

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 100.3.3.3/221/HK/410.020.3/2024
TENTANG
ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

Menimbang : a. bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mampu memberikan pelayanan berkualitas untuk memajukan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, serta aplikasi dan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang akan menghasilkan layanan terintegrasi, diperlukan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang digunakan sebagai pedoman oleh Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, arsitektur dan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik ditetapkan oleh Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di

Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 41);
6. Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini dengan rincian berikut:

- a. Arsitek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
- b. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

2

- KEDUA : Arsitek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan muatan berikut:
- integrasi proses bisnis;
 - data dan informasi;
 - infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 - keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- KETIGA : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah merupakan dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan serta pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah, yang mencakup :
- tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - audit teknologi informasi dan komunikasi.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 28 Agustus 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR : 100.3.3.3/221/HK/410.020.3/2024
TENTANG
ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 memuat definisi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dengan pelaksanaan SPBE, maka diharapkan akan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen SPBE secara nasional juga merupakan suatu kebutuhan mutlak untuk menjaga keterpaduan dan efisiensi di dalam pelaksanaan SPBE.

Teknologi informasi sangat berpengaruh di era industri 4.0, karena di era industri 4.0 mengandalkan teknologi informasi dalam segala bidang, dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan lain-lain. Keutamaan teknologi informasi adalah sangat memudahkan manusia dalam memproduksi, mengolah data dan menyebarkan informasi. Hal ini telah memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan SPBE atau *E-Government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Implementasi SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Maksud

Penyusunan Arsitektur SPBE 2022-2025 ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Blitar sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE serta Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dokumen Arsitektur SPBE Kota Blitar meliputi:

1. Arsitektur Proses Bisnis
2. Arsitektur Layanan SPBE

3. Arsitektur Data dan Informasi
4. Arsitektur Aplikasi
5. Arsitektur Infrastruktur SPBE
6. Arsitektur Keamanan SPBE

1.2.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Arsitektur SPBE tahun 2022-2025 Kota Blitar adalah:

- 1 Tersedianya dokumen panduan dalam penerapan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Blitar.
- 2 Memastikan langkah-langkah penerapan SPBE di Kota Blitar dapat sejalan dengan kebijakan Arsitektur SPBE Nasional.
- 3 Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
- 4 Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;

1.2.3 Sasaran

Sedangkan sasaran dari kegiatan pembuatan arsitektur SPBE ini adalah sebagai berikut:

- 1 Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien
- 2 Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna
- 3 Tersusunnya dokumen Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Blitar.
- 4 Teridentifikasinya kondisi eksisting terkait SPBE di Kota Blitar dan merumuskan kebutuhannya.

1.2.4 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Arsitektur SPBE Kota Blitar tahun 2022-2025 adalah sebagai berikut:

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
2. Panduan Penyusunan Arsitektur Pengembangan e-Government Lembaga (Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003).
3. Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik (Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 56/KEP/M.KOMINFO/12/2003).
4. Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Sistem informasi eGovernment (Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Tahun 2004).
5. Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 41 Tahun 2007).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
13. Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007).
14. Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
18. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan nomor 21 tahun 2011.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019.
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031.

1.3 Pendekatan dan Ruang Lingkup

Berikut adalah pendekatan yang digunakan dan ruang lingkup dokumen Arsitektur SPBE Kota Blitar 2022-2025.

1.3.1 Pendekatan

1. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan hasil analisis kebijakan dan data yang diperoleh dari berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
2. Pendekatan Kelembagaan/Organisasi digunakan untuk melakukan analisis terhadap struktur organisasi Pemerintah Kota Blitar serta rencana pengembangannya.
3. Pendekatan Perencanaan dilakukan untuk menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana, berbagai aspek ketersediaan sumber daya manusia serta ketersediaan biaya dalam kaitan pengembangan SPBE di Kota Blitar.
4. Pendekatan Teknis digunakan untuk analisis proses bisnis, data dan informasi, layanan, aplikasi, infrastruktur dan keamanan Kota Blitar.
5. Pendekatan Komprehensif dan Integratif digunakan untuk mempertimbangkan segala aspek yang terkait secara terpadu terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengembangan serta pengendalian pembangunan SPBE di Kota Blitar.
6. Pendampingan penyusunan Arsitektur SPBE kepada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

1.3.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Blitar ini mencakup beberapa hal sebagai berikut.

- a. Menjelaskan Arsitektur SPBE yang mencakup 6 domain arsitektur dalam menunjang pelaksanaan SPBE Kota Blitar.
- b. Menyusun domain beserta referensi Arsitektur SPBE yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Blitar dan Arsitektur SPBE Nasional.

1.3.3 Kerangka Kerja

Kerangka kerja penyusunan Arsitektur SPBE terdiri dari penyiapan perangkat yang diperlukan untuk pengumpulan data. Perangkat yang dipersiapkan berupa file excel sesuai template ABACUS. Template file excel terdiri dari:

- 1 Sheet Arsitektur Proses Bisnis

Sheet ini diperlukan untuk mengetahui proses bisnis yang ada di masing-masing Perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

- 2 Sheet Arsitektur Layanan

Sheet ini diperlukan untuk mengetahui jenis layanan SPBE yang terdapat di masing-masing Perangkat Daerah.

- 3 Sheet Arsitektur Data dan Informasi

Sheet ini dipergunakan untuk mengetahui data dan informasi yang dipergunakan dalam melaksanakan layanan dan proses bisnis di masing-masing Perangkat Daerah.

- 4 Sheet Arsitektur Aplikasi

Sheet ini diperlukan untuk mengetahui aplikasi apa saja yang sudah implementasikan di masing-masing Perangkat Daerah.

- 5 Sheet Arsitektur Infrastruktur

Sheet ini diperlukan untuk mengetahui infrastruktur yang dimiliki masing-masing Perangkat Daerah. Sheet arsitektur infrastruktur terdiri dari beberapa sheet yaitu:

- a) Sheet komputasi awan
- b) Sheet perangkat keras jaringan
- c) Sheet perangkat keras keamanan
- d) Sheet perangkat keras media penyimpan
- e) Sheet perangkat keras peripheral
- f) Sheet perangkat keras server
- g) Sheet perangkat lunak platform

6. Sheet Arsitektur Keamanan

Sheet ini dipergunakan untuk mengetahui berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah yang berkaitan dengan keamanan SPBE. Sheet ini terdiri dari beberapa sheet yaitu:

- a) Sheet audit keamanan SPBE
- b) Sheet Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE
- c) Sheet Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE
- d) Sheet Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum dan Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional
- e) Sheet Penanganan Insiden Keamanan SPBE
- f) Sheet Peningkatan Keamanan SPBE
- g) Sheet Standar Teknis dan prosedur Keamanan SPBE, Standar Keamanan Internasional dan Regulasi Lainnya

1.3.4 Kegiatan FGD

Kegiatan FGD diperlukan dalam pelaksanaan dalam pembuatan dokumen Arsitektur SPBE Kota Blitar dengan tujuan untuk membahas isu strategis, kondisi terkini dan menginventarisir seluruh domain arsitektur SPBE yang dimiliki Kota Blitar saat ini. Luaran yang diharapkan dalam kegiatan FGD ini adalah dokumen pendukung dan data isian terkait 6 domain arsitektur SPBE yang dimiliki oleh OPD – OPD di Kota Blitar.

Kegiatan FGD ini akan dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan agenda diskusi:

1. FGD 1: Overview Peta Rencana dan Arsitektur SPBE
2. FGD 2: Pembahasan Domain Arsitektur SPBE terkait Domain Arsitektur Proses Bisnis, Domain Data dan Informasi serta Domain Layanan dan Peta Rencana SPBE
3. FGD 3: Pembahasan Domain Arsitektur SPBE terkait Domain Infrastruktur, Domain Aplikasi dan Domain Keamanan serta Peta Rencana SPBE

Bab 2. Gambaran Umum

1.4 Isu Strategis

1.4.1 Permasalahan Pembangunan Kota Blitar

Permasalahan pembangunan Kota Blitar dikelompokkan menjadi beberapa masalah pokok sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Blitar: TPT Kota Blitar Tahun 2019 sebesar 4,64% masih berada di atas Jawa timur yang sebesar 3,92%. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah pengangguran tahun 2019 di Kota Blitar bertambah 482 orang yakni dari 3.202 pengangguran tahun 2018 menjadi 3.684 pengangguran pada tahun 2019. Ini menyebabkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga meningkat sebesar 0,58 poin menjadi 4,64% pada Agustus 2019. Dari jumlah pengangguran tersebut paling banyak yang memiliki pendidikan SMA yakni sebesar 1,55%. Sementara berdasarkan data di tahun 2020, TPT juga mengalami kenaikan sebesar 2,14 persen. Dari semula 4,64% menjadi 6,68%.
2. Angka Kemiskinan masih relatif tinggi: jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 mencapai 10.100 jiwa atau 7,13% dari total penduduk. Jumlah penduduk miskin di Kota Blitar pada tahun 2020 mencapai 7,78 persen dari total penduduk, bertambah sebanyak 1.000 jiwa atau naik sebesar 0,65 persen dari tahun 2019.
3. Belum optimalnya peningkatan perekonomian masyarakat: masih rendahnya jumlah koperasi aktif yang sehat untuk menunjang perekonomian kota, masih rendahnya jumlah koperasi dengan permodalan mandiri, dan masih sangat rendahnya pertumbuhan usaha mikro yang dibina
4. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur: masih ditemukan beberapa permasalahan terkait penyediaan dan pelayanan infrastruktur, antara lain penurunan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik yakni dari 96,03% pada tahun 2018 turun menjadi 94,53% di tahun berikutnya, belum optimalnya jumlah sampah terolah di TPA yaitu mencapai 79,16% pada tahun 2019 dan menurun pada tahun 2020 menjadi 76,16%, belum optimalnya pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat yang sebesar 73,60%, cenderung meningkatnya persentase kawasan permukiman rawan kumuh yang pada tahun 2019 mencapai 0,75% dan di tahun 2020 capaiannya 0,44%.
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik: Masih ditemukan beberapa kinerja yang perlu ditingkatkan, antara lain perangkat daerah di lingkungan Pemda Kota Blitar yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi baru mencapai 60% pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 72,41% di tahun 2020, masih rendahnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-procurement yakni turun dari 86 persen ke 42 persen pada Tahun 2019 kemudian meningkat menjadi 63% persen di tahun 2020.

1.4.2 Isu Internasional

Sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs), Kota Blitar memiliki keinginan kuat untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaan SDGs tersebut. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 terkait tujuan pembangunan berkelanjutan dimana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah memiliki unsur

sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Rencana aksi (RENAKSI) SDGs Daerah merupakan prioritas daerah dalam melaksanakan SDGs sesuai dengan kebutuhan dan keadaan daerah kemudian harus menjadi rencana kerja pemerintah setiap tahun. Prioritas tersebut dapat dibagi ke dalam dua rencana besar, yaitu bagaimana fokus dan sasaran khusus SDGs di daerah; dan bagaimana SDGs diurus utamakan ke dalam seluruh kebijakan dan program pemerintah daerah.

1.4.3 Isu Kebijakan Pemimpin Daerah

Arah pembangunan secara umum direpresentasikan dalam rumusan visi dan misi Kepala Daerah. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih periode 2021-2026, yaitu:

Tabel 0-1 Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih periode 2021-2026

Visi	Misi
Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun, Toyyibatun, Warobbun Ghofur	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya
	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang Memiliki Mutu dan Nilai Kompetensi Tinggi dengan Mengoptimalkan Potensi Generasi Muda Kabupaten Blitar
	Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas
	Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan

1.4.4 Isu Strategis RPJMD 2021– 2026 Kota Blitar

Terdapat 13 isu strategis di Kota Blitar yang akan menjadi perhatian dalam analisis tujuan pembangunan berkelanjutan seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 0-2 Isu Strategis Kota Blitar Berdasarkan Analisis dalam KLHS

Pilar	Tema Besar Isu	Isu Strategis
Ekonomi	Tekanan Perkembangan Kota	Sistem perpajakan perlu perbaikan
		Perlu penataan PKL
		Dampak Negatif perkembangan kota
		- Menurunnya kualitas udara (kendaraan bermotor)
		- Menurunnya kualitas air (limbah rumah tangga)

Pilar	Tema Besar Isu	Isu Strategis
Lingkungan		- Konversi lahan hijau untuk permukiman - Build up are semakin padat, reapan makin mengecil, beban drainase semakin berat, genangan kota (musim penghujan) - Sistem transportasi dan perpajakan semakin rumit
	Kondisi Infrastruktur Kota	kondisi Infrastruktur perlu ditingkatkan
	Pengembangan ekonomi Lokal	Pengembangan ekonomi belum maksimal
	Penurunan angka pengangguran	Penurunan angka pengangguran belum maksimal
	Kondisi Lingkungan Hidup	Pencemaran Lingkungan masih tinggi Perubahan Iklim semakin mengkhawatirkan: - kualitas iklim semakin menurun - Ancaman penurunan supply air tanah
		Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
		Penurunan kuantitas sumberdaya air
		Ruang Terbuka Hijau Terbatas
		Belum tertatanya kawasan permukiman
		Pemanfaatan Energi terbarukan belum optimal
Sosial		Daya dukung lingkungan menurun
	Bencana (Alam dan Non-Alam)	Ancaman Bencana semakin tinggi baik alam maupun non alam
	Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah Belum Optimal
	Alih Fungsi Lahan	Alih Fungsi Lahan Pertanian
	Kemiskinan	Angka Kemiskinan terancam naik
	Menurunnya nilai sosial dan kebangsaan masyarakat	Menurunnya nilai sosial dan kebangsaan
	Ketahanan Pangan	Perlunya Peningkatan Ketahanan Pangan karena kewaspadaan terhadap konversi lahan pertanian yang semakin tinggi dan rusaknya daerah tangkapan air

Pilar	Tema Besar Isu	Isu Strategis
	Tingkat Kesehatan Masyarakat	Kesadaran hidup sehat masyarakat masih rendah Menurunnya tingkat kesehatan masyarakat
	Tingkat Pendidikan	Perlunya Peningkatan Kualitas, Akses dan mutu Pendidikan yang Adil dan Merata
Tata Kelola	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi Belum Optimal

Berdasarkan RPJMD Kota Blitar tahun 2021 – 2026, telah ditetapkan beberapa isu – isu strategis yaitu:

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2. Peningkatan kualitas layanan Kesehatan dan SDM yang berdaya saing
3. Pemantapan Kota Blitar sebagai kota tujuan wisata sejarah yang berwawasan kebangsaan, kebudayaan dan lingkungan hidup
4. Peningkatan nilai-nilai religius dan sosial dalam kerangka lingkungan yang kondusif, dinamis, dan demokratis
5. Peningkatan Kota Blitar sebagai kota layanan perdagangan dan jasa
6. Peningkatan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang dan berkelanjutan
7. Pemantapan penerapan good governance dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi

1.5 Visi Misi Kota Blitar

1.5.1 Visi Kota Blitar

Berdasarkan pada arah pembangunan daerah Kota Blitar sebagaimana termuat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar 2005-2025 dan berbagai capaian pembangunan periode 2016-2021 yang mampu menunjukkan hasil signifikan, potensi yang ada di daerah, dan isu-isu strategis, serta tantangan Kota Blitar dalam kurun waktu lima tahun ke depan, dan visi, misi, program Walikota dan Wakil Walikota terpilih (2021-2026), maka diperlukan kesinambungan pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis menuju Kota Blitar lebih baik, dan lebih sejahtera.

Rumusan visi merupakan kondisi yang akan diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Visi daerah merupakan landasan utama dalam merumuskan berbagai kondisi yang lebih mikro pada level misi, tujuan, dan sasaran. Visi RPJMD Kota Blitar 2021-2026 didasarkan pada beberapa nilai luhur yaitu nilai – nilai religius, kebudayaan, kebangsaan, dan kearifan lokal.

Pada masa perjuangan kemerdekaan, Kota Blitar juga menjadi saksi patriotisme Shoedanco Soeprijadi beserta PETA Blitar melawan kekejaman tentara Jepang. Sebuah peristiwa yang kemudian menyulut perjuangan merebut kemerdekaan di daerah-daerah lain dan meneguhkan Kota Blitar sebagai kota Patria atau Kota Pembela Tanah Air.

Predikat sebagai kota Patria semakin menguat dengan kisah Bung Karno yang tidak dapat dipisahkan dari Kota Blitar. Di kota inilah Bung Karno tinggal dan dibesarkan, hingga menjadi bumi tempat peristirahatan terakhir putra Sang Fajar. Berbagai memorabilia presiden pertama tersebut, tersusun rapi dan lengkap di Perpustakaan Bung Karno dan Istana Gebang. Peringatan hari lahir Pancasila dan Bulan Bung Karno pun dirayakan dengan meriah dan penuh khidmat. Menjadikan Kota Blitar layak mendapat julukan sebagai "Bumi Bung Karno" dan "Kota Proklamator". Selain dikenal dengan patriotisme dan peninggalan sejarah yang menjadi daya tarik wisata, Kota Blitar juga memiliki banyak potensi ekonomi termasuk perikanan, industri makanan, industri kerajinan dan lain sebagainya.

Berbagai potensi tersebut menjadi modal besar yang dimiliki Kota Blitar untuk tumbuh menjadi kota unggul dan KEREN di Jawa Timur. Ditambah dengan semangat patriotisme yang mendarah daging sejak Aryo Blitar, Shoedanco Soeprijadi hingga Bung Karno, yang berpadu dengan nilai-nilai religius memperkuat Blitar sebagai kota yang aman dan nyaman dalam keberagaman. Komitmen pemerintah daerah untuk terus membangun dengan semangat gotong-royong tetap dikedepankan. Oleh karena itu, Visi RPJMD Kota Blitar 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut: "**Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermartabat**"

Penjelasan kalimat visi tersebut yaitu:

KOTA BLITAR KEREN: Terwujudnya Kota Blitar yang dalam realitas Keberagaman tetap dalam kondisi RELigius dan Nasionalis, rukun, aman dan kondusif, masyarakatnya sejahtera jasmani dan rohani.

UNGGUL: Terwujudnya Sumber Daya Manusia Kota Blitar yang berkualitas, berbudi pekerti luhur, religius, sehat, dijiwai nilai-nilai Pancasila sehingga terbentuk manusia paripurna yang dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

MAKMUR: Suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi, infrastruktur dan sosial masyarakat sehingga Kota Blitar menjadi Kota yang sejahtera, berwawasan lingkungan hidup dan nyaman untuk ditinggali.

BERMARTABAT: Terwujudnya perikehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, norma dan budaya yang berlaku, serta terbukanya ruang masyarakat untuk mengoptimalkan segenap daya cipta dan kreativitas didukung tata pemerintahan yang bersih, transparan, berjiwa melayani dan profesional.

Berdasarkan rumusan di atas, maka terdapat empat poin visi yaitu Keren, Unggul, Makmur, dan Bermartabat. Keempat poin visi ini bersifat luas yang mencakup berbagai isu besar yaitu peningkatan kualitas tata kehidupan, kualitas dan daya saing sumber daya manusia, penguatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat ditopang oleh penguatan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan.

1.5.2 Misi Kota Blitar

Berdasarkan visi "**Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN: Unggul, Makmur, Bermartabat**", terdapat lima misi yang akan dilaksanakan, yaitu:

MISI 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat religius yang mengedepankan nilai toleransi dan berwawasan kebangsaan. Spirit perjuangan Bung Karno, Supriyadi dan Aryo Blitar merupakan potensi besar sekaligus modal untuk terus menggelorakan semangat patriotisme dan

nasionalisme masyarakat Kota Blitar. Berkepribadian dalam kebudayaan diambil dari diktum Tri Sakti Bung Karno dengan harapan masyarakat Kota Blitar memiliki kecintaan terhadap budaya asli Indonesia dan mempraktekkan nilai-nilai kearifan lokal. Misi ini juga mengarahkan Kota Blitar sebagai kota tangguh bencana sekaligus kota yang menempatkan posisi perempuan setara, sejajar, saling melengkapi dan bermitra dengan laki-laki. Dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), Misi 1 memuat Pilar Pembangunan Sosial dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

MISI 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter

Misi ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan Misi 2 memuat Pilar Pembangunan Sosial. Keren yang dimaksud di dalam misi ini merupakan kependekan dari Keberagaman, Religius, dan Nasionalis. Arah pembangunan sumber daya manusia ditujukan pada pembangunan manusia paripurna pada lima dimensi: pendidikan, kesehatan, religiusitas, penguatan nasionalisme, dan peningkatan daya saing. Manusia yang dihasilkan tidak hanya memiliki kemampuan intelektual yang unggul, tetapi juga sehat, religius, kreatif, dan memiliki jiwa nasionalisme. Sementara upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diwujudkan melalui perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan kesehatan dengan dipadu dukungan kesadaran masyarakat.

MISI 3: Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital

Misi ini diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang berorientasi pada kemandirian ekonomi daerah. Peningkatan pembangunan ekonomi daerah dilakukan dengan menggerakkan seluruh sektor, potensi, dan sumber daya. Orientasi ekonomi daerah diarahkan pada pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital, optimalisasi perdagangan dan perindustrian, penguatan sektor pariwisata baik pariwisata sejarah kebangsaan, kampung tematik, maupun model pariwisata lain. Peningkatan kemandirian ekonomi juga ditempuh melalui upaya optimalisasi ketahanan pangan dan pertanian termasuk pengembangan *urban farming*, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, serta memberikan berbagai kemudahan dalam penanaman modal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Misi 3 secara keseluruhan memuat Pilar Pembangunan Ekonomi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

MISI 4: Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

Misi ini diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan tetap menjaga keserasian dengan tata ruang secara berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur baik bina marga, cipta karya, maupun sumber daya air diarahkan tidak semata-mata mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan, tetapi harus tetap menjaga kelestarian lingkungan. Misi ini diarahkan pada upaya menjaga kualitas dan kelestarian lingkungan hidup baik air, udara, tanah dan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, Misi 4 dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan memuat Pilar Pembangunan Ekonomi dan Pilar Pembangunan Lingkungan.

MISI 5: Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Misi ini diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang baik, bersih, profesional dengan pelayanan publik memenuhi harapan pengguna layanan. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan termuat dalam misi ini. Tata kelola pemerintahan mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan evaluasi kinerja diarahkan pada tata kelola yang akuntabel, transparan, partisipatif, berjiwa melayani, berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, serta adaptif terhadap perubahan.

1.5.3 Tujuan dan Sasaran

Misi 1 berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan tata kehidupan yang religius, nasionalis, setara gender, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Secara khusus misi ini fokus pada upaya menciptakan menata kehidupan sosial masyarakat. Misi ini diturunkan ke dalam dua tujuan dan empat sasaran, yaitu:

- Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis
 - Meningkatnya kerukunan antar umat beragama;
 - Meningkatnya ketertiban umum;
 - Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Kelestarian Cagar Budaya.
- Meningkatnya Kesenjangan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak
 - Menurunnya kesenjangan gender.

Misi 2 fokus pada upaya meningkatkan sumber daya manusia yang keren, berdaya saing, sehat jasmani-rohani, cerdas dan berakhlak. Secara spesifik misi menyasar perbaikan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Misi ini diperinci ke dalam satu tujuan dan lima sasaran, yaitu:

- Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
 - Meningkatnya kualitas layanan pendidikan;
 - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - Meningkatnya prestasi olahraga dan kontribusi pemuda dalam pembangunan daerah;
 - Meningkatnya pengendalian penduduk;
 - Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat.

Misi 3, kondisi yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan yaitu berdaya saing secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis digital menjadi spirit pembangunan ekonomi pada misi tiga. Misi ini diturunkan ke dalam dua tujuan dan sembilan sasaran, yaitu:

- Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
 - Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin;
 - Meningkatnya ketahanan pangan daerah;

- Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat;
- **Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi**
 - Meningkatnya nilai investasi daerah;
 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian;
 - Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah;
 - Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan.

Misi 4 fokus pada upaya meningkatkan infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan hidup dan berkeadilan. Kata kunci yang diusung pada misi ini berupa wawasan lingkungan hidup dan berkeadilan sebagai spirit peningkatan kualitas infrastruktur. Misi ini kemudian diturunkan ke dalam tiga tujuan dan delapan sasaran, yaitu:

- **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah**
 - Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum;
 - Meningkatnya kualitas perhubungan.
- **Meningkatnya Kelayakhunian**
 - Meningkatnya akses rumah layak huni;
 - Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman;
 - Meningkatnya kualitas penataan ruang.
- **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**
 - Meningkatnya kualitas air;
 - Meningkatnya kualitas udara;
 - Meningkatnya kualitas lahan;
 - Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3;
 - Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana.

Misi 5 berkaitan dengan upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi. Perbaikan tata kelola pemerintahan mulai akan diarahkan pada penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Misi ini akan dijabarkan ke dalam satu tujuan dan enam sasaran, yaitu:

- **Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi berbasis Teknologi Informasi**
 - Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah;
 - Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah;
 - Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
 - Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - Meningkatnya Profesionalitas ASN;
 - Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah.

Tabel 0-3 Visi Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2021-2026

No	Misi		Tujuan	Indikator Tujuan		Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir
								2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan	1.1	Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis	1.1.1	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Angka	86,31	83,25	83,5	83,75	84	84,25	84,25
		1.2	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	1.2.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	97,6	97,6	97,7	97,8	97,9	98	98
2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter	2.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Daya Saing SDM	2.1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	78, 57	78,58	78,59	78,60	78,61	78,62	78,62
3	Berdikari secara ekonomi yang	3.1	Meningkatnya tingkat	3.1.1	Angka Kemiskinan	Persen	7,78	7,26	7,21	7,16	7,11	7,06	7,06
				3.1.2	Indeks Gini	Angka	0,344	0,345	0,344	0,343	0,342	0,341	0,341

No	Misi		Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian					Kondisi Akhir	
							2022	2023	2024	2025	2026		
	berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital		kesejahteraan masyarakat	3.1.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6,68	5,90	5,55	5,22	4,90	4,61	4,61
		3.2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	3.2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-2,28	3,50 - 3,75	4,00	4,50	5,00	5,50	5,50
4	Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan	4.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	4.1.1	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	58,07	58,27	58,37	58,47	58,57	58,67	58,67
		4.2	Meningkatnya kelayakhunian	4.2.1	Rasio permukiman layak huni	Rasio	0,93	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99	0,99
		4.3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	4.3.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	66,52	68,86	70,03	71,20	72,37	73,54	73,54
5	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	5.1	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	5.1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	67,17 (B)	67,67 (B)	68,17 (B)	68,67 (BB)	69,17 (BB)	69,67 (BB)	69,67 (BB)

1.6 Analisis Kesenjangan Antara Kondisi Eksisting dan Kondisi Ideal

Kota Blitar mempunyai kemajuan yang cukup signifikan dalam hal penerapan SPBE. Hal ini terlihat dari hasil evaluasi SPBE tahun 2018 sampai 2020, namun terjadi dinamika di tahun 2021 dan 2022. Berikut ini adalah perbandingan nilai Evaluasi SPBE tahun 2022 untuk mencapai target di 2023.

Tabel 0-4 Tabel Analisis Gap per Indikator

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
Domain 1 - Kebijakan SPBE				
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE				
1	Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah	2	4	Kebijakan Internal Arsitektur SPBE perlu ditingkatkan. Untuk evaluasi SPBE berikutnya, persiapkan dokumen sbb. : notulensi/catatan/laporan hasil rekomendasi tindak lanjut kebijakan internal Arsitektur SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan kebijakan internal Arsitektur SPBE, dokumentasi aktivitas-aktivitas penyempurnaan kebijakan internal Arsitektur SPBE; Dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sebelumnya dan yang memuat pengaturan/norma Arsitektur SPBE yang telah disempurnakan.
2	Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	4	Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE perlu ditingkatkan. Untuk Evaluasi SPBE berikutnya persiapkan dokumen sbb.: notulensi/catatan/laporan hasil rekomendasi tindak lanjut kebijakan internal Peta Rencana SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan kebijakan internal Peta Rencana SPBE, dokumentasi aktivitas-aktivitas penyempurnaan kebijakan internal Peta Rencana SPBE; Dokumen kebijakan Instansi Pemerintah Daerah yang sebelumnya dan yang memuat pengaturan/norma Peta Rencana SPBE yang telah disempurnakan.
3	Kebijakan Internal Manajemen Data	3	4	Kebijakan Internal Manajemen Data saat ini nilainya masih belum bisa 5 karena kebijakan saat ini adalah kebijakan baru yang belum pernah direvisi. Untuk ke depannya, kebijakan ini bisa mencapai 3 jika tersedia dokumen

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				sbb: notulensi / catatan / laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut kebijakan internal Manajemen Data SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan kebijakan internal Manajemen Data SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyempurnaan kebijakan internal Manajemen Data SPBE; Dokumen kebijakan Pemerintah Daerah yang sebelumnya dan yang memuat pengaturan/norma Manajemen Data SPBE yang telah disempurnakan.
4	Kebijakan Pembangunan Internal Aplikasi SPBE	1	4	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE adalah kebijakan baru yang di instrument SPBE yang lama tidak ada. Saat ini kebijakan ini masih belum dapat mencapai skor 5 karena ini adalah kebijakan baru yang belum pernah dievaluasi / direvisi. Untuk ke depannya, kebijakan ini dapat mencapai level 5 jika tersedia dokumen sbb. : notulensi/catatan/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyempurnaan kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE; Dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sebelumnya dan berisi pengaturan/norma Pembangunan Aplikasi SPBE yang telah disempurnakan
5	Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3	4	Kebijakan internal Layanan Pusat Data sudah bagus, pertahankan. Untuk evaluasi SPBE berikutnya, mohon disiapkan bukti dokumen sbb.: notulensi/catatan/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut kebijakan internal Layanan Pusat Data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan kebijakan internal Layanan Pusat Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyempurnaan kebijakan internal Layanan Pusat Data; Dokumen kebijakan Pemerintah Daerah yang sebelumnya dan yang memuat pengaturan/norma Layanan Pusat Data yang telah disempurnakan.

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
6	Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	4	Perwali SPBE yang saat ini berlaku masih belum mengatur interkoneksi Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Oleh karena itu Level 4 masih belum bisa terpenuhi. Untuk perbaikan ke depan, kebijakan ini perlu direvisi dengan memasukkan pasal yang mengatur interkoneksi Layanan Jaringan Intra Pemkot Blitar dengan pemerintah daerah lain (horizontal) atau instansi pusat lainnya (vertical). Bukti dokumen yang perlu disiapkan antara lain: konteks pengaturan/norma arah kebijakan interkoneksi pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya tertuang dalam Perwali atau Peraturan Daerah. Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi kebijakan internal Jaringan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah, bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan internal Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
7	Kebijakan Internal penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	4	Saat ini Pemkot Blitar masih belum mempunyai kebijakan terkait penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan itu, perlu dibentuk tim khusus untuk menyusun tim khusus untuk menyusun kebijakan ini.
8	Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	2	4	Saat ini Pemkot Blitar masih belum mempunyai kebijakan terkait Manajemen Keamanan Informasi. Sehubungan dengan itu, perlu dibentuk tim khusus untuk menyusun tim khusus untuk menyusun kebijakan ini.
9	Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	4	Perwali SPBE Nomor 49 Tahun 2020 masih belum mengatur tentang kebijakan internal terkait Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE). Untuk perbaikan ke depan, sebaiknya segera dibuat Perwali yang mengatur kebijakan internal Audit TIK dan

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				pengaturan/norma penerapan Audit TIK bagi seluruh OPD di Pemkot Blitar yang tertuang dalam dokumen kebijakan Perwali atau Peraturan Daerah.
10	Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	4	Perwali SPBE Nomor 49 Tahun 2020 telah memuat secara lengkap pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Pemkot Blitar yang mendukung penerapan SPBE pada seluruh OPD. Di Perwali tersebut dijelaskan bahwa Tim Koordinasi SPBE mengkoordinir pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPBE. Di beberapa dokumen pendukung yang lain juga disebutkan bahwa Tim Koordinasi SPBE ini juga sudah direviu dan dievaluasi. Untuk perbaikan ke depan, kebijakan ini perlu direvisi dengan menambahkan pasal yang mengatur arah koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE antar Instansi Pusat atau antar Pemerintah Daerah. Selain itu perlu menyiapkan bukti dokumen sbb.: notulensi/catatan/ laporan hasil evaluasi kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Pemkot Blitar, bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE.
Domain 2 - Tata Kelola SPBE				
Aspek 2 - Perencanaan Strategis SPBE				
11	Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	3	Bukti dokumen yang diajukan sudah menunjukkan bahwa Arsitektur SPBE Kota Blitar sudah memiliki arsitektur Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE (level 3). Sudah ada evaluasi yang sudah dilakukan, tetapi dokumen yang ada menunjukkan bahwa evaluasi baru dilakukan sekali sehingga konsistensinya masih belum terlihat. Untuk menuju ke level 4, dokumen yang perlu dipersiapkan adalah sbb.: - Dokumen Arsitektur SPBE / Rencana Induk TI / Masterplan TIK / Cetak Biru / Master Plan Smart City yang menggambarkan seluruh Referensi

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE dan telah sesuai dengan standar Arsitektur SPBE Nasional; - notulensi/catatan/laporan hasil revidu Arsitektur SPBE, bukti undangan rapat revidu dan evaluasi Arsitektur SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas revidu dan evaluasi Arsitektur SPBE.
12	Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	3	Peta Rencana SPBE Kota Blitar sudah memuat secara lengkap peta rencana Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK (level 3). Sudah ada evaluasi yang sudah dilakukan, tetapi dokumen yang ada menunjukkan bahwa evaluasi baru dilakukan sekali (tahun 2019) sehingga konsistensinya masih belum terlihat. Untuk menuju ke level 4, dokumen yang harus disediakan adalah sbb.: - notulensi/catatan/laporan hasil revidu Peta Rencana SPBE, bukti undangan rapat revidu dan evaluasi Peta Rencana SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas revidu dan evaluasi Peta Rencana SPBE
13	Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	1	3	Bukti dokumen yang diajukan sudah menunjukkan bahwa seluruh Rencana dan Anggaran SPBE unit kerja/perangkat daerah telah dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK dalam hal ini Dinas Kominfo Kota Blitar. Rencana dan Anggaran SPBE masih belum direvidu dan dievaluasi secara periodik. Untuk menuju level 4, dokumen yang harus disediakan adalah: - dokumen Rencana dan Anggaran SPBE terpadu dan dokumen RKA/KL atau DPA-SKPD; - Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil revidu/evaluasi Rencana dan Anggaran SPBE, bukti undangan rapat revidu dan evaluasi Rencana dan Anggaran SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas revidu dan evaluasi Rencana dan Anggaran SPBE.

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
14	Inovasi Proses Bisnis SPBE	2	4	Proses Bisnis Pemerintah Daerah telah memenuhi standar dan Proses Bisnis Pemerintah Daerah telah dilakukan perbaikan sebagai bentuk inovasi Proses Bisnis untuk mewujudkan proses bisnis yang lebih efisien (Level 3). Dokumen pendukung yang tersedia masih belum menunjukkan bahwa dokumen proses bisnis sudah direviu dan dievaluasi secara periodic. Untuk menuju level 4, dokumen yang harus disiapkan adalah sbb.: - Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan dokumentasi penerapan Inovasi Proses Bisnis melalui sistem elektronik; - Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi Inovasi Proses Bisnis, bukti undangan rapat reviu dan evaluasi Inovasi Proses Bisnis, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu dan evaluasi Inovasi Proses Bisnis.
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi				
15	Pembangunan Aplikasi SPBE	1	3	Bukti dokumen yang diajukan sudah menunjukkan bahwa proses pembangunan Aplikasi SPBE telah dilakukan sesuai siklus pembangunan aplikasi (Level 2). Dokumen pendukung yang tersedia masih belum menunjukkan bahwa proses pembangunan aplikasi SPBE telah dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK. Untuk menuju ke level 3, dokumen yang harus disediakan adalah: - Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus pembangunan aplikasi dan didokumentasikan secara formal; - Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE antara unit pengusul di Intansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Unit pengelola TIK (Dinas Kominfo).

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
16	Layanan Pusat Data	2	4	Bukti dokumen yang diajukan sudah menunjukkan bahwa Layanan Pusat Data telah digunakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemkot Blitar. Selain itu, terdapat prosedur pengoperasian baku Layanan Pusat Data. Untuk menuju ke level 4, dokumen yang harus disiapkan adalah: - Dokumentasi pemanfaatan Layanan Pusat Data, SOP penggunaan pusat data, dokumentasi integrasi dengan pusat data Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain dan/atau Pusat Data Nasional; - Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi Layanan Pusat Data, bukti undangan rapat evaluasi Layanan Pusat Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Layanan Pusat Data.
17	Layanan jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	4	Bukti dokumen yang diajukan hanya topologi Jaringan Intranet DISKOMINFO, bukan topologi jaringan intranet di seluruh Pemkot Blitar yang menghubungkan semua OPD (Level 2). Untuk menuju ke Level 3, dokumen/program yang harus disiapkan adalah: - Layanan Jaringan Intra Pemkot Blitar telah diterapkan diseluruh OPD - Terdapat notulensi/catatan/laporan pengoperasian Jaringan Intra Pemkot Blitar di seluruh OPD dan didokumentasikan secara formal.
18	Penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	4	Sistem penghubung layanan di Pemkot Blitar telah diterapkan di seluruh OPD. Untuk menuju ke Level 4, program dan dokumen yang harus disiapkan: - Sistem Penghubung Layanan Pemkot Blitar telah terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. - Tautan Sistem Penghubung Layanan, tangkapan layar aplikasi layanan integrasi data yang telah terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya - Standard Operating Procedure (SOP) integrasi data atau layanan SPBE dengan menggunakan Sistem Penghubung Layanan; - Notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi Sistem Penghubung Layanan Pemkot Blitar - Bukti undangan rapat evaluasi Sistem Penghubung Layanan Pemkot Blitar - dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Sistem Penghubung Layanan Pemkot Blitar
Aspek 4 - Penyelenggara SPBE				
19	Pelaksanaan tim koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	4	Pemkot Blitar sudah memiliki Tim Koordinasi SPBE yang ditetapkan dan mencakup tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah namun belum ada bukti dokumen yang menunjukkan bahwa Tim Koordinasi sudah melaksanakan semua rencana seperti yang tertulis di Road Map. Untuk menuju Level 3, yang harus dipersiapkan adalah: - Tim Koordinasi SPBE Pemkot Blitar telah melaksanakan keseluruhan tugas/program kerja namun belum dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada seluruh OPD. - Notulensi/catatan/laporan, bukti undangan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas rapat koordinasi tugas/program kerja dengan seluruh OPD - rapat reviu atau evaluasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE.
20	Kolaborasi penerapan SPBE	3	4	Bukti dokumen yang ada tidak berhubungan dengan kolaborasi antar unit. Untuk menuju Level 2, yang harus dipersiapkan adalah: - Pemkot Blitar sudah melakukan kolaborasi penerapan SPBE antar unit kerja dan telah menyusun perencanaan, namun belum ditetapkan secara formal.

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				Untuk menuju ke Level 3, yang harus dilakukan adalah: - Pemkot Blitar menetapkan/membentuk Forum Kolaborasi Penerapan SPBE secara formal, serta sudah melakukan pertemuan secara rutin - Forum Kolaborasi SPBE merupakan wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat. Forum Kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual - Bukti dokumen dalam bentuk: dokumentasi aktivitas-aktivitas penetapan dan/atau kegiatan Forum Kolaborasi Penerapan SPBE, notulensi/catatan/laporan kegiatan rutin Forum Kolaborasi Penerapan SPBE, dan/atau bukti undangan kegiatan Forum Kolaborasi Penerapan SPBE.
Domain 3 - Manajemen SPBE				
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE				
21	Penerapan Manajemen Risiko SPBE	3	3	Pemkot Blitar masih belum menerapkan manajemen risiko (Level=1). Manajemen Risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. Untuk menuju Level 2: Manajemen Risiko sudah diterapkan tetapi tanpa mengacu pada pedoman manajemen risiko SPBE. Pemkot Blitar masih mempunyai waktu untuk mempersiapkan diri mencapai Level 3, hal-hal yang harus dilakukan: - membuat pedoman Manajemen Risiko SPBE - menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan pedoman - terdapat bukti dokumen yang menunjukkan penerapan Manajemen Risiko SPBE, seperti undangan rapat penerapan Manajemen Risiko SPBE, laporan hasil pelaksanaan, laporan hasil reviu penerapan Manajemen Risiko

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
22	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3	3	Pemkot Blitar belum mempunyai dokumen arsitektur infrastruktur dan keamanan SPBE. Sudah dibentuk Tim Pengelola Layanan Keamanan Informasi sejak tahun 2020. Belum ada bukti dokumen yang menunjukkan apakah pengendalian keamanan informasi sudah selaras dengan perencanaan program. Untuk menuju level 3 yang harus dipersiapkan adalah: - pengendalian Keamanan Informasi telah dilaksanakan pada semua OPD - bukti dokumen bahwa semua keamanan informasi sudah diterapkan di semua OPD - - bukti dokumen yang menunjukkan bahwa pengendalian Keamanan Informasi sudah selaras dengan arah dan perencanaan program
23	Penerapan Manajemen Data	2	3	- Pemkot Blitar saat ini masih belum menerapkan Manajemen Data. Manajemen Data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. - Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data. Untuk menuju Level 2 hal-hal yang harus dilakukan: - Pemkot Blitar sudah menerapkan kegiatan Manajemen Data dengan program kegiatan yang terarah dan terencana, namun belum mengacu pada pedoman yang berlaku. Untuk menuju Level 3 hal-hal yang harus dilakukan: - Pemkot Blitar telah menerapkan Manajemen Data sesuai dengan pedoman Manajemen Data yang berlaku melalui serangkaian proses

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data. Bukti dokumen bahwa Manajemen Data sudah diterapkan di semua OPD - Bukti dokumen bahwa Manajemen Data sudah diterapkan sesuai dengan Pedoman Manajemen Data
24	Penerapan Manajemen Aset TIK	2	3	Pemkot Blitar masih belum menerapkan Manajemen Aset TIK. - Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Aset TIK mencakup perangkat lunak, perangkat keras, data dan informasi, infrastruktur, SDM, lisensi, data, SOP, outsource services, dan IT asset register. - Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Untuk menuju ke Level 2, yang harus dilakukan adalah sbb.: - Manajemen Aset TIK dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK. Untuk menuju ke Level 3, yang harus dilakukan adalah sbb.: - Manajemen Aset TIK telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK (proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK). Bukti dokumen yang perlu dipersiapkan: - Pedoman Manajemen Aset TIK - Bukti dokumen yang menunjukkan bahwa Manajemen Aset TIK sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan sudah diterapkan di semua OPD.

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
25	Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2	3	Pemkot Blitar sampai saat ini masih belum menerapkan Kompetensi SDM. - Manajemen Sumber Daya Manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. Manajemen SDM SPBE termasuk didalamnya kegiatan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dan promosi literasi SPBE. Manajemen SDM dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia dalam SPBE. Untuk menuju Level 2 yang perlu dipersiapkan adalah: - Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE belum terpenuhi seluruhnya (kompetensi di bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE). Untuk menuju Level 3 yang perlu dipersiapkan adalah: - Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE sudah terpenuhi seluruhnya (kompetensi di bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE). Bukti dokumen: - dokumen perencanaan & pengembangan SDM SPBE - bukti dokumen pelaksanaan pengembangan SDM SPBE
26	Penerapan Manajemen Pengetahuan	1	3	Pemkot Blitar masih belum menerapkan Manajemen Pengetahuan. Manajemen Pengetahuan adalah proses yang dilakukan untuk mendokumentasi pengalaman dan pengetahuan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi SPBE guna meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Untuk menuju Level 2, hal-hal yang perlu dilakukan adalah sbb.: - Manajemen Pengetahuan SPBE telah dilaksanakan tanpa standar/pedoman

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				Untuk menuju Level 3, hal-hal yang perlu dilakukan adalah sbb.: - Manajemen Pengetahuan SPBE dilaksanakan dengan mengacu pada standar/pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Manajemen Pengetahuan SPBE diterapkan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan. Bukti dokumen: - notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Pengetahuan, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Pengetahuan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Pengetahuan.
27	Penerapan Manajemen Perubahan	2	3	Pemkot Blitar saat ini masih belum menerapkan Manajemen Perubahan. - Manajemen Perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. - Manajemen Perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE. Lingkup Manajemen Perubahan SPBE: 1. Perubahan Aplikasi; 2. Perubahan Perangkat Keras; 3. Perubahan Perangkat Lunak; 4. Perubahan Infrastruktur; 5. Perubahan Proses Bisnis; 6. Perubahan Lingkungan Organisasi; 7. Perubahan Layanan;

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				8. Perubahan Data; 9. Perubahan Keamanan; 10. Perubahan Arsitektur. Syarat untuk mencapai Level 2: - Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE baru dilaksanakan oleh Sebagian OPD Syarat untuk mencapai Level 3: - Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan oleh semua OPD sesuai pedoman perubahan. Bukti dokumen: - Dokumen perencanaan pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE, Dokumen pedoman pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE - Bukti pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE, dan Bukti Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE.
28	Penerapan Manajemen Layanan SPBE	3	3	Pemkot Blitar saat ini masih belum menerapkan Manajemen Layanan SPBE. - Manajemen Layanan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE. - Manajemen Layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas. - Penyelenggaraan Manajemen Layanan SPBE ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar Layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif.

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				Penyelenggaraan Manajemen Layanan dapat diwujudkan dengan membangun portal pusat layanan untuk menjalankan proses: - pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna; - pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE; dan - pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi. Syarat untuk mencapai Level 2: - Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan pada sebagian proses Manajemen Layanan SPBE (Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE). Syarat untuk mencapai Level 3: - Pemkot Blitar telah menerapkan Manajemen Layanan SPBE sesuai dengan pedoman yang berlaku yang memuat serangkaian proses manajemen layanan mulai dari pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE. Bukti dokumen: - Dokumen perencanaan pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE - Dokumen pedoman pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE - Bukti pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE
Aspek 6 - Pelaksanaan Audit TIK				
29	Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1	2	Pemkot Blitar sudah melaksanakan Audit Infrastruktur tetapi tanpa perencanaan yang bersinambungan. Audit Infrastruktur SPBE harus dilaksanakan berdasarkan standar dan tata

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				cara pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE. Audit Infrastruktur SPBE meliputi pemeriksaan hal pokok teknis antara lain: 1. penerapan tata kelola dan manajemen infrastruktur SPBE; 2. infrastruktur SPBE; 3. kinerja infrastruktur SPBE yang dihasilkan; dan 4. aspek infrastruktur SPBE lainnya. Syarat Level 2: Pemkot Blitar telah melakukan Audit Infrastruktur secara rutin minimal 2 tahun sekali, namun pemeriksaan hanya meliputi sebagian hal pokok teknis yang disyaratkan. Syarat Level 3: Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi internal Pemerintah Daerah. Audit Infrastruktur SPBE dilakukan secara rutin minimal 2 tahun sekali dan pemeriksaan sudah meliputi seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan. Bukti dokumen yang perlu dipersiapkan: Laporan pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, notulensi/catatan pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, bukti undangan rapat pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE.
30	Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1	2	Pemkot Blitar sudah melaksanakan audit aplikasi SPBE tahun 2020. Kegiatan ini baru dilaksanakan sekali. Sudah ada laporan hasil Audit Aplikasi Umum maupun aplikasi khusus. Audit Aplikasi SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE.

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				Audit Aplikasi SPBE terdiri atas: 1. Audit Aplikasi Umum 2. Audit Aplikasi Khusus Standar/pedoman audit dapat berupa standar internal, standar/pedoman nasional, atau standar/pedoman internasional. Syarat untuk mencapai Level 3: Pemkot Blitar telah melakukan Audit Aplikasi Khusus secara rutin minimal 2 tahun sekali dan audit telah dilakukan pada seluruh Aplikasi Khusus yang ada. Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi internal. Bukti dokumen: Dokumentasi penerapan Audit Aplikasi sesuai standar dan tata cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dan meliputi audit aplikasi umum dan aplikasi khusus.
31	Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1	2	Pemkot Blitar sudah melakukan audit keamanan SPBE pada tahun 2020, kegiatan ini baru dilakukan sekali dan sudah mengikuti panduan yang ada. Audit Keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Keamanan SPBE. Audit Keamanan SPBE terdiri atas: 1. Audit Keamanan Aplikasi 2. Audit Keamanan Infrastruktur. Standar/pedoman audit dapat berupa standar internal instansi, standar/pedoman nasional, atau standar/pedoman internasional.

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				Syarat untuk mencapai Level 3: - Pemkot Blitar telah melakukan Audit Keamanan SPBE secara rutin minimal 2 tahun sekali dan audit telah dilakukan pada seluruh Aplikasi Khusus yang ada. - Kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi internal Bukti dokumen yang harus disiapkan : Laporan pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, notulensi/catatan penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, bukti undangan rapat penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.
Domain 4 - Layanan SPBE				
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik				
32	Layanan Perencanaan	4	4	Layanan Perencanaan di Pemkot Blitar seharusnya sudah bisa mencapai Level 4. Untuk evaluasi SPBE ke depannya, mohon dilengkapi bukti dokumen sbb.: - Dokumen yang menunjukkan bahwa Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya layanan penganggaran Berbasis Elektronik, layanan keuangan Berbasis Elektronik, layanan pengadaan Berbasis Elektronik, layanan perencanaan Berbasis Elektronik, dll. - Dokumen yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
33	Layanan Penganggaran	4	4	Layanan Penganggaran di Pemkot Blitar sudah terintegrasi dengan layanan lainnya seperti layanan perencanaan maupun manajemen keuangan. Bukti dokumen yang ada masih belum menunjukkan bahwa layanan ini sudah dapat mencapai Level 5. Bukti dokumen yang dibutuhkan untuk mencapai Level 5: - Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi penganggaran telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya. - Terdapat notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan penganggaran berbasis elektronik, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE;
34	Layanan Keuangan	4	4	Layanan Keuangan berbasis elektronik di Pemkot Blitar sudah terintegrasi dengan layanan lainnya seperti layanan perencanaan maupun anggaran. Bukti dokumen yang ada masih belum menunjukkan bahwa layanan ini sudah dapat mencapai Level 5. Bukti dokumen yang dibutuhkan untuk mencapai Level 5: - Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi keuangan telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya. - Terdapat notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan keuangan berbasis elektronik, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE;

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
35	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4	4	Untuk saat ini, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sudah mendapat nilai yang optimal yaitu Level 4.
36	Layanan Kepegawaian	4	4	Layanan Kepegawaian di Pemkot Blitar (SIMPEG) terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) melalui API web service. Selain itu SIMPEG terintegrasi dengan Sistem Informasi Eksekutif (SIE) Kota Blitar. Untuk mencapai Level 5, bukti dokumen yang diperlukan adalah: - Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya. - Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan layanannya. Terdapat notulensi/catatan/telaah/laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE;
37	Layanan Kearsipan Dinamis	4	4	Pemkot Blitar sudah memiliki Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik (e-Surat) yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi pengelolaan kearsipan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi surat masuk dan surat keluar dalam alur tata naskah dinas. Untuk mencapai Level 4, yang harus dilakukan adalah: Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik (e-Surat diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau dengan layanan kearsipan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				Bukti dokumen yang harus disediakan: Dokumen yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.
38	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	3	4	Pemkot Blitar sudah menerapkan layanan pengelolaan barang milik negara/daerah SIMDA BMD yang terintegrasi dengan SIMDA Keuangan. Untuk mencapai Level 5, bukti dokumen yang diperlukan adalah: Dokumen yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi (SIMDA BMD) telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya. Terdapat notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SIMDA BMD, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SIMDA BMD, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SIMDA BMD.
39	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3	4	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah yang digunakan oleh Pemkot Blitar adalah WBS. Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik sudah menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi pengawasan internal, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi pengawasan internal Untuk mencapai Level 4, yang harus dilakukan adalah: Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik harus diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau dengan Layanan Pengawasan Internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				Bukti dokumen yang perlu disediakan: Dokumen yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi WBS dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.
40	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3	5	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi sudah menyediakan layanan transaksi dan layanan analisis data. Untuk mencapai Level 4, yang harus dilakukan adalah: Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (AID 3L) harus diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau dengan Layanan Pengawasan Internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya. Bukti dokumen yang perlu disediakan: Dokumen yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi AID 3L dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.
41	Layanan Kinerja Pegawai	3	5	Pemkot Blitar sudah mempunyai aplikasi e-Kinerja (Layanan Kinerja Pegawai) yang sudah menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi kinerja pegawai, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi hasil kinerja pegawai. Aplikasi e-Kinerja ini terintegrasi dengan absensi pegawai tetapi modul absensi pegawai adalah masih bagian dari aplikasi e-Kinerja (bukan modul yang berbeda).

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				Untuk mencapai Level 4, yang harus dilakukan adalah: Layanan e-Kinerja harus diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau dengan Layanan Kinerja Pegawai Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya. Bukti dokumen yang perlu disediakan: Dokumen yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi e-Kinerja dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik				
42	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4	4	Pemkot Blitar sudah memiliki Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (LAPOR SP4N) yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi pengaduan pelayanan publik, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi pengaduan pelayanan publik. Layanan LAPOR SP4N sudah diintegrasikan dengan Sistem Informasi Eksekutif (SIE) Pemkot Blitar. Untuk mencapai Level 5, bukti dokumen yang harus disediakan adalah: Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya. Terdapat notulensi/catatan/telaah/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE;

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
43	Layanan Data Terbuka	3	4	Pemkot Blitar perlu meningkatkan Layanan Data Terbuka. - Data Terbuka merupakan sekumpulan data yang dikelola oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang dapat di bagi pakai oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. - Data Terbuka(Open Data) adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan data terbuka Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. - Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan data terbuka Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Syarat tercapainya Level 2: Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait data terbuka seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen. Syarat tercapainya Level 3: Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait data terbuka seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data Bukti dokumen yang harus disediakan: Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, kemajuan status approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
44	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4	4	Pemkot Blitar sudah mempunyai Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang sudah memberikan layanan transaksi. Layanan JDIH Pemkot Blitar sudah terintegrasi dengan JDIH Nasional. Saran untuk perbaikan: saat ini aplikasi JDIH Pemkot Blitar hanya mempunyai 1 jenis transaksi yaitu penambahan data. Untuk pengembangan ke depannya, sebaiknya layanan transaksinya dilengkapi dengan validasi dokumen yang diunggah dan dilengkapi dengan analitik data. Bukti dokumen yang harus disediakan: Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh aplikasi JDIH dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan JDIH Nasional.
45	Layanan Publik Sektor 1	4	5	Aplikasi SILPUSITRON untuk pengelolaan surat dan arsip dinamis. Layanan ini sudah termasuk dalam layanan kearsipan dinamis yang sudah ditanyakan di indikator 37. Untuk kedepannya sebaiknya dipilih aplikasi lain yang mempunyai fitur kolaborasi sehingga dapat mencapai skor 4.
46	Layanan Publik Sektor 2	4	5	Aplikasi Hibah Bansos: aplikasi ini sudah menyediakan layanan transaksi, validasi dan persetujuan serta analitik data.

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				Untuk mencapai Level 4, bukti dokumen yang harus disediakan adalah: Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya. Terdapat notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE. Bukti dokumen yang menunjukkan bahwa aplikasi Hibah Bansor
47	Layanan Publik Sektor 3	4	5	Aplikasi SIPAK online : Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan. Aplikasi ini sudah menyediakan layanan transaksi, validasi dan persetujuan serta analitik data. Layanan ini sudah dintegrasikan dengan aplikasi Dispendukcapil Kota Blitar. Untuk mencapai Level 5, bukti dokumen yang harus disediakan adalah: Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh aplikasi SIPAK telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya. Terdapat notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SIPAK, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SIPAK, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SIPAK.

1.7 Strategi / Rekomendasi terhadap Implementasi Arsitektur SPBE

Tabel 0-5 Tabel Rekomendasi Perbaikan Tiap Indikator

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
Domain 1 - Kebijakan SPBE				
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE				
1	Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat / Pemerintah Daerah	2	4	Kebijakan Internal Arsitektur SPBE perlu ditingkatkan.. Untuk evaluasi SPBE berikutnya, persiapkan dokumen sbb. : notulensi/catatan/laporan hasil rekomendasi tindak lanjut kebijakan internal Arsitektur SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan kebijakan internal Arsitektur SPBE, dokumentasi aktivitas-aktivitas penyempurnaan kebijakan internal Arsitektur SPBE; Dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sebelumnya dan yang memuat pengaturan/norma Arsitektur SPBE yang telah disempurnakan.
2	Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	4	Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE perlu ditingkatkan. Untuk Evaluasi SPBE berikutnya persiapkan dokumen sbb.: notulensi/catatan/laporan hasil rekomendasi tindak lanjut kebijakan internal Peta Rencana SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan kebijakan internal Peta Rencana SPBE, dokumentasi aktivitas-aktivitas penyempurnaan kebijakan internal Peta Rencana SPBE; Dokumen kebijakan Instansi Pemerintah Daerah yang sebelumnya dan yang memuat pengaturan/norma Peta Rencana SPBE yang telah disempurnakan.
3	Kebijakan Internal Manajemen Data	3	4	Kebijakan Internal Manajemen Data saat ini nilainya masih belum bisa 5 karena kebijakan saat ini adalah kebijakan baru yang belum pernah direvisi. Untuk ke depannya, kebijakan ini bisa mencapai 3 jika tersedia dokumen sbb: notulensi / catatan / laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut kebijakan internal Manajemen Data SPBE, bukti undangan rapat

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				pembahasan penyempurnaan kebijakan internal Manajemen Data SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyempurnaan kebijakan internal Manajemen Data SPBE; Dokumen kebijakan Pemerintah Daerah yang sebelumnya dan yang memuat pengaturan/norma Manajemen Data SPBE yang telah disempurnakan.
4	Kebijakan Pembangunan Internal Aplikasi SPBE	1	4	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE adalah kebijakan baru yang di instrument SPBE yang lama tidak ada. Saat ini kebijakan ini masih belum dapat mencapai skor 5 karena ini adalah kebijakan baru yang belum pernah dievaluasi / direvisi. Untuk ke depannya, kebijakan ini dapat mencapai level 5 jika tersedia dokumen sbb. : notulensi/catatan/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyempurnaan kebijakan internal Pembangunan Aplikasi SPBE; Dokumen kebijakan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang sebelumnya dan berisi pengaturan/norma Pembangunan Aplikasi SPBE yang telah disempurnakan
5	Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3	4	Kebijakan internal Layanan Pusat Data sudah bagus, pertahankan. Untuk evaluasi SPBE berikutnya, mohon disiapkan bukti dokumen sbb.: notulensi/catatan/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut kebijakan internal Layanan Pusat Data, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan kebijakan internal Layanan Pusat Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyempurnaan kebijakan internal Layanan Pusat Data; Dokumen kebijakan Pemerintah Daerah yang sebelumnya dan yang memuat pengaturan/norma Layanan Pusat Data yang telah disempurnakan.
6	Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3	4	Perwali SPBE yang saat ini berlaku masih belum mengatur interkoneksi Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Jaringan

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
	Pusat/Pemerintah Daerah			Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Oleh karena itu Level 4 masih belum bisa terpenuhi. Untuk perbaikan ke depan, kebijakan ini perlu direvisi dengan memasukkan pasal yang mengatur interkoneksi Layanan Jaringan Intra Pemkot Blitar dengan pemerintah daerah lain (horizontal) atau instansi pusat lainnya (vertical). Bukti dokumen yang perlu disiapkan antara lain: konteks pengaturan/norma arah kebijakan interkoneksi pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya tertuang dalam Perwali atau Peraturan Daerah. Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi kebijakan internal Jaringan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah, bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal Jaringan Intra Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan internal Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
7	Kebijakan Internal penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	4	Saat ini Pemkot Blitar masih belum mempunyai kebijakan terkait penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan itu, perlu dibentuk tim khusus untuk menyusun tim khusus untuk menyusun kebijakan ini.
8	Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	2	4	Saat ini Pemkot Blitar masih belum mempunyai kebijakan terkait Manajemen Keamanan Informasi. Sehubungan dengan itu, perlu dibentuk tim khusus untuk menyusun tim khusus untuk menyusun kebijakan ini.
9	Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	4	Perwali SPBE Nomor 49 Tahun 2020 masih belum mengatur tentang kebijakan internal terkait Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE). Untuk perbaikan ke depan, sebaiknya segera dibuat

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				Pewali yang mengatur kebijakan internal Audit TIK dan pengaturan/norma penerapan Audit TIK bagi seluruh OPD di Pemkot Blitar yang tertuang dalam dokumen kebijakan Perwali atau Peraturan Daerah.
10	Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	4	Perwali SPBE Nomor 49 Tahun 2020 telah memuat secara lengkap pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Pemkot Blitar yang mendukung penerapan SPBE pada seluruh OPD. Di Perwali tersebut dijelaskan bahwa Tim Koordinasi SPBE mengkoordinir pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPBE. Di beberapa dokumen pendukung yang lain juga disebutkan bahwa Tim Koordinasi SPBE ini juga sudah direviu dan dievaluasi. Untuk perbaikan ke depan, kebijakan ini perlu direvisi dengan menambahkan pasal yang mengatur arah koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE antar Instansi Pusat atau antar Pemerintah Daerah. Selain itu perlu menyiapkan bukti dokumen sbb.: notulensi/catatan/ laporan hasil evaluasi kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Pemkot Blitar, bukti undangan rapat evaluasi kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE.
Domain 2 - Tata Kelola SPBE				
Aspek 2 - Perencanaan Strategis SPBE				
11	Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1	3	Bukti dokumen yang diajukan sudah menunjukkan bahwa Arsitektur SPBE Kota Blitar sudah memiliki arsitektur Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE (level 3). Sudah ada evaluasi yang sudah dilakukan, tetapi dokumen yang ada menunjukkan bahwa evaluasi baru dilakukan sekali sehingga konsistensinya masih belum terlihat.

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				Untuk menuju ke level 4, dokumen yang perlu dipersiapkan adalah sbb.: - Dokumen Arsitektur SPBE / Rencana Induk TI / Masterplan TIK / Cetak Biru / Master Plan Smart City yang menggambarkan seluruh Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE dan telah sesuai dengan standar Arsitektur SPBE Nasional; - notulensi/catatan/laporan hasil reviu Arsitektur SPBE, bukti undangan rapat reviu dan evaluasi Arsitektur SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu dan evaluasi Arsitektur SPBE.
12	Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	3	Peta Rencana SPBE Kota Blitar sudah memuat secara lengkap peta rencana Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK (level 3). Sudah ada evaluasi yang sudah dilakukan, tetapi dokumen yang ada menunjukkan bahwa evaluasi baru dilakukan sekali (tahun 2019) sehingga konsistensinya masih belum terlihat. Untuk menuju ke level 4, dokumen yang harus disediakan adalah sbb.: - notulensi/catatan/laporan hasil reviu Peta Rencana SPBE, bukti undangan rapat reviu dan evaluasi Peta Rencana SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu dan evaluasi Peta Rencana SPBE
13	Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	1	3	Bukti dokumen yang diajukan sudah menunjukkan bahwa seluruh Rencana dan Anggaran SPBE unit kerja/perangkat daerah telah dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK dalam hal ini Dinas Kominfo Kota Blitar. Rencana dan Anggaran SPBE masih belum direviu dan dievaluasi secara periodik.

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				Untuk menuju level 4, dokumen yang harus disediakan adalah: - dokumen Rencana dan Anggaran SPBE terpadu dan dokumen RKA/KL atau DPA-SKPD; - Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi Rencana dan Anggaran SPBE, bukti undangan rapat reviu dan evaluasi Rencana dan Anggaran SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu dan evaluasi Rencana dan Anggaran SPBE.
14	Inovasi Proses Bisnis SPBE	2	4	Proses Bisnis Pemerintah Daerah telah memenuhi standar dan Proses Bisnis Pemerintah Daerah telah dilakukan perbaikan sebagai bentuk inovasi Proses Bisnis untuk mewujudkan proses bisnis yang lebih efisien (Level 3). Dokumen pendukung yang tersedia masih belum menunjukkan bahwa dokumen proses bisnis sudah direviu dan dievaluasi secara periodic. Untuk menuju level 4, dokumen yang harus disiapkan adalah sbb.: - Dokumen model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan dokumentasi penerapan Inovasi Proses Bisnis melalui sistem elektronik; - Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi Inovasi Proses Bisnis, bukti undangan rapat reviu dan evaluasi Inovasi Proses Bisnis, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas reviu dan evaluasi Inovasi Proses Bisnis.
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi				
15	Pembangunan Aplikasi SPBE	1	3	Bukti dokumen yang diajukan sudah menunjukkan bahwa proses pembangunan Aplikasi SPBE telah dilakukan sesuai siklus pembangunan aplikasi (Level 2). Dokumen pendukung yang tersedia masih belum

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				menunjukkan bahwa proses pembangunan aplikasi SPBE telah dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK. Untuk menuju ke level 3, dokumen yang harus disediakan adalah: - Dokumentasi proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus pembangunan aplikasi dan didokumentasikan secara formal; - Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE antara unit pengusul di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Unit pengelola TIK (Dinas Kominfo).
16	Layanan Pusat Data	2	4	Bukti dokumen yang diajukan sudah menunjukkan bahwa Layanan Pusat Data telah digunakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di Pemkot Blitar. Selain itu, terdapat prosedur pengoperasian baku Layanan Pusat Data. Untuk menuju ke level 4, dokumen yang harus disiapkan adalah: - Dokumentasi pemanfaatan Layanan Pusat Data, SOP penggunaan pusat data, dokumentasi integrasi dengan pusat data Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain dan/atau Pusat Data Nasional; - Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi Layanan Pusat Data, bukti undangan rapat evaluasi Layanan Pusat Data, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Layanan Pusat Data.
17	Layanan jaringan intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3	4	Bukti dokumen yang diajukan hanya topologi Jaringan Intranet DISKOMINFO, bukan topologi jaringan intranet di seluruh Pemkot Blitar yang menghubungkan semua OPD (Level 2).

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				Untuk menuju ke Level 3, dokumen/program yang harus disiapkan adalah: - Layanan Jaringan Intra Pemkot Blitar telah diterapkan diseluruh OPD - Terdapat notulensi/catatan/laporan pengoperasian Jaringan Intra Pemkot Blitar di seluruh OPD dan didokumentasikan secara formal.
18	Penggunaan sistem penghubung layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	4	Sistem penghubung layanan di Pemkot Blitar telah diterapkan di seluruh OPD. Untuk menuju ke Level 4, program dan dokumen yang harus disiapkan: - Sistem Penghubung Layanan Pemkot Blitar telah terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. - Tautan Sistem Penghubung Layanan, tangkapan layar aplikasi layanan integrasi data yang telah terintergrasi dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya - Standard Operating Procedure (SOP) integrasi data atau layanan SPBE dengan menggunakan Sistem Penghubung Layanan; - Notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi Sistem Penghubung Layanan Pemkot Blitar - Bukti undangan rapat evaluasi Sistem Penghubung Layanan Pemkot Blitar - dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Sistem Penghubung Layanan Pemkot Blitar

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
Aspek 4 - Penyelenggara SPBE				
19	Pelaksanaan tim koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	4	Pemkot Blitar sudah memiliki Tim Koordinasi SPBE yang ditetapkan dan mencakup tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah namun belum ada bukti dokumen yang menunjukkan bahwa Tim Koordinasi sudah melaksanakan semua rencana seperti yang tertulis di Road Map. Untuk menuju Level 3, yang harus dipersiapkan adalah: - Tim Koordinasi SPBE Pemkot Blitar telah melaksanakan keseluruhan tugas/program kerja namun belum dikomunikasikan/dikoordinasikan kepada seluruh OPD. - Notulensi/catatan/laporan, bukti undangan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas rapat koordinasi tugas/program kerja dengan seluruh OPD - rapat reviu atau evaluasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE.
20	Kolaborasi penerapan SPBE	3	4	Bukti dokumen yang ada tidak berhubungan dengan kolaborasi antar unit. Untuk menuju Level 2, yang harus dipersiapkan adalah: - Pemkot Blitar sudah melakukan kolaborasi penerapan SPBE antar unit kerja dan telah menyusun perencanaan, namun belum ditetapkan secara formal. Untuk menuju ke Level 3, yang harus dilakukan adalah:

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				- Pemkot Blitar menetapkan/membentuk Forum Kolaborasi Penerapan SPBE secara formal, serta sudah melakukan pertemuan secara rutin - Forum Kolaborasi SPBE merupakan wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat. Forum Kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual - Bukti dokumen dalam bentuk: dokumentasi aktivitas-aktivitas penetapan dan/atau kegiatan Forum Kolaborasi Penerapan SPBE, notulensi/catatan/laporan kegiatan rutin Forum Kolaborasi Penerapan SPBE, dan/atau bukti undangan kegiatan Forum Kolaborasi Penerapan SPBE.
Domain 3 - Manajemen SPBE				
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE				
21	Penerapan Manajemen Risiko SPBE	3	3	Pemkot Blitar masih belum menerapkan manajemen risiko (Level=1). Manajemen Risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. Untuk menuju Level 2: Manajemen Risiko sudah diterapkan tetapi tanpa mengacu pada pedoman manajemen risiko SPBE. Pemkot Blitar masih mempunyai waktu untuk mempersiapkan diri mencapai Level 3, hal-hal yang harus dilakukan: - membuat pedoman Manajemen Risiko SPBE

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				- menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan pedoman - terdapat bukti dokumen yang menunjukkan penerapan Manajemen Risiko SPBE, seperti undangan rapat penerapan Manajemen Risiko SPBE, laporan hasil pelaksanaan, laporan hasil reviu penerapan Manajemen Risiko
22	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3	3	Pemkot Blitar belum mempunyai dokumen arsitektur infrastruktur dan keamanan SPBE. Sudah dibentuk Tim Pengelola Layanan Keamanan Informasi sejak tahun 2020. Belum ada bukti dokumen yang menunjukkan apakah pengendalian keamanan informasi sudah selaras dengan perencanaan program. Untuk menuju level 3 yang harus dipersiapkan adalah: - pengendalian Keamanan Informasi telah dilaksanakan pada semua OPD - bukti dokumen bahwa semua keamanan informasi sudah diterapkan di semua OPD - - bukti dokumen yang menunjukkan bahwa pengendalian Keamanan Informasi sudah selaras dengan arah dan perencanaan program
23	Penerapan Manajemen Data	2	3	- Pemkot Blitar saat ini masih belum menerapkan Manajemen Data. Manajemen Data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. - Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				Untuk menuju Level 2 hal-hal yang harus dilakukan: - Pemkot Blitar sudah menerapkan kegiatan Manajemen Data dengan program kegiatan yang terarah dan terencana, namun belum mengacu pada pedoman yang berlaku. Untuk menuju Level 3 hal-hal yang harus dilakukan: - Pemkot Blitar telah menerapkan Manajemen Data sesuai dengan pedoman Manajemen Data yang berlaku melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data. Bukti dokumen bahwa Manajemen Data sudah diterapkan di semua OPD - Bukti dokumen bahwa Manajemen Data sudah diterapkan sesuai dengan Pedoman Manajemen Data
24	Penerapan Manajemen Aset TIK	2	3	Pemkot Blitar masih belum menerapkan Manajemen Aset TIK. - Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Aset TIK mencakup perangkat lunak, perangkat keras, data dan informasi, infrastruktur, SDM, lisensi, data, SOP, outsource services, dan IT asset register. - Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Untuk menuju ke Level 2, yang harus dilakukan adalah sbb.: - Manajemen Aset TIK dilaksanakan tanpa mengacu pada pedoman

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				Manajemen Aset TIK. Untuk menuju ke Level 3, yang harus dilakukan adalah sbb.: - Manajemen Aset TIK telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK (proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan aset TIK). Bukti dokumen yang perlu dipersiapkan: - Pedoman Manajemen Aset TIK - Bukti dokumen yang menunjukkan bahwa Manajemen Aset TIK sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan sudah diterapkan di semua OPD.
25	Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2	3	Pemkot Blitar sampai saat ini masih belum menerapkan Kompetensi SDM. - Manajemen Sumber Daya Manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. Manajemen SDM SPBE termasuk didalamnya kegiatan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE dan promosi literasi SPBE. Manajemen SDM dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia dalam SPBE. Untuk menuju Level 2 yang perlu dipersiapkan adalah: - Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE belum terpenuhi seluruhnya (kompetensi di bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE). Untuk menuju Level 3 yang perlu dipersiapkan adalah: - Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE sudah terpenuhi seluruhnya (kompetensi di bidang Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, dan Infrastruktur SPBE). Bukti dokumen: - dokumen perencanaan & pengembangan SDM SPBE - bukti dokumen pelaksanaan pengembangan SDM SPBE
26	Penerapan Manajemen Pengetahuan	1	3	Pemkot Blitar masih belum menerapkan Manajemen Pengetahuan. Manajemen Pengetahuan adalah proses yang dilakukan untuk mendokumentasi pengalaman dan pengetahuan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi SPBE guna meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Untuk menuju Level 2, hal-hal yang perlu dilakukan adalah sbb.: - Manajemen Pengetahuan SPBE telah dilaksanakan tanpa standar/pedoman Untuk menuju Level 3, hal-hal yang perlu dilakukan adalah sbb.: - Manajemen Pengetahuan SPBE dilaksanakan dengan mengacu pada standar/pedoman di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan Manajemen Pengetahuan SPBE diterapkan menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan. Bukti dokumen: - notulensi/catatan penyusunan rancangan penerapan Manajemen Pengetahuan, bukti undangan rapat penyusunan rancangan penerapan Manajemen Pengetahuan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas penyusunan Manajemen Pengetahuan.

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
27	Penerapan Manajemen Perubahan	2	3	Pemkot Blitar saat ini masih belum menerapkan Manajemen Perubahan. - Manajemen Perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. - Manajemen Perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE. Lingkup Manajemen Perubahan SPBE: 1. Perubahan Aplikasi; 2. Perubahan Perangkat Keras; 3. Perubahan Perangkat Lunak; 4. Perubahan Infrastruktur; 5. Perubahan Proses Bisnis; 6. Perubahan Lingkungan Organisasi; 7. Perubahan Layanan; 8. Perubahan Data; 9. Perubahan Keamanan; 10. Perubahan Arsitektur. Syarat untuk mencapai Level 2: - Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE baru dilaksanakan oleh Sebagian OPD

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				Syarat untuk mencapai Level 3: - Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan oleh semua OPD sesuai pedoman perubahan. Bukti dokumen: - Dokumen perencanaan pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE, Dokumen pedoman pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE - Bukti pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE, dan Bukti Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Perubahan SPBE.
28	Penerapan Manajemen Layanan SPBE	3	3	Pemkot Blitar saat ini masih belum menerapkan Manajemen Layanan SPBE. - Manajemen Layanan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE. - Manajemen Layanan merupakan serangkaian proses pelayanan kepada pengguna, pengoperasian layanan, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar Layanan SPBE dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas. - Penyelenggaraan Manajemen Layanan SPBE ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar Layanan SPBE tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif. Penyelenggaraan Manajemen Layanan dapat diwujudkan dengan membangun portal pusat layanan untuk menjalankan proses: - pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna;

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				- pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE; dan - pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi. Syarat untuk mencapai Level 2: - Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan pada sebagian proses Manajemen Layanan SPBE (Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE). Syarat untuk mencapai Level 3: - Pemkot Blitar telah menerapkan Manajemen Layanan SPBE sesuai dengan pedoman yang berlaku yang memuat serangkaian proses manajemen layanan mulai dari pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE. Bukti dokumen: - Dokumen perencanaan pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE - Dokumen pedoman pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE - Bukti pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE
Aspek 6 - Pelaksanaan Audit TIK				
29	Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1	2	Pemkot Blitar sudah melaksanakan Audit Infrastruktur tetapi tanpa perencanaan yang bersinambungan. Audit Infrastruktur SPBE harus dilaksanakan berdasarkan standar dan tata

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				cara pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE. Audit Infrastruktur SPBE meliputi pemeriksaan hal pokok teknis antara lain: 1. penerapan tata kelola dan manajemen infrastruktur SPBE; 2. infrastruktur SPBE; 3. kinerja infrastruktur SPBE yang dihasilkan; dan 4. aspek infrastruktur SPBE lainnya. Syarat Level 2: Pemkot Blitar telah melakukan Audit Infrastruktur secara rutin minimal 2 tahun sekali, namun pemeriksaan hanya meliputi sebagian hal pokok teknis yang disyaratkan. Syarat Level 3: Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi internal Pemerintah Daerah. Audit Infrastruktur SPBE dilakukan secara rutin minimal 2 tahun sekali dan pemeriksaan sudah meliputi seluruh hal pokok teknis yang disyaratkan. Bukti dokumen yang perlu dipersiapkan: Laporan pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, notulensi/catatan pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, bukti undangan rapat pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE.
30	Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1	2	Pemkot Blitar sudah melaksanakan audit aplikasi SPBE tahun 2020. Kegiatan ini baru dilaksanakan sekali. Sudah ada laporan hasil Audit Aplikasi Umum

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				maupun aplikasi khusus. Audit Aplikasi SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE. Audit Aplikasi SPBE terdiri atas: 1. Audit Aplikasi Umum 2. Audit Aplikasi Khusus Standar/pedoman audit dapat berupa standar internal, standar/pedoman nasional, atau standar/pedoman internasional. Syarat untuk mencapai Level 3: Pemkot Blitar telah melakukan Audit Aplikasi Khusus secara rutin minimal 2 tahun sekali dan audit telah dilakukan pada seluruh Aplikasi Khusus yang ada. Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Informasi internal. Bukti dokumen: Dokumentasi penerapan Audit Aplikasi sesuai standar dan tata cara pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dan meliputi audit aplikasi umum dan aplikasi khusus.
31	Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1	2	Pemkot Blitar sudah melakukan audit keamanan SPBE pada tahun 2020, kegiatan ini baru dilakukan sekali dan sudah mengikuti panduan yang ada. Audit Keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				Audit Keamanan SPBE terdiri atas: 1. Audit Keamanan Aplikasi 2. Audit Keamanan Infrastruktur. Standar/pedoman audit dapat berupa standar internal instansi, standar/pedoman nasional, atau standar/pedoman internasional. Syarat untuk mencapai Level 3: - Pemkot Blitar telah melakukan Audit Keamanan SPBE secara rutin minimal 2 tahun sekali dan audit telah dilakukan pada seluruh Aplikasi Khusus yang ada. - Kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi internal Bukti dokumen yang harus disiapkan : Laporan pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, notulensi/catatan penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, bukti undangan rapat penyusunan rancangan pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.
Domain 4 - Layanan SPBE				
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik				
32	Layanan Perencanaan	4	4	Layanan Perencanaan di Pemkot Blitar seharusnya sudah bisa mencapai Level 4. Untuk evaluasi SPBE ke depannya, mohon dilengkapi bukti dokumen sbb.: - Dokumen yang menunjukkan bahwa Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik memberikan layanan kolaborasi dengan layanan elektronik lain, misalnya layanan penganggaran Berbasis Elektronik, layanan keuangan

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				Berbasis Elektronik, layanan pengadaan Berbasis Elektronik, layanan perencanaan Berbasis Elektronik, dll. - Dokumen yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada Arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.
33	Layanan Penganggaran	4	4	Layanan Penganggaran di Pemkot Blitar sudah terintegrasi dengan layanan lainnya seperti layanan perencanaan maupun manajemen keuangan. Bukti dokumen yang ada masih belum menunjukkan bahwa layanan ini sudah dapat mencapai Level 5. Bukti dokumen yang dibutuhkan untuk mencapai Level 5: - Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi penganggaran telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya. - Terdapat notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan penganggaran berbasis elektronik, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE;
34	Layanan Keuangan	4	4	Layanan Keuangan berbasis elektronik di Pemkot Blitar sudah terintegrasi dengan layanan lainnya seperti layanan perencanaan maupun anggaran. Bukti dokumen yang ada masih belum menunjukkan bahwa layanan ini sudah dapat mencapai Level 5.

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				Bukti dokumen yang dibutuhkan untuk mencapai Level 5: - Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi keuangan telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya. - Terdapat notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan keuangan berbasis elektronik, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE;
35	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4	4	Untuk saat ini, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sudah mendapat nilai yang optimal yaitu Level 4.
36	Layanan Kepegawaian	4	4	Layanan Kepegawaian di Pemkot Blitar (SIMPEG) terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) melalui API web service. Selain itu SIMPEG terintegrasi dengan Sistem Informasi Eksekutif (SIE) Kota Blitar. Untuk mencapai Level 5, bukti dokumen yang diperlukan adalah: - Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya. - - Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan layanannya. Terdapat notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				pengembangan layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE;
37	Layanan Kearsipan Dinamis	4	4	Pemkot Blitar sudah memiliki Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik (e-Surat) yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi pengelolaan kearsipan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi surat masuk dan surat keluar dalam alur tata naskah dinas. Untuk mencapai Level 4, yang harus dilakukan adalah: Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik (e-Surat) diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau dengan layanan kearsipan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya. Bukti dokumen yang harus disediakan: Dokumen yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.
38	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	3	4	Pemkot Blitar sudah menerapkan layanan pengelolaan barang milik negara/daerah SIMDA BMD yang terintegrasi dengan SIMDA Keuangan.

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				Untuk mencapai Level 5, bukti dokumen yang diperlukan adalah: Dokumen yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi (SIMDA BMD) telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya. Terdapat notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SIMDA BMD, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SIMDA BMD, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SIMDA BMD.
39	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3	4	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah yang digunakan oleh Pemkot Blitar adalah WBS. Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik sudah menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi pengawasan internal, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi pengawasan internal Untuk mencapai Level 4, yang harus dilakukan adalah: Layanan Pengawasan Internal Berbasis Elektronik harus diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau dengan Layanan Pengawasan Internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya. Bukti dokumen yang perlu disediakan: Dokumen yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi WBS dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
40	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3	5	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi sudah menyediakan layanan transaksi dan layanan analisis data. Untuk mencapai Level 4, yang harus dilakukan adalah: Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (AID 3L) harus diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau dengan Layanan Pengawasan Internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya. Bukti dokumen yang perlu disediakan: Dokumen yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi AID 3L dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.
41	Layanan Kinerja Pegawai	3	5	Pemkot Blitar sudah mempunyai aplikasi e-Kinerja (Layanan Kinerja Pegawai) yang sudah menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi kinerja pegawai, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi hasil kinerja pegawai. Aplikasi e-Kinerja ini terintegrasi dengan absensi pegawai tetapi modul absensi pegawai adalah masih bagian dari aplikasi e-Kinerja (bukan modul yang berbeda). Untuk mencapai Level 4, yang harus dilakukan adalah: Layanan e-Kinerja harus diintegrasikan dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan perencanaan, penganggaran, dan/atau dengan Layanan Kinerja Pegawai Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				Bukti dokumen yang perlu disediakan: Dokumen yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi e-Kinerja dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan SPBE lainnya, sebagai hasil integrasi layanan/middleware/basis data seperti ditunjukkan pada arsitektur aplikasinya, pengelolaan repositori API, dan dokumentasi integrasi layanan SPBE lainnya.
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik				
42	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4	4	Pemkot Blitar sudah memiliki Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (LAPOR SP4N) yang menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat mengunduh atau mengunggah informasi pengaduan pelayanan publik, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme persetujuan dan validasi pengaduan pelayanan publik. Layanan LAPOR SP4N sudah diintegrasikan dengan Sistem Informasi Eksekutif (SIE) Pemkot Blitar. Untuk mencapai Level 5, bukti dokumen yang harus disediakan adalah: Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya. Terdapat notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE;
43	Layanan Data Terbuka	3	4	Pemkot Blitar perlu meningkatkan Layanan Data Terbuka. - Data Terbuka merupakan sekumpulan data yang dikelola oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang dapat di bagi pakai oleh Instansi

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				Pusat/Pemerintah Daerah lain. - Data Terbuka(Open Data) adalah serangkaian proses untuk menghasilkan pengelolaan data terbuka Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. - Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang dimaksud merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan data terbuka Instansi Pusat/Pemerintah Daerah Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Syarat tercapainya Level 2: Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan interaksi terkait data terbuka seperti pencarian informasi, pengunggahan dan pengunduhan dokumen. Syarat tercapainya Level 3: Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait data terbuka seperti transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data Bukti dokumen yang harus disediakan: Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi untuk transaksi, dimana selain adanya fitur upload (unggah) dan/atau download (unduh) untuk mendukung input dan output

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				data/informasi, maka sistem aplikasi memiliki fungsi mekanisme transaksi data/informasi, validasi data/informasi, kemajuan status approval (persetujuan) data/informasi, dan/atau analitik data baik antar pengguna maupun automasi.
44	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4	4	Pemkot Blitar sudah mempunyai Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang sudah memberikan layanan transaksi. Layanan JDIH Pemkot Blitar sudah terintegrasi dengan JDIH Nasional. Saran untuk perbaikan: saat ini aplikasi JDIH Pemkot Blitar hanya mempunyai 1 jenis transaksi yaitu penambahan data. Untuk pengembangan ke depannya, sebaiknya layanan transaksinya dilengkapi dengan validasi dokumen yang diunggah dan dilengkapi dengan analitik data. Bukti dokumen yang harus disediakan: Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh aplikasi JDIH dapat berbagai pakai sumber data/informasi dengan layanan JDIH Nasional.
45	Layanan Publik Sektor 1	4	5	Aplikasi SILPUSITRON untuk pengelolaan surat dan arsip dinamis. Layanan ini sudah termasuk dalam layanan kearsipan dinamis yang sudah ditanyakan di indikator 37. Untuk kedepannya sebaiknya dipilih aplikasi lain yang mempunyai fitur kolaborasi sehingga dapat mencapai skor 4.
46	Layanan Publik Sektor 2	4	5	Aplikasi Hibah Bansos: aplikasi ini sudah menyediakan layanan transaksi, validasi dan persetujuan serta analitik data.

Nomor Indikator	Nama Indikator	Nilai Tahun 2022	Target Nilai 2023	Rekomendasi Perbaikan
				Untuk mencapai Level 4, bukti dokumen yang harus disediakan adalah: Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh sistem aplikasi telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya. Terdapat notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SPBE, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SPBE. Bukti dokumen yang menunjukkan bahwa aplikasi Hibah Bansor
47	Layanan Publik Sektor 3	4	5	Aplikasi SIPAK online : Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan. Aplikasi ini sudah menyediakan layanan transaksi, validasi dan persetujuan serta analitik data. Layanan ini sudah dintegrasikan dengan aplikasi Dispendukcapil Kota Blitar. Untuk mencapai Level 5, bukti dokumen yang harus disediakan adalah: Dokumentasi yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan oleh aplikasi SIPAK telah ditingkatkan/ dikembangkan layanannya. Terdapat notulensi/ catatan/telaah/laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan layanan SIPAK, bukti undangan rapat pembahasan penyempurnaan Layanan SIPAK, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan SIPAK.

Bab 3. Arsitektur SPBE Kota Blitar

Sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE, Pemerintah Kota Blitar menyusun Arsitektur SPBE Kota Blitar dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional. Untuk itu dalam penyusunannya Arsitektur SPBE Kota Blitar dibangun dan dikembangkan selaras dengan Arsitektur SPBE nasional.

1.8 Kerangka Kerja Arsitektur SPBE

Kerangka kerja Arsitektur SPBE Nasional disusun berdasarkan kerangka kerja SPBE sebagai panduan penerapan dan pengelolaan SPBE nasional. Dengan tujuan mewujudkan keterpaduan antar struktur di dalam Arsitektur SPBE, meniadakan tumpang tindih pelaksanaan proses bisnis, dan memastikan penerapan data dan informasi berbagi pakai menjadi Satu Data Indonesia, melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi berbagi pakai yang terintegrasi.

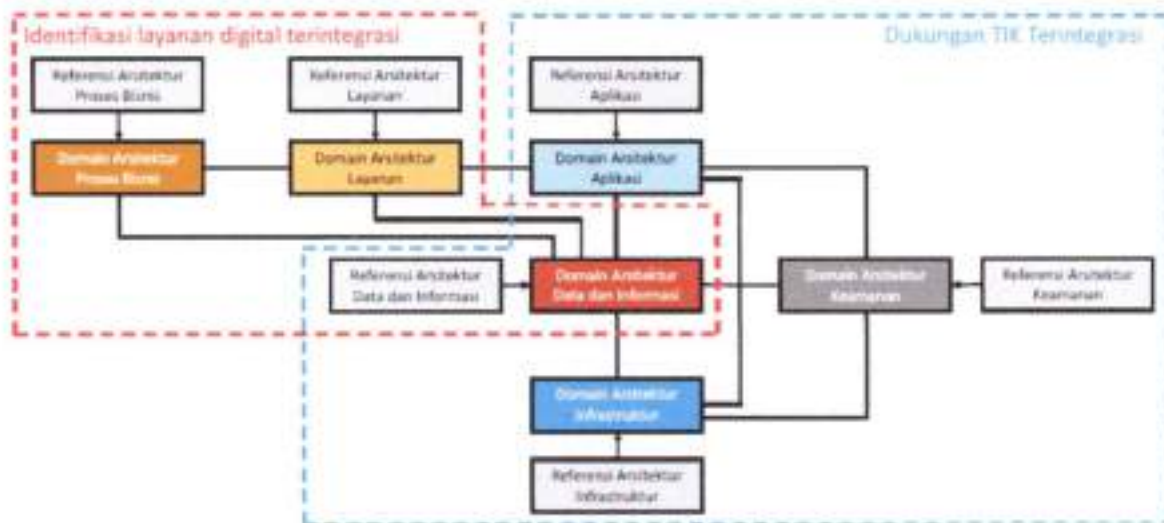
Arsitektur SPBE terdiri atas Referensi Arsitektur SPBE dan Domain Arsitektur SPBE. Referensi arsitektur terdiri atas 6 (enam) komponen, yaitu:

- a. referensi arsitektur proses bisnis;
- b. referensi arsitektur data dan informasi;
- c. referensi arsitektur layanan SPBE;
- d. referensi arsitektur aplikasi SPBE;
- e. referensi arsitektur infrastruktur SPBE; dan
- f. referensi arsitektur keamanan SPBE.

Serupa dengan referensi arsitektur, domain arsitektur juga terdiri atas 6 (enam) komponen, yaitu:

- a. domain arsitektur proses bisnis;
- b. domain arsitektur data dan informasi;
- c. domain arsitektur layanan SPBE;
- d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
- e. domain arsitektur infrastruktur SPBE; dan
- f. domain arsitektur keamanan SPBE.

Secara garis besar keterkaitan antara semua Referensi Arsitektur SPBE dengan semua domain arsitekturnya tergambar pada gambar berikut. Pada ilustrasi kerangka kerja arsitektur dapat dilihat pengelompokan kegiatan penyelenggaraan SPBE yang terkait dengan identifikasi layanan digital terintegrasi (tergambar dalam kotak bergaris putus-putus berwarna merah) dan identifikasi dukungan teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi yang diperlukan (tergambar dalam kotak bergaris putus-putus berwarna biru).



Gambar 0-1 Keterkaitan Antar Komponen dalam Arsitektur SPBE

1.9 Arsitektur Proses Bisnis

1.9.1 Model Interaksi Pemerintahan

Model interaksi pemerintahan menunjukkan bagaimana proses-proses pemerintahan terjadi di dalam lembaga pemerintah. Ini menjadi dasar bagi penyusunan proses bisnis, karena dari model interaksi pemerintahan ini dapat diketahui apa saja yang harus dilakukan dan sekaligus pendukung TIK yang diperlukan. Untuk itu dalam proses penyusunan proses bisnis, diperlukan pemahaman mengenai model interaksi pemerintahan.

1.9.1.1 Interaksi Government To Government (G2G)

Pemerintah secara umum di dalam operasional pemerintahannya, senantiasa berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai lembaga pemerintah lainnya. Dalam konteks Pemerintah Kota Blitar, interaksi dan komunikasi terjadi di internal lingkungan Pemerintah Kota Blitar (antar SKPD, Kecamatan dan kelurahan/desa) maupun antara Pemerintah Kota Blitar dengan lembaga pemerintah lainnya, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Bentuk interaksi dan komunikasi antara Pemerintah Kota Blitar dengan berbagai lembaga pemerintah dapat dijelaskan pada berikut:

Satuan-satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Blitar senantiasa berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain untuk menyukseskan pencapaian visi dan misi Kota Blitar. Bentuk interaksi diantara satuan-satuan kerja ini meliputi:

- Koordinasi perencanaan kegiatan pembangunan di Kota Blitar. Di dalam kegiatan koordinasi ini terjadi pertukaran data diantara satuan-satuan kerja tersebut. Data-data yang dipertukarkan meliputi data untuk keperluan perencanaan maupun data perencanaan itu sendiri.
- Koordinasi penganggaran, dimana setiap satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Blitar akan berkoordinasi mengenai penganggaran kegiatan yang direncanakan. Data-data yang mengalir di dalam kegiatan ini meliputi data-data perencanaan kegiatan, besaran anggaran yang dibutuhkan, maupun besaran anggaran yang disetujui.
- Koordinasi pelaksanaan kegiatan, dimana diantara satuan-satuan kerja tersebut berinteraksi dan berkoordinasi di dalam pelaksanaan kegiatan. Data yang mengalir di dalam kegiatan ini meliputi koordinasi

pelaksanaan kegiatan, seperti surat pemberitahuan, surat survey pengumpulan data, dan lainnya.

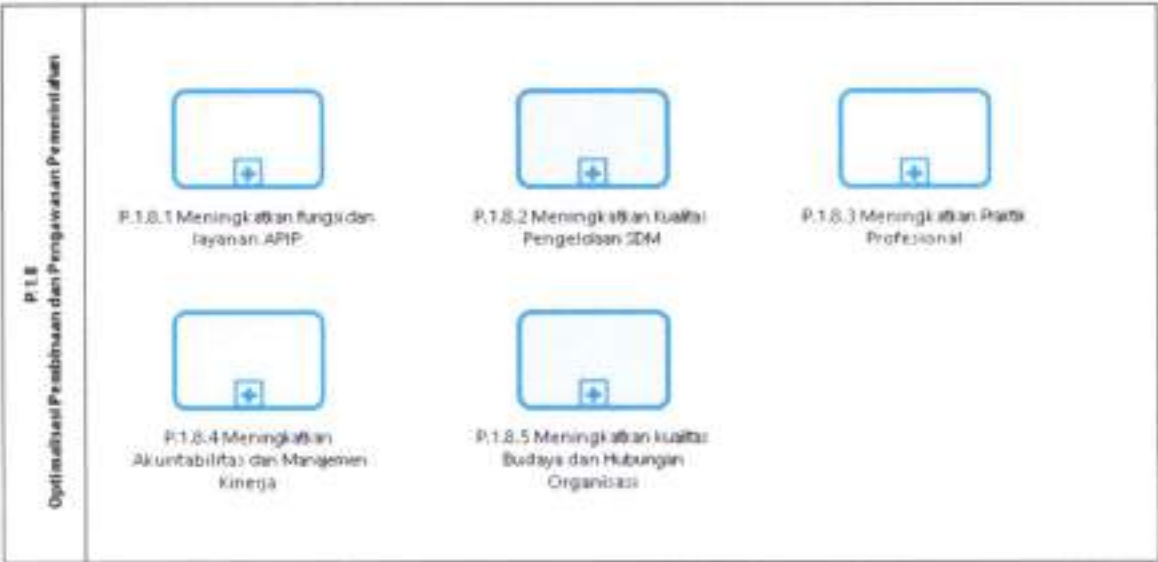
- d. Pelaporan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Pelaporan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Blitar kepada bagian yang ditunjuk untuk mengumpulkan setiap laporan kegiatan.
- e. Interaksi dalam kerangka pelayanan kepegawaian seperti pelayanan kenaikan pangkat, mutasi jabatan maupun pelayanan gaji. Interaksi antar pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, dimana di dalam keseharian pelaksanaan kegiatan pemerintahan, terjadi berbagai interaksi antar pegawai di lingkungan Pemkot Blitar.

1.9.1.2 Interaksi Government To Citizen (G2G)

Pemerintah Kota Blitar pada dasarnya adalah pelayan bagi publik. Oleh karenanya secara langsung Pemerintah Kota Blitar melakukan interaksi dengan publik berupa pelayanan kepada publik. Pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar.

1.9.2 Peta Relasi Proses Bisnis

Inspektorat



BAPPEDA



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

P.4.3 Meningkatkan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	 P.4.3.1 Meningkatkan kesehatan reproduksi dan pembinaan KB
---	---

Dinas Pemuda dan Olahraga

P.2.4 Meningkatkan Daya Saing Pemuda dan Olahraga	 P.2.4.1 Meningkatnya daya saing Pemuda  P.2.4.2 Meningkatkan daya saing olahraga
---	---

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

P.1.4 Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	 P.1.4.1 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah  P.1.4.2 Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemertajutan Aset Daerah
--	--

Dinas Sosial

P.4 Menurunkan Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran	 P.4.1 Meningkatkan Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
--	---

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

P.1 Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	 P.1.6 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
---	--

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

P.1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	 P.1.7 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kearsipan
--	---

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

P.5.4 Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis dan Ber	 P.5.4.1 Menumbuhkan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila
---	---

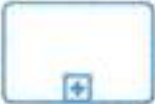
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

P.6.7 Meningkatkan Ketangguhan dalam menghadapi Bencana	 P.6.7.1 Meningkatkan Pengutan Kolaborasi dan Peraturan Daerah mengenai Penanggulangan Bencana  P.6.7.2 Melakukan Strategi untuk lintas lembaga dan pemangku kepentingan dalam pemerangnggulan  P.6.7.3 Melakukan inovasi pengelolaan risiko bencana sesuai proyek risiko bencana  P.6.7.4 Meningkatkan tata kelola penanggulangan bencana berstandar dan profesional  P.6.7.5 Melakukan pengembangan Sistem Informasi, Data dan Logistik Kebencanaan  P.6.7.6 Melakukan Pengujian Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Bencana  P.6.7.7 Meningkatkan pengembangan proses pemilihan pascabencana pd daerah dan mas tendang bencana
---	---

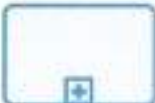
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

P.3.3 Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian dan Perikanan	 P.3.3.1 Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan  P.3.3.2 Meningkatkan produktivitas perikanan budidaya  P.3.3.3 Meningkatkan nilai tambah produk perikanan  P.3.3.4 Meningkatkan Produksi Ternak  P.3.3.5 Meningkatkan Nilai Tambah Produk Perikanan
--	--

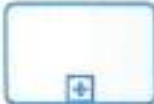
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika

P.1.5 Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi informasi		
	P.1.5.1 Meningkatkan Layanan Publik dan Layanan Administrasi	P.1.5.2 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah
		
	P.1.5.3 Meningkatkan Layanan Kematangan Layanan Publik Sektoral	P.1.5.4 Meningkatkan Manajemen Pemerintahan

Dinas Pendidikan

P.2.2 Meningkatkan kualitas pendidikan			
	P.2.2.1 Meningkatkan rata-rata lama sekolah	P.2.2.2 Meningkatkan harapan lama sekolah	P.2.2.3 Mengoptimalkan SPM Pendidikan

Satuan Polisi Pamong Praja

P.5.3 Meningkatkan Keamanan, Ketertarikan dan Ketertiban Umum Masyarakat				
	S.3.1 Menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat	S.3.2 Menyelenggarakan Penegakan Perda dan Perkada	P.5.3.3 Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat	P.5.3.4 Menyelenggarakan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

P.3.2 Mengembangkan Daya Saling Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	 P.3.2.1 Meningkatkan kunjungan dan pengeluaran wisatawan
---	---

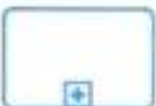
Dinas Perhubungan

P.6.4 Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas Transportasi yang Berkeselamatan	 P.6.4.1 Meningkatkan penyelenggaraan manajemen keselamatan transportasi  P.6.4.2 Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan  P.6.4.3 Meningkatkan sertifikasi dan keselamatan jalan
--	--

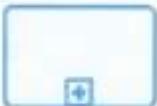
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

P.3.1 Meningkatkan volume usaha di Sektor Perdagangan dan Perindustrian	 P.3.1.1 Meningkatkan Pembudayaan Industri  P.3.1.2 Meningkatkan Kinerja Perdagangan Daerah
---	--

Dinas Lingkungan Hidup

P.6.5 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		P.6.5.1 Meningkatkan tata lingkungan hidup
		P.6.5.2 Meningkatkan kualitas air dan udara
		P.6.5.3 Meningkatkan kualitas lahan
		P.6.5.4 Meningkatkan penghijauan pengsmpahan dan limbah B3

Kecamatan

P.1.6 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		P.1.6.4 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Tingkat Kelurahan
--	---	---

Sekretariat DPRD

P.1.6 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		P.1.6.3 Meningkatkan Fasilitas Pelayanan Anggota Dewan
--	---	--

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja

P.3.4 Meningkatkan Peran Koperasi dan Omzet UMKM	P.3.4.1 Meningkatkan Kemudahan, Perlindungan dan Pembudayaan Koperasi P.3.4.2 Meningkatkan Kemudahan, Perlindungan dan Pembudayaan UMKM
--	---

SetDa Bagian Organisasi

P.1.2 Meningkatkan Kualitas Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan	P.1.2.5 Meningkatkan kualitas koordinasi dan penyusunan kebijakan bagian organisasi
---	--

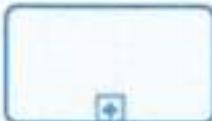
SetDa Bagian Pemerintahan

P.1.2 Meningkatkan Kualitas Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan	P.1.2.1 Meningkatkan kualitas koordinasi, fasilitasi dan perumusan kebijakan bagian pemerintahan P.1.2.2 Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan perumusan kebijakan administrasi kecamatan P.1.2.3 Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan perumusan kebijakan otonomi daerah dan kerja sama
---	--

SetDa Bagian Perekonomian dan Kesra

P.1.2 Meningkatkan Kualitas Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan	 P.1.2.2 Meningkatkan koordinasi, fasilitasi, dan perumusan kebijakan bagian perekonomian dan kesra
---	---

SetDa Bagian Hukum

P.1.2 Meningkatkan Kualitas Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan	 P.1.2.3 Meningkatkan kualitas koordinasi dan penyusunan kebijakan bagian hukum
---	---

SetDa Bagian Layanan PBJ

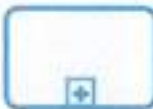
P.1.2 Meningkatkan Kualitas Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan	 P.1.2.4 Meningkatkan kualitas fasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa dan perumusan kebijakan
---	---

SetDa Bagian Umum

P.1.2 Meningkatkan Kualitas Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan	 P.1.2.6 Meningkatkan kualitas pengelolaan bagian umum
---	--

1.9.3 Dekomposisi Proses Bisnis

Inspektorat

P.1.8.1 Meningkatkan fungsi dan layanan AP P	 P.1.8.1.1 Menjamin efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Assasnod)	 P.1.8.1.2 Meningkatkan fungsi Pemeliharaan dalam kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas	 P.1.8.1.3 Penguatan Tata Kelola Pemerintah dan Peningkatan Integritas
--	--	--	--

BAPPEDA

P.1.1.1 Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah	 P.1.1.1.1 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah  P.1.1.1.2 Melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
---	---

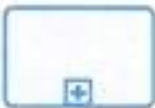
Dinas Pemberdayaan Perempuan

P.4.3.1Meningkatkan kesehatan reproduksi dan pembinaan KB	 P.4.3.1.1 Meningkatkan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan K  P.4.3.1.2 Meningkatkan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)  P.4.3.1.3 Meningkatkan Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pe  P.4.3.1.4 Meningkatkan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Da
---	---

Dinas Pemuda dan Olahraga

P.2.4.1 Meningkatkan daya saing Pemuda	 P.2.4.1.1 Meningkatkan Pembangunan pemuda
--	---

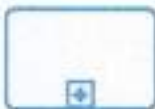
Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

P.1.4.1 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	 P.1.4.1.1 Mengoptimalkan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dan Sistem Penatausahaan Keuangan Daerah  P.1.4.1.2 Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan  P.1.4.1.3 Meningkatkan Kemandirian Daerah
---	---

Dinas Sosial

P.4.1 Meningkatkan Kemandirian Pemeraiu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	 P.4.1.1 meningkatkan pengembangan dan kualitas PKKS  P.4.1.2 meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial  P.4.1.3 meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial
--	---

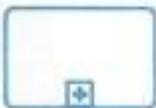
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

P.1.6 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	 P.1.6.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
--	---

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

P.1.7 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kearsipan			
	P.1.7.1 Meningkatkan Pengelolaan Arsip Dinamis	P.1.7.2 Meningkatkan Pengelolaan Arsip Statis	P.1.7.3 Melakukan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan
			
	P.1.7.4 Meningkatkan layanan kearsipan	P.1.7.5 Meningkatkan penyelamatan dan pelestarian arsip	

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

P.5.4.1 Menumbuhkan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila		
	P.5.4.1.1 Meningkatkan pembinaan ideologi Wawasan Kebangsaan	P.5.4.1.2 Meningkatkan pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
		
	P.5.4.1.3 Menumbuhkan pemahaman tentang kewaspadaan nasional & Penanganan Konflik	P.5.4.1.4 Meningkatkan Pembinaan tentang politik dalam Negeri

Satuan Polisi Pamong Praja

5.3.1 Menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat				
	P.5.3.1.1 Melaksanakan Pengamanan kegiatan untuk rasa dan kerukunan masa	P.5.3.1.2 Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan	P.5.3.1.3 Melakukan Patroli Wilayah dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman	P.5.3.1.4 Menyelenggarakan Pengamanan dan Pengawasan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

P.6.7.1. Meningkatkan Penguatan Kebijakan dan Peraturan Daerah Mengenai Penanggulangan Bencana	P.6.7.1.1. Melakukan Penetapan kebijakan prioritas peningkatan kapasitas Daerah
---	--

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

P.3.3.1 Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan		P.3.3.1.1 Meningkatkan sarana pertanian		P.3.3.1.2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana pertanian		P.3.3.1.3 Meningkatkan pengendalian hama penyakit tanaman
		P.3.3.1.4 Meningkatkan kualitas SDM pertanian		P.3.3.1.5 Meningkatkan pengawasan perijinan usaha pertanian		P.3.3.1.6 Meningkatkan fungsi lahan

Dinas Pendidikan

P.2.2.1 Meningkatkan rata-rata lama sekolah		P.2.2.1.1 Mengurangi angka putus sekolah		P.2.2.1.2 Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kesetaraan dan Non Formal		P.2.2.1.3 Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
--	--	---	--	--	--	--

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

P.3.2.1 Meningkatkan kunjungan dan pengeluaran wisatawan		P.3.2.1.1 Mendorong Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata
		P.3.2.1.2 Meningkatkan pelayanan pariwisata
		P.3.2.1.3 Mengembangkan ekonomi kreatif
		P.3.2.1.4 Mengembangkan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi kreatif

Dinas Perhubungan

P.6.4.1 Meningkatkan penyelenggaraan manajemen keselamatan transportasi		P.6.4.1.1 Meningkatkan pembinaan keselamatan transportasi
		P.6.4.1.2 Mengkoordinasikan peningkatan pelayanan keselamatan transportasi
		P.6.4.1.3 Meningkatkan dan mengawasi angkutan perantara darat dan penyebrangan
		P.6.4.1.4 Mengelola dan mengembangkan parkir

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

P.3.1.1 Meningkatkan Pemberdayaan Industri		P.3.1.1.1 Meningkatkan kemampuan pelaku UKM
		P.3.1.1.2 Fasilitas Bantuan informasi pasar produk UKM
		P.3.1.1.3 Fasilitas penerapan teknologi di bidang industri
		P.3.1.1.4 Penyelenggaraan pengawasan barang pokok dan penting

Dinas Lingkungan Hidup

P.6.5.1 Meningkatkan tata lingkungan hidup	P.6.5.1.1 Menyusun perencanaan lingkungan hidup P.6.5.1.2 Meningkatkan komunikasi lingkungan P.6.5.1.3 Meningkatkan Penanganan pengaduan lingkungan hidup
--	---

Kecamatan

P.1.6.4 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Tingkat Kewilayahan	P.1.6.4.1 Optimalisasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik P.1.6.4.2 Penguatan perencanaan pembangunan masyarakat Kelurahan P.1.6.4.3 Penguatan Koordinasi dan Pendataan Pemerintahan dan Ketertarikan Umum P.1.6.4.4 Fasilitas Penyelenggaraan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat P.1.6.4.5 Optimalisasi Pelayanan Administrasi
---	--

Sekretariat DPRD

P.1.6.3 Meningkatkan Fasilitas Pelayanan Anggota Dewan	P.1.6.3.1 Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pembentukan Peraturan Daerah P.1.6.3.2 Fasilitas Pembahasan Kebijakan Anggaran P.1.6.3.3 Peningkatan Fasilitas DPRD dalam Fungsi Pengawasan P.1.6.3.4 Fasilitas Peningkatan Kapasitas anggota DPRD P.1.6.3.5 Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat P.1.6.3.6 Fasilitas Administrasi dan Kesejahteraan Anggota DPRD
--	--

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika

P.1.5.1 Meningkatkan Layanan Publik dan Layanan Administrasi	P.1.5.1.1 Meningkatkan pengelolaan informasi publik P.1.5.1.2 Meningkatkan pelayanan komunikasi publik
--	--

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja

P.3.4.1 Meningkatkan Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi	P.3.4.1.1 Meningkatkan Kemudahan Penyelenggaraan Koperasi P.3.4.1.2 Meningkatkan Perlindungan Koperasi P.3.4.1.3 Meningkatkan Pemberdayaan Koperasi melalui form usaha koperasi P.3.4.1.4 Meningkatkan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi P.3.4.1.5 Peningkatan dan pemertanian kesehatan koperasi P.3.4.1.6 Meningkatkan Kapasitas Kompetensi dan SDM Koperasi
--	--

SetDa Bagian Organisasi

P.1.2.5 Meningkatkan kualitas koordinasi dan penyusunan kebijakan bagian organisasi	P.1.2.5.1 Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan koordinasi Eksternitas dan Analisis Jabatan P.1.2.5.2 Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan koordinasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana P.1.2.5.3 Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan kinerja dan Reformasi Birokrasi
---	---

SetDa Bagian Pemerintahan

P.1.2.1 Meningkatkan kualitas koordinasi, fasilitasi, dan penunsaan
kegiatan bagian geomatika



P.1.2.1.1 Memfasilitasi Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah
(Forakompda)



P.1.2.1.2 Menyusun IPPD dan
RUPD



P.1.2.1.3 Memfasilitasi topografi
daerah dan pemetaan
sekitarnya



P.1.2.1.4 Memfasilitasi dan
koordinasi pelaksanaan Pemis



P.1.2.1.5 Menyusun bahan
penetapan, penghapusan
pembentukan dan perubahan
kelurahan dan kecamatan

SetDa Bagian Perekonomian dan Kesra

P.1.2.2 Meningkatkan koordinasi, fasilitasi, dan penyuksunan kebijakan bagian perekonomian dan kesra	P.1.2.2.1 Memfasilitasi perumusan kebijakan bina mental spiritual P.1.2.2.2 Memfasilitasi perumusan kebijakan kesejahteraan sosial dan masyarakat P.1.2.2.3 Memfasilitasi perumusan kebijakan perekonomian
---	---

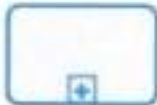
SetDa Bagian Hukum

P.1.2.3 Meningkatkan kualitas koordinasi dan penyusunan kebijakan bagian hukum	P.1.2.3.1 Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan koordinasi penyusunan produk hukum daerah P.1.2.3.2 Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan koordinasi Bantuan Hukum P.1.2.3.3 Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan koordinasi Dokumentasi dan Informasi
---	---

SetDa Bagian Layanan PBJ

P.1.2.4 Meningkatkan kualitas fasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa dan penyuksunan kebijakan	P.1.2.4.1 Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan koordinasi Penyusunan dan Pengendalian Pro P.1.2.4.2 Memfasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa P.1.2.4.3 Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan koordinasi Penyusunan Layanan Pengadaan Set
---	---

SetDa Bagian Umum

P1.2.6 Meningkatkan kualitas pengelolaan bagian umum			
	P1.2.6.1 Meningkatkan kualitas penyediaan rumah tangga dan Perlengkapan	P1.2.6.2 Meningkatkan kualitas Tampilan Komunikasi Pemohon dan Protokol	P1.2.6.3 Meningkatkan kualitas pengelolaan Tata Usaha Pemohon dan keuangan

1.9.4 Pemetaan Proses Bisnis dan Perangkat Daerah

Pemetaan proses bisnis perangkat daerah mengacu pada Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat 1 dan Tingkat 2 yang telah ditetapkan. Pada tabel berikut dapat dilihat taksonomi referensi arsitektur proses bisnis pada tingkat 1 dan tingkat 2.

Tabel 0-1 Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB) Level 1 dan 2

Ko de	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Pertahanan dan Luar Negeri (01)		
01. 01	Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertahanan negara, termasuk di dalamnya pengelolaan instalasi strategis dan potensi pertahanan, strategi pertahanan, penanggulangan ancaman, pertahanan siber.
01. 02	Urusan Luar Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri
Ekonomi dan Industri (02)		
02. 01	Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang penumbuh-kembangan industri dalam negeri, termasuk di dalamnya pengelolaan ekonomi kreatif dan produk digital.
02. 02	Perdagangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pengelolaan perdagangan termasuk di dalamnya perdagangan dalam negeri, ekspor impor, dan perdagangan berjangka.
02. 03	Pertanian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian termasuk di dalamnya peningkatan produksi pertanian, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, ketahanan pangan, serta keamanan hayati.

Ko de	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
02.04	Perkebunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perkebunan termasuk di dalamnya pengembangan bio energi dan keberlanjutan usaha perkebunan
02.05	Peternakan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang peternakan termasuk di dalamnya kesehatan masyarakat veteriner dan perikanan budidaya.
02.06	Perikanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perikanan termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat perikanan serta pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut.
02.07	Badan Usaha Milik Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pengelolaan badan usaha milik negara.
02.08	Investasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pembinaan penanaman modal antara lain manajemen penanaman modal, manajemen perizinan penanaman modal, dan litigasi penanaman modal.
02.09	Koperasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pembinaan koperasi.
02.10	Usaha Kecil Dan Menengah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pembinaan usaha kecil dan menengah.
02.11	Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan termasuk di dalamnya pengelolaan faktor pendukung kepariwisataan dan penyusunan rencana induk kepariwisataan nasional.
Pembangunan Daerah (03)		
03.01	Pekerjaan Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum.
03.02	Transmigrasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transmigrasi.
03.03	Transportasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transportasi.
03.04	Perumahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan.
03.05	Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)		
04.01	Kesehatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan termasuk di dalamnya kefarmasian dan alat kesehatan, P4GN, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta

Ko de	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		pengawasan obat dan makanan.
04.02	Sosial	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial termasuk di dalamnya manajemen pencarian dan pertolongan, pembangunan manusia, penanganan fakir miskin, dan penanggulangan bencana.
04.03	Pemberdayaan Perempuan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan.
Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)		
05.01	Hukum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hukum termasuk di dalamnya pengelolaan masyarakat dan penyelenggaraan keimigrasian.
05.02	Keamanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keamanan.
05.03	Hak Asasi Manusia	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak atas kekayaan intelektual.
Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)		
06.01	Pendidikan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan termasuk di dalamnya pembinaan perpustakaan dan manajemen tenaga pendidikan.
06.02	Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ketenagakerjaan termasuk di dalamnya manajemen pekerja migran Indonesia serta pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja.
06.03	Ilmu Pengetahuan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ilmu pengetahuan.
06.04	Teknologi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang teknologi.
06.05	Pemuda	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)		
07.01	Pertambangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertambangan
07.02	Energi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang energi termasuk di dalamnya ketenagalistrikan dan konservasi energi.
07.03	Kehutanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kehutanan termasuk di dalamnya peningkatan daya dukung DAS dan hutan lindung serta perlindungan kawasan hutan.

Ko de	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
07.04	Kelautan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan.
07.05	Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup termasuk di dalamnya manajemen iklim dan cuaca dan pengelolaan sarana dan prasarana iklim dan cuaca.
Budaya dan Agama (08)		
08.01	Agama	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang agama.
08.02	Kebudayaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan termasuk di dalamnya pembinaan arsip nasional, dan pembinaan perfilman nasional.
08.03	Olahraga	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keolahragaan.
Pemerintahan Umum (09)		
09.01	Dalam Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam urusan dalam negeri.
09.02	Keuangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan negara
09.03	Informasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi termasuk di dalamnya pengelolaan sumber daya dan perangkat informatika, penyiaran radio publik, dan penyiaran televisi publik.
09.04	Komunikasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi.
09.05	Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional termasuk di dalamnya pengawasan penyimpangan pembangunan, manajemen ekonomi makro, dan dukungan strategis program/kebijakan.
09.06	Aparatur Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan aparatur negara termasuk di dalamnya manajemen pelayanan publik, manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik, kearsipan nasional, dan kerjasama antar instansi.
09.07	Kesekretariatan Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sekretariat negara termasuk di dalamnya hubungan dengan Lembaga Negara, manajemen ketahanan nasional, dan pengawasan pemerintah.
09.08	Pertanahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan termasuk di dalamnya litigasi pertanahan dan pengelolaan infrastruktur pertanahan.

Ko de	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
09.09	Kependudukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan termasuk di dalamnya pendampingan hukum dalam rangka pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan partisipasi masyarakat.

1.9.5 Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis

Dalam domain arsitektur proses bisnis pemerintahan yang diemban oleh instansi pemerintah, selanjutnya diklasifikasikan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur proses bisnis yang terdiri dari 4 (empat) tingkat, yaitu:

- sektor pemerintahan, yang mengelompokkan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- urusan pemerintahan, yang menjelaskan turunan dari sektor pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- fungsi pemerintahan, yang menjelaskan lebih rinci dari urusan pemerintahan di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), yang selanjutnya Instansi h.lsat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional;
- sub fungsi pemerintahan yang menjelaskan lebih rinci dari fungsi pemerintahan sebagai tingkat 4 (keempat). Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyusun pada stntktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan dan layanan terintegrasi yang akan dibangun sebagai bagian dari layanan digital nasional.

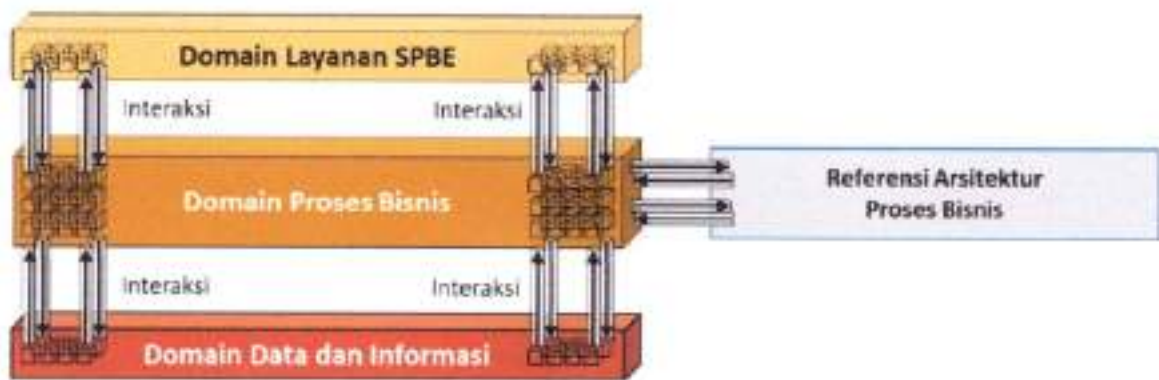


Gambar 0-2 Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis

1.9.6 Peta Relasi dan Keterkaitan Antar Domain

Domain arsitektur proses bisnis ini terdiri dari berbagai macam proses bisnis pemerintahan yang akan menghasilkan berbagai macam data dan informasi, serta akan mendefinisikan layanan pemerintah, sebagaimana terlihat ilustrasi keterkaitan pada Gambar 9, dimana domain proses bisnis akan berelasi langsung dengan domain layanan SPBE dan domain data dan

informasi. Dengan adanya keterkaitan antar domain arsitektur lainnya dalam SPBE, maka dapat direlasikan informasi-informasi lainnya terkait urusan pemerintahan yang dilakukan, sebagai contoh melihat layanan-layanan yang dihasilkan dalam urusan pemerintahan tersebut, atau aplikasi dan infrastruktur apa- saja yang mendukung, atau data dan informasi apa yang diperlukan atau dihasilkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.



Gambar 0-3 Relasi langsung pada Domain Proses Bisnis

1.9.7 Atribut Metadata Arsitektur Proses Bisnis

Pemetaan proses bisnis pada dilakukan dengan menggunakan metadata dan pemetaan proses bisnis yang telah didefinisikan oleh perangkat daerah. Pada tabel berikut ini dapat dilihat atribut metadata arsitektur proses bisnis.

Tabel 0-2 Atribut Metadata Arsitektur Proses Bisnis

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Bisnis/Urusan	Merupakan urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas unit kerja/perangkat daerah.
3	Uraian Bisnis/Urusan	Merupakan uraian dari urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas unit kerja/perangkat daerah.
4	Kode Model Referensi	Merupakan kode model referensi SPBE yang sesuai dengan nama bisnis/urusan yang dipilih

1.9.8 Referensi Arsitektur Proses Bisnis SPBE Nasional

Pemetaan proses bisnis perangkat daerah mengacu pada Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat 1 dan Tingkat 2 yang telah ditetapkan. Pada tabel berikut dapat dilihat taksonomi referensi arsitektur proses bisnis pada tingkat 1 dan tingkat 2.

Tabel 0-3 Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB) Level 1 dan 2

Ko de	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Pertahanan dan Luar Negeri (01)		
01. 01	Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertahanan negara, termasuk di dalamnya pengelolaan instalasi strategis dan potensi pertahanan, strategi pertahanan, penanggulangan ancaman, pertahanan siber.
01. 02	Urusan Luar Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri
Ekonomi dan Industri (02)		
02. 01	Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang penumbuh-kembangan industri dalam negeri, termasuk di dalamnya pengelolaan ekonomi kreatif dan produk digital.
02. 02	Perdagangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pengelolaan perdagangan termasuk di dalamnya perdagangan dalam negeri, ekspor impor, dan perdagangan berjangka.
02. 03	Pertanian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian termasuk di dalamnya peningkatan produksi pertanian, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, ketahanan pangan, serta keamanan hayati.
02. 04	Perkebunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perkebunan termasuk di dalamnya pengembangan bio energi dan keberlanjutan usaha perkebunan
02. 05	Peternakan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang peternakan termasuk di dalamnya kesehatan masyarakat veteriner dan perikanan budidaya.
02. 06	Perikanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perikanan termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat perikanan serta pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut.
02. 07	Badan Usaha Milik Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pengelolaan badan usaha milik negara.
02. 08	Investasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pembinaan penanaman modal antara lain manajemen penanaman modal, manajemen perizinan penanaman modal, dan litigasi penanaman modal.
02. 09	Koperasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pembinaan koperasi.
02.	Usaha Kecil Dan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam

Ko de	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
10	Menengah	pembinaan usaha kecil dan menengah.
02. 11	Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan termasuk di dalamnya pengelolaan faktor pendukung kepariwisataan dan penyusunan rencana induk kepariwisataan nasional.
Pembangunan Daerah (03)		
03. 01	Pekerjaan Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum.
03. 02	Transmigrasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transmigrasi.
03. 03	Transportasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transportasi.
03. 04	Perumahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan.
03. 05	Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)		
04. 01	Kesehatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan termasuk di dalamnya kefarmasian dan alat kesehatan, P4GN, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta pengawasan obat dan makanan.
04. 02	Sosial	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial termasuk di dalamnya manajemen pencarian dan pertolongan, pembangunan manusia, penanganan fakir miskin, dan penanggulangan bencana.
04. 03	Pemberdayaan Perempuan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan.
Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)		
05. 01	Hukum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hukum termasuk di dalamnya pengelolaan masyarakat dan penyelenggaraan keimigrasian.
05. 02	Keamanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keamanan.
05. 03	Hak Asasi Manusia	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak atas kekayaan intelektual.
Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)		
06. 01	Pendidikan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan termasuk di dalamnya pembinaan perpustakaan dan manajemen tenaga

Ko de	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		pendidikan.
06.02	Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ketenagakerjaan termasuk di dalamnya manajemen pekerja migran Indonesia serta pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja.
06.03	Ilmu Pengetahuan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ilmu pengetahuan.
06.04	Teknologi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang teknologi.
06.05	Pemuda	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)		
07.01	Pertambangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertambangan
07.02	Energi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang energi termasuk di dalamnya ketenagalistrikan dan konservasi energi.
07.03	Kehutanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kehutanan termasuk di dalamnya peningkatan daya dukung DAS dan hutan lindung serta perlindungan kawasan hutan.
07.04	Kelautan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan.
07.05	Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup termasuk di dalamnya manajemen iklim dan cuaca dan pengelolaan sarana dan prasarana iklim dan cuaca.
Budaya dan Agama (08)		
08.01	Agama	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang agama.
08.02	Kebudayaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan termasuk di dalamnya pembinaan arsip nasional, dan pembinaan perfilman nasional.
08.03	Olahraga	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang olahraga.
Pemerintahan Umum (09)		
09.01	Dalam Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam urusan dalam negeri.
09.02	Keuangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan negara
09.03	Informasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi termasuk di dalamnya pengelolaan sumber daya dan perangkat

Ko de	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		informatika, penyiaran radio publik, dan penyiaran televisi publik.
09. 04	Komunikasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi.
09. 05	Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional termasuk di dalamnya pengawasan penyimpangan pembangunan, manajemen ekonomi makro, dan dukungan strategis program/kebijakan.
09. 06	Aparatur Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan aparatur negara termasuk di dalamnya manajemen pelayanan publik, manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik, kearsipan nasional, dan kerjasama antar instansi.
09. 07	Keseekretariatan Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keseekretariatan negara termasuk di dalamnya hubungan dengan Lembaga Negara, manajemen ketahanan nasional, dan pengawasan pemerintah.
09. 08	Pertanahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan termasuk di dalamnya litigasi pertanahan dan pengelolaan infrastruktur pertanahan.
09. 09	Kependudukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan termasuk di dalamnya pendampingan hukum dalam rangka pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan partisipasi masyarakat.

1.9.9 Model Domain dan Arsitektur Proses Bisnis Kota Blitar

1.9.9.1 Domain Arsitektur Proses Bisnis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Tabel 0-4 Domain Arsitektur Proses Bisnis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
Pengelolaan Informasi Publik	Meningkatnya tatakelola dan layanan pemerintah berbasis elektronik	indeks layanan SPBE	85%		Diskominfo	RAB.09 Pemerintah an Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.05 Pengelolaan Informasi Publik	RAB 09.03.05.01 Pengelolaan Informasi Publik	Pemerintah Kota Blitar
Layanan Informasi Publik	Meningkatnya tatakelola dan layanan pemerintah berbasis elektronik	indeks layanan SPBE	85%		Diskominfo	RAB.09 Pemerintah an Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.05 Pengelolaan Informasi Publik	RAB 09.03.05.02 Layanan Informasi Publik	Pemerintah Kota Blitar
Kemitraan Komunikasi Dan Informasi Publik	Meningkatnya tatakelola dan layanan pemerintah berbasis elektronik	indeks layanan SPBE	85%		Diskominfo	RAB.09 Pemerintah an Umum	RAB.09.04 Komunikasi	RAB.09.04.02 Pengelolaan Komunikasi Publik	RAB 09.04.02.01 Kemitraan Komunikasi Dan Informasi Publik	Pemerintah Kota Blitar
Pembangunan Dan Pengembangan Sarana	Meningkatnya tatakelola dan layanan pemerintah	Indeks Tata kelola SPBE	91%		Diskominfo	RAB.09 Pemerintah an Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.01 Pengelolaan Informatika	RAB.09.03.01.01 Pembangunan Dan Pengembara	Pemerintah Kota Blitar

Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
Prasarana Tik	berbasis elektronik								n Sarana Prasarana Tik	
Pengembangan Aplikasi Informatika	Meningkatnya tatakelola dan layanan pemerintah berbasis elektronik	Indeks Tata kelola SPBE	91%		Diskominfo	RAB.09 Pemerintah an Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.01 Pengelolaan Informatika	RAB 09.03.01.02 Pengembangan Aplikasi Informatika	Pemerintah Kota Blitar
Pemberdayaan TIK	Meningkatnya tatakelola dan layanan pemerintah berbasis elektronik	Indeks Tata kelola SPBE	91%		Diskominfo	RAB.09 Pemerintah an Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.01 Pengelolaan Informatika	RAB 09.03.01.03 Pemberdayaan TIK	Pemerintah Kota Blitar
Statistik	Meningkatnya tatakelola dan layanan pemerintah berbasis elektronik	Prosentase ketermanfaatan data statistik sektoral	100 %		Diskominfo	RAB.09 Pemerintah an Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.03 Pengelolaan Data Statistik	RAB 09.03.03.01 Statistik	Pemerintah Kota Blitar
Persandian	Meningkatnya tatakelola dan layanan pemerintah berbasis elektronik	Prosentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan persandian	29%		Diskominfo	RAB.09 Pemerintah an Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.01 Pengelolaan Informatika	RAB 09.03.01.04 Persandian	Pemerintah Kota Blitar

1.9.9.2 Domain Arsitektur Proses Bisnis Sekretariat Daerah

Tabel 0-5 Domain Arsitektur Proses Bisnis Sekretariat Daerah

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
Fasilitasi perumusan kebijakan bina mental spiritual	menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah di bidang sarana dan prasarana spiritual	Meningkatkan koordinasi, fasilitasi, dan perumusan kebijakan bagian perekonomian dan kesejahteraan rakyat	Jumlah Kebijakan Pusat yang ditindaklanjuti	100 %	91,41%	Sekretariat Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.08.01 Agama	RAB.08.01.01 Bimbingan Masyarakat Keagamaan	RAB.08.01.01.01 Fasilitasi perumusan kebijakan bina mental spiritual	Pemerintah Kota Blitar

1.9.9.3 Domain Arsitektur Proses Bisnis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tabel 0-6 Domain Arsitektur Proses Bisnis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Holtikultura	Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan Holtikultura	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.02 Peningkatan Produksi Pertanian	RAB.02.03.02.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Pemerintah Kota Blitar

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
dan Perkebunan	dan Perkebunan	Pertanian dan Perikanan								Hortikultura dan Perkebunan	
Peningkatan nilai tambah produk perikanan	Meningkatkan nilai tambah produk perikanan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian dan Perikanan				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.06 Perikanan	RAB.02.06.03 Pengelolaan Hasil Perikanan	RAB.02.06.03.01 Peningkatan nilai tambah produk perikanan	Pemerintah Kota Blitar
Peningkatan Produksi Ternak	Meningkatkan Produksi Ternak	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian dan Perikanan				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 Peternakan	RAB.02.05.05 Produksi Pakan Dan Ternak	RAB.02.05.05.01 Peningkatan Produksi Ternak	Pemerintah Kota Blitar
Peningkatan Nilai Tambah Produksi Peternakan	Meningkatkan Nilai Tambah Produksi Peternakan	Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian dan Perikanan				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 Peternakan	RAB.02.05.05 Produksi Pakan Dan Ternak	RAB.02.05.05.01.02 Peningkatan Nilai Tambah Produksi Peternakan	Pemerintah Kota Blitar

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
Peningkatan ketersediaan pangan	Meningkatkan ketersediaan pangan	Menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.04 Ketahanan Pangan	RAB.02.03.04.01 Peningkatan ketersediaan pangan	Pemerintah Kota Blitar
Peningkatan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan	Meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan	Menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.04 Ketahanan Pangan	RAB.02.03.04.02 Peningkatan keterjangkauan masyarakat terhadap pangan	Pemerintah Kota Blitar
Meningkatkan pemanfaatan pangan masyarakat	Meningkatkan pemanfaatan pangan masyarakat	Menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.04 Ketahanan Pangan	RAB.02.03.04.03 Meningkatkan pemanfaatan pangan masyarakat	Pemerintah Kota Blitar

1.9.9.4 Domain Arsitektur Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 0-7 Domain Arsitektur Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
Peningkatan Pemberdayaan Industri	Meningkatkan	Meningkatkan volume usaha di Sektor				Dinas Perindustrian dan	RAB.02 Ekonomi	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.01 Pembinaan	RAB.02.01.01.01 Peningkatan	Pemerintah Kota Blitar

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
	Pemberdayaan Industri	Perdagangan dan Perindustrian				Perdagangan	dan Industri		Industri Regional	Pemberdayaan Industri	
Peningkatan Kinerja Perdagangan Daerah	Meningkatkan Kinerja Perdagangan Daerah	Meningkatkan volume usaha di Sektor Perdagangan dan Perindustrian				Dinas Perindustrian dan Perdagangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 Perdagangan	RAB.02.02.03 Perdagangan Dalam Negeri	RAB.02.02.03.01 Peningkatan Kinerja Perdagangan Daerah	Pemerintah Kota Blitar

1.9.9.5 Domain Arsitektur Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan

Tabel 0-8 Domain Arsitektur Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
Peningkatan Kemudahan Penyelenggaraan Koperasi	Meningkatkan Kemudahan Penyelenggaraan Koperasi	Meningkatkan Peran Koperasi dan Omzet UMKM				Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.09 Koperasi	RAB.02.09.01 Pembinaan Koperasi	RAB.02.09.01.01 Peningkatan Kemudahan Penyelenggaraan Koperasi	Pemerintah Kota Blitar

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
Peningkatan Perlindungan Koperasi	Meningkatkan Perlindungan Koperasi	Meningkatkan Peran Koperasi dan Omzet UMKM				Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.09 Koperasi	RAB.02.09.01 Pembinaan Koperasi	RAB.02.09.01.02 Peningkatan Perlindungan Koperasi	Pemerintah Kota Blitar
Peningkatan Pemberdayaan Koperasi melalui Iklim usaha koperasi	Meningkatkan Pemberdayaan Koperasi melalui Iklim usaha koperasi	Meningkatkan Peran Koperasi dan Omzet UMKM				Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.09 Koperasi	RAB.02.09.03 Pemberdayaan Dan Pembiayaan Koperasi	RAB.02.09.03.01 Peningkatan Pemberdayaan Koperasi melalui Iklim usaha koperasi	Pemerintah Kota Blitar
Melaksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Melaksanakan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatkan Peran Koperasi dan Omzet UMKM				Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.09 Koperasi	RAB.02.09.04 Pengawasan Koperasi	RAB.02.09.04.01 Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemerintah Kota Blitar
Penilaian dan pemeriksaan kesehatan koperasi	Penilaian dan pemeriksaan kesehatan koperasi	Meningkatkan Peran Koperasi dan Omzet UMKM				Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.09 Koperasi	RAB.02.09.04 Pengawasan Koperasi	RAB.02.09.04.02 Penilaian dan pemeriksaan kesehatan koperasi	Pemerintah Kota Blitar
Peningkatan Kapasitas Kompetensi	Meningkatkan Kapasitas Kompetensi	Meningkatkan Peran Koperasi				Dinas Koperasi, UKM dan	RAB.02 Ekonomi	RAB.02.09 Koperasi	RAB.02.09.01 Pembinaan Koperasi	RAB.02.09.01.03 Peningkatan	Pemerintah Kota Blitar

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
dan SDM Koperasi	dan SDM Koperasi	dan Omzet UMKM				Ketenagakerjaan	dan Industri			Kapasitas Kompetensi dan SDM Koperasi	
Peningkatan Kemudahan UKM	Meningkatkan Kemudahan UKM	Meningkatkan Peran Koperasi dan Omzet UMKM				Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 Usaha Kecil Dan Menengah	RAB.02.10.01 Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah	RAB.02.10.01.01 Peningkatan Kemudahan UKM	Pemerintah Kota Blitar
Peningkatan Pemberdayaan UMK	Meningkatkan Pemberdayaan UMK	Meningkatkan Peran Koperasi dan Omzet UMKM				Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 Usaha Kecil Dan Menengah	RAB.02.10.04 Pemberdayaan Dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	RAB.02.10.04.01 Peningkatan Pemberdayaan UMK	Pemerintah Kota Blitar
Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Menurunkan Tingkat Pengangguran				Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.02 Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	RAB.06.02.02.01 Peningkatan Kesempatan Kerja	Pemerintah Kota Blitar
Peningkatan Kualitas dan Produktivitas	Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas	Menurunkan Tingkat Pengangguran				Dinas Koperasi, UKM dan	RAB.06 Pendidikan dan	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.01 Peningkatan Kompetensi	RAB.06.02.01.01 Peningkatan Kualitas dan	Pemerintah Kota Blitar

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
s Angkatan Kerja	s Angkatan Kerja					Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja		dan Daya Saing Tenaga Kerja Serta Produktifitas	Produktivitas Angkatan Kerja	
Peningkatan Pelaksanaan Hubungan Industrial	Meningkatkan Pelaksanaan Hubungan Industrial	Menurunkan Tingkat Pengangguan				Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.0 3 Peningkatan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	RAB.06.02.0 3.01 Peningkatan Pelaksanaan Hubungan Industrial	Pemerintah Kota Blitar
Peningkatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	Meningkatkan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	Menurunkan Tingkat Pengangguan				Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.0 4 Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	RAB.06.02.0 4.01 Peningkatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	Pemerintah Kota Blitar

1.9.9.6 Domain Arsitektur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Tabel 0-9 Domain Arsitektur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependensi)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependensi)	→ RAB Level 2 (Dependensi)	→ RAB Level 3 (Dependensi)	→ RAB Level 4 (Dependensi)	→ Instansi (Dependensi)
Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Mendorong Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Mengembangkan Daya Saing Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 Pariwisata	RAB.02.11.01 Pembinaan Pariwisata Regional	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Pemerintah Kota Blitar
Peningkatan pemasaran pariwisata	Meningkatkan pemasaran pariwisata	Mengembangkan Daya Saing Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 Pariwisata	RAB.02.11.01 Pembinaan Pariwisata Regional	Peningkatan pemasaran pariwisata	Pemerintah Kota Blitar
Pengembangan ekonomi kreatif	Mengembangkan ekonomi kreatif	Mengembangkan Daya Saing Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.07 Pengelolaan Ekonomi Kreatif Dan Produk Digital	Pengembangan ekonomi kreatif	Pemerintah Kota Blitar
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi kreatif	Mengembangkan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi kreatif	Mengembangkan Daya Saing Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.07 Pengelolaan Ekonomi Kreatif Dan Produk Digital	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan ekonomi kreatif	Pemerintah Kota Blitar
Peningkatan	Meningkatkan	Meningkatkan Pelestarian				Dinas Pariwisata	RAB.08 Budaya	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.02	Peningkatan	Pemerintah Kota Blitar

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
pengelolaan cagar budaya lokal	pengelolaan cagar budaya lokal	Nilai-Nilai Budaya Lokal				dan Kebudayaan	dan agama	n	Pelestarian Cagar Budaya	pengelolaan cagar budaya lokal	
Peningkatan pengelolaan museum	Meningkatkan pengelolaan museum	Meningkatkan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.01 Kesenjajaran	Peningkatan pengelolaan museum	Pemerintah Kota Blitar
Optimalisasi pengelolaan objek pemajuan kebudayaan	Mengoptimalkan pengelolaan objek pemajuan kebudayaan	Meningkatkan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal				Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	RAB.08 Budaya dan agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.03 Manajemen Budaya	Optimalisasi pengelolaan objek pemajuan kebudayaan	Pemerintah Kota Blitar

1.9.9.7 Domain Arsitektur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 0-10 Domain Arsitektur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 Perdagangan	RAB.02.02.01 Pembinaan Perdagangan Regional	RAB.02.02.01.01 Peningkatan Kualitas	Pemerintah Kota Blitar

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
Peningkatan Jumlah Investor dan Nilai Investasi	Meningkatkan Jumlah Investor dan Nilai Investasi	Baik dan Bersih Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi unggul dan ekonomi kreatif				Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 Investasi	RAB.02.08.01 Pembinaan Penanaman Modal Regional	Pelayanan Publik RAB.02.08.01.01 Peningkatan Jumlah Investor dan Nilai Investasi	Pemerintah Kota Blitar

1.9.9.8 Domain Arsitektur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 0-11 Domain Arsitektur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
Perencanaan pembangunan jalan, jembatan	Perencanaan pembangunan jalan, jembatan	Meningkatkan kualitas Jalan dan Jembatan				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02.01 Perencanaan pembangunan jalan, jembatan	Pemerintah Kota Blitar

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	Unit Kerja (Dependency)	RAB Level 1 Nasional (Dependency)	RAB Level 2 (Dependency)	RAB Level 3 (Dependency)	RAB Level 4 (Dependency)	Instansi (Dependency)
Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan	Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan	Meningkatkan kualitas Jalan dan Jembatan				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02.02 Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan	Pemerintah Kota Blitar
Preservasi Jalan dan Jembatan	Preservasi Jalan dan Jembatan	Meningkatkan kualitas Jalan dan Jembatan				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02.03 Preservasi Jalan dan Jembatan	Pemerintah Kota Blitar
Peningkatan Kualitas Tata Bangunan	Peningkatan Kualitas Tata Bangunan	Meningkatkan Kualitas Keciptakaryaan (Tata Bangunan) dan Bina Konstruksi				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.03 Pembinaan Jasa Kontruksi	RAB.03.01.03.01 Peningkatan Kualitas Tata Bangunan	Pemerintah Kota Blitar
Peningkatan Kualitas Bina Konstruksi	Peningkatan Kualitas Bina Konstruksi	Meningkatkan Kualitas Keciptakaryaan (Tata Bangunan) dan Bina Konstruksi				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.03 Pembinaan Jasa Kontruksi	RAB.03.01.03.02 Peningkatan Kualitas Bina Konstruksi	Pemerintah Kota Blitar

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
Peningkatan konservasi sumber daya air	Peningkatan konservasi sumber daya air	Meningkatkan kualitas infrastruktur sumberdaya air				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.05 Pengelolaan Sumber Daya Air	RAB.03.01.05.01 Peningkatan konservasi sumber daya air	Pemerintah Kota Blitar
Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Air	Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Air	Meningkatkan kualitas infrastruktur sumberdaya air				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.05 Pengelolaan Sumber Daya Air	RAB.03.01.05.02 Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Air	Pemerintah Kota Blitar
Peningkatan Pengendalian Daya Rusak Air	Peningkatan Pengendalian Daya Rusak Air	Meningkatkan kualitas infrastruktur sumberdaya air				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.05 Pengelolaan Sumber Daya Air	RAB.03.01.05.03 Peningkatan Pengendalian Daya Rusak Air	Pemerintah Kota Blitar
Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatkan kualitas infrastruktur sumberdaya air				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.05 Pengelolaan Sumber Daya Air	RAB.03.01.05.04 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air	Pemerintah Kota Blitar
Peningkatan kualitas Pembinaan Penataan Ruang	Peningkatan kualitas Pembinaan Penataan Ruang	Meningkatkan Kualitas Tata Ruang				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.01 Pembinaan Pertanahan Regional	RAB.03.06.01.01 Peningkatan kualitas Pembinaan Penataan Ruang	Pemerintah Kota Blitar

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
Pembebasan Lahan	Pembebasan Lahan	Meningkatkan kualitas Jalan dan Jembatan				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAB.03 Pembangunan Kewilayahannya	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.04 Tata Ruang Tanah	RAB.03.06.04.01 Pembebasan Lahan	Pemerintah Kota Blitar
Peningkatan kualitas Perencanaan Tata Ruang	Peningkatan kualitas Perencanaan Tata Ruang	Meningkatkan Kualitas Tata Ruang				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAB.03 Pembangunan Kewilayahannya	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.04 Tata Ruang Tanah	RAB.03.06.04.02 Peningkatan kualitas Perencanaan Tata Ruang	Pemerintah Kota Blitar
Peningkatan kualitas Pemanfaatan Ruang	Peningkatan kualitas Pemanfaatan Ruang	Meningkatkan Kualitas Tata Ruang				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAB.03 Pembangunan Kewilayahannya	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.04 Tata Ruang Tanah	RAB.03.06.04.03 Peningkatan kualitas Pemanfaatan Ruang	Pemerintah Kota Blitar
Peningkatan kualitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Peningkatan kualitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatkan Kualitas Tata Ruang				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAB.03 Pembangunan Kewilayahannya	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.04 Tata Ruang Tanah	RAB.03.06.04.03 Peningkatan kualitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pemerintah Kota Blitar
Peningkatan kualitas Pengawasan Penataan Ruang	Peningkatan kualitas Pengawasan Penataan Ruang	Meningkatkan Kualitas Tata Ruang				Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RAB.03 Pembangunan Kewilayahannya	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.04 Tata Ruang Tanah	RAB.03.06.04.05 Peningkatan kualitas Pengawasan Penataan Ruang	Pemerintah Kota Blitar

1.9.9.9 Domain Arsitektur Dinas Perhubungan

Tabel 0-12 Domain Arsitektur Dinas Perhubungan

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
Peningkatan pembinaan keselamatan transportasi	meningkatkan pembinaan keselamatan transportasi	Meningkatkan penyelenggaraan manajemen keselamatan transportasi				Dinas Perhubungan	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.03 Pengelola Keamanan Dan Keselamatan Transportasi	RAB.03.03.03.01 Peningkatan pembinaan keselamatan transportasi	Pemerintah Kota Blitar
Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan	meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan	Meningkatkan penyelenggaraan manajemen keselamatan transportasi				Dinas Perhubungan	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.04 Pengelola Sarana Dan Prasarana Transportasi	RAB.03.03.04.01 Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan	Pemerintah Kota Blitar
Peningkatan ketertiban dan keselamatan jalan	meningkatkan ketertiban dan keselamatan jalan	Meningkatkan penyelenggaraan manajemen keselamatan transportasi				Dinas Perhubungan	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.03 Pengelola Keamanan Dan Keselamatan Transportasi	RAB.03.03.03.02 Peningkatan ketertiban dan keselamatan jalan	Pemerintah Kota Blitar

1.9.9.10 Domain Arsitektur Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 0-13 Domain Arsitektur Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik Kebencanaan	Melaksanakan pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik Kebencanaan	Meningkatnya Ketangguhan dalam menghadapi Bencana				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.02 Manajemen Pencarian Dan Pertolongan	RAB.04.02.02.01 pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik Kebencanaan	Pemerintah Kota Blitar
Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Melakukan Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Meningkatnya Ketangguhan dalam menghadapi Bencana				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.02 Manajemen Pencarian Dan Pertolongan	RAB.04.02.02.02 Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Pemerintah Kota Blitar
pengembangan proses pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana	Meningkatkan pengembangan proses pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat	Meningkatnya Ketangguhan dalam menghadapi Bencana				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.03 Manajemen Sosial	RAB.04.02.03.01 pengembangan proses pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat	Pemerintah Kota Blitar

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
	terdampak bencana									terdampak bencana	
Penguatan Kebijakan dan Peraturan daerah mengenai Penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien	Meningkatkan Penguatan Kebijakan dan Peraturan daerah mengenai Penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien	Meningkatkannya Ketangguhan dalam menghadapi Bencana				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	RAB.04.02.06.01 Penguatan Kebijakan dan Peraturan daerah mengenai Penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien	Pemerintah Kota Blitar
investasi pengelolaan risiko bencana sesuai proyeksi risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan	Melakukan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai proyeksi risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan	Meningkatkannya Ketangguhan dalam menghadapi Bencana				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	investasi pengelolaan risiko bencana sesuai proyeksi risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan	Pemerintah Kota Blitar

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
tata kelola penanggulangan bencana berstandar, dan profesional	Meningkatkan tata kelola penanggulangan bencana berstandar, dan profesional	Meningkatkan Ketangguhan dalam menghadapi Bencana				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	RAB.04.02.06.01 tata kelola penanggulangan bencana berstandar, dan profesional	Pemerintah Kota Blitar

1.9.9.11 Domain Arsitektur Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 0-14 Domain Arsitektur Dinas Lingkungan Hidup

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
Peningkatan tata lingkungan hidup	Meningkatkan tata lingkungan hidup	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup				Dinas Lingkungan Hidup	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional	RAB.07.05.01.01 Peningkatan tata lingkungan hidup	Pemerintah Kota Blitar
Peningkatan ketaatan terhadap persetujuan lingkungan	Meningkatkan ketaatan terhadap persetujuan lingkungan dan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup				Dinas Lingkungan Hidup	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional	RAB.07.05.01.02 Peningkatan ketaatan terhadap persetujuan	Pemerintah Kota Blitar

Nama Bisnis/Uru san	Uraian Bisnis/Uru san	Sasaran Strategis	Indikat or Kinerja Utama	Nilai IKU Targ et	Nilai IKU Terealis asi	→ Unit Kerja (Dependen cy)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependen cy)	→ RAB Level 2 (Dependen cy)	→ RAB Level 3 (Dependen cy)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependen cy)
dan dokumen lingkungan	dokumen lingkungan									lingkungan dan dokumen lingkungan	
Peningkata n pengendali an pencemara n dan atau kerusakan lingkungan hidup	Meningkatk an pengendalia n pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Meningkat nya Kualitas Lingkunga n Hidup				Dinas Lingkunga n Hidup	RAB.07 Lingkunga n dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkunga n Hidup	RAB.07.05. 02 Pelestarian Lingkunga n Hidup	RAB.07.05.02 .01 Peningkatan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	Pemerintah Kota Blitar
Peningkata n Pengelolaa n persampah an	Meningkatk an Pengelolaan persampaha n	Meningkat nya Kualitas Lingkunga n Hidup				Dinas Lingkunga n Hidup	RAB.07 Lingkunga n dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkunga n Hidup	RAB.07.05. 02 Pelestarian Lingkunga n Hidup	RAB.07.05.02 .02 Peningkatan Pengelolaan persampahan	Pemerintah Kota Blitar
Peningkata n konservasi dan komunikasi lingkungan	Meningkatk an konservasi dan komunikasi lingkungan	Meningkat nya Kualitas Lingkunga n Hidup				Dinas Lingkunga n Hidup	RAB.07 Lingkunga n dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkunga n Hidup	RAB.07.05. 02 Pelestarian Lingkunga n Hidup	RAB.07.05.02 .03 Peningkatan konservasi dan komunikasi lingkungan	Pemerintah Kota Blitar

1.9.9.12 Domain Arsitektur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 3-14 Domain Arsitektur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
Peningkatan kualitas perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Meningkatkan kualitas perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan				Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	RAB.03 Pembangunan Kewilayahannya	RAB.03.04 Perumahan	RAB.03.04.03 Pengembangan Kawasan Permukiman	RAB.03.04.03.01 Peningkatan kualitas perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Pemerintah Kota Blitar

1.9.9.13 Domain Arsitektur Dinas Sosial

Tabel 0-15 Domain Arsitektur Dinas Sosial

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
Peningkatan pemberdayaan sosial	meningkatkan pemberdayaan sosial	Meningkatkan Kemandirian Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial				Dinas Sosial	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional	RAB.04.02.01.01 Peningkatan pemberdayaan sosial	Pemerintah Kota Blitar

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
Peningkatan penanganan fakir miskin	meningkatkan penanganan fakir miskin	Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial				Dinas Sosial	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.05 Penanganan Fakir Miskin	RAB.04.02.05.01 Peningkatan penanganan fakir miskin	Pemerintah Kota Blitar
Peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial	meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial	Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial				Dinas Sosial	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.03 Manajemen Sosial	RAB.04.02.03.01 Peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial	Pemerintah Kota Blitar
Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial	meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial	Meningkatnya Kemandirian Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial				Dinas Sosial	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.03 Manajemen Sosial	RAB.04.02.03.02 Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial	Pemerintah Kota Blitar

1.9.9.14 Domain Arsitektur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tabel 0-16 Domain Arsitektur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
Peningkatan Kualifikasi ASN	Meningkatkan Kualifikasi ASN	Meningkatnya Manajemen Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAB.09 Pemerintah an Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.01 Pengelolaa n Aparatur Negara	RAB.09.06.01 .01 Peningkatan Kualifikasi ASN	Pemerintah Kota Blitar
Peningkatan Kompetensi ASN	Meningkatkan Kompetensi ASN	Meningkatnya Manajemen Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAB.09 Pemerintah an Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.01 Pengelolaa n Aparatur Negara	RAB.09.06.01 .02 Peningkatan Kompetensi ASN	Pemerintah Kota Blitar
Peningkatan Kinerja ASN	Meningkatkan Kinerja ASN	Meningkatnya Manajemen Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAB.09 Pemerintah an Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.05 Akuntabilit as Kinerja	RAB.09.06.05 .01 Peningkatan Kinerja ASN	Pemerintah Kota Blitar

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
Peningkatan Disiplin ASN	Meningkatkan Disiplin ASN	Meningkatnya Manajemen Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.09 Pengawasan Aparatur Negara	RAB.09.06.09.01 Peningkatan Disiplin ASN	Pemerintah Kota Blitar

1.9.9.15 Domain Arsitektur Dinas Pemuda dan Olahraga

Tabel 0-17 Domain Arsitektur Dinas Pemuda dan Olahraga

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
Peningkatan daya saing Pemuda	Meningkatnya daya saing Pemuda	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Olahraga				Dinas Pemuda dan Olahraga	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 Pemuda	RAB.06.04.02 Pembinaan Pemuda Regional	RAB.06.04.02.01 Peningkatan daya saing Pemuda	Pemerintah Kota Blitar
Peningkatan daya saing olahraga	Meningkatnya daya saing olahraga	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Olahraga				Dinas Pemuda dan Olahraga	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.05 Olahraga	RAB.06.05.01 Pembinaan Olahraga Regional	RAB.06.05.01.01 Peningkatan daya saing olahraga	Pemerintah Kota Blitar

1.9.9.16 Domain Arsitektur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tabel 0-18 Domain Arsitektur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Optimalisasi Penelitian dan Pengembangan Daerah				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RAB.09 Pemerintah Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01.01 Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Pemerintah Kota Blitar
Peningkatan hasil Penelitian dan Pengembangan yang Berkualitas	Meningkatkan hasil Penelitian dan Pengembangan yang Berkualitas	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Optimalisasi Penelitian dan Pengembangan Daerah				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	RAB.09 Pemerintah Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01.02 Peningkatan hasil Penelitian dan Pengembangan yang Berkualitas	Pemerintah Kota Blitar

1.9.9.17 Domain Arsitektur Sekretariat DPRD

Tabel 0-19 Domain Arsitektur Sekretariat DPRD

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pembentukan Peraturan Daerah	Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pembentukan Peraturan Daerah	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Anggota Dewan				Sekretariat DPRD	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariaan Negara	RAB.09.07.06 Pengkajian Strategis	RAB.09.07.06.01 Peningkatan Fasilitas Pelayanan Pembentukan Peraturan Daerah	Pemerintah Kota Blitar
Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Anggota Dewan				Sekretariat DPRD	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariaan Negara	RAB.09.07.06 Pengkajian Strategis	RAB.09.07.06.02 Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pemerintah Kota Blitar
Peningkatan Fasilitas DPRD dalam Fungsi Pengawasan	Peningkatan Fasilitas DPRD dalam Fungsi Pengawasan	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Anggota Dewan				Sekretariat DPRD	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariaan Negara	RAB.09.07.05 Pengawasan Pemerintahan	RAB.09.07.05.01 Peningkatan Fasilitas DPRD dalam Fungsi Pengawasan	Pemerintah Kota Blitar
Fasilitasi Pengawasan Penggunaan Anggaran yang Sedang	Fasilitasi Pengawasan Penggunaan Anggaran yang Sedang	Meningkatnya Fasilitas Pelayanan Anggota Dewan				Sekretariat DPRD	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariaan Negara	RAB.09.07.05 Pengawasan Pemerintahan	RAB.09.07.05.02 Fasilitasi Pengawasan Penggunaan Anggaran yang Sedang	Pemerintah Kota Blitar

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai IKU Targ et	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependen cy)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependen cy)	→ RAB Level 2 (Dependen cy)	→ RAB Level 3 (Dependen cy)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependen cy)
Dilaksanakan	Dilaksanakan									Dilaksanakan	
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas anggota DPRD	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas anggota DPRD	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Anggota Dewan				Sekretariat DPRD	RAB.09 Pemerintah an Umum	RAB.09.07 Kesekretaria tan Negara	RAB.09.07.04 Manajemen Pimpinan Tinggi	RAB.09.07.04 .01 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas anggota DPRD	Pemerintah Kota Blitar
Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Anggota Dewan				Sekretariat DPRD	RAB.09 Pemerintah an Umum	RAB.09.07 Kesekretaria tan Negara	RAB.09.07.06 Pengkajian Strategis	RAB.09.07.06 .04 Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pemerintah Kota Blitar
Fasilitasi Administrasi dan Kesejahteraan Anggota DPRD	Fasilitasi Administrasi dan Kesejahteraan Anggota DPRD	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Anggota Dewan				Sekretariat DPRD	RAB.09 Pemerintah an Umum	RAB.09.07 Kesekretaria tan Negara	RAB.09.07.04 Manajemen Pimpinan Tinggi	RAB.09.07.04 .01 Fasilitasi Administrasi dan Kesejahteraan Anggota DPRD	Pemerintah Kota Blitar

1.9.9.18 Domain Arsitektur Inspektorat

Tabel 0-20 Domain Arsitektur Inspektorat

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
Peningkatan fungsi dan layanan APIP	Meningkatkan fungsi dan layanan APIP					Inspektorat	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariat an Negara	RAB.09.07.05 Pengawasan Pemerintahan	RAB.09.07.05.02 Peningkatan fungsi dan layanan APIP	Pemerintah Kota Blitar
Peningkatan Kualitas Pengelolaan SDM	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan SDM					Inspektorat	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.01 Pengelolaan Aparatur Negara	RAB.09.06.01.04 Peningkatan Kualitas Pengelolaan SDM	Pemerintah Kota Blitar
Peningkatan Praktik Profesional	Meningkatkan Praktik Profesional					Inspektorat	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.04 Pembinaan Reformasi Birokrasi	RAB.09.06.04.01 Peningkatan Praktik Profesional	Pemerintah Kota Blitar
Peningkatan Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Meningkatkan Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja					Inspektorat	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.05 Akuntabilitas Kinerja	RAB.09.06.05.02 Peningkatan Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Pemerintah Kota Blitar
Peningkatan kualitas Budaya dan	Meningkatkan kualitas Budaya dan					Inspektorat	RAB.09 Pemerintahan	RAB.09.07 Kesekretariat	RAB.09.07.02 Koordinasi	RAB.09.07.02.01 Peningkatan	Pemerintah Kota Blitar

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
Hubungan Organisasi	Hubungan Organisasi						an Umum	an Negara	Dengan Lembaga Negara	kualitas Budaya dan Hubungan Organisasi	
Optimalisasi Struktur Tata Kelola	Optimalisasi Struktur Tata Kelola					Inspektorat	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.04 Pembinaan Reformasi Birokrasi	RAB.09.06.04.02 Optimalisasi Struktur Tata Kelola	Pemerintah Kota Blitar

1.9.9.19 Domain Arsitektur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Tabel 0-21 Domain Arsitektur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Nama Bisnis/Urusan	Uraian Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Nilai IKU Target	Nilai IKU Terealisasi	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah				Badan Pengelolaa n Keuangan dan Aset Daerah Kota	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.07 Keuangan Daerah	RAB.09.01.07.01 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintah Kota Blitar
Optimalisasi Pengelolaa n	Mengoptimalkan Pengelolaan	Meningkatkan kualitas				Badan Pengelolaa n	RAB.09 Pemerintahan	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan	RAB.09.02.08.01 Optimalisasi	Pemerintah Kota Blitar

Nama Bisnis/Uru san	Uraian Bisnis/Urus an	Sasaran Strategis	Indikat or Kinerja Utama	Nilai IKU Targ et	Nilai IKU Terealis asi	→ Unit Kerja (Dependen cy)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependen cy)	→ RAB Level 2 (Dependen cy)	→ RAB Level 3 (Dependen cy)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependen cy)
n dan Pemanfaat an Aset Daerah	dan Pemanfaatan Aset Daerah	pengelolaa n keuangan dan aset daerah				Keuangan dan Aset Daerah Kota	an Umum		Dan Manajemen Aset	Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	

1.9.9.20 Referensi Arsitektur Proses Bisnis SPBE Pemerintah Kota Blitar

Berikut pemetaan referensi Arsitektur Proses Bisnis Level 3 dan 4 SPBE Pemerintah Kota Blitar

Tabel 0-22 Referensi Arsitektur Proses Bisnis Level 3 dan 4 SPBE Pemerintah Kota Blitar

Proses Bisnis Pengelolaan Informatika (09.03.01)		
Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
09.03.0 1.01	Pengoptimalan Monitoring opini dan aspirasi publik	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait: Pemantauan isu publik di media massa dan media sosial Pengumpulan pendapat umum Pemantauan aduan masyarakat Evaluasi dan pemilihan isu publik
09.03.0 1.02	Peningkatan Pelayanan informasi publik	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait: Melaksanakan Pengelolaan Informasi publik Melakukan pelayanan informasi publik Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat
09.03.0 1.03	Pelaksanaan pelayanan sengketa informasi publik	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait: PPID utama (kepala dinas) mengoordinir PPID pembantu dalam menyelesaikan sengketa Mewakili lembaga dalam Mediasi sengketa informasi di komisi informasi apabila diberikan kuasa oleh Atasan PPID Melaksanakan prosedur sidang Ajudikasi Non Litigasi
09.03.0 1.04	Penguatan pengelolaan infrastruktur teknologi dan komunikasi	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait: Meningkatkan pengelolaan domain Mengembangkan sistem jaringan intra pemerintah daerah
09.03.0 1.05	Peningkatan pengelolaan aplikasi sistem informasi	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait: Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan

		Berbasis Elektronik Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
09.03.01.06	Peningkatan pengelolaan keamanan informasi dan persandian	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait: Menyusun kebijakan keamanan informasi Mengelola sumber daya keamanan informasi Melaksanakan pengamanan sistem elektronik dan non elektronik. Menyediakan layanan keamanan informasi Melaksanakan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah
Proses Bisnis Pengelolaan Data Statistik (09.03.03)		
Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
09.03.03.01	Penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait: Melakukan perencanaan data Melakukan pengumpulan data Melakukan pemeriksaan data Melakukan penyebarluasan data
09.03.03.02	Pengembangan pelayanan statistik terpadu	
09.03.03.03	Pembangunan metadata statistik sektoral	

09.03.0 3.04	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan statistik sektoral	
Proses Bisnis Pengelolaan Komunikasi Publik (09.04.02)		
Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
09.04.0 2.01	Pengoptimalan Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait: Menyusun strategi komunikasi publik Mengemas konten untuk dipublikasikan
09.04.0 2.02	Peningkatan pengelolaan media komunikasi publik	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait: Menyelenggarakan media komunikasi publik Menyelenggarakan diseminasi pesan di media Evaluasi penggunaan media komunikasi publik
09.04.0 2.03	Peningkatan Kemitraan dengan pemangku kepentingan	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait: Melaksanakan pemetaan pemangku kepentingan Mengidentifikasi isu strategis dan memberikan solusi kepada pemangku kepentingan Mengembangkan model dan simulasi kemitraan Menyediakan bahan-bahan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi Melaksanakan kompetisi serta pemberian penghargaan Melaksanakan evaluasi terhadap pemanfaatan media yang dimiliki oleh pemangku kepentingan
09.04.0 2.04	Penguatan kapasitas sumberdaya komunikasi publik	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan sub fungsi pemerintahan terkait: Melaksanakan kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Menyediakan dan memberikan konsultasi serta advokasi
Proses Bisnis Pembinaan pendidikan regional (06.01.01)		
Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur

06.01.0 1.01	Pengurangan angka putus sekolah	Melaksanakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Melaksanakan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan Melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) Menyelenggarakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten Memberikan Bantuan Alat Tulis Siswa Miskin
06.01.0 1.02	Pengoptimalan Pendidikan PAUD, Kesetaraan dan Non Formal	Menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
Proses Bisnis Manajemen tenaga pendidikan (06.03.02)		
Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
06.01.0 2.01	Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Melakukan Pelatihan dan Pembinaan Guru Menyelenggarakan Sertifikasi Guru
06.01.0 2.02	Peningkatan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan	Melakukan pendataan sarana dan prasarana satuan pendidikan Melakukan perhitungan alokasi anggaran Menerima usulan dari Satuan pendidikan Melakukan survey atau seleksi sarana prasarna yang dibutuhkan di Satuan pendidikan Melakukan alokasi anggaran Menetapkan Calon Penerima bantuan sarana prasarana Satuan pendidikan
Proses Bisnis Pendidikan dasar (06.03.01)		
Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
06.01.0 3.01	Peningkatan Angka Melanjutkan	Menyelenggarakan Bantuan Siswa Berprestasi
06.01.0 3.02	Peningkatan APK Sekolah Dasar	Meningkatkan Akses Pada Sekolah Dasar
06.01.0 3.03	Peningkatan APK Sekolah Menengah Pertama	Meningkatkan Akses Sekolah Menengah Pertama Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama
Proses Bisnis Manajemen aparatur sipil negara (09.06.02)		
Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur

09.06.0 2.01	Peningkatan Kualifikasi ASN	Meningkatkan Riwayat Pendidikan Formal ASN Menempatkan ASN sesuai dengan kualifikasi jabatan
09.06.0 2.02	Peningkatan Kompetensi ASN	Menganalisis kebutuhan Diklat Menyusun standart kompetensi jabatan perangkat daerah Meningkatkan Kompetensi Manajerial Meningkatkan Kompetensi Fungsional Meningkatkan Kompetensi Teknis Mengoptimalkan evaluasi dan tertib administrasi pengembangan kompetensi
09.06.0 2.03	Peningkatan Kinerja ASN	Mengoptimalkan sistem informasi dan fasilitasi profesi ASN Mengoptimalkan Mekanisme Sasaran Kinerja Pegawai Mengoptimalkan Pemenuhan hak profesi ASN Mengoptimalkan Penghargaan ASN Mengoptimalkan Mutasi dan Promosi ASN
09.06.0 2.04	Peningkatan Disiplin ASN	Menyelenggarakan sosialisasi, pengendalian, dan pelaksanaan peraturan perundang- undangan dibidang kepegawaian Merencanakan dan melaksanakan pembinaan disiplin aparatur Mengkaji dan memproses penjatuhan hukuman disiplin aparatur Memfasilitasi penyelesaian sengketa dan gugatan pegawai

Proses Bisnis Pembinaan keuangan instansi (09.02.01)

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
09.02.0 1.01	Pengoptimalan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Mengoptimalkan sistem penatausahaan keuangan daerah Mengoptimalkan perencanaan keuangan daerah
09.02.0 1.02	Peningkatan Transparansi Pengelolaan Keuangan	Meningkatkan pengelolaan akuntansi keuangan daerah
09.02.0 1.03	Peningkatan Kemandirian Daerah	Mengoptimalkan pengelolaan pendapatan asli daerah

Proses Bisnis Pengadaan dan manajemen aset (09.02.08)

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
------	----------------------	--------------------------------

09.02.0 8.01	Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Aset Daerah	Menyusun RKB
09.02.0 8.02	Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	Melaksanakan pelaporan Barang Milik Daerah melalui aplikasi SIMBADA
09.02.0 8.03	Pengoptimalan penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah	Menyusun RKB
09.02.0 8.04	Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah	
09.02.0 8.05	Pelaksanaan Penilaian Layak Fungsi Aset Daerah	
09.02.0 8.06	Pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah	Mengoptimalkan proses pemindahtanganan BMD Mengoptimalkan proses pemusnahan BMD Melaksanakan penghapusan barang milik daerah
09.02.0 8.07	Pelaksanaan penatausahaan	
09.02.0 8.08	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah	
Proses Bisnis Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (09.05.01)		
Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
09.05.0 1.01	Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah	Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
09.05.0 1.02	Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi RPJPD Melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi RPJMD Melaksanakan Pengendalian dan Evaluasi RKPD
Proses Bisnis Penelitian dan Pengembangan (09.05.03)		

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
09.05.0 3.01	Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan	
09.05.0 3.02	Pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan Kabupaten/Kota	
09.05.0 3.03	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan	
09.05.0 3.04	Pengeluaran rekomendasi untuk mendapatkan izin penelitian	
Proses Bisnis Pengawasan aparatur negara (09.06.09)		
Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
09.06.0 9.01	Penjaminan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Assurance)	Meningkatkan kualitas Audit Meningkatkan kualitas Reviu Meningkatkan kualitas Evaluasi Meningkatkan kualitas Pemantauan/Monitoring
09.06.0 9.02	Pemberian masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (advisory services)	Melaksanakan Sosialisasi Melaksanakan Asistensi Meningkatkan kualitas Fasilitas Melaksanakan pendampingan Melaksanakan konsultasi
09.06.0 9.03	Penguatan Tata Kelola Pemerintah dan Peningkatan Integritas	Pengawasan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi - Melaksanakan Audit Investigatif
Proses Bisnis Pengelolaan aparatur negara (09.06.01)		
Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
09.06.0 1.01	Penyusunan Peta Kompetensi	
09.06.0 1.02	Penyusunan dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai	
09.06.0 1.03	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis	

09.06.0 1.04	Pengikut Sertaan Pendidikan dan Pelatihan	
09.06.0 1.05	Penyusunan Kebijakan rotasi dan mutasi internal APIP	
09.06.0 1.06	Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Melaksanakan Analisis Jabatan Melaksanakan Analisis Beban Kerja
Proses Bisnis Pembinaan reformasi birokrasi (09.06.04)		
Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
09.06.0 4.01	Pelaksanaan Perencanaan Audit Berbasis Risiko (Risk Based Audit Plans)	- Menyusun Audit Universe (Peta Auditan) - Menyusun Kebijakan Pengawasan dan PKPT Berbasis Risiko
09.06.0 4.02	Peningkatan Kualitas Kerangka Kerja Manajemen (Quality Management Framework)	- Menyusun Pedoman Pengawasan - Menyusun Pedoman Telaah Sejawat - Melaksanakan Kendali Mutu Audit - Melakukan survey kepuasan pelanggan
Proses Bisnis Akuntabilitas kinerja (09.06.05)		
Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
09.06.0 5.01	Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	
09.06.0 5.02	Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja	
09.06.0 5.03	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	
Proses Bisnis Kelembagaan dan tata laksana (09.06.03)		
Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
09.06.0 3.01	Pembangunan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan berbasis teknologi	- Melaksanakan pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan - Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan
09.06.0 3.02	Pelaksanaan rapat internal APIP secara berkala	
09.06.0 3.03	Pelaksanaan koordinasi pengawasan dengan Tenaga Ahli	
Proses Bisnis Manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) (09.06.07)		
Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur

09.06.0 7.01	Penyusunan Internal Audit Charter	
09.06.0 7.02	Pensosialisasian Internal Audit Charter	
09.06.0 7.03	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan	
09.06.0 7.04	Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan	
Proses Bisnis pembinaan penanaman modal regional (02.08.01)		
Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
02.08.0 1.01	Peningkatan promosi penanaman modal	- Mengikuti pameran investasi - Meningkatkan pengembangan strategi promosi penanaman modal
02.08.0 1.02	Peningkatan pengendalian penanaman modal	- Mengoptimalkan pemantauan penanaman modal - Menyelenggarakan pembinaan penanaman modal - Mengoptimalkan pengawasan penanaman modal
02.08.0 1.03	Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	- Penyusunan kebijakan daerah terkait penanaman modal - Penyusunan dokumen perencanaan PM

1.10 Arsitektur Data dan Informasi

1.10.1 Model Data dan Informasi Berdasarkan Model Interaksi Pemerintahan

Dalam domain arsitektur data dan informasi yang dihasilkan dari berbagai aktivitas dalam proses bisnis pemerintahan, selanjutnya diklasifikasikan substansi data dan informasi ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur data dan informasi yang terdiri dari 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. data pokok, yang mengelompokkan data ke dalam data yang dihasilkan pada sektor pemerintahan dan data pendukung umum sebagai tingkat 1, yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. data tematik, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, dikelompokkan ke dalam data tematik urusan pemerintahan dan uraian data pendukung umum sebagai tingkat 2, yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. data topik, yang menjelaskan lebih rinci dari data tematik di tingkat nasional sebagai tingkat 3, yang selanjutnya Instansi Ptsat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional;

- d. data sub topik, yang menjelaskan lebih rinci dari data topik sebagai tingkat 4. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan dalam membangun layanan terintegrasi sebagai bagian dari layanan digital nasional, serta kebutuhan operasional aplikasi.



Gambar 0-4 Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi

1.10.2 Model Data dan Informasi Berdasarkan Peta Relasi Proses Bisnis

Domain arsitektur data dan informasi mempunyai relasi langsung dengan domain arsitektur proses bisnis sebagai sumber data dan informasi tersebut dan domain arsitektur infrastruktur SPBE di mana diklasifikasikan pada media penyimpanan data tersebut. Semua data disimpan dalam infrastruktur SPBE yang terintegrasi. Data dan informasi harus dapat diakses dan dibagipakaikan melalui aplikasi SPBE sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Data dan informasi merupakan aset yang perlu diamankan dalam SPBE. Mekanisme pengamanan terhadap data diatur dan ditetapkan oleh standar arsitektur keamanan, sebagaimana dapat terlihat ilustrasi relasi langsung dengan domain data dan informasi pada gambar berikut.



Gambar 0-5 Relasi langsung pada Domain Data dan informasi

1.10.3 Atribut Metadata Arsitektur Data dan Infomasi

Pemetaan arsitektur data dan informasi dilakukan dengan menggunakan metadata yang telah didefinisikan oleh perangkat daerah masing-masing. Pada tabel berikut ini dapat dilihat atribut metadata arsitektur data dan informasi. Pada tabel berikut ini dapat dilihat atribut metadata data dan informasi.

Tabel 0-23 Atribut Metadata Data dan Informasi

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata

No	Nama Atribut	Keterangan
2	Nama Data	Merupakan data yang dikelola oleh unit kerja/perangkat daerah.
3	Uraian Data	Merupakan penjelasan atau keterangan dari data, terutama mengenai ciri khas dari data tersebut.
4	Tujuan Data	Merupakan penjelasan tujuan dari pemanfaatan data
5	Kode Model Referensi Data	Merupakan pilihan kode model referensi data yang sesuai dengan data yang dipilih
6	Sifat Data	Merupakan klasifikasi data berdasarkan kerahasiaan konten data
7	Jenis Data	Merupakan klasifikasi data berdasarkan bentuk datanya

1.10.4 Referensi Arsitektur Data dan Informasi SPBE Nasional

Pada table berikut ini dapat dilihat taksonomi referensi arsitektur data dan informasi.

Tabel 0-24 Referensi Arsitektur Data Dan Informasi Tingkat 1 dan 2

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Informasi Pertahanan dan Luar Negeri (01)		
01.0 1.	Data pertahanan	Data yang mempresentasikan bidang pertahanan negara, termasuk di dalamnya pengelolaan instalasi strategis dan potensi pertahanan, strategi pertahanan, penanggulangan ancaman, pertahanan siber.
01.0 2.	Data urusan luar negeri	Data yang mempresentasikan bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri
Informasi Ekonomi dan Industri (02)		
02.0 1.	Data industri	Data yang mempresentasikan bidang penumbuh-kembangan industri dalam negeri, termasuk di dalamnya pengelolaan ekonomi kreatif dan produk digital.
02.0 2.	Data perdagangan	Data yang mempresentasikan pengelolaan perdagangan termasuk di dalamnya perdagangan dalam negeri, ekspor impor, dan perdagangan berjangka.
02.0 3.	Data pertanian	Data yang mempresentasikan bidang pertanian termasuk di dalamnya peningkatan produksi pertanian, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, ketahanan pangan, serta keamanan hayati.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
02.0 4.	Data perkebunan	Data yang mempresentasikan bidang perkebunan termasuk di dalamnya pengembangan bio energi dan keberlanjutan usaha perkebunan
02.0 5.	Data peternakan	Data yang mempresentasikan bidang peternakan termasuk di dalamnya kesehatan masyarakat veteriner dan perikanan budidaya.
02.0 6.	Data perikanan	Data yang mempresentasikan bidang perikanan termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat perikanan serta pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut.
02.0 7.	Data badan usaha milik negara	Data yang mempresentasikan pengelolaan badan usaha milik negara.
02.0 8.	Data investasi	Data yang mempresentasikan pembinaan penanaman modal antara lain manajemen penanaman modal, manajemen perizinan penanaman modal, dan litigasi penanaman modal.
02.0 9.	Data koperasi	Data yang mempresentasikan pembinaan koperasi antara lain manajemen kelembagaan koperasi, manajemen produksi dan pemasaran koperasi, pemberdayaan pembiayaan koperasi, serta pembinaan dan pengawasan koperasi.
02.1 0.	Data usaha kecil dan menengah	Data yang mempresentasikan pembinaan usaha kecil dan menengah antara lain manajemen kelembagaan usaha kecil dan menengah, manajemen produksi dan pemasaran usaha kecil dan menengah, dan pemberdayaan pembiayaan usaha kecil dan menengah.
02.1 1.	Data pariwisata	Data yang mempresentasikan bidang kepariwisataan termasuk di dalamnya pengelolaan faktor pendukung kepariwisataan dan penyusunan rencana induk kepariwisataan nasional.
Informasi Pembangunan Daerah (03)		
03.0 1	Data pekerjaan umum	Data yang mempresentasikan bidang pekerjaan umum antara lain manajemen infrastruktur pekerjaan umum, pembinaan jasa konstruksi, pengelolaan air limbah domestik, dan pengelolaan sumber daya air.
03.0	Data	Data yang mempresentasikan bidang

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
2	transmigrasi	transmigrasi antara lain pendidikan dan pelatihan ketransmigrasian, penelitian dan pengembangan transmigrasi, serta pengembangan kawasan transmigrasi.
03.0 3	Data transportasi	Data yang mempresentasikan bidang transportasi antara lain pengelolaan keamanan dan keselamatan transportasi, pengelolaan pelayanan transportasi, serta pengelolaan sarana dan prasarana transportasi.
03.0 4	Data perumahan	Data yang mempresentasikan bidang perumahan antara lain manajemen infrastruktur perumahan, pengelolaan lingkungan perumahan, pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sarana dan prasarana strategis, dan penyelenggaraan perumahan.
03.0 5	Data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	Data yang mempresentasikan bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal antara lain pembangunan daerah tertinggal, pembangunan desa dan kawasan pedesaan, pemberdayaan masyarakat desa, dan pengembangan daerah tertentu.
Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)		
04.0 1	Data kesehatan	Data yang mempresentasikan bidang kesehatan termasuk di dalamnya kefarmasian dan alat kesehatan, P4GN, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta pengawasan obat dan makanan.
04.0 2	Data sosial	Data yang mempresentasikan bidang sosial termasuk di dalamnya manajemen pencarian dan pertolongan, pembangunan manusia, penanganan fakir miskin, dan penanggulangan bencana.
04.0 3	Data pemberdayaan perempuan	Data yang mempresentasikan bidang pemberdayaan perempuan antara lain kesetaraan gender, perlindungan anak, perlindungan hak perempuan, dan manajemen pertumbuhan dan perkembangan anak.
04.0 1	Data kesehatan	Data yang mempresentasikan bidang kesehatan termasuk di dalamnya kefarmasian dan alat kesehatan, P4GN, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta pengawasan obat dan makanan.
Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)		
05.0	Data hukum	Data yang mempresentasikan bidang hukum

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
1		termasuk di dalamnya pengelolaan masyarakat dan penyelenggaraan keimigrasian.
05.0 2	Data keamanan	Data yang mempresentasikan bidang keamanan antara lain manajemen keamanan, manajemen ketertiban, penanggulangan transnasional dan terorisme, penegakan hukum, pengayoman masyarakat, dan pemeliharaan ketentraman masyarakat.
05.0 3	Data hak asasi manusia	Data yang mempresentasikan bidang hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak atas kekayaan intelektual.
Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)		
06.0 1	Data pendidikan	Data yang mempresentasikan bidang pendidikan termasuk di dalamnya pembinaan kepastakaan dan manajemen tenaga pendidikan.
06.0 2	Data ketenagakerjaan	Data yang mempresentasikan bidang ketenagakerjaan termasuk di dalamnya manajemen pekerja migran Indonesia serta pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja.
06.0 3	Data ilmu pengetahuan	Data yang mempresentasikan bidang ilmu pengetahuan antara lain penelitian ilmu dasar, penelitian inter dan multi disiplin terfokus, penelitian ilmu pengetahuan sektor tertentu, dan pengkoordinasian sistem nasional ilmu pengetahuan.
06.0 4	Data teknologi	Data yang mempresentasikan bidang teknologi antara lain manajemen invensi dan inovasi, manajemen penginderaan jauh, manajemen teknologi penerbangan dan antariksa, manajemen tenaga nuklir, pengelolaan pengkajian dan penerapan teknologi, serta pengkoordinasian sistem nasional teknologi.
06.0 5	Data pemuda	Data yang mempresentasikan bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)		
07.0 1	Data pertambangan	Data yang mempresentasikan bidang pertambangan
07.0 2	Data energi	Data yang mempresentasikan bidang energi termasuk di dalamnya ketenagalistrikan dan konservasi energi.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
07.0 3	Data kehutanan	Data yang mempresentasikan bidang kehutanan termasuk di dalamnya peningkatan daya dukung DAS dan hutan lindung serta perlindungan kawasan hutan.
07.0 4	Data kelautan	Data yang mempresentasikan bidang kelautan antara lain manajemen kemaritiman, tata ruang laut, pemberdayaan masyarakat kelautan, dan pengelolaan sumber daya kelautan.
07.0 5	Data lingkungan hidup	Data yang mempresentasikan bidang lingkungan hidup termasuk di dalamnya manajemen iklim dan cuaca dan pengelolaan sarana dan prasarana iklim dan cuaca.
Informasi Budaya dan agama (08)		
08.0 1	Data agama	Data yang mempresentasikan bidang agama antara lain bimbingan masyarakat keagamaan, pendidikan agama dan pelatihan keagamaan, penyelenggaraan haji dan umroh, dan produk halal.
08.0 2	Data kebudayaan	Data yang mempresentasikan bidang kebudayaan termasuk di dalamnya pembinaan arsip nasional, dan pembinaan perfilman nasional.
08.0 3	Data olahraga	Data yang mempresentasikan bidang keolahragaan.
Informasi Pemerintahan Umum (09)		
09.0 1	Data dalam negeri	Data yang mempresentasikan urusan dalam negeri antara lain kebijakan politik, pemerintahan umum, pembinaan otonomi daerah, pemerintahan daerah, dan program prioritas nasional.
09.0 2	Data keuangan	Data yang mempresentasikan bidang keuangan negara
09.0 3	Data informasi	Data yang mempresentasikan bidang informasi termasuk di dalamnya pengelolaan sumber daya dan perangkat informatika, penyiaran radio publik, dan penyiaran televisi publik.
09.0 4	Data komunikasi	Data yang mempresentasikan bidang komunikasi antara lain komunikasi publik, penyelenggaraan pos, dan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
09.0 5	Data perencanaan pembangunan nasional	Data yang mempresentasikan bidang perencanaan pembangunan nasional termasuk di dalamnya pengawasan penyimpangan pembangunan, manajemen ekonomi makro, dan dukungan strategis program/kebijakan.
09.0 6	Data aparatur negara	Data yang mempresentasikan bidang pengelolaan aparatur negara termasuk di dalamnya manajemen pelayanan publik, manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik, kearsipan nasional, dan kerjasama antar instansi.
09.0 7	Data kesekretariatan negara	Data yang mempresentasikan bidang kesekretariatan negara termasuk di dalamnya hubungan dengan Lembaga Negara, manajemen ketahanan nasional, dan pengawasan pemerintah.
09.0 8	Data pertanahan	Data yang mempresentasikan bidang pertanahan termasuk di dalamnya litigasi pertanahan dan pengelolaan infrastruktur pertanahan.
09.0 9	Data kependudukan	Data yang mempresentasikan bidang kependudukan termasuk di dalamnya pendampingan hukum dalam rangka pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan partisipasi masyarakat.
Data Pendukung Umum (10)		
10.0 1	Kebijakan Pemerintah	Data yang mempresentasikan informasi terkait kebijakan pemerintah.
10.0 2	Data Manajemen Kegiatan	Data yang mempresentasikan informasi terkait kegiatan.
10.0 3	Data Kewilayahan	Data yang mempresentasikan informasi kewilayahan.
10.0 4	Data Dukung Lainnya	Data yang mempresentasikan informasi yang tidak tercakup dalam definisi lainnya.

1.10.5 Model Domain dan Referensi Arsitektur Data dan Informasi Kota Blitar

Tabel 0-25 Arsitektur Data dan Informasi Kota Blitar

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Infor masi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	← Proses Bisnis (Dependenc y)	→ Layan an (Dependenc y)	→ RAD Level 1 (Dependenc y)	→ RAD Level 2 (Dependenc y)	→ RAD Level 3 (Dependenc y)	→ RAD Level 4 (Dependenc y)	→ Instansi (Dependenc y)
1	Fasilitasi Persidangan DPRD	Data Jenis dan Jumlah Persidangan DPRD	Tersedian ya Data Aktivitas DPRD	Ter bu ka	Dat a Sta tisti k	Tig a Bul an an	Bagia n Layan an Tugas dan Fungs i DPRD	Bagia n Layan an Tugas dan Fungs i DPRD	Data Jenis dan Jumlah Persidangan DPRD	Terse diany a Data Aktivit as DPRD	Tidak	RAB.0 9.01.0 9 Fasilit asi Persid angan DPRD	RAL.0 2.09.0 3.01 Pengel olaan Data Dan Infor masi Persid angan DPRD	RAD.0 09 Infor masi Peme rinta han Umu m	RAD.0 9.03 Data Infor masi	RAD.0 9.03.0 3 Pengel olaan Data Statis tik	RAD.0 9.03.0 3.01 Fasilit asi Persid angan DPRD	Peme rinta h Kota Blita r
2	Peningkat an Kapasitas DPRD	Data Jenis dan Jumlah Persidangan DPRD	Tersedian ya Data Aktivitas DPRD	Ter bu ka	Dat a Sta tisti k	Tig a Bul an an	Bagia n Layan an Tugas dan Fungs i DPRD	Bagia n Layan an Tugas dan Fungs i DPRD	Data Jenis dan Jumlah Persidangan DPRD	Terse diany a Data Aktivit as DPRD	Tidak	RAB.0 9.01.1 0 Penin gkata n Kapas itas DPRD	RAL.0 2.09.0 3.01 Pengel olaan Data Dan Infor masi Persid angan DPRD	RAD.0 09 Infor masi Peme rinta han Umu m	RAD.0 9.03 Data Infor masi	RAD.0 9.03.0 3 Pengel olaan Data Statis tik	RAD.0 9.03.0 3.02 Penin gkata n Kapas itas DPRD	Peme rinta h Kota Blita r

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ RAD Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
3	Bantuan Sosial BPNT	Jumlah PPKS yang mendapat layanan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)	Untuk menjelaskan kepada publik jumlah penerima BPNT yang mendapat layanan di Kota Blitar	Terbuka		Tahun	Bidang Fakmis Dayasos	Bidang Fakmis Dayasos				RAB.0 4.02.0 5 Penanganan Fakir Miskin	RAL.0 1.26.0 2 Penanganan Fakir Miskin	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.0 4.02 Data Sosial	RAD.0 4.02.0 5 Penanganan Fakir Miskin	RAB.0 4.02.0 5.02 Bantuan Sosial BPNT	Pemerintah Kota Blitar
4	Bantuan Sosial APBD	Jumlah PPKS yang mendapat layanan bersumber APBD	Untuk menjelaskan kepada publik jumlah penerima Bantuan APBD yang mendapat layanan di Kota Blitar	Terbuka		Tahun	Bidang Fakmis Dayasos	Bidang Fakmis Dayasos				RAB.0 4.02.0 5.02 Fasilitas Bantuan Kesejahteraan Sosial Keluarga	RAL.0 1.26.0 2 Penanganan Fakir Miskin	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.0 4.02 Data Sosial	RAD.0 4.02.0 5 Penanganan Fakir Miskin	RAB.0 4.02.0 5.03 Bantuan Sosial APBD	Pemerintah Kota Blitar
5	Bantuan Sosial	Jumlah PPKS	Untuk menjelaskan	Terbuka		Tahun	Bidang	Bidang				RAB.0 4.02.0	RAL.0 1.26.0	RAD.04	RAD.0 4.02	RAD.0 4.02.0	RAB.0 4.02.0	Pemerintah

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ RAD Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
	BPNT	yang mendapat layanan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)	an kepada publik jumlah penerima BPNT yang mendapat layanan di Kota Blitar	ka		na n	Fakmi s Dayas os	Fak mis Daya sos				5 Penan ganan Fakir Miski n	2 Penan ganan Fakir Miski n	Infor masi Perli ndun gan Sosia l dan Kese hata n	Data Sosial	5 Penan ganan Fakir Miski n	5.04 Bantu an Sosial BPNT	h Kota Blita r
6	Bantuan Sosial APBD	Jumlah PPKS yang mendapat layanan bersumbe r APBD	Untuk menjelaskan kepada publik jumlah penerima Bantuan APBD yang mendapat layanan di Kota Blitar	Ter bu ka		Ta hu na n	Bidan g Fakmi s Dayas os	Bida ng Fak mis Daya sos				RAB.0 4.02.0 5.02 Fasilit asi Bantu an Keseja hteraan Sosial Kelua rga	RAL.0 1.26.0 2 Penan ganan Fakir Miski n	RAD. 04 Infor masi Perli ndun gan Sosia l dan Kese hata n	RAD.0 4.02 Data Sosial	RAD.0 4.02.0 5 Penan ganan Fakir Miski n	RAB.0 4.02.0 5.05 Bantu an Sosial APBD	Peme rinta h Kota Blita r
7	Data Penyelesai an Perselisih	Berisi data perusahaa n dan	Menghipu n data perselisih an	Ter bat as	Dat a Sta tisti	Ta hu na n	Bidan g Hubu ngan	Bida ng Hub unga				RAB.0 6.02.0 3 Penin	RAL.0 1.32 Keten agake	RAD. 06 Infor masi	RAD.0 6.02 Data Keten	RAD.0 6.02.0 1 Pembi	RAD.0 6.02.0 1.04 Data	Peme rinta h Kota

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Infor masi yang Terka it (Outp ut)	Intero perabi litas	→ Prose s Bisnis (Depe ndenc y)	→ Layan an (Depe ndenc y)	→ RAD Leve l 1 (Dep ende ncy)	→ RAD Level 2 (Depe nden cy)	→ RAD Level 3 (Depe ndenc y)	→ RAD Level 4 (Depe ndenc y)	→ Insta nsi (Dep ende ncy)
	an Hubungan Industrial	karyawan yang berselisih	hubungan industrial pada kota Blitar sebagai pelaporan pada provinsi		k		Indus trial	n Indu strial				gkata n Hubu ngan Indust rial dan Jamin an Sosial Tenag a Kerja	rjaan	Pend idika n dan Tena ga Kerja	agake rjaan	naan Keten agake rjaan Regio nal	Penyel esaian Perseli sihan Hubu ngan Indust rial	Blita r
8	Data Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Berisi data perusaha an yang mencatatk an PKB	Menghimp un data PKB yakni untuk memeriksa ulang peraturan yang telah dibuat apakah telah sesuia dengan Perundan	Ter bat as	Dat a Sta tisti k	Ta hu na n	Bidan g Hubu ngan Indus trial	Bida ng Hub unga n Indu strial				RAB.0 6.02.0 3 Penin gkata n Hubu ngan Indust rial dan Jamin an Sosial	RAL.0 1.32 Keten agake rjaan	RAD. 06 Infor masi Pend idika n dan Tena ga Kerja	RAD.0 6.02 Data Keten agake rjaan	RAD.0 6.02.0 1 Pemb inaan Keten agake rjaan Regio nal	RAD.0 6.02.0 1.05 Data Perjan jian Kerja Bersa ma (PKB)	Peme rinta h Kota Blita r

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Penaung Jawa Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ RAD Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
			g-undangan yang berlaku									Tenaga Kerja						
9	Data Peraturan Perusahaan	Berisi data nama perusahaan yang telah mencatatkan PP	Menghimpun data PP yakni untuk memeriksa ulang peraturan yang telah dibuat apakah telah sesuai dengan Perundangan g-undangan yang berlaku	Terbatas	Data Statistik	Tahunan	Bidang Hubungan Industrial	Bidang Hubungan Industrial				RAB.06.02.03 Peningkatan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAD.06 Informatika Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 Data Ketenagakerjaan	RAD.06.02.01 Pembiayaan Ketenagakerjaan Regional	RAD.06.02.01.06 Data Peraturan Perusahaan	Pemerintah Kota Blitar
10	Data LKS Bipartit	Berisi data perusahaan yang mencatatkan	Menghimpun data LKS Bipartit yakni	Terbatas	Data Statistik	Tahunan	Bidang Hubungan Industrial	Bidang Hubungan Industrial				RAB.06.02.03 Peningkatan	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAD.06 Informatika Pendidikan	RAD.06.02 Data Ketenagakerjaan	RAD.06.02.01 Pembiayaan LKS	RAD.06.02.01.07 Data LKS	Pemerintah Kota Blitar

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Infor masi yang Terka it (Outp ut)	Intero perabi litas	→ Prose s Bisnis (Depe ndenc y)	→ Layan an (Depe ndenc y)	→ RAD Leve l 1 (Dep ende ncy)	→ RAD Level 2 (Depe nden cy)	→ RAD Level 3 (Depe ndenc y)	→ RAD Level 4 (Depe ndenc y)	→ Insta nsi (Dep ende ncy)
		an LKS Bipartit	untuk memeriksa ulang peraturan yang telah dibuat apakah telah sesuia dengan Perundan g- undangan yang berlaku				trial	Indu strial				n Hubu ngan Indust rial dan Jamin an Sosial Tenag a Kerja		idika n dan Tena ga Kerja	rjaan	Keten agake rjaan Regio nal	Bipart it	r
1 1	Data Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	Berisi data perusahaa n yang mencatatk an PKWT	Menghimp un data PKWT yakni untuk memeriksa ulang peraturan yang telah dibuat apakah telah	Ter bat as	Dat a Sta tisti k	Ta hu na n	Bidan g Hubu ngan Indus trial	Bida ng Hub unga n Indu strial				RAB.0 6.02.0 3 Penin gkata n Hubu ngan Indust rial dan Jamin	RAL.0 1.32 Keten agake rjaan	RAD. 06 Infor masi Pend idika n dan Tena ga Kerja	RAD.0 6.02 Data Keten agake rjaan	RAD.0 6.02.0 1 Pemb inaan Keten agake rjaan Regio nal	RAD.0 6.02.0 1.08 Data Perjan jian Kerja Waktu Terten tu	Peme rinta h Kota Blita r

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Infor masi yang Terkait (Output)	Intero perabi litas	← Proses Bisnis (Dependenc y)	→ Layan an (Dependenc y)	→ RAD Level 1 (Dependenc y)	→ RAD Level 2 (Dependenc y)	→ RAD Level 3 (Dependenc y)	→ RAD Level 4 (Dependenc y)	→ Instansi (Dependenc y)
			sesuia dengan Perundan g- undangan yang berlaku									an Sosial Tenaga Kerja						
1 2	Layanan DTKS	Rekap DTKS Kota Blitar	Untuk menjelask an kepada publik jumlah DTKS yang terupdate	Ter bu ka		Bulan	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial				RAB.0 4 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAL.0 1.26.0 2 Penanganan Fakir Miskin	RAD.0 04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.0 4.02 Data Sosial	RAD.0 4.02.0 5 Penanganan Fakir Miskin	RAB.0 4.02.0 5.01 Pengelolaan DTKS	Pemerintah Kota Blitar
1 3	LKSA	Jumlah Panti Asuhan di Kota Blitar	Untuk menjelask an kepada publik jumlah LKSA di Kota Blitar			Tahun	Bidang Rehabilitasi Sosial	Bidang Rehabilitasi Sosial				RAB.0 4 Perlindungan Sosial dan Kesch	RAL.0 1.25.0 8 Rehabilitasi	RAD.0 04 Informasi Perlindungan Sosial	RAD.0 4.02 Data Sosial	RAD.0 4.02.0 1 Pembinaan Sosial Regional	RAD.0 4.02.0 1.01 LKSA	Pemerintah Kota Blitar

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	Proses Bisnis (Dependency)	Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ RAD Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
1 4	Layanan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Penerima Manfaat Rehabilitasi Sosial	Untuk menjelaskan kepada publik jumlah KPM yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	Terbuka		Tahunan	Bidang Rehabilitasi Sosial	Bidang Rehabilitasi Sosial				atan RAB.04 Perlington Sosial dan Kesehatan	RAL.01.25.08 Rehabilitasi	l dan Kesehatan RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAD.04.02 Data Sosial	RAD.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional	RAD.04.02.01.02 Layanan Rehabilitasi Sosial	Pemerintah Kota Blitar
1 5	Data Calon Peserta Pelatihan	Berisi data calon peserta pelatihan yang akan mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	Menghimpun data calon peserta pelatihan berbasis kompetensi untuk selanjutnya di seleksi	Terbatas	Data Statistik	Realtime	Bidang Tenaga Kerja	Bidang Tenaga Kerja				RAB.06.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing	RAL.01.32.04 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 Data Ketenagakerjaan	RAD.06.02.01 Bidang Ketenagakerjaan	RAD.06.02.01.01 Data Calon Peserta Pelatihan	Pemerintah Kota Blitar

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Infor masi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ RAD Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
												Tenaga Kerja Serta Produktifitas						
1 6	Data Pencari Kerja	Berisi data diri Pencari kerja yakni nama, alamat, pendidikan terakhir dll	Menghimpun data pencari kerja untuk selanjutnya dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan selanjutnya	Terbatas	Data Statistik	Tiga Bulanan	Bidang Tenaga Kerja	Bidang Tenaga Kerja				RAB.06.02.02 Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	RAL.01.32.05 Penerimaan Tenaga Kerja	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 Data Ketenagakerjaan	RAD.06.02.01 Bidang Ketenagakerjaan	RAD.06.02.01.02 Data Pencari Kerja	Pemerintah Kota Blitar
1 7	Data Penempat	berisi data yang	Menghimpun data	Terbatas	Data	Tahun	Bidang	Bidang				RAB.06.02.02	RAL.01.32.05	RAD.06	RAD.06.02	RAD.06.02.01	RAD.06.02.01.02	Pemerintah

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ RAD Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
	an Tenaga	terdiri dari nama, pendidikan terakhir dan lokasi penempatan tenaga kerja	pencari kerja yang telah bekerja, ditempatkan oleh BKK	as	Statistik	na	Tenaga Kerja	Tenaga Kerja				2 Peningkatan Penerimaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	5 Penerimaan Tenaga Kerja	Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	Data Ketenagakerjaan	1 Bidang Ketenagakerjaan	1.02 Data Penerimaan Tenaga	h Kota Blitar
1 8	Data Bursa Kerja Khusus (BKK)	Berisi Data Bursa Kerja Khusus (BKK) terdiri dari nama SMK, alamat dan nama	Menghimpun data BKK yang telah mendaftarkan diri untuk bergabung menjadi partner dinas	Terbatas	Data Statistik	Tahunan	Bidang Tenaga Kerja	Bidang Tenaga Kerja				RAB.06.02.02 Peningkatan Penerimaan Tenaga	RAL.01.32.05 Penerimaan Tenaga Kerja	RAD.06 Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAD.06.02 Data Ketenagakerjaan	RAD.06.02.01 Pembinaan Ketenagakerjaan Regional	RAD.06.02.01.03 Data Bursa Kerja Khusus (BKK)	Pemerintah Kota Blitar

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Infor masi yang Terkait (Output)	Intero perabi litas	→ Prose s Bisnis (Depe ndenc y)	→ Layan an (Depe ndenc y)	→ RAD Level 1 (Dep endenc y)	→ RAD Level 2 (Depe ndenc y)	→ RAD Level 3 (Depe ndenc y)	→ RAD Level 4 (Depe ndenc y)	→ Instansi (Dep endenc y)
		pengurus	dalam penempat an tenaga kerja									Kerja dan Perlua san Kesem patan Kerja						
1 9	Data Rekomend asi CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia)	Berisi data diri calon PMI yang akan berangkat , perusaha an penyalur PMI, jabatan calon PMI, dan negara tujuan	Menghimp un data calon PMI sebagai Bentuk Fasilitasi Perlindun gan PMI Pra dan Purna Penempat an Kerja di Luar Negeri oleh Dinas tenaga kerja.	Ter bat as	Dat a Sta tisti k	Ta hu na n	Bidan g Tenag a Kerja	Bida ng Tena ga Kerja			Ya	RAB.0 6.02.0 2 Penin gkata n Pene mpata n Tenag a Kerja dan Perlua san Kesem patan Kerja	RAL.0 1.32.0 5 Pene mpata n Tenag a Kerja	RAD. 06 Infor masi Pend idika n dan Tena ga Kerja	RAD.0 6.02 Data Keten agake rjaan	RAD.0 6.02.0 2 Manaj emen Pekerj a Migra n Indon esia	RAD.0 6.02.0 2.01 Data Reko mend asi CPMI (Calon Pekerj a Migra n Indon esia)	Peme rinta h Kota Blita r
2 0	Data Aplikasi				Dat a	Ta hu	Disko minfo	Dina s				RAB.0 9.06.0		RAD. 01	RAD.0 1.01	RAD.0 1.01.0	RAD.0 1.01.0	Peme rinta

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Penaung Jawab Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ RAD Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
	yang sudah mendapatkan sertifikat informasi				Lainnya	nan	tik	Komunikasi, Informasi dan Statistik				7.01 Pengelolaan Persandian		Informasi Perta hanan dan Luar Nege ri	Data Perta hanan	7 Perta hanan Siber	7.01 Data Aplikasi yang sudah mendapatkan sertifikat informasi	h Kota Blitar
2 1	Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah			Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Diskominfo tik	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik			Ya	RAB.0 9.03.0 3 Pengelolaan Data Statistik	RAL.0 2.09.0 3 Pengelolaan Data Dan Informasi	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.0 9.03 Data Informasi	RAD.0 9.03.0 3 Pengelolaan Data Statistik	RAD.0 9.03.0 3.03 Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan	Pemerintah Kota Blitar

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ RAD Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
2 2	Data Pasangan Usia Subur			Terbatas	Data Statistik	Bulanan	Penyuluhan KB	Dinas Pembinaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Bereencana				RAB.0 3.07.0 3.01 Keluarga Bereencana	RAL.0 1.23.0 4 Keluarga Bereencana	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.0 3.07 Data Kependudukan	RAD.0 3.07.0 3 Keluarga Bereencana	RAD.0 3.07.0 3.01 Data Pasangan Usia Subur	Pemerintah Kota Blitar
2 3	Data Peserta KB Baru			Terbatas	Data Statistik	Bulanan	Penyuluhan KB	Dinas Pembinaan Pere				RAB.0 3.07.0 3.01 Keluarga Bere	RAL.0 1.23.0 4 Keluarga Bere	RAD.03 Informasi Pembangu	RAD.0 3.07 Data Kependudukan	RAD.0 3.07.0 3 Keluarga Bere	RAD.0 3.07.0 3.02 Data Peserta KB	Pemerintah Kota Blitar

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ RAD Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
								mpu an, Perli ndun gan Anak dan Kelu arga Bere ncan a				cana	cana	nan Kewil ayah an		cana	Baru	
2 4	Data Peserta KB Aktif			Ter bat as	Dat a Sta tisti k	Bul an an	Penyu luh KB	Dina s Pemb erday aan Pere mpu an, Perli ndun gan Anak dan Kelu arga				RAB.0 3.07.0 3.01 Kelu arga Beren cana	RAL.0 1.23.0 4 Kelu arga Beren cana	RAD. 03 Infor masi Pemb angu nan Kewil ayah an	RAD.0 3.07 Data Kepem dudukan	RAD.0 3.07.0 3 Kelu arga Beren cana	RAD.0 3.07.0 3.03 Data Pesert a KB Aktif	Peme rinta h Kota Blita r

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sif at Da ta	Jen is Dat a	Val idi tas Da ta	Peng hasil Data/ Produ sen Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Infor masi yang Terka it (Outp ut)	Intero perabi litas	← Prose s Bisnis (Depe ndenc y)	→ Layan an (Depe ndenc y)	→ RAD Leve l 1 (Dep endenc y)	→ RAD Level 2 (Depe nden cy)	→ RAD Level 3 (Depe ndenc y)	→ RAD Level 4 (Depe ndenc y)	→ Insta nsi (Dep endenc y)
2 5	Data Unmet need			Ter bat as	Dat a Sta tisti k	Bul an an	Penyu luh KB	Bere ncan a Dina s Pemb erday aan Pere mpu an, Perli ndun gan Anak dan Kelu arga Bere ncan a				RAB.0 3.07.0 3.01 Kelua rga Beren cana	RAL.0 1.23.0 4 Kelua rga Beren cana	RAD. 03 Infor masi Pemb angu nan Kewil ayah an	RAD.0 3.07 Data Kepend udukan	RAD.0 3.07.0 3 Kelua rga Beren cana	RAD.0 3.07.0 3.04 Data Unmet need	Peme rinta h Kota Blita r
2 6	Data Pendampi ngan Calon Pengantin			Ter bat as	Dat a Sta tisti k	Bul an an	Tim Penda mping Kelua rga (TPK)	Dina s Pemb erday aan Pere				RAB.0 3.07.0 3.01 Penin gkata n	RAL.0 1.23.0 4 Kelua rga Beren	RAD. 03 Infor masi Pemb angu	RAD.0 3.07 Data Kepend udukan	RAD.0 3.07.0 4 Pemb erday aan	RAD.0 3.07.0 4.02 Data Penda mping	Peme rinta h Kota Blita r

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ RAD Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
								mpu an, Perli ndun gan Anak dan Kelu arga Bere ncan a				Ketah anan dan Keseja hteraa n Kelu arga	cana	nan Kewil ayah an		Partisi pasi Masya rakat	an Calon Penga ntin	
2 7	Data Pendampi ngan Ibu Hamil			Ter bat as	Dat a Sta tisti k	Bul an an	Tim Penda mping Kelu arga (TPK)	Dina s Pemb erday aan Pere mpu an, Perli ndun gan Anak dan Kelu arga				RAB.0 3.07.0 3.01 Penin gkata n Ketah anan dan Keseja hteraa n Kelu arga	RAL.0 1.23.0 4 Kelu arga Beren cana	RAD. 03 Infor masi Pemb angu nan Kewil ayah an	RAD.0 3.07 Data Kepend udukan	RAD.0 3.07.0 4 Pemb erday aan Partisi pasi Masya rakat	RAD.0 3.07.0 4.03 Data Penda mping an Ibu Hamil	Peme rinta h Kota Blita r

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ RAD Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
28	Data Pendampingan Ibu Pasca Sain			Terbatas	Data Statistik	Bulanan	Tim Pendamping Keluarga (TPK)	Bere ncan a Dinas Pemb erday aan Pere mpu an, Perli ndun gan Anak dan Kelu arga Bere ncan a				RAB.0 3.07.0 3.01 Penin gkata n Ketah anan dan Keseja hteraa n Kelu arga	RAL.0 1.23.0 4 Kelu arga Beren cana	RAD. 03 Infor masi Pemb angu nan Kewil ayah an	RAD.0 3.07 Data Kependudukan	RAD.0 3.07.0 4 Pemb erday aan Partisi pasi Masya rakat	RAD.0 3.07.0 4.04 Data Penda mping an Ibu Pasca Sain	Pemerintah Kota Blitar
29	Data Pendampingan Bayi usia Dua Tahun (Baduta)			Terbatas	Data Statistik	Bulanan	Tim Pendamping Keluarga (TPK)	Dinas Pemb erday aan Pere				RAB.0 3.07.0 3.01 Penin gkata n	RAL.0 1.23.0 4 Kelu arga Beren	RAD. 03 Infor masi Pemb angu	RAD.0 3.07 Data Kependudukan	RAD.0 3.07.0 4 Pemb erday aan	RAD.0 3.07.0 4.05 Data Penda mping	Pemerintah Kota Blitar

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Infor masi yang Terka it (Outp ut)	Intero perabi litas	→ Prose s Bisnis (Depe ndenc y)	→ Layan an (Depe ndenc y)	→ RAD Leve l 1 (Dep endenc y)	→ RAD Level 2 (Depe nden cy)	→ RAD Level 3 (Depe ndenc y)	→ RAD Level 4 (Depe ndenc y)	→ Insta nsi (Dep endenc y)
								mpu an, Perli ndun gan Anak dan Kelu arga Bere ncan a				Ketah anan dan Keseja hteraa n Kelu arga	cana	nan Kewil ayah an		Partisi pasi Masya rakat	an Bayi usia Dua Tahun (Badu ta)	
3 0	Data Kelompok Tribina			Ter bat as	Dat a Sta tisti k	Ta hu na n	Kader Tribin a	Dina s Pemb erday aan Pere mpu an, Perli ndun gan Anak dan Kelu arga				RAB.0 3.07.0 3.01 Penin gkata n Ketah anan dan Keseja hteraa n Kelu arga	RAL.0 1.23.0 4 Kelu arga Beren cana	RAD. 03 Infor masi Pemb angu nan Kewil ayah an	RAD.0 3.07 Data Kepen dudukan	RAD.0 3.07.0 4 Pemb erday aan Partisi pasi Masya rakat	RAD.0 3.07.0 4.06 Data Kelom pok Tribin a	Peme rinta h Kota Blita r

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Infor masi yang Terka it (Outp ut)	Intero perabi litas	→ Prose s Bisnis (Depe ndenc y)	→ Layan an (Depe ndenc y)	→ RAD Leve l 1 (Dep ende ncy)	→ RAD Level 2 (Depe nden cy)	→ RAD Level 3 (Depe nden cy)	→ RAD Level 4 (Depe nden cy)	→ Insta nsi (Dep ende ncy)
3 1	Data Kelompok PIK-R			Ter bat as	Dat a Sta tisti k	Ta hu na n	Kader Tribin a	Bere ncan a Dina s Pemb erday aan Pere mpu an, Perli ndun gan Anak dan Kelu arga Bere ncan a				RAB.0 3.07.0 3.01 Penin gkata n Ketah anan dan Keseja hteraa n Kelu arga	RAL.0 1.23.0 4 Kelu arga Beren cana	RAD. 03 Infor masi Pemb angu nan Kewil ayah an	RAD.0 3.07 Data Kepen dudu kan	RAD.0 3.07.0 4 Pemb erday aan Partisi pasi Masya rakat	RAD.0 3.07.0 4.07 Data Kelom pok PIK-R	Peme rinta h Kota Blita r
3 2	Data Kelompok UPPKA			Ter bat as	Dat a Sta tisti k	Ta hu na n	Kader Tribin a	Dina s Pemb erday aan Pere				RAB.0 3.07.0 3.01 Penin gkata n	RAL.0 1.23.0 4 Kelu arga Beren	RAD. 03 Infor masi Pemb angu	RAD.0 3.07 Data Kepen dudu kan	RAD.0 3.07.0 4 Pemb erday aan	RAD.0 3.07.0 4.08 Data Kelom pok	Peme rinta h Kota Blita r

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Infor masi yang Terka it (Outp ut)	Intero perabi litas	→ Prose s Bisnis (Depe ndenc y)	→ Layan an (Depe ndenc y)	→ RAD Leve l 1 (Dep endenc y)	→ RAD Level 2 (Depe ndenc y)	→ RAD Level 3 (Depe ndenc y)	→ RAD Level 4 (Depe ndenc y)	→ Instansi (Dep endenc y)
								mpu an, Perli ndun gan Anak dan Kelu arga Bere ncan a				Ketah anan dan Keseja hteraa n Kelu arga	cana	nan Kewil ayah an		Partisi pasi Masya rakat	UPPK A	
3 3	Data Perempua n Kepala Keluarga			Ter bat as	Dat a Sta tisti k	Ta hu na n	DP3A KB	Dina s Pemb erday aan Pere mpu an, Perli ndun gan Anak dan Kelu arga				RAB.0 4.03.0 2.01 Pembe rdaya an Perem puan	RAL.0 1.27.0 1 Keset araan Gende r	RAD. 04 Infor masi Perli ndun gan Sosia l dan Kese hata n	RAD.0 4.03 Data Pemb erday aan Perem puan	RAD.0 4.03.0 2 Pemb erday aan Perem puan	RAD.0 4.03.0 2.01 Data Perem puan Kepal a Kelu arga	Peme rinta h Kota Blita r

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ RAD Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
3 4	Data PUG/PPRG			Terbatas	Data Keuangan	Tahun	Seluruh Perangkat Daerah	Bere ncan a Dinas Pemb erday aan Pere mpu an, Perli ndun gan Anak dan Kelu arga Bere ncan a				RAB.0 4.03.0 2.01 Pembe rdaya an Perem puan	-	RAD. 04 Infor masi Perli ndun gan Sosia l dan Kese hata n	RAD.0 4.03 Data Pemb erday aan Perem puan	RAD.0 4.03.0 3 Keset araan Gende r	RAD.0 4.03.0 3.01 Data PUG/ PPRG	Peme rinta h Kota Blita r
3 5	Data Kasus Kekerasan Anak			Ter tut up	Data Sta tisti k	Re alti me	P2TP2 A	Dinas Pemb erday aan Pere				RAB.0 4.03.0 4.01 Perlin dunga n	RAL.0 1.27.0 2 Perlin dunga n	RAD. 04 Infor masi Perli ndun	RAD.0 4.03 Data Pemb erday aan	RAD.0 4.03.0 4 Perlin dunga n	RAD.0 4.03.0 4.01 Data Kasus Keker	Peme rinta h Kota Blita r

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Infor masi yang Terka it (Outp ut)	Intero perabi litas	→ Prose s Bisnis (Depe ndenc y)	→ Layan an (Depe ndenc y)	→ RAD Leve l 1 (Dep endenc y)	→ RAD Level 2 (Depe nden cy)	→ RAD Level 3 (Depe ndenc y)	→ RAD Level 4 (Depe ndenc y)	→ Insta nsi (Dep endenc y)
								mpu an, Perli ndun gan Anak dan Kelu arga Bere ncan a				Anak	Anak	gan Sosia l dan Kese hata n	Perem puan	Anak	asan Anak	
3 6	Data Kasus Kekerasan Perempua n			Ter tut up	Dat a Sta tisti k	Re alti me	P2TP2 A	Dina s Pemb erday aan Pere mpu an, Perli ndun gan Anak dan Kelu arga				RAB.0 4.03.0 4.01 Perlin dunga n Anak	RAL.0 1.27.0 3 Perlin dunga n Hak Perem puan	RAD. 04 Infor masi Perli ndun gan Sosia l dan Kese hata n	RAD.0 4.03 Data Pemb erday aan Perem puan	RAD.0 4.03.0 5 Perlin dunga n Hak Perem puan	RAD.0 4.03.0 5.01 Data Kasus Keker asan Perem puan	Peme rinta h Kota Blita r

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validasi Data	Penghasil Data/ Produk Data	Penanggung Jawab Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	Proses Bisnis (Dependency)	Layanan (Dependency)	RAD Level 1 (Dependency)	RAD Level 2 (Dependency)	RAD Level 3 (Dependency)	RAD Level 4 (Dependency)	Instansi (Dependency)
								Bere nca a										
3 7	Data Permohonan Pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB)	Data Pemohon Pengajuan NIB atau Nomor Induk berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS.	Dengan memiliki NIB, usaha yang dirintis akan memiliki legalitas dan memudah kan untuk mengakses hal-hal yang terkait di bidang administratif. Dengan data UMKM yang telah tercatat	Ter bu ka	Dat a Lai nnya	Lai nn ya	Dinas Penan aman Modal dan Pelayan an Terpadu Satu Pintu	Dinas Pena nama n Moda l dan Pelayan an Terpadu Satu Pintu				RAB.0 2.08.0 9.01 Pelapo ran Layan an	RAL.0 1.12.0 6 Pelaya nan Fasilit as Penan aman Modal	RAD. 02 Infor masi Ekon omi dan Indu stri	RAD.0 2.08 Data Invest asi	RAD.0 2.08.0 3 Manaj emen Perizi nan Penan aman Modal	RAD.0 2.08.0 3.01 Data Permo honan Pengaj uan Nomor Induk Berus aha (NIB)	Peme rinta h Kota Blita r

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validasi Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Infor masi yang Terka it (Outp ut)	Intero perabi litas	→ Prose s Bisnis (Depe ndenc y)	→ Layan an (Depe ndenc y)	→ RAD Leve l 1 (Dep ende ncy)	→ RAD Level 2 (Depe nden cy)	→ RAD Level 3 (Depe ndenc y)	→ RAD Level 4 (Depe ndenc y)	→ Insta nsi (Dep ende ncy)
			secara administratif, pemerintah dapat dengan mudah memberikan program- program yang membantu UMKM dengan tepat sasaran sesuai kebutuhan.															
3 8	Data Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan	Data SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung	Manfaat utamanya adalah menjaga kondisi lingkungan dari	Ter bu ka	Dat a Lai nnya	Lai nnya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Dinas Pena nama n Moda l dan				RAB.0 2.08.0 9.01 Pelaporan Layanan	RAL.0 1.12.0 6 Pelayan an Fasilitas	RAD. 02 Infor masi Ekon omi dan	RAD.0 2.08 Data Investasi	RAD.0 2.08.0 3 Manaj emen Perizinan	RAD.0 2.08.0 3.02 Data Surat Pernyataan	Pemerintah Kota Blitar

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validasi Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Infor masi yang Terka it (Outp ut)	Intero perabi litas	→ Prose s Bisnis (Depe ndenc y)	→ Layan an (Depe ndenc y)	→ RAD Leve l 1 (Dep ende ncy)	→ RAD Level 2 (Depe nden cy)	→ RAD Level 3 (Depe ndenc y)	→ RAD Level 4 (Depe ndenc y)	→ Insta nsi (Dep ende ncy)
	n (SPPL)	ng jawab usahadan /atau kegiatan untuk melakuka n pengelolaa n dan pemantau an lingkunga n hidup atas dampak lingkunga n hidup dari usaha dan/atau kegiatan ya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-	dampak negatif kegiatan usaha. Apabila pelaku UMKM telah mendaftar dan memiliki SPPL, maka Ia wajin memastik an agar kegiatan usahanya tidak menimbul kan kerusak an, pencemar an, atau dampak buruk lainnya				Terpa du Satu Pintu	Pelay anan Terp adu Satu Pintu					Penan aman Modal	Indu stri			Penan aman Modal	Pengel olaan Lingk ungan (SPPL)

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Infor masi yang Terka it (Outp ut)	Intero perabi litas	→ Prose s Bisnis (Depe ndenc y)	→ Layan an (Depe ndenc y)	→ RAD Leve l 1 (Dep enden cy)	→ RAD Level 2 (Depe nden cy)	→ RAD Level 3 (Depe nden cy)	→ RAD Level 4 (Depe nden cy)	→ Insta nsi (Dep ende ncy)
		UPL	bagi lingkunga n.															
3 9	Data Sertifikat Standar (SS)	Data Sertifikat Standar yang dimaksud merupaka n legalitas untuk melaksan akan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataa n Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakuka	Sertifikat standar digunaka n untuk menilai apakah pelaku usaha telah memenuh i standar yang ditetapka n. Selain itu, sertifikat standar berguna sebagai bentuk legalitas pelaku usaha dalam	Ter bu ka	Dat a Lai nny a	Lai nn ya	Dinas Penan aman Modal dan Pelay anan Terpa du Satu Pintu	Dina s Pena nama n Moda l dan Pelay anan Terp adu Satu Pintu				RAB.0 2.08.0 9.01 Pelapo ran Layan an	RAL.0 1.12.0 6 Pelaya nan Fasilit as Penan aman Modal	RAD. 02 Infor masi Ekon omi dan Indu stri	RAD.0 2.08 Data Invest asi	RAD.0 2.08.0 3 Manaj emen Perizi nan Penan aman Modal	RAD.0 2.08.0 3.03 Data Sertifi kat Stand ar (SS)	Peme rinta h Kota Blita r

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produk Data	Penggunaan Data/Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	Proses Bisnis (Dependency)	Layanan (Dependency)	RAD Level 1 (Dependency)	RAD Level 2 (Dependency)	RAD Level 3 (Dependency)	RAD Level 4 (Dependency)	Instansi (Dependency)
		n kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.	melaksanakan kegiatan usaha yang sudah sesuai dengan standar															
40	Data Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)	Data KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang	KKPR tidak hanya berfungsi sebagai acuan pemanfaatan ruang, tapi fungsi lain dari KKPR adalah sebagai acuan untuk administrasi pertanahan	Terbuka	Data Geospasial	Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				RAB.02.08.09.01 Pelaporan Layanan	RAL.01.12.06 Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	RAD.03 Manajemen Perizinan Penanaman Modal	RAD.02.08.03.04 Data Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR)	Pemerintah Kota Blitar

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validasi Data	Penghasil Data/ Produk Data	Penanggung Jawab Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	Proses Bisnis (Dependensi)	Layanan (Dependensi)	RAD Level 1 (Dependensi)	RAD Level 2 (Dependensi)	RAD Level 3 (Dependensi)	RAD Level 4 (Dependensi)	Instansi (Dependensi)
		(RDTR)	n dalam hal pengaturan hak dan kepemilikan tanah yang akan digunakan dalam kegiatan usaha.															
4 1	Data Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)	Data Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah salah satu satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat dalam	Meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan non-formal, LKP melengkapi pendidikan formal dalam	Terbuka	Data Lainnya	Tiga Tahun	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				RAB.0 2.08.0 9.01 Pelaporan Layanan	RAL.0 1.12.0 6 Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.0 2.08 Data Investasi	RAD.0 2.08.0 3 Manajemen Perizinan Penanaman Modal	RAD.0 2.08.0 3.05 Data Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan	Pemerintah Kota Blitar

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ RAD Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
4 2	Data Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Data Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau lebih disingkat dengan PKBM adalah suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan	Tujuan PKBM sendiri adalah memperluas kesempatan warga masyarakat, khususnya yang tidak mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan	Terbuka	Data Lainnya	Tiga Tahunan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				RAB.0 2.08.0 9.01 Pelaporan Layanan	RAL.0 1.12.0 6 Pelayan Fasilitas Penanaman Modal	RAD.0 02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.0 2.08 Data Investasi	RAD.0 2.08.0 3 Manajemen Perizinan Penanaman Modal	RAD.0 2.08.0 3.06 Data Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Pemerintah Kota Blitar

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validasi Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ RAD Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
4 3	Data Surat izin Praktek Dokter Hewan (SIP DRH)	nan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Data Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Hewan merupakan bukti tertulis yang secara sah diberikan oleh pemerintah daerah kepada Tenaga Kesehatan (Nakes) sebagai tanda	diri dan bekerja mencari nafkah. Surat Izin Praktik berfungsi sebagai penerbit. Dengan SIP, segala bentuk kegiatan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kesehatan , dapat dimonitor dengan baik.	Ter bu ka	Dat a Lai nny a	Li ma Ta hu na n	Dinas Penan aman Modal dan Pelayan an Terpa du Satu Pintu	Dina s Pena nama n Moda l dan Pelayan an Terpa du Satu Pintu				RAB.0 2.08.0 9.01 Pelapo ran Layan an	RAL.0 1.12.0 6 Pelaya nan Fasilit as Penan aman Modal	RAD. 02 Infor masi Ekon omi dan Indu stri	RAD.0 2.08 Data Invest asi	RAD.0 2.08.0 3 Manaj emen Perizi nan Penan aman Modal	RAD.0 2.08.0 3.07 Data Surat izin Prakte k Dokte r Hewa n (SIP DRH)	Peme rinta h Kota Blita r

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validasi Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Infor masi yang Terka it (Outp ut)	Intero perabi litas	← Prose s Bisnis (Depe ndenc y)	→ Layan an (Depe ndenc y)	→ RAD Leve l 1 (Dep ende ncy)	→ RAD Level 2 (Depe nden cy)	→ RAD Level 3 (Depe ndenc y)	→ RAD Level 4 (Depe ndenc y)	→ Instansi (Dep ende ncy)
		telah diberi kewenang an untuk menjalank an praktik.	Selain itu, SIP dapat mencegah bentuk kegiatan yang bertentan gan satu dengan yang lainnya															
4 4	Data Izin Operasion al Penyeleng garaan Program Pendidika n Anak Usia Dini (PAUD) Baru dan Perpanjan gan	Data Izin Operasion al Penyeleng garaan Program Pendidika n Anak Usia Dini (PAUD) Baru dan Perpanjan gan		Ter bu ka	Dat a Lai nny a	Tig a Ta hu na n	Dinas Penan aman Modal dan Pelay anan Terpa du Satu Pintu	Dina s Pena nama n Moda l dan Pelay anan Terp adu Satu Pintu				RAB.0 2.08.0 9.01 Pelapo ran Layan an	RAL.0 1.12.0 6 Pelaya nan Fasilit as Penan aman Modal	RAD. 02 Infor masi Ekon omi dan Indu stri	RAD.0 2.08 Data Invest asi	RAD.0 2.08.0 3 Manaj emen Perizi nan Penan aman Modal	RAD.0 2.08.0 3.08 Data Izin Opera sional Penyel engga raan Progra m Pendi dikan Anak Usia	Peme rinta h Kota Blita r

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validasi Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Infor masi yang Terka it (Outp ut)	Intero perabi litas	→ Prose s Bisnis (Depe ndenc y)	→ Layan an (Depe ndenc y)	→ RAD Leve l 1 (Dep ende ncy)	→ RAD Level 2 (Depe nden cy)	→ RAD Level 3 (Depe ndenc y)	→ RAD Level 4 (Depe ndenc y)	→ Insta nai (Dep ende ncy)
																	Dini (PAUD) Baru dan Perpa njang an	
4 5	Data Izin Operasion al Penyeleng garaan Program Pendidika n Taman Kanak - kanak (TK) Baru dan Perpanjan gan	Data Izin Operasion al Penyeleng garaan Program Pendidika n Taman Kanak - kanak (TK) Baru dan Perpanjan gan		Ter bu ka	Dat a Lai nny a	Tig a Ta hu na n	Dinas Penan aman Modal dan Pelay anan Terpa du Satu Pintu	Dina s Pena nama n Moda l dan Pelay anan Terp adu Satu Pintu				RAB.0 2.08.0 9.01 Pelapo ran Layan an	RAL.0 1.12.0 6 Pelaya nan Fasilit as Penan aman Modal	RAD. 02 Infor masi Ekon omi dan Indu stri	RAD.0 2.08 Data Invest asi	RAD.0 2.08.0 3 Manaj emen Perizi nan Penan aman Modal	RAD.0 2.08.0 3.09 Data Izin Opera sional Penyel engga raan Progra m Pendi dikan Tama n Kanak - kanak (TK)	Peme rinta h Kota Blita r

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Infor masi yang Terkait (Output)	Intero perabi litas	→ Prose s Bisnis (Depe ndenc y)	→ Layan an (Depe ndenc y)	→ RAD Leve l 1 (Dep ende ncy)	→ RAD Level 2 (Depe nden cy)	→ RAD Level 3 (Depe ndenc y)	→ RAD Level 4 (Depe ndenc y)	→ Insta nsi (Dep ende ncy)
4 6	Data Izin Pendidika n - Izin Operasion al Penyeleng garaan Program Pendidika n Sekolah Dasar (SD) Baru dan Perpanjan gan	Data Izin Pendidika n - Izin Operasion al Penyeleng garaan Program Pendidika n Sekolah Dasar (SD) Baru dan Perpanjan gan		Ter bu ka	Dat a Lai nny a	Tig a Ta hu na n	Dinas Penan aman Modal dan Pelay anan Terpa du Satu Pintu	Dina s Pena nama n Moda l dan Pelay anan Terp adu Satu Pintu				RAB.0 2.08.0 9.01 Pelapo ran Layan an	RAL.0 1.12.0 6 Pelaya nan Fasilit as Penan aman Modal	RAD. 02 Infor masi Ekon omi dan Indu stri	RAD.0 2.08 Data Invest asi	RAD.0 2.08.0 3 Manaj emen Perizi nan Penan aman Modal	Baru dan Perpa njang an RAD.0 2.08.0 3.10 Data Izin Pendi dikan - Izin Opera sional Penyel engga raan Progra m Pendi dikan Sekola h Dasar (SD) Baru	Peme rinta h Kota Blita r

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Infor masi yang Terka it (Outp ut)	Intero perabi litas	→ Prose s Bisnis (Depe ndenc y)	→ Layan an (Depe ndenc y)	→ RAD Leve l 1 (Dep ende ncy)	→ RAD Level 2 (Depe nden cy)	→ RAD Level 3 (Depe ndenc y)	→ RAD Level 4 (Depe ndenc y)	→ Insta nsi (Dep ende ncy)
4 7	Data Izin Operasion al Penyeleng garaan Program Pendidika n Sekolah Menengah Pratama (SMP) Baru dan Perpanjan gan	Data Izin Operasion al Penyeleng garaan Program Pendidika n Sekolah Menengah Pratama (SMP) Baru dan Perpanjan gan		Ter bu ka	Dat a Lai nny a	Tig a Ta hu na n	Dinas Penan aman Modal dan Pelay anan Terpa du Satu Pintu	Dina s Pena nama n Moda l dan Pelay anan Terp adu Satu Pintu				RAB.0 2.08.0 9.01 Pelapo ran Layan an	RAL.0 1.12.0 6 Pelaya nan Fasilit as Penan aman Modal	RAD. 02 Infor masi Ekon omi dan Indu stri	RAD.0 2.08 Data Invest asi	RAD.0 2.08.0 3 Manaj emen Perizi nan Penan aman Modal	dan Perpa njang an RAD.0 2.08.0 3.11 Data Izin Opera sional Penyel engga raan Progra m Pendi dikan Sekola h Mene ngah Prata ma (SMP) Baru dan	Peme rinta h Kota Blita r

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Infor masi yang Terka it (Outp ut)	Intero perabi litas	→ Prose s Bisnis (Depe ndenc y)	→ Layan an (Depe ndenc y)	→ RAD Leve l 1 (Dep ende ncy)	→ RAD Level 2 (Depe nden cy)	→ RAD Level 3 (Depe ndenc y)	→ RAD Level 4 (Depe ndenc y)	→ Insta nsi (Dep ende ncy)
4 8	Data Izin Reklame	Izin Penyeleng garaan Reklame Permanen yang selanjutny a disingkat (IPR) Permanen adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerinta h Daerah Kota sebagai dasar peletakan reklame dengan	Pembuata n reklame bertujuan untuk memberik an informasi kepada khalayak tentang suatu barang, jasa, atau hal lain dengan cara yang menarik.	Ter bu ka	Dat a Lai nny a	Ta hu na n	Dinas Penan aman Modal dan Pelay anan Terpa du Satu Pintu	Dina s Pena nama n Moda l dan Pelay anan Terp adu Satu Pintu				RAB.0 2.08.0 9.01 Pelapo ran Layan an	RAL.0 1.12.0 6 Pelaya nan Fasilit as Penan aman Modal	RAD. 02 Infor masi Ekon omi dan Indu stri	RAD.0 2.08 Data Invest asi	RAD.0 2.08.0 3 Manaj emen Perizi nan Penan aman Modal	Perpa njang an RAD.0 2.08.0 3.12 Data Izin Rekla me	Peme rinta h Kota Blita r

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validasi Data	Penghasil Data/ Produk Data	Penanggung Jawab Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	Proses Bisnis (Dependensi)	Layanan (Dependensi)	RAD Level 1 (Dependensi)	RAD Level 2 (Dependensi)	RAD Level 3 (Dependensi)	RAD Level 4 (Dependensi)	Instansi (Dependensi)
49	Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	memperhatikan estetika, edukasi, dan keserasian lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sebuah produk hukum berisi perizinan yang diberikan oleh	Memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap tanah dan bangunan pemilik properti.	Terbuka	Data Lainnya	Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				RAB.02.08.09.01 Pelaporan Layanan	RAL.01.12.06 Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal	RAD.02 Informatika dan Industri	RAD.02.08 Data Investasi	RAD.03 Manajemen Perizinan Penanaman Modal	RAD.03.13 Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Pemerintah Kota Blitar

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validasi Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Infor masi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ RAD Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
		Kepala Daerah kepada pemilik bangunan . IMB berlaku untuk membangun baru termasuk juga mengubah , memperluas, mengurangi, merawat atau merobohkan bangunan .																
50	Data Izin Utilitas dan Izin	Data Izin Utilitas dan Izin		Terbuka	Data Lai	Lain ya	Dinas Penanaman	Dinas Pena				RAB.0 2.08.0 9.01	RAL.0 1.12.0 6	RAD. 02 Infor	RAD.0 2.08 Data	RAD.0 2.08.0 3	RAD.0 2.08.0 3.14	Pemerintah

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	Penanggung Jawab Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	Proses Bisnis (Dependensi)	Layanan (Dependensi)	RAD Level 1 (Dependensi)	RAD Level 2 (Dependensi)	RAD Level 3 (Dependensi)	RAD Level 4 (Dependensi)	Instansi (Dependensi)
	Trotoar	Trotoar			nnya		Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	nama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				Pelaporan Layanan	Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal	masi Ekonomi dan Industri	Investasi	Manajemen Perizinan Penanaman Modal	Data Izin Utilitas dan Izin Trotoar	Kota Blitar
5 1	Laporan Pendataan Andalalin	Menggambar dan menganalisis dampak lalu lintas pada suatu area atau proyek tertentu	Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana lalu lintas mempengaruhi lingkungan dan infrastruktur, serta	Terbatas	Data Statistik	Tahunan	Dinas Perhubungan Kota Blitar	Dinas Perhubungan Kota Blitar	- Volume kendaraan - Jenis kendaraan - Kecepatan - Pola pergerakan	Dokumen Rekomendasi Andalalin	Ya	RAB.03.03.06.01 Rekomendasi Andalalin	RAL.01.19.01.01 Pelayanan Pembelian Rekomendasi Izin Andalalin	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03 Data Transportasi	RAD.03.03.03 Pengelolaan Keamanan dan Keselematan Transportasi	RAD.03.03.01 Data Andalalin	Pemerintah Kota Blitar

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wall Data	Informasi yang Terkait (Input)	Infor masi yang Terkait (Output)	Intero perabi litas	→ Prose s Bisnis (Depe ndenc y)	→ Layan an (Depe ndenc y)	→ RAD Leve l 1 (Dep endenc y)	→ RAD Level 2 (Depe nden cy)	→ RAD Level 3 (Depe ndenc y)	→ RAD Level 4 (Depe ndenc y)	→ Insta nsi (Dep endenc y)
			memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau mitigasi															
5 2	Data Pelatihan SDM IKM			Ter tut up	Dat a Sta tisti k	Ta hu na n	Dinas Perin dustri an dan Perda ganga n	Dina s Perin dustr ian dan Perd agan gan				RAB.0 2.01.0 2.01 Penge mban gan SDM IKM	RAL.0 1.05.0 8 Penge mban gan Indus tri	RAD. 02 Infor masi Ekon omi dan Indus tri	RAD.0 2.01 Data Indus tri	RAD.0 2.01.0 2 Penu mbuh - Kemb angan Indus tri Dala m Negeri	RAD.0 2.01.0 2.01 Pelati han SDM IKM	Peme rinta h Kota Blita r
5 3	Data Pelatihan Mutu Produk			Ter tut up	Dat a Sta tisti k	Ta hu na n	Dinas Perin dustri an dan Perda ganga n	Dina s Perin dustr ian dan Perd				RAB.0 2.01.0 2.02 Penin gkata n Kualit	RAL.0 1.05.0 8 Penge mban gan Indus	RAD. 02 Infor masi Ekon omi dan	RAD.0 2.01 Data Indus tri	RAD.0 2.01.0 2 Penu mbuh - Kemb	RAD.0 2.01.0 2.02 Pelati han Mutu Produ	Peme rinta h Kota Blita r

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Penaung Jawab Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ RAD Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
							n	agan gan				as Mutu Produk	tri	Indu stri		angan Indus tri Dala m Negeri	k	
5 4	Data Pedagang Pasar			Ter tut up	Dat a Sta tisti k	Lai nn ya	Dinas Perin dustri an dan Perda ganga n	Dina s Perin dustri an dan Perd agan gan				RAB.0 2.02.0 2.03 Pembi naan dan Penga wasan Pedag ang Pasar	RAL.0 1.06.0 6 Pengel olaan Saran a dan Prasa rana Perda ganga n	RAD. 02 Infor masi Ekon omi dan Indu stri	RAD.0 2.02 Data Perda ganga n	RAD.0 2.02.0 2 Pengel olaan Perda ganga n	RAD.0 2.02.0 2.01 Penda taan Pedag ang Pasar	Peme rinta h Kota Blita r
5 5	Data Peserta Promosi Produk			Ter tut up	Dat a Sta tisti k	Ta hu na n	Dinas Perin dustri an dan Perda ganga n	Dina s Perin dustri an dan Perd agan gan				RAB.0 2.02.0 2.04 Fasilit asi Promo si Produ k	RAL.0 1.06.0 7 Penge mban gan Perda ganga n	RAD. 02 Infor masi Ekon omi dan Indu stri	RAD.0 2.02 Data Perda ganga n	RAD.0 2.02.0 2 Pengel olaan Perda ganga n	RAD.0 2.02.0 2.02 Penda taan Pesert a Promo si	Peme rinta h Kota Blita r

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produksen Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Infor masi yang Terkait (Output)	Intero perabi litas	← Prose s Bisnis (Depe ndenc y)	→ Layan an (Depe ndenc y)	→ RAD Leve l 1 (Dep ende ncy)	→ RAD Level 2 (Depe nden cy)	→ RAD Level 3 (Depe ndenc y)	→ RAD Level 4 (Depe ndenc y)	→ Insta nsi (Dep ende ncy)
5 6	Data Monitorin g Harga Bahan Pokok			Ter bu ka	Dat a Sta tisti k	Ha ria n	Dinas Perin dustri an dan Perda gangan	Dina s Perin dustr ian dan Perda gan gan				RAB.0 2.02.0 2.06 Penga wasan Baran g Bered ar	RAL.0 1.06.0 5 Perlin dunga n Konsu men	RAD. 02 Infor masi Ekon omi dan Indu stri	RAD.0 2.02 Data Perda gangan	RAD.0 2.02.0 3 Perda gangan Dala m Negeri	RAD.0 2.02.0 3.01 Penga wasan Baran g Bered ar	Peme rinta h Kota Blita r
5 7	Data Pelayanan Tera dan Tera Ulang (TTU)			Ter tut up	Dat a Sta tisti k	Bul an an	Dinas Perin dustri an dan Perda gangan	Dina s Perin dustr ian dan Perda gan gan				RAB.0 2.02.0 8.01 Pelaya nan Tera dan Tera Ulang	RAL.0 1.06.0 5 Perlin dunga n Konsu men	RAD. 02 Infor masi Ekon omi dan Indu stri	RAD.0 2.02 Data Perda gangan	RAD.0 2.02.0 6 Stand ardisa si Dan Penge ndalia n Mutu	RAD.0 2.02.0 6.01 Pelaya nan Tera dan Tera Ulang (TTU)	Peme rinta h Kota Blita r
5 8	Jumlah Pemohon/ Petani/Kel ompok Tani yang mengajuk	Data Pemohon/ Petani/Kel ompok Tani di Kota	Untuk mengetah ui data pemohon/ petani/kel ompok	Ter bu ka	Dat a Lai nny a	Re alti me	Bidan g TPHP	Dina s Perta nian dan Keta	Jumlah pemohon/ petani/kel ompok tani yang memiliki	Jumla h surat rekom endas i	Ya	RAB.0 2.03.0 2.06 Reko mend asi	RAL.0 1.07.0 3 Reko mend asi	RAD. 02 Infor masi Ekon omi	RAD.0 2.03 Data Perta nian	RAD.0 2.03.0 7 Jumla h Petani	RAD.0 2.03.0 7.01 Jumla h Petani	Peme rinta h Kota Blita

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	Penanggung Jawab Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	Proses Bisnis (Dependensi)	Layanan (Dependensi)	RAD Level 1 (Dependensi)	RAD Level 2 (Dependensi)	RAD Level 3 (Dependensi)	RAD Level 4 (Dependensi)	Instansi (Dependensi)
	an Surat Rekomendasi pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Jenis Solar)	Blitar yang berusaha di bidang pertanian	tani yang mengajukan surat rekomendasi pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu (jenis solar)					hana n Pang an	usaha di bidang pertanian dengan menggunakan alat dan mesin pertanian berbahan bakar solar	pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu (jenis solar) yang diterbitkan		BBM bersubsidi	BBM Bersubsidi	dan Industri		yang mengajukan rekomendasi	yang mengajukan rekomendasi	r
5 9	APBD	Berisi data anggaran untuk 1 tahun berjalan		Terbuka	Data Keuangan	Tahunan	Bidang Anggaran	Kepala Badan				RAB.0 9.02.0 5 Penganggaran	RAL.0 2.02.0 4 Penganggaran	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.0 9.02 Data Keuangan	RAD.0 9.02.0 5 Penganggaran	RAD.0 9.02.0 5.01 APBD	Pemerintah Kota Blitar
6 0	Laporan Keuangan Daerah			Terbuka	Data Keuangan	Realtime	Bidang Perbendaharaan	Kepala Badan				RAB.0 9.02.0 6 Perbe	RAL.0 2.02.0 3 Perbe	RAD.09 Informasi	RAD.0 9.02 Data Keua	RAD.0 9.02.0 6 Perbe	RAD.0 9.02.0 6.01 Laporan	Pemerintah Kota

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	Penanggung Jawab Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	Proses Bisnis (Dependensi)	Layanan (Dependensi)	RAD Level 1 (Dependensi)	RAD Level 2 (Dependensi)	RAD Level 3 (Dependensi)	RAD Level 4 (Dependensi)	Instansi (Dependensi)
					ngan		raan & Akuntansi					ndaha raan	ndaha raan	Peme rinta han Umu m	ngan	ndaha raan	an Keuan gan Daera h	Blita r
6 1	Laporan Aset			Ter bu ka	Dat a Ke ua nga n	Re alti me	Bidan g Aset	Kepal a Bada n				RAB.0 9.02.0 8 Penga daan Dan Manaj emen Aset	RAL.0 2.02.0 5 Pengel olaan Baran g Milik Negar a	RAD. 09 Infor masi Peme rinta han Umu m	RAD.0 9.02 Data Keua ngan	RAD.0 9.02.0 8 Penga daan Dan Manaj emen Aset	RAD.0 9.02.0 8.01 Lapor an Aset	Peme rinta h Kota Blita r
6 2	ASN Berdasarkan Golongan			Ter bat as	Dat a Sta tisti k	Bul an an	Bidan g Infor masi dan Pemb inaan Apara tur	Kepal a Bada n Kepe gawai an Daer ah Kota Blitar				RAB.0 9.06.0 2 Manaj emen Apara tur Sipil Negar a	RAL.0 2.04.0 1 Manaj emen ASN	RAD. 09 Infor masi Peme rinta han Umu m	RAD.0 9.06 Data Apara tur Negar a	RAD.0 9.06.0 2 Manaj emen Apara tur Sipil Negar a	RAD.0 9.06.0 2.01 ASN Berda sarka n Golon gan	Peme rinta h Kota Blita r

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ RAD Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
6 3	ASN Berdasarkan Eselon			Terbatas	Data Statistik	Bulanan	Bidang Informasi dan Pembinaan Aparatur	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar				RAB.0 9.06.0 2 Manajemen Aparatur Sipil Negara	RAL.0 2.04.0 1 Manajemen ASN	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.0 9.06 Data Aparatur Negara	RAD.0 9.06.0 2 Manajemen Aparatur Sipil Negara	RAD.0 9.06.0 2.02 ASN Berdasarkan Eselon	Pemerintah Kota Blitar
6 4	ASN Berdasarkan Tipe Pegawai			Terbatas	Data Statistik	Bulanan	Bidang Informasi dan Pembinaan Aparatur	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar				RAB.0 9.06.0 2 Manajemen Aparatur Sipil Negara	RAL.0 2.04.0 1 Manajemen ASN	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.0 9.06 Data Aparatur Negara	RAD.0 9.06.0 2 Manajemen Aparatur Sipil Negara	RAD.0 9.06.0 2.03 ASN Berdasarkan Tipe Pegawai	Pemerintah Kota Blitar
6 5	ASN Berdasarkan Agama			Terbatas	Data Statistik	Bulanan	Bidang Informasi dan	Kepala Badan Kepegawaian				RAB.0 9.06.0 2 Manajemen	RAL.0 2.04.0 1 Manajemen	RAD.09 Informasi Pemerintahan	RAD.0 9.06 Data Aparatur	RAD.0 9.06.0 2 Manajemen	RAD.0 9.06.0 2.04 ASN Berdasarkan	Pemerintah Kota Blitar

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ RAD Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
							Pembinaan Aparatur	gawai an Daerah Kota Blitar				Aparatur Sipil Negara	ASN	rintan Umum	Negara	Aparatur Sipil Negara	sark n Agama	r
6 6	ASN Berdasarkan Usia			Terbatas	Data Statistik	Bulanan	Bidang Informasi dan Pembinaan Aparatur	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar				RAB.0 9.06.0 2 Manajemen Aparatur Sipil Negara	RAL.0 2.04.0 1 Manajemen ASN	RAD. 09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.0 9.06 Data Aparatur Negara	RAD.0 9.06.0 2 Manajemen Aparatur Sipil Negara	RAD.0 9.06.0 2.05 ASN Berdasarkan Usia	Pemerintah Kota Blitar
6 7	Data Mutasi dan Pensiun PNS			Terbatas	Data Statistik	Bulanan	Bidang Informasi dan Pembinaan Aparatur	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota				RAB.0 9.06.0 2 Manajemen Aparatur Sipil Negara	RAL.0 2.04.0 1 Manajemen ASN	RAD. 09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.0 9.06 Data Aparatur Negara	RAD.0 9.06.0 2 Manajemen Aparatur Sipil Negara	RAD.0 9.06.0 2.06 Data Mutasi dan Pensiun PNS	Pemerintah Kota Blitar

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ RAD Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
68	Informasi Kepegawaian			Terbatas	Data Statistik	Bulanan	Bidang Informasi dan Pembinaan Aparatur	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar				RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	RAL.02.04.01 Manajemen ASN	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.06 Data Aparatur Negara	RAD.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	RAD.09.06.02.07 Informasi Kepegawaian	Pemerintah Kota Blitar
69	Jumlah hewan sakit yang tertangani	Jumlah hewan sakit yang dilaporkan dan ditangani	Mengurangi kasus penyakit yang ada	Terbuka	Data Lainnya	Tiga Bulanan	Bidang Peternakan	Kepala Bidang Peternakan	mengetahui jumlah dan jenis kasus penyakit yang ada	Data kasus penyakit	Ya	RAB.02.03.02.01 Puskesmas	RAL.01.09.06 Puskesmas	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.05 Data Peternakan	RAD.02.05.07 Jumlah Hewan sakit yang tertangani	RAD.02.05.07.01 Jumlah Hewan sakit yang tertangani	Pemerintah Kota Blitar
70	Data Koperasi	Untuk mengetahui data koperasi	untuk memberikan gambaran	Terbuka		Bulanan	bidang koper	Kepala Dinas				Pendaftaran Koperasi		RAD.02 Informasi	RAD.02.09 Data Koper	RAD.02.09.06 Penilaian	RAD.02.09.06.01 Data	Pemerintah Kota

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Penaung Jawab Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ RAD Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
		yang ada di Kota Blitar	tentang perkembangan, peranan dan kinerja koperasi.				asi	Koperasi dan Usaha Mikro				dan Usaha Mikro		Ekonomi dan Industri	asi	ian Koperasi	Koperasi	Blitar
7 1	Data Usaha Mikro	Untuk mengetahui data pelaku usaha mikro yang ada di Kota Blitar	untuk mendapatkan jumlah pelaku UMKM secara akurat dan rill	Terbuka		Tahunan	bidang UM	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro				Pendaftaran Koperasi dan Usaha Mikro		RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.10 Data Usaha Kecil dan Menengah	RAD.02.10.05 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah	RAD.02.10.05.01 Data Usaha Mikro	Pemerintah Kota Blitar
7 2	Data Luas Wilayah Bebas Genangan	data terkait luas wilayah Kota Blitar yang terbebas	memberikan informasi terkait luasan daerah kota Blitar yang	Terbatas	Data Statistik	Tahunan	Bidang Sumber Daya Air dan Drain	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	lokasi	Dokumentasi luas wilayah bebas genangan	Ya	RAB.03.01.02.01 Pengelolaan Infrastruktur	RAL.01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strate	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewil	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	RAD.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur	RAD.03.01.02.01 Pengelolaan Infrastruktur Sumb	Pemerintah Kota Blitar

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	Penanggung Jawab Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	Proses Bisnis (Dependency)	Layanan (Dependency)	RAD Level 1 (Dependency)	RAD Level 2 (Dependency)	RAD Level 3 (Dependency)	RAD Level 4 (Dependency)	Instansi (Dependency)
		dari genangan	terbebas dari genangan				ase	dan Penat aan Ruang		gan; laporan capaian kinerja a OPD		Jalan dan Jembatan	gis	ayah an		Pekerjaan Umum	er Daya Air	
7 3	Data Kondisi jalan	data terkait jalan kota kondisi baik, kondisi rusak ringan, kondisi rusak berat	memberikan informasi terkait kondisi permukaan jalan kota yang menjadi aset DPUPR	Terbatas	Data Statistik	Tahunan	Bidang Bina Maarga	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nama CV pelaksana ; SPK; SPMK	Dokumen survei kondisi jalan; laporan capaian kinerja a OPD	Ya	RAB.0 3.01.0 2.01 Pengelolaan Infrastuktur Jalan dan Jembatan	RAL.0 1.17.0 1 Sarana Dan Prasarana Strategis	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.0 3.01 Data Pekerjaan Umum	RAD.0 3.01.0 2 Pengelolaan Infrastuktur Pekerjaan Umum	RAD.0 3.01.0 2.02 Pengelolaan Infrastuktur Jalan dan Jembatan	Pemerintah Kota Blitar
7 4	Data Kondisi jembatan	data terkait jembatan di kota Blitar kondisi baik,	memberikan informasi terkait kondisi jembatan yang	Terbatas	Data Statistik	Tahunan	Bidang Bina Maarga	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Nama CV pelaksana ; SPK; SPMK	Dokumen survei kondisi jembatan	Ya	RAB.0 3.01.0 2.01 Pengelolaan Infrastuktur	RAL.0 1.17.0 1 Sarana Dan Prasarana	RAD.03 Informasi Pembangunan	RAD.0 3.01 Data Pekerjaan Umum	RAD.0 3.01.0 2 Pengelolaan Infrastuktur	RAD.0 3.01.0 2.03 Pengelolaan Infrastuktur	Pemerintah Kota Blitar

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Infor masi yang Terkait (Output)	Intero perabi litas	→ Prose s Bisnis (Depe ndenc y)	→ Layan an (Depe ndenc y)	→ RAD Leve l 1 (Dep ende ncy)	→ RAD Level 2 (Depe nden cy)	→ RAD Level 3 (Depe ndenc y)	→ RAD Level 4 (Depe ndenc y)	→ Insta nsi (Dep ende ncy)
		kondisi rusak ringan, kondisi rusak berat	menjadi aset DPUPR					m dan Penataan Ruang		tan; laporan capaian kinerja a OPD		r Jalan dan Jembatan	Strategis	Kewilayah an		r Pekerj aan Umum	Jalan dan Jembatan	
7 5	Data Kondisi Bangunan Pelengkap Jalan	Data terkait trotoar dan drainase jalan kewenangan pemerintah Kota Blitar dalam Kondisi Baik, kondisi rusak ringan, Kondisi rusak berat	memberikan informasi terkait kondisi trotoar dan drainase jalan yang menjadi aset DPUPR	Terbatas	Data Statistik	Tahunan	Bidang Bina Maarga	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	lokasi	Dokumen survey kondisi bangunan pelengkap jalan; laporan capaian kinerja a OPD	Ya	RAB.03.01.02.01 Pengelolan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	RAL.01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	RAD.03 Infor masi Pembangunan Kewilayah an	RAD.03.01 Data Pekerj aan Umum	RAD.02.01.02 Pengelolan Infrastruktur Pekerj aan Umum	RAD.03.01.02.04 Pengelolan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Pemerintah Kota Blitar

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ RAD Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
7 6	Data jumlah bangunan gedung negara	menunjukkan jumlah gedung negara yang berada di wilayah Kota Blitar	memberikan informasi terkait ketersediaan bangunan gedung negara	Terbatas	Data Statistik	Tahunan	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lokasi gedung	Laporan capaian kinerja a OPD	Ya	RAB.0 3.01.0 2.02 Pengelolaan Infrastruktur Keciptaan	RAL.0 1.17.0 1 Sarana Dan Prasarana Strategis	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah	RAD.0 3.01 Data Pekerjaan Umum	RAD.0 3.01.0 2 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	RAD.0 3.01.0 2.05 Pengelolaan Infrastruktur Keciptaan	Pemerintah Kota Blitar
7 7	Data kondisi bangunan gedung negara	data terkait kondisi kerusakan bangunan baik kerusakan ringan, kerusakan sedang dan kerusakan berat	memberikan informasi terkait kondisi bangunan gedung negara di wilayah Kota Blitar	Terbatas	Data Statistik	Tahunan	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lokasi gedung; tingkat kerusakan gedung	Laporan capaian kinerja a OPD	Ya	RAB.0 3.01.0 2.02 Pengelolaan Infrastruktur Keciptaan	RAL.0 1.17.0 1 Sarana Dan Prasarana Strategis	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah	RAD.0 3.01 Data Pekerjaan Umum	RAD.0 3.01.0 2 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	RAD.0 3.01.0 2.06 Pengelolaan Infrastruktur Keciptaan	Pemerintah Kota Blitar
7	Data	data	memberik	Ter	Dat	Li	Bidan	Kepal	hasil	Lapor	Ya	RAB.0	RAL.0	RAD.	RAD.0	RAD.0	RAD.0	Peme

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produksi Data	Penanggung Jawab Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	Proses Bisnis (Dependency)	Layanan (Dependency)	RAD Level 1 (Dependency)	RAD Level 2 (Dependency)	RAD Level 3 (Dependency)	RAD Level 4 (Dependency)	Instansi (Dependency)
8	kebutuhan bangunan gedung negara	terkait jumlah gedung negara yang dibutuhkan di Kota Blitar	an informasi terkait jumlah kebutuhan gedung negara	batas	Statistik	manajemen	g Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi	a Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	survey kebutuhan gedung negara dari OPD - OPD di wilayah pemerintah kota Blitar	an capaian kinerja OPD		3.01.02.02 Pengelolaan Infrastruktur Keciptaan	1.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	3.01 Data Pekerjaan Umum	3.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	3.01.02.07 Pengelolaan Infrastruktur Keciptaan	rinta h Kota Blitar
7 9	Data Kondisi Prasarana lingkungan Kawasan Bangunan Negara di wilayah Kota Blitar	data terkait jumlah Kawasan Bangunan Negara mana saja dengan prasarana lingkungan dalam kondisi baik	memberikan informasi terkait Jumlah Kawasan Bangunan Negara dengan prasarana lingkungan dalam kondisi baik di wilayah	Terbatas	Data Statistik	Tahunan	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	lokasi Bangunan Negara	Laporan capaian kinerja OPD	Ya	RAB.03.01.02.02 Pengelolaan Infrastruktur Keciptaan	RAL.01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	RAD.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	RAD.03.01.02.08 Pengelolaan Infrastruktur Keciptaan	Pemerintah Kota Blitar

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produk Data	→ Penguasaan Jawa Barat / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ RAD Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
80	data Jumlah Kawasan Bangunan Negara dengan prasarana lingkungan yang memadai	menyajikan data jumlah Kawasan Bangunan Negara dengan prasarana lingkungan yang memadai	Kota Blitar memberikan informasi jumlah Kawasan Bangunan Negara dengan prasarana lingkungan yang memadai di wilayah Kota Blitar	Tertbatas	Data Statistik	Tahunan	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	lokasi kawasan bangunan	Laporan capaian kinerja OPD	Ya	RAB.0 3.01.0 2.02 Pengelolaan Infrastruktur Keciprakan	RAL.0 1.17.0 1 Sarana Dan Prasarana Strategis	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah	RAD.0 3.01 Data Pengerjaan Umum	RAD.0 3.01.0 2 Pengelolaan Infrastruktur Pengerjaan Umum	RAD.0 3.01.0 2.09 Pengelolaan Infrastruktur Keciprakan	Pemerintah Kota Blitar
81	Data Kondisi Jaringan Irigasi	data terkait panjang jaringan irigasi yang menjadi kewenangan DPUPR	memberikan informasi terkait kondisi jaringan irigasi yang menjadi	Tertbatas	Data Statistik	Tahunan	Bidang Sumbat Daya Air dan Drainase	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan	lokasi	Dokumen survey kondisi jaringan irigasi	Ya	RAB.0 3.01.0 2.01 Pengelolaan Infrastruktur Jalan	RAL.0 1.17.0 1 Sarana Dan Prasarana Strategis	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah	RAD.0 3.01 Data Pengerjaan Umum	RAD.0 3.01.0 2 Pengelolaan Infrastruktur Pengerjaan	RAD.0 3.01.0 2.10 Pengelolaan Infrastruktur Sumbat	Pemerintah Kota Blitar

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	→ Proses Bisnis (Dependensi)	→ Layanan (Dependensi)	→ RAD Level 1 (Dependensi)	→ RAD Level 2 (Dependensi)	→ RAD Level 3 (Dependensi)	→ RAD Level 4 (Dependensi)	→ Instansi (Dependensi)
		dalam kondisi baik, kondisi rusak ringan, kondisi rusak berat	aset DPUPR					Penataan Ruang		; laporan capaian kinerja OPD		dan Jembatan		an		aan Umum	Daya Air	
8 2	Data Kondisi Saluran Drainase	data terkait panjang saluran drainase yang menjadi kewenangan DPUPR dalam kondisi baik, kondisi rusak ringan, kondisi rusak berat	memberikan informasi terkait kondisi saluran drainase yang menjadi aset DPUPR	Tertabas	Data Statistik	Tahunan	Bidang Sumber Daya Air dan Drainase	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	lokasi	Dokumen survey kondisi saluran drainase; laporan capaian kinerja OPD	Ya	RAB.03.01.02.01 Pengelolaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	RAL.01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah	RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum	RAD.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	RAD.03.01.02.11 Pengelolaan Infrastruktur Sumbur Daya Air	Pemerintah Kota Blitar

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validasi Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ RAD Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
8 3	data jumlah tenaga kerja yang lulus pelatihan tahun ke- n	menyajikan data terkait jumlah tenaga kerja yang lulus pelatihan tenaga konstruksi yang diadakan oleh DPUPR	memberikan informasi terkait jumlah tenaga kerja yang lulus pelatihan tenaga konstruksi yang diadakan oleh DPUPR	Terbatas	Data Statistik	Tahunan	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tahun pelatihan	Laporan capaian kinerja a OPD	Ya	RAB.0 3.01.0 2.02 Pengelolaan Infrastruktur Keciptaan	RAL.0 1.17.0 1 Sarana Dan Prasarana Strategis	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.0 3.01 Data Pekerjaan Umum	RAD.0 3.01.0 3 Pembinaan Jasa Konstruksi	RAD.0 3.01.0 3.01 data jumlah tenaga kerja yang lulus pelatihan tahun ke-n	Pemerintah Kota Blitar
8 4	jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan tahun ke- n	menyajikan data terkait jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan tenaga konstruksi yang diadakan	memberikan informasi terkait jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan tenaga konstruksi yang	Terbatas	Data Statistik	Tahunan	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	tahun pelatihan	Laporan capaian kinerja a OPD	Ya	RAB.0 3.01.0 2.02 Pengelolaan Infrastruktur Keciptaan	RAL.0 1.17.0 1 Sarana Dan Prasarana Strategis	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.0 3.01 Data Pekerjaan Umum	RAD.0 3.01.0 3 Pembinaan Jasa Konstruksi	RAD.0 3.01.0 3.02 jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelati	Pemerintah Kota Blitar

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ RAD Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
		oleh DPUPR	diadakan oleh DPUPR					R									han tahun ke-n	
8 5	jumlah SPM sipjaki yang terpenuhi	menyajikan data terkait jumlah SPM SIPJAKI yang terpenuhi	memberikan informasi terkait SPM SIPJAKI yang terpenuhi	Terbatas	Data Statistik	Tahunan	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SPM SIPJAKI	Laporan capaian kinerja a OPD	Ya	RAB.0 3.01.0 2.02 Pengelolaan Infrastruktur Keciptaan	RAL.0 2.09.0 3 Pengelolaan Data Dan Informasi	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.0 3.01 Data Pekerjaan Umum	RAD.0 3.01.0 3 Pembiayaan Jasa Konstruksi	RAD.0 3.01.0 3.03 jumlah SPM sipjaki yang terpenuhi	Pemerintah Kota Blitar
8 6	jumlah dokumen standar harga, upah, bahan yang terupdate perbulan	menyajikan data terkait jumlah dokumen standar harga, upah, bahan yang terupdate	memberikan informasi terkait update standar harga, upah, bahan di wilayah Kota	Terbatas	Data Statistik	Bulanan	Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	nama barang, upah dan bahan	Dokumen HSBG N, SHST, Laporan capaian kinerja a OPD	Ya	RAB.0 3.01.0 2.02 Pengelolaan Infrastruktur Keciptaan	RAL.0 2.09.0 3 Pengelolaan Data Dan Informasi	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.0 3.01 Data Pekerjaan Umum	RAD.0 3.01.0 3 Pembiayaan Jasa Konstruksi	RAD.0 3.01.0 3.04 jumlah dokumen standar harga, upah,	Pemerintah Kota Blitar

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produksi Data	Penanggung Jawab Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	Proses Bisnis (Dependency)	Layanan (Dependency)	RAD Level 1 (Dependancy)	RAD Level 2 (Dependancy)	RAD Level 3 (Dependancy)	RAD Level 4 (Dependancy)	Instansi (Dependency)
			Blitar					Ruang										bahan yang terupdate perbulan
87	Luas lahan yang tidak bertentangan dengan pola ruang RTRW	menyajikan data terkait luas lahan yang tidak bertentangan dengan pola tata ruang	memberikan informasi terkait kesesuaian RTRW	Tertabas	Data Statistik	Tahunan	Bidang Tata Ruang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	titik koordinat lokasi, peruntukan	informasi tata ruang, Laporan Capaian Kinerja OPD	Ya	RAB.03.01.01.02 Penge ndalia n dan Pema nfaata n Tata Ruang	RAL.01.17.01 Saran a Dan Prasa rana Strate gis	RAD.03 Infor masi Pemb angunan Kewil ayah an	RAD.03.06 Data Perta nahan	RAD.03.06.01 Pembi naan Perta nahan Regio nal	RAD.03.06.01.01 Luas lahan yang tidak berten tanga n denga n pola ruang RTRW	Peme rintah Kota Blita r
88	Jumlah dokumen ketatarua ngan yang dikerjakan sampai dengan						Bidang Tata Ruang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Nama CV pelaksana ; SPK; SPMK	Laporan Capaian Kinerja OPD	Ya	RAB.03.01.01.02 Penge ndalia n dan Pema	RAL.01.17.01 Saran a Dan Prasa rana	RAD.03 Infor masi Pemb angunan	RAD.03.06 Data Perta nahan	RAD.03.06.02 Kebija kan Huku m	RAD.03.06.02.01 Jumla h doku men	Peme rintah Kota Blita r

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produksi Data	→ Peningkatan Jawa Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ RAD Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
		tahun n						m dan Penataan Ruang				nfaatan Tata Ruang	Strategis	Kewilayah an		Pertanahan	ketataru an yang dikerj akan sampa i denga n tahun n	
8 9	Jumlah kelurahan yang petak tanahnya difasilitasi PTSL						Bidang Tata Ruang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	nama kelurahan	Laporan Capaian Kinerja OPD	Ya	RAB.0 3.01.0 1.02 Penge ndalia n dan Pema nfaata n Tata Ruang	RAL.0 1.17.0 1 Saran a Dan Prasa rana Strate gis	RAD. 03 Infor masi Pemb angu nan Kewil ayah an	RAD.0 3.06 Data Perta nahan	RAD.0 3.06.0 2 Kebija kan Huku m Perta nahan	RAD.0 3.06.0 2.02 Jumla h kelura han yang petak tanah nya difasili tasi PTSL	Peme rinta h Kota Blita r
9	Jumlah						Bidang	Kepala	lokasi	Lapor	Ya	RAB.0	RAL.0	RAD.	RAD.0	RAD.0	RAD.0	Peme

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	→ Proses Bisnis (Dependensi)	→ Layanan (Dependensi)	→ RAD Level 1 (Dependensi)	→ RAD Level 2 (Dependensi)	→ RAD Level 3 (Dependensi)	→ RAD Level 4 (Dependensi)	→ Instansi (Dependensi)
0	luas tanah yang sudah dikonsolidasi						g Tata Ruang	a Dina s Peker jaan Umu m dan Penat aan Ruan g		an Capaian Kinerja OPD		3.01.0 1.02 Penge ndalia n dan Pema nfaata n Tata Ruang	1.17.0 1 Saran a Dan Prasa rana Strate gis	03 Infor masi Pemb angu nan Kewil ayah an	3.06 Data Perta nahan	3.06.0 3 Kebija kan Penga daan Tanah	3.06.0 3.01 Jumla h luas tanah yang sudah dikon solida si	rinta h Kota Blita r
9 1	Data Pengelolaa n Air Limbah Domestik	berisi data terkait pengelolaa n air limbah domestik di kota Blitar	untuk mengetah ui data terkait pengelolaa n air limbah domestik di kota Blitar	Ter bat as	Dat a Sta tisti k	Ta hu na n	Bidan g Peru maha n, Air Minu m, dan Air Limba h, Dinas Peru maha n	Kepal a Dina s Peru maha n Raky at dan Kawa san Perm ukim an	rumah yang belum terlayani sistem air limbah yang memadai/ jumlah rumah yang belum memiliki septictank individu	jumla h septic tank yang terba ngun, jumla h ruma h tangg a yang terlay	Ya	RAB.0 3.04.0 3 Penge mban gan Kawas an Permu kiman	RAL.0 1.20.0 2 Kawa san Perm ukima n	RAD. 03 Infor masi Pemb angu nan Kewil ayah an	RAD.0 3.01 Data Pekerj aan Umu m	RAD.0 3.01.0 4 Pengel olaan Air Limba h Dome stik	RAD.0 3.01.0 4 Pengel olaan Air Limba h Dome stik	Peme rinta h Kota Blita r

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validasi Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Infor masi yang Terka it (Outp ut)	Intero perabi litas	← Prose s Bisnis (Depe ndenc y)	→ Layan an (Depe ndenc y)	→ RAD Leve l 1 (Dep ende ncy)	→ RAD Level 2 (Depe nden cy)	→ RAD Level 3 (Depe ndenc y)	→ RAD Level 4 (Depe ndenc y)	→ Insta nsi (Dep ende ncy)
							Rakya t dan Kawa san Perm ukim an		maupun komunal beserta lokasinya, lokasi MCK yang belum terpelihar a, jumlah rumah yang belum terlayani penyedota n lumpur tinja	ani sistem air limba h yang mema dai, jumla h MCK yang dipeli hara, jumla h ruma h tangg a yang terlay ani penye dotan lump ur								

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ RAD Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
9 2	Data Pengelolaan Jaringan Air Minum	berisi data terkait pengelolaan jaringan air minum di kota Blitar	untuk mengetahui data terkait pengelolaan jaringan air minum di kota Blitar	Terbatas	Data Statistik	Tahunan	Bidang Perumahan, Air Minum, dan Air Limbah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan	rumah tangga yang belum mendapat kan akses air minum yang aman beserta lokasinya	tinjau panjang jaringan pipa air minum yang terbangan, Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum yang	Ya	RAB.0 3.04.0 3 Pengembangan Kawasan Perumahan	RAL.0 1.20.0 2 Kawasan Perumahan	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah an	RAD.0 3.01 Data Pekerjaan Umum	RAD.0 3.01.0 6 Pengelolaan Jaringan Air Minum	RAD.0 3.01.0 6 Pengelolaan Jaringan Air Minum	Badan Pendapatan Daerah

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ RAD Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
9 3	Data PSU Kawasan Permukiman	berisi database jalan, drainase, penerangan jalan lingkungan serta data pembangunan dan pemeliharaan PSU Kawasan Permukiman	untuk mengetahui data terkait jalan, drainase, penerangan jalan lingkungan serta data pembangunan dan pemeliharaan PSU Kawasan Permukiman	Terbatas	Data Lainnya	Tiga Bulan	Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	jumlah PSU yang terdata, luas jalan yang dibangun, ditingkatkan dan dipelihara , panjang drainase yang dibangun, ditingkatkan dan dipelihara , jumlah titik penerangan jalan lingkungan yang dibangun dan dipelihara , jumlah	data jumlah PSU, data terkait luas jalan yang dibangun, ditingkatkan dan dipelihara, panjang drainase yang dibangun, ditingkatkan dan dipelihara, jumlah titik penerangan jalan lingkungan yang dibangun, ditingkatkan dan	Aman Ya	RAB.0 3.04.0 5 Penyelenggaraan Perumahan	RAL.0 1.20.0 2 Kawasan Permukiman	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.0 3.04 Data Perumahan	RAD.0 3.04.0 3 Pembangunan Kawasan Permukiman	RAD.0 3.04.0 3.01 Data PSU Kawasan Permukiman	Badan Pendapatan Daerah

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	Penanggung Jawab Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	Proses Bisnis (Dependency)	Layanan (Dependency)	RAD Level 1 (Dependency)	RAD Level 2 (Dependency)	RAD Level 3 (Dependency)	RAD Level 4 (Dependency)	Instansi (Dependency)
									sarpras pemakaman umum yang dibangun dan dipelihara, jumlah lokasi permukiman tematik yang terbangun, jumlah jembatan permukiman yang dibangun	dipelihara, jumlah titik penerangan jalan lingkungan yang dibangun dan dipelihara, jumlah sarpras pemakaman umum yang dibangun dan								

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	Penanggung Jawab Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	Proses Bisnis (Dependensi)	Layanan (Dependensi)	RAD Level 1 (Dependensi)	RAD Level 2 (Dependensi)	RAD Level 3 (Dependensi)	RAD Level 4 (Dependensi)	Instansi (Dependensi)
9 4	Data Rumah Tidak Layak	berisi data terkait rumah tidak	untuk mengetahui data terkait	Terbatas	Data Statistik	Tahunan	Bidang Perumahan	Kepala Dinas	rumah tidak layak hunipr	Jumlah Rumah	Ya	RAB.0 3.04.0 5 Penyel	RAL.0 1.20.0 3 Peru	RAD. 03 Informasi	RAD.0 3.04 Data Peru	RAD.0 3.04.0 3 Penge	RAD.0 3.04.0 3.02 Data	Badan Pendapat

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Penaung Jawab Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ RAD Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
	Huni (RTLH)	layak huni di Kota Blitar	rumah tidak layak huni di Kota Blitar		k		n, Air Minum, dan Air Limbah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	kelurahan , termasuk Nama, No. KK, Alamat, Status Kepemilikan Lahan	Tidak Layak Huni yang direhabilitasi dan Jumlah Rumah Layak Huni di Kota Blitar		enggaran Perumahan	maha n Rakyat	Pembangunan Kewilayahan	maha n	mбан gan Kawasan Permukiman	Rumahan Tidak Layak Huni (RTLH)	an Daerah
9 5	Data Kawasan Bebas Kumuh	berisi data terkait kawasan bebas kumuh	untuk mengetahui data terkait kawasan bebas kumuh	Terbatas	Data Statistik	Tahunan	Bidang Kawasan Permukiman Dinas Peru	Kepala Dinas Perumahan Rakyat	Panjang jalan dan drainase yang dibangun, Luas Kota Blitar, Luas Kumuh	Data Kawasan Bebas Kumuh	Ya			RAD. 03 Informasi Pembangunan Kewilayah	RAD.0 3.04 Data Perumahan	RAD.0 3.04.0 3 Pembangunan Kawasan Perm	RAD.0 3.04.0 3.03 Data Kawasan Bebas Kumuh	Badan Pendapatan Daerah

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Penaung Jawab Data/ Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ RAD Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
							maha n Rakya t dan Kawa san Perm ukim an	dan Kawa san Perm ukim an	Kota Blitar					an		ukima n		
9 6	Data PSU Perumahan	berisi data terkait PSU dan kepemilik an aset PSU Perumahan di Kota Blitar	untuk mengetah ui informasi tentang PSU didalam perumahan dan tentang kepemilik an PSU di perumahan- perumahan Kota Blitar.	Ter bu ka	Dat a Lai nnya	Ta hu na n	Bidan g Peru maha n, Air Minu m, dan Air Limba h, Dinas Peru maha n Rakya t dan Kawa	Kepal a Dina s Peru maha n Raky at dan Kawa san Perm ukim an	Nama Perumaha n dan Lokasi, Nama Pengemba ng, Luas Perumaha n, Tahun Pembangu nan/ Penyeraha n, PSU yang terdapat di dalam perumaha n, Ukuran	Data yang berisi tentan g PSU didala m peru maha n dan tentan g kepe milika n PSU di peru maha	Ya	RAB.0 3.04.0 5 Penyel engga raan Perum ahan	RAL.0 1.20.0 3.01 Layan an Renca na Tapak	RAD. 03 Infor masi Pemb angu nan Kewil ayah an	RAD.0 3.04 Data Peru maha n	RAD.0 3.04.0 5 Penyel engga raan Peru maha n	RAD.0 3.04.0 5.01 Data PSU Perum ahan	Bada n Pend apat an Daer ah

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Infor masi yang Terka it (Outp ut)	Intero perabi litas	→ Prose s Bisnis (Depe ndenc y)	→ Layan an (Depe ndenc y)	→ RAD Leve l 1 (Dep ende ncy)	→ RAD Level 2 (Depe nden cy)	→ RAD Level 3 (Depe ndenc y)	→ RAD Level 4 (Depe ndenc y)	→ Insta nsi (Dep ende ncy)
9 7	Data Pengelolaa n Rumah Susun	berisi data penghuni rusun, data fasilitas umum di rusun, data terkait pembayaran rusun	Untuk mengetahui data terkait pengelolaa n rumah susun	Ter tut up	Dat a Lai nny a	Ta hu na n	san Perm ukim an UPT Rusu nawa	Kepal a Dina s Peru maha n Raky at dan Kawa san Perm ukim an	Rumah dan Jumlah Petak Rumah Nama Penghuni Rusun dan No KK, Bukti Setor atas pembayar an sewa rusun, fasilitas umum apa saja yang terdapat di masing- masing rusun	n- peru maha n Kota Blitar Doku men yang berisi data pengh uni rusun , data fasilit as umu m di rusun , data terkai t pemb ayara n rusun	Tidak	RAB.0 3.04.0 5 Penyel engga raan Perum ahan	RAL.0 1.20.0 3 Peru maha n Rakya t	RAD. 03 Infor masi Pemb angu nan Kewil ayah an	RAD.0 3.04 Data Peru maha n	RAD.0 3.04.0 5 Penyel engga raan Peru maha n	RAD.0 3.04.0 5.02 Pengel olaan Ruma h Susun	Bada n Pend apat an Daer ah

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	→ Proses Bisnis (Dependensi)	→ Layanan (Dependensi)	→ RAD Level 1 (Dependensi)	→ RAD Level 2 (Dependensi)	→ RAD Level 3 (Dependensi)	→ RAD Level 4 (Dependensi)	→ Instansi (Dependensi)
9 8	Jumlah benih yang diproduksi	Benih padi unggul dan bersertifikat	Mengetahui benih padi yang diproduksi	Terbuka	Data Lainnya	Enam Bulan	UPT P2TP H	Kepala UPT P2TP H	Jumlah lahan yang dikelola	Jumlah benih padi unggul dan bersertifikat yang diproduksi	Tidak	RAB.0 2.03.0 2.08 Pembe nihan	RAL.0 1.07.0 4 Perbe nihan	RAD. 02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.0 2.03 Data Pertanian	RAD.0 2.03.0 8 Jumlah benih yang diproduksi	RAD.0 2.03.0 8.01 Jumlah benih yang diproduksi	Badan Pendapatan Daerah
9 9	Jumlah hewan yang dipotong	Sapi yang dipotong di Rumah Potong Hewan	Mengetahui jumlah sapi yang dipotong di Rumah Potong Hewan yang juga dikenakan retribusi daerah	Terbuka	Data Lainnya	Harian	UPT RPH	Kepala UPT RPH	Jumlah sapi yang dipotong di Rumah Potong Hewan	Data jumlah sapi yang dipotong (harian) dan jumlah retribusi yang diperoleh dari	Tidak	RAB.0 2.03.0 2.04 Pengel olaan RPH	RAL.0 1.09.0 7 Pengel olaan RPH	RAD. 02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.0 2.05 Data Peternakan	RAD.0 2.05.0 8 Jumlah Hewan yang dipotong	RAD.0 2.05.0 8 .01Ju mlah Hewan yang dipotong	Pemerintah Kota Blitar

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ RAD Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
100	Data Umum dan kepegawaian	Data tentang Jumlah Pegawai di DLHKP	Tersedianya Data seluruh Pegawai di DLHKP	Terbuka	Data Lainnya	Tahun	Bagian Kepegawaian	Kepegawaian	Kepegawaian	Tersebut data pegawai menurut jenisnya	pemotongan sapi Ya	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan		RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data Informasi	RAD.09.03.03 Pengelolaan Data Statistik	RAD.09.03.04 Data Umum dan kepegawaian	Pemerintah Kota Blitar
101	Laporan Penyelenggaraan Angkutan Kota	Menggambar dan mengevaluasi penyelenggaraan sistem angkutan kota dalam suatu wilayah atau kota	Untuk memantau kinerja dan efisiensi sistem angkutan kota, serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan	Terbatas	Data Statistik	Tahun	Seksi Angkutan Darat dan Terminal - Dinas Perhubungan Kota Blitar	Seksi Angkutan Darat dan Terminal - Dinas Perhubungan Kota Blitar	- Pemetaan rute dan jaringan - Analisis jumlah penumpang - Evaluasi kinerja operasional - Evaluasi kualitas layanan	Dokumen Penyelenggaraan Angkutan Kota	Ya	RAB.03.03.06.04 Pelayanan Angkutan Kota	RAL.01.19.02.03 Pelayanan Angkutan Kota	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.03 Data Transportasi	RAD.03.03.02 Pengelolaan Transportasi	RAD.03.03.02.03 Data Penyelenggaraan Angkutan Kota	Pemerintah Kota Blitar

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ RAD Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
			merumuskan rekomendasi perbaikan dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan strategis dan perbaikan dalam penyelenggaraan angkutan kota						Rekomendasi perbaikan dan pengembangan									
102	Laporan Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum	Menggambar dan menganalisis aspek terkait	Untuk memahami kondisi, keefektifan, dan efisiensi dari	Terbatas	Data Statistik	Tahunan	Seksi Perparkiran - Dinas Perhubungan	Seksi Perparkiran - Dinas Perh	- Jumlah kendaraan yang parkir - Jenis kendaraan (seperti	Dokumen Penyelenggaraan Parkir di	Ya	RAB.03.03.06.02 Pengelolaan Parkir di	RAL.01.19.02.01 Pelayanan Parkir Tepi	RAD.03 Informasi Pembangunan	RAD.03.03 Data Transporasi	RAD.03.03.02 Pengelolaan Transporasi	RAD.03.03.02.01 Data Penyelenggaraan	Pemerintah Kota Blitar

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Proses Data	→ Peningkatan Jawa B Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ RAD Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
		pengelolaan dan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum	sistem parkir yang ada di tepi jalan umum				n Kota Blitar	ubun gan Kota Blitar	mobil, sepeda motor, sepeda) - Durasi parkir	Tepi Jalan Umum		Tepi Jalan Umum	Jalan Umum	Kewilayah an		i	Parkir di Tepi Jalan Umum	
103	Laporan Penyelenggaraan Tempat Parkir Khusus	Membahas mengenai pengelolaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tempat parkir yang dirancang khusus untuk tujuan tertentu	Untuk mengevaluasi efisiensi, keefektifan, dan kelayakan dari tempat parkir khusus	Terbatas	Data Statistik	Tahunan	Seksi Perparkiran - Dinas Perhubungan Kota Blitar	Seksi Perparkiran - Dinas Perhubungan Kota Blitar	- Jumlah kendaraan yang memanfaatkan Tempat Parkir Khusus - Jenis kendaraan - Durasi parkir	Dokumen Penyelenggaraan Tempat Parkir Khusus	Ya	RAB.0 3.03.0 6.05 Pengelolaan Temp at Parkir Khusus	RAL.0 1.19.0 2.02 Pelayanan Parkir Khusus	RAD.0 03 Informasi Pembangunan Kewilayah an	RAD.0 3.03 Data Transpor tas i	RAD.0 3.03.0 2 Pengel olaan Transpor tas i	RAD.0 3.03.0 2.02 Data Penyel engga raan Temp at Parkir Khusus	Pemerintah Kota Blitar
104	Data Sarana dan	Data Tentang Sarana	Terpenuhi nya Data Sarana	Terbatas	Data Lain	Tahunan	Bagian Umum	Sub bag, Keua	Sub bag,Umum dan	tersedia data	Ya	RAL.0 2 Layan		RAD.0 09 Infor	RAD.0 9.03 Data	RAD.0 9.03.0 3	RAD.0 9.03.0 3.05	Pemerintah

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Interoperabilitas	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ RAD Level 3 (Dependency)	→ RAD Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
	Prasarana	dan Prasarana yang ada di DLHKP	dan Prasarana		nn y a	n	m dan kepeg awaia n	ngan	Kepegawai an	Saran a dan Prasar ana		an Admin istrasi Pemer intaha n		masi Peme rinta han Umu m	Infor masi	Pengel olaan Data Statis tik	Data Saran a dan Prasar ana	Kota Blita r
1 0 5	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Data Realisasi Fisik dan Keuangan dalam satu Bulan	Terpenuhi nya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan yang diminta oleh Bagian Pembangu nan Sekretaria t Daerah Kota Blitar	Ter bat as	Dat a Ke ua nga n	Bul an	Lapor an Pelak sana Kegiat an dan Angga ran melal ui Sub.B ag Keua ngan	Sub bag. Keua ngan	Sub bag.Keua ngan	tersed ianya data Realis asi fisik dan keuan gan	Ya	RAL.0 2 Layan an Admin istrasi Pemer intaha n		RAD.0 09 Infor masi Peme rinta han Umu m	RAD.0 9.03 Data Infor masi	RAD.0 9.03.0 3 Pengel olaan Data Statis tik	RAD.0 9.03.0 3.07 Lapor an Realis asi Fisik dan Keuan gan	Peme rinta h Kota Blita r
1 0 6	Laporan Penyeleng garaan Pengujian Berkala	Menggam barkan proses keluar masuk	Untuk memberik an dokument asi dan	Ter bat as	Dat a Sta tisti k	Ta hu na n	UPT. Pengu jian Kenda raan	UPT. Pengu jian Kend araa	- Identifikas i kendaraa n	Doku men Penyel engga raan	Ya	RAB.0 3.03.0 6.03 Pelaya nan	RAL.0 1.19.0 1.02 Pelaya nan	RAD.0 03 Infor masi Pemb	RAD.0 3.03 Data Trans portas	RAD.0 3.03.0 3 Pengel olaan	RAD.0 3.03.0 3.02 Data Penyel	Peme rinta h Kota Blita

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Infor masi yang Terka it (Outp ut)	Intero perabi litas	← Prose s Bisnis (Depe ndenc y)	→ Layan an (Depe ndenc y)	→ RAD Leve l 1 (Dep ende ncy)	→ RAD Level 2 (Depe nden cy)	→ RAD Level 3 (Depe ndenc y)	→ RAD Level 4 (Depe ndenc y)	→ Insta nsi (Dep ende ncy)
	Kendaraan Bermotor	pengujian berkala yang dilakukan pada kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku	evaluasi terhadap hasil pengujian kendaraan bermotor yang telah dilakukan				Bermotor - Dinas Perhubungan Kota Blitar	n Bermotor - Dinas Perhubungan Kota Blitar	- Tanggal uji - Hasil uji - Rekomendasi perbaikan - Data historis	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Pengujian Kendaraan Bermotor	Pengujian Kendaraan Bermotor (Uji KIR)	anggaran Kewilayah an	i	Keamanan dan Kesele matan Trans portasi	enggaran Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	r
107	Data Destinasi Pariwisata			Terbuka	Data Statistik	Tahunan			kondisi, lokasi		Tidak	4.1 Pengembangan Potensi Wisata		RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.11 Data Pariwisata	RAD.02.11.02 Kepariwisata an	RAD.02.11.02.01 Data Obyek Destinasi Wisata	Pemerintah Kota Blitar
108	Data Pemuda Berprestasi			Terbuka	Data Statistik	Tahunan					Tidak	5.1 Pembe rdayaan	Seleksi Pemili	RAD.06 Infor	RAD.06.04 Data	RAD.06.04.01	RAD.06.04.01.01	Pemerintah

I D	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/ Produk Data	→ Pena nggu ng Jawa b Data / Wali Data	Informasi yang Terkait (Input)	Infor masi yang Terka it (Outp ut)	Intero perabi litas	→ Prose s Bisnis (Depe ndenc y)	→ Layan an (Depe ndenc y)	→ RAD Leve l 1 (Dep ende ncy)	→ RAD Level 2 (Depe nden cy)	→ RAD Level 3 (Depe ndenc y)	→ RAD Level 4 (Depe ndenc y)	→ Insta nsi (Dep ende ncy)
	si				tisti k	n						an dan Penge mban gan Pemu da	han Pemu da Berpr estasi	masi Pend idika n dan Tena ga Kerja	Pemu da	Pemu da Berpr estasi	Data Pemu da Berpr estasi Tingk at Provin si	Kota Blita r
1 0 9	Data Atlit Berprestasi			Ter bu ka	Dat a Sta tisti k	Ta hu na n					Tidak	6.3 Pembi naan dan Penge mban gan Olahr aga	Verifi kasi Data Atlit	RAD. 06 Infor masi Pend idika n dan Tena ga Kerja	RAD.0 6.05 Data Olahr aga	RAD.0 6.05.0 3 Atlit Berpr estasi	RAD.0 6.05.0 3.01 Atlit Berpr estasi Tingk atnPro vinsi	Peme rinta h Kota Blita r

1.11 Arsitektur Layanan

1.11.1 Struktur Referensi Arsitektur Layanan

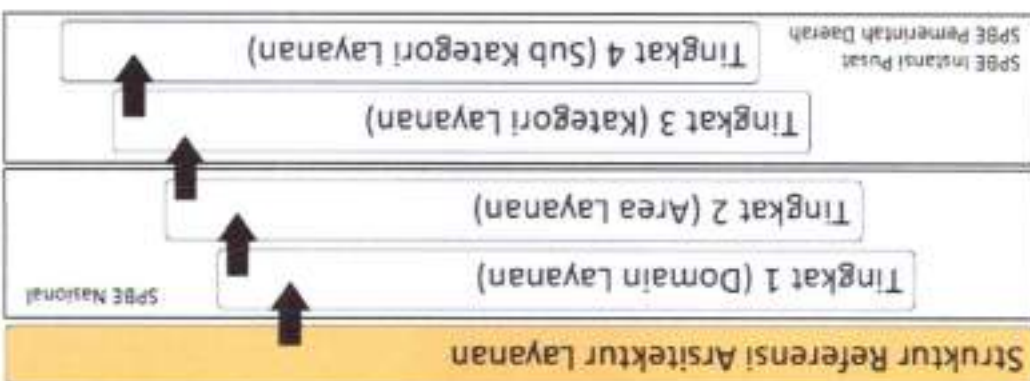
Dalam domain arsitektur layanan SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan substansi layanan SPBE ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur layanan SPBE yang berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

a. domain layanan, yang mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;

b. area layanan, yang menjelaskan area layanan pemerintahan sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;

c. kategori layanan, yang menjelaskan layanan pemerintahan yang merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, dengan mereklasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga); dan

d. sub kategori layanan, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori layanan sebagai tingkat 4 (keempat). Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

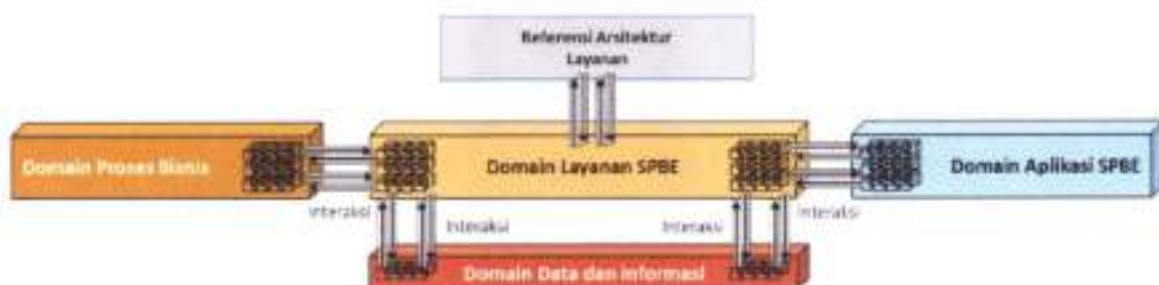


Gambar 0-6 Struktur Referensi Arsitektur Layanan SPBE

1.11.2 Peta Relasi dan Keterkaitan Antar Domain

Dengan sekian banyak ragam layanan yang dihasilkan pemerintah, maka perlu dilakukan pengelompokan ataupun klasifikasi yang benar sesuai dengan struktur arsitektur layanan SPBE. Dengan adanya pengelompokan ini, memudahkan evaluasi terhadap layanan pemerintah yang didukung oleh sistem informasi secara keseluruhan yang berada pada domain aplikasi SPBE, sehingga menghilangkan duplikasi melalui berbagai pakai aplikasi dalam penyediaan layanan yang ada antar instansi pemerintahan, yang terbentuk dari domain proses bisnis, sehingga inovasi layanan baru untuk mendukung visi dan misi SPBE.

Selanjutnya layanan terintegrasi pemerintah, juga akan memerlukan pengelolaan data dan informasi yang terdapat pada domain data dan informasi, maka dapat terlihat relasi langsung pada domain layanan SPBE pada gambar berikut.



Gambar 0-7 Relasi langsung pada Domain Layanan SPBE

1.11.3 Atribut Metadata Arsitektur Layanan

Pada table berikut ini dapat dilihat atribut metadata layanan.

Tabel 0-26 Atribut Metadata Layanan

No	Nama Atribut	Keterangan
1	ID	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Nama Layanan	Merupakan nama dari layanan yang dihasilkan oleh unit kerja/perangkat daerah.
3	Tujuan Layanan	Merupakan penjelasan tujuan dari layanan
4	Fungsi Layanan	Merupakan uraian penjelasan dari fungsi-fungsi yang terdapat dalam layanan
5	Model Referensi Layanan	Merupakan kode model referensi SPBE yang sesuai dengan nama layanan yang dipilih
6	Unit Pelaksana	Merupakan unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan layanan
7	Kementerian/ Lembaga terkait	Merupakan kementerian/lembaga terkait dengan layanan
8	Urusan Pemerintahan Terkait	Merupakan urusan pemerintahan yang terkait dengan layanan
9	Target Layanan	Merupakan target pengguna layanan
10	Metode Layanan	Merupakan model dari layanan

1.11.4 Referensi Arsitektur Layanan SPBE Nasional

Pada tabel berikut ini dapat dilihat taksonomi referensi arsitektur layanan SPBE.

Tabel 0-27 Referensi Arsitektur Layanan SPBE Tingkat 1 dan 2

Ko de	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Layanan Publik (01)		
01. 01	Informasi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi antara lain pengelolaan aplikasi sistem, pengelolaan sumberdaya dan perangkat informatika, pertahanan siber, dan penyelenggaraan penyiaran.
01.	Komunikasi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan

Ko de	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
02		pelayanan komunikasi antara lain pos dan sistem komunikasi.
01.03	Kebudayaan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kebudayaan antara lain kearsipan nasional, kebijakan kebudayaan, perfilman dan kesenian, sastra dan bahasa Indonesia, dan cagar budaya.
01.04	Usaha	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait dunia usaha antara lain manajemen bisnis, investasi, kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, koperasi dan usaha mikro, serta pajak dan cukai.
01.05	Pendidikan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan pendidikan antara lain kepustakaan, manajemen pendidik dan manajemen tenaga kependidikan.
01.06	Energi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait energi antara lain kelistrikan dan konservasi energi.
01.07	Lingkungan Hidup	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait lingkungan hidup antara lain meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
01.08	Industri	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait dunia industri antara lain pelayanan penerimaan negara bukan pajak dan standar nasional.
01.09	Hubungan Internasional	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait hubungan antar negara.
01.10	Kesehatan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan antara lain farmasi dan alat kesehatan, kesehatan masyarakat, pemberdayaan tenaga kesehatan, penanggulangan narkotika, pengawasan obat dan makanan, pengendalian penyakit, pengujian bahan adiktif, dan rehabilitasi.
01.11	Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait pertanian, perkebunan, dan peternakan.
01.12	Ketenagakerjaan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan ketenagakerjaan antara lain jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan kerja, pengelolaan ketenagakerjaan, pengelolaan pekerja migran Indonesia, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan penempatan tenaga kerja.
01.13	Agama	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait agama antara lain haji dan

Ko de	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		umroh, kehidupan beragama, dan produk halal.
01.14	Permukiman	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait permukiman antara lain infrastruktur permukiman, kawasan permukiman, pertanahan, perumahan rakyat, serta sarana dan prasarana strategis.
01.15	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
01.16	Perlindungan Sosial	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait perlindungan sosial antara lain intelijen keamanan, keamanan dan ketertiban umum, jaminan sosial, penanganan fakir miskin, penanggulangan ancaman terorisme, penanggulangan bencana, pencarian dan pertolongan, pengelolaan lalu lintas, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
01.17	Perdagangan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait perdagangan antara lain perdagangan berjangka komoditi dan perlindungan konsumen.
01.18	Pariwisata	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait kepariwisataan.
01.19	Transportasi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait transportasi antara lain keamanan dan keselamatan transportasi.
01.20	Kesejahteraan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait kesejahteraan masyarakat antara lain kesetaraan gender, olahraga, perlindungan anak, perlindungan hak perempuan, dan pemberdayaan pemuda.
01.21	Ekonomi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perekonomian antara lain ekonomi kreatif dan ekonomi digital.
01.22	Hukum dan Peraturan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait hukum dan peraturan antara lain keimigrasian dan perlindungan hak kekayaan intelektual.
01.23	Kenegaraan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kenegaraan antara lain kelembagaan negara, nilai-nilai kebangsaan, pemasyarakatan UUD 45 dan Pancasila, pembangunan manusia Indonesia, pertahanan negara, dan politik.
01.24	Perizinan dan Akreditasi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait perizinan dan akreditasi.

Ko de	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
01. 25	Kependudukan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait kependudukan.
01. 26	Pemerintahan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara umum antara lain pembangunan nasional, otonomi daerah, hubungan masyarakat, pengayoman masyarakat, dan program prioritas nasional.
Layanan Administrasi Pemerintahan (02)		
02. 01	Perencanaan dan Program	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait perencanaan dan program.
02. 02	Keuangan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait keuangan negara antara lain pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan barang milik negara, dan perbendaharaan.
02. 03	Sumber Daya Manusia	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait sumber daya aparatur sipil negara.
02. 04	Kearsipan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kearsipan dan persandian.
02. 05	Dukungan Operasional Organisasi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang mendukung operasional organisasi/instansi.
02. 06	Akuntabilitas Kinerja	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait akuntabilitas kinerja.
02. 07	Dukungan Umum Organisasi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang mendukung organisasi/instansi secara umum.
02. 08	Organisasi dan Tata Kelola	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait kelembagaan dan tata kelola kelembagaan.
02. 09	Kebijakan Organisasi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait kebijakan organisasi/instansi.
02. 10	Data dan Informasi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait pengelolaan data dan informasi termasuk didalamnya pengelolaan perangkat keras, pengelolaan sistem informasi, dan pembinaan kepastakaan.
02. 11	Manajemen SPBE	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik.
02. 12	Layanan Terintegrasi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait pengintegrasian layanan antara lain perencanaan, penganggaran, pengkoordinasian layanan.

Ko de	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
02.13	Lintas Organisasi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait pengkoordinasian kegiatan lintas organisasi/instansi.
02.14	Kerja Sama	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait kerjasama baik antar instansi ataupun dengan pihak lain.

1.11.5 Model Layanan SPBE Kota Blitar

Sesuai dengan Perpres No 95 tahun 2018 tentang SPBE menyebutkan daftar layanan SPBE terbagi atas 2 (dua) kelompok layanan, yaitu:

- 1 Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik, yang mendukung tata laksana internal birokrasi
- 2 Layanan Publik Berbasis Elektronik, yang mendukung layanan kepada masyarakat termasuk di dalamnya layanan publik.

1.11.5.1 Layanan Administrasi Pemerintahan

Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik dijalankan dengan menggunakan aplikasi umum berbagai pakai. Layanan tersebut meliputi :

- 1 Layanan Perencanaan
- 2 Layanan Penganggaran
- 3 Layanan Keuangan
- 4 Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
- 5 Layanan Kepegawaian
- 6 Layanan Kearsipan Dinamis
- 7 Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- 8 Layanan Pengawasan Internal Pemerintah (termasuk whistle blowing system)
- 9 Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
- 10 Layanan Kinerja Pegawai

1.11.5.2 Layanan Publik

Sedangkan Layanan Publik berbasis Elektronik, antara lain meliputi:

- 1 Layanan Pengaduan Publik
- 2 Layanan Data Terbuka
- 3 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
- 4 Layanan Publik lainnya

1.11.5.3 Layanan Kinerja Pegawai dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Sedangkan layanan ini meliputi :

- 1 Layanan Kinerja Pegawai
- 2 Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1.11.6 Model Domain dan Arsitektur Layanan Kota Blitar

Tabel 0-28 Domain dan Arsitektur Layanan Kota Blitar

I D	Nama Layan an	Tujua n Layan an	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	→ Prose s Bisni s (Depen dency)	→ RAL Leve l 1 (Dep end ency)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end ency)
1	Kebij akan Perek onom ian dan SDA	Memb uat kebi ja kan untuk ditind aklan juti ke OPD terkait	Sebagai pedoman kebijakan bagi perangkat daerah terkait	Bagi an Pere kono mian dan SDA	Bagi an Pere kono mian dan SDA	Kemend agri	Uns ur pend uku ng sem ua urus an pem erint ahan	OPD Terkait	No n Ele ktr oni k	Memp ermud ah peran gkat daera h untuk meny usun kebi ja kan	Tidk ada	Tidk ada	Tidk ada	P5.6. 2 Koord inasi TPID	RAL. 01 Laya nan Publ ik	RAL. 01.04 Ekon omi	RAL. 01.04 .02 Kebij akan Perek onom ian	RAL.0 1.04. 02.01 Kebij akan Perek onom ian	Pem erint ah Kota Blita r
2	Layan an Indus tri Loga m								No n Ele ktr oni k					Pelay anan Indus tri Loga m	RAL. 01 Laya nan Publ ik	RAL. 01.05 Indus tri	RAL. 01.05 .08 Penge mban gan Indus tri	RAL.0 1.05. 08.01 Layan an Indus tri Loga m	Pem erint ah Kota Blita r
3	Pelati han SDM IKM								No n Ele ktr oni k					Penge mban gan SDM	RAL. 01 Laya nan Publ	RAL. 01.05 Indus tri	RAL. 01.05 .08 Penge mban	RAL.0 1.05. 08.02 Pelati han	Pem erint ah Kota Blita

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end ency)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end ency)
									k					IKM	ik		gan Indus tri	SDM IKM	r
4	Pelati han Mutu Produ k								No n Ele ktr oni k					Penin gkata n Kuali tas Mutu Produ k	RAL. 01 Laya nan Publ ik	RAL. 01.05 Indus tri	RAL. 01.05 .08 Penge mban gan Indus tri	RAL.0 1.05. 08.03 Pelati han Mutu Produ k	Pem erint ah Kota Blita r
5	Layan an TTU								No n Ele ktr oni k					Pelay anan Tera dan Tera Ulang	RAL. 01 Laya nan Publ ik	RAL. 01.06 Perda gang an	RAL. 01.06 .05 Perlin dung an Kons umen	RAL.0 1.06. 05.01 Layan an TTU	Pem erint ah Kota Blita r
6	Layan an Monit oring Harga dan Stok Baran g								No n Ele ktr oni k					Penga wasa n Bara ng Bered ar	RAL. 01 Laya nan Publ ik	RAL. 01.06 Perda gang an	RAL. 01.06 .05 Perlin dung an Kons umen	RAL.0 1.06. 05.02 Layan an Monit oring Harga dan Stok	Pem erint ah Kota Blita r

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	← Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end ency)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end ency)
	Pokok																	Baran g Pokok	
7	Layan an Ijin Pakai Objek Retrib usi Pasar								No n Ele ktr oni k					Penge lolaa n Saran a, Prasa rana dan Retri busi Pasar	RAL. 01 Laya nan Publ ik	RAL. 01.06 Perda gang an	RAL. 01.06 .06 Penge lolaa n Sara na dan Prasa rana Perda gang an	RAL.0 1.06. 06.01 Layan an Ijin Pakai Objek Retrib usi Pasar	Pem erint ah Kota Blita r
8	Layan an Fasilit asi Prom osi Produ k								No n Ele ktr oni k					Fasilit asi Prom osi Produ k	RAL. 01 Laya nan Publ ik	RAL. 01.06 Perda gang an	RAL. 01.06 .07 Penge mban gan Perda gang an	RAL.0 1.06. 07.01 Layan an Fasilit asi Prom osi Produ k	Pem erint ah Kota Blita r

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	→ Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end ency)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end ency)
9	Perbe nihan	Memb erikan pelaya nan berup a benih padi unggu l dan berser tifkat. Diman a konsu men bisa memb eli benih padi denga n kualit as bagus dan harga terjan gkau	Menyedia kan benih padi unggul dan bersertifi kat dengan varietas yang tersedia	UPT Prod uksi dan Perb enih an Tana man Pang an dan Horti kult ura	Dina s Pert ania n dan Keta han an Pang an	Pertania n	Perta nian	Petani dan kios pertani an di Kota Blitar maupu n luar Kota Blitar	No n Ele ktr oni k	Memb erikan kemu dahan kepad a konsu men untuk mend apatk an benih padi yang berku alitas dan harga terjan gkau	Menin gkatn ya produ ktifita s tanam an padi sehing ga bisa menin gkatk an keseja hteraa n ekono mi petani , kios dan masya rakat pada umum nya	Pelak sanaa n tana m padi hanya dilaku kan 2 kali setah un. Sedan gkan permi ntaan benih padi yang konti nyu setiap bulan nya	- Mengat ur jadwal tanam di 2 lokasi lahan. - Menginf ormasik an kepada petani mengen ai jadwal produk si benih padi	Perbe nihan	RAL. 01 Laya nan Publ ik	RAL. 01.07 Perta nian	RAL. 01.07 .04 Perbe nihan	RAL.0 1.07. 04.01 Perbe nihan	Pem erint ah Kota Blita r

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	← Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end enc y)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end enc y)
10	Puskesmas	dibawah harga pasaran Memberikan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	KIE Pencegahan penyakit menular (zoonosis) dan penyakit tidak menular pada hewan maupun produk asal hewan	bida ng peter nakan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pertanian	Pertanian	Peternak dan Masyarakat Pemilik Hewan Kesayangan	Non Elektroni k	Jaminan terhadap Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Mengurangi angka kematian schingga menin gkatkan ekono mi melalui produ ktifitas petern akan, pada hewan kesay angan menja	Penyebaran penyakit zoonosis dari hewa n/ternak yang sakit maupun penyakit hewa n menul ar strate gis (PHM	Melaksanakan pencegahan penyakit (desinfeksi, vaksinasi, suportif , monitoring/surveilans) dan pengobatan penyakit serta KIE kepada masyarakat	Puskesmas	RAL.01 Layan an Publik	RAL.01.09 Peter nakan	RAL.01.09 .06 Pusk eswan	RAL.01.09.06.01 Puske swan	Pem erintah Kota Blitar

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	→ Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end enc y)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end enc y)
										min keseh atan pemili k hewan melal ui keseh atan hewan	S)								
1 1	Penge lolaan RPH	Melay ani jasa penye mbelih an sapi agar daging sapi yang bereda r di Kota Blitar terjam in kehal	- Pemotong an hewan secara benar (sesuai dengan persyarat an kesehata n masyarak at veteriner, kesejahte raan hewan dan	UPT RPH	Dina s Pert ania n dan Kota han an Pang an	Pertania n	Perta nian	Para jagal (penjual daging sapi di Kota Blitar	No n Ele ktr oni k	Jamin an produ k asal hewan (daging sapi) yang ASUH	Keberl angsu ngan keters ediaa n daging sapi dalam Kota Blitar	Pemot ongan sapi betina produ ktif dan sapi yang memb awa penya kit zoono sis	Pengaw asan pemoto ngan betina produkt if dan pemerik saan antemo rtem	Penge lolah an RPH	RAL. 01 Laya nan Publ ik	RAL. 01.09 Peter naka n	RAL. 01.09 .07 Penge lolaan RPH	RAL.0 1.09. 07.01 Penge lolaan RPH	Pem erint ah Kota Blita r

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	→ Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end ency)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end ency)
		lannya	syariah agama) dan pemeriks aan hewan sebelum dan sesudah dipotong																
1 2	Reko mend asi Pemb elian BBM Bersu bsidi	Memb erikan kemu dahan kepad a nelaya n dan pelaku usaha perika nan untuk menda patka n bahan bakar jenis	Penerbita n Surat Rekomen dasi Pembelia n Bahan Bakar Jenis Tertentu (Solar) untuk Nelayan dan Pelaku Usaha Perikana n	Kepa la Dina s Perik anan	Dina s Peri kana n	Kelauta n dan Perikan an	Kela utan dan Perik anan	Nelayan dan Pelaku Usaha Perikan an	No n Ele ktr oni k	Kemu dahan nelaya n dan pelak u usaha perika nan dalam pembe lian bahan bakar solar bersu bsidi sesuai denga	Menin gkatk an produ ktifita s, penda patan dan ekono mi perika nan di Kota Blitar	Kesuli tan akses dalam pemb elian bahan bakar solar bersu bsidi bagi nelay an dan pelak u usaha perika	Member ikan Surat Rekome ndasi Pembeli an BBM Bersub sidi	Kebij akan Perik anan	RAL. 01 Laya nan Publ ik	RAL. 01.10 Perik anan	RAL. 01.10 .04 Reko mend asi BBM Bersu bsidi	RAL.0 1.10. 04.01 Reko mend asi Pemb elian BBM Bersu bsidi	Pem erint ah Kota Blita r

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	← Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end ency)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end ency)
		tertentu (solar) untuk digun akan sesuai denga n kebut uhan operas ionaln ya								n kebut uhann ya		nan							
1 3	Pelay anan Perizi nan Berusa ha	Memb erikan legalit as yang kepada a pelaku usaha untuk memu lai dan menjal ankan usaha	Menerbit kan Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Pernyataa n Pengelola an Lingkung an (SPPL), Sertifikat	Bida ng Pena nam an Mod al	DPM PTS P	Kementr ian Investas i	Urus an Pena nam an Mod al	Investor atau Pelaku Usaha	Ele ktr oni k	Memil iki legalit as dan memu dahka n untuk menga kses hal- hal yang terkait	Menin gkatk an Realis asi Invest asi	Terba gu menja di 3 Resik o: Resik o Renda h, Resik o Sedan g, Resik		P6.1 Pelay anan Perizi nan Berusa ha	RAL. 01 Laya nan Publ ik	RAL. 01.12 Inves tasi	RAL. 01.12 .06 Pelay anan Fasili tas Pena nama n Moda l	RAL.0 1.12. 06.01 Pelay anan Perizi nan Berusa ha	Pem erint ah Kota Blita r

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	→ Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end enc y)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end enc y)
		dan/ atau kegiat annya	Standar (SS), Konfirma si Kesesuaia n Kegiatan Pemanfaa tan Ruang (KKKPR)							di bidan g admin istratif		o Tinggi							
1 4	Pelay anan Perizi nan Non Berusa ha	Memb erikan legalit as suatu perizin an sebag ai dasar pengu asaan suatu hak untuk mengg unaka n	Menerbit kan Izin Pendidika n - Izin Operasio nal Penyeleng garaan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Izin Operasio nal Penyeleng garaan	Bida ng Infor masi , Peng emb anga n dan Peng adua n serta Bida ng Pelay anan	DPM PTS P	Kement rian Investas i	Urus an Pena nam an Mod al	Investor atau Pelaku Usaha	Ele ktr oni k	untuk penge ndalia n dan penga wasan pemer intah terhad ap aktivit as dalam hal- hal terten tu yang	Menin gkatk an Penda patan Asli Daera h	Kuran gnya pema hama n pelak u usaha tenta ng perizi nan	Sosialis asi Perizina n ke pelaku usaha	P6.2 Pelay anan Perizi nan Non Berusa ha	RAL. 01 Laya nan Publ ik	RAL. 01.12 Inves tasi	RAL. 01.12 .06 Pelay anan Fasili tas Pena nama n Moda l	RAL.0 1.12. 06.02 Pelay anan Perizi nan Non Berusa ha	Pem erint ah Kota Blita r

[illegible]

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pemerint ahan Terkait	→ Target Layanan (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	→ Prose s Blani s (Depe nden cy)	→ RAL Level 1 (Dep end ency)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end ency)
			Penyeleng garaan Program Pendidika n Sekolah Menenga h Pratama (SMP) Baru dan Perpanja ngan, Izin Reklame - Izin Reklame Tetap, Perpanja ngan dan Isidental, Izin Mendirik an Banguna n (IMB), Izin Utilitas dan Izin Trotoar																
1	Admi	memb	memberik		Keca				No					Admi	RAL	RAL	RAL	RAL.0	Pem

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	← Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end enc y)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end enc y)
5	nistra si Perizi nan Mend irikan Bang unan	erikan pelaya nan yang prima sesuai denga n kebut uhan masya rakat	an izin sesuai dengan persyarat an yang telah terpenuhi		mata n Bug ul Kidul				n Ele ktr oni k					nistra si Perizi nan Mend irikan Bang unan	01 Laya nan Publ ik	01.16 Perizi nan dan Akre ditasi	01.16 .03 Pelay anan Terpa du Satu Pintu	1.16. 03.01 Admi nstra si Perizi nan Mend irikan Bang unan	erint ah Kota Blita r
1 6	Pener bitan Reko mend asi mend iriaka n bang unan	untuk meme nuhi persya ratan perizin an pemba nguna n infrast ruktur gedun g	Guna memenuh i persyarat an perizinan yang dibutuhk an oleh pemohon,	Kepa la Dina s Peke rjaan Umu m dan Pena taan Rua ng	Bida ng Pena taan Ban guna n dan Bina Kons truk si pada Dina s Peke rjaa	Kementr ian PUPR	Pelay anan Dasa r	Masyar akat	No n Ele ktr oni k	Guna mente rtibka n perijin an pemb angun an gedun g dan prasar ana bangu nan gedun g	mend ukung PAD Kota Blitar yang bersu mber dari retrib usi	Belu m semu a masy araka t mema hami kriteri a persy arata n teknis yang diberi	sosialis asi kepada masyar akat dengan lebih masif	P8.1 Pener bitan Reko mend asi	RAL. 01 Laya nan Publ ik	RAL. 01.17 Peker jaan Umu m	RAL. 01.17 .01 Sara na Dan Prasa rana Strat egis	RAL.0 1.17. 01.02 Pener bitan Reko mend asi mend iriaka n bang unan	Pem erint ah Kota Blita r

1 D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pengguna Jawab Layanan	Unit Pelaksanaan	→ Kementerian/Lembaga Terkait (Dependency)	Urusan Pemerintahan Terkait	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	Potensi Manfaat	Potensi Ekonomi	Potensi Resiko	Mitigasi Resiko	→ Proses Bisnis (Dependency)	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	→ RAL Level 3 (Dependency)	→ RAL Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
					n Umum dan Pena taan Ruang							kan							
1 7	Penerbitan Rekomendasi Izin Trotoar	untuk memenuhi persyaratan perizinan pembangunan akses jalan keluar masuk dan utilitas pada trotoar	Guna memenuhi persyaratan perizinan yang dibutuhkan oleh pemohon,	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bina Margapada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kementerian PUPR	Pelayanan Dasar	Masyarakat	Non Elektronik	Guna mentebatkan perizinan pemanfaatan trotoar	mendukung PAD Kota Blitar yang bersumber dari retribusi	Belum semua masyarakat memanfaatkan kriteria persyaratannya teknis yang diberikan	sosialisasi kepada masyarakat dengan lebih masif	P8.1 Penerbitan Rekomendasi	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	RAL.01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	RAL.01.17.01.03 Penerbitan Rekomendasi Izin Trotoar	Pemerintah Kota Blitar
1 8	Bantuan Tekni	Membantu PD	Guna mendukung	Kepala Dinas	Bidang Penataan	Kementerian PUPR	Pelayanan Dasar	Perangkat Daerah	Non Elektronik	Meningkatkan	infrastruktur yang	terjadi keterlambatan	optimalisasi dan	P8.2 Bantuan	RAL.01 Layanan	RAL.01.17 Pekerjaan	RAL.01.17.01	RAL.01.17.01.04	Pemerintah

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Layan an	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	← Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end enc y)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end enc y)
s	lain dalam meren canak an pemba nguna n gedun g baik saran a maup un prasar ana	pembang unan gedung negara di Kota Blitar	s Peke rjaan Umu m dan Pena taan Rua ng	taan Ban guna n dan Bina Kons truk si pada Dina s Peke rjaa n Umu m dan Pena taan Rua ng		r	di lingkun gan Pemerin tah Kota Blitar	ktr oni k	kualit as bangu nan gedun g besert a saran a prasar ana di Kota Blitar	berku alitas memb antu mend orong pertu mbuh an perek onomi an	ambat an penye lesaia n bantu an teknis karen a banya knya permi ntaan bantu an teknis tidak berba nding lurus denga n jumla h SDM di bidan g	peningk atan kapasit as SDM yang ada untuk membe rikan bantua n teknis kepada PD lain	Tekni s	nan Publ ik	jaan Umu m	Sara na Dan Prasa rana Strat egis	Bant uan Tekni s	Kota Blita r	

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	→ Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end ency)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end ency)
PBBK																			
1 9	Infor masi Tata Ruan g	Memb erikan inform asi menge nai rencana perunt ukan lahan sesuai denga n Renca na Tata Ruang	Sebagai acuan bagi masyarak at yang membutu hkan informasi mengenai rencana peruntuk an lahan di Kota Blitar	Kepala Dinas Peke rjaan Umu m dan Pena taan Ruan g	Bidan g Tata Ruan g pada Dina s Peke rjaan Umu m dan Pena taan Ruan g	Kement erian ATR/BP N	Pelay anan Dasa r	Masyar akat	Ele ktr oni k	Menin gkatk an wawas an menge nai tata ruang dan menja dikan proses perijin an/in vestas i lebih efektif dan efisien	menja dikan proses perijin an/in vestas i lebih efektif dan efisien	keterg antun gan pada Pusat (Keme nteria n ATR/ BPN)	Menyed iakan sistem informa si di pemkot sehingg a tersedia databas e cadang an apabila databas e pusat error/k endala	P8.4 Infor masi Tata Ruan g	RAL. 01 Laya nan Publ ik	RAL. 01.17 Peker jaan Umu m	RAL. 01.17 .01 Sara na Dan Prasa rana Strat egis	RAL.0 1.17. 01.05 Infor masi Tata Ruan g	Pem erint ah Kota Blita r
2 0	Penye waan Alat dan Uji Mutu	Untuk pemen uhan kebut uhan alat berat yang	alat yang menduku ng pelaksan aan pembang unan yang	Kepala Dinas Peke rjaan Umu m	Bidan g Pena taan Ban guna n dan	Kement rian PUPR	Pelay anan Dasa r	Perangk at Daerah di lingkun gan Pemerin tah	No n Ele ktr oni k	Menin gkatk an kualit as bangu nan gedun	pena mbah an PAD tarif retrib usi yang	alat yang sudah tidak layak pakai dan biaya	pengad aan alat dimulai dengan invent arisasi peralat	P8.5 Penye waan Alat dan Uji Mutu	RAL. 01 Laya nan Publ ik	RAL. 01.17 Peker jaan Umu m	RAL. 01.17 .01 Sara na Dan Prasa rana	RAL.0 1.17. 01.06 Penye waan Alat dan Uji	Pem erint ah Kota Blita r

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	→ Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end ency)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end ency)
		ada dilabo ratori um uji mutu bahan bahan bangu nan dan alat berat yang berad a di bidang Penata an bangu nan dan Bina Konstr uksi.	kesinamb ungan	dan Pena taan Rua ng	Bina Kons truk si pada Dina s Peke rjaa n Umu m dan Pena taan Rua ng			Kota Blitar, Masyar akat		g besert a saran a prasar ana di Kota Blitar	sudah ada di Peratu ran Walik ota Blitar Nomor 82 tahun 2022 tentan g penye suaia n tarif retrib usi Pema kaian Kekay aan Daera h	pemel ihara an yang tinggi pada alat yang sudah tidak laik pakai	an dan kondisi peralat an sehingg a terbent uk Analisa kebutu han yang kemudi an dituang kan dalam usulan pengad aan peralat an di rencan a kerja anggara n				Strat egis	Mutu	
2 1	Pelay anan Pemb	Untuk melak ukan	Membant u dalam perencanaan	Tim Penil ai	Dina s Perh	Kement erian Perhub	Perh ubu ngan	Aset Pemerin tah	No n Ele	Memb erikan inform	Dapat ditem ukan	Kema cetan lahu	Melaku kan Analisis	RAB. 03.03 .06.0	RAL. 01 Laya	RAL. 01.19 Trans	RAL. 01.19 .01	RAL.0 1.19. 01.01	Pem erint ah

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	← Prosc s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end enc y)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end enc y)
	erian Reko mend asi Izin Andal alin	analisi s terhad ap dampa k lalu lintas yang akan diakib atkan oleh suatu proyek atau kegiat an	aan lalu lintas yang efisien	Anda lalin	ubu ngan	ungan		Kota Blitar	ltr oni k	asi yang lebih baik tentan g damp ak yang akan ditimb ulkan oleh proye k atau kegiat an terhad ap lalu lintas	solusi yang efisien untuk meng urangi kemac etan dan mema ksimal kan pema nfaata n infrast ruktur lalu lintas yang ada	lintas yang tidak terpre diksi atau kurang ny aksesi bilitas dapat meng ganggu perger akan masy araka t dan aktivit as bisnis di sekita r proye k atau kegiat	Dampa k Lalu Lintas yang kompre hensif	l Reko mend asi Andal alin	nan Publ ik	porta si	Kema nana n Dan Kesel amat an Trans porta si	Pelay anan Pemb erian Reko mend asi Izin Andal alin	Kota Blita r

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	→ Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end ency)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end ency)
2 2	Pelay anan Peng ujian Kend araan Berm otor (Uji KIR)	Memas takan bahwa kenda raan bermo tor me memu nuhi s tanda r keama nan dan kelaya kan teknis yang diteta pkan oleh otorita s terkait	Memverifi kasi apakah kendaraa n memenuh i standar teknis yang telah ditetapka n oleh otoritas terkait	UPT. Peng ujian Kend araan Ber moto r	Dina s Perh ubu ngan	Kement erian/Perhub ungan	Perh ubu ngan	Kendar aan Wajib Uji	Ele ktr oni k	Memas takan bahwa kenda raan yang berop erasi di jalan raya memu nuhi persya ratan kesela matan yang diperl ukan, sehing ga meng urangi risiko kecela kaan dan	Memb antu memp erpanj ang umur kenda raan, meng urangi risiko kerus akan atau kegag alan yang tidak terdug a, dan meng hemat biaya perbai kan yang mahal dan	Jika kenda raan yang tidak memu nuhi persy aratan kesela matan atau emisi diper boleh kan untuk tetap berop erasi di jalan raya, hal ini dapat	Mening katkan kesadar an publik tentang penting nya uji KIR secara teratur dan konsek uensi dari tidak memat uhi persyar atan tersebu t	RAB. 03.03 .06.0 3 Pelay anan Peng ujian Kend araan Berm otor	RAL. 01 Laya nan Publ ik	RAL. 01.19 Trans porta si	RAL. 01.19 .01 Kema nana n Dan Kesel amat an Trans porta si	RAL.0 1.19. 01.02 Pelay anan Peng ujian Kend araan Berm otor (Uji KIR)	Pem erint ah Kota Blita r

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	← Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end ency)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end ency)
										melin dungi kesela matan penge mudi, penu mpan g, dan pengg una jalan lainny a		menin gkatk an risiko kecela kaan dan polusi udara							
2 3	Pelay anan Parkir Tepi Jalan Umu m	Untuk menga tur dan menge lola parkir di tepi jalan umum secara efisien	Meningka tkan mobilitas dan kelancara n lalu lintas di jalan- jalan umum	Seks i Perp arkir an	Dina s Perh ubu ngan	Kement erian Perhub ungan	Perh ubu ngan	Penggu na Jalan	No n Ele ktr oni k	Meng urangi parkir semba ranga n yang mengg angu arus lalu lintas dan menin gkatk	Meng hasilk an Penda patan Asli Daera h dari tarif parkir yang ditera pkan	Dapat terjad i kema cetan akibat parkir semb arang an atau parkir di lokasi yang	Menyed iakan pengat uran parkir yang jelas, termas uk penetap an lokasi parkir yang tepat,	RAB. 03.03 .06.0 2 Penge lolaa n Parki r di Tepi Jalan Umu m	RAL. 01 Laya nan Publ ik	RAL. 01.19 Trans porta si	RAL. 01.19 .02 Pelay anan Trans porta si	RAL.0 1.19. 02.01 Pelay anan Parkir Tepi Jalan Umu m	Pem erint ah Kota Blita r

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	← Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end enc y)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end enc y)
										an mobili tas		tidak tepat	pembat asan waktu parkir, atau penggu naan sistem parkir berting kat						
2 4	Pelay anan Parkir Khus us	Menin gkatka n aksesi bilitas bagi pengg una yang memb utuhk an akses parkir yang khusu s	Mengatur dan mengarah kan pengguna parkir ke area yang sesuai dengan kebutuha n mereka	Seks i Perp arkir an	Dina s Perh ubu ngan	Kement erian Perhub ungan	Perh ubu ngan	Penggu na Jalan	No n Ele ktr oni k	Memb antu mengo ptimal kan pema nfaata n ruang parkir yang ada	Meng hasilk an penda patan tamba han melal ui tarif parkir yang diken akan pada jenis parkir khusu	Penya lahgu naan parkir khus us oleh pengg una yang tidak berha k	Melibat kan keberad aan petugas pengaw as parkir, pemant auan dengan kamera CCTV, atau penggu naan teknolo gi	RAB. 03.03 .06.0 5 Penge lolaa n Temp at Parki r Khus us	RAL. 01 Laya nan Publ ik	RAL. 01.19 Trans porta si	RAL. 01.19 .02 Pelay anan Trans porta si	RAL.0 1.19. 02.02 Pelay anan Parkir Khus us	Pem erint ah Kota Blita r

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	→ Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Level 1 (Dep end ency)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end ency)
										s terseb ut			parkir yang canggih , seperti sistem pengen alan plat nomor kendar aan						
2 5	Pelay anan Angk utan Kota	Menye diaka n transp ortasi umum yang aman, terjan gkau, efisien , dan dapat diand alkan bagi pendu duk	Meningka tkan aksesibili tas pendudu k kota ke berbagai tempat penting seperti tempat kerja, sekolah, rumah sakit, pusat perbelanj aan, dan	Seks i Angk utan Dara t dan Term inal	Dina s Perh ubu ngan	Kement erian Perhub ungan	Perh ubu ngan	Warga Kota Blitar	No n Ele ktr oni k	Menin gkatk an aksesi bilitas dan mobili tas pendu duk kota	Menin gkatk an pariwi sata dan ekono mi lokal	Ketid aktep atan waktu dan ketida knya mana dalam pengg unaan Pelay anan Angk utan Kota	Memilik i perenca naan dan manaje men operasi onal yang efektif untuk mengur angi risiko ketidak tepatan waktu	RAB. 03.03 .06.0 4 Pelay anan Angk utan Kota	RAL. 01 Laya nan Publ ik	RAL. 01.19 Trans porta si	RAL. 01.19 .02 Pelay anan Trans porta si	RAL.0 1.19. 02.03 Pelay anan Angk utan Kota	Pem erint ah Kota Blita r

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	← Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end ency)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end enc y)
		dan pengu njung di dalam kota	tempat wisata										dan ketidak nyama nan dalam Pelayan an Angkut an Kota						
2 6	Layan an Pema kama n	Memb erikan pelaya nan kepad a masya rakat terkait pema kaman	Memberik an pelayana n terkait ijin pengguna an tempat pemakam an, perpanja ngan ijin/her registrasi pengguna an tempat pemakam an, ijin pemindah	Kepa la Dina s Peru mah an Raky at dan Kaw asan Perm ukim an	UPT Pem aka man		Pelay anan Dasa r	Masyar akat Umum	No n Ele ktr oni k	Kepua san Peneri ma Layan an	Adany a peneri maan melal ui retrib usi			P4.4 Penge lolaa n Pema kama n	RAL. 01 Laya nan Publ ik	RAL. 01.20 Peru maha n	RAL. 01.20 .02 Kawa san Perm ukim an	RAL.0 1.20. 02.01 Layan an Pema kama n	Pem erint ah Kota Blita r

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pemerint ahan Terkait	→ Target Layanan (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfaat	Poten si Ekon omi	Poten si Resiko	Mitigas i Resiko	→ Proses Bisnis (Depen dency)	→ RAL Level 1 (Depen dency)	→ RAL Level 2 (Depen dency)	→ RAL Level 3 (Depen dency)	→ RAL Level 4 (Depen dency)	→ Instansi (Depen dency)
			an/pembongkaran makam, dan ijin pengadaaan makam tumpang																
2 7	Layanan Rencana Tapak	Rekomendasi terhadap pengajuan tapak kavling	Memberikan kepastian hukum terkait aset PSU Perumahan	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan, Air Minum, dan Air Limbah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	Kementerian PUPR dan Kementerian Investasi/BKPM	Pelayanan Dasar	Badan Hukum/Pribadi yang menyelenggarakan kavling rumah	Non Elektronik	Kejelasan tentang pengakuan aset PSU secara legal	Meningkatkan investasi daerah	Belum semua pengembangan perumahan proaktif untuk merespon penyerahan PSU nya	Melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait penyerahan PSU Perumahan	RAB.03.04.05 Penyelesaian Perumahan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.20 Perumahan	RAL.01.20.03 Perumahan Rakyat	RAL.01.20.03.01 Layanan Rencana Tapak	Pemerintah Kota Blitar

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pemerint ahan Terkait	→ Target Layanan (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	← Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end ency)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end ency)
2 8	Layan an Pengh uni Rusu n	Memb erikan pelaya nan kepada a masya rakat berpe nghasi lan renda h (MBR) terkait penye diaan rumah susun	Memberik an kesempat an layanan hunian yang layak bagi masyarak at berpengh asilan rendah (MBR)	Kepa la Dina s Peru mah an Raky at dan Kaw asan Perm ukim an	UPT Rus una wa		Pelay anan Dasa r	Masyar akat Berpen ghasila n Rendah (MBR)	No n Ele ktr oni k	Kepua san Peneri ma Layan an	Adany a peneri maan melal ui retrib usi			P4.3 Penge lolaa n Ruma h Susu n	RAL 01 Laya nan Publ ik	RAL 01.20 Peru maha n	RAL 01.20 .03 Peru maha n Raky at	RAL.0 1.20. 03.02 Layan an Pengh uni Rusu n	Pem erint ah Kota Blita r
2 9	Layan an Reha bilitas i Sosial	Memb erikan inform asi dan pelaya nan		Kepa la Dina s Sosi al Kota Blita r	Dina s Sosi al Kota Blita r	Kementr ian Sosial	Urus an Sosi al	Disabili tas, Lansia Terlant ar	No n Ele ktr oni k					PERL INDU NGA N PPKS	RAL 01 Laya nan Publ ik	RAL 01.26 Sosia l	RAL 01.26 .03 Reha bilita si Sosia	RAL 01.26 .03.0 1 Layan an Reha	Pem erint ah Kota Blita r

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	← Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end enc y)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end enc y)
		terkait disabil itas, lansia terlant ar dan inform asi penga suh anak		Blita r														l bilitas i Sosial	
3 0	Layan an Bans os APBN	Memb erikan inform asi dan pelaya nan terkait peneri ma bantu an iuran APBN, PKH serta BPNT		Kepa la Dina s Sosi al Kota Blita r	Dina s Sosi al Kota Blita r	Kementr ian Sosial	Urus an Sosi al	PBIN, PKH, Penerim a BPNT	No n Ele ktr oni k					PENA NGA NAN FAKI R MISK IN	RAL 01 Laya nan Publ ik	RAL 01.26 Sosia l	RAL 01.26 .02 Pena ngan an Fakir Misk in	RAL.0 1.26. 02.01 Layan an Bans os APBN	Pem erint ah Kota Blita r
3	Layan	Memb		Kepa	Dina	Kementr	Urus	Penerim	No					PENA	RAL	RAL	RAL	RAL.0	Pem

I D	Nama Layan an	Tujua n Layan an	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	→ Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end ency)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end ency)
1	an Bans os APBD	erikan inform asi dan pelaya nan terkait peneri ma bantu an seperti Santu nan Kemat ian (Sanke m) dan Banso s APBD		la Dina s Sosi al Kota Blita r	s Sosi al Kota Blita r	ian Sosial	an Sosi al	a Sankem , Penerim a Bansos APBD	n Ele ktr oni k					NGA NAN FAKI R MISK IN	01 Laya nan Publ ik	01.26 Sosia l	01.26 .02 Pena ngan an Fakir Miski n	1.26. 02.02 Layan an Bans os APBD	erint ah Kota Blita r
3 2	Layan an DTKS	Memb erikan layana n dan inform asi terkait		Kepa la Dina s Sosi al Kota Blita r	Dina s Sosi al Kota Blita r	Kementr ian Sosial	Urus an Sosi al	Masyar akat Kota Blitar	No n Ele ktr oni k					PENA NGA NAN FAKI R MISK IN	RAL. 01 Laya nan Publ ik	RAL. 01.26 Sosia l	RAL. 01.26 .02 Pena ngan an Fakir	RAL.0 1.26. 02.03 Layan an DTKS	Pem erint ah Kota Blita r

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	← Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end ency)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end ency)
		usula n DTKS, Kartu Indon esia Pintar (KIP) serta usula banso s		Blita r														Miski n	
3 3	Layan an penye lesaia n masal ah Hubu ngan Indus trial	Tujua n layana n ini menye lesaik an perma salaha n pada Hubu ngan Indus trial dan pelapo	Fungsi layanan penyelesa ian masalah Hubunga n Industrial adalah menyeles aikan perbedaa n pendapat yang mengakib atkan	Bida ng Hub unga n Indu strial	Dina s Tena ga Kerj a	Kementr ian Ketenag akerjaa n	Urus an Tena ga Kerja	Buruh / Pekerja dan Perusa haan	No n Ele ktr oni k	Menye lesaik an perma salaha n terkait hubu ngan indust rial				RAB. 06.02 .03 Penin gkata n Hubu ngan Indus trial dan Jami nan Sosial Tenag a Kerja	RAL. 01 Laya nan Publ ik	RAL. 01.32 Keten agake rjaan	RAL 01.32 .02 Penge lolaa n Keten agake rjaan	RAL 01.32 .02.0 1 Layan an penye lesaia n masal ah Hubu ngan Indus trial	Pem erint ah Kota Blita r

[illegible]

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	← Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end ency)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end enc y)
			n kerja dan perselisih an antar perusaha an dan pekerja																
3 4	Layan an Penge sahan Perat uran Perus ahaa n	Penge sahan Peratu ran Perus ahaan	Fungsi layanan ini, antara lain: Untuk menjamin keseimba ngan antara hak dan kewajiba n pekerja. Menjamin keseimba ngan antara kewenang an dan kewajiba n pengusah	Bida ng Hub unga n Indu strial	Dina s Tena ga Kerj a	Kementr ian Ketenag akerjaa n	Urus an Tena ga Kerja	Perusa haan	Ele ktr oni k da n No n Ele ktr oni k	Terdaf tarnya PP				RAB. 06.02 .03 Penin gkata n Hubu ngan Indus trial dan Jami nan Sosial Tenag a Kerja	RAL. 01 Laya nan Publ ik	RAL. 01.32 Keten agake rjaan	RAL 01.32 .02 Penge lolaa n Keten agake rjaan	RAL 01.32 .05.0 2 Layan an Penge sahan Perat uran Perus ahaa n	Pem rint ah Kota Blita r

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	→ Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end enc y)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end enc y)
			a. Memberik an pedoman bagi pengusah a dan pekerja untuk melaksan akan tugas kewajiba nnya masing- masing.																
3 5	Layan an Penca tatan LKS Bipar tit	Pencat atan LKS Biparti t	Fungsi pencatata n LKS Bipartit agar dengan adanya Pembentu kan LKS Bipartit dapat mencipta kan	Bida ng Hub unga n Indu strial	Dina s Tena ga Kerj a	Kementr ian Ketenag akerjaa n	Urus an Tena ga Kerja	Perusa haan	Ele ktr oni k da n No n Ele ktr oni k	Tercat atnya LKS Bipart it				RAB. 06.02 .03 Penin gkata n Hubu ngan Indus trial dan Jami nan	RAL. 01 Laya nan Publ ik	RAL. 01.32 Keten agake rjaan	RAL 01.32 .02 Penge lolaan Keten agake rjaan	RAL 01.32 .05.0 3 Layan an Penca tatan LKS Bipar tit	Pem erint ah Kota Blita r

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	← Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end enc y)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end enc y)
			hubunga n industrial yang harmonis , dinamis, dan berkeadil an di perusaha an.											Sosial Tenag a Kerja					
3 6	Layan an Penca tatan Perja njian Kerja Wakt u Terte ntu (PKW T)	Pencat atan PKWT	Fungsi pencatata n ini agar pekerja buruh dapat memaksi malkan proses hak dan kewajiba n sebagai karyawan pada kurun waktu yang sudah	Bida ng Hub unga n Indu strial	Dina s Tena ga Kerj a	Kementr ian Ketenag akerjaa n	Urus an Tena ga Kerja	Perusa haan	Ele ktr oni k da n No n Ele ktr oni k	Tercat atnya PKWT				RAB. 06.02 .03 Penin gkata n Hubu ngan Indus trial dan Jami nan Sosial Tenag a Kerja	RAL. 01 Laya nan Publ ik	RAL. 01.32 Keten agake rjaan	RAL 01.32 .02 Penge lolaa n Keten agake rjaan	RAL 01.32 .05.0 4 Layan an Penca tatan Perja njian Kerja Wakt u Terte ntu (PKW T)	Pem erint ah Kota Blita r

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement orian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	← Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end enc y)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end enc y)
			ditentukan. Jika hasilnya memuaskan maka karyawan bisa diangkat sebagai karyawan tetap.																
3 7	Layanan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Perusahaan	Fungsi layanan ini mempertegas dan memperjelas hak serta kewajiban perusahaan dan pekerja. Menciptakan hubungan industrial	Bidang Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja	Kementerian Ketenagakerjaan	Urusan Tenaga Kerja	Perusahaan	Elektronik dan Non Elektronik	Terdaf tarnya PKB				RAB. 06.02 .03 Penin gkatan Hubu ngan Indus trial dan Jami nan Sosial Tenaga Kerja	RAL. 01 Layanan Publik	RAL. 01.32 Ketenagakerjaan	RAL 01.32 .05 Penerimaan Tenaga Kerja	RAL 01.32 .05.0 1 Layanan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Pemerintah Kota Blitar

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pengguna Jawab Layanan	Unit Pelaksanaan	Kementerian/Lembaga Terkait (Dependancy)	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Layanan (Dependancy)	Metode Layanan	Potensi Manfaat	Potensi Ekonomi	Potensi Resiko	Mitigasi Resiko	Proses Bisnis (Dependancy)	RAL Level 1 (Dependancy)	RAL Level 2 (Dependancy)	RAL Level 3 (Dependancy)	RAL Level 4 (Dependancy)	Instansi (Dependancy)
			yang harmonis sehingga dapat meminimalisir konflik atau perselisihan. Menjaga kelancaran proses produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja.																
38	Layanan Pendaftaran Calon Peserta Pelatihan	Memfasilitasi para pencari kerja untuk mendaftarkan diri	Fungsi diadakan pelatihan adalah meningkatkan penguasaan teori	Bidang Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	Kementerian Ketenagakerjaan	Urusan Tenaga Kerja	Pencarian Kerja	Non Elektronik	Membah kompetensi pencari kerja				RAB.06.02.01 Peningkatan Kompetensi dan	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	RAL.01.32.04 Peningkatan Kualitas Tenaga	RAL.01.32.04.01 Layanan Pendaftaran Calon Peserta	Pemerintah Kota Blitar

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pemerint ahan Terkait	→ Target Layanan (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	← Proses Bisnis (Depen dency)	→ RAL Level 1 (Depen dency)	→ RAL Level 2 (Depen dency)	→ RAL Level 3 (Depen dency)	→ RAL Level 4 (Depen dency)	→ Instansi (Depen dency)
		mengikut i pelatihan berbasis kompetensi	dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan - persoalan yang menyangkut kegiatan mencapai tujuan.											Daya Saing Tenaga Kerja Serta Produktivitas				ga Kerja	a Pelatihan
3 9	Pembinaan	Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020 menyatakan bahwa pemerintah daerah	untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat jasa konstruksi	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pena taan Ruang	Bidang Pena taan Bangunan dan Bina Konstruksi pada Dina	Kementerian PUPR	Pelayanan Dasar	Masyarakat Jasa konstruksi yang ada di Kota Blitar	Non Elektronik	Meningkatkan kualitas bangunan gedung berserta sarana prasar	meningkatkan kemampuan masyarakat konstruksi di Kota Blitar	terbatasnya jumlah tenaga konstruksi yang di bina	Penganggaran yang tepat guna dan berkesi nambun untuk pelaksanaan pembinaan	P8.6 Pembinaan	RAL 01 Layanan Publik	RAL 01.32 Ketenagakerjaan	RAL 01.32 .04 Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja	RAL 01.32 .04.02 Pembinaan	Pemerintah Kota Blitar

I D	Nama Layan an	Tujuan Layan an	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	← Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Level 1 (Dep end enc y)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end enc y)
		dalam melak sanak an kewen angan sesuai denga n tangg ungja wabny a yaitu menin gkatka n kompe tensi, profesi onalita s, dan produ ktivita s tenaga kerja konstr uksi	si, oleh karena itu perlu keikutser taan masyarak at Pembinaa n melalui pengatur an, pemberda yaan dan pengawas an		s Peke rjaa n Umu m dan Pena taan Rua ng					ana di Kota Blitar	mend ukung pemb angun an infrast ruktur yang berku alitas		jasa konstru ksi						

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	→ Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end ency)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end ency)
4 0	Pene mpat an tenag a kerja dan perlu asan kese mpat an kerja	Memb erikan fasilita si bagi pencar i kerja agar memp eroleh inform asi pasar kerja untuk menda patka n pekerj aan	- Pelaksan aan JoFair - Padat Karya - Penyuluh an dan bimbinga n jabatan - Fasilitasi perlindun gan CPMI Pra dan purna penempat an kerja - Sosialisas i dan penempat an transmigr asi	Bida ng Tena ga Kerja	Dina s Tena ga Kerj a	Kementr ian Ketenag akerjaa n	Urus an Tena ga Kerja	Pencari Kerja	Ele ktr oni k da n No n Ele ktr oni k	Agar penca ri kerja mend apatk an pekerj aan sesuai denga n komp etensi yang dimili ki		Resik o Renda h, Resik o Sedan g. Resik o Tinggi		RAB. 06.02 .02 Penin gkata n Pene mpat an Tenag a Kerja dan Perlu asan Kese mpat an Kerja	RAL. 01 Laya nan Publ ik	RAL. 01.32 Keten agake rjaan	RAL. 01.32 .05 Pene mpat an Tena ga Kerja	RAL.0 1.32. 05.01 Pene mpat an tenag a kerja dan perlu asan kese mpat an kerja	Pem erint ah Kota Blita r
4 1	Layan an pemb uatan kartu	Tujua nnya sebag ai tanda	Fungsi utama dari Kartu Tanda	Bida ng Tena ga Kerja	Dina s Tena ga Kerj a	Kementr ian Ketenag akerjaa n	Urus an Tena ga Kerja	Pencari Kerja	No n Ele ktr oni	Sebag ai syarat mela mar				RAB. 06.02 .02 Penin gkata	RAL. 01 Laya nan Publ	RAL. 01.32 Keten agake rjaan	RAL. 01.32 .05 Pene mpat	RAL.0 1.32. 05.02 Layan an	Pem erint ah Kota Blita

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	← Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end enc y)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end enc y)
	AK/1	bahwa tidak sedan g terikat denga n perus ahaan mana pun.	Pencari Kerja / AK1 ini adalah supaya Dinas Ketenaga kerjaan bisa mendata jumlah pencari kerja di daerahny a. Selain itu, Kartu Tanda Pencari Kerja juga berfungsi untuk melapor ke Disnaker apabila pencari kerja belum/su dah		a				k pekerj aan					n Pene mpat an Tenag a Kerja dan Perlu asan Kese mpat an Kerja	ik		an Tena ga Kerja	pemb uatan kartu AK/1	r

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	→ Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end enc y)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end enc y)
			mendapat kan pekerjaan																
4 2	Layan an Reko m CPMI	Tujua nnya mema stikan bahwa perus ahaan penyal ur CPMI adalah perus ahaan yang legal	Fungsi layanan pembuata n rekom paspor CPMI adalah agar Dinas Tenaga Kerja dapat mendata jumlah CPMI yang akan berangkat	Bida ng Tena ga Kerja	Dina s Tena ga Kerj a	Kementr ian Ketenag akerjaa n	Urus an Tena ga Kerja	Calon Pekerja Migran Indones ia	No n Ele ktr oni k	mema stikan perus ahaan yang menya lurka n CPMI adala h perus ahaan yang legal				RAB. 06.02 .02 Penin gkata n Pene mpat an Tenag a Kerja dan Perlu asan Kese mpat an Kerja	RAL. 01 Laya nan Publ ik	RAL. 01.32 Keten agake rjaan	RAL. 01.32 .05 Pene mpat an Tena ga Kerja	RAL.0 1.32. 05.03 Layan an Reko m CPMI	Pem erint ah Kota Blita r
4 3	Layan an penda ftaran dan perpa	Tujua nnya memb erikan pelaya nan	BKK berguna membant u alumni Sekolah Menenga	Bida ng Tena ga Kerja	Dina s Tena ga Kerj a	Kementr ian Ketenag akerjaa n	Urus an Tena ga Kerja	Sekolah Meneng ah Kejurua n se- Kota	No n Ele ktr oni k	mengi kat dan memb angun hubu				RAB. 06.02 .02 Penin gkata n	RAL. 01 Laya nan Publ ik	RAL. 01.32 Keten agake rjaan	RAL. 01.32 .05 Pene mpat an	RAL.0 1.32. 05.04 Layan an penda	Pem erint ah Kota Blita r

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pemerint ahan Terkait	→ Target Layanan (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfaat	Poten si Ekon omi	Poten si Resiko	Mitigas i Resiko	→ Proses Bisnis (Depen dency)	→ RAL Level 1 (Depen dency)	→ RAL Level 2 (Depen dency)	→ RAL Level 3 (Depen dency)	→ RAL Level 4 (Depen dency)	→ Instansi (Depen dency)
	njang an tanda daftar bursa kerja khusus (BKK)	dan informasi lowongan kerja, pelaksanaan, pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja	h Kejuruan (SMK)/Perguruan Tinggi/LPK mencari pekerjaan dan menjembatani dunia usaha dalam merekrut tenaga kerja, sekaligus tolak ukur keberhasilan sekolah dalam menyiapkan tenaga terampil yang dibutuhkan pasar					Blitar		ngan saling meng untungkan antara sekolah dengan dinas agar dapat menge ntaskan penga ngguran tingkat SMA/ SMK sedera jat			Pene mpatan Tenaga Kerja dan Perlu asan Kese mpatan Kerja				Tena ga Kerja	ftaran dan perpan jang an tanda daftar bursa kerja khusus (BKK)	

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	→ Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end ency)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end enc y)
4 4	Perizinan Lingkungan Hidup	yaitu Pelayanan Pengu rusan Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha /Kegiatan sebagai syarat pener bitan Perizin an Berusa ha yang terdiri atas UKL-UPL	kerja. Pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertaman an Kota Blitar melayani Perijinan Lingkung an dalam hal ini yaitu penerbita n Persetuju an Lingkung an. Penerbita n Persetuju an Lingkung an dilaksana	Bida ng APD AL	DLH KP	Dinas Lingkun gan Hidup,Kebersiha n dan Pertama nan	Urus an Ling kung an Hidu p	Masyar akat Umum,I nstansi, Swasta	pel aya na n ber bas is onl ine mel alu apli kas i we b yan g ber na ma SIL IHP AS	Memp ercepa t proses pengaj uan permo honan doku men lingku ngan hidup karen a penda ftaran berba sis online melal ui teknol ogi inform asi dapat meper	Memp ermudah ah proses pengaj uan permo honan doku men lingku ngan hidup karen a denga n SILIH PAS pemo hon tidak perlu datan g ke kantor untuk proses	Resik o terjad inya server down	Melaku kan kerjasa ma dengan Diskom infotik Kota Blitar untuk mempe rbaiki ganggu an saat server down	Deng an adan ya web aplik asi SILIH PAS ini, peng urusa n SPPL menj adi lebih muda h dan cepat denga n mem butu hkan wakt u hany	RAL. 01 Laya nan Publ ik	RAL. 01.40 Lingk unga n Hidu p	RAL. 01.40 .04 Peng awas an Dan Keam anan Sum ber Daya Alam	RAL.0 1.40. 04.01 Perizi nan Lingk unga n Hidu p	Pem erint ah Kota Blita r

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Layan an	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	← Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end enc y)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end enc y)
		dan SPPL.	kan dengan melakuka n pemeriks aan atau penilaian dokumen lingkunga n bagi pemrakar sa usaha dan/atau kegiatan sebagai syarat penerbita n Perizinan Berusaha . Saat ini, bidang yang melayani pemeriks aan atau penilaian dokumen lingkunga n untuk							singka t proses birokr asi	pengaj uan			a 1-2 hari, serta pemo hon dapat mela kuka n peng urusa n, peng ungg ahan berka s doku men secar a mand iri, dan pence takan doku men regist er					

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	← Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end ency)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end enc y)
			penerbita n Persetuju an Lingkung an adalah Bidang Analisis dan Pengenda lian Dampak Lingkung an											SPPL secar a mand iri tanpa perlu ke kanto r DLHK P Kota Blitar					
4 5	Wistle Blowi ng	Sebag ai wadah atau portal bagi masya rakat untuk melap orkan dugaa n TIPIK	Pencegah an TIPIKOR	Insp ektu r	Insp ektu rat	Inspekt orat Provinsi Jawa Timur	Peng awas an	Masyar akat Kota Blitar	Ele ktr oni k	Mence gah terjadi nya TIPIK OR	Menye lambat kan keuan gan pemer intah daera h	Penye lewen gan atau tinda kan korup si yang dapat meru gikan Pemer intah	Melaku kan rangkai an tahap investig asi sesuai dengan peratur an yang berlaku	RAB. 09.07 .05 Penga wasan Peme rinta han	RAL. 01 Laya nan Publ ik	RAL. 01.43 Infor masi	RAL. 01.43 .03 Pelay anan Infor masi	RAL.0 1.43. 03.01 Wistle Blowi ng	Pem erint ah Kota Blita r

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	← Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Level 1 (Dep end ency)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end ency)
		OR										Daera h khus usnya bagi masy araka r							
4 6	Fasilit asi Pembi ayaan	untuk memb erikan inform asi sekali gus memb angun pemah aman bersa ma pelaku Koper asi dan Usaha Mikro menge nai	memberik an fasilitasi bagi para pelaku Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Blitar terutama fasilitasi terkait penguata n K- UMKM dari segi keuangan atau pembiaya		Dina s Kope rasi dan Usa ha Mikr o	Perbank an, Lembag a BUMN, dan OPD terkait		K-UKM	No n Ele ktr oni k					P4.2. 1 Fasili tasi Pemb iaya n	RAL. 01 Publ ik	RAL. 01.13 Koper asi	RAL. 01.13 .01 Koper asi Dan Usah a Mikro	RAL.0 1.13. 01.1 Fasilit asi Pembi ayaan	Pem erint ah Kota Blita r

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	← Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end enc y)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end enc y)
		akses- akses permo dalam Koper asi dan Usaha Mikro baik dari perba nkan maup un non- perba nkan.	an.																
4 7	Prom osi Pema saran	untuk memb eritah ukan atau mena warka n produ k atau jasa	meningka tkan kesadara n publik, merangsa ng orang untuk membeli dan meningka		Dina s Kope rasi dan Usa ha Mikr o	Paguyu ban koperasi /usaha mikro, EO, Pelaku Usaha, platform pemasar an		K-UKM	No n Ele ktr oni k					P4.2. 2 Prom osi Pema saran	RAL. 01 Publ ik	RAL. 01.13 Koper asi	RAL. 01.13 .01 Koper asi Dan Usah a Mikro	RAL.0 1.13. 01.2 Prom osi Pema saran	Pem erint ah Kota Blita r

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	← Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end enc y)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end enc y)
		secara online maup un offline denga n tujuan menar ik calon konsu men untuk memb eli atau mengk onsu msiny a.	tkan penjualan .			(ex.shop ee,dll)													
4 8	Legali tas Usah a KUM		untuk membina, menertib kan, mengarah kan, dan mengawa si izin		Dina s Kope rasi dan Usa ha Mikr	DPMPT SP		K-UKM	No n Ele ktr oni k					P4.2. 3 Legali tas Usah a KUM	RAL. 01 Publ ik	RAL. 01.13 Koper asi	RAL. 01.13 .01 Koper asi Dan Usah a	RAL.0 1.13. 01.3 Legali tas Usah a KUM	Pem erint ah Kota Blita r

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pengguna Jawa b Layanan	Unit Pelaksana	→ Kementrian/L embaga Terkait (Dependancy)	Urusan Pemerintah Terkait	→ Target Layanan (Dependancy)	Metode Layanan	Potensi Manfaat	Potensi Ekonomi	Potensi Risiko	Mitigasi Risiko	→ Proses Bisnis (Dependancy)	→ RAL Level 1 (Dependancy)	→ RAL Level 2 (Dependancy)	→ RAL Level 3 (Dependancy)	→ RAL Level 4 (Dependancy)	→ Instansi (Dependancy)
			usaha perdagangan.		o													Mikro	
49	Advokasi KUM				Dinas Koperasi dan Usaha Mikro			K-UKM	Non Elektronik					P4.3.4 Advokasi KUM	RAL.01 Publik	RAL.01.13 Koperasi	RAL.01.13.01 Koperasi Dan Usaha Mikro	RAL.01.13.01.4 Advokasi KUM	Pemerintah Kota Blitar
50	Layanan PPID								Elektronik					Pengelolaan Informasi Publik	RAL.01 Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL.01.43.01 Layanan PPID	RAL.01.43.01.01 Layanan PPID	Pemerintah Kota Blitar
51	Layanan Pengaduan Masyarakat								Elektronik					Pengelolaan Komunitas Publik	RAL.01 Publik	RAL.01.44 Komunikasi	RAL.01.44.01 Layanan Pengaduan Masyarakat	RAL.01.44.01.01 Layanan Pengaduan Masyarakat	Pemerintah Kota Blitar

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	← Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Level 1 1 (Dep end ency)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end ency)
5 2	Srika ndi	Mewuj udkan tata kelola pemer intahan yang bersih , efektif, transp aran, dan akunt abel melalu i penera pan SPBE Bidan g Kearsi pan Dinam is	Mewujud kan pelayana n administr asi pemerint ahan di Bidang Kearsipan Dinamis yang berkualit as dan terpercay a	Bida ng Kear sipa n pada Dina s Perp usta kaan dan Kear sipa n	Bida ng Kear sipa n pada Dina s Perp usta kaan dan Kear sipa n	ANRI	Urus an Kear sipa n	Perangk at Daerah di Wilayah Kota Blitar	Ele ktr oni k	Pengel olaan arsip dinam is				RAB. 08.02 .06 Pemb inaan Kepu staka an Dan Arsip Nasio nal	RAL. 02 Laya nan Adm inist rasi Pem erint aha n	-	RAL. 02.10 .05 Aplik asi SPBE	RAL.0 2.10. 05.01 Srika ndi	Pem erint ah Kota Blita r
5 3	Reko mend asi	Memb erikan kemu	Penerbita n Surat Rekomen	Bida ng TPH	Dina s Pert	Pertania n	Perta nian	Petani pemilik alsintan	No n Ele	Kelan caran pembe	Menin gkatn ya	Kelan gkaan bahan		Reko mend asi	RAL. 02 Laya	RAL. 01.07 Perta	RAL. 01.07 .03	RAL.0 1.07. 03.02	Pem erint ah

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	← Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end enc y)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end enc y)
	BBM bersu bsidi	dahan kepad a masya rakat teruta ma petani dan pengu saha kecil menen gah bidang pertan ian untuk menda patka n bahan bakar jenis tertent u (solar subsidi) untuk	dasi Pembelia n Jenis Bahan Bakar Tertentu (Jenis Solar) untuk alat dan mesin yang bergerak di bidang pertanian		ania n dan Keta han an Pang an			, Usaha Selep Padi Keliling, dan Selep Padi Meneta p yang berdomi sili di Kota Blitar	ktr oni k	lian bahan bakar solar bersu bsidi untuk alsint an (alat dan mesin pertan ian) untuk aktifit as budid aya tanam an panga n	produ ktifita s tanam an panga n yang secara tidak langs ung menin gkatk an ekono mi pertan ian di Kota Blitar	bakar solar bersu bsidi di SPBU dan atau perma salah an lain yang meny angku t pemb elian solar subsidi untuk alsint an		BBM bersu bsidi	nan Adm inist rasi Pem erint aha n	nian	Reko mend asi BBM Bersu bsidi	Reko mend asi Reko mend asi BBM bersu bsidi	Kota Blita r

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	← Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end enc y)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end enc y)
		digun akan pada alat mesin pertan ian berup a trakto r, mesin selep padi kelilin g, dan mesin selep padi menet ap																	
5 4	LAYA NAN PENG ADAA N BARA NG DAN	Pelaks anaan peman tauan dan evalua si di bidang	Penyiapa n bahan pengoordi nasian pelaksan aan tugas perangkat daerah di	BAGI AN PEN GAD AAN BAR ANG DAN	BAG IAN PEN GAD AAN BAR ANG DAN	KEMEN DAGRI	Uns ur pend uku ng sem ua urus	PERAN GKAT DAERA H DAN MASYA RAKAT	Ele ktr oni k	Meng hasilk an baran g/jasa yang tepat dari	memu dahka n pelak u usaha mikro dan	Kerug ian mater iil atau finans ial, Tangg	Kerugia n materiil atau finansia l, Tangu ng	P5.5. 1 Pelay anan SPSE	RAL. 02 Laya nan Adm inist rasi Pem	RAL. 02.02 Keua ngan	RAL. 02.02 .08 Penye lengg araan Peng adaa	RAL.0 2.02. 08.02 LAYA NAN PENG ADAA N	Pem erint ah Kota Blita r

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	← Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end enc y)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end enc y)
	JASA	pengel olaan penga daan baran g dan jasa, pengel olaan layana n penga daan secara elektro nik, Pemb inaan dan advok asi penga daan baran g dan jasa	bidang pengelol aan pengadaa n barang dan jasa, pengelol aan layanan pengadaa n secara elektronik , pembinaa n dan advokasi pengadaa n barang dan jasa	JAS A	JAS A		an pem erint ahan			setiap uang yang dibela njaka n, diuku r dari aspek kualit as, jumla h, waktu , biaya, lokasi, dan penye dia, Menin gkatk an pengg unaan produ ksi dalam negeri	usaha kecil berper an aktif dalam penga daan baran g/jasa pemer intah , menin gkatk an produ k dalam negeri	ung jawab jawab huku m, Kegag alan penga daan, kegag alan opera s	jawab hukum, Kegagal an pengad aan, kegagal an operas		erint aha n		n Bara ng/J asa Peme rinta h	BARA NG DAN JASA	

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Koment erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	→ Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end ency)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end ency)
5 5	Kons ultasi Kebij akan	Untuk memb eri analisa menda lam terhad ap suatu kebijaka nan	Pendalam an terhadap suatu Kebijakan	Kaba g Orga nisas i	Bagi an Orga nisa si	Kemenp anRB Kemend agri	SEM UA OPD TER KAIT	Perangk at Daerah dan ASN	No n Ele ktr oni k						RAL. 02 Laya nan Adm inist rasi Pem erint aha n	RAL. 02.04 Apar atur Negar a	RAL. 02.04 .06 Peng kajia n Mana jeme n ASN	RAL.0 2.04. 06.02 Kons ultasi Kons ultasi Kebij akan	Pem erint ah Kota Blita r
5 6	Layan an Penye dia data dan infor masi	Untuk meme nuhi kebut uhan data yang diperl ukan bagi penilai an, dsb	Untuk melayani perminta an data dan informasi	Kaba g Orga nisas i	Bagi an Orga nisa si	Kemenp anRB Kemend agri	SEM UA OPD TER KAIT	Perangk at Daerah dan ASN	No n Ele ktr oni k		Tidk ada	Tidk ada	Tidk ada		RAL. 02 Laya nan Adm inist rasi Pem erint aha n	RAL. 02.08 Orga nisasi dan Tata Kelola	RAL. 02.04 .07 Tata Kelola Dan Tata Laks ana Orga nisasi	RAL.0 2.04. 07.02 Layan an Layan an Penye dia data dan infor masi	Pem erint ah Kota Blita r
5 7	Fasilit asi Peny	Penye diaan Data	Tersedian ya Data Jenis dan	Sekr etari at	Sekr etari at				No n Ele					Fasili tasi Persi	RAL. 02 Laya	RAL. 02.09 Data	RAL. 02.09 .03	RAL.0 2.09. 03.01	Pem erint ah

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	← Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end ency)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end ency)
	usun an Perat uran Daera h	Jenis dan Jumla h Persid angan DPRD	Jumlah Persidang an DPRD	DPR D	DPR D				ktr oni k					dang an DPRD	nan Adm inist rasi Pem erint aha n	dan Infor masi Peme rinta han	Penge lolaa n Data Dan Infor masi	Fasilit asi Peny usun an Perat uran Daera h	Kota Blita r
5 8	Fasilit asi Penga wasa n	Penye diaan Data Jenis dan Jumla h Persid angan DPRD	Tersedian ya Data Jenis dan Jumlah Persidang an DPRD	Sekr etari at DPR D	Sekr etari at DPR D				No n Ele ktr oni k					Fasili tasi Persi dang an DPRD	RAL. 02 Laya nan Adm inist rasi Pem erint aha n	RAL. 02.09 Data dan Infor masi Peme rinta han	RAL. 02.09 .03 Penge lolaa n Data Dan Infor masi	RAL.0 2.09. 03.02 Fasilit asi Penga wasa n	Pem erint ah Kota Blita r
5 9	Fasilit asi Reses	Penye diaan Data Jenis dan Jumla h Persid angan	Tersedian ya Data Jenis dan Jumlah Persidang an DPRD	Sekr etari at DPR D	Sekr etari at DPR D				No n Ele ktr oni k					Fasili tasi Persi dang an DPRD	RAL. 02 Laya nan Adm inist rasi Pem erint	RAL. 02.09 Data dan Infor masi Peme rinta han	RAL. 02.09 .03 Penge lolaa n Data Dan Infor	RAL.0 2.09. 03.03 Fasilit asi Reses	Pem erint ah Kota Blita r

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	→ Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end ency)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end ency)
			DPRD												aha n		masi		
6 0	Kunj ungan Kerja	Penye diaan Data Jenis dan Jumla h Persid angan DPRD	Tersedian ya Data Jenis dan Jumlah Persidang an DPRD	Sekr etari at DPR D	Sekr etari at DPR D				No n Ele ktr oni k					Penin gkata n Kapa sitas DPRD	RAL. 02 Laya nan Adm inist rasi Pem erint aha n	RAL. 02.09 Data dan Infor masi Peme rinta han	RAL. 02.09 .03 Penge lolaa n Data Dan Infor masi	RAL.0 2.09. 03.04 Kunj unga n Kerja	Pem erint ah Kota Blita r
6 1	Bimte k/Ori entasi Penda lama n Tugas	Penye diaan Data Jenis dan Jumla h Persid angan DPRD	Tersedian ya Data Jenis dan Jumlah Persidang an DPRD	Sekr etari at DPR D	Sekr etari at DPR D				No n Ele ktr oni k					Penin gkata n Kapa sitas DPRD	RAL. 02 Laya nan Adm inist rasi Pem erint aha n	RAL. 02.09 Data dan Infor masi Peme rinta han	RAL. 02.09 .03 Penge lolaa n Data Dan Infor masi	RAL.0 2.09. 03.05 Bimte k/Ori entasi Penda lama n Tugas	Pem erint ah Kota Blita r
6 2	Penye diaan Tenag a Ahli Fraks	Penye diaan Data Jenis dan	Tersedian ya Data Jenis dan Jumlah Persidang	Sekr etari at DPR	Sekr etari at DPR				No n Ele ktr oni					Penin gkata n Kapa sitas	RAL. 02 Laya nan Adm	RAL. 02.09 Data dan Infor	RAL. 02.09 .03 Penge lolaa	RAL.0 2.09. 03.06 Penye diaan	Pem erint ah Kota Blita

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Layan an	Unit Pelak san a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	→ Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Level 1 (Dep end ency)	→ RAL Level 2 (Dep end ency)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Instansi (Dep end ency)
	i	Jumla h Persid angan DPRD	an DPRD	D	D				k					DPRD	inist rasi Pem erint aha n	masi Peme rinta han	n Data Dan Infor masi	Tenag a Ahli Fraks i	r
63	Layan an Peng umpu lan data statis tik sekto ral								No n Ele ktr oni k					Peng umpu lan data statis tik sekto ral	RAL. 02 Laya nan Adm inist rasi Pem erint aha n	RAL. 02.09 Data dan Infor masi Peme rinta han	RAL. 02.09 .03 Penge lolaa n Data Dan Infor masi	RAL.0 2.09. 03.07 Layan an Peng umpu lan data statis tik sekto ral	Pem erint ah Kota Blita r
64	Pener bitan Stand ar Harga Satua n Tertin ggi SK	Memb antu PD lain dalam meren cana kan pemban guna	Untuk mewujudkan tertib administrasi dan kelancara n pelaksan aan pembang	Kepa la Dina s Peke rjaan Umu m dan Pena	Bida ng Pena taan Ban guna n dan Bina Kons	Kementr ian PUPR	Pelay anan Dasa r	Perangk at Daerah di lingkun gan Pemerin tah Kota Blitar	No n Ele ktr oni k	Untuk mewuj udkan tertib admin istrasi dan kelanc aran pelaks	peren canaa n pekerj aan konstr uksi yang tepat angga	adany a inflasi yang tidak dipre diksi di tahun berik	koordin asi yang inten ke bagian adminis trasi pemban gunan	P8.3 Pener bitan Stand ar Harga Satua n Tertin ggi	RAL. 02 Laya nan Adm inist rasi Pem erint aha	RAL. 02.09 Data dan Infor masi Peme rinta han	RAL. 02.09 .03 Penge lolaa n Data Dan Infor masi	RAL.0 2.09. 03.08 Pener bitan Stand ar Harga Satua n	Pem erint ah Kota Blita r

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	← Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end enc y)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end enc y)
	tertin ggi (HSP K)	n gedun g baik saran a maup un prasar ana	unan Konstruk si di lingkunga n Pemerint ah Kota Blitar, perlu menetapk an Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Konstruk si	taan Rua ng	truk si pada Dina s Peke rjaa n Umu m dan Pena taan Rua ng					anaan pemb angun an Konst ruksi di lingku ngan Pemer intah Kota Blitar, perlu menet apkan Harga Satua n Pokok Kegiat an (HSPK) Konst ruksi, yang digun akan untuk	ran	utnya	untuk penyam paian harga SH yang dipakai sebagai acuan dalam penyus unan HSPK tahun berikut nya		n				Tertin ggi SK tertin ggi (HSP K)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	← Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end ency)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end ency)
6 5	Layan an Anali sis data statistik sektoral								Ele ktr oni k	diteta pkan				Anali sis data statistik sektoral	RAL 02 Laya nan Adm inist rasi Pem erint aha n	RAL 02.09 Data dan Infor masi Peme rinta han	RAL 02.09 .06 Statis tik Sektoral	RAL.0 2.09. 06.01 Layan an Anali sis data statistik sektoral	Pem erint ah Kota Blita r
6 6	Layan an Penge mban gan data statistik sektoral								Ele ktr oni k					Penge mban gan data statistik sektoral	RAL 02 Laya nan Adm inist rasi Pem erint aha n	RAL 02.09 Data dan Infor masi Peme rinta han	RAL 02.09 .06 Statis tik Sektoral	RAL.0 2.09. 06.02 Layan an Penge mban gan data statistik sektoral	Pem erint ah Kota Blita r
6	layan an	ing dan	Mensingk ronisasi	bagi an	bagi an	KEMEN	Uns ur	Perangk aDaera	No n	Mensi ngkro	tidk	tidak	tidak	P6.3. 4	RAL 02	RAL 02.09	RAL 02.09	RAL.0 2.09.	Pem erint

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	Prose s Bisni s (Depe nden cy)	RAL Leve l 1 (Dep end ency)	RAL Level 2 (Dep ende ncy)	RAL Level 3 (Depe nden cy)	RAL Level 4 (Depe nden cy)	Inst ansi (Dep end ency)
7	Pelap oran Mone v fisik dan keua ngan	evalua si data realisa si fisik dan keuan gan peran gkat daera h	data fisik dan keuangan	Admi nistrasi Pem bang unan	Adm inistri Pembang una n	DAGRI	pend uku ng sem ua urus an pem erint ahan	ht	Ele ktr oni k	nisasi data fisik dan keuan gan	ada	ada	ada	Pelap oran	Laya nan Adm inistri Pemb erint ahan	Data dan Infor masi Peme rinta han	.09 Penge lolah Mone v Fisik dan Keua ngan	09.02 layan an Pelap oran Mone v fisik dan keua ngan	ah Kota Blita r
6 8	Layan an Penge lolaan E- Gover nmen t								No n Ele ktr oni k					Penge lolaan E- Gover nmen t	RAL 02 Laya nan Adm inistri Pemb erint ahan	RAL 02.10 Siste m Peme rinta han Berb asis Elekt ronik	RAL 02.10 .01 Tata Kelola SPBE	RAL 02.10 01.01 Layan an Penge lolaan E- Gover nmen t	Pem erint ah Kota Blita r
6 9	Layan an Infras trukt ur Jarin gan								Ele ktr oni k					Penge lolaan Infras trukt ur Jarin gan	RAL 02 Laya nan Adm inistri Pemb erint ahan	RAL 02.10 Siste m Peme rinta han	RAL 02.10 .04 Infras trukt ur SPBE	RAL 02.10 04.01 Layan an Infras trukt	Pem erint ah Kota Blita r

I D	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Pena nggu ng Jawa b Laya nan	Unit Pela ksan a	→ Kement erian/L embaga Terkait (Depen dency)	Urus an Pem erint ahan Terk ait	→ Target Layana n (Depen dency)	Me tod e La ya na n	Poten si Manfa at	Poten si Ekon omi	Poten si Resik o	Mitigas i Resiko	← Prose s Bisni s (Depe nden cy)	→ RAL Leve l 1 (Dep end enc y)	→ RAL Level 2 (Dep ende ncy)	→ RAL Level 3 (Depe nden cy)	→ RAL Level 4 (Depe nden cy)	→ Inst ansi (Dep end enc y)
70	Layan an Penge lolaan dan Integr asi Aplik asi								Ele ktr onik					gan	Pem erint ahan	Berb asis Elekt ronik		ur Jarin gan	
														Penge lolaa n dan Integr asi Aplik asi	RAL. 02 Laya nan Adm inist rasi Pem erint ahan	RAL. 02.10 Siste m Peme rintahan Berb asis Elekt ronik	RAL. 02.10 .05 Aplik asi SPBE	RAL.0 2.10. 05.01 Layan an Penge lolaan dan Integr asi Aplik asi	Pem erint ah Kota Blita r
71	Layan an Keam anan SPBE								Ele ktr onik					Penge lolaa n Persa ndian	RAL. 02 Laya nan Adm inist rasi Pem erint ahan	RAL. 02.10 Siste m Peme rintahan Berb asis Elekt ronik	RAL. 02.10 .06 Keam anan SPBE	RAL.0 2.10. 06.01 Layan an Keam anan SPBE	Pem erint ah Kota Blita r

1.12Arsitektur Aplikasi

1.12.1 Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi

Dalam domain arsitektur aplikasi SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan substansi aplikasi SPBE ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur aplikasi SPBE berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- domain aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi pemerintah ke dalam 2 (dua) domain aplikasi pemerintah, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- area aplikasi, yang menjelaskan area aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan, sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- kategori aplikasi, yang menjelaskan aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga); dan
- sub kategori aplikasi, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori aplikasi sebagai tingkat 4 (keempat). Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mendefinisikan di tingkat 3 (ketiga) dan tingkat 4 (keempat), akan dijelaskan dalam pedoman penyusunan Arsitektur SPBE. Ilustrasi struktur referensi arsitektur aplikasi SPBE dapat terlihat pada gambar berikut.



Gambar 0-8 Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Selanjutnya proses klasifikasi dan identifikasi pada struktur domain di tingkat nasional, akan menjadi arah kebijakan Arsitektur SPBE Nasional, melalui referensi arsitektur aplikasi dan menjadi acuan pada pembentukan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

1.12.2 Peta Relasi dan Keterkaitan Antar Domain

Layanan SPBE yang dilakukan secara elektronik dihasilkan melalui sebuah aplikasi. Aplikasi SPBE diharapkan dapat mengakomodir fungsi-fungsi yang perlu dilakukan untuk menghasilkan layanan tersebut. Dengan demikian aplikasi ini dapat berupa sebuah aplikasi ataupun pengintegrasian dari beberapa aplikasi. Aplikasi SPBE terhubung secara terintegrasi secara lintas sektoral, sehingga pembangunannya diwajibkan mengikuti kaidah

pembangunan aplikasi SPBE sehingga mempermudah tata kelola aplikasi di lingkungan pemerintahan secara nasional.

Penyusunan referensi arsitektur pada domain aplikasi SPBE bertujuan untuk melakukan klasifikasi aplikasi dan komponennya, melalui pemetaan aplikasi yang berkorelasi dengan arah kebijakan nasional berupa penciptaan layanan pemerintah terintegrasi, sehingga membantu secara signifikan dalam mengidentifikasi peluang ditemukannya duplikasi aplikasi dan peluang untuk berbagi pakai aplikasi.

Penyusunan referensi arsitektur aplikasi SPBE dilakukan dengan memerhatikan faktor sebagai berikut:

- a. disusun berdasarkan pada struktur adaptif yang memungkinkan terjadinya pengembangan dan atau pengintegrasian fungsi lain/bam dalam penyediaan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. aplikasi yang berorientasi pada layanan;
- c. didefinisikan sebagai hirarki komponen aplikasi;
- d. dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
- e. berbasis kode sumber terbuka (open source); dan
- f. terkorelasi dengan domain layanan SPBE, dan domain data dan informasi melalui hubungan yang teridentifikasi dan didukung oleh domain infrastruktur SPBE dan domain keamanan SPBE, maka dapat terlihat relasi langsung pada domain aplikasi SPBE pada gambar berikut



Gambar 0-9 Relasi Langsung pada Domain Aplikasi SPBE

1.12.3 Atribut Metadata Arsitektur Aplikasi

Pada table berikut ini dapat dilihat atribut metadata aplikasi.

Tabel 0-29 Atribut Metadata Aplikasi

No	Nama Atribut	Keterangan
1	Nama Aplikasi	Nama aplikasi yang digunakan atau dimiliki.
2	Uraian Aplikasi	Berisi uraian atau deskripsi secara umum dari aplikasi.
3	Fungsi Aplikasi	Berisi keterangan fungsi dari aplikasi terhadap layanan yang didukung.
4	Kode Model Referensi SPBE	Kode model referensi yang terkait dengan aplikasi
5	Layanan yang Didukung	Layanan yang didukung oleh aplikasi, pilihan layanan yang didukung didapat dari metadata layanan.

No	Nama Atribut	Keterangan
6	Data yang Digunakan	Data yang disimpan pada media penyimpanan data, pilihan data yang digunakan didapat dari metadata data.
7	Luaran	Merupakan hasil-hasil yang diperoleh dari aplikasi yang dimiliki atau digunakan.
8	Basis Aplikasi	Basis dari aplikasi (Desktop; Web; Cloud; atau Mobile)
9	Server Aplikasi	Server yang digunakan oleh aplikasi, pilihan server yang digunakan didapat dari metadata perangkat keras server.
10	Tipe Lisensi Bahasa Pemrograman	Tipe lisensi dari aplikasi (Open Source/Proprietary)
11	Bahasa Pemrograman	Bahasa pemrograman yang digunakan oleh aplikasi.
12	Kerangka Pengembangan	Kerangka atau Framework yang digunakan oleh aplikasi.
13	Basis Data	Basis data yang digunakan oleh aplikasi.

1.12.4 Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE Nasional

Pada table berikut ini dapat dilihat taksonomi referensi arsitektur aplikasi.

Tabel 0-30 Referensi Arsitektur Aplikasi Tingkat 1 dan 2.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Aplikasi Umum (01)		
01.01	Aplikasi Layanan Publik	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh IPPD untuk mendukung pelayanan publik.
01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh IPPD untuk mendukung administrasi pemerintahan.
Aplikasi Khusus (02)		
02.01	Aplikasi Misi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh IPPD tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan IPPD lain, untuk mendukung misi tertentu.
02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh IPPD tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi IPPD lain.

1.12.5 Model Aplikasi Kota Blitar

1.12.5.1 Pembangunan Aplikasi

Untuk mendukung Layanan SPBE, digunakan aplikasi SPBE. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. Secara umum aplikasi SPBE terbagi kedalam 2 (dua) jenis aplikasi yaitu:

1. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum dilakukan untuk mendukung Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
2. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan untuk mendukung Layanan fungsional yang bersifat spesifik pada

instansi pusat dan/atau pemerintah daerah dan sektor strategis lainnya.

Aplikasi umum dapat digunakan untuk mendukung proses bisnis instansi yang bersifat umum atau pendukung seperti berikut:

- a. Perencanaan;
- b. Penganggaran;
- c. Pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- d. Akuntabilitas kinerja;
- e. Pemantauan dan evaluasi;
- f. Kearsipan;
- g. Kepegawaian; dan
- h. Pengaduan pelayanan publik.

SPBE mengarahkan pada penggunaan dan pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai. Arahkan aplikasi umum berbagi pakai nasional dituangkan kedalam Arsitektur SPBE Nasional yang disusun dengan koordinasi oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Percepatan SPBE salah satu langkahnya dilakukan dengan membangun Aplikasi Umum berbagi pakai untuk memberikan Layanan SPBE. Aplikasi umum berbagi pakai dikembangkan untuk mendukung proses bisnis yang bersifat umum pada instansi pemerintahan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi Umum tersebut akan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Presiden mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mulai berlaku atau setelah tahun 2020. Terkait hal tersebut, maka setiap pimpinan Instansi Pusat dan Kepala Daerah harus mencegah dan/atau menghentikan pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum tersebut.

Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dijelaskan diatas, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
- b. Melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
- c. Melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
- d. Mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Untuk mendukung percepatan implementasi SPBE, maka diupayakan pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai oleh seluruh instansi pusat maupun pemerintah daerah di Republik Indonesia. Kegiatan percepatan implementasi aplikasi umum berbagi pakai sesuai dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Integrasi layanan, data dan aplikasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi;
- b. Integrasi layanan, data dan aplikasi Kepegawaian;
- c. Integrasi layanan, data dan aplikasi Kearsipan;
- d. Integrasi layanan, data dan aplikasi Pengaduan Publik.

1.12.5.2 Penggunaan Sistem Penghubung

Untuk integrasi aplikasi SPBE, Sesuai dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, digunakan sistem penghubung. Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dan melakukan integrasi Layanan SPBE. Sistem Penghubung Layanan pemerintah dapat menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal-kanal perangkat IoT. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah mensyaratkan adanya standar interoperabilitas, standar keamanan, dan akses melalui Jaringan Intra pemerintah.

1.12.6 Model Domain dan Referensi Arsitektur Aplikasi Kota Blitar

Tabel 0-31 Domain dan Referensi Arsitektur Aplikasi Kota Blitar

Na ma Apli kasi	Uraian Aplikasi	Fung si Aplik asi	→ Laya nan (Dep ende ncy)	→ Data yang digu nak an - RAD Leve l 3 (Dep ende ncy)	← Prose s Bisni s (Dep ende ncy)	Lua ran	← Inpu tan Data (Dep ende ncy)	→ Sup plier Data (Dep ende ncy)	→ Luar an Data (Dep ende ncy)	→ Cust omer Data (Dep ende ncy)	Bas is Ap lik asi	→ Per ang kat Ker as Ser ver	→ Sist em Pen ghu bung g Lay ana n	Tip e Lise nsi Apli kas i	Bah asa Pem rogr ama n	Kera ngka Peng emba ngan	N a m a Bas is Dat a	← Unit Pen gem ban g	→ Unit Ope rasional Tek nolo gi	→ RA A Le vel 1	→ RA A Le vel 2	→ Inst ansi (Dep ende ncy)
Apli kasi SP4 AN LAP OR!	Sistem Pengelol aan Pengadu an Pelayana n Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengadu an Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyam paian semua	untu k peny ampa ian semu a aspir asi dan peng adua n raky at secar a onlin e yang terint egras		RAD 09.0 3.05 Peng elola an Infor masi Publ ik						Pem erint ahan dan Mas yara kat	W eb Ba se d		Pro prie tary						Din as Ko mu nik asi dan Info rma tika Kot a Blit ar	RA L 01 Ap lik asi U m m	RA L 01 .0 1 Ap lik asi U m m La ya na n Pu bli k	

Na ma Apli kasi	Uraian Aplikasi	Fung si Aplik asi	→ Laya nan (Dep ende ncy)	→ Data yang digu nak an - RAD Leve l 3 (Dep ende ncy)	← Pros es Bisni s (Dep ende ncy)	Lua ran	← Inpu tan Data (Dep ende ncy)	→ Sup plier Data (Dep ende ncy)	→ Luar an Data (Dep ende ncy)	→ Cust omer Data (Dep ende ncy)	Ba sis Ap lik asi	→ Per ang kat Ker as Ser ver	→ Sist em Pen ghu bung g Lay ana n	Tip e Lise nsi Apli kas i	Bah asa Pem rogr ama n	Kera ngka Peng emba ngan	N a m a B as is D at a	← Unit Pen gem ban g	→ Unit Ope rasional Tek nolo gi	→ RA A Le vel 1	→ RA A Le vel 2	→ Inst ansi (Dep ende ncy)
	aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara Nasional dengan laman akses website www.lapor.go.id	i dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap Penyelenggara pelayanan publik																				
Ma kot	Aplikasi e-mail resmi	Menyediakan	RAL 02.0 9.04.	RAD 09.0 3.01	RAB 09.0 3.01.	cma il	emai l	Dina s Kom	emai l	Pem crint ahan	W cb Ba			Pro prie tary				Din as Kom	Din as Ko	RA L. 02	RA L. 02	

Na ma Apli kasi	Uraian Aplikasi	Fung si Aplik asi	→ Laya nan (Dep ende ncy)	→ Data yang digu nak an - RAD Leve l 3 (Dep ende ncy)	← Pros es Bisni s (Dep ende ncy)	Lua ran	← Inpu tan Data (Dep ende ncy)	→ Sup plier Data (Dep ende ncy) -	→ Luar an Data (Dep ende ncy) -	→ Cust omer Data (Dep ende ncy)	Ba sis Apli kasi	→ Per ang kat Ker as Ser ver	→ Sist em Pen ghu bung Lay ana n	Tip e Lise nsi Apli kas i	Bah asa Pem rogr ama n	Kera ngka Peng emba ngan	N a m a B as is D at a	← Unit Pen gem ban g	→ Unit Ope rasi onal Tek nolo gi	→ RA A Le vel 1	→ RA A Le vel 2	→ Inst ansi (Dep ende ncy)
am ail	Pemerint ah Kota Blitar	email peme rinta h kota Blitar	01 Laya nan Peng emba ngan dan Peng elolan Aplik asi	Peng elolan Infor mati ka	02 Pem bang una n Aplik asi Infor mati ka			unik asi dan Infor mati ka			se d							uni kasi dan Info rma tika	mu nik asi dan Info rma tika Kota Blitar	Ap lik asi Kh us us	.0 1 Ap lik asi Kh us us Mi si Ter te nt u	
Clo ud	Komput asi awan Pemerint ah Kota Blitar	Meny ediak an Kom puta si awan Peme rinta h Kota Blitar	RAL 02.0 9.04. 01 Laya nan Peng emba ngan dan Peng elolan	RAD 09.0 3.01 Peng elolan Infor mati ka	RAB 09.0 3.01. 02 Pem bang una n Aplik asi Infor	data yan g tersi mpa n pada clou d	file/ dok ume n yang diup load pada clou d	Dina s Kom unik asi dan Infor mati ka	Lapo ran Pem akai an Kap asita s Peny imp ana n	Pem erint ahan	W eb Ba se d			Pro pri etary			m yS Q L	Din as Kom uni kasi dan Info rma tika	Din as Ko mu nik asi dan Info rma tika Kota	RA L. 02 Ap lik asi Kh us us	RA L. 02 .0 1 Ap lik asi Kh us us Mi	

Na ma Apli kasi	Uraian Aplikasi	Fung si Aplik asi	→ Laya nan (Dep ende ncy)	→ Data yang digu nak an - RAD Leve l 3 (Dep ende ncy)	← Pros es Bisni s (Dep ende ncy)	Lua ran	← Inpu tan Data (Dep ende ncy)	→ Sup plier Data (Dep ende ncy)	→ Luar an Data (Dep ende ncy)	→ Cust omer Data (Dep ende ncy)	Bas is Ap lik asi	→ Per ang kat Ker as Ser ver	→ Sist em Pen ghu bung Lay ana n	Tip e Lisc ensi Apli kas i	Bah asa Pem rogr ama n	Kera ngka Peng emba ngan	N a m a Bas is Dat a	← Unit Pen gem ban g	→ Unit Ope rasional Tek nolo gi	→ RA A Le vel 1	→ RA A Le vel 2	→ Inst ansi (Dep ende ncy)
			an Aplik asi		matika				pada clou d										Blit ar			si Ter tent u
Sa mb at	SAMBAT ONLINE ini adalah sarana yang di sediakan untuk menjem batani sekaligu s memuda hkan warga kota khususn ya untuk melayan gkan	untu k menj emba tani sekal igus mem udah kan warg a kota khus usny a untu k mela yang kan	RAL 01.4 3.03. 02 Laya nan Peng adua n Publi k	RAD 09.0 3.05 Peng elola an Infor masi Publ ik	RAB 09.0 3.05. 001 Peng elola an Infor masi Publi k					Pem erint ahan dan Mas yara kat	W eb Ba se d		Pro prie tary	PHP	Code Ignit er	m yS QL	Din as Kom uni kasi dan Info rma tika	Din as Ko mu nik asi dan Info rma tika Kota Blit ar	RA L, 02 Ap lik asi Khu sus	RA L, 02 .0 1 Ap lik asi Khu sus Mi si Ter tent u		

[illegible]

Na ma Apli kasi	Uraian Aplikasi	Fung si Aplik asi	→ Laya nan (Dep ende ncy)	→ Data yang digu nak an - RAD Leve l 3 (Dep ende ncy)	← Pros es Bisni s (Dep ende ncy)	Lua ran	← Inpu tan Data (Dep ende ncy)	→ Sup plier Data (Dep ende ncy)	→ Luar an Data (Dep ende ncy)	→ Cust omer Data (Dep ende ncy)	Bas is Apli kasi	→ Per ang kat Ker as Ser ver	→ Sist em Pen ghu bung Lay ana n	Tip e Lise nsi Apli kas i	Bah asa Pem rogr ama n	Kera ngka Peng emba ngan	N a m a Bas is Dat a	← Unit Pen gem ban g	→ Unit Ope rasional Tek nolo gi	→ RA A Le vel 1	→ RA A Le vel 2	→ Inst ansi (Dep ende ncy)
Sat u Dat a	Sistem tata kelola data Pemda untuk mengha silkan data yang akurat, mutakhi r, terpadu, dan dapat dipertan ggungja wabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakai	Untu k meny ediak an data statis tik sektoral kota Blitar yang dapa t digu naka n seba gai baha n peru musa n kebij								Pem erint ahan dan Mas yarakat	W eb Ba se d			Pro pri etary	PHP	Lara vel	m yS QL	Din as Kom uni kasi dan Info rmatika	Din as Kom uni kasi dan Info rmatika Kota Blitar	RA L. 02 Ap lik asi Kh usus	RA L. 02 .0 1 Ap lik asi Kh usus Misi Ter tentu	

Na ma Apli kasi	Uraian Aplikasi	Fung si Aplik asi	→ Laya nan (Dep ende ncy)	→ Data yang digu nak an - RAD Leve l 3 (Dep ende ncy)	← Pros es Bisni s (Dep ende ncy)	Lua ran	← Inpu tan Data (Dep ende ncy)	→ Sup plier Data (Dep ende ncy) -	→ Luar an Data (Dep ende ncy) -	→ Cust omer Data (Dep ende ncy)	Ba sis Ap lik asi	→ Per ang kat Ker as Ser ver	→ Sist em Pen ghu bung g Lay ana n	Tip e Lise nsi Apli kas i	Bah asa Pem rogr ama n	Kera ngka Peng emban gan	N a m a B as is D at a	← Unit Pen gem ban g	→ Unit Ope rasi onal Tek nolo gi	→ RA A Le vel 1	→ RA A Le vel 2	→ Inst ansi (Dep ende ncy)
		akan dan seba gai infor masi yang dapa t diseb artua skan ke masy arak at melal ui Porta l Blitar Satu Data																				
Sur adi	Aplikasi Persurat an	Pemb uata n	RAL. 02.0 9.04.	RAD 09.0 3.01		Pen gars ipan	File Sura t	Selu ruh OPD	Data Pers urat	Selu ruh OPD	W eb Ba		API (TT E)	Pro prie tary	PHP (Cod e	Code Ignit er	m yS	Din as Kom	Din as Ko	RA L. 02	RA L. 02	Dina s Kom

Na ma Apli kasi	Uraian Aplikasi	Fung si Aplik asi	→ Laya nan (Dep ende ncy)	→ Data yang digu nak an - RAD Leve l 3 (Dep ende ncy)	← Pros es Bisni s (Dep ende ncy)	Lua ran	← Inpu tan Data (Dep ende ncy)	→ Sup plier Data (Dep ende ncy)	→ Luar an Data (Dep ende ncy)	→ Cust omer Data (Dep ende ncy)	Bas is Ap lik asi	→ Per ang kat Ker as Ser ver	→ Sist em Pen ghu bung Lay ana n	Tip e Lise nsi Apli kas i	Bah asa Pem rogr ama n	Kera ngka Peng emba ngan	N a m a B as is D at a	← Unit Pen gem ban g	→ Unit Ope rasional Tek nolo gi	→ RA A Le vel 1	→ RA A Le vel 2	→ Inst ansi (Dep ende ncy)
	Digital Kota Blitar	dan pengi rima n surat antar insta nsi peme rinta h kota Blitar	01 Laya nan Peng emba ngan dan Peng elolan Aplik asi	Peng elolan Infor mati ka		Sur at		, Kelu raha n, Pus kes mas	an Pem erita h Kota Blita r	, Kelu raha n, Pusk esm as	se d				Ignit er)		Q L	uni kasi dan Info rma tika	mu nik asi dan Info rma tika Kota Blita r	Ap lik asi Kh us us Mi si Te rte nt u	.0 1 Ap lik asi Kh us us Mi si	unik asi dan Infor mati ka Kota Blita r
Med ia cent er				RAD 09.0 3.05 Peng elolan Infor masi Publ ik	RAB 09.0 3.05. 001 Peng elolan Infor masi Publi k					Mas yara kat	W eb Ba se d			Pro prie tary	Wor dpre ss			Din as Kom uni kasi dan Info rma tika	Din as Ko mu nik asi dan Info rma tika Kota a	RA L. 02 Ap lik asi Kh us us	RA L. 02 .0 1 Ap lik asi Kh us us Mi	

Na ma Apli kasi	Uraian Aplikasi	Fung si Aplik asi	→ Laya nan (Dep ende ncy)	→ Data yang digu nak an - RAD Leve l 3 (Dep ende ncy)	← Pros es Bisni s (Dep ende ncy)	Lua ran	← Inpu tan Data (Dep ende ncy)	→ Sup plier Data (Dep ende ncy)	→ Luar an Data (Dep ende ncy)	→ Cust omer Data (Dep ende ncy)	Bas is Ap lik asi	→ Per ang kat Ker as Ser ver	→ Sist em Pen ghu bun g Lay ana n	Tip e Lise nsi Apli kas i	Bah asa Pem rogr ama n	Kera ngka Peng emba ngan	N a m a Bas is Dat a	← Unit Pen gem ban g	→ Unit Ope rasional Tek nolo gi	→ RA A Le vel 1	→ RA A Le vel 2	→ Inst ansi (Dep ende ncy)
We b pem kot				RAD 09.0 3.05 Peng elola an Infor masi Publi k	RAB 09.0 3.05. 001 Peng elola an Infor masi Publi k, RAB 09.0 3.01. 02 Pem bang una n Aplik asi					Mas yara kat Web Bas ed			Pro prie tary	Wor dpre ss			Din as Kom uni kasi dan Info rma tika	Blit ar Din as Ko mu nik asi dan Info rma tika Kota Blit ar		RA L. 02 Ap lik asi Kh us us	si Te rte nt u RA L. 02 .0 1 Ap lik asi Kh us us Mi si Te rte nt u	

Na ma Apli kasi	Uraian Aplikasi	Fung si Aplik asi	→ Laya nan (Dep ende ncy)	→ Data yang digu nak an - RAD Leve l 3 (Dep ende ncy)	← Pros es Bisni s (Dep ende ncy)	Lua ran	← Inpu tan Data (Dep ende ncy)	→ Sup plier Data (Dep ende ncy) -	→ Luar an Data (Dep ende ncy) -	→ Cust omer Data (Dep ende ncy)	Ba sis Apli kasi	→ Per ang kat Ker as Ser ver	→ Sist em Pen ghu bung Lay ana n	Tip e Lise nsi Apli kasi	Bah asa Pem rogr ama n	Kera ngka Peng emba ngan	N a m a B as is D at a	← Unit Pen gem ban g	→ Unit Ope rasi onal Tek nolo gi	→ RA A Le vel 1	→ RA A Le vel 2	→ Inst ansi (Dep ende ncy)
					Infor mati ka																	
CC TV	Aplikasi yang menamp ilkan peta cctv Kota Blitar dan rekaman cctv Kota Blitar yang dapat diakses secara realtime oleh Masyara kat	Mem berik an infor masi terka it CCT V yang ada di Kota Blitar	RAL 01.4 3.03. 01 Laya nan infor masi publi k	RAD 09.0 3.05 Peng elola an Infor masi Publ ik	RAB 09.0 3.01. 02 Pem bang una n Aplik asi Infor mati ka	Rek ama n CCT V	Rek ama n CCT V	CCT V (Har dwa re)	Rek ama n CCT V	Mas yara kat	W eb Ba se d			Pro pri etary	PHP	Code Ignit er	m yS Q L	Din as Kom uni kasi dan Info rma tika	Din as Ko mu nik asi dan Info rma tika Kota Blit ar	RA L. 02 Ap lik asi Kh us us	RA L. 02 .0 1 Ap lik asi Kh us us Mi si Ter te nt u	

Na ma Apli kasi	Uraian Aplikasi	Fung si Aplik asi	→ Laya nan (Dep ende ncy)	→ Data yang digu nak an - RAD Leve l 3 (Dep ende ncy)	← Pros es Bisni s (Dep ende ncy)	Lua ran	← Inpu tan Data (Dep ende ncy)	→ Sup plier Data (Dep ende ncy) -	→ Luar an Data (Dep ende ncy) -	→ Cust omer Data (Dep ende ncy)	Ba sis Ap lik asi	→ Per ang kat Ker as Ser ver	→ Sist em Pen ghu bung Lay ana n	Tip e Lise nsi Apli kas i	Bah asa Pem rogr ama n	Kera ngka Peng emba ngan	N a m a B as is D at a	← Unit Pen gem ban g	→ Unit Ope rasional Tek nolo gi	→ RA A Le vel 1	→ RA A Le vel 2	→ Inst ansi (Dep ende ncy)
Sm artc ity	Portal Aplikasi Pemerint ah Kota Blitar	Mem perm udah penc arian lama n/ap likasi Peme rinta h Kota Blitar	RAL. 02.0 9.04. 01 Laya nan Peng emba ngan dan Peng elola an Aplik asi	RAD 09.0 3.05 Peng elola an Infor masi Publ ik	RAB 09.0 3.01. 02 Pem bang una n Aplik asi Infor mati ka	Port al apli kasi	aplik asi	OPD Pemi lik Apli kasi	Port al Apli kasi Pem erint ah Kota Blita r	Mas yara kat	W eb Ba se d			Pro pri etary	PHP	Code Ignit er	m yS Q L	Din as Kom uni kasi dan Info rma tika	Din as Ko mu nik asi dan Info rma tika Kot a Blit ar	RA L. 02 Ap lik asi Kh us us	RA L. 02 .0 1 Ap lik asi Kh us us Mi si Ter te nt u	
Das hbo ard	Sistem informasi terintegrasi dengan beberapa aplikasi OPD di	Lapo ran pada Wali kota terka it kiner ja	RAL. 02.0 9.04. 01 Laya nan Peng emba ngan	RAD 09.0 3.01 Peng elola an Infor mati ka	RAB 09.0 3.01. 02 Pem bang una n Aplik	Lap ora n Lay ana n Pera ngkat	Data Laya nan Pera ngkat Daer ah	Pera ngkat Daer ah	Lapo ran Real Time Terk ait Laya nan pada	Wali kota	W eb Ba se d			Pro pri etary	PHP	Code Ignit er	m yS Q L	Din as Kom uni kasi dan Info rma tika	Din as Ko mu nik asi dan Info rma	RA L. 02 Ap lik asi Kh us us	RA L. 02 .0 1 Ap lik asi Kh	

Na ma Apli kasi	Uraian Aplikasi	Fung si Aplik asi	→ Laya nan (Dep ende ncy)	→ Data yang digu nak an - RAD Leve l 3 (Dep ende ncy)	← Pros es Bisni s (Dep ende ncy)	Lua ran	← Inpu tan Data (Dep ende ncy)	→ Sup plier Data (Dep ende ncy)	→ Luar an Data (Dep ende ncy)	→ Cust omer Data (Dep ende ncy)	Bas is Ap lik asi	→ Per ang kat Ker as Ser ver	→ Sist em Pen ghu bung g Lay ana n	Tip e Lise nsi Apli kas i	Bah asa Pem rogr ama n	Kera ngka Peng emba ngan	N a m a B as is D at a	← Unit Pen gem ban g	→ Unit Ope rasional Tek nolo gi	→ RA A Le vel 1	→ RA A Le vel 2	→ Inst ansi (Dep ende ncy)
	Kota Blitar menggu nakan data visualisa si	Pera ngka t Daer ah	dan Peng elola an Aplik asi		asi Infor mati ka	Dae rah ber upa grafi k			Pera ngka t Daer ah										tika Kot a Blit ar			us us Mi si Ter tent u
Pote nsi Des a	Potensi Kelurah an adalah aplikasi pendata an yang dikhusu kan untuk keluraha n mengen ai gambara n menyelu ruh	Mem berik an infor masi terka it gamb aran meny eluru h tentan g kara kter kelur ahan								Pem erint ahan	W eb Ba se d			Pro prie tary	PHP	Lara vel	m yS Q L	Din as Kom uni kasi dan Info rma tika	Din as Kom uni kasi dan Info rma tika Kot a Blit ar	RA L. 02 Ap lik asi Kh us us	RA L. 02 .0 1 Ap lik asi Kh us us Mi si Ter tent u	

[illegible]

Na ma Apli kasi	Uraian Aplikasi	Fung si Aplik asi	→ Laya nan (Dep ende ncy)	→ Data yang digu nak an - RAD Leve l 3 (Dep ende ncy)	← Pros es Bisni s (Dep ende ncy)	Lua ran	← Inpu tan Data (Dep ende ncy)	→ Sup plier Data (Dep ende ncy)	→ Luar an Data (Dep ende ncy)	→ Cust omer Data (Dep ende ncy)	Ba sis Ap lik asi	→ Per ang kat Ker as Ser ver	→ Sist em Pen ghu bun g Lay ana n	Tip e Lise nsi Apli kas i	Bah asa Pem rogr ama n	Kera ngka Peng emba ngan	N a m a B as is D at a	← Unit Pen gem ban g	→ Unit Ope rasi onal Tek nolo gi	→ RA A Le vel 1	→ RA A Le vel 2	→ Inst ansi (Dep ende ncy)
Apli kasi CET TAR	i di Kelurah an									Pem erint ahan dan Mas yara kat	W eb Ba se d			Pro prie tary					Din as Ko mu nik asi dan Info rma tika Kota Blit ar	RA L. 02 Ap lik asi Kh us us	RA L. 02 .0 1 Ap lik asi Kh us us Mi si Te rte nt u	

Na ma Apli kasi	Uraian Aplikasi	Fung si Aplik asi	→ Laya nan (Dep ende ncy)	→ Data yang digu nak an - RAD Leve l 3 (Dep ende ncy)	← Pros es Bisni s (Dep ende ncy)	Lua ran	← Inpu tan Data (Dep ende ncy)	→ Sup plier Data (Dep ende ncy) -	→ Luar an Data (Dep ende ncy) -	→ Cust omer Data (Dep ende ncy)	Ba sis Ap lik asi	→ Per ang kat Ker as Ser ver	→ Sist em Pen ghu bung Lay ana n	Tip e Lise nsi Apli kas i	Bah asa Pem rogr ama n	Kera ngka Peng emba ngan	N a m a B as is D at a	← Unit Pen gem ban g	→ Unit Ope rasi onal Tek nolo gi	→ RA A Le vel 1	→ RA A Le vel 2	→ Inst ansi (Dep ende ncy)
112 NC C	Aplikasi dekstop penerima an panggilan darurat 112	Mene rima pang gilan darur at 112	RAL 01.4 3.03. 02 Laya nan Peng adua n Publi k	RAD 09.0 3.05 Peng clola an Infor masi Publi k	RAB 09.0 3.01. 02 Pem bang una n Aplik asi Infor mati ka	Pen gad uan Dar urat	Peng adu an Dar urat	Mas yara kat	Lapo ran Peng adu an Dar urat	Pem erint ahan dan Mas yara kat	De sk top	Ser ver Afa za		Pro prie tary				Din as Kom uni kasi dan Info rma tika	Din as Ko mu nik asi dan Info rma tika Kot a Blit ar	RA L. 02 Ap lik asi Kh us us	RA L 02 .0 2 Ap lik asi Kh us us Fu ng si Ter te nt u	
112 WE BSI TE	Aplikasi pengadu an darurat yang terintegr asi dengan	Mena mpil kan lapor an peng adua n	RAL 01.4 3.03. 02 Laya nan Peng adua n	RAD 09.0 3.05 Peng clola an Infor masi	RAB 09.0 3.01. 02 Pem bang una n	Pen gad uan Dar urat	Peng adu an Dar urat	Mas yara kat	Lapo ran Peng adu an Dar urat	Mas yara kat	W eb Ba se d			Pro prie tary			m yS Q L	Din as Kom uni kasi dan Info	Din as Ko mu nik asi dan Info	RA L. 02 Ap lik asi Kh	RA L 02 .0 2 Ap lik asi	

Na ma Apli kasi	Uraian Aplikasi	Fung si Aplik asi	→ Laya nan (Dep ende ncy)	→ Data yang digu nak an - RAD Leve l 3 (Dep ende ncy)	← Pros es Bisni s (Dep ende ncy)	Lua ran	← Inpu tan Data (Dep ende ncy)	→ Sup plier Data (Dep ende ncy) -	→ Luar an Data (Dep ende ncy) -	→ Cust omer Data (Dep ende ncy)	Ba sis Ap lik asi	→ Per ang kat Ker as Ser ver	→ Sist em Pen ghu bun g Lay ana n	Tip e Lisc ensi Apli kas i	Bah asa Pem rogr ama n	Kera ngka Peng emba ngan	N a m a B as is D at a	← Unit Pen gem ban g	→ Unit Ope rasi onal Tek nolo gi	→ RA A Le vel 1	→ RA A Le vel 2	→ Inst ansi (Dep ende ncy)
	layanan darurat 112	daru rat dan menf asilit asi peng adua n daru rat melal ui websi te	n Publi k	Publ ik	Aplik asi Infor mati ka													rma tika	rma tika Kot a Blit ar	us us	Kh us us Fu ng si Te rte nt u	

1.13Arsitektur Infrastruktur

Arsitektur infrastruktur SPBE nasional, memastikan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE nasional dilakukan secara berbagi pakai dan efisien, terhubung dengan infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan memerhatikan faktor sebagai berikut:

1. pusat komputasi dan data terpusat;
2. kapasitas besar untuk komputasi dan penyimpanan;
3. penggunaan teknologi virtualisasi;
4. pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi (*hardware/ software/ netware*) secara optimal;
5. kendali yang terpusat dan kolaborasi operasional;
6. dukungan terkait media jaringan yang beragam;
7. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pemakai; dan
8. kerangka infrastruktur dan aplikasi pemerintah.

Kerangka kerja arsitektur infrastruktur SPBE terdiri atas referensi arsitektur SPBE dan domain arsitektur infrastruktur SPBE.

1.13.1 Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur

Dalam domain arsitektur infrastruktur SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya substansi infrastruktur SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur infrastruktur SPBE berupa 3 (tiga) tingkat, yaitu:

- a. domain infrastruktur, yang mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain infrastruktur sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. area infrastruktur, yang menjelaskan area infrastruktur sesuai dengan domain infrastruktur dalam mendukung pengelolaan aplikasi serta data dan informasi, dikelompokkan ke dalam area infrastruktur sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional; dan
- c. kategori infrastruktur, yang menjelaskan lebih rinci dari area infrastruktur, sebagai tingkat 3 (ketiga), yang menjadi struktur di tingkat nasional.

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah akan memetakan kebutuhan infrastruktur dalam membangun dan mengelola aplikasi sesuai dengan domain arsitektur aplikasi SPBE serta memetakan data dan informasi sesuai dengan domain data dan informasi, sehingga dapat memantau dan mengevaluasi pemerataan infrastruktur SPBE nasional yang diperlukan. Pelaksanaan pemetaan ini akan dijelaskan dalam pedoman penyusunan Arsitektur SPBE. Ilustrasi struktur referensi arsitektur infrastruktur SPBE dapat terlihat pada gambar berikut.



Gambar 0-10 Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

1.13.2 Peta Relasi dan Keterkaitan Antar Domain

Domain infrastruktur SPBE akan memetakan semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya, yang digunakan untuk menghasilkan layanan. Penyusunan referensi arsitektur pada domain infrastruktur SPBE bertujuan untuk memberikan dasar dalam mengklasifikasikan teknologi infrastruktur SPBE yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Referensi ini digunakan sebagai acuan dalam pemetaan infrastruktur SPBE yang digunakan saat ini dan yang direncanakan ke dalam domain arsitektur infrastruktur SPBE. Informasi ini diperlukan dalam mengidentifikasi infrastruktur SPBE yang dapat digunakan secara berbagi pakai dan mempermudah dalam melakukan konsolidasi dan utilisasinya, agar infrastruktur SPBE dapat dipergunakan secara terpadu serta efektif dan efisien. Dalam hal ketersediaan ini belum tercapai, maka digunakan infrastruktur yang ada, yang dikoordinasikan dalam domain infrastruktur SPBE.

Penyusunan Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE dilakukan dengan memerhatikan faktor sebagai berikut:

- harus mudah beradaptasi dengan kebutuhan masa depan, dan mengakomodasi teknologi baru ;
- didefinisikan sebagai hirarki elemen infrastruktur SPBE;
- dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
- memfasilitasi layanan dan interoperabilitas bersama;
- berbasis standar umum (open standard); dan
- dapat digunakan untuk mendukung domain aplikasi SPBE serta domain data dan informasi melalui hubungan yang terindikasi dan didukung oleh domain keamanan SPBE, maka dapat terlihat relasi langsung pada domain infrastruktur SPBE pada gambar berikut.



Gambar 0-11 Relasi Langsung pada Domain Infrastruktur SPBE

Referensi dari struktur pada domain infrastruktur SPBE berlaku secara nasional, sehingga Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan bahasa yang sama dalam mendefinisikan infrastruktur SPBE yang dimiliki. Dengan demikian dapat dilakukan pemerataan infrastruktur SPBE yang menjadi prioritas agenda pembangunan.

1.13.3 Atribut Metadata Arsitektur Infrastruktur

1.13.3.1 Atribut Metadata Komputasi Awan

Pada table berikut ini dapat dilihat atribut metadata komputasi awan.

Tabel 0-32 Atribut Metadata Komputasi Awan

No	Nama Atribut	Keterangan
1	Nama Government cloud	Nama Government cloud yang digunakan
2	Deskripsi Government cloud	Penjelasan dari Government cloud yang digunakan
3	Tipe Government cloud	Jenis dari Government cloud yang digunakan (PaaS, IaaS, dan SaaS)
4	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari Government cloud yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)
5	Nama Pemilik	Nama pemilik Government cloud yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
6	Biaya Layanan	Biaya yang dikeluarkan pemilik untuk layanan Government cloud
7	Unit Pengelola Government cloud	Unit pengelola Government cloud yang digunakan
8	Jangka Waktu Pelayanan	Periode penggunaan layanan Government cloud

1.13.3.2 Atribut Metadata Perangkat Lunak Platform

Pada table berikut ini dapat dilihat atribut metadata perangkat lunak platform.

Tabel 0-33 Atribut Metadata Perangkat Lunak Platform

No	Nama Atribut	Keterangan
1	Nama Perangkat Lunak	Nama Perangkat Lunak yang digunakan
2	Deskripsi Perangkat Lunak	Penjelasan dari Perangkat Lunak yang digunakan
3	Tipe Perangkat Lunak	Jenis dari Perangkat Lunak yang digunakan (Sistem Operasi, Sistem Utilitas, atau Sistem Database)
4	Jenis Sistem Operasi (jika pilihan adalah 1 pada No. 3)	(Dos, Unix, MacOS, Windows, Networking OS, atau Lainnya)
5	Jenis Sistem Utilitas (jika pilihan adalah 2 pada No. 3)	
6	Jenis Sistem Database (jika pilihan adalah 3)	

No	Nama Atribut	Keterangan
	pada No. 3)	
7	Jenis lisensi	Jenis Lisensi Perangkat Lunak yang digunakan (Lisensi Seumur Hidup, Lisensi Periodik, atau Kode Sumber Terbuka)
8	Nama Pemilik Lisensi	Nama pemilik dari lisensi perangkat lunak
9	Validitas Lisensi Perangkat Lunak	Penjelasan validitas dari lisensi perangkat lunak yang digunakan

1.13.3.3 Atribut Metadata Perangkat Keras Server/Pusat Data

Pada table berikut ini dapat dilihat atribut metadata perangkat keras server.

Tabel 0-34 Atribut Metadata Perangkat Keras Server

No	Nama Atribut	Keterangan
1	Nama Server	Nama dari perangkat server yang digunakan.
2	Deskripsi Server	Berisi deskripsi dari perangkat server yang digunakan.
3	Jenis Penggunaan Server	Jenis penggunaan dari server yang digunakan, jenis penggunaan tersebut berupa (Web Server; Mail Server; Aplikasi; Database ; File Server; atau Active Directory
4	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari server yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)
5	Nama Pemilik	Nama pemilik server yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
6	Unit Pengelola Server	Unit pengelola server yang digunakan
7	Lokasi Perangkat Keras Server	Lokasi dari perangkat server yang digunakan, pilihan lokasi didapat dari metadata fasilitas.
8	Perangkat Lunak yang Digunakan	Perangkat lunak yang digunakan oleh server, pilihan perangkat lunak didapat dari metadata perangkat lunak.
9	Kapasitas Memori	Kapasitas memori atau Random Access Memory (RAM) yang digunakan oleh server, satuan kapasitas memori dalam GigaByte (GB).
10	Jenis Teknologi Prosesor	Jenis teknologi prosesor yang digunakan oleh server, berupa: High End Mid End

No	Nama Atribut	Keterangan
		Low End
11	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Jumlah kapasitas penyimpanan pada server, satuan kapasitas penyimpanan dalam Gigabyte (GB).
12	Teknik Penyimpanan	Teknik penyimpanan yang digunakan pada server (RAID 1, RAID 3, RAID 5, atau non-RAID)

1.13.3.4 Atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan

Pada table berikut ini dapat dilihat atribut metadata perangkat keras media penyimpanan.

Tabel 0-35 Atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan

No.	Nama Atribut	Keterangan
1	Nama Data Storage	Nama dari data storage yang digunakan
2	Deskripsi Data Storage	Berisi deskripsi dari data storage yang digunakan.
3	Data yang Digunakan	Data yang disimpan pada media penyimpanan data, pilihan data yang digunakan didapat dari metadata data.
4	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari data storage yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)
5	Nama Pemilik	Nama pemilik data storage yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
6	Unit Pengelola Data Storage	Unit pengelola data storage yang digunakan.
7	Lokasi Data Storage	Lokasi dari data storage yang digunakan, pilihan lokasi didapat dari metadata fasilitas.
8	Perangkat Lunak yang Digunakan	Perangkat lunak yang digunakan oleh data storage, pilihan perangkat lunak didapat dari metadata perangkat lunak.
9	Kapasitas Penyimpanan	Jumlah kapasitas penyimpanan pada data storage, satuan kapasitas penyimpanan dalam Gigabyte (GB).
10	Metode Akses Data Sharing	Metode akses data sharing yang digunakan pada data storage (<i>Direct Attached Storage/DAS</i> atau <i>Network Attached Storage/NAS</i>)

1.13.3.5 Atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pada table berikut ini dapat dilihat atribut metadata system penghubung layanan pemerintah.

Tabel 0-36 Atribut Metadata Sistem Pnenghubung Layanan Pemerintah

No	Nama Atribut	Keterangan
1	Nama Sistem Penghubung	Nama sistem penghubung yang digunakan atau dimiliki.
2	Deskripsi Sistem Penghubung	Berisi deskripsi dari sistem penghubung yang digunakan.
3	Jenis Sistem Penghubung	Jenis sistem penghubung yang digunakan (Sistem penghubung pemerintah / Sistem penghubung non pemerintah)
4	Kepemilikan	Status kepemilikan dari sistem penghubung yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)
5	Nama Pemilik	Nama pemilik data storage yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
6	Nama Jaringan Intra yang Digunakan	Nama jaringan intra yang digunakan oleh sistem penghubung, pilihan jaringan intra didapat dari metadata jaringan intra.
7	Aplikasi yang Dihubungkan	Aplikasi yang dihubungkan oleh sistem penghubung, pilihan aplikasi didapat dari metadata aplikasi.

1.13.3.6 Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah

Pada table berikut ini dapat dilihat atribut metadata jaringan intra pemerintah.

Tabel 0-37 Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah

No	Nama Atribut	Keterangan
1	Nama Jaringan	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Deskripsi Jaringan	Merupakan penjelasan dari jaringan
3	Jenis Jaringan	Merupakan jenis jaringan yang digunakan
4	Kepemilikan	Merupakan pemilik dari jaringan
5	Nama Pemilik	Merupakan nama dari pemilik jaringan
6	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Merupakan unit kerja/perangkat daerah pengelola jaringan
7	Bandwidth	Merupakan jumlah bandwidth yang tersedia
8	Tipe Media Jaringan	Merupakan tipe dari media jaringan
9	Media Lainnya	Merupakan tipe dari media jaringan

1.13.3.7 Atribut Metadata Perangkat Keras Jaringan

Pada table berikut ini dapat dilihat atribut metadata perangkat keras jaringan.

Tabel 0-38 Atribut Metadata Perangkat Keras Jaringan

No	Nama Atribut	Keterangan
1	Nama <i>Network/Communication Device</i>	Nama Network/Communication Device yang digunakan
2	Deskripsi <i>Network/Communication Device</i>	Penjelasan dari Network/Communication Device yang digunakan
3	Tipe <i>Network/Communication Device</i>	Jenis dari Network/Communication Device yang digunakan (Switch L2, Switch L3, Switch L4, Switch L7, Multilayer Switch, Router, Wireless equipment, atau Transmission equipment)
4	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari Network/Communication Device yang digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)
5	Nama Pemilik	Nama pemilik Network/ Communication Device yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
6	Unit Pengelola <i>Network/Communication Device</i>	Unit pengelola Network/ Communication Device yang digunakan

1.13.3.8 Atribut Metadata Fasilitas Komputasi

Pada table berikut ini dapat dilihat atribut metadata fasilitas komputasi.

Tabel 0-39 Atribut Metadata Fasilitas Komputasi

No	Nama Atribut	Keterangan
1	Nama Fasilitas	Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2	Kode Model Referensi SPBE	Merupakan kode model referensi SPBE sesuai dengan fasilitas yang dipilih
3	Bandwidth Intranet	Merupakan jumlah bandwidth internet yang tersedia selama 1 tahun
4	Bandwidth Internet	Merupakan jumlah bandwidth internet yang tersedia selama 1 tahun
5	Lokasi	Merupakan lokasi dari fasilitas

No	Nama Atribut	Keterangan
6	Kepemilikan	Merupakan unit pemilik dari fasilitas
7	Unit Kerja Penanggung jawab	Merupakan unit kerja/perangkat daerah yang bertanggung jawab atas fasilitas
8	Klasifikasi Tier Fasilitas	Merupakan klasifikasi tier fasilitas
9	Sistem Pengamanan Fasilitas	Merupakan tipe pengamanan fasilitas

1.13.3.9 Atribut Metadata Perangkat Keras Periferal

Pada table berikut ini dapat dilihat atribut metadata perangkat keras periferal.

Tabel 0-40 Atribut Metadata Perangkat Keras Periferal

No	Nama Atribut	Keterangan
1	Nama Periferal	Nama Periferal yang digunakan
2	Deskripsi Periferal	Penjelasan dari Periferal yang digunakan
3	Tipe Periferal	Jenis dari Periferal yang digunakan (Input, Output, Input/Output)
4	Lokasi penempatan Periferal	(mengacu pada meta data fasilitas)
5	Unit Pengelola <i>Network/Communication Device</i>	Unit pengelola Periferal yang digunakan

1.13.3.10 Atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan

Pada table berikut ini dapat dilihat atribut metadata perangkat keras keamanan.

Tabel 0-41 Atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan SPBE

No	Nama Atribut	Keterangan
1	Nama <i>Security Device</i>	Nama dari Security Device yang digunakan
2	Deskripsi <i>Security Device</i>	Penjelasan dari Security Device yang digunakan
3	Tipe <i>Security Device</i>	Jenis dari security device yang digunakan (Firewall, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, Proxy, Load Balancer, Wireless intrusion prevention and detection system, Unified Threat Management, atau Network Access Control)
4	Status Kepemilikan	Status kepemilikan dari Security Device yang

No	Nama Atribut	Keterangan
		digunakan (Milik Sendiri; Milik Instansi Pemerintah Lain; Milik BUMN; atau Milik Pihak Ketiga)
5	Nama Pemilik	Nama pemilik Security Device yang digunakan, diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.
6	Unit Pengelola Security Device	Unit pengelola Security Device yang digunakan

1.13.4 Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE Nasional

Pada table berikut ini dapat dilihat taksonomi referensi arsitektur infrastruktur.

Tabel 0-42 Referensi Arsitektur Infrastruktur Tingkat 1 dan 2

Ko de	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Fasilitas Komputasi (01)		
01.01	Pusat Data Nasional	Fasilitas yang digunakan keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data
01.02	Pusat Komputasi	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu
01.03	Pusat Kendali	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkungan sistem
Sistem Integrasi (02)		
02.01	Jaringan Intra Pemerintah	Jaringan tertutup yang menghubungkan antara subsistem atau simpul jaringan dalam satu sistem/organisasi
02.02	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem layanan komunikasi untuk interaksi antar aplikasi dalam pertukaran data maupun layanan
Platform (03)		
03.01	Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan lingkungan kerja yang mendukung aplikasi
03.02	Komputasi Awan	Lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan platform berdasarkan teknologi cloud untuk lingkungan kerja aplikasi

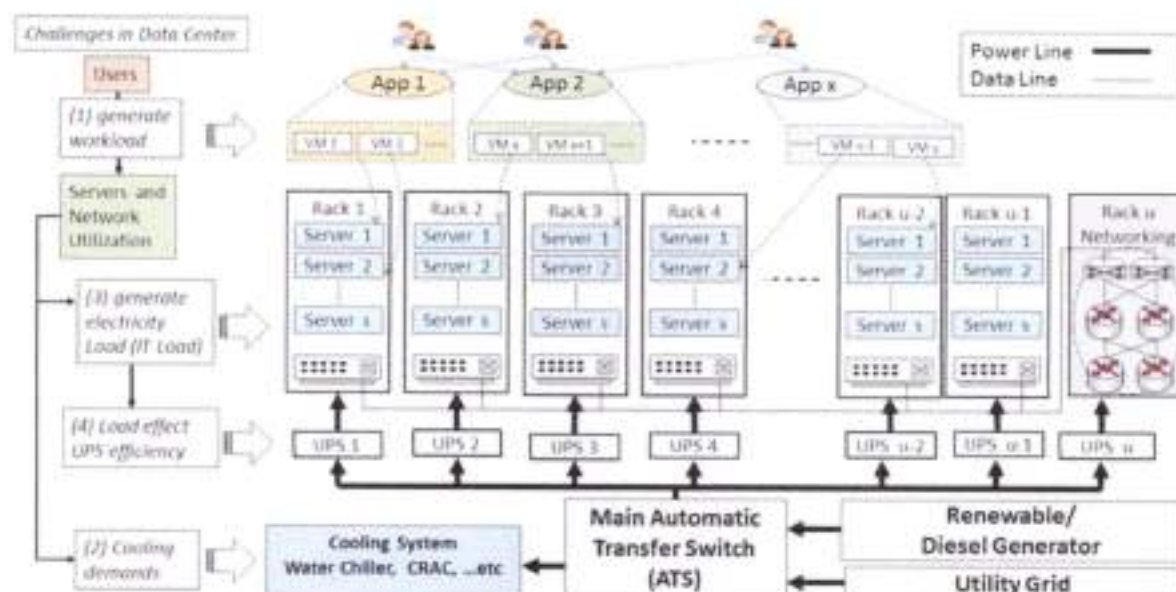
1.13.5 Infrastruktur Kota Blitar

1.13.5.1 Pusat Data

SPBE membutuhkan pusat data yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan

penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data. Baik Smart City maupun SPBE termasuk dalam kategori sistem elektronik strategis dan tinggi sehingga diperlukan jaminan sistem dengan asas resiko yang menganut prinsip keamanan informasi yaitu kerahasiaan, integritas dan ketersediaan.

Pengadaan Pusat data harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu ke standar nasional dan internasional baik secara desain, kualitas infrastruktur pusat data dan sistem manajemen keamanan informasi. Disain infrastruktur Data Centre yang ideal dijelaskan pada gambar berikut.



Gambar 0-12 Gambar Desain Arsitektur Pusat Data yang ideal

Pengembangan data center Blitar terdiri dari:

1. Pengadaan peralatan untuk pengembangan Data Centre seperti core router, layer 3 switch, server virtualisasi, load balancing server, dll.
2. Pendirian Network Operating Centre (NOC)
3. Penerapan Virtual Private Network
4. Penerapan keamanan menggunakan Demilitarized Zone (DMZ) menggunakan firewall ganda (internal dan eksternal) serta intrusion detection system.
5. Sertifikasi Keamanan Informasi SNI 27001:2009 atau sejenisnya.
6. Pengembangan Disaster Recovery Plan (DRP) dan menerapkan manajemen resiko di lingkungan data center untuk mengantisipasi bencana alam
7. Penerapan strategi backup and recovery plan
8. Penyediaan layanan data terbuka dan berbagi data (interoperabilitas)
9. Penambahan petugas piket untuk pemantauan 24 jam.
10. Mengaktifkan sistem fire suppression yang komprehensif di data center untuk mencegah terjadinya api atau menanggulangi api yang sudah terlanjur muncul
11. Mengimplementasikan aspek umum keamanan informasi berdasarkan standar kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity) dan ketersediaan (availability).

Untuk operasional pusat data, harus tersedia dokumen sbb.:

1. Log/rekaman/catatan pengoperasian pusat data;
2. Terdapat SOP di tingkat Pemerintah daerah yang telah ditetapkan dan secara aktif digunakan sebagai panduan dalam pengoperasian pusat data;
3. sertifikasi pusat data yang memenuhi standar UTI:TST atau ANSI/TIA-942

Apabila pusat data bersama menggunakan jasa penyedia pusat data, dibutuhkan dokumen kontrak sewa dan bukti sertifikasi pusat data.

1.13.5.2 Pusat Pemulihan Bencana

Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menggantikan dan/atau memulihkan kembali akses data, aplikasi, informasi dan perangkat keras yang diperlukan pada saat terjadinya gangguan dan/atau bencana.

1.13.5.3 Server dan Hardware

Untuk penerapan SPBE, Pemkot Blitar perlu menyediakan berbagai layanan server antara lain :

1. Mengoptimalkan konsep high availability pada perangkat server (power supply, harddisk, RAM dan kipas) dan sistem server (sistem virtual, clustering and replication, RAID dan sebagainya).
2. Mengoptimalkan keamanan pada layanan server (username, password, antivirus dan pembaharuan sistem operasi, firewall, ports, monitoring system, auto lock, secure applications pada server dan sebagainya)
3. Mengoptimalkan fungsi rackmount dan pengaturan suhu dingin pada penempatan server.
4. Mengelola DNS Server, Web Server, Mail Server, Proxy Server, dll yang dilindungi secara ketat oleh firewall, IDS dan perangkat keamanan lainnya.
5. Penyediaan Database Server yang handal untuk menyimpan berbagai aplikasi Smart City maupun SPBE. Database Server berfungsi untuk menyimpan data pokok, data transaksi, data analisis dan pelaporan semua aplikasi penunjang Smart City maupun SPBE
6. Penyediaan layanan Single Sign-on (SSN) untuk proses autentikasi yaitu teknologi yang memungkinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
7. Penyediaan layanan Virtual Private Network (VPN) agar para pegawai Pemkot dapat mengakses semua aplikasi dan layanan yang ada dari luar kantor secara aman.

1.13.5.4 Jaringan Internet dan Jaringan Intra Pemerintah

Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah. Jaringan Intra Instansi Pemerintah Daerah yang dimaksud merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah. Sedangkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang dimaksud merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam

Pemerintah Daerah. Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah. Penggunaan Infrastruktur tersebut dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah. Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

1.13.6 Model Domain dan Arsitektur Infrastruktur Kota Blitar

Pada tabel berikut dapat dilihat arsitektur infrastruktur dari Kota Blitar.

Tabel 0-43 Fasilitas Komputasi

ID	Nama Fasilitas Komputasi	Bandwidth Intranet	Bandwidth Internet	Lokasi	Kepemilikan(Information)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Klasifikasi Tier Fasilitas	Sistem Pengamanan Fasilitas	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	← Sistem Penghubung Layanan (Dependency)	← Jaringan Intra Pemerintah
	Ruang Server Utama	1			Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Non Tier	Biometrik	RAI.01	RAI.01.02	RAI.01.02.01		
	Ruang Server Dukcapil				Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Non Tier		RAI.01	RAI.01.02	RAI.01.02.02		VPN Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
	Data Center Dinas Kominf o Provinsi			Dinas Kominf o Provinsi Jatim	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Non Tier	Biometrik	RAI.01	RAI.01.02	RAI.01.02.03		

ID	Nama Fasilitas Komputasi	Bandwidth Intranet	Bandwidth Internet	Lokasi	Kepemilikan(Information)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Klasifikasi Tier Fasilitas	Sistem Pengamanan Fasilitas	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	← Sistem Penghubung Layanan (Dependency)	← Jaringan Intra Pemerintah
	Ruang Server Bapenda	3 Gbps	21 Mbps	Ruang Server Bapenda	Sendiri	Badan Pendapatan Daerah Kota Blitar	Non Tier	Non Biometrik	RAI.01	RAI.01.02	RAI.01.02.04		
	CC-Room ATCS Ruang server	100		Dinas Perhubungan Ruang Server Dispendukcapil	Sendiri	Dinas Perhubungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Non Tier	Biometrik	RAI.01	RAI.01.03	RAI.01.03.01		
									RAI.01	RAI.01.02	RAI.01.02.05		

Tabel 0-44 Komputasi Awan

Nama Government Cloud	Deskripsi Government Cloud	Tipe Cloud	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Biaya Layanan	Unit Pengembang	Unit Operasional	Jangka Waktu Pelayanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	← Fasilitas Komputasi (Dependency)
	Penyimpanan berbasis awan untuk berbagi berkas	SaaS	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar	Rp 0	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar	Bidang Aplikasi Informatika	Tidak Ditentukan	RAI.03 Platform	RAI.03.02 Teknologi Awan	RAI.03.03 .03 SaaS	Pemerintah Kota Blitar	Pusat Data Dinas Kominfo

Tabel 0-45 Perangkat Keras Jaringan

Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
Core Switch	/ managable-, bahan Campuran	Multilayer Switch	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar	Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pemerintah Kota Blitar
4G Router suport	TP link /, bahan campuran	Router	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar	Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Pemerintah Kota Blitar

Tabel 0-46 Perangkat Keras Keamanan

Nama Perangkat Keamanan	Deskripsi Security Device	Tipe Keamanan Device	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	← Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, Standar Keamanan Internasional, dan Regulasi lainnya
Device Firewall	/ Firewall security, ukuran 1U, bahan Besi	Firewall	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar	Bidang Infrastruktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Keamanan	Pemerintah Kota Blitar	Pusat Data Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar	ISO 27001 Information Security Management Systems

Nama Perangkat Keamanan	Deskripsi Security Device	Tipe Keamanan Device	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)	← Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, Standar Keamanan Internasional, dan Regulasi lainnya
IP Cam Security System	/, bahan Besi	Intrusion Detection System	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar	Bidang Infrastruktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Keamanan	Pemerintah Kota Blitar	Pusat Data Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar	ISO 27001 Information Security Management Systems

Tabel 0-47 Perangkat Keras Media Penyimpan

Nama Media Storage	Deskripsi Data Storage	Data yang Digunakan [Data Input]	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	Lokasi Storage [Mengacu Metadata Fasilitas Komputasi]	Perangkat Lunak	Metode Akses Data Sharing	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)	← Perangkat Keras Server	→ Fasilitas Komputasi (Dependency)
ASUSTOR NAS	NAS	Bervariasi	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar	Bidang Infrastruktur DISKOMI NFO Kota Blitar	Pusat Data DISKOMI NFO Kota Blitar		Network Attached Storage (NAS)	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.02 Perangkat Keras Media Penyimpan	Pemerintah Kota Blitar		Pusat Data DISKOMI NFO Kota Blitar

Tabel 0-48 Perangkat Keras Server

Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Server	Lokasi Perangkat Lunak Server	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)	Kapasitas Memori	Jenis Teknologi Processor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Workflow - Proses Bisnis (Dependency)	← Fasilitas Komputasi (Dependency)
Web Server Virtualisasi (Proxmox)	Server virtualisasi untuk aplikasi berbasis web yang dimiliki Pemerintah Kota Blitar	Web Server	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Blitar	Bidang Aptika Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Blitar	Balaikota Blitar	Linux	256 GB	High End	9,6 TB	Non Raid	RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.01 Pusat Data	RAI.01.01.03 Pusat Data Instansi Daerah	DISK MINFO Kota Blitar	Pusat Data Dinas KOMINFO Kota Blitar
Server Database	Server untuk manajemen database aplikasi berbasis web milik Pemerintah	Server Database	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Blitar	Bidang Aptika Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Blitar	Balaikota Blitar	Linux	200 GB	High End	2 TB	Non Raid	RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.01 Pusat Data	RAI.01.01.03 Pusat Data Instansi Daerah	DISK MINFO Kota Blitar	Pusat Data Dinas KOMINFO Kota Blitar

Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Server	Lokasi Perangkat Lunak Server	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)	Kapasitas Memori	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Workflow - Proses Bisnis (Dependency)	← Fasilitas Komputasi (Dependency)
Server Blitar kota	Kota Blitar Web server untuk domain dan subdomain Blitar kota	Web Server	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Blitar	Bidang Aptika Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Blitar	Balaikota Blitar	Linux	128 GB	High End	2,5 TB	Non Raid	RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.01 Pusat Data	RAI.01.01.03 Pusat Data Instansi Daerah	DISKO MINFO Kota Blitar	Pusat Data Dinas KOMINFO Kota Blitar
Server DNS 2	Server backup DNS	Domain Name Server	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Blitar	Bidang Aptika Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Blitar	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur	Linux	128 GB	High End	1,2 TB	Non Raid	RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.01 Pusat Data	RAI.01.01.03 Pusat Data Instansi Daerah	DISKO MINFO Kota Blitar	Pusat Data Dinas KOMINFO Kota Blitar

Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Server	Lokasi Perangkat Lunak Server	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)	Kapasitas Memori	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Workflow - Proses Bisnis (Dependency)	← Fasilitas Komputasi (Dependency)
Server DNS 1	Server DNS	Domain Name Server	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Blitar	Bidang Aptika Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Blitar	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur	Linux		High End		Non Raid	RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.01 Pusat Data	RAI.01.01.03 Pusat Data Instansi Daerah	DISKO MINFO Kota Blitar	Pusat Data Dinas KOMINFO Kota Blitar
Server Kominfo	Server untuk aplikasi milik Dinas Komunikasi dan Informatika	Web Server	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Blitar	Bidang Aptika Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Blitar	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur	Linux		High End		Non Raid	RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.01 Pusat Data	RAI.01.01.03 Pusat Data Instansi Daerah	DISKO MINFO Kota Blitar	Pusat Data Dinas KOMINFO Kota Blitar

Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Server	Lokasi Perangkat Lunak Server	→ Perangkat Lunak Platform (Dependency)	Kapasitas Memori	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Workflow - Proses Bisnis (Dependency)	← Fasilitas Komputasi (Dependency)
Server git	Server untuk aplikasi milik Dinas Komunikasi dan Informatika	Web Server	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Blitar	Bidang Aptika Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Blitar	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur	Linux	128 GB	High End	1,2 TB	Non Raid	RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.01 Pusat Data	RAI.01.01.03 Pusat Data Instansi Daerah	DISKO MINFO Kota Blitar	Pusat Data Dinas KOMINFO Kota Blitar
Server email	Server khusus untuk email Blitar kota	Mail Server	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Blitar	Bidang Aptika Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Blitar	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur	Linux		High End			RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.01 Pusat Data	RAI.01.01.03 Pusat Data Instansi Daerah	DISKO MINFO Kota Blitar	Pusat Data Dinas KOMINFO Kota Blitar

Tabel 0-49 Jaringan Intra Pemerintah

Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Media Lainnya	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	← Sistem Penghubung Layanan (Dependency)	→ Data dan Informasi (Dependency)
Metro OPD - 1	Metro antar OPD yang dikelola oleh Bidang Aptika	Metro-net	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 GBps	Fiber Optic		RAI.02 Sistem Integrasi	RAI.02.01 Jaringan Intra	RAI.02.01.03 Jaringan Intra Pemerintah Daerah	OPD yang ada di Pemkot Blitar	Sistem Penghubung Layanan Intranet Blitar

1.13.6.1 Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE Pemerintah Kota Blitar

Berikut hasil pemetaan referensi arsitektur infrastruktur SPBE Pemerintah Kota Blitar

Tabel 0-50 Referensi arsitektur Infrastruktur SPBE Level 3 Pemerintah Kota Blitar

Kode	Deskripsi
RAI.01.02.01 Ruang Server Utama	Ruang Server Utama Dinas Komunikasi dan Informatika
RAI.01.02.02 Ruang Server Dukcapil	Ruang Server Utama Dukcapil
RAI.01.02.03 Data Center Dinas Kominfo Provinsi	Data Center Dinas Kominfo Provinsi
RAI.01.02.04 Ruang Server Bapenda	Ruang Server Bapenda
RAI.01.02.05 Ruang server	Ruang server
RAI.01.03.01 Pusat Kendali ATCS	Pusat Kendali ATCS Dinas Perhubungan

1.14Arsitektur Keamanan

Domain arsitektur keamanan SPBE bertujuan untuk mendeskripsikan pengendalian dan pengintegrasian keamanan data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE yang terpadu dalam SPBE nasional dan menjadi acuan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat dilakukan pengendalian melalui identifikasi program keamanan, pertimbangan kelaikan keamanan serta regulasi keamanan yang komprehensif.

1.14.1 Struktur Referensi Arsitektur Keamanan

Dalam domain arsitektur keamanan SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya substansi keamanan SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur keamanan SPBE dengan 2 (dua) tingkat, yaitu:

- domain keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan dan rekomendasi kelaikan keamanan, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- area keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi strtrktur di tingkat nasional.

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah akan mendefinisikan penerapan keamanan SPBE, melalui pedoman penyusunan Arsitektur SPBE. Ilustrasi struktur referensi arsitektur keamanan SPBE dapat terlihat pada gambar berikut.



Gambar 0-13 Struktur Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

1.14.2 Peta Relasi dan Keterkaitan Antar Domain

Domain arsitektur keamanan SPBE adalah domain arsitektur yang mendeskripsikan kerangka dasar keamanan terkait data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi. Relasi domain arsitektur keamanan SPBE menyatakan hubungan dengan domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur aplikasi SPBE, dan domain arsitektur infrastruktur SPBE, maka dapat terlihat relasi langsung pada gambar berikut.



Gambar 0-14 Relasi langsung pada Domain Keamanan SPBE

Tanggung jawab keamanan SPBE pada tingkat Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

pelaksana SPBE. Untuk penerapan keamanan SPBE, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah pelaksana SPBE berkoordinasi dan berkonsultasi dengan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Domain arsitektur keamanan SPBE selanjutnya perlu didukung oleh pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE, dimana manajemen dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Manajemen keamanan informasi dan teknis prosedur keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE yang ditetapkan.

1.14.3 Atribut Metadata Arsitektur Keamanan

Pada table berikut ini dapat dilihat atribut metadata manajemen keamanan.

Tabel 0-51 Atribut Metadata manajemen keamanan

No	Nama Atribut	Keterangan
1	Jenis Standar Keamanan	Jenis standar keamanan yang diacu dan menjadi prioritas oleh setiap IPPD diantaranya: standar dan/atau Peraturan terkait teknis dan prosedur keamanan SPBE; standar internasional terkait keamanan informasi; atau regulasi lainnya.
2	Keterangan Nama Standar	Nama dari jenis standar keamanan yang diacu dan menjadi prioritas oleh setiap IPPD.
3	Tingkat Risiko	Tingkat risiko Keamanan SPBE dengan penentuan klasifikasi level (high, medium atau low)
4	Penerapan Keamanan	Program kerja atau kegiatan Keamanan SPBE yang dilaksanakan oleh setiap IPPD sebagai upaya dalam meminimalkan dampak risiko Keamanan SPBE. Program kerja atau kegiatan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi: edukasi kesadaran Keamanan SPBE; penilaian kerentanan Keamanan SPBE; peningkatan Keamanan SPBE; dan penanganan insiden Keamanan SPBE.
5	Pengujian Kelaikan Keamanan	Pengujian kelaikan keamanan yang telah dilaksanakan terhadap pengendalian data dan informasi, persyaratan keamanan Aplikasi Umum SPBE, dan persyaratan keamanan Infrastruktur SPBE Nasional.
6	ID metadata terkait	Mengacu kepada metadata SPBE terkait.

1.14.4 Referensi Arsitektur Keamanan SPBE Nasional

Pada table berikut ini dapat dilihat taksonomi referensi arsitektur keamanan.

Tabel 0-52 Referensi Arsitektur Keamanan Tingkat 1 dan 2

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Standar Keamanan (01)		
01.01	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Standar atau Peraturan Pemerintah yang digunakan untuk penerapan Keamanan SPBE.
01.02	Standar Keamanan Internasional	Standar internasional yang digunakan sebagai pendukung dan untuk meningkatkan penerapan Keamanan SPBE.
01.03	Regulasi lainnya	Peraturan Pemerintah lainnya selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan Keamanan SPBE.
Penerapan Keamanan (02)		
02.01	kesadaran Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPPD untuk meningkatkan kesadaran keamanan SPBE.
02.02	kerentanan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPPD untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan SPBE.
02.03	peningkatan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPPD untuk meningkatkan keamanan SPBE.
02.04	penanganan insiden Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPPD untuk menanggulangi, memulihkan dan memitigasi risiko insiden keamanan SPBE.
Kelaikan Keamanan (03)		
03.01	Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum	Uji kelaikan keamanan terhadap aplikasi umum yang dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di IPPD dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar aplikasi umum yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
03.02	Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional	Uji kelaikan keamanan terhadap Infrastruktur SPBE nasional yang dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di IPPD dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar Infrastruktur SPBE Nasional yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.

1.14.5 Model Keamanan Kota Blitar

1.14.5.1 Keamanan Infrastruktur dan Jaringan

Berdasarkan hasil survei dan analisis data yang telah dilakukan, topologi infrastuktur jaringan antar OPD dan topologi WAN di Kota Blitar adalah seperti pada Gambar berikut ini.



Gambar 0-15 Infrastruktur Jaringan Intra Antar OPD Kota Blitar

Gambar di atas menunjukkan topologi jaringan yang menghubungkan setiap OPD di Kota Blitar. Infrastruktur dan keamanan Informasi merupakan hal yang penting dalam pengelolaan Arsitektur SPBE. Hal tersebut dikarenakan penggunaan Internet sebagai media utama dalam komunikasi data dan informasi antar OPD dan pihak di luar pemerintah Kota Blitar.

Berikut ini adalah rekomendasi umum terkait kebutuhan infrastruktur dan keamanan informasi yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Blitar untuk mendukung penggunaan/operasional aplikasi pemerintah Kota Blitar, mencakup pemasangan atau penambahan:

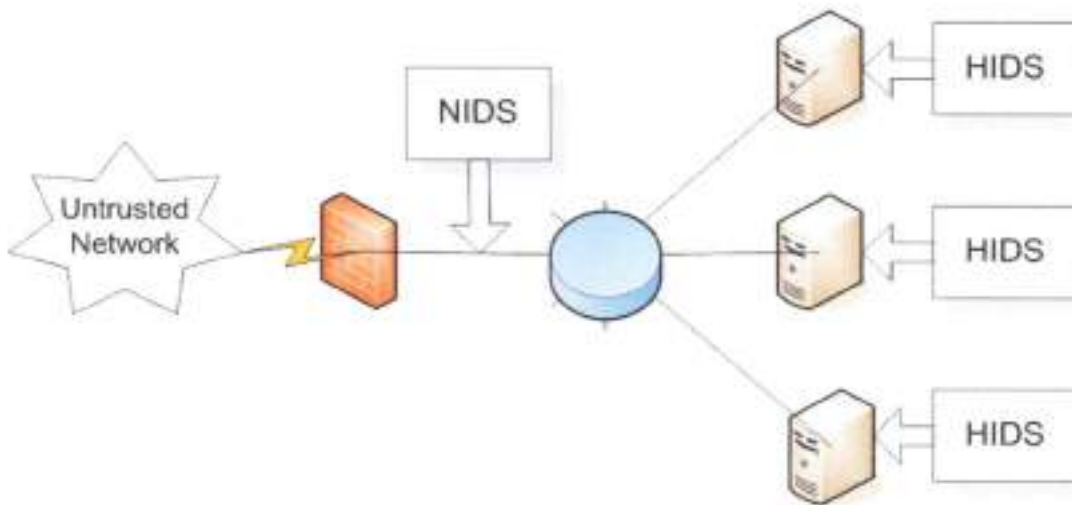
1. Penempatan Firewall di semua server dan semua subnet. Firewall adalah sebuah pembatas antara suatu jaringan lokal dengan jaringan lainnya yang sifatnya publik sehingga setiap data yang masuk dapat diidentifikasi untuk dilakukan penyaringan sehingga aliran data dapat dikendalikan untuk mencegah bahaya/ancaman yang datang dari jaringan publik. Firewall merupakan suatu cara atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software ataupun sistem itu sendiri dengan tujuan untuk melindungi, baik dengan menyaring,

membatasi atau bahkan menolak suatu atau semua hubungan/kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Segmen tersebut dapat merupakan sebuah workstation, server, router, atau local area network (LAN).

2. CARA KERJA FIREWALL

- a. Menutup traffic yang datang (incoming network traffic) berdasarkan sumber atau tujuan dari traffic tersebut : memblokir incoming network traffic yang tidak diinginkan adalah fitur yang paling umum yang disediakan oleh firewall.
 - b. Menutup traffic yang keluar (outgoing network traffic) berdasarkan sumber atau tujuan dari traffic tersebut : Firewall juga bisa menyaring traffic yang berasal dari jaringan internal ke Internet, misalnya ketika kita ingin mencegah user dari mengakses situs-situs porno.
 - c. Menutup traffic berdasarkan kontennya: Firewall yang lebih canggih dapat memonitor traffic dari konten-konten yang tidak diinginkan, misalnya firewall yang didalamnya terintegrasi antivirus ia dapat mencegah file yang terinfeksi oleh virus masuk ke komputer atau jaringan komputer internal yang kita miliki
 - d. Melaporkan traffic di jaringan dan kegiatan firewall : Ketika memonitor traffic jaringan dari dan ke Internet, yang juga penting adalah mengetahui apa yang dikerjakan oleh firewall, siapa yang mencoba membobol jaringan internal dan siapa yang mencoba mengakses informasi yang tidak layak dari Internet.
3. *Firewall* disetiap *gateway router* untuk subnet yang memiliki server, khususnya subnet yang terhubung ke jaringan luar atau Internet. Ada 2 pendapat tentang posisi Firewall ini: apakah di depan Gateway-Router atau di belakang Gateway-Router (masuk di dalam Subnet); kegiatan ini merekomendasikan *Firewall* diletakkan di depan Gateway-Router (posisi terdepan) dengan alasan memperlakukan Firewall sebagai "batas demarkasi keamanan" atau *Security Perimeter* antara jaringan internal yang dapat dipercaya vs. jaringan luar yang tidak dapat dipercaya. *Firewall* khususnya untuk filtering IP dan port

Gateway-Router. Ada 2 model pilihan penggunaan *Gateway-Router*, yakni pilihan pertama hanya menggunakan 1 (satu) *Gateway-Router* sebelum masuk ke jaringan internal, pilihan kedua menggunakan 2 (dua) *Gateway-Router*: yakni berfungsi sebagai *External filtering router* (terdepan), kemudian dihubungkan kumpulan perangkat keamanan yang disebut *Demilitarized zone* (DMZ) terdiri dari *Firewall* dan *Proxy Server* (sebagai web server perantara berperan seperti web server yang asli sehingga akses dari luar tidak langsung ke web server asli yang lebih sensitif), kemudian terhubung ke *Internal filtering router* baru terhubung ke IDS.



Gambar 0-17 Penempatan host-based IDS dan network-based IDS.

6. Terdapat 2 macam IDS yaitu host-based IDS (HIDS) dan network-based IDS (NIDS). Host-based IDS diletakkan pada host yang berdiri sendiri atau perlengkapan dalam sebuah jaringan. Sebuah HIDS melakukan pengawasan terhadap paket-paket yang berasal dari dalam maupun dari luar hanya pada satu alat saja dan kemudian memberi peringatan kepada user atau administrator sistem jaringan akan adanya kegiatankegiatan yang mencurigakan yang terdeteksi oleh HIDS.
7. *NIDS (Network based IDS)*; semua lalu lintas yang mengalir ke sebuah jaringan akan dianalisis untuk mencari apakah ada percobaan serangan atau penyusupan ke dalam sistem jaringan. NIDS umumnya terletak di dalam segmen jaringan penting di mana server berada atau terdapat pada "pintu masuk" jaringan. Idealnya semua traffic yang berasal dari luar dan dalam jaringan di lakukan proses scan, namun cara ini dapat menyebabkan bottleneck yang mengganggu kecepatan akses di seluruh jaringan.
8. *Host-based IDS (HIDS)* yakni IDS dalam bentuk program yang diinstall di tiap komputer untuk memonitor aktivitas dan perubahan file di komputer tersebut, dan *Network-based IDS* yakni alat dan software untuk memonitor traffic dan aktivitas mencurigakan dalam jaringan. *Network-based IDS (NIDS)* dipasang disetiap Subnet di OPD yang menyimpan Server aplikasi dan/atau basis data penting, seperti OPD Dinkominfo (*letak IDS di dalam Subnet sesudah Router atau terhubung Switch*). *Network-based IDS* dipasang di belakang (sesudah) Router

1.14.5.2 Keamanan Aplikasi

Keamanan aplikasi adalah penggunaan perangkat lunak, perangkat keras, dan metode prosedural untuk melindungi aplikasi dari ancaman eksternal. Langkah-langkah keamanan yang dibangun ke dalam aplikasi dan rutinitas keamanan aplikasi yang baik meminimalkan kemungkinan bahwa peretas akan dapat memanipulasi aplikasi dan mengakses, mencuri, memodifikasi, atau menghapus data sensitif.

1.14.5.3 Pengelolaan Keamanan Informasi

Keamanan informasi merupakan hal penting dalam penyelenggaraan layanan. Dengan semakin meningkatnya risiko dan insiden keamanan informasi dalam penyelenggaraan SPBE, upaya pengamanan terhadap SPBE yang memiliki data dan informasi strategis dan penting wajib segera dilakukan. Keamanan informasi yang handal, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan sistem elektronik untuk

pelayanan publik. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka keamanan data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, perlu menyusun sebuah standar tentang manajemen keamanan informasi, yang mengatur bagaimana informasi menjadi aman agar kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi tetap terjaga.

Manajemen keamanan informasi menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Hal tersebut dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Manajemen keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

1.14.5.3.1 Pengendalian Organisasi Keamanan Informasi

1. Unit TIK mengkaji perjanjian kerahasiaan pihak-pihak internal dan eksternal secara berkala untuk menjaga aset informasi;
2. Menjalinkan kerja sama dengan pihak-pihak berwenang di luar Pemerintah Kota Blitar yang terkait dengan keamanan informasi;
3. Menjalinkan kerja sama dengan komunitas keamanan informasi di luar Pemerintah Kota Blitar melalui pelatihan, seminar, atau forum lain yang relevan dengan keamanan informasi; dan
4. Menerapkan pengendalian keamanan informasi berdasarkan hasil penilaian risiko untuk mencegah atau mengurangi dampak risiko terkait dengan pemberian akses kepada pihak ketiga.

1.14.5.3.2 Pengendalian Pengelolaan Aset Informasi

1. Setiap Unit TIK bertanggung jawab terhadap keamanan aset informasi:
 - a. Mengidentifikasi aset informasi dan mendokumentasikannya dalam daftar inventaris aset informasi;
 - b. Menetapkan pemilik aset informasi di setiap unit TIK
 - c. Menetapkan aset informasi yang terkait dengan perangkat pengolah informasi;
 - d. Pemilik aset informasi menetapkan aturan penggunaan aset informasi.
2. Klasifikasi aset informasi

Aset informasi diklasifikasikan sesuai tingkat kerahasiaan, nilai, tingkat kritikalitas, serta aspek hukumnya.

1.14.5.3.3 Pengendalian Keamanan Fisik dan Lingkungan

1. Pengamanan area
 - a. Seluruh pegawai, pihak ketiga, dan tamu yang memasuki lingkungan area Pusat Data/Ruang Server wajib mematuhi aturan yang berlaku;
 - b. Ketentuan rinci tentang pengamanan area lingkungan kerja di Pemerintah Kota Blitar diuraikan dalam standar keamanan fisik dan lingkungan.

2. Pengamanan perangkat

- a. Perangkat pengolah informasi dan perangkat pendukung wajib ditempatkan di lokasi yang aman dan diposisikan sedemikian rupa untuk mengurangi risiko aset informasi dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
- b. Perangkat pendukung wajib dipasang untuk menjamin beroperasinya perangkat pengolah informasi dan secara berkala wajib diperiksa dan diuji ulang kinerjanya.
- c. Kabel sumber daya listrik wajib dilindungi dari kerusakan, dan kabel telekomunikasi yang mengalirkan informasi wajib dilindungi dari kerusakan dan penyadapan.
- d. Perangkat pengolah informasi wajib dipelihara secara berkala untuk menjamin ketersediaan, keutuhan, dan fungsinya.
- e. Penggunaan perangkat yang dibawa ke luar dari lingkungan Pemerintah Kota Blitar disetujui oleh Pejabat yang berwenang.
- f. Perangkat pengolah informasi penyimpan data yang sudah tidak digunakan lagi wajib disanitasi sebelum digunakan kembali atau dihapuskan/dimusnahkan;
- g. Penanganan perangkat pengolah informasi penyimpan data di Pemerintah Kota Blitar sesuai dengan standar penanganan media penyimpan data yang ditetapkan dalam Standar Pengelolaan Data Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

1.14.5.3.4 Pengendalian Pengelolaan Operasional

1. Prosedur operasional dan tanggung jawab

- a. Wajib mendokumentasikan, memelihara, dan menyediakan seluruh prosedur operasional yang terkait dengan penggunaan perangkat pengolah informasi sesuai dengan peruntukannya.
- b. Mengendalikan perubahan terhadap perangkat pengolah informasi.
- c. Melakukan pemisahan informasi yang memiliki klasifikasi SANGAT RAHASIA dan RAHASIA untuk menghindari adanya pegawai yang memiliki pengendalian eksklusif terhadap seluruh aset informasi dan perangkat pengolahnya.
- d. Melakukan pemisahan perangkat pengembangan, pengujian, dan operasional untuk mengurangi risiko perubahan atau akses oleh pihak yang tidak berwenang terhadap sistem operasional.

2. Pengelolaan layanan oleh pihak ketiga

- a. Wajib memastikan bahwa pengendalian keamanan informasi, definisi layanan, dan tingkat layanan yang tercantum dalam kesepakatan penyediaan layanan telah diterapkan, dioperasikan, dan dipelihara oleh pihak ketiga.
- b. Wajib melakukan pemantauan terhadap kinerja penyediaan layanan, laporan, dan catatan yang disediakan oleh pihak ketiga secara berkala.

- c. Wajib memperhatikan kritikalitas, proses yang terkait dan hasil penilaian ulang risiko layanan apabila terjadi perubahan pada layanan yang disediakan pihak ketiga.
3. Perencanaan dan penerimaan sistem
 - a. Unit TIK wajib memantau penggunaan perangkat pengolah informasi dan membuat perkiraan pertumbuhan kebutuhan ke depan untuk memastikan ketersediaan kapasitas;
 - b. Unit TIK wajib menetapkan kriteria penerimaan untuk sistem informasi baru, pemutakhiran dan versi baru serta melakukan pengujian sebelum penerimaan.
4. Perlindungan terhadap ancaman program yang membahayakan. Wajib menerapkan sistem yang dapat melakukan pendeteksian, pencegahan, dan pemulihan sebagai bentuk perlindungan terhadap ancaman program yang membahayakan.
5. Backup
 - a. Wajib melakukan *backup* informasi dan perangkat lunak yang berada di Pusat Data secara berkala.
 - b. Proses *backup* di Pemerintah Kota Blitar sesuai dengan *backup* data yang ditetapkan dalam Standar Pengelolaan Data Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
6. Pengelolaan keamanan jaringan
 - a. Wajib mengelola dan melindungi jaringan dari berbagai bentuk ancaman;
 - b. Wajib mengidentifikasi fitur keamanan layanan, tingkat layanan, dan kebutuhan pengelolaan serta mencantumkannya dalam kesepakatan penyediaan layanan jaringan termasuk layanan jaringan yang disediakan oleh pihak ketiga.
7. Penanganan media penyimpan data
 - a. Setiap Unit TIK mempunyai prosedur yang mengatur penanganan media penyimpan data untuk melindungi aset informasi;
 - b. Penanganan media penyimpanan data sesuai dengan standar penanganan media penyimpan data yang ditetapkan dalam Standar Pengelolaan Data Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
8. Pertukaran informasi
 - a. Pertukaran informasi dan perangkat lunak antara Pemerintah Kota Blitar dengan pihak ketiga dilakukan atas kesepakatan tertulis kedua belah pihak;
 - b. Pemilik informasi wajib melakukan penilaian risiko yang memadai sebelum melaksanakan pertukaran informasi;
 - c. Wajib menerapkan pengendalian keamanan informasi untuk pengiriman informasi melalui surat elektronik atau pengiriman informasi melalui jasa layanan pengiriman dalam rangka menghindari akses pihak yang tidak berwenang;
9. Pemantauan
 - a. Wajib menerapkan *audit logging* yang mencatat aktivitas pengguna, pengecualian, dan kejadian keamanan informasi

dalam kurun waktu tertentu untuk membantu pengendalian akses dan investigasi di masa mendatang.

- b. Wajib memantau penggunaan sistem dan mengkaji secara berkala hasil kegiatan pemantauan.
- c. Wajib melindungi fasilitas pencatatan dan data yang dicatat dari kerusakan dan akses oleh pihak yang tidak berwenang.
- d. Wajib menerapkan pencatatan kegiatan *system administrator* dan *system operator*.
- e. Wajib menerapkan pencatatan kesalahan untuk dianalisis dan diambil tindakan penanganan yang tepat.
- f. Wajib memastikan semua perangkat pengolah informasi yang tersambung dengan jaringan telah disinkronisasi dengan sumber waktu yang akurat dan disepakati.

1.14.5.3.5 Pengendalian Akses

1. Wajib menyusun, mendokumentasikan, dan mengkaji ketentuan akses ke aset informasi berdasarkan kebutuhan organisasi dan persyaratan keamanan.
2. Pengelolaan akses pengguna
 - a. Wajib menyusun prosedur pengelolaan hak akses pengguna sesuai dengan peruntukannya.
 - b. Wajib membatasi dan mengendalikan penggunaan hak akses khusus.
 - c. Wajib mengatur pengelolaan kata sandi pengguna;
 - d. Wajib memantau dan mengevaluasi hak akses pengguna dan penggunaannya secara berkala untuk memastikan kesesuaian status pemakaiannya.
3. Tanggung jawab pengguna
 - a. Wajib mematuhi aturan pembuatan dan penggunaan kata sandi.
 - b. Memastikan perangkat pengolah informasi yang digunakan mendapatkan perlindungan terutama saat ditinggalkan; dan
 - c. Melindungi informasi agar tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
4. Pengendalian akses jaringan
 - d. Wajib mengatur akses pengguna dalam mengakses jaringan Pemerintah Kota Blitar sesuai dengan peruntukannya;
 - e. Wajib menerapkan proses otorisasi pengguna untuk setiap akses ke dalam jaringan internal melalui koneksi eksternal;
 - f. Akses ke perangkat keras dan perangkat lunak untuk diagnosa harus dikontrol berdasarkan prosedur dan hanya digunakan oleh pegawai yang diberikan wewenang untuk melakukan pengujian, pemecahan masalah, serta pengembangan sistem, dan *port* pada fasilitas jaringan yang tidak dibutuhkan dalam kegiatan atau fungsi layanan wajib dinonaktifkan.
 - g. Wajib memisahkan jaringan untuk pengguna, sistem informasi, dan layanan informasi.

- h. Wajib menerapkan mekanisme pengendalian akses pengguna sesuai dengan persyaratan pengendalian akses.
 - i. Pengendalian *routing* jaringan internal Pemerintah Kota Blitar wajib dilakukan sesuai pengendalian akses dan kebutuhan layanan informasi.
5. Pengendalian akses ke sistem operasi
- a. Akses ke sistem operasi wajib dikontrol dengan menggunakan prosedur akses yang aman.
 - b. Setiap pengguna wajib memiliki akun yang unik dan hanya digunakan sesuai dengan peruntukannya, dan proses otorisasi pengguna wajib menggunakan teknik autentikasi yang sesuai untuk memvalidasi identitas dari pengguna.
 - c. Sistem pengelolaan kata sandi wajib mudah untuk digunakan dan dapat memastikan kualitas sandi yang dibuat pengguna.
 - d. Wajib membatasi dan mengendalikan penggunaan *system utilities*;
 - e. Fasilitas *session time-out* wajib diaktifkan untuk menutup dan mengunci layar komputer, aplikasi, dan koneksi jaringan apabila tidak ada aktivitas pengguna setelah periode tertentu.
 - f. Wajib membatasi waktu koneksi untuk sistem informasi dan aplikasi yang memiliki klasifikasi SANGAT RAHASIA dan RAHASIA.
6. Pengendalian akses ke aplikasi dan sistem informasi:
- a. Wajib memastikan bahwa akses terhadap aplikasi dan sistem informasi hanya diberikan kepada pengguna sesuai peruntukannya;
 - b. Aplikasi dan sistem informasi yang memiliki klasifikasi SANGAT RAHASIA dan RAHASIA wajib diletakkan pada lokasi terpisah untuk mengurangi kemungkinan diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
7. *Mobile computing* dan *teleworking*
- a. Membangun kepedulian pengguna perangkat *mobile computing* dan *Teleworking* akan risiko-risiko keamanan yang terus meningkat terhadap informasi yang tersimpan dalam perangkat *mobile computing*;
 - b. Pengguna perangkat *mobile computing* dan *teleworking* wajib mengikuti prosedur yang terkait penggunaan perangkat *mobile computing* dan *teleworking* untuk menjaga keamanan perangkat dan informasi di dalamnya.

1.14.5.3.6 Pengendalian Keamanan Informasi

Pengendalian keamanan informasi dalam pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem informasi

1. Menetapkan dan mendokumentasikan secara jelas persyaratan keamanan informasi yang relevan sebelum pengadaan, pengembangan, atau pemeliharaan sistem informasi baru.
2. Pengelolaan informasi pada aplikasi:

- a. Data yang akan dimasukkan ke aplikasi wajib diperiksa terlebih dahulu kebenaran dan kesesuaiannya.
 - b. Setiap aplikasi wajib disertakan proses validasi untuk mendeteksi bahwa informasi yang dihasilkan utuh dan sesuai dengan yang diharapkan.
 - c. Data keluaran aplikasi wajib divalidasi untuk memastikan data yang dihasilkan adalah benar.
3. Pengendalian penggunaan kriptografi:
- a. Wajib mengembangkan dan menerapkan sistem kriptografi untuk perlindungan informasi dan membuat rekomendasi yang tepat bagi penerapannya.
 - b. Sistem kriptografi wajib digunakan untuk melindungi aset informasi yang memiliki klasifikasi SANGAT RAHASIA, RAHASIA, dan TERBATAS.
4. Keamanan file sistem
- a. Wajib mempunyai prosedur untuk pengendalian perangkat lunak pada sistem operasional.
 - b. Menentukan sistem pengujian data, melindunginya dari kemungkinan kerusakan, kehilangan atau perubahan oleh pihak yang tidak berwenang.
 - c. Mengendalikan ke kode program secara ketat dan salinan versi terkini dari perangkat lunak disimpan di tempat yang aman.
5. Keamanan dalam proses pengembangan dan pendukung
- a. Wajib mengendalikan perubahan pada sistem operasi dengan penggunaan prosedur pengendalian perubahan.
 - b. Wajib mengendalikan perubahan terhadap perangkat lunak yang dikembangkan sendiri maupun pihak ketiga.
 - c. Wajib meninjau dan menguji sistem operasi dan/atau perangkat lunak untuk memastikan tidak ada dampak merugikan pada proses operasional atau keamanan informasi Pemerintah Kota Blitar pada saat terjadi perubahan sistem operasi dan/atau perangkat lunak, untuk informasi yang memiliki klasifikasi SANGAT RAHASIA dan RAHASIA.
 - d. Wajib mencegah kemungkinan terjadinya kebocoran informasi.
 - e. Wajib melakukan supervisi dan memantau pengembangan perangkat lunak oleh pihak ketiga.
6. Pengelolaan kerentanan teknis
- a. Wajib mengumpulkan informasi kerentanan teknis secara berkala dari seluruh sistem informasi yang digunakan maupun komponen pendukung sistem informasi.
 - b. Wajib melakukan evaluasi dan penilaian risiko terhadap kerentanan teknis yang ditemukan dalam sistem informasi serta menetapkan pengendalian yang tepat terhadap risiko terkait.

1.14.5.3.7 Kebijakan Keamanan Informasi

- 1) Kebijakan co-location untuk semua server OPD di data center Diskominfo

2) Kebijakan manajemen TI, diantaranya:

- a. Manajemen Resiko
- b. Manajemen Keamanan Informasi
- c. Manajemen Data
- d. Manajemen Aset TIK
- e. Manajemen Pengetahuan
- f. Manajemen perubahan TIK
- g. Manajemen Layanan SPBE
- h. Manajemen SDM

1.14.6 Model Domain dan Referensi Arsitektur Keamanan Kota Blitar

Sebagaimana dijelaskan pada kerangka kerja arsitektur keamanan, domain arsitektur keamanan SPBE akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya substansi keamanan SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur keamanan SPBE dengan 2 (dua) tingkat, yaitu:

- a. domain keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan dan rekomendasi kelaikan keamanan, sebagai tingkat 1(pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional
- b. area keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, Aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional.

Domain keamanan seperti disebutkan sebelumnya memiliki struktur dengan 2 (dua) tingkat, dimana keseluruhan tingkat merupakan struktur di tingkat nasional.

Secara umum domain keamanan Kota Blitar sebagian besar terlaksana di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar. Berikut adalah domain dan referensi terkait keamanan yang dapat dilakukan di Kota Blitar.

1.14.6.1 Audit Keamanan SPBE

Tabel 0-53 Audit Keamanan SPBE

I D	Nama Kegiatan Audit Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Audit Keamanan SPBE	Hasil Audit Keamanan SPBE	Jenis Audit Keamanan	Tindak lanjut Audit Keamanan	Tanggal Kegiatan Audit Keamanan	→ Instansi (Dependency)
	Audit	Kegiatan Audit	c. perlu peningkatan	Eksternal	b. sebagian ditindaklanjuti	2020	Pemerintah Kota Blitar

1.14.6.2 Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE

Tabel 0-54 Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE

I D	Nama	Jenis Standar Keamanan	Deskripsi	Tanggal Mulai Penerapan	Tanggal Akhir Penerapan	→ Instansi (Dependen cy)
	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021	1. Standar Nasional dan/atau Peraturan Terkait Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	19 Mei 2021		Badan Siber dan Sandi Negara
	Peraturan Walikota no. XX Thun YYYYPemakaia n Nama Domain kotaBlitar.go.i d	3. Regulasi Lainnya	Penataan nama domain			Dinas Komunikas i dan Informatik a

1.14.6.3 Referensi Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kota Blitar

Berikut hasil pemetaan referensi arsitektur keamanan SPBE Pemerintah Kota Blitar

Tabel 0-55 Referensi arsitektur keamanan SPBE Level 3 Pemerintah Kota Blitar

Kode	Deskripsi Referensi Arsitektur Keamanan	Status	Kategori	Sub-kategori
RAK.01.01.00 1	Kebijakan Keamanan Informasi	Renca na	Standar Keaman an	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE
RAK.01.01.00 2	SOP Keamanan Informasi	Renca na	Standar Keaman an	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE
RAK.01.02.00 3	ISO 27001	Renca na	Standar Keaman an	Standar Keamanan Internasional
RAK.01.02.00 4	Security Control Framework	Renca na	Standar Keaman an	Standar Keamanan Internasional
RAK.01.03.00 5	Undang- undang ITE	Renca na	Standar Keaman an	Regulasi lainnya

Kode	Deskripsi Referensi Arsitektur Keamanan	Status	Kategori	Sub-kategori
RAK.01.03.006	PP no 71 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik	Renca na	Standar Keaman an	Regulasi lainnya
RAK.02.02.007	Sosialisasi Kesadaran Keamanan SPBE	Renca na	Penerap an Keaman an	Kesadaran Keamanan SPBE
RAK.02.02.008	Pedoman Prinsip Keamanan Informasi bagi Individu	Renca na	Penerap an Keaman an	Kesadaran Keamanan SPBE
RAK.02.02.009	Provisi Keamanan Aplikasi	Renca na	Penerap an Keaman an	Kerentanan Keamanan SPBE
RAK.02.02.010	Provisi Keamanan Infrastruktur	Renca na	Penerap an Keaman an	Kerentanan Keamanan SPBE
RAK.02.02.011	Pen-test berkala	Renca na	Penerap an Keaman an	Kerentanan Keamanan SPBE
RAK.02.02.012	Monitoring risiko keamanan berkala	Renca na	Penerap an Keaman an	Kerentanan Keamanan SPBE
RAK.02.02.013	Pengelolaan register risiko keamanan	Renca na	Penerap an Keaman an	Kerentanan Keamanan SPBE
RAK.02.02.014	Audit keamanan	Renca na	Penerap an Keaman an	Kerentanan Keamanan SPBE
RAK.02.03.015	Pengelolaan Tools Keamanan	Operas ional	Penerap an Keaman an	Peningkatan Keamanan SPBE
RAK.02.03.016	Antivirus	Operas ional	Penerap an Keaman an	Peningkatan Keamanan SPBE
RAK.02.03.017	Data Leak Prevention	Operas ional	Penerap an Keaman an	Peningkatan Keamanan SPBE
RAK.02.03.018	Firewall	Operas ional	Penerap an Keaman an	Peningkatan Keamanan SPBE

Kode	Deskripsi Referensi Arsitektur Keamanan	Status	Kategori	Sub-kategori
RAK.02.03.019	Data Protection	Renca na	Penerap an Keaman an	Peningkatan Keamanan SPBE
RAK.02.04.020	Manajemen penanganan insiden keamanan	Renca na	Penerap an Keaman an	Penanganan insiden Keamanan SPBE
RAK.02.04.021	Sistem Monitoring Pengelolaan dan Pencegahan Insiden (IDS)	Renca na	Penerap an Keaman an	Penanganan insiden Keamanan SPBE
RAK.03.01.022	Web Application Firewall	Operas sional	Kelaikan Keaman an	Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum
RAK.03.02.023	System Security Testing	Operas sional	Kelaikan Keaman an	Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional
RAK.03.01.024	Sertifikat SSL (Secure Socket Layer)	Operas sional	Kelaikan Keaman an	Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR : 100.3.3.3/221/HK/410.020.3/2024
TENTANG
ARSITEKTUR DAN PETA RENCANA SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB 1 – PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Didalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), disebutkan SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Tujuan dari SPBE sendiri adalah membangun transparansi, keterpaduan, peningkatan kinerja serta efektivitas penggunaan anggaran.

Untuk memastikan SPBE yang akan diimplementasikan maupun yang sudah dilakukan benar-benar mendukung target yang ditetapkan, maka disusunlah Peta Rencana SPBE sebagai dokumen perencanaan terhadap harapan yang ingin dicapai di masa mendatang.

Peta Rencana SPBE didefinisikan sebagai dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi, meliputi keterpaduan proses bisnis data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi, keamanan dan layanan SPBE. Dokumen Peta Rencana tersebut perlu dilakukan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dan pelaksanaan SPBE di setiap instansi pemerintah.

Pemerintah Kota Blitar saat ini sudah memiliki dokumen Masterplan SPBE 2021 - 2025 sesuai visi misi Pemerintah Kota Blitar dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan diharapkan juga dapat selaras dengan Rencana Induk SPBE Nasional dan Rencana Induk SPBE Provinsi Jawa Timur. Untuk itu agar proses pembangunan dan pemeliharaan layanan SPBE dapat terus terimplementasikan dengan baik, Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar sebagai salah satu Tim Koordinasi SPBE perlu melakukan review terhadap dokumen Masterplan SPBE agar dapat beradaptasi dengan dokumen perencanaan penganggaran maupun kebijakan internal daerah maupun nasional yang terbaru.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pelaksanaan kegiatan Review Peta Rencana SPBE Kota Blitar 2021 - 2025 adalah untuk mendeskripsikan ulang perencanaan pada komponen-komponen SPBE sekaligus mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, manajemen, layanan, program kegiatan dan anggaran SPBE yang telah dilakukan.

Adapun tujuan dari kegiatan Review Peta Rencana SPBE Kota Blitar 2021 - 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menata ulang arah perencanaan strategis daerah terkait penerapan dan pemanfaatan TI secara menyeluruh.
2. Melakukan revisi / pemutakhiran peta rencana yang ada agar lebih selaras dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Provinsi dan RPJMD Daerah.

3. Memperoleh masukan / rekomendasi program kegiatan dan anggaran pelaksanaan SPBE.

1.3. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini yaitu tersusunnya dokumen hasil Review Peta Rencana SPBE Kota Blitar 2021 - 2025 sebagai acuan pengembangan dan pengelolaan SPBE yang lebih

update dan disusun secara sistematis dan terpadu sejalan dengan visi misi dan arah pembangunan daerah.

1.4. Ruang Lingkup Kegiatan

Lingkup pelaksanaan kegiatan Review Peta Rencana SPBE Kota Blitar 2021 - 2025 mencakup sebagai berikut :

1. Melakukan survey / observasi / diskusi untuk pengumpulan data dan informasi mengenai pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
2. Melakukan review terhadap:
 - a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran SPBE
 - b. Arah Kebijakan SPBE
 - c. Inisiatif Pengembangan SPBE
 - d. Strategi SPBE
3. Melakukan analisis kesenjangan (gap analysis) disertai solusi terhadap capaian target yang diharapkan pada RPJMD, Renstra OPD, Peta Rencana SPBE Nasional maupun Peta Rencana Kota Blitar yang sudah ada sebelumnya dengan kondisi aktual pelaksanaannya.
4. Menyusun rekomendasi program/kegiatan peningkatan penerapan SPBE sebagai rencana aksi perbaikan SPBE.
5. Melakukan revisi / pemutakhiran peta jalan (roadmap) yang terbagi menjadi 5 (lima) aspek: Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, Layanan dan SDM.
6. Menyusun draft peraturan walikota terkait program percepatan (quick wins) SPBE.
7. Melakukan pemaparan laporan hasil kegiatan yang telah disusun.

1.5. Keluaran

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan Review Peta Rencana SPBE Kota Blitar 2021 - 2025 adalah:

1. Dokumen hasil review implementasi SPBE terhadap dokumen Masterplan SPBE 2021 -2025
2. Draft Peraturan Walikota tentang Program Percepatan SPBE Kota Blitar

1.6. Sistematika Penulisan

Laporan Akhir ini terdiri dari:

Bab 1 : Pendahuluan

Bagian ini berisi mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup kegiatan, keluaran, dan sistematika penulisa

Bab 2 : Dasar Teori

Bagian ini menjelaskan berbagai acuan yang menjadi pertimbangan dalam menyusun laporan ini.

Bab 3 : Metode Pendekatan

Bagian ini menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan pekerjaan review peta rencana ini.

Bab 4 : Analisa Kondisi Saat Ini

Bagian ini menjelaskan tentang penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Blitar saat ini.

Bab 5 : Analisa Kesenjangan

Bagian ini berisi tentang hasil analisa kesenjangan. Hasil analisa kesenjangan memperlihatkan kebutuhan pengembangan SPBE yang diperlukan di masa mendatang dengan mempertimbangkan kondisi penerapan SPBE Pemerintah Kota Blitar saat ini.

Bab 6 : Rekomendasi Revisi Peningkatan Program SPBE

Bagian ini berisi tentang berbagai program/ kegiatan pengembangan SPBE yang diperlukan Pemerintah Kota Blitar.

Bab 7 : Revisi Peta Rencana SPBE

Bagian ini berisikan mengenai peta rencana pengembangan SPBE yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Blitar. Peta Rencana pengembangan SPBE terdiri dari Peta Rencana Layanan SPBE, Peta Rencana Manajemen SPBE, Peta Rencana Tata Kelola SPBE, Peta Rencana Aplikasi SPBE, Peta Rencana Infrastruktur SPBE, Peta Rencana Keamanan SPBE dan Peta Rencana Audit TIK.

BAB 2 – LANDASAN TEORI

2.1. SPBE

Berdasarkan *Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE*, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

SPBE dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Efektivitas
optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan
- b. Keterpaduan
pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE
- c. Kestinambungan
keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- d. efisiensi
optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna
- e. akuntabilitas
kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE
- f. interoperabilitas
koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE
- g. keamanan
kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Unsur-unsur SPBE meliputi:

1. Rencana Induk SPBE Nasional
2. Arsitektur SPBE
3. Peta Rencana SPBE
4. rencana dan anggaran SPBE
5. Proses Bisnis
6. data dan informasi
7. Infrastruktur SPBE
8. Aplikasi SPBE
9. Keamanan SPBE
10. Layanan SPBE

2.2. Arsitektur SPBE

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE, Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 132 tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE, tertera bahwa Arsitektur SPBE Nasional Tahun 2020-2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Dalam setiap Arsitektur SPBE memuat 2 (dua) komponen, yaitu:

- a. Referensi arsitektur, yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur;
- b. Domain arsitektur, yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur

2.3. Peta Rencana SPBE

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE, Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. Peta Rencana SPBE terdiri atas:

- a. Peta Rencana SPBE Nasional
- b. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat
- c. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

2.3.1. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional

Peta Rencana SPBE Nasional memuat:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Layanan SPBE;
- d. Infrastruktur SPBE;
- e. Aplikasi SPBE;
- f. Keamanan SPBE; dan
- g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Peta Rencana SPBE Nasional disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Nasional. Peta Rencana SPBE Nasional disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Peta Rencana SPBE Nasional dilakukan revaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Peta Rencana SPBE Nasional disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Penyusunan Peta Rencana SPBE Nasional dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Peta Rencana SPBE Nasional ditetapkan dengan Peraturan Menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Reviu Peta Rencana SPBE Nasional dilakukan berdasarkan:

- a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
- b. perubahan Rencana Kerja Pemerintah; atau
- c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE nasional.

Reviu Peta Rencana SPBE Nasional sebagaimana dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

2.3.2. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat

Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Instansi Pusat, dan rencana strategis Instansi Pusat. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat masing-masing. Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dengan Peta Rencana SPBE Nasional, pimpinan Instansi Pusat berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Reviu Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dilakukan berdasarkan:

- a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
- b. perubahan rencana strategis Instansi Pusat;
- c. perubahan Arsitektur SPBE Instansi Pusat; atau
- d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Instansi

Reviu Peta Rencana SPBE Instansi Pusat dilakukan oleh pimpinan Instansi Pusat masing-masing.

2.3.3. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE

Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan

oleh kepala daerah masing-masing. Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan:

- a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional

- b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah
- c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah atau
- d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan oleh kepala daerah masing-masing.

2.4. Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Percepatan SPBE dilakukan dengan membangun Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE Nasional untuk memberikan Layanan SPBE.

2.4.1. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Umum

Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:

- a. perencanaan
- b. penganggaran
- c. pengadaan barang dan jasa pemerintah
- d. akuntabilitas kinerja
- e. pemantauan dan evaluasi
- f. kearsipan
- g. kepegawaian dan
- h. pengaduan pelayanan public

Pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi Umum dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang penyelenggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mulai berlaku. Setiap pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah mencegah dan/atau menghentikan pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum. Dalam hal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi sejenis, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan.

2.4.2. Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, dan Pemantauan dan Evaluasi

Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan

jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran,

pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi. Integrasi Layanan SPBE dilakukan melalui:

- a. bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
- b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan
- c. penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.

Integrasi Layanan SPBE dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

2.4.3. Kearsipan

Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Integrasi layanan kearsipan dilakukan melalui:

- a. bagi pakai arsip dan informasi kearsipan dalam Instansi Pusat, dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan; dan
- c. penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi.

Integrasi layanan kearsipan dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

2.4.4. Kepegawaian

Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, dilakukan penerapan

manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterpaduan Proses Bisnis terhadap manajemen Pegawai Negeri Sipil diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian untuk konsolidasi data Pegawai Negeri Sipil dari semua Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Integrasi layanan kepegawaian dilakukan melalui:

- a. bagi pakai data kepegawaian dalam Instansi Pusat, dalam Pemerintah Daerah, dan/atau
- b. antara lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;

- c. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi; dan
- e. penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antara:
 - 1. Instansi Pusat dan lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian; dan
 - 2. Pemerintah Daerah dan Lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian.

Integrasi layanan kepegawaian dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

2.4.5. Pengaduan Pelayanan Publik

Untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Integrasi layanan pengaduan pelayanan public dilakukan melalui:

- a. bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik dalam Instansi Pusat, dalam Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik; dan
- c. penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi.

Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

2.4.6. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur SPBE Nasional

Untuk mendukung pengoperasian Aplikasi Umum dilakukan pembangunan dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE Nasional. Infrastruktur SPBE Nasional dibangun dan/atau

dikembangkan secara terpadu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Presiden tentang SPBE mulai berlaku. Dalam pengoperasian Aplikasi Umum Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Infrastruktur SPBE Nasional paling lambat 1 (satu) tahun setelah Infrastruktur SPBE Nasional ditetapkan. Pengembangan Infrastruktur SPBE Nasional dapat menggunakan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah tersedia sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembangunan dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE Nasional dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

2.4.7. Pendanaan

Pendanaan yang diperlukan untuk percepatan SPBE di Instansi Pusat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan untuk percepatan SPBE di Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.5. Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Tim Koordinasi SPBE Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara nasional dan berkala. Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing secara berkala. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Pemantauan dan evaluasi didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE. Pedoman evaluasi SPBE digunakan bagi Tim Koordinasi SPBE Nasional dan koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman evaluasi SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Berdasarkan *Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE*, Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan *Bab 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE*, Evaluasi penerapan kebijakan SPBE bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Secara keseluruhan, terdapat 47 indikator yang menjadi parameter penilaian indeks SPBE yang tersebar pada 4 domain. Domain-domain yang dinilai dalam evaluasi SPBE, yaitu:

Tabel 2.56 Domain dan Aspek Penilaian SPBE

<i>Domain dan Aspek Penilaian</i>	<i>Bobot</i>
Domain 1 – Kebijakan SPBE	13%
<i>Aspek 1 – Kebijakan internal terkait tata kelola SPBE</i>	<i>13%</i>
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	25%
<i>Aspek 2 – Perencanaan strategis</i>	<i>10%</i>
<i>Aspek 3 – Teknologi informasi dan komunikasi</i>	<i>10%</i>
<i>Aspek 4 – Penyelenggaraan SPBE</i>	<i>5%</i>
Domain 3 – Manajemen SPBE	16,5%

<i>Aspek 5 – Penerapan manajemen SPBE</i>	12%
<i>Aspek 6 – Audit TIK</i>	4,5%
<i>Domain 4 – Layanan SPBE</i>	45,5%
<i>Aspek 7 – Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik</i>	27,5%
<i>Aspek 8 – Layanan publik berbasis elektronik</i>	18%

Tingkat kematangan pada kapabilitas proses (domain kebijakan, tata Kelola dan manajemen)

1. Rintisan

Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan proses tata kelola dilaksanakan secara ad-hoc.

2. Terkelola

Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di instansi pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi

3. Terstandardisasi

Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di instansi pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya terstandardisasi

4. Terintegrasi dan terukur

Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar instansi pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif

5. Optimum

pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas

Tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis (domain layanan):

1. Informasi

Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.

2. Interaksi

Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.

3. Transaksi

Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.

4. Kolaborasi

Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.

5. Optimalisasi

Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal

BAB 3 - METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan yang akan dipergunakan Tim Konsultan untuk menyelesaikan pekerjaan Review Peta Rencana SPBE 2021-2025 adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Laporan Pendahuluan
2. Pengumpulan data
3. Pembuatan perangkat wawancara/ survei/ observasi
4. Pelaksanaan wawancara/ survei/ observasi
5. Analisa penerapan SPBE saat ini
6. Analisa kesenjangan
7. Penyusunan rekomendasi penerapan SPBE mendatang
8. Revisi Peta Rencana SPBE
9. Pembuatan draft Peraturan Walikota tentang Percepatan Penerapan SPBE
10. Pembuatan Laporan Akhir
11. Presentasi hasil pekerjaan

3.1. Pembuatan Laporan Pendahuluan

Pada tahap ini Konsultan akan membuat Laporan Pendahuluan sesuai dengan KAK yang sudah ditentukan. Laporan Pendahuluan ini akan berisikan mengenai: uraian umum kegiatan, identifikasi pemahaman pekerjaan, metode pendekatan, alur pelaksanaan kegiatan, dan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan.

3.2. Pengumpulan data

Pada tahap ini konsultan mengumpulkan berbagai dokumen yang berisi data dan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. Dokumen yang diperlukan antara lain: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Blitar, Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Blitar 2021-2025, Rencana Strategis OPD, Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kota Blitar 2022, Arsitektur SPBE Nasional, dan dokumen lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan ini.

3.3. Pembuatan perangkat wawancara/ survei/ observasi

Berdasarkan berbagai dokumen yang sudah diperoleh maka akan dibuat perangkat yang diperlukan untuk pelaksanaan wawancara/ survei/ observasi. Perangkat ini diperlukan supaya pelaksanaan wawancara/ survei/ observasi dapat lebih terarah. Perangkat ini diperlukan juga sebagai media untuk mengetahui sejauh mana penerapan SPBE yang sudah dilaksanakan Pemerintah Kota Blitar dan target apa saja yang belum tercapai.

3.4. Pelaksanaan wawancara/ survei/ observasi

Berdasarkan perangkat yang sudah disusun maka akan dilaksanakan wawancara/ survei/ observasi kepada beberapa person Pemerintah Kota Blitar yang terkait dengan aspek pertanyaan.

3.5. Analisa penerapan SPBE saat ini

Berdasarkan berbagai dokumen yang diterima dan hasil wawancara/ survei/ observasi maka akan dapat diketahui sejauh mana pencapaian penerapan SPBE di Pemerintah Kota Blitar. Berdasarkan data yang sudah diperoleh tersebut akan dapat diketahui program atau kegiatan apa saja yang

tercantum dalam Peta Rencana SPBE yang sudah dilaksanakan, dalam progress pelaksanaan dan belum dilaksanakan.

3.6. Analisa kesenjangan

Pada tahap ini konsultan akan melaksanakan analisa kesenjangan antara capaian penerapan SPBE dengan target pencapaian penerapan SPBE Pemerintah Kota Blitar. Analisa kesenjangan ini dilaksanakan dengan cara membandingkan antara pencapaian SPBE dibandingkan dengan target pencapaian kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Blitar, Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Blitar 2021-2025, Rencana Strategis OPD, Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kota Blitar 2022, Arsitektur SPBE Nasional.

3.7. Penyusunan rekomendasi penerapan SPBE mendatang

Berdasarkan hasil analisa kesenjangan akan dapat diketahui kekurangan atau kelemahan dalam penerapan SPBE. Untuk mengatasi kekurangan atau kelemahan tersebut maka disusun rekomendasi penerapan SPBE mendatang. Rekomendasi berisi berbagai program kegiatan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar supaya berbagai target pencapaian penerapan SPBE bisa diwujudkan dalam periode waktu yang sudah ditentukan.

3.8. Revisi Peta Rencana SPBE

Pada tahap ini konsultan akan menyusun Revisi Peta Rencana SPBE. Revisi Peta Rencana SPBE yang dibuat mengacu pada rekomendasi penerapan SPBE yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Revisi Peta Rencana akan berisi :

- berbagai kegiatan penerapan SPBE yang sudah ada di Peta Rencana SPBE sebelumnya yang belum dilaksanakan dan dapat dilanjutkan
- berbagai kegiatan penerapan SPBE yang belum ada di Peta Rencana SPBE sebelumnya akan tetapi diperlukan berdasarkan rekomendasi yang sudah disusun
- kegiatan penerapan SPBE yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE dan sudah tidak relevan lagi maka akan dihapus dari kegiatan Peta Rencana SPBE

3.9. Pembuatan draft Peraturan Walikota tentang Percepatan Penerapan SPBE

Pada tahap ini maka konsultan akan menyusun draft Peraturan Walikota yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat supaya program percepatan penerapan SPBE dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh Perangkat Daerah yang terkait dengan program percepatan penerapan SPBE tersebut. Dengan adanya landasan hukum ini maka berbagai program percepatan penerapan SPBE ini juga akan dapat dianggarkan. Draft Peraturan Walikota ini akan memuat beberapa program kegiatan yang direkomendasikan dalam Peta Rencana SPBE.

3.10. Pembuatan Laporan Akhir

Pada tahap ini konsultan akan menyusun laporan akhir dengan kisi-kisi sesuai dengan pedoman yang sudah tercantum dalam KAK pekerjaan ini. Laporan Akhir terdiri dari beberapa bagian yaitu:

- Pendahuluan
- Landasan Teori

- Metodologi
- Analisa Kondisi Saat Ini
- Analisa Kesenjangan
- Rekomendasi Revisi Program Peningkatan SPBE
- Revisi Peta Rencana SPBE

3.11. Presentasi Hasil Pekerjaan

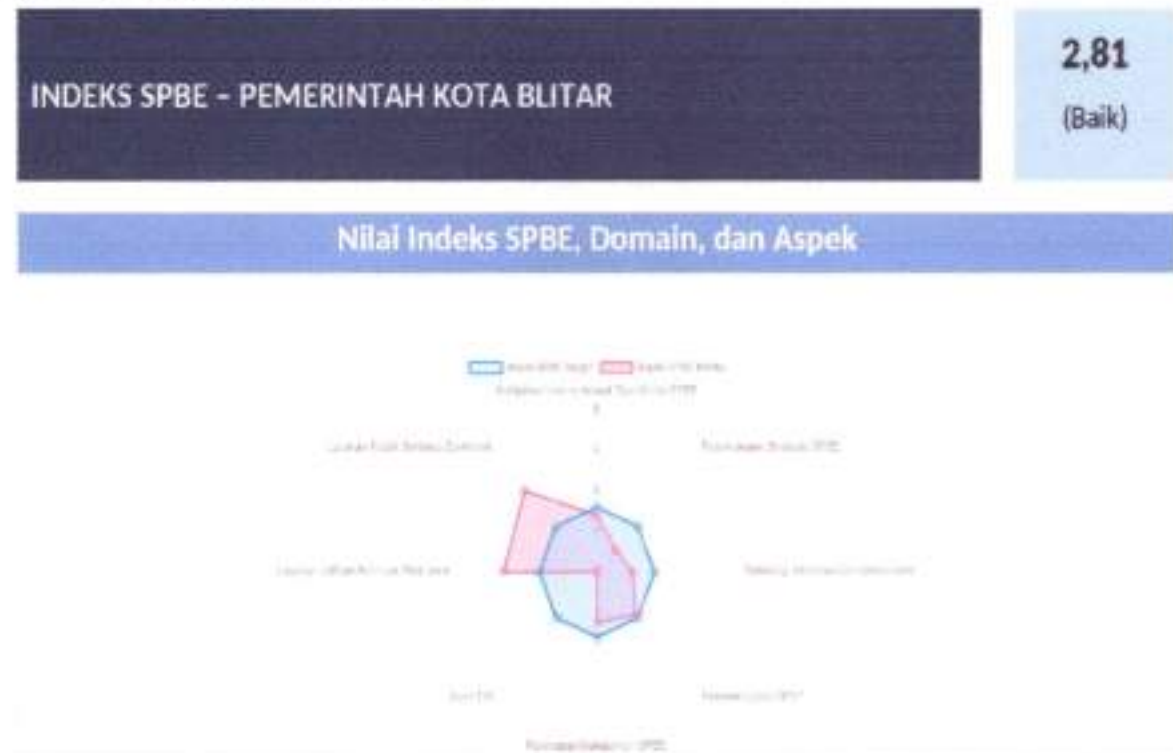
Setelah Laporan Akhir diselesaikan maka Konsultan akan melaksanakan presentasi hasil pekerjaan di hadapan Tim Pemerintah Kota Blitar yang ditugaskan untuk membahas hasil pekerjaan tersebut. Jika terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki maka konsultan akan segera memperbaikinya.

BAB 4 – ANALISA KONDISI SEKARANG

4.1. Indeks SPBE Pemerintah Kota Blitar

4.1.1. Indeks SPBE Tahun 2022

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE yang dilakukan Kementerian PANRB tahun 2022 maka Pemerintah Kota Blitar memiliki Indeks SPBE 2.81 (BAIK). Pada gambar 4.1. berikut ini dapat diketahui bahwa pada capaian aspek Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik dan aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik telah melampaui target nasional. Sedangkan pada capaian aspek Kebijakan Internal, Tata Kelola SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggaraan SPBE dan Audit TIK masih dibawah target nasional.



Gambar 4.1 Indeks SPBE Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022

Tabel 4.57 - Indeks SPBE Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022

Nama Indeks	Nilai 2022
SPBE	2,81
Domain Kebijakan SPBE	2,40
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,40
Domain Tata Kelola SPBE	2,00
Perencanaan Strategis SPBE	1,75
Teknologi informasi dan Komunikasi	2,00
Penyelenggara SPBE	2,50
Domain Manajemen SPBE	1,91
Penerapan Manajemen SPBE	2,25
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	3,69
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,60
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,83

4.1.2. Domain Kebijakan

Pada table 4.2. berikut ini dapat dilihat hasil penilaian Indeks SPBE Domain Kebijakan Pemerintah Kota Blitar tahun 2021 dan 2022 beserta penjelasan yang berkaitan dengan kebijakan SPBE saat ini yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 4.58 - Hasil Evaluasi SPBE 2021-2022 Domain Kebijakan

NO	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI	TINGKAT KEMATANGAN	
			2021	2022
1	Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan internal arsitektur SPBE Pemerintah Kota Blitar belum memuat seluruh unsur arsitektur SPBE. Kebijakan arsitektur SPBE dikatakan lengkap jika memuat tentang Arsitektur Proses Bisnis ; Arsitektur Data; Arsitektur Infrastruktur ; Arsitektur Aplikasi ; Arsitektur Keamanan ; dan Arsitektur Layanan	2	2
2	Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan internal peta rencana SPBE belum memuat seluruh unsur peta rencana SPBE yang terdiri dari peta rencana layanan SPBE, peta rencana manajemen SPBE, peta rencana tata kelola SPBE, peta rencana aplikasi SPBE, peta rencana infrastruktur SPBE, peta rencana keamanan SPBE, peta rencana audit TIK,	2	2

NO	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI	TINGKAT KEMATANGAN	
			2021	2022
3	Kebijakan Internal Manajemen Data	Kebijakan internal Manajemen Data Pemerintah Kota Blitar telah mengatur sebagian proses ruang lingkup Manajemen Data. Proses penerapan ruang lingkup Manajemen Data SPBE dikatakan lengkap jika memuat pengelolaan Arsitektur Data, Data Induk , Data Referensi , Basis Data, Kualitas Data dan Interoperabilitas Data.	2	3
4	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	Pemerintah Kota Blitar belum memiliki kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan aplikasi SPBE.	2	1
5	Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	Kebijakan internal terkait Layanan Pusat data telah mengatur penggunaan pada seluruh perangkat daerah.	3	3
6	Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Blitar sudah memiliki kebijakan internal pengoperasian Layanan jaringan Intra yang sudah ditetapkan dan penggunaannya sudah pada seluruh perangkat daerah	3	3
7	Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Blitar sudah memiliki Pengaturan Sistem Penghubung Layanan yang diterapkan pada seluruh Perangkat Daerah	2	3
8	Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan kebijakan mengenai Manajemen Keamanan Informasi namun belum mengatur secara lengkap cakupan Manajemen Keamanan Informasi. Cakupan manajemen keamanan informasi dikatakan lengkap jika mengatur tentang penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan	3	2

NO	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI	TINGKAT KEMATANGAN	
			2021	2022
		pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi.		
9	Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pemerintah Kota Blitar sudah menetapkan kebijakan mengenai Audit TIK namun belum lengkap mengatur tentang cakupan ruang lingkup Audit TIK	2	2
10	Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan kebijakan internal mencakup pengaturan tugas tugas Tim Koordinasi SPBE yang diterapkan di semua perangkat daerah	3	3

4.1.2. Domain Tata Kelola

Pada table 4.3. berikut ini dapat dilihat hasil penilaian Indeks SPBE Domain Tata Kelola Pemerintah Kota Blitar tahun 2021 dan 2022 beserta penjelasan penerapan tata Kelola SPBE saat ini yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 4.59 - Hasil Evaluasi SPBE 2021-2022 Domain Tata Kelola

NO	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI	TINGKAT KEMATANGAN	
			2021	2022
11	Kematangan Arsitektur SPBE IPPD	Pemerintah Kota Blitar belum memiliki dokumen Arsitektur SPBE yang sudah dilegalkan dalam bentuk SK atau Peraturan Walikota	2	1
12	Kematangan Peta Rencana SPBE IPPD	Pemerintah Kota Blitar sudah memiliki dokumen Peta Rencana SPBE yang mencakup keseluruhan muatan Peta Rencana SPBE	3	3
13	Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Kota Blitar belum tertuang dalam RKA/DPA	2	1
14	Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	Pemerintah Kota Blitar sudah memiliki dokumen Proses Bisnis sesuai pedoman yang berlaku	5	2
15	Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	Pemerintah Kota Blitar sudah melakukan proses pembangunan / pengembangan Aplikasi SPBE	3	1

NO	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI	TINGKAT KEMATANGAN	
			2021	2022
		namun belum memenuhi siklus pembangunan aplikasi (ad hoc)		
16	Kematangan Layanan Pusat Data	Pemerintah Kota Blitar sudah memiliki layanan pusat data akan tetapi baru dimanfaatkan oleh sebagian perangkat daerah	3	2
17	Kematangan Layanan Jaringan Intra IPPD	Pemerintah Kota Blitar telah menerapkan pengoperasian Jaringan Intra pada seluruh perangkat daerah	3	3
18	Kematangan Sistem Hubung Layanan IPPD	Pemerintah Kota Blitar telah menerapkan Sistem Penghubung Layanan pada sebagian perangkat daerah	3	2
19	Kematangan Tim Koordinasi SPBE IPPD	Pemerintah Kota Blitar sudah memiliki Tim Koordinasi SPBE yang ditetapkan dan mencakup tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE namun belum dilaksanakan seluruhnya	4	2
20	Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan dan membentuk tim Kolaborasi Penerapan SPBE formal, serta sudah melakukan pertemuan secara rutin namun masih dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada sebagian perangkat daerah.	3	3

4.1.3. Domain Manajemen

Pada table berikut ini dapat dilihat hasil penilaian Indeks SPBE Domain Manajemen Pemerintah Kota Blitar tahun 2021 dan 2022 beserta penjelasan terkait penerapan manajemen SPBE saat ini di Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 4.60 - Hasil Evaluasi SPBE 2021-2022 Domain Manajemen

NO	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI	TINGKAT KEMATANGAN	
			2021	2022
21	Penerapan Manajemen Risiko SPBE	Pemerintah Kota Blitar telah menerapkan Manajemen Risiko SPBE sesuai dengan pedoman Manajemen Risiko SPBE yang berlaku	3	3

NO	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI	TINGKAT KEMATANGAN	
			2021	2022
22	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Pemerintah Kota Blitar sudah terdapat pengendalian Keamanan Informasi yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah	2	3
23	Penerapan Manajemen Data	Pemerintah Kota Blitar sudah menerapkan kegiatan Manajemen Data sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku	3	2
24	Penerapan Manajemen Aset TIK	Pemerintah Kota Blitar sudah menerapkan kegiatan Manajemen Aset TIK sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku	2	2
25	Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Blitar sudah menerapkan kegiatan Penerapan Kompetensi SDM SPBE sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE, namun belum memenuhi seluruh kompetensi SDM SPBE. Penerapan Kompetensi SDM SPBE dilaksanakan tanpa mengacu pedoman yang berlaku	2	2
26	Penerapan Manajemen Pengetahuan	Pemerintah Kota Blitar belum atau sudah menerapkan kegiatan Manajemen Pengetahuan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana	3	1
27	Penerapan Manajemen Perubahan	Pemerintah Kota Blitar sudah menerapkan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku dan belum	2	2

NO	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI	TINGKAT KEMATANGAN	
			2021	2022
		dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah		
28	Penerapan Manajemen Layanan SPBE	Pemerintah Kota Blitar telah menerapkan Manajemen Layanan SPBE yang sudah mengacu pedoman yang memuat seluruh proses Manajemen Layanan mulai dari pelayanan Pengguna SPBE dan pengoperasian Layanan SPBE	2	3
29	Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	Pemerintah Kota Blitar belum atau sudah melakukan Audit Infrastruktur tanpa program kegiatan yang terencana	2	1
30	Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	Pemerintah Kota Blitar belum atau sudah melakukan Audit Aplikasi tanpa program kegiatan yang terencana	2	1
31	Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	Pemerintah Kota Blitar belum atau sudah melakukan Audit Aplikasi tanpa program kegiatan yang terencana	3	1

4.1.4. Domain Layanan

Pada table berikut ini dapat dilihat hasil penilaian Indeks SPBE Domain Layanan Pemerintah Kota Blitar tahun 2021 dan 2022 beserta penjelasan layanan SPBE yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Kota Blitar saat ini.

Tabel 4.61 - Hasil Evaluasi SPBE 2021-2022 Domain Layanan

NO	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI	TINGKAT KEMATANGAN	
			2021	2022
32	Layanan Perencanaan	Pemerintah Kota Blitar sudah memiliki layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya	4	4
33	Layanan Penganggaran	Pemerintah Kota Blitar sudah memiliki layanan penganggaran Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya	4	4
34	Layanan Keuangan	Pemerintah Kota Blitar sudah memiliki layanan Keuangan	4	4

NO	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI	TINGKAT KEMATANGAN	
			2021	2022
		Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya		
35	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Pemerintah Kota Blitar sudah memiliki layanan Pengadaan Barang /Jasa Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya	4	4
36	Layanan Kepegawaian	Pemerintah Kota Blitar sudah memiliki layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE	4	4
37	Layanan Kearsipan Dinamis	Pemerintah Kota Blitar sudah memiliki layanan Kearsipan Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya	4	4
38	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Pemerintah Kota Blitar sudah memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi Pengelolaan BMN/BMD dan sistem dapat merespon pengguna dengan mekanisme persetujuan dan validasi penghapusan BMN/BMD	3	3
39	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	Pemerintah Kota Blitar sudah memiliki Layanan pengawasan internal Pemerintah Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi pengaduan dan sistem dapat merespon pengguna dengan mekanisme persetujuan dan validasi pengaduan	3	3
40	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Pemerintah Kota Blitar sudah memiliki Layanan Akuntabilitas Kinerja Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan dimana pengguna dapat mengunduh dan	3	3

NO	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI	TINGKAT KEMATANGAN	
			2021	2022
		mengunggah informasi Akuntabilitas kinerja Organisasi dan sistem dapat merespon pengguna dengan mekanisme persetujuan dan validasi		
41	Layanan Kinerja Pegawai	Pemerintah Kota Blitar sudah memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi kinerja pegawai dan sistem dapat merespon pengguna dengan mekanisme persetujuan dan validasi hasil kinerja pegawai	3	3
42	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	Pemerintah Kota Blitar sudah memiliki layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya	4	4
43	Layanan Data Terbuka	Pemerintah Kota Blitar sudah memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi data terbuka dan sistem dapat merespon pengguna dengan mekanisme persetujuan dan validasi data terbuka	3	3
44	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Pemerintah Kota Blitar sudah memiliki Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya	4	4
45	Layanan Publik Sektor 1	Pemerintah Kota Blitar sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya	4	4
46	Layanan Publik Sektor 2	Pemerintah Kota Blitar sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dapat	4	4

NO	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI	TINGKAT KEMATANGAN	
			2021	2022
		berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya		
47	Layanan Publik Sektor 3	Pemerintah Kota Blitar sudah memiliki Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya	5	4

4.2. Kebijakan Pelaksanaan SPBE Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar

Pemerintah Kota Blitar telah memiliki Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Peraturan Walikota terdiri dari:

- **BAB I - KETENTUAN UMUM**

Bab I terdiri dari :

- Bagian Kesatu : Pengertian Dan Istilah (Pasal 1)
- Bagian Kedua terdiri dari :
 - Azas (Pasal 2)
 - Maksud (Pasal 3)
 - Tujuan (Pasal 4) Dan
 - Ruang Lingkup (Pasal 5)

- **BAB II – SPBE**

Bab II terdiri dari :

- Bagian Kesatu : Umum (Pasal 6)
- Bagian Kedua : Perencanaan (Pasal 7-8)
- Bagian Ketiga : Kebijakan (Pasal 9-11)
- Bagian Keempat : Kelembagaan (Pasal 12)
- Bagian Kelima : Sumber Daya Manusia (Pasal 13-16)
- Bagian Keenam : Sistem Informasi
 - Paragraf 1 : Umum (Pasal 17)
 - Paragraf 2 : Layanan SPBE (Pasal 18)
 - Paragraf 3 : Data dan Informasi (Pasal 19-21)
 - Paragraf 4 : Aplikasi Pengolah Data Dalam SPBE (Pasal 22-26)
 - Paragraf 4 : Situs Resmi dan Alamat Surat Elektronik Resmi (Pasal 27)
 - Paragraf 5 : Layanan Pemberian Nama Domain Resmi Pemerintah Daerah (Pasal 28)

- Paragraf 6 : Layanan Tata Naskah Dinas Elektronik (Pasal 29-30)
- Paragraf 6 : Layanan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Berbasis Elektronik (Pasal 31-32)
- Paragraf 7 : Layanan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan dan Penganggaran (Pasal 33-34)
- Paragraf 7 : Layanan Sistem Informasi Manajemen Keuangan (Pasal 34-35)
- Paragraf 8 : Layanan Sistem Informasi Manajemen Kinerja berbasis Elektronik (Pasal 36-37)
- Paragraf 9 : Sistem Informasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (Pasal 38)
- Paragraf 10 : Layanan Sistem Informasi Pengaduan Publik (Pasal 39)
- Paragraf 11 : Layanan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara Elektronik (Pasal 40)
- Paragraf 12 : Layanan Sistem Informasi Whistle Blowing System (WBS) secara Elektronik (Pasal 41)
- Bagian Ketujuh : Infrastruktur (Pasal 42-46)
- Bagian Kedelapan : Keamanan Infrastruktur (Pasal 47-50)
- Bagian Kesembilan : Pusat Pemulihan Bencana (Pasal 51-52)
- Bagian Kesepuluh : Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (Pasal 53)
- BAB IV - PENYELENGGARAAN SISTEM PENGAMANAN INFORMASI
 - Bagian Kesatu : Umum (Pasal 54)
 - Bagian Kedua : Pengamanan Sistem Elektronik (Pasal 55-56)
 - Bagian Ketiga : Pengamanan Transaksi Elektronik (Pasal 57)
- BAB V - PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK (Pasal 58)
- BAB VI - PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN (Pasal 59)
- BAB VII - KETENTUAN PENUTUP (Pasal 60)

Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut dijumpai beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki yaitu:

- Nomer Bab melompat karena tidak ada Bab III
- Terjadi perulangan paragraf seperti paragraf 4, paragraf 6 dan paragraf 7
- Penjelasan pasal demi pasal akan lebih baik jika mengacu pada domain evaluasi SPBE nasional yaitu: kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan
- Perlu beberapa pasal tambahan untuk mendukung peningkatan Indeks SPBE Kota Blitar.

4.3. RPJMD Kota Blitar 2021-2026

4.3.1. Visi Misi Kota Blitar

4.3.1.1. Visi Kota Blitar

Visi RPJMD Kota Blitar 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermartabat”

Penjelasan kalimat visi tersebut yaitu:

KOTA BLITAR

KEREN:

Terwujudnya Kota Blitar yang dalam realitas KEberagaman tetap dalam kondisi RELigius dan Nasionalis, rukun, aman dan kondusif, masyarakatnya sejahtera jasmani dan rohani.

UNGGUL:

Terwujudnya Sumber Daya Manusia Kota Blitar yang berkualitas, berbudi pekerti luhur, religius, sehat, dijiwai nilai-nilai Pancasila sehingga terbentuk manusia paripurna yang dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

MAKMUR:

Suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi, infrastruktur dan social masyarakat sehingga Kota Blitar menjadi Kota yang sejahtera, berwawasan lingkungan hidup dan nyaman untuk ditinggali.

BERMARTABAT:

Terwujudnya perikehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, norma dan budaya yang berlaku, serta terbukanya ruang masyarakat untuk mengoptimalkan segenap daya cipta dan kreativitas didukung tata pemerintahan yang bersih, transparan, berjiwa melayani dan profesional.

Berdasarkan rumusan di atas, maka terdapat empat poin visi yaitu Keren, Unggul, Makmur, dan Bermartabat. Keempat poin visi ini bersifat luas yang mencakup berbagai isu besar yaitu peningkatan kualitas tata kehidupan, kualitas dan daya saing sumber daya manusia, penguatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat ditopang oleh penguatan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan.

4.3.1.2. Misi Kota Blitar

Berdasarkan visi “Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN: Unggul, Makmur, Bermartabat”, terdapat lima misi yang akan dilaksanakan, yaitu:

MISI 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat religius yang mengedepankan nilai toleransi dan berwawasan kebangsaan. Spirit perjuangan Bung Karno, Supriyadi dan Aryo Blitar merupakan potensi besar

sekaligus modal untuk terus menggelorakan semangat patriotisme dan nasionalisme masyarakat Kota Blitar. Berkepribadian dalam kebudayaan diambil dari diktum Tri Sakti Bung Karno dengan harapan masyarakat Kota Blitar memiliki kecintaan terhadap budaya asli Indonesia dan mempraktekkan nilai-nilai kearifan lokal. Misi ini juga mengarahkan Kota Blitar sebagai kota tangguh bencana sekaligus kota yang menempatkan posisi perempuan setara, sejajar, saling melengkapi dan bermitra dengan laki-laki. Dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), Misi 1 memuat Pilar Pembangunan Sosial dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

MISI 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter

Misi ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan Misi 2 memuat Pilar Pembangunan Sosial. Keren yang dimaksud di dalam misi ini merupakan kependekan dari Keberagaman, Religius, dan Nasionalis. Arah pembangunan sumber daya manusia ditujukan pada pembangunan manusia paripurna pada lima dimensi: pendidikan, kesehatan, religiusitas, penguatan nasionalisme, dan peningkatan daya saing. Manusia yang dihasilkan tidak hanya memiliki kemampuan intelektual yang unggul, tetapi juga sehat, religius, kreatif, dan memiliki jiwa nasionalisme. Sementara upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diwujudkan melalui perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan kesehatan dengan dipadu dukungan kesadaran masyarakat.

MISI 3: Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital

Misi ini diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang berorientasi pada kemandirian ekonomi daerah. Peningkatan pembangunan ekonomi daerah dilakukan dengan menggerakkan seluruh sektor, potensi, dan sumber daya. Orientasi ekonomi daerah diarahkan pada pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital, optimalisasi perdagangan dan perindustrian, penguatan sektor pariwisata baik pariwisata sejarah kebangsaan, kampung tematik, maupun model pariwisata lain. Peningkatan kemandirian ekonomi juga ditempuh melalui upaya optimalisasi ketahanan pangan dan pertanian termasuk pengembangan urban farming, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, serta memberikan berbagai kemudahan dalam penanaman modal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Misi 3 secara keseluruhan memuat Pilar Pembangunan Ekonomi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

MISI 4: Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

Misi ini diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan tetap menjaga keserasian dengan tata ruang secara berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur baik bina marga, cipta karya, maupun sumber daya air diarahkan tidak semata-mata mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan, tetapi harus tetap menjaga kelestarian lingkungan. Misi ini diarahkan pada upaya menjaga

kualitas dan kelestarian lingkungan hidup baik air, udara, tanah dan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, Misi 4 dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan memuat Pilar Pembangunan Ekonomi dan Pilar Pembangunan Lingkungan.

MISI 5: Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Misi ini diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang baik, bersih, profesional dengan pelayanan publik memenuhi harapan pengguna layanan. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan termuat dalam misi ini. Tata kelola pemerintahan mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan evaluasi kinerja diarahkan pada tata kelola yang akuntabel, transparan, partisipatif, berjiwa melayani, berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, serta adaptif terhadap perubahan.

4.3.2. Tujuan dan Sasaran

Misi 1 berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan tata kehidupan yang religius, nasionalis, setara gender, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Secara khusus misi ini fokus pada upaya menciptakan menata kehidupan sosial masyarakat. Misi ini diturunkan ke dalam dua tujuan dan empat sasaran, yaitu:

- Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis
 - Meningkatnya kerukunan antar umat beragama;
 - Meningkatnya ketertiban umum;
 - Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Kelestarian Cagar Budaya.
- Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak
 - Menurunnya kesenjangan gender.

Misi 2 fokus pada upaya meningkatkan sumber daya manusia yang keren, berdaya saing, sehat jasmani-rohani, cerdas dan berkarakter. Secara spesifik misi menasar perbaikan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Misi ini diperinci ke dalam satu tujuan dan lima sasaran, yaitu:

- Meningkatnya Derajat Kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
 - Meningkatnya kualitas layanan pendidikan;
 - Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - Meningkatnya prestasi olahraga dan kontribusi pemuda dalam pembangunan daerah;
 - Meningkatnya pengendalian penduduk;
 - Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat.

Misi 3, kondisi yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan yaitu berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis digital menjadi spirit pembangunan ekonomi pada misi tiga. Misi ini diturunkan ke dalam dua tujuan dan sembilan sasaran, yaitu:

- Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
 - Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin;
 - Meningkatnya ketahanan pangan daerah;
 - Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat;
- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
 - Meningkatnya nilai investasi daerah;
 - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian;
 - Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah;
 - Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan.

Misi 4 fokus pada upaya meningkatkan infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan hidup dan berkeadilan. Kata kunci yang diusung pada misi ini berupa wawasan lingkungan hidup dan berkeadilan sebagai spirit peningkatan kualitas infrastruktur. Misi ini kemudian diturunkan ke dalam tiga tujuan dan delapan sasaran, yaitu:

- Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah
 - Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum;
 - Meningkatnya kualitas perhubungan.
- Meningkatkan Kelayakhunian
 - Meningkatnya akses rumah layak huni;
 - Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman;
 - Meningkatnya kualitas penataan ruang.
- Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
 - Meningkatnya kualitas air;
 - Meningkatnya kualitas udara;
 - Meningkatnya kualitas lahan;
 - Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3;
 - Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana.

Misi 5 berkaitan dengan upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi. Perbaikan tata kelola pemerintahan mulai akan diarahkan pada penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Misi ini akan dijabarkan ke dalam satu tujuan dan enam sasaran, yaitu:

- Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi berbasis Teknologi Informasi
 - Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah;
 - Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah;
 - Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
 - Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - Meningkatnya Profesionalitas ASN;
 - Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah.

4.3.3. Strategi dan Arah kebijakan

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Blitar maka diperlukan Strategi dan arah kebijakan Kota Blitar tahun 2021-2026 seperti yang dirinci pada tabel berikut ini. Pada table 4.6 diuraikan mengenai strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kota Blitar untuk mendukung pencapaian misi 1 Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 4.62 – Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Mendukung Misi 1

Visi: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Memperkuat kelembagaan kerukunan umat beragama
			Penguatan anti radikalisme
			Penguatan wawasan kebangsaan
			Peningkatan nilai religiusitas
			Peningkatan pencegahan gangguan ketahanan sosial
	Meningkatnya ketertiban umum	Peningkatan penegakan Perda	Peningkatan pencegahan, penanganan, dan penyelesaian pelanggaran Perda
	Meningkatnya Pemajuan	Peningkatan pelestarian nilai budaya	Peningkatan nilai, tradisi, dan warisan kekayaan budaya

Visi: KOTA BLITAR HEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Kebudayaan dan		
	Kelestarian Cagar Budaya	Peningkatan pelestarian cagar budaya	Peningkatan identifikasi dan pengelolaan cagar budaya
Meningkatnya Kesenjangan Gender, Perlindungan Perempuan, dan Anak	Menurunnya kesenjangan gender	Peningkatan implementasi kebijakan responsif gender	Penyusunan payung hukum tentang PUG
			Peningkatan kapasitas perempuan
			Peningkatan peluang partisipasi perempuan di ranah publik
			Peningkatan peluang partisipasi perempuan di sektor pekerjaan formal
		Peningkatan kualitas pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan	Penguatan kelembagaan dan fasilitasi perlindungan perempuan
		Peningkatan pemenuhan hak-hak anak	Peningkatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat

Pada table 4.7 diuraikan mengenai strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kota Blitar untuk mendukung pencapaian misi 2 Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 4.63 – Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Mendukung Misi 2

Visi: KOTA BLITAR HEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya derajat	Meningkatnya kualitas		Optimalisasi pengelolaan perizinan satuan

Visi: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat			
Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	layanan pendidikan	Peningkatan tata kelola pendidikan	pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF)
			Optimalisasi pengelolaan data
		Peningkatan kualitas pendidikan	Penanaman nilai kebhinneka tunggal ikaan, religiusitas dan nasionalisme sebagai muatan lokal SD dan SMP
			Fasilitasi peningkatan mutu layanan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF)
			Peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas
			Fasilitasi peningkatan kualitas siswa
			Peningkatan pendidikan karakter di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat
		Peningkatan akses pendidikan	Jaminan fasilitasi layanan pendidikan berkesinambungan
			Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam peningkatan akses pendidikan
			Peningkatan sekolah inklusif
			Pemerataan akses pendidikan yang responsif gender
			Peningkatan ketersediaan tenaga

Visi: ROTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat			
Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pendidik dan tenaga kependidikan
			Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas kesehatan ibu	peningkatan penanganan komplikasi saat kehamilan
			peningkatan penanganan komplikasi saat dan pasca persalinan
			peningkatan kunjungan K1 dan K4
		Peningkatan kualitas kesehatan bayi dan balita	Peningkatan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
			Penurunan bayi lahir dengan Berat Badan Bawah Garis Merah (BBBGM)
			Penurunan bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
		Peningkatan penanganan stunting	peningkatan pengetahuan tentang gizi seimbang
			Pemenuhan gizi ibu hamil
			Peningkatan gizi balita
		Peningkatan pelayanan kesehatan	Penguatan fasilitas pelayanan kesehatan
			Peningkatan sistem pelayanan rujukan
			Pemenuhan kualitas standar pelayanan kesehatan di rumah sakit

Visi: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat			
Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan layanan kegawatdaruratan
			Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan
			Pengembangan layanan <i>home care</i>
		Peningkatan pencegahan penyakit menular dan tidak menular	Optimalisasi edukasi masyarakat tentang penyakit menular dan tidak menular
			Peningkatan pengetahuan tentang PHBS
	Meningkatnya prestasi olahraga dan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah	Pengembangan organisasi kepemudaan	Optimalisasi pembinaan terhadap organisasi kepemudaan
			Peningkatan fasilitasi organisasi kepemudaan
			Peningkatan minat pemuda terhadap organisasi
		Peningkatan prestasi olahraga	Pembinaan klub olahraga
			Pembinaan atlet
			peningkatan promosi olahraga
			Peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga
			Pemerataan akses fasilitas olahraga
		Peningkatan olahraga rekreasi	Peningkatan fasilitasi olahraga rekreasi
		Peningkatan akses olahraga bagi penyandang disabilitas	Peningkatan fasilitasi olahraga disabilitas

Visi: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya pengendalian penduduk	Optimalisasi penyelenggaraan program pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan keluarga sejahtera	Peningkatan partisipasi peserta KB aktif
			Pendataan dan fasilitasi Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB
			Peningkatan kerjasama antar <i>Stakeholders</i> dalam pengendalian usia perkawinan di bawah umur (15-19 tahun)
			Optimalisasi peningkatan keluarga sejahtera
	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Peningkatan kegemaran membaca dan literasi	Perumusan dan implemetasi regulasi daerah bidang Perpustakaan
			Peningkatan fasilitas dan pelayanan perpustakaan
			Pengembangan taman baca masyarakat (TBM)
			Peningkatan layanan perpustakaan berbasis digital
			Peningkatan koleksi buku perpustakaan

Pada table 4.8 diuraikan mengenai strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kota Blitar untuk mendukung pencapaian misi 3 Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 4.64 – Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Mendukung Misi 3

Visi: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya tingkat	Menurunnya ketimpangan antar	Peningkatan kesejahteraan	Optimalisasi pelatihan dan pemenuhan kebutuhan dasar

Visi: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
kesejahteraan masyarakat	penduduk miskin	dan pemberdayaan PMKS	Pemberian program sosial ekonomi bagi warga miskin dan rentan miskin.
	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Peningkatan pembangunan bidang ketahanan pangan	Optimalisasi produktivitas sumber daya hewani dan nabati sebagai sumber pangan
			Optimalisasi pencegahan masuk dan keluarnya pangan mengandung bahan berbahaya
	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Peningkatan upaya rehabilitasi dan jaminan sosial	Peningkatan PMKS yang direhabilitasi, diberdayakan, dan menerima jaminan sosial
			Peningkatan validasi data PMKS
		Peningkatan manajemen pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Peningkatan sistem keamanan dan kebersihan TMP
		Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Peningkatan pendampingan pekerja sosial
		Peningkatan kesempatan kerja	Peningkatan kapasitas PSKS
			Peningkatan penggunaan teknologi dalam pencarian dan penempatan kerja
	Menurunnya tingkat pengangguran	Peningkatan penyelesaian konflik	Peningkatan kesesuaian keterampilan pencari kerja dengan permintaan pasar tenaga kerja
			Optimalisasi mediasi konflik industrial

Visi: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		industrial	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya nilai investasi daerah	Peningkatan kondusivitas iklim investasi	Optimalisasi identifikasi potensi investasi
			Peningkatan dukungan kelembagaan dalam peningkatan minat investasi
			Peningkatan promosi investasi
			Peningkatan pengelolaan data potensi investasi yang terintegrasi dengan sistem tata ruang
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian	Peningkatan volume perdagangan besar dan eceran	Optimalisasi metode pemasaran barang berbasis digital
			Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana berbasis digital
			Optimalisasi pengawasan perdagangan
			Optimalisasi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
		Peningkatan nilai produksi industri kecil dan menengah (IKM)	Peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM
			Peningkatan pemasaran hasil industri
			Peningkatan nilai produksi IKM sebagai barang ekspor
		Peningkatan Perencanaan dan Fasilitasi Kegiatan Industri	Pemantapan perencanaan industri/ Inisiasi Rencana Pembangunan Industri (RIP) Kota
			Peningkatan pengelolaan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah

Visi: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan destinasi pariwisata	Optimalisasi pengembangan kawasan pariwisata yang sudah ada
			Optimalisasi pengembangan kawasan pariwisata baru
		Pengembangan SDM Pariwisata	Pengembangan kompetensi untuk insan pariwisata
		Pemasaran pariwisata baru	Pemasaran pariwisata berbasis digital
		Pengembangan sub sektor ekonomi kreatif	Pembinaan pelaku ekonomi kreatif dan menumbuhkan pelaku ekonomi kreatif baru
			Optimalisasi pengembangan sub sektor ekonomi kreatif unggulan
	Meningkatnya nilai tambah Bruto Koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah	Pengembangan Usaha Mikro	Optimalisasi pengembangan Usaha Mikro
			Inisiasi pemasaran Usaha Mikro berbasis digital
		Pengembangan koperasi	Optimalisasi pengembangan koperasi
	Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	Peningkatan produksi tanaman pangan dan tanaman hortikultura	Peningkatan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
			Peningkatan pengendalian OPT
			Peningkatan ketersediaan sarana pertanian
			Peningkatan kapasitas SDM petani
			Penerapan metode budidaya berorientasi agribisnis

Visi: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan sarana dan prasarana produksi peternakan	Peningkatan pemasaran produk tanaman pangan secara digital
			Peningkatan produksi hasil ternak
			Peningkatan penanganan limbah ternak di tingkat peternak
			Peningkatan pendampingan unit usaha peternak dan hasil hewan ternak dalam proses sertifikasi halal dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
		Peningkatan produksi dan pemasaran produk perikanan budidaya	Peningkatan penanganan penyakit hewan ternak
			Peningkatan kapasitas SDM pembudidaya perikanan
			Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berbasis digital
			Peningkatan pemenuhan benih ikan

Pada table 4.9 diuraikan mengenai strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kota Blitar untuk mendukung pencapaian misi 4 Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 4.65 – Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Mendukung Misi 4

Visi: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan			
Hidup dan Berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Peningkatan ketersediaan dan kualitas	Optimalisasi pemeliharaan jalan dan utilitasnya

Visi: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan			
Hidup dan Berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
infrastruktur daerah	pekerjaan umum	jalan dan jembatan	Peningkatan ketersediaan jalan dan utilitasnya
			Optimalisasi rehabilitasi dan rekonstruksi jalan dan utilitasnya
			Peningkatan ketersediaan jembatan
			Optimalisasi pemeliharaan jembatan
			Optimalisasi rehabilitasi jembatan
		Peningkatan ketersediaan dan kualitas jaringan irigasi	Peningkatan ketersediaan jaringan irigasi
			Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan pengaturan debit air untuk mencegah banjir
	Meningkatnya kualitas perhubungan	Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana perhubungan	Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi terminal
			Peningkatan ketersediaan fasilitas terminal memadai
		Peningkatan ketersediaan perlengkapan dan keselamatan jalan yang memadai	Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan
			Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan
		Optimalisasi pengelolaan angkutan umum dan penertiban lalu lintas	Optimalisasi layanan angkutan sekolah
			Pengembangan layanan uji KIR berbasis IT
			Optimalisasi pengelolaan parkir

Visi: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan			
Hidup dan Berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas
			Penertiban pelanggaran lalu lintas
Meningkatnya kelayakhunian	Meningkatnya akses rumah layak huni	Peningkatan akses rumah layak huni	Peningkatan kualitas rumah tidak layak/rusak
			Peningkatan kualitas rumah tidak layak/rusak di kawasan permukiman kumuh
			Penyediaan rumah bagi korban relokasi program pemerintah
			Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana
			Peningkatan pemberian rekomendasi pengembangan perumahan
			Peningkatan ketersediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Peningkatan ketersediaan jalan lingkungan memadai	Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan di kawasan permukiman
			Peningkatan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan di kawasan perumahan
		Peningkatan ketersediaan dan kualitas drainase	Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi drainase lingkungan di kawasan perumahan
			Optimalisasi pemeliharaan dan

Visi: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan			
Hidup dan Berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			rehabilitasi drainase perkotaan
			Pengembangan sistem drainase perkotaan dan pengaturan debit air untuk pencegahan banjir
			Normalisasi fungsi sungai dan pengendalian banjir
		Optimalisasi pengelolaan air limbah	Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL
		Peningkatan akses air minum	optimalisasi pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Peningkatan ketersediaan dan	Pengembangan/kajian standarisasi pemeliharaan bangunan gedung
		kualitas bangunan gedung	Peningkatan ketersediaan bangunan gedung
		Optimalisasi penataan bangunan dan lingkungan	Peningkatan ketersediaan fasilitas umum skala kota
			Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas umum skala kota
		Peningkatan kualitas jasa konstruksi	Peningkatan kapasitas tenaga konstruksi
			Peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi
			Peningkatan pengelolaan jasa konstruksi melalui sistem informasi
		Peningkatan kualitas	Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi tata ruang dan perwujudan pola ruang

Visi: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan			
Hidup dan Berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		perencanaan tata ruang	pada kawasan lindung dan kawasan budidaya.
			Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang sistem informasi tata ruang
			Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang
		Pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan tindak lanjut terhadap penyimpangan peraturan tata ruang
		Optimalisasi penyelesaian kasus pertanahan	Fasilitasi sengkata tanah garapan
			Peningkatan koordinasi penggunaan tanah dan pencatatan aset pemerintah kota
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air	Peningkatan pengendalian pencemaran air	Peningkatan pengawasan sumber-sumber pencemaran air
			Optimalisasi layanan pengaduan lingkungan hidup
		Peningkatan kualitas perencanaan, pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup	Peningkatan pembinaan pelaku usaha tentang lingkungan hidup
			Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup
	Meningkatnya kualitas udara	Optimalisasi pengendalian pencemaran udara	Peningkatan peran masyarakat dalam pengurangan gas emisi rumah kaca
			Optimalisasi penggunaan energi alternatif
			Optimalisasi pemantauan kualitas udara

Visi KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan			
Hidup dan Berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya kualitas lahan	Optimalisasi ketersediaan dan kualitas RTH	Peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan ketersediaan dan kualitas RTH
	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	Optimalisasi pengelolaan sampah	Optimalisasi layanan sampah perkotaan
			Peningkatan pengelolaan sampah 3R
			Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan khususnya mengupayakan terwujudnya TPA Regional
		Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah
			Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup
		Optimalisasi pengelolaan limbah B3	Pemberian penghargaan masyarakat peduli lingkungan
			Peningkatan pembinaan pelaku usaha dan kegiatan penghasil limbah B3
	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Peningkatan sarana prasarana pendukung penanganan bencana
			Peningkatan sarana prasarana pendukung penanganan bencana
			Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana
			Peningkatan kelurahan tangguh bencana

Visi: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan			
Hidup dan Berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Optimalisasi koordinasi penanganan bencana
			Pemenuhan prasyarat ketahanan daerah
		Peningkatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Peningkatan personil PMK yang bersertifikat
			Peningkatan sarana pemadam kebakaran

Pada table 4.10 diuraikan mengenai strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kota Blitar untuk mendukung pencapaian misi 5 Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 4.66 – Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Mendukung Misi 5

Visi: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis			
Teknologi Informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan daerah
			Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan daerah
		Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Peningkatan integrasi sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
			Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan daerah
			Peningkatan kualitas data dalam mendukung kinerja perencanaan
		Penguatan kelembagaan berbasis kinerja	Penguatan pendampingan dan pembinaan PD dalam implementasi SAKIP

Visi: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan
			Peningkatan validasi data pembangunan daerah
		Peningkatan efektifitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah	Penyusunan peta kebijakan daerah
			Peningkatan fasilitasi dan koordinasi pengendalian kebijakan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
			Fasilitasi pemenuhan kualitas produk hukum daerah
			Peningkatan fasilitasi dan koordinasi pengendalian kebijakan daerah bidang perekonomian dan pembangunan
			Peningkatan kapasitas BUMD dan BLUD
			Peningkatan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik
			Peningkatan verifikasi dan validasi data penerimaan bantuan sosial
		Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan kelurahan	Peningkatan kualitas administrasi pemerintahan kelurahan
			Peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan

Visi: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat

Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis

Teknologi Informasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya kualitas Tata Kelola keuangan dan aset daerah daerah	Optimalisasi sistem pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan pengelolaan Penatausahaan Keuangan daerah
			peningkatan pengelolaan perencanaan keuangan daerah
			Peningkatan penyusunan keuangan daerah sesuai standar
		Peningkatan sistem pengelolaan aset daerah	Peningkatan pengelolaan perencanaan kebutuhan barang milik daerah
			Peningkatan pengelolaan perencanaan kebutuhan barang milik daerah
			Peningkatan pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah
			Peningkatan tertib pencatatan jumlah dan nilai inventaris barang milik daerah sesuai regulasi
		Peningkatan kualitas pengawasan daerah	Penguatan sistem pengendalian internal
			Peningkatan kapasitas pengawasan daerah
		Peningkatan intensifikasi dan	Peningkatan penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM di tingkat PD
			Peningkatan identifikasi sumber-

Visi: KOTA BLITAR KENEN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah	sumber pajak dan retribusi daerah
			Peningkatan koordinasi dengan PD penghasil retribusi
			Peningkatan pengelolaan piutang daerah
			Penguatan data wajib pajak dan retribusi secara akurat
			Pemberian insentif pajak daerah
			Peningkatan pelaporan dan pembayaran pajak secara online
		Peningkatan transparansi dan kinerja keuangan daerah	Peningkatan kualitas belanja daerah
			Penguatan keterbukaan sistem pengelolaan keuangan daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan dukungan terhadap fungsi kewilayahan	Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kecamatan
			Peningkatan kapasitas ASN kecamatan dan kelurahan
		Peningkatan sistem penyelenggaraan pelayanan publik	Peningkatan fasilitasi dan pembinaan pelayanan publik kewilayahan
			Peningkatan pengendalian pelayanan publik
			Koordinasi dan fasilitasi layanan kerumahtanggaan dan penatausahaan, serta protokol

Visi: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan kualitas sistem pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan update elemen data penduduk sesuai peristiwa kependudukan
			Peningkatan kualitas data kependudukan
			Peningkatan kesadaran masyarakat terkait kebijakan pelayanan administrasi kependudukan
			Peningkatan pengelolaan arsip pencatatan sipil
		Peningkatan sinkronisasi layanan DPRD	Fasilitasi agenda pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
			Penyesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sesuai dokumen perencanaan DPRD
	Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Penguatan tata kelola SPBE	Penguatan dan optimalisasi infrastruktur jaringan TIK
			peningkatan integrasi aplikasi layanan publik
		Peningkatan keamanan informasi	Peningkatan peran dan kapasitas Gov-CSIRT
			Penyusunan regulasi dan pedoman teknis terkait keamanan informasi
		Peningkatan sistem keterbukaan informasi publik	Peningkatan kualitas sistem layanan pemerintahan dan layanan publik
			Peningkatan kemudahan akses

Visi: KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			publik terhadap data dan informasi publik
			Peningkatan pelayanan data pembangunan daerah melalui e-governance
		Peningkatan pemanfaatan data statistik daerah	Peningkatan integrasi satu data dengan aplikasi lainnya
			Peningkatan ketersediaan data statistik sektoral
	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Peningkatan kualitas sistem manajemen kepegawaian	Penguatan sistem rekrutmen pegawai berbasis kebutuhan
			Penempatan jabatan pegawai berbasis sistem merit
			Peningkatan kualitas data kepegawaian daerah
			Peningkatan sistem kinerja ASN
		Peningkatan kapasitas ASN	penyusunan data kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi jabatan struktural dan pelaksana
			Analisis kesenjangan kompetensi ASN
			Peningkatan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan organisasi maupun individu
	Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas pelayanan kearsipan	Peningkatan kualitas pelayanan arsip daerah berbasis TIK
			Peningkatan perlindungan dan

Visi: KOTA ELITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat			
Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			penyelamatan arsip daerah
			Peningkatan pembinaan dan pengawasan kearsipan

• **4.4. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar 2023-2026**

Untuk mewujudkan penerapan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar maka Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun Rencana Strategis. Pada tabel 4.11 berikut ini dapat dilihat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dibuat oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2023-2026.

Tabel 4.67 – Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah
1	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Program Informasi dan Komunikasi Publik
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
			Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik
			Pelayanan Informasi Publik
			Layanan Hubungan Media
			Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan
			Manajemen Komunikasi Krisis
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
		Meningkatnya layanan SPBE melalui	Program Aplikasi Informatika
			Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah
		kebijakan dan tata kelola TIK	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
			Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
			Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Penatalaksanaan dan Pengawasan e-goverment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
			Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
			Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
			Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
	Meningkatnya pemanfaatan data		Program penyelenggaraan statistik sektoral
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah
		statistik daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
			Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam peningkatan mutu Statistik Daerah yang terintegrasi
			Membangun Metadata Statistik Sektoral
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
			Pengembangan Infrastruktur
			Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
		Meningkatnya Keamanan informasi	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
			Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
			Operasionalisasi Jaring komunikasi sandi Pememerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan komponen instalasi listrik/ Penerangan bangunan kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan peralatan rumah tangga
			Penyediaan bahan Logistik kantor
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyediaan jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
			Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

• 4.5. Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Blitar 2021-2025

Peta Rencana SPBE Kota Blitar tahun 2021-2025 berisikan langkah-langkah yang akan di jalankan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan dan penerapan SPBE untuk 5 tahun mendatang. Peta Rencana ini digunakan untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE di Kota Blitar.

Peta Rencana SPBE Kota Blitar ini dibuat dengan mengacu pada Rencana Induk SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Kota Blitar dan RPJPD Kota Blitar 20052025 serta untuk mewujudkan Visi SPBE Kota Blitar yaitu "Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk menciptakan pelayanan publik yang berkinerja tinggi dan mewujudkan masyarakat Kota Blitar yang semakin sejahtera melalui APBD Pro Rakyat".

Peta Rencana SPBE berikut ini memuat:

1. Peta Rencana Tata Kelola SPBE
2. Peta Rencana Manajemen SPBE
3. Peta Rencana Layanan SPBE
4. Peta Rencana Infrastruktur SPBE
5. Peta Rencana Aplikasi SPBE
6. Peta Rencana Keamanan SPBE
7. Peta Rencana Audit TIK

Peta Rencana SPBE Kota Blitar (tata kelola, manajemen SPBE, layanan, infrastruktur, aplikasi SPBE, keamanan SPBE dan Audit TIK) dijelaskan secara detail pada halaman berikut ini:

• 4.5.1. Peta Jalan Tata Kelola SPBE 2021-2025

Pada tabel 4.12 dapat dilihat Peta Jalan Tata Kelola SPBE Pemerintah Kota Blitar Tahun 2021-2025.

Tabel 4.68 – Peta Jalan Tata Kelola SPBE 2021-2025

Peta Jalan Tata Kelola SPBE							
No	Nama Kegiatan	Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Revisi Kebijakan Perwali terkait penerapan SPBE (Perwali Blitar nomor 49 tahun 2020)	Revisi kebijakan SPBE yang sudah ada serta penambahan kebijakan baru: - Kebijakan Manajemen Data - Pembangunan Aplikasi SPBE - Jaringan Intra Pemkot Blitar - Penggunaan Sistem Penghubung Layanan - Manajemen Keamanan Informasi - Audit TIK					
2	Penyusunan Kebijakan internal Manajemen Data	Kebijakan manajemen data harus meliputi manajemen arsitektur data, manajemen data induk, manajemen data referensi, manajemen basis data dan manajemen kualitas					
3	Penerapan Manajemen Data	Manajemen Data meliputi seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data					
4	Revisi Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE						

Peta Jalan Tata Kelola SPBE							
No	Nama Kegiatan	Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
5	Pembuatan prosedur (SOP) terkait pengoperasian Layanan Pusat Data						
6	Integrasi Pusat Data Kota Blitar dengan Pusat Data Pemprov Jawa Timur						
7	Integrasi Pusat Data Kota Blitar dengan Pusat Data Nasional						
8	Penambahan kapasitas storage untuk Backup & Recovery pada Pusat Data						
9	Sertifikasi nasional/internasional pusat data						
10	Penyusunan Kebijakan Jaringan Intra Pemkot Blitar						
11	Pengukuran Quality of Service Jaringan Intra Pemkot Blitar						
12	Penyusunan Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi	Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi harus meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian dan evaluasi kinerja)					
13	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi pada seluruh OPD						
14	Pembentukan Tim Keamanan Informasi Pemkot Blitar						

Peta Jalan Tata Kelola SPBE							
No	Nama Kegiatan	Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
15	Penyusunan Kebijakan Audit Teknologi Informasi	Audit TIK meliputi audit aplikasi, audit infrastruktur dan audit keamanan					
16	Pembaruan Proses Bisnis SPBE untuk semua OPD	Penyusunan Proses Bisnis SPBE Pemkot Blitar harus mengacu ke Permenpan RB no 19 tahun 2019 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis					
17	Penyusunan Peraturan tentang Software/Free Open Source Software						
18	Penyusunan Peraturan tentang Standarisasi Infrastruktur Jaringan TIK						
19	Penyusunan Peraturan tentang Standarisasi Aplikasi/Sistem Informasi TIK						
20	Pemeliharaan dan Pengembangan Satu Data						
21	Sinkronisasi Arsitektur Data Pemkot Blitar - Satu Data Nasional						
22	Penyusunan kebijakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (Government Service Bus)						

Peta Jalan Tata Kelola SPBE							
No	Nama Kegiatan	Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
23	Sertifikasi ISO 20000-1:2018 tentang Sistem Manajemen Layanan						
24	Evaluasi SPBE secara periodik						
25	Evaluasi Rencana Induk SPBE secara periodik						
26	Evaluasi Kinerja Tim Koordinasi SPBE	Penyusunan program kerja tahunan, pelaksanaan program dan evaluasi capaian kinerja					
27	Forum Kolaborasi SPBE	Wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE. Anggota meliputi pelaku usaha, masyarakat, wakil perguruan tinggi, lembaga penelitian, dll. Forum kolaborasi dalam bentuk pertemuan informal/ FGD					

• **4.5.2. Peta Jalan Manajemen SPBE**

Pada tabel 4.13 dapat dilihat Peta Jalan Manajemen SPBE Pemerintah Kota Blitar Tahun 2021-2025.

Tabel 4.69 – Peta Jalan Manajemen SPBE 2021-2025

Peta Jalan Manajemen SPBE							
No	Nama Kegiatan	Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pembuatan Pedoman dan	Pedoman Manajemen Risiko SPBE Pemkot Blitar					

Peta Jalan Manajemen SPBE							
No	Nama Kegiatan	Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
	Pembaharuan Pedoman Manajemen Risiko SPBE	harus mengacu pada Permenpan RB no 5 tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE					
2	Pelaksanaan dan evaluasi penerapan Manajemen Risiko SPBE di seluruh OPD	Penerapan Manajemen Risiko SPBE harus direviu setiap tahun					
3	Penyusunan dan Pembaharuan Pedoman/Standar Keamanan Informasi	Pedoman/standar Keamanan Informasi harus mengacu ke Perban BSSN no 4 tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi					
4	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi beserta evaluasinya						
5	Penyusunan Pedoman dan Pembaharuan Pedoman Manajemen Data						
6	Penerapan Manajemen Data beserta evaluasinya	Penerapan Manajemen Data meliputi proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.					
7	Penyusunan Dokumen pedoman	Aset TIK mencakup perangkat lunak,					

Peta Jalan Manajemen SPBE							
No	Nama Kegiatan	Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
	pelaksanaan Manajemen Aset TIK	perangkat keras, data dan informasi, infrastruktur, SDM, lisensi, data, SOP, outsource services, dan IT asset register.					
8	Penerapan Manajemen Aset TIK beserta evaluasinya						
9	Penyusunan Dokumen pedoman pelaksanaan Manajemen SDM SPBE	Pedoman memuat serangkaian proses manajemen SDM SPBE mulai dari perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan SDM dalam SPBE					
10	Penerapan Manajemen SDM SPBE beserta evaluasinya						
11	Penyusunan Dokumen dan Pembaharuan Dokumen Panduan Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE,	Pedoman harus memuat serangkaian proses manajemen pengetahuan mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.					
12	Penerapan Manajemen Pengetahuan						

Peta Jalan Manajemen SPBE							
No	Nama Kegiatan	Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
	SPBE di semua OPD beserta evaluasinya						
13	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Manajemen Perubahan	Pedoman Manajemen Perubahan SPBE harus meliputi Perubahan Aplikasi, Perubahan Perangkat Keras, Perubahan Perangkat Lunak, Perubahan Infrastruktur, Perubahan Proses Bisnis, Perubahan Lingkungan Organisasi, Perubahan Layanan, Perubahan Data, Perubahan Keamanan dan Perubahan Arsitektur.					
14	Penyusunan Dokumen dan Pembaharuan Dokumen Pedoman Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE,						
15	Penerapan Manajemen Perubahan SPBE di semua OPD beserta evaluasinya						

• **4.5.3. Peta Jalan Layanan SPBE 2021-2025**

Pada tabel 4.14 dapat dilihat Peta Jalan Layanan SPBE Pemerintah Kota Blitar Tahun 2021-2025.

Tabel 4.70 – Peta Jalan Layanan SPBE 2021-2025

Peta Jalan Layanan SPBE							
No	Nama Kegiatan	Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pengembangan Sistem Informasi Eksekutif Terintegrasi						
2	Penyediaan software berlisensi						
3	Penerapan Sistem Penghubung Layanan untuk integrasi layanan SPBE						
4	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan						
5	Sinkronisasi layanan e-planning, ebudgeting dan manajemen keuangan dengan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)						
6	Integrasi Layanan Manajemen Kepegawaian dengan BKN dan Layanan Kinerja Pegawai						
7	Integrasi Layanan Akuntabilitas Kinerja						

Peta Jalan Layanan SPBE							
No	Nama Kegiatan	Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
	Organisasi dengan Layanan Manajemen Keuangan						
8	Penerapan Layanan Kearsipan Dinamis di semua OPD						
9	Integrasi Layanan Kearsipan Dinamis dengan Layanan Manajemen Kepegawaian, Manajemen Perencanaan dan Manajemen Keuangan						
10	Integrasi Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Layanan Pengadaan Barang/Jasa, Layanan Penganggaran dan Layanan Manajemen Keuangan						
11	Integrasi Layanan Pengawasan Internal dengan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Berbasis Elektronik, Layanan						

Peta Jalan Layanan SPBE							
No	Nama Kegiatan	Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
	Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik						
12	Penambahan fitur analitik data pada Layanan Pengaduan Layanan Publik						
13	Pengembangan Layanan Data Terbuka Kota Blitar						
14	Integrasi Layanan Data Terbuka Kota Blitar dengan Layanan Data Terbuka Pemprov Jawa Timur dan Layanan Data Terbuka Nasional						
15	Update Konten dan Penambahan Fitur Analitik Data Layanan Data Terbuka						
16	Penambahan fitur transaksi layanan JDIH dan integrasi dengan Layanan JDIH Nasional						
17	Pengembangan Portal Pusat Layanan SPBE						
18	Evaluasi Layanan secara periodik						
19	Pengembangan Big Data						

Peta Jalan Layanan SPBE							
No	Nama Kegiatan	Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
	Analytics pada layanan SPBE						
20	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan						
21	Pengembangan dan Update Portal Pusat Layanan SPBE						

• **4.5.4. Peta Jalan Infrastruktur SPBE 2021-2025**

Pada tabel 4.15 dapat dilihat Peta Jalan Infrastruktur SPBE Pemerintah Kota Blitar Tahun 2021-2025.

Tabel 4.71 – Peta Jalan Infrastruktur SPBE 2021-2025

Peta Jalan Infrastruktur SPBE							
No	Nama Kegiatan	Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pembangunan Jaringan Fiber Optic untuk Backbone untuk semua OPD						
2	Pemeliharaan, Pengamanan, Penambahan Jaringan Wired maupun Wireless						
3	Peningkatan dan Pengaturan Alokasi Bandwidth Internet						
4	Penyediaan Public Access Point (Free WiFi)						
5	Peningkatan Kinerja Data Center						

Peta Jalan Infrastruktur SPBE							
No	Nama Kegiatan	Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
6	Pembangunan Hybrid Cloud Computing						
7	Pengembangan Disaster Recovery Center						
8	Pembangunan Emergency Call Center						
9	Pengembangan Network Operation Center						
10	Penyediaan Helpdesk Service dan IT Support						
11	Pengembangan Security Operation Center						
12	Integrasi Data Center Pemkot Blitar ke Data Center Pemprov Jatim						
13	Integrasi Data Center Pemkot Blitar ke Pusat Data Nasional						
14	Penyediaan Network Monitoring Tools						

• **4.5.5. Peta Jalan Aplikasi SPBE 2021-2025**

Pada tabel 4.16 dapat dilihat Peta Jalan Aplikasi SPBE Pemerintah Kota Blitar Tahun 2021-2025.

Tabel 4.72 – Peta Jalan Aplikasi SPBE 2021-2025

Peta Jalan Aplikasi SPBE							
N o	Nama Aplikasi	SKPD Pengguna	202 1	202 2	202 3	202 4	202 5
1	Layanan dan Database Kesbangpol (E-LANDA)	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana					
2	CSR KOTA BLITAR	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
3	SMART SURVEY (Upgrade)	Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan					
4	Sistem Informasi Manajemen Data Kesra (SIMDAKESRA) (Upgrade)	Bagian Perekonomian dan Kesra					
5	Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (SIPAK)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
6	Sistem Informasi Kesehatan Hewan dan Peternakan (SIMASTAHANPENAK) (Upgrade)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian					
7	Blitar Kota Serba Ada (BLIKOSDA) (Upgrade)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik					
8	Melaporkan Kelahiran dan Kematian (EMELATI) (Upgrade)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik					
9	Sistem Informasi Fasilitas Kesehatan dan Peta Sebar Penyakit (INFOKES)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik					

Peta Jalan Aplikasi SPBE							
N o	Nama Aplikasi	SKPD Pengguna	202 1	202 2	202 3	202 4	202 5
	(Upgrade)						
10	Sistem Verifikasi Data Kependudukan (SIDAKU)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik					
11	Sistem Informasi Rawat Inap Elektronik (SIRINE)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik					
12	Sistem Informasi Dana Bergulir (SIDALIR) (Upgrade)	Dinas Koperasi dan UKM					
13	Visit Blitar	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan					
14	SLOGAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PB dan KB					
15	Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pendidikan Kota Blitar (PANSEL-DP)	Dinas Pendidikan					
16	Info PKL Kota Blitar (PEKA5) (upgrade)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian					
17	PINTAR ONLINE SHOP	Dinas Perdagangan dan Perindustrian					
18	Aplikasi Absensi Berbasis Lokasi (AKSI)	Badan Kepegawaian Daerah					
19	E-FORMASI	Badan Kepegawaian Daerah					

Peta Jalan Aplikasi SPBE							
N o	Nama Aplikasi	SKPD Pengguna	202 1	202 2	202 3	202 4	202 5
20	SIAP	Badan Kepegawaian Daerah					
21	Sistem Informasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SIBPHTB)	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah					
22	Sistem Informasi Managemen PBB (SIM PBB)	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah					
23	SISMIOP	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah					
24	Sistem Terintegrasi Informasi Jabatan (SISTER MANJA)	Bagian Hukum dan Organisasi					
25	Perijinan Nakes	Dinas Kesehatan					
26	Aplikasi Pengelolaan Keuangan Sekolah Terpadu (upgrade)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik					
27	E-RUSUNAWA	Dinas Perumahan Rakyat					
28	E-Klaim INA-CBG	RSUD Mardi Waluyo					

• **4.5.6. Peta Jalan Keamanan SPBE 2021-2025**

Pada tabel 4.17 dapat dilihat Peta Jalan Keamanan SPBE Pemerintah Kota Blitar Tahun 2021-2025.

Tabel 4.73 – Peta Jalan Keamanan SPBE 2021-2025

Peta Jalan Keamanan SPBE							
No	Nama Kegiatan	Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pembuatan Dokumen Tata Kelola Keamanan Informasi						
2	Penyusunan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE						
3	Penyusunan standar teknis keamanan aplikasi berbasis web						
4	Penyusunan standar teknis keamanan aplikasi berbasis mobile						
5	Analisis Risiko Keamanan Informasi						
6	Sosialisasi Edukasi Kesadaran Keamanan Informasi						
7	Analisis Kerentanan Keamanan SPBE						
8	Penetration Testing untuk uji coba keamanan server dan infrastruktur jaringan						
9	Pembentukan CSIRT Kota Blitar						
10	Penanganan Insiden						

Peta Jalan Keamanan SPBE							
No	Nama Kegiatan	Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
	Keamanan SPBE						
11	Penerapan sistem pencadangan berkala (backup & recovery)						
12	Penerapan Single Sign-on untuk autentikasi jaringan dan aplikasi						
13	Konfigurasi Firewall pada semua server						
14	Konfigurasi Intrusion Detection pada Router						
15	Penguatan keamanan pada semua server						
16	Penerapan Digital Signature pada layanan – layanan penting						
17	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Information System Security Professional (CISSP)						
18	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Information						

Peta Jalan Keamanan SPBE							
No	Nama Kegiatan	Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
	System Auditor (CISA)						
19	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Information Security Manager (CISM)						
20	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Network Defender						
21	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Ethical Hacker						
22	Pelatihan dan Sertifikasi Systems Security Certified Practitioner (SSCP)						
23	Pelatihan dan Sertifikasi Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK)						
24	Pelatihan dan Sertifikasi Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security)						
25	Sertifikasi ISO 27001:2013 Information Security Manajement System (ISMS)						

• **4.5.7. Peta Jalan Audit TIK 2021-2025**

Pada tabel 4.18 dapat dilihat Peta Jalan Audit TIK Pemerintah Kota Blitar Tahun 2021-2025.

Tabel 4.74 – Peta Jalan Audit TIK 2021-2025

Peta Jalan Audit TIK							
No	Nama Kegiatan	Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Penyusunan Dokumen dan Pembaharuan Pedoman Audit Aplikasi	Audit Aplikasi SPBE terdiri atas Audit Aplikasi Umum dan Audit Aplikasi Khusus					
2	Penyusunan Dokumen dan Pembaharuan Pedoman Audit Infrastruktur	Audit Infrastruktur meliputi penerapan tata kelola dan manajemen infrastruktur SPBE, infrastruktur SPBE, kinerja infrastruktur SPBE dan aspek infrastruktur SPBE lainnya.					
3	Penyusunan Dokumen dan Pembaharuan Dokumen Panduan Audit Keamanan	Audit Keamanan SPBE terdiri atas Audit Keamanan Aplikasi dan Audit Keamanan Infrastruktur.					
4	Audit Aplikasi secara mandiri	Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh auditor TIK internal					
5	Audit Infrastruktur secara mandiri	Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh auditor TIK internal					

Peta Jalan Audit TIK							
No	Nama Kegiatan	Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
6	Audit Keamanan secara mandiri	Kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi internal					
7	Audit Aplikasi eksternal (auditor eksternal tersertifikasi)	Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh auditor TIK eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi					
8	Audit Infrastruktur eksternal (auditor eksternal tersertifikasi)	Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan oleh auditor TIK eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi					
9	Audit Keamanan eksternal (auditor eksternal tersertifikasi)	Kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor Sistem Keamanan Informasi.					
10	Tindak lanjut rekomendasi hasil audit aplikasi	Output: Laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut					

Peta Jalan Audit TIK							
No	Nama Kegiatan	Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
		hasil pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE					
11	Tindak lanjut rekomendasi hasil audit infrastuktur	Output: Laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE					
12	Tindak lanjut rekomendasi hasil audit keamanan	Output: Laporan hasil reuiu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan Audit Keamanan SPBE					
13	Pelatihan dan Sertifikasi Audit Aplikasi	Pelatihan diadakan oleh Lembaga audit terakreditasi dan auditornya terdaftar di BPPT					
14	Pelatihan dan Sertifikasi Audit Infrastruktur	Pelatihan diadakan oleh Lembaga audit terakreditasi dan auditornya terdaftar di BPPT					
15	Pelatihan dan Sertifikasi Audit Keamanan	Pelatihan diadakan oleh Lembaga audit terakreditasi dan auditornya terdaftar di BPPT					

Peta Jalan Audit TIK							
No	Nama Kegiatan	Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
16	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Information Systems Auditor (CISA)	Sertifikasi internasional dari Information Systems Audit and Control Association (ISACA)					

4.6. Rekomendasi Pelaksanaan Smart City Kota Blitar 2021-2023

Untuk memperlancar penerapan Smart City maka Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun dokumen Rekomendasi Pelaksanaan Smart City Kota Blitar tahun 2021-2023.

• 4.6.1. Rekomendasi Pengelolaan Sistem Pemerintahan Terpadu

Pada tabel 4.19 dapat dilihat rekomendasi pengelolaan sistem pemerintahan terpadu Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 4.75 –Rekomendasi Substansi Kota Blitar Smart City (Single Portal Smart City)

Tahap 1	Rekomendasi Brand	Rekomendasi Slogan
Perencanaan Brand Smart City Kota Blitar.	Kota Blitar Smart City	"PATRIOT: Pusat Layanan Terpadu Blitar Kota" "PROKLAMATOR: Program Kesatuan Layanan Masyarakat Kota Blitar"

Tahap 2	Pengelompokkan Berdasarkan Dimensi Smart City	Pengelompokkan Subtansi Fitur Smart City dalam Fasilitas Single Portal
Proses klasifikasi fasilitas yang dimiliki oleh setiap OPD untuk diintegrasikan dalam	Smart Governance	Kluster Fasilitas Informasi Kepegawaian : a. itur akses proses monev kinerja aparatur sipil di Kota Blitar. (Input standar evaluasi, sasaran dan capaian kinerja pegawai masingmasing instansi multi year, dan transparansi proses monev yang tengah dijalankan). b. itur monitoring kehadiran ASN. Kluster Fasilitas Keuangan :

Tahap 2	Pengelompokan Berdasarkan Dimensi Smart City	Pengelompokan Subtansi Fitur Smart City dalam Fasilitas Single Portal
fitur-fitur yang dimiliki oleh Single Portal Smart City.		a. PSE Kota Blitar. b. onitoring Anggaran Pemerintah (Laporan Statistik Pencairan Total Anggaran Pemkot Blitar, Laporan Statistik Daya Serap Anggaran Masing-Masing Instansi) c. aporan rekapitulasi RUP d. ayanan Pembayaran Pajak PBB (Cek tagihan pajak, fasilitas terintegrasi pembayaran pajak dengan platform swasta lain misal Tokopedia/Shopee) Kluster Layanan Masyarakat : a. ayanan pengajuan permohonan/ perizinan b. ayanan cek status permohonan/ perizinan. c. ayanan Bantuan Sosial (Cek Penerima Bansos, Pendaftaran Bansos, Cek Proses Penyaluran Bansos). d. uesioner Konstan Survei Kepuasan Masyarakat MasingMasing OPD. e. istem informasi kependudukan (Cek proses layanan administrasi kependudukan). f. ayanan pelaporan kematian dan kelahiran (E-Melati). Kluster Tata Kelola Pemerintahan a. Informasi agenda kerja masing-masing OPD. b. Layanan akses produk hukum daerah. c. Website dan email masingmasing OPD. d. e-musrenbang / Layanan SENOPATI (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Terintegrasi) / Layanan Akses Statistik Hasil Musrenbang. e. Fitur e-letter Pemerintah Daerah. f. Sistem informasi arsip dan kearsipan daerah (SIMASKERAN).
	Smart Branding	Kluster fasilitas Turisme :

Tahap 2	Pengelompokan Berdasarkan Dimensi Smart City	Pengelompokan Subtansi Fitur Smart City dalam Fasilitas Single Portal
		a. ayanan panduan lokasi wisata. b. istem informasi wisata daerah (Media Sosial tempat wisata, terhubung dengan platform Visit Blitar). c. istem informasi ketersediaan wisata inklusif d. ayanan pembelian tiket wisata berbasis online.
	Smart Economy	Kluster Fasilitas Pantau Kondisi Ekonomi Masyarakat : a. Informasi fluktuasi harga bahan pokok di Kota Blitar. b. Layanan Pendataan Industri Kecil Menengah. c. Sistem informasi ketersediaan stok bahan pokok/pangan daerah. d. Layanan promosi investasi (EJISC Kota Blitar)
	Smart Living	Kluster Fasilitas Kesehatan : a. ayanan booking nomor antrean online. b. istem informasi puskesmas elektronik (SIMPUSTRONIK). c. ayanan rekomendasi dan perizinan dilema. (PATRIA DINKES) d. istem informasi ketersediaan bed rumah sakit (real time). e. istem informasi jadwal dokter. f. istem informasi lokasi fasilitas dilema. g. ayanan konsultasi dilema. h. istem informasi sebaran gizi makanan di Kota Blitar. (Identifikasi jenis warung dan makanan dengan kandungan gizi tertentu). i. ank Data Kesehatan. Kluster Mobilitas Masyarakat : a. istem informasi jadwal keberangkatan bus di terminal.

Tahap 2	Pengelompokan Berdasarkan Dimensi Smart City	Pengelompokan Subtansi Fitur Smart City dalam Fasilitas Single Portal
		b. istem informasi rute angkutan umum. c. istem informasi ketersediaan halte. d. istem informasi rute kendaraan (informasi jalan satu arah dan dua arah, jalan dapat dilalui mobil dan tidak). e. istem informasi arus lalu lintas. f. istem informasi pemantauan angkutan sekolah dan angkutan barang (SIPAKSABAR) g. -Parkir Kluster Fasilitas Harmonisasi Lingkungan Hidup : a. istem informasi zonasi pembangunan di Kota Blitar. (Dilengkapi peta interaktif zonasi pembangunan Kota Blitar).
	Smart Society	Kluster Fasilitas Pendidikan : a. apodik b. PDB c. -Library/E-Perpustakaan (Fasilitas pendaftaran keanggotaan perpustakaan daerah online). d. istem informasi jumlah sebaran guru dan siswa multi year. e. kses video dan materi pembelajaran (Aplikasi Sinaro). f. aftar sekolah dan status akreditasi. g. ayanan akses Sistem informasi pengelolaan bantuan operasional sekolah (SIPBOS). h. engelolaan Data Siswa dan Guru Sekolah (PETAGUSILAH). Kluster Layanan Ketenagakerjaan : a. istem informasi ketersediaan lowongan.

Tahap 2	Pengelompokan Berdasarkan Dimensi Smart City	Pengelompokan Subtansi Fitur Smart City dalam Fasilitas Single Portal
		b. ayanan Pendaftaran kegiatan sertifikasi kerja. c. istem informasi kegiatan pelatihan kerja. Kluster Layanan Sosial-Politik : a. istem Quick Count Pilkada. b. istem pendaftaran organisasi masyarakat. c. -Landa (Layanan dan Database Kesbangpol). d. ayanan konsultasi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama).
	Smart Environm ent	Kluster Layanan Proteksi Lingkungan : a. Laporan pengolahan sampah di Kota Blitar. b. Rekapitulasi keanekaragaman hayati di Kota Blitar. c. Sistem informasi polusi di Kota Blitar. d. Fitur pelaporan lingkungan online. (SILOLIK)

4.6.2. Rekomendasi Optimalisasi Pusat Data Terpadu

Data Center atau yang biasa dimaknakan sebagai pusat data merupakan sistem pengelolaan data terpadu yang mampu melakukan tugas pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan, hingga penemuan kembali data sehingga mampu memberikan dukungan dalam pengambilan kebijakan (*Decision Support System*) (Henriyadi, 2008). Merujuk pada pandangan Henriyadi (2008) *Data Center* sendiri tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan perangkat keras yang memiliki kapasitas menyimpan data, lebih dari itu fungsi esensial dari *Data Center* justru terletak pada kemampuan untuk menyediakan layanan akses data secara mudah dan akurat. Oleh karenanya dalam hubungannya dengan sistem pemerintahan, kajian mengenai *data center* harus dititikberatkan pada kontribusi sistem *data center* dalam mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan digital atau *Smart City*.

Pada tabel 4.20 berikut ini diuraikan mengenai rekomendasi optimalisasi pusat data terpadu secara lebih terinci.

Tabel 4.76 – Rekomendasi Optimalisasi Pusat Data Terpadu

Fasilitas Data Center	Fitur Yang Dapat Disediakan Dalam Fasilitas Data Center	Rekomendasi Lain
Fasilitas data center merupakan platform digital (umumnya berada dalam satu website dengan Smart City) yang bermaksud mengumpulkan dan mengelola seluruh data penting yang dimiliki OPD ke dalam satu wadah tunggal yang dapat menjadi rujukan dalam memenuhi kebutuhan data pemerintahan	Formula Substansi : Data Unik Kedaerahan + Data BPS = Data Center. Penyusunan fitur dalam fasilitas data center didasarkan pada : - o Data Publik yang berkaitan dengan pelayanan dasar. - o Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Fitur yang dapat ditambah dalam rangka optimalisasi Data Center ialah sebagai berikut : • Data Umum (Kependudukan Umum, Wilayah, Ekonomi, Kesehatan, Keuangan) 1. ekapitulasi Statistik Kependudukan Multi Years (Gender, Agama, Pendidikan, Peta Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah, IPM). 2. ata tingkat pertumbuhan ekonomi. 3. ekapitulasi data Kesehatan (Jumlah konsentrasi penyakit dalam kurun waktu tertentu). 4. ekapitulasi data daya serap keuangan masing-masing OPD di Kota Blitar Multi Years. 5. ekapitulasi jumlah bencana/ atau penyediaan zonasi wilayah rawan bencana di Kota Blitar. 6. ata Wilayah (Peta Topografi, Peta Luas Wilayah, Peta Sebaran Potensi Wilayah, Peta Rencana Pengembangan Perkotaan). • Data Publikasi/Dokumen 1. tatistik Indeks PMPRB Pemerintah Kota Blitar.	Update + Upgrade + Sustain = Mature Smart City. Perlu ada update data pada fitur info statistik yang terdapat pada aplikasi Pusat Data Statistik Kota Blitar (Adata). Pengintegrasian Layanan Pusat Data Statistik (SIMPEDAK, data, SIMDAKESRA) Kota Blitar dengan platform Blitar Smart City (BSC). Perlu update data untuk beberapa fitur di dalam portal Data Center Adata Kota Blitar. (Perlu adanya pemutakhiran data pada kolom fitur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kesehatan, Badan

Fasilitas Data Center	Fitur Yang Dapat Disediakan Dalam Fasilitas Data Center	Rekomendasi Lain
	2..... <i>ekapitulasi Publikasi Dokumen</i> (Dokumen Hasil Kajian, Dokumen Publikasi BPS, Dokumen Roadmap Pembangunan Kota, Masterplan Smart City). Data Kinerja OPD 1..... <i>ekapitulasi Data Kepuasan Layanan</i> (Jumlah dan kategori aduan, peringkat kepuasan masyarakat terhadap layanan masing-masing OPD). 2..... <i>ekapitulasi jumlah permintaan informasi yang diterima, waktu yang diperlukan dalam pemberian informasi, jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi, alasan penolakan informasi.</i>	Kesatuan Bangsa dan Politik dan Penanggulangan Bencana). <i>Perlu ada pengelompokan layanan data pada fitur Pusat Data Statistik.</i> <i>(Pengelompokan Fitur Data masing-masing OPD, pengelompokan data umum, pengelompokan data publikasi/ dokumen, Data Kinerja OPD)</i>

• 4.6.3. Rekomendasi Peningkatan Security Information System

Merujuk pada Bab III pasal 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengaman Informasi, praktik *security information system* atau yang lebih dikenal dengan jaminan keamanan masyarakat dapat dilakukan melalui dua tahap. *Pertama* bagi institusi penyelenggara sistem keamanan data rendah proses pengamanan informasi dapat dilakukan dengan menerapkan pedoman indeks keamanan informasi (KAMI), dan *kedua* adalah bagi penyelenggara sistem keamanan data tinggi diwajibkan untuk menerapkan sistem keamanan standar SNI ISO/IEC 27001. Dalam proses penyelenggaraannya upaya untuk menjamin keamanan data tersebut dapat dilakukan dengan melakukan *assessment* kesiapan keamanan informasi yang dilakukan dengan menggunakan standar keamanan informasi berbasis indeks KAMI (Yunella et al., 2020).

Secara sederhana indeks KAMI sebagaimana yang dimaksud pada penjelasan di atas, umumnya merupakan proses pengukuran tahap pertama yang dilakukan oleh suatu institusi sebelum melangkah menuju proses audit keamanan data berbasis SNI ISO/IEC 27001:2013. Dalam proses audit KAMI beberapa komponen penilaian yang diuji meliputi 6 standar keamanan yang juga telah disesuaikan dengan standar ISO/IEC 27001:2013, 6 standar keamanan data ini meliputi :

- Kategori sistem elektronik yang digunakan oleh institusi;
- Tata kelola keamanan informasi;

- c. Pengelolaan risiko keamanan informasi;
- d. Kerangka kerja keamanan informasi;
- e. Pengelolaan aset informasi, dan
- f. Teknologi dan keamanan informasi.
- g. Suplemen (Kaitannya dengan kerja sama layanan data dengan pihak eksternal)

Selanjutnya dalam pemahaman yang lebih mendalam, upaya untuk meningkatkan kualitas *Security information system* umumnya dapat dilakukan dengan melakukan beberapa agenda kerja yang berfokus pada peningkatan kualitas keamanan data. Merujuk pada evaluasi *Assessment KAMI* yang telah diselenggarakan di banyak daerah, diperoleh kesimpulan umum bahwa upaya meningkatkan kualitas keamanan data dapat dilakukan lewat beberapa hal, yakni :

1. Indikator Tata Kelola Informasi

- a. Membuat dokumen tata rencana pengamanan informasi/manajemen keamanan data;
- b. Menentukan peran dan tanggung jawab struktural terkait keamanan informasi;
- c. Program sosialisasi keamanan informasi;
- d. Melakukan indeks/audit keamanan informasi menggunakan sertifikasi KAMI / ISO/IEC 27001:2013

2. Indikator Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi

3. Indikator Kerangka Kerja Keamanan Informasi

- a. Membuat prosedur *recovery* data pasca terjadi kerusakan data;
- b. Membuat prosedur pendisiplinan kerja (dapat berupa ancaman sanksi maupun Tindakan lain yang diperlukan apabila ditemukan sabotase data).

4. Pengelolaan Aset Keamanan Informasi

- a. Membuat dokumen persetujuan/perjanjian dengan seluruh pihak terkait tanggung jawab keamanan informasi;
- b. Membuat dokumen/aturan penggunaan informasi/data;
- c. Membuat persyaratan melakukan transfer dokumen/data dengan pihak eksternal;
- d. Membuat manajemen kontroling keamanan sistem informasi.

5. Teknologi Keamanan Informasi

- a. Perlu terdapat rencana/agenda pengembangan keamanan perangkat lunak pengamanan data/informasi;
- b. Prosedur dan pedoman mengenai pilihan penegakan kata sandi yang kuat bagi setiap pengguna;
- c. Manajemen brankas kata sandi;

- d. Melakukan kontroling *virus/malware/* ancaman lain yang mungkin muncul.
6. **Suplemen (Indikator Hubungan Dengan Pihak Eksternal)**
 - a. Membuat kebijakan/prosedur tertulis mengenai pengelolaan data dengan pihak ketiga;
 - b. Membuat kebijakan/prosedur tertulis untuk memiliki hak pantau atas keamanan data dalam hubungannya dengan pihak ketiga;
 - c. Memastikan keamanan data pada sistem *cloud service*;

4.6.4. Rekomendasi Kegiatan Optimalisasi *Smart City* Kota Blitar

Berdasarkan dokumen *Smart City* Kota Blitar tahun 2021-2023 maka dapat diketahui berbagai rekomendasi kegiatan untuk mengoptimalkan pelaksanaan *Smart City* Kota Blitar seperti yang tercantum pada table 4.21.

Tabel 4.77 – Rekomendasi Kegiatan Untuk Mengoptimalkan Pelaksanaan *Smart City* Kota Blitar

No.	Kegiatan	OPD	Sifat Program
1.	Program evaluasi dan review <i>Master Plan Smart City</i> Kota Blitar.	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.	Program pendukung implementasi
2.	Program evaluasi terstruktur pelaksanaan <i>Smart City</i> di Kota Blitar setiap tahun.	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.	Program pendukung implementasi
3.	Perlu ada rekapitulasi hasil evaluasi <i>Smart City Multi Year</i> .	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.	Program pendukung implementasi
4.	Realisasi <i>Single Portal Smart City : Patria Smart City</i> .	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.	Perlu menjadi program prioritas
5.	Sosialisasi pemanfaatan TIK sebagai instrumen pendukung <i>Smart City</i> .	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.	Perlu menjadi program prioritas
6.	Program realisasi regulasi / payung hukum <i>Smart City</i> Kota Blitar.	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.	Perlu menjadi program prioritas.

No.	Kegiatan	OPD	Sifat Program
7.	Realisasi regulasi dewan <i>Smart City</i> .	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.	Perlu menjadi program prioritas.

Berdasarkan dokumen Smart City Kota Blitar tahun 2021-2023 maka dapat diketahui berbagai rekomendasi kegiatan pendukung lainnya untuk mengoptimalkan pelaksanaan Smart City Kota Blitar seperti yang tercantum pada table 4.22.

Tabel 4.78 – Rekomendasi Kegiatan Pendukung Lainnya

Rekomendasi Kegiatan Pendukung Lainnya			
No.	Dimensi	Kegiatan/Program	OPD
1.	<i>Smart Governance (Birokrasi, Service, Policy)</i>	a. Perlu ada pembahasan menyeluruh mengenai konsep/ teknis anggaran dan pelaksanaan <i>Smart City</i> Kota Blitar dengan mengundang OPD terkait. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan tanggung jawab masing-masing OPD dalam mendukung pelaksanaan <i>Smart City</i> Kota Blitar. Perlu diketahui pula bahwa implementasi Smart City tidak hanya menjadi tanggung jawab Diskominfo Kota Blitar, namun juga menjadi tanggung jawab seluruh OPD melalui tupoksinya masingmasing; b. Pengembangan/ Optimalisasi fitur <i>data center</i> (Satu Data Kota Blitar) disertai dengan mekanisme update data berkala dan mekanisme pertukaran data antar institusi; c. Koordinasi pengembangan aplikasi pendukung birokrasi pelayanan publik; d. Pengembangan sistem pengaduan dan evaluasi kinerja OPD secara online dan terintegrasi	Dapat diinisiasi oleh Diskominfo, BAPPEDA.

Rekomendasi Kegiatan Pendukung Lainnya			
No.	Dimensi	Kegiatan/Program	OPD
2	<i>Smart Branding (Turisme, bisnis, kenampakan fisik kota)</i>	a. Pengembangan Kawasan Wisata Kota Blitar yang edukatif, inklusif, dan berwawasan lingkungan; b. Pengembangan kawasan wisata yang sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Kota Blitar; c. Pengembangan tempat wisata tematik di Kota Blitar; d. Pelatihan kelompok sadar wisata (hospitality); e. Pengembangan zona wisata aman dan nyaman; f. Pengembangan fasilitas pembelian tiket <i>online</i>; g. Sistem monitoring penginapan, hotel dan infrastruktur wisata lain; h. Pengembangan fasilitas wirausaha yang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat kawasan wisata; i. Pembangunan tata kota/infrastruktur kota yang menunjang <i>image/branding</i> Kota Blitar; j. Pengembangan produk lokal Kota Blitar sebagai sarana untuk meningkatkan daya tarik wisata.	Dinas Pariwisata, dan OPD lain yang berkaitan.
3.	<i>Smart Society (Security, Learning dan Community)</i>	a. Kebijakan Pemanfaatan Publik Area/Penyediaan fasilitas ruang publik yang mendorong kreativitas masyarakat; b. Pengembangan kurikulum muatan lokal yang berorientasi pada pembekalan peserta didik dari bahaya kenakalan remaja;	Dinas Pendidikan, BPBD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Perhubungan, TNI, FKUB,

Rekomendasi Kegiatan Pendukung Lainnya			
No.	Dimensi	Kegiatan/Program	OPD
		c. Pelatihan keselamatan diri masyarakat terhadap bahaya bencana; d. Pembinaan wawasan kebangsaan di masyarakat untuk menghindari praktik intoleransi; k. Pemetaan jumlah halte dan rute penunjang bus sekolah; l. Penambahan layanan Wifi gratis di Kota Blitar m. Optimalisasi layanan darurat 112 Kota Blitar; n. Optimalisasi perangkat CCTV untuk memantau keadaan masyarakat	Diskominfotik, dan OPD lain yang terkait.
4	<i>Smart Living (Harmony, Health, Mobility)</i>	a. Promosi pola hidup sehat di setiap fasilitas umum; b. Penambahan layanan informasi jadwal dokter; c. Perlu ada monitoring kualitas sebaran gizi makanan; d. Pengembangan aksesibilitas sarana Kesehatan. Program penyiapan infrastruktur yang mempermudah masyarakat e. datang ke layanan Kesehatan; Program <i>healthy sidewalk</i>; f. Perlu ada tinjauan mengenai harmonisasi fasilitas Kesehatan dengan fasilitas lain. g. (Konektivitas antar fasilitas umum); h. Pengembangan fitur ATCS yang dapat diremote di ruang kontrol ATCS dishub.	Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan Dinas lain terkait.
5	<i>Smart Economy (Welfare, Transaction, Industry)</i>	a. Tindak Lanjut Program b. Pengentasan Kemiskinan : c. Program kontroling dan evaluasi pendamping PKH;	Dinas Sosial, Dinas

Rekomendasi Kegiatan Pendukung Lainnya			
No.	Dimensi	Kegiatan/Program	OPD
		d. Program kontroling dan evaluasi penyaluran bantuan; e. Program sinkronisasi data warga miskin dan data kependudukan; f. Pengembangan aplikasi bidang bisnis dan investasi; g. Pengembangan mekanisme transaksi digital untuk pasar tradisional; h. Pengembangan aplikasi pantau harga bahan pokok di Kota Blitar; i. Pengembangan sistem informasi persediaan dan permintaan bahan pokok di Kota Blitar; j. Program pengembangan manajemen UKM; k. Program pelatihan kewirausahaan sosial; l. Program pengembangan marketing UKM yang kongruen dengan <i>branding</i> wisata Kota Blitar; m. Program stimulasi pembukaan wirausaha baru. Membuat forum wirausaha muda/ wirausaha pelajar di Kota Blitar.	Koperasi, dan Dinas lain terkait.
6	<i>Smart Environment (Waste, Energy, Protection)</i>	a. Perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk melakukan kegiatan pemisahan sampah mandiri; b. Pengembangan mekanisme bank sampah dan pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat; c. Koordinasi perencanaan kebijakan pengurangan sampah; d. Perlu terdapat fasilitas informasi cuaca atau kualitas lingkungan;	DLH, Dinas Pertamanan dan Kebersihan, Dinas Pekerjaan Umum, Kelompok Masyarakat, dan pihak-pihak lain terkait

Rekomendasi Kegiatan Pendukung Lainnya			
No.	Dimensi	Kegiatan/Program	OPD
		e. Pengembangan fasilitas taman kota inklusif; f. Program keterbukaan informasi tata ruang; g. Program pengelolaan sampah menjadi barang berkualitas atau energi terbarukan; h. Program hemat energi; i. Program pengembangan budidaya tanaman toga dan taman obat-obatan alternatif di Kota Blitar.	

4.7. Arsitektur SPBE Pemerintah Kota Blitar 2022-2025

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Pada bagian berikut ini akan dibahas secara singkat arsitektur SPBE Pemerintah Kota Blitar periode 2022-2025. Arsitektur SPBE ini dibagi menjadi 6 jenis arsitektur yaitu:

1. Arsitektur Proses Bisnis
2. Arsitektur Data dan Informasi
3. Arsitektur Layanan
4. Arsitektur Aplikasi
5. Arsitektur Infrastruktur
6. Arsitektur Keamanan

4.7.1. Arsitektur Proses Bisnis

Pada tabel 4.23 berikut ini akan diuraikan mengenai arsitektur proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 4.79 – Arsitektur Proses Bisnis

Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Unit Kerja	RAB
Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya tatakelola dan layanan pemerintah berbasis elektronik	Diskominfo	RAB 09.03.05.01 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
Terwujudnya Sistem Pemerintahan	Meningkatnya tatakelola dan layanan	Diskominfo	RAB 09.03.05.02 LAYANAN

Nama Bisnis/Urusan	Sasaran Strategis	Unit Kerja	RAB
Berbasis Elekttronik (SPBE)	pemerintah berbasis elektronik		INFORMASI PUBLIK
Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elekttronik (SPBE)	Meningkatnya tatakelola dan layanan pemerintah berbasis elektronik	Diskominfo	RAB 09.04.02.01 KEMITRAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elekttronik (SPBE)	Meningkatnya tatakelola dan layanan pemerintah berbasis elektronik	Diskominfo	RAB.09.03.01.01 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA TIK
Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elekttronik (SPBE)	Meningkatnya tatakelola dan layanan pemerintah berbasis elektronik	Diskominfo	RAB 09.03.01.02 PENGEMBANG AN APLIKASI INFORMATIKA
Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elekttronik (SPBE)	Meningkatnya tatakelola dan layanan pemerintah berbasis elektronik	Diskominfo	RAB 09.03.01.03 PEMBERDAYAAN TIK
Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elekttronik (SPBE)	Meningkatnya tatakelola dan layanan pemerintah berbasis elektronik	Diskominfo	RAB 09.03.03.01 STATISTIK
Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elekttronik (SPBE)	Meningkatnya tatakelola dan layanan pemerintah berbasis elektronik	Diskominfo	RAB 09.03.01.04 PERSANDIAN

4.7.2. Arsitektur Data dan Informasi

Pada tabel 4.24 berikut ini akan diuraikan mengenai arsitektur data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 4.80 – Arsitektur Data dan Informasi

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data
Data Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi		Terbuka dan Tertutup	Data Keuangan	Tiga Bulanan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Data Realisasi PAD	Realisasi seluruh PAD		Terbuka	Data Keuangan	Bulanan	Badan Pendapatan Daerah
Data Statistik Sektoral		Penyediaan data yang akurat dan terintegrasi	Terbuka dan Tertutup	Data Statistik	Tahunan	Seluruh Perangkat Daerah
Data Jaringan Internet dan Intranet Pemkot Blitar	Peta jaringan internet dan intranet ke seluruh perangkat daerah		Terbatas	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Data MRTG		Terbatas	Data Lainnya	Tahunan	Dinas Komunikasi dan Informatika

Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Penghasil Data/Produsen Data
Data Infrastruktur TIK	Data perangkat keras dan perangkat lunak		Terbatas	Data Lainnya	Tahunan	Seluruh Perangkat Daerah
Data Pengelolaan Aplikasi	Data aplikasi yang dikembangkan dan dikelola oleh Diskominfo		Terbuka	Data Lainnya	Tiga Bulanan	Dinas Komunikasi dan Informatika
Data Kegiatan Pengembangan Sumber Daya TIK	Data kegiatan pengembangan sumber daya TIK yang diselenggarakan Diskominfo		Terbuka	Data Lainnya	Tiga Bulanan	Dinas Komunikasi dan Informatika

4.7.3. Arsitektur Layanan

Pada tabel 4.25 berikut ini akan diuraikan mengenai arsitektur layanan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 4.81 – Arsitektur Layanan

Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Penanggung Jawab Layanan	Unit Pelaksana	Target Layanan	Proses Bisnis
Layanan Informasi Data Statistik Sektoral	Tersedianya layanan Data Statistik untuk user (publik dan pemerintah)	Penyediaan layanan Data Statistik untuk user (publik dan pemerintah)	Kepala Bidang Statistik dan Informasi	Seksi Statistik	Publik dan Pemerintah	RAB 09.03. 03.01 Statistik
Layanan Informasi Geospasial	Tersedianya layanan informasi geospasial untuk public dan pemerintah	Penyediaan layanan informasi geospasial untuk publik dan pemerintah	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Seksi Statistik	Publik dan Pemerintah	RAB 09.03. 03.01 Statistik
Layanan Informasi Statistik	Tersedianya layanan informasi statistik	Penyediaan layanan informasi statistik	Kepala Bidang	Seksi Statistik	Publik dan Pemerintah	RAB 09.03. 03.01 Statistik

Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Penanggung Jawab Layanan	Unit Pelaksana	Target Layanan	Proses Bisnis
Sektoral	sektoral untuk publik dan pemerintah	sektoral untuk publik dan pemerintah	Statistik dan Persandian			
Layanan Informasi Publik	Tersedianya layanan informasi publik untuk publik dan pemerintah	Penyediaan layanan informasi public untuk publik dan pemerintah	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	Sub Substansi pengolahan Informasi Publik	Publik dan Pemerintah	RAB 09.03. 05.01 Pengelolaan Informasi Publik
Layanan Pengaduan Publik	Tersedianya layanan pengaduan publik	Penyediaan layanan pengaduan publik	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	Sub Substansi pengolahan Informasi Publik	Publik dan Pemerintah	RAB 09.03. 05.01 Pengelolaan Informasi Publik
Layanan Komunikasi Publik	Tersedianya layanan komunikasi publik untuk	Penyediaan layanan komunikasi publik untuk	Kepala Bidang Komunikasi	Sub Substansi Kemitraan Komunikasi dan	Publik dan Pemerintah	RAB 09.04. 02.01 Kemitraan

Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Penanggung Jawab Layanan	Unit Pelaksana	Target Layanan	Proses Bisnis
	publik dan pemerintah	publik dan pemerintah	dan Informasi Publik	Informasi Publik		Komunikasi dan Informasi Publik
Layanan Peyebar-luasan Informasi Publik	Tersedianya layanan Peyebar-luasan Informasi Publik	Penyediaan layanan Peyebar-luasan Informasi Publik dan pemerintahan	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	Sub Substansi Pelayanan Informasi Publik	Publik dan Pemerintah	RAB 09.03. 05.01 Pengelolaan Informasi Publik
Layanan Operasional Pengaman-an Persan-dian	Tersedianya layanan operasional pengamanan persandian untuk publik dan pemerintah	Penyediaan layanan operasional pengamanan persandian untuk publik dan pemerintah	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Seksi Persandian	Publik dan Pemerintah	RAB 09.03. 01.04 Persandian
Layanan Pengembangan Sumber Daya TIK	Terselenggara-kannya kegiatan pengembangan	Penyel enggaran kegiatan pengembang-	Kepala Aplikasi Informatika	Sub Substansi Pemberda-yaan	Publik dan Pemerintah	RAB 09.03. 01.03 Pemberda-yaan TIK

Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Penanggung Jawab Layanan	Unit Pelaksana	Target Layanan	Proses Bisnis
	sumber daya TIK	an sumber daya TIK		TIK		
Layanan Infrastruktur TIK	Tersedianya infrastruktur TIK (Jaringan dan Pusat Data) untuk Perangkat Daerah	Penyediaan layanan infrastruktur TIK (Jaringan dan Pusat Data) untuk Perangkat Daerah	Kepala Aplikasi Informatika	Sub Substansi Sarana dan Prasarana TIK	Publik dan Pemerintah	RAB 09.03. 01.01 Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana TIK
Layanan Akses Internet dan Intranet	Tersedia nya akses internet dan intranet untuk Perangkat Daerah dan Fasilitas Publik	Penyediaan layanan akses internet dan intranet untuk Perangkat Daerah dan Fasilitas Publik	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Sub Substansi Sarana dan Prasarana TIK	Publik dan Pemerintah	RAB 09.03. 01.01 Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana TIK

Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Penanggung Jawab Layanan	Unit Pelaksana	Target Layanan	Proses Bisnis
Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi	Tersedianya Aplikasi untuk layanan administrasi pemerintah daerah dan aplikasi layanan publik	Penyediaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi Perangkat Daerah	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Sub Substansi Pengembangan Informatika	Publik dan Pemerintah	RAB 09.03. 01.02 Pengembangan Aplikasi Informatika
Layanan Statistik Sektoral	Tersedianya layanan statistik sektoral untuk publik dan pemerintah	Penyediaan layanan statistik sektoral untuk publik dan pemerintah	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Seksi Persandian	Publik dan Pemerintah	RAB 09.03. 03.01 Statistik

4.7.4. Arsitektur Aplikasi

Pada tabel 4.26 berikut ini akan diuraikan mengenai arsitektur aplikasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 4.82 – Arsitektur Aplikasi

Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Layanan	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Nama Basis Data	Unit Pengembang
Aplikasi SP4AN LAPOR!	Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terintegrasi secara Nasional dengan laman akses website www.lapor.go.id	untuk penyampaian semua aspirasi dan pengaduan rakyat secara online yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap Penyelenggara pelayanan publik		Web Based			
Makota-mail	Aplikasi e-mail resmi Pemerintah Kota Blitar	Menyediakan email pemerintah kota Blitar	RAL. 02.09. 04.01 Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi	Web Based			Dinas Komunikasi dan Informatika
Cloud	Komputasi awan Pemerintah Kota Blitar	Menyediakan Komputasi	RAL. 02.09. 04.01 Layanan Pengembangan	Web Based		my SQL	Dinas Komunikasi

Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Layanan	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Nama Basis Data	Unit Pengembangan
		awan Pemerintah Kota Blitar	dan Pengelolaan Aplikasi				dan Informatika
Sambat	SAMBAT ONLINE ini adalah sarana yang disediakan untuk menjembatani sekaligus memudahkan warga kota khususnya untuk melayangkan aspirasi, saran, kritik, pengaduan maupun pertanyaan kepada perangkat pemerintah Kota BLITAR.	untuk menjembatani sekaligus memudahkan warga kota khususnya untuk melayangkan aspirasi, saran, kritik, pengaduan maupun pertanyaan kepada perangkat pemerintah Kota BLITAR.	RAL 01.43.03.02 Layanan Pengaduan Publik	Web Based	PH P	my SQL	Dinas Komunikasi dan Informatika

Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Layanan	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Nama Basis Data	Unit Pengembangan
Satu Data	Sistem tata kelola data Pemda untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan , Serta mudah diakses dan dibagi pakai	Untuk menyediakan data statistik sektoral kota Blitar yang dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan dan sebagai informasi yang dapat disebarluaskan ke masyarakat melalui Portal Blitar Satu Data		Web Based	PHP	my SQL	Dinas Komunikasi dan Informatika
Suradi	Aplikasi Persuratan Digital Kota Blitar	Pembuatan dan pengiriman surat antar instansi pemerintah kota Blitar	RAL. 02.09. 04.01 Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi	Web Based	PHP (Code Igniter)	my SQL	Dinas Komunikasi dan Informatika
Media center				Web Based	Word-press		Dinas Komunikasi

Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Layanan	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Nama Basis Data	Unit Pengembang
Web Pemkot			RAB 09.03 .05.001 Pengelolaan Informasi Publik, RAB 09.03 .01.02 Pembangunan Aplikasi Informatika	Web Based	Word press		Dinas Komunikasi dan Informatika
CCT V	Aplikasi yang menampilkan peta cctv Kota Blitar dan rekaman cctv Kota Blitar yang dapat diakses secara realtime oleh Masyarakat	Memberikan Informasi terkait CCTV yang ada di Kota Blitar	RAB 09.03 .01.02 Pembangunan Aplikasi Informatika	Web Based	PHP	my SQL	Dinas Komunikasi dan Informatika
Smartcity	Portal Aplikasi Pemerintah Kota Blitar	Mempermudah pencarian laman /aplikasi Pemerintah Kota Blitar	RAB 09.03 .01.02 Pembangunan Aplikasi Informatika	Web Based	PHP	my SQL	Dinas Komunikasi Dan Informatika

Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Layanan	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Nama Basis Data	Unit Pengembang
Dashboard	Sistem informasi terintegrasi dengan beberapa aplikasi OPD di Kota Blitar menggunakan data visualisasi	Laporan pada Walikota terkait kinerja Perangkat Daerah	RAB 09.03.01.02 Pembangunan Aplikasi Informatika	Web Based	PHP	MySQL	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Potensi Desa	Potensi Kelurahan adalah aplikasi pendataan yang dikhususkan untuk kelurahan mengenai gambaran menyeluruh tentang karakter kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana serta perkembangan Informasi di Kelurahan	Memberikan informasi terkait gambaran menyeluruh tentang karakter kelurahan di Kota Blitar		Web Based	PHP	MySQL	Dinas Komunikasi dan Informatika
Aplikasi CETAR				Web Based			Dinas Komunikasi

Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Layanan	Basis Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Nama Basis Data	Unit Pengembang dan Informatika
112 WEBSITE	Aplikasi pengaduan darurat yang terintegrasi dengan layanan darurat 112	Menampilkan laporan pengaduan darurat dan memfasilitasi pengaduan darurat melalui website	RAL 01.43. 03.02 Layanan Pengaduan Publik	Web Based		my SQL	

4.7.5. Arsitektur Infrastruktur

Pembahasan arsitektur infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kota Blitar terdiri dari :

- Fasilitas Komputasi
- Komputasi Awan
- Perangkat Keras Jaringan
- Perangkat Keras Keamanan
- Perangkat Keras Media Penyimpanan
- Perangkat Keras Server
- Jaringan Intra Pemerintah

4.7.5.1. Fasilitas Komputasi

Pada tabel 4.27 berikut ini akan diuraikan mengenai fasilitas komputasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 4.83 – Fasilitas Komputasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar

Nama Fasilitas Komputasi	Bandwidth Intranet	Bandwidth Internet	Lokasi	Kepemilikan	Unit Kerja Penanggung Jawab	Jaringan Intra Pemerintah
Ruang Server Utama	1			Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Ruang Server Dukcapil				Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	VPN Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri
Data Center Dinas Kominfo Provinsi			Dinas Kominfo Provinsi Jatim	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	
Ruang Server Bapenda	3 Gbps	21 Mbps	Ruang Server Bapenda	Sendiri		
CC-Room ATCS			Dinas Perhubungan			

4.7.5.2. Komputasi Awan

Pada tabel 4.28 berikut ini akan diuraikan mengenai komputasi awan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 4.84 – Komputasi Awan Dinas Komunikasi dan Informatika

Deskripsi Government Cloud	Tipe Cloud	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Fasilitas Komputasi
Penyimpanan berbasis awan untuk berbagi berkas	SaaS	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar	Pusat Data Dinas Kominfo

4.7.5.3. Perangkat Keras Jaringan

Pada tabel 4.29 berikut ini akan diuraikan mengenai perangkat keras jaringan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 4.85 – Perangkat keras Jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika

Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik
Core Switch	managable-, bahan Campuran	Multilayer Switch	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar
4G Router suport	TP link /, bahan campuran	Router	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar

4.7.5.4. Perangkat Keras Keamanan

Pada tabel 4.30 berikut ini akan diuraikan mengenai perangkat keras keamanan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 4.86 – Perangkat Keras Keamanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Nama Perangkat Keamanan	Deskripsi Security Device	Tipe Keamanan Device	Nama Pemilik	Fasilitas Komputasi	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, Standar Keamanan Internasional, dan Regulasi lainnya
Device Firewall	Firewall security, ukuran 1U, bahan Besi	Firewall	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar	Pusat Data Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar	ISO 27001 Information Security Management Systems
IP Cam Security System	bahan Besi	Intrusion Detection System	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar	Pusat Data Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar	ISO 27001 Information Security Management Systems

4.7.5.5. Perangkat Keras Media Penyimpanan

Pada tabel 4.31 berikut ini akan diuraikan mengenai perangkat keras media penyimpanan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 4.87 – Perangkat Keras Media Penyimpanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Nama Media Storage	Deskripsi Data Storage	Kepermilik an	Nama Pemilik	Unit Pengelola	Lokasi Storage	Metode Akses Data Sharing
ASUSTORN AS	NAS	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Blitar	Bidang Infrastruktur DISKOMINFO Kota Blitar	Pusat Data DISKOMINFO Kota Blitar	Network Attached Storage (NAS)

4.7.5.6. Perangkat Keras Server

Pada tabel 4.32 berikut ini akan diuraikan mengenai perangkat keras server di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 4.88 – Perangkat Keras Server Dinas Komunikasi dan Informatika

Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Lokasi Perangkat Lunak Server	Perangkat Lunak Platform	Kapasitas Memori	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan
Web Server Virtualisasi (Proxmox)	Server virtualisasi untuk aplikasi berbasis web yang dimiliki Pemerintah Kota Blitar	Web Server	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Blitar	Balaikot a Blitar	Linux	256 GB	High End	9,6 TB	No n Ra id
Server Database	Server untuk manajemen database aplikasi berbasis Web milik Pemerintah Kota Blitar	Server Database	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Blitar	Balaikot a Blitar	Linux	200 GB	High End	2TB	No n Ra id
Server Blitarkota	Web server untuk domain dan subdomain Blitarkota	Web Server	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Blitar	Balaikot a Blitar	Linux	128 GB	High End	2,5 TB	No n Ra id
Server DNS 2	Server backup DNS	Domain Name Server	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Linux	128 GB	High End	1,2 TB	No n Ra id

Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Lokasi Perangkat Lunak Server	Perangkat Lunak Platform	Kapasitas Memori	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan
				Pemerintah Kota Blitar	Provinsi					
Server DNS 1	Server DNS	Domain Name Server	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Blitar		Linux		High End		Non RAID
Server Kominfo	Server untuk aplikasi milik Dinas Komunikasi dan Informatika	Web Server	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Blitar		Linux		High End		Non RAID
Server git	Server untuk aplikasi milik Dinas Komunikasi dan Informatika	Web Server	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Blitar		Linux	128 GB	High End	1,2TB	Non RAID
Server email	Server khusus untuk email Blitar Kota	Mail Server	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Blitar		Linux		High End		

4.7.5.7. Jaringan Intra Pemerintah

Pada tabel 4.32 berikut ini akan diuraikan mengenai jaringan intra pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 4.89 – Jaringan Intra Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika

Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Sistem Penghubung Layanan	Data dan Informasi
Metro OPD -1	Metro antar OPD yang dikelola oleh Bidang Aptika	Metro-net	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 GBps	Fiber Optic	OPD yang ada di Pemkot Blitar	Sistem Penghubung Layanan Intranet Blitar

• 4.7.6. Arsitektur Keamanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pada tabel 4.34 diuraikan mengenai Audit Keamanan SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel 4.90 – Audit Keamanan SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika

ID	Nama Kegiatan Audit Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Audit Keamanan SPBE	Hasil Audit Keamanan SPBE	Jenis Audit Keamanan	Tindak lanjut Audit Keamanan	Tanggal Kegiatan Audit Keamanan	Instansi (Dependency)
	Audit	Kegiatan Audit	perlu peningkatan	Eksternal	sebagian ditindaklanjuti	2020	Pemerintah Kota Blitar

Pada tabel 4.35 diuraikan mengenai Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel 4.91 – Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika

Nama	Jenis Standar Keamanan	Deskripsi	Tanggal Mulai Penerapan	Instansi
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021	Standar Nasional dan/atau Peraturan Terkait Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	19 Mei 2021	Badan Siber dan Sandi Negara
Peraturan Walikota tentang Penggunaan Nama Domain kotaBlitar.go.id	Regulasi Lainnya	Penataan nama domain		Dinas Komunikasi dan Informatika

• **4.8. Rencana Strategis SPBE Nasional**

Pada tabel 4.36 berikut ini akan dapat dilihat Rencana Strategis SPBE Nasional.

Tabel 4.92 – Peta Rencana SPBE Nasional

No.	Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu	Penanggung Jawab
A.	Tata Kelola SPBE			
	<i>Pembangunan Arsitektur SPBE</i>	<i>Sistem Informasi Arsitektur SPBE</i> <i>Arsitektur SPBE Nasional</i> <i>Arsitektur SPBE Instansi Pusat</i>	2018 – 2021 2018 – 2020 2020 - 2021	<i>Menteri PAN dan RB</i> <i>Menteri PAN dan RB</i> <i>Menteri/ Kepala Lembaga</i>

No.	Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu	Penanggung Jawab
		Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	2020 - 2021	Kepala Daerah
2	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE	- Tim Koordinasi SPBE Nasional - Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat - Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah	2018 - 2019 2018 - 2019 2018 - 2019	Menteri PAN dan RB Menteri/Kepala Lembaga Kepala Daerah
3	Penguatan Kebijakan SPBE	- Kebijakan makro - Kebijakan meso - Kebijakan mikro	2020 - 2024 2018 - 2019 2019 - 2025	Menteri PAN dan RB Tim Koordinasi SPBE Nasional Pimpinan K/L/D
4	Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE	- Evaluasi SPBE Nasional - Evaluasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah - Audit TIK	2018 - 2025 2018 - 2025 2018 - 2025	Menteri PANRB Pimpinan K/L/D Menteri Komunikasi Dan Informatika, Kepala BPPT, dan Kepala BSSN
B	Layanan SPBE			

No.	Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu	Penanggung Jawab
5	Survei Pengguna SPBE	Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna	2019 - 2025	Pimpinan K/L/D
6	Portal Pelayanan Publik yang Terintegrasi	Integrasi Proses Bisnis Pelayanan Publik Pemerintah Pusat	2018 - 2025	Menteri PAN dan RB
		Portal Pelayanan Publik Pemerintah Pusat	2018 - 2025	Menteri Komunikasi dan Informatika
		Integrasi Proses Bisnis Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	2018 - 2025	Menteri Dalam Negeri
		Portal Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	2018 - 2025	Menteri Komunikasi dan Informatika
7	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi	Integrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Pemantauan dan Evaluasi	2018 - 2020	Menteri PPN/ Bappenas
		Integrasi Kepegawaian	2018 - 2020	Menteri PAN RB

No.	Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu	Penanggung Jawab
		- Integrasi Kearsipan - Integrasi Pengaduan Publik - Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan	2018 – 2020 2018 – 2020 2018 – 2021	Menteri PAN RB Menteri PAN RB Menteri Komunikasi dan Informatika
8	Penyelenggaraan Manajemen Layanan	- Manajemen Layanan SPBE - Portal Pusat Layanan	2019 – 2021 2019 – 2021	Menteri Komunikasi Dan Informatika Menteri Komunikasi Dan Informatika
C	Teknologi Informasi dan Komunikasi			
9	Penyediaan Pusat Data Nasional	Pusat Data Nasional	2018 – 2022	Menteri Komunikasi Dan Informatika
10	Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah	- Pusat Pengendalian dan Jaringan Intra Pemerintah - Jaringan Intra Instansi Pusat - Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	2018 – 2022 2018 – 2022 2018 – 2022	Menteri Komunikasi Dan Informatika Pimpinan K/L/D Gubernur

No.	Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu	Penanggung Jawab
		Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2018 - 2022	Bupati/ Walikota
11	Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	2018 - 2022	Menteri Komunikasi Dan Informatika
12	Penyediaan Akses Berkualitas Terhadap Layanan SPBE di Seluruh Wilayah Indonesia	Jaringan Pita Lebar Yang Berkualitas	2018 - 2025	Menteri Komunikasi Dan Informatika
13	Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai	- Cloud Service - Integrasi Kanal Layanan - Repositori Aplikasi Umum - Kajian Teknologi Cloud Service	2018 - 2025 2018 - 2025 2018 - 2025 2018 - 2025	Menteri Komunikasi Dan Informatika Menteri Komunikasi Dan Informatika Menteri Komunikasi Dan Informatika Kepala BPPT
14	Pembangunan Portal Data Nasional	- Dukungan TIK Portal Data Nasional - Integrasi Data dan Pengelolaan	2019 - 2025 2019 - 2025	Menteri Komunikasi Dan Informatika Menteri PPN/ Bappenas

No.	Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu	Penanggung Jawab
		<i>Portal Data Nasional</i>		
15	<i>Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Nasional</i>	• <i>Manajemen Keamanan Informasi</i> • <i>Teknologi Keamanan Informasi</i> • <i>Budaya Keamanan Informasi</i>	2018 – 2020 2018 – 2025 2018 – 2025	<i>Kepala BSSN</i> <i>Kepala BSSN</i> <i>Kepala BSSN</i>
16	<i>Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan Untuk Pengambilan Keputusan yang Cepat dan Akurat</i>	• <i>Kajian Teknologi Kecerdasan Buatan</i> • <i>Penerapan Big Data Pemerintah</i> • <i>Penerapan Kecerdasan Buatan</i>	2019 – 2025 2019 – 2025 2019 – 2025	<i>Kepala BPPT</i> <i>Menteri Komunikasi Dan Informatika</i> <i>Menteri Komunikasi Dan Informatika</i>
D.	Sumber Daya Manusia SPBE			
17	<i>Promosi Literasi SPBE</i>	• <i>Pelatihan dan Sosialisasi</i>	2018 – 2025	<i>Tim Koordinasi SPBE Nasional</i>
18	<i>Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE</i>	• <i>Standar Kompetensi Teknis SPBE</i> • <i>Jabatan Fungsional yang Terkait SPBE</i>	2018 – 2022 2018 – 2025	<i>Menteri PAN dan RB</i> <i>Menteri PAN dan RB</i>

No.	Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu	Penanggung Jawab
		• Pola Remunerasi Bidang SPBE • Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi	2018 – 2025 2018 - 2025	Menteri PAN dan RB Pimpinan K/L/D
19	Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah	• Forum Kolaborasi SPBE	2019 - 2020	Menteri PAN dan RB

BAB 5 – Analisa Kesenjangan

5.1 Analisa Kesenjangan SPBE Pemkot Blitar 2021 – 2025

Untuk menselaraskan strategi pengembangan SPBE Pemerintah Kota Blitar dengan arah dan kebijakan strategi SPBE nasional, maka perlu dilakukan analisa kesenjangan kondisi terkini SPBE Pemerintah kota Blitar dibandingkan dengan indikator-indikator pada SPBE nasional. Dengan adanya analisa kesenjangan tersebut, akan dapat diketahui hal-hal apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar untuk meningkatkan indeks SPBE yang dimiliki. Pada tabel berikut ini dapat diketahui analisa kesenjangan kondisi terkini SPBE Pemerintah Kota Blitar dengan indikator-indikator pada SPBE nasional beserta rekomendasi untuk mencapai target tertentu.

Tabel 5.93 Analisa Kesenjangan SPBE Pemkot Blitar 2021 – 2025 beserta rekomendasi untuk mencapai target yang diinginkan

N O	INDIKAT OR	EXISTI NG		TARGET			Analisa Gap	Rekomendasi
		20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
1	Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pe merintah Daerah	2	2	3	4	4	Kebijakan yang ada tidak lengkap (tidak mengatur referensi dan domain arsitektur secara lengkap)	Rekomendasi untuk mencapai level 3: 1. Melengkapi pasal kebijakan yang berkaitan dengan referensi dan domain arsitektur yang lengkap. Domain arsitektur terdiri dari: arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur infrastruktur, arsitektur aplikasi, arsitektur keamanan, dan arsitektur layanan Rekomendasi untuk mencapai level 4: 2. Kebijakan internal Arsitektur SPBE yang mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/ atau antar IPPD. 3. Secara periodik dilakukan reuiu dan evaluasi
2	Kebijakan Internal	2	2	2	2	3	Kebijakan yang ada	Rekomendasi untuk mencapai level 3:

N O	INDIKAT OR	EXISTI NG		TARGET			Analisa Gap	Rekomendasi
		20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
	Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pe merntah Daerah						tidak lengkap (tidak mengatur peta rencana SPBE secara lengkap)	1. Melengkapi pasal kebijakan yang berkaitan dengan peta rencana SPBE. Peta rencana SPBE terdiri atas: tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan audit teknologi informasi dan komunikasi
3	Kebijakan Internal Manajemen Data	2	3	3	3	4	Kebijakan internal manajemen data belum mengatur seluruh proses ruang lingkup manajemen data	Rekomendasi untuk mencapai level 4: 1. Melengkapi pasal kebijakan internal manajemen data yang mencakup pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data
4	Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2	1	2	3	4	Kebijakan internal belum tersedia atau masih dalam bentuk draft	Rekomendasi untuk mencapai level 2: 1. Melengkapi pasal kebijakan internal manajemen data yang mengatur seluruh siklus pembangunan aplikasi. Siklus pembangunan aplikasi meliputi kajian kebutuhan, perencanaan, rancang bangun, implementasi, pengujian kelayakan, pemeliharaan, dan evaluasi Rekomendasi untuk mencapai level 3: 2. Kebijakan internal mengatur proses konsultasi terkait seluruh siklus pembangunan aplikasi

N O	INDIKAT OR	EXISTI NG		TARGET			Analisa Gap	Rekomendasi
		20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
								SPBE dengan perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK. Rekomendasi untuk mencapai level 4: 3. Kebijakan internal mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi oleh unit kerja/perangkat daerah. 4. Aplikasi SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik
5	Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3	3	4	5	5	Kebijakan internal telah mengatur penggunaan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di IPPD	Rekomendasi untuk mencapai level 4: 1. Melengkapi pasal kebijakan internal layanan pusat data untuk mengatur interkoneksi layanan pusat data antar instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar IPPD 2. Kebijakan direviu dan dievaluasi secara periodik Rekomendasi untuk mencapai level 5: 1. menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Layanan Pusat Data agar sesuai dengan kebutuhan IPPD ataupun perubahan lingkungan dan teknologi

N O	INDIKAT OR	EXISTI NG		TARGET			Analisa Gap	Rekomendasi
		20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
6	Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pe merintah Daerah	3	3	4	5	5	Kebijakan internal pengopera sian Layanan jaringan Intra IPPD sudah ditetapkan dan penggunaa nnya sudah pada seluruh unit kerja/pera ngkat daerah IPPD.	Rekomendasi untuk mencapai level 4: 1. Menerapkan kebijakan internal terkait pengoperasian Jaringan Intra IPPD secara menyeluruh yang mengatur interkoneksi Layanan Pusat data antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar INstansi Pusat dan Pemerintah daerah 2. Melakukan reviu dan evaluasi kebijakan secara periodik Rekomendasi untuk mencapai level 5: 3. Menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal jaringan intra instansi dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Jaringan Intra IPPD agar sesuai dengan kebutuhan IPPD ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
7	Kebijakan Internal Pengguna an Sistem Penghubu ng Layanan Instansi Pusat/Pe merintah Daerah	2	3	4	4	5	Kebijakan internal sudah memiliki pengatura n sistem penghubu ng layanan IPPD yang diterapkan pada seluruh unit kerja.	Rekomendasi untuk mencapai level 4: 1. menerapkan kebijakan internal terkait Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah secara menyeluruh dan telah mengatur keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 2. Melakukan reviu dan evaluasi kebijakan secara

N O	INDIKAT OR	EXISTI NG		TARGET			Analisa Gap	Rekomendasi
		20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
								periodik Rekomendasi untuk mencapai level 5: 3. menindaklanjuti hasil revidu dan evaluasi kebijakan Internal sistem Penghubung Layanan IPPD dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Sistem Penghubung terkait agar sesuai dengan kebutuhan IPPD ataupun perubahan lingkungan dan teknologi
8	Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3	2	3	3	4	Kebijakan internal sudah ditetapkan namun belum mengatur secara lengkap cakupan manajemen keamanan informasi	Rekomendasi untuk mencapai level 3: 1. Memperbaiki kebijakan mengenai manajemen keamanan informasi secara lengkap. Manajemen keamanan informasi meliputi: penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan keberlanjutan terhadap Keamanan Informasi. Rekomendasi untuk mencapai level 4: 2. Kebijakan internal untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di IPPD 3. Kebijakan telah direvidu dan dievaluasi secara periodik
9	Kebijakan Internal Audit	2	2	2	2	3	Kebijakan internal sudah	Rekomendasi untuk mencapai level 3: 1. Memperbaiki

N O	INDIKAT OR	EXISTI NG		TARGET			Analisa Gap	Rekomendasi
		20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
	Teknologi Informasi dan Komunikasi						ditetapkan namun belum mengatur secara lengkap mengenai Audit TIK	kebijakan mengenai audit teknologi informasi dan komunikasi yang terdiri atas: audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE dan audit keamanan SPBE. 2. Audit teknologi informasi meliputi: penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi, fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi, kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan, dan aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
1 0	Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah	3	3	4	4	5	Kebijakan internal mencakup pengaturan tugas-tugas tim koordinasi SPBE yang diterapkan di semua unit kerja atau semua perangkat daerah	Rekomendasi untuk mencapai level 4: 1. IPPD sudah memiliki arah koordinasi, kerja sama atau integrasi penerapan SPBE dengan instansi Pusat/ Pemerintah Daerah lain yang dituangkan pada tugas tugas Tim Koordinasi SPBE 2. Kebijakan telah direviu dan dievaluasi secara periodik Rekomendasi untuk mencapai level 5: 3. menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan TIM Koordinasi SPBE menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Tim Kooordinasi SPBE agar

N O	INDIKAT OR	EXISTI NG		TARGET			Analisa Gap	Rekomendasi
		20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
								SPBE sesuai dengan kebutuhan IPPD
1 1	Kematang an Arsitektur SPBE IPPD	2	1	3	4	5	Arsitektur SPBE masih belum ada atau masih dalam proses penyusuna n	Rekomendasi untuk mencapai level 3: 1. Membuat dokumen arsitektur SPBE yang mencakup sebagian referensi arsitektur SPBE dan enam domain arsitektur SPBE, yaitu arsitektur proses bisnis SPBE, arsitektur data dan informasi SPBE, arsitektur layanan SPBE, arsitektur aplikasi SPBE, arsitektur infrastruktur SPBE, dan arsitektur keamanan SPBE. 2. Memiliki dokumen arsitektur SPBE yang mencakup seluruh Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE. 3. Mendokumentasikan dokumen secara formal. Rekomendasi untuk mencapai level 4: 4. Memiliki dokumen arsitektur SPBE sesuai standar arsitektur SPBE Nasional 5. Telah melakukan reviu dan evaluasi secara periodik Rekomendasi untuk mencapai level 5: 6. Pemutakhiran dokumen sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi
1 2	Kematang an Peta Rencana	3	3	3	3	4	Dokumen peta rencana SPBE telah mencakup	Rekomendasi untuk mencapai level 4: 1. Memiliki dokumen peta rencana SPBE yang dituangkan dalam

N O	INDIKAT OR	EXISTI NG		TARGET			Analisa Gap	Rekomendasi
		20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
	SPBE IPPD						keseluruhan muatan peta rencana SPBE.	rencana kerja dan anggaran 2. Melakukan reviu dan evaluasi secara periodik
1 3	Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	2	1	2	2	3	Rencana atau Anggaran SPBE belum atau sudah tertuang dalam RKA/DPA.	Rekomendasi untuk mencapai level 2: 1. Membuat dokumen rencana dan anggaran SPBE dan sebagian dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di Instansi Pemerintah Daerah Rekomendasi untuk mencapai level 3: 2. Seluruh rencana dan anggaran SPBE IPPD dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK di IPPD.
1 4	Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	5	2	3	4	5	Memiliki dokumen proses bisnis sesuai pedoman yang berlaku	Rekomendasi untuk mencapai level 3: 1. Melakukan perbaikan pada proses bisnis sebagai bentuk penerapan inovasi proses bisnis Rekomendasi untuk mencapai level 4: 2. Melakukan penerapan inovasi proses bisnis melalui sistem elektronik 3. Melakukan reviu dan evaluasi secara periodik Rekomendasi untuk mencapai level 5: 4. melakukan perbaikan Inovasi Proses Bisnis yang diterapkan melalui sistem elektronik sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi

N O	INDIKAT OR	EXISTI NG		TARGET			Analisa Gap	Rekomendasi
		20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
1 5	Kematang an Pembang unan Aplikasi SPBE	3	1	2	3	4	Belum/ su dah melakukan proses/pe ngembang an aplikasi SPBE namu belum memenuhi siklus pembangu nan aplikasi (ad-hoc)	Rekomendasi untuk mencapai level 2: 1. Melakukan proses pembangunan/pengemb angan aplikasi 2. Memenuhi siklus pembangunan aplikasi Rekomendasi untuk mencapai level 3: 3. Sudah melakukan proses pembangunan/pengemb angan aplikasi SPBE 4. telah dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK Rekomendasi untuk mencapai level 4: 5. Pembangunan/pengemb angan aplikasi telah dilaksanakan secara terpadu dan dapat dikendalikan 6. melakukan reviu dan evaluasi secara periodik Rekomendasi untuk mencapai level 5: 7. Aplikasi SPBE telah dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan IPPD ataupun perubahan lingkungan dan teknologi
1 6	Kematang an Layanan Pusat Data	3	2	3	4	5	Memiliki layanan pusat data yang dimanfaat kan oleh sebagian unit	Rekomendasi untuk mencapai level 3: 1. Memiliki layanan pusat data yang memiliki prosedur pengoperasian baku pusat data yang dimanfaatkan oleh seluruh unit

N O	INDIKAT OR	EXISTI NG		TARGET			Analisa Gap	Rekomendasi
		20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
							kerja/pera ngkat daerah	kerja/perangkat daerah Rekomendasi untuk mencapai level 4: 2. Memiliki layanan pusat data yang mendukung interkoneksi/integrasi dengan pusat data yang diselenggarakan oleh IPPD lain atau Pusat Data nasional 3. Melakukan reviu dan evaluasi secara berkala Rekomendasi untuk mencapai level 5: 4. Layanan Pusat data IPPD telah dilakukan perbaikan atau peningkatan sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi
1 7	Kematang an Layanan Jaringan Intra IPPD	3	3	4	5	5	Menerapka n pengopera sian jaringan intra IPPD pada seluruh unit kerja/pera ngkat daerah	Rekomendasi untuk mencapai level 4: 1. Menerapkan pengoperasian jaringan intra IPPD secara menyeluruh 2. telah mengatur interkoneksi dan akses dengan jaringan intra IPPD lainnya, atau dengan Jaringan intra Pemerintah 3. Melakukan reviu dan evaluasi terhadap pengoperasian layanan jaringan intra IPPD Rekomendasi untuk mencapai level 5: 4. Melakukan peningkatan/perbaikan terhadap pengoperasian jaringan intra instansi pusat/pemerintah

N O	INDIKAT OR	EXISTI NG		TARGET			Analisa Gap	Rekomendasi
		20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
								daerah sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi
1 8	Kematang an Sistem Hubung Layanan IPPD	3	2	2	3	4	Menerapka n sistem penghubu ng layanan IPPD pada sebagian unit kerja/pera ngkat daerah	Rekomendasi untuk mencapai level 3: 1. menerapkan sistem penghubung layanan IPPD pada seluruh unit kerja/perangkat daerah Rekomendasi untuk mencapai level 4: 2. Menggunakan sistem penghubung layanan IPPD yang telah terintegrasi dengan sistem penghubung layanan IPPD lainnya dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (Nasional) 3. Melakukan reviu dan evaluasi secara berkala
1 9	Kematang an Tim Koordinas i SPBE IPPD	4	2	3	4	5	memiliki tim koordinasi SPBE yang ditetapkan dan mencakup tugas/prog ram kerja Tim Koordinasi SPBE namun belum dilaksanak an seluruhny a	Rekomendasi untuk mencapai level 3: 1. Tim Koordinasi SPBE melaksanakan keseluruhan tugas/program kerja, namun belum dikomunikasikan kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah Rekomendasi untuk mencapai level 4: 2. Tim Koordinasi SPBE IPPD mengkomunikasikan/me ngkoordinasikan tugas dan program kerja kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah 3. Melakukan reviu dan evaluasi terhadap tugas/program kerja

N O	INDIKAT OR	EXISTI NG		TARGET			Analisa Gap	Rekomendasi
		20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
								Rekomendasi untuk mencapai level 5: 4. Melakukan peningkatan/perbaikan sebagai hasil tindak lanjut reuiu dan evaluasi
20	Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3	3	4	4	5	Menetapkan dan membantu tim Kolaborasi Penerapan SPBE formal serta sudah melakukan pertemuan secara rutin namun masih dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada sebagian unit kerja/perangkat daerah	Rekomendasi untuk mencapai level 4: 1. Membangun Kolaborasi Penerapan SPBE secara terpadu seluruh unit kerja/perangkat daerah 2. Melakukan pertemuan secara rutin yang dikoordinasikan oleh pimpinan instansi Pusat/Kepala daerah 3. Melakukan reuiu dan evaluasi secara berkala terkait efektivitas Kolaborasi Penerapan SPBE Rekomendasi untuk mencapai level 5: 4. melakukan perbaikan pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE sebagai tindak lanjut hasil reuiu dan evaluasi secara berkesinambungan
21	Penerapan Manajemen Risiko SPBE	3	3	3	3	4	Telah menerapkan Manajemen Risiko SPBE sesuai dengan pedoman Manajemen Risiko SPBE yang berlaku	Rekomendasi untuk mencapai level 4: 1. Menyusun kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE yang ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE/Tim Koordinasi SPBE kepada seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah 2. Melakukan reuiu dan evaluasi secara berkala

N O	INDIKAT OR	EXISTI NG		TARGET			Analisa Gap	Rekomendasi
		20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
2 2	Penerapa n Manajeme n Keamana n Informasi	2	3	3	4	4	terdapat pengendali an Keamanan Informasi yang dilaksanak an oleh seluruh Unit Kerja/Pera ngkat Daerah	Rekomendasi untuk mencapai level 4: 1. menyusun strategi keamanan informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE berdasarkan risiko SPBE 2. Melakukan reviu dan evaluasi secara berkala
2 3	Penerapa n Manajeme n Data	3	2	3	3	4	Menerapka n kegiatan Manajeme n Data sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE, namun pelaksanaa nnya belum mengacu pada pedoman yang berlaku	Rekomendasi untuk mencapai level 3: 1. Menerapkan Manajemen Data sesuai dengan pedoman Manajemen Data yang berlaku yang memuat seluruh rangkaian proses pedoman Manajemen Data pengelolaan manajemen data SPBE meliputi: arsitektur data, data induk dan data referensi, basis data, dan kualitas data Rekomendasi untuk mencapai level 4: 2. Menyusun strategi Keamanan Data yang ditetapkan oleh Forum Satu Data/Tim Koordinasi SPBE IPPD yang diterapkan kepada seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah 3. Melakukan reviu dan evaluasi secara berkala
2 4	Penerapa n Manajeme n Aset TIK	2	2	3	4	5	Menerapka n kegiatan Manajeme n Aset TIK sesuai dan	Rekomendasi untuk mencapai level 3: 1. Menerapkan Manajemen Aset TIK sesuai dengan pedoman

N O	INDIKAT OR	EXISTI NG		TARGET			Analisa Gap	Rekomendasi
		20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
							selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku yang berlaku yang memuat seluruh rangkaian proses pedoman Manajemen Aset TIK Proses Manajemen Aset TIK: perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak Rekomendasi untuk mencapai level 4: 2. Menyusun strategi pengelolaan Aset TIK yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE IPPD yang diterapkan kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah 3. Melakukan reviu dan evaluasi secara berkala Rekomendasi untuk mencapai level 5: 4. Melakukan perbaikan penerapan Manajemen Aset TIK sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara berkesinambungan	
2 5	Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2	2	2	2	3	Menerapkan kegiatan Penerapan Kompetensi SDM SPBE sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana	Rekomendasi untuk mencapai level 3: 1. Menerapkan Kompetensi SDM SPBE yang memuat serangkaian proses Penerapan Kompetensi SDM SPBE mulai dari perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan SDM dalam SPBE 2. Memenuhi seluruh kompetensi SDM SPBE

N O	INDIKAT OR	EXISTI NG		TARGET			Analisa Gap	Rekomendasi
		20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
							SPBE, namun belum memenuhi seluruh kompetensi SDM SPBE. Penerapan Kompetensi SDM SPBE dilaksanakan tanpa mengacu pedoman yang berlaku	Kompetensi SDM SPBE: proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE sesuai pedoman yang berlaku
26	Penerapan Manajemen Pengetahuan	3	1	1	2	3	Belum atau sudah menerapkan kegiatan Penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana	Rekomendasi untuk mencapai level 2: 1. Membuat peta rencana penerapan manajemen pengetahuan SPBE 2. Menerapkan kegiatan Manajemen Pengetahuan SPBE sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE 3. Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE belum mengacu pedoman yang berlaku
27	Penerapan Manajemen Perubahan	2	2	3	4	5	Menerapkan kegiatan Manajemen Perubahan SPBE sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang	Rekomendasi untuk mencapai level 3: 1. Menerapkan Manajemen Perubahan sesuai dengan pedoman yang berlaku Muatan: aplikasi SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, layanan SPBE, keamanan SPBE Proses manajemen

N O	INDIKAT OR	EXISTI NG		TARGET			Analisa Gap	Rekomendasi
		20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
							tercantum dalam Peta Rencana SPBE, namun pelaksanaannya belum mengacu pada pedoman yang berlaku dan belum dilaksanakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah perubahan: perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE Rekomendasi untuk mencapai level 4: 2. Menyusun strategi pelaksanaan Manajemen Perubahan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE 3. Melaksanakan kegiatan manajemen Perubahan yang diterapkan kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah 4. Melakukan reviu dan evaluasi secara berkala Rekomendasi untuk mencapai level 5: 5. Melakukan perbaikan Manajemen Perubahan sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara berkesinambungan	
28	Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2	3	4	5	5	Sudah mengacu pada pedoman yang memuat seluruh proses Manajemen Layanan mulai dari pelayanan Pengguna SPBE dan pengopera	Rekomendasi untuk mencapai level 4: 1. menyusun strategi pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE 2. Pelaksanaan SPBE sudah terhadap seluruh proses manajemen Layanan SPBE dan didukung oleh penggunaan Sistem Aplikasi Manajemen Layanan

N O	INDIKAT OR	EXISTI NG		TARGET			Analisa Gap	Rekomendasi
		20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
							sian layanan SPBE.	3. Dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala Rekomendasi untuk mencapai level 5: 4. Melakukan perbaikan penerapan Manajemen Layanan SPBE sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara berkesinambungan
2 9	Pelaksana an Audit Infrastruk tur SPBE	2	1	2	2	3	Belum atau sudah melakukan audit infrastruk tur tanpa program kegiatan yang terencana	Rekomendasi untuk mencapai level 2: 1. Harus menyusun Peta Rencana Audit Infrastruktur SPBE. 2. Melakukan Audit Infrastruktur melalui program kegiatan yang sesuai dan selaras dengan Peta Rencana SPBE. 3. Melakukan Audit Infrastruktur SPBE secara rutin sesuai perencanaan, namun pemeriksaannya hanya meliputi sebagian hal pokok teknis yang disyaratkan Rekomendasi untuk mencapai level 3: 4. Melakukan Audit Infrastruktur sesuai dengan pedoman yang berlaku 5. Melakukan Audit Infrastruktur SPBE secara rutin dan pemeriksaannya sudah meliputi hal pokok teknis yang disyaratkan 6. Dilaksanakan oleh auditor TIK Internal IPPD

N O	INDIKAT OR	EXISTI NG		TARGET			Analisa Gap	Rekomendasi
		20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
3 0	Pelaksana an Audit Aplikasi SPBE	2	1	2	2	3	Belum atau sudah melakukan Audit Aplikasi tanpa program kegiatan yang terencana	Rekomendasi untuk mencapai level 2: 1. Harus membuat Peta Rencana Audit Aplikasi SPBE 2. melakukan Audit Aplikasi melalui program kegiatan yang sesuai dan selaras dengan Peta Rencana SPBE 3. Melakukan Audit Aplikasi SPBE secara rutin, namun pemeriksaannya hanya meliputi sebagian hal pokok teknis yang disyaratkan
3 1	Pelaksana an Audit Keamana n SPBE	3	1	2	2	3	Belum atau sudah melakukan audit keamanan tanpa program kegiatan yang terencana	Rekomendasi untuk mencapai level 2: 1. Membuat Peta rencana Pelaksanaan audit Keamanan SPBE 2. melakukan Audit Keamanan melalui program kegiatan yang sesuai dan selaras dengan Peta Rencana SPBE 3. Melakukan Audit Keamanan SPBE secara rutin, namun pemeriksaannya hanya meliputi sebagian hal pokok teknis yang disyaratkan
3 2	Layanan Perencan aan	4	4	4	4	5	sudah memiliki layanan Perencana an Berbasis Elektronik yang dapat berkolabor asi dengan layanan	Rekomendasi untuk mencapai level 5: 1. Memiliki Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembang kan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi 2. Melakukan optimalisasi melalui

N O	INDIKAT OR	EXISTI NG		TARGET			Analisa Gap	Rekomendasi
		20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
							SPBE lainnya	penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)
3 3	Layanan Pengangg aran	4	4	5	5	5	sudah memiliki layanan pengangg aran Berbasis Elektronik yang dapat berkolabor asi dengan layanan SPBE lainnya	Rekomendasi untuk mencapai level 5: 1. Memiliki Layanan Pengangg aran Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembang kan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi 2. Melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)
3 4	Layanan Keuangan	4	4	5	5	5	sudah memiliki layanan Keuangan Berbasis Elektronik yang dapat berkolabor asi dengan layanan SPBE lainnya	Rekomendasi untuk mencapai level 5: 1. Memiliki Layanan Keuangan Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembang kan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi 2. Melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)
3 5	Layanan Pengadaa n Barang dan Jasa	4	4	5	5	5	sudah memiliki layanan Pengadaan Barang/Ja sa Berbasis	Rekomendasi untuk mencapai level 5: 1. Memiliki Layanan Pengadaan Barang/Jasa Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembang

N O	INDIKAT OR	EXISTI NG		TARGET			Analisa Gap	Rekomendasi
		20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
							Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya	kan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi 2. Melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)
3 6	Layanan Kepegawaian	4	4	4	4	5	sudah memiliki layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya	Rekomendasi untuk mencapai level 5: 1. Memiliki Layanan Kepegawaian Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi 2. Melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)
3 7	Layanan Kearsipan Dinamis	4	4	5	5	5	sudah memiliki layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya	Rekomendasi untuk mencapai level 5: 1. Memiliki Layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi 2. Melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)

N O	INDIKAT OR	EXISTI NG		TARGET			Analisa Gap	Rekomendasi
		20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
3 8	Layanan Pengelola an Barang Milik Negara/D aerah	3	3	4	5	5	sudah memiliki Layanan Pengelolaa n BMN/BMD Berbasis Elektronik yang menyediak an layanan dimana pengguna dapat mengundu h dan mengungg ah informasi Pengelolaa n BMN/BMD dan sistem dapat merespon pengguna dengan mekanism e persetujua n dan validasi penghapus an BMN/BMD	Rekomendasi untuk mencapai level 4: 1. Memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya Rekomendasi untuk mencapai level 5: 2. Memiliki Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembang kan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi 3. Melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)
3 9	Layanan Pengawas an Internal Pemerinta h	3	3	4	4	5	sudah memiliki Layanan Pengawasa n Internal Pemerinta h yang menyediak an fungsi bertransak si, fungsi transaksi	Rekomendasi untuk mencapai level 4: 1. Memiliki Layanan Pengawasan Internal Pemerintah yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya Rekomendasi untuk mencapai level 5: 2. Memiliki Layanan Pengawasan Internal

N O	INDIKAT OR	EXISTI NG		TARGET			Analisa Gap	Rekomendasi
		20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
							data, validasi data, kemajuan status approval data, dan/atau analitik data	Pemerintah yang dapat ditingkatkan/dikembang kan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi 3. Melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)
4 0	Layanan Akuntabil itas Kinerja Organisas i	3	3	4	5	5	sudah memiliki Layanan Akuntabilit as Kinerja Berbasis Elektronik yang menyediak an layanan dimana pengguna dapat mengundu h dan mengungg ah informasi Akuntabilit as Kinerja Organisasi, dan sistem dapat merespon pengguna dengan mekanism e persetujua n dan validasi	Rekomendasi untuk mencapai level 4: 1. Memiliki Layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya Rekomendasi untuk mencapai level 5: 2. Memiliki Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembang kan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi 3. Melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)

N O	INDIKAT OR	EXISTI NG		TARGET			Analisa Gap	Rekomendasi
		20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
4 1	Layanan Kinerja Pegawai	3	3	3	3	4	sudah memiliki Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang menyediakan layanan dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi kinerja pegawai	Rekomendasi untuk mencapai level 4: 1. Memiliki Layanan Pengelolaan Layanan Kinerja Pegawai Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya
4 2	Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4	4	5	5	5	sudah memiliki layanan Kearsipan Dinamis Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya	Rekomendasi untuk mencapai level 5: 1. Memiliki Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi 2. Melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)
4 3	Layanan Data Terbuka	3	3	3	4	4	Sudah memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang menyediakan	Rekomendasi untuk mencapai level 4: 1. Memiliki Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya

N O	INDIKAT OR	EXISTI NG		TARGET			Analisa Gap	Rekomendasi
		20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
							an layanan dimana pengguna dapat mengunduh dan mengunggah informasi data terbuka	
4 4	Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4	4	5	5	5	Sudah memiliki Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti kearsipan, kepastakaan, dan/atau dengan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum IPPD lainnya	Rekomendasi untuk mencapai level 5: 1. Memiliki Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi 2. Melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)
4 5	Layanan Publik Sektor 1	4	4	5	5	5	sudah memiliki layanan	Rekomendasi untuk mencapai level 5: 1. Memiliki Layanan

N O	INDIKAT OR	EXISTI NG		TARGET			Analisa Gap	Rekomendasi
		20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
4 6	Layanan Publik Sektor 2	4	4	5	5	5	Publik Sektor Berbasis Elektronik yang dapat berkolabor asi dengan layanan SPBE lainnya, seperti layanan Kependud ukan, Perizinan dan/atau dengan Layanan Publik Sektor IPPD lainnya	Publik Sektor 1 Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembang kan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi 2. Melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)
4 7	Layanan Publik Sektor 3	5	4	5	5	5		

5.2 Analisa Kesenjangan Peta Rencana SPBE PEMKOT BLITAR 2021 – 2025

Untuk mendukung tercapainya peta rencana SPBE Pemerintah Kota Blitar, maka perlu diketahui kegiatan apa saja yang belum direalisasikan atau yang sudah direalisasikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran kegiatan-kegiatan yang selaras dengan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Blitar 2021 - 2025. Pada tabel berikut ini dapat dilihat analisa kesenjangan kegiatan yang sudah atau belum terealisasikan berdasarkan peta rencana SPBE Pemerintah Kota Blitar pada tahun 2021 – 2025.

Tabel 5.94 Analisa Kesenjangan realisasi kegiatan Peta Rencana SPBE Pemkot Blitar 2021 – 2025

V	Kegiatan	Keterangan	Belum Direali sasikan	Dalam Progres	Sudah direalis asikan	Analisa Kesenjangan
6- 1	Peta Jalan Tata Kelola SPBE					
1	Revisi Kebijakan Perwali terkait penerapan SPBE (Perwali Blitar	Revisi kebijakan SPBE yang sudah ada serta			V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan

V	Kegiatan	Keterangan	Belum Direalisasi	Dalam Progres	Sudah direalisasi	Analisa Kesenjangan
	nomor 49 tahun 2020)	penambahan kebijakan baru: - Kebijakan Manajemen Data - Pembangunan Aplikasi SPBE - Jaringan Intra Pemkot Blitar - Penggunaan Sistem Penghubung Layanan - Manajemen Keamanan Informasi - Audit TIK				
2	Penyusunan Kebijakan internal Manajemen Data	Kebijakan manajemen data harus meliputi manajemen arsitektur data, manajemen data induk, manajemen data referensi, manajemen basis data dan manajemen kualitas			V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
3	Penerapan Manajemen Data	Manajemen Data meliputi seluruh rangkaian proses pengelolaan	V Belum			Kegiatan belum terlaksana

V	Kegiatan	Keterangan	Belum Direalisasikan	Dalam Progres	Sudah direalisasikan	Analisa Kesenjangan
		arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data				
4	Revisi Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE				V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
5	Pembuatan prosedur (SOP) terkait pengoperasian Layanan Pusat Data		V Belum			Kegiatan belum terlaksana
6	Integrasi Pusat Data Kota Blitar dengan Pusat Data Pemprov Jawa Timur				V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
7	Integrasi Pusat Data Kota Blitar dengan Pusat Data Nasional				V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
8	Penambahan kapasitas storage untuk Backup & Recovery pada Pusat Data				V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
9	Sertifikasi nasional/internasional pusat data		V Perlu			Kegiatan belum terlaksana
10	Penyusunan Kebijakan Jaringan Intra Pemkot Blitar				V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
11	Pengukuran Quality of Service Jaringan				V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan

V	Kegiatan	Keterangan	Belum Direalisasi	Dalam Progres	Sudah direalisasi	Analisa Kesenjangan
	Intra Pemkot Blitar					
12	Penyusunan Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi	Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi harus meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian dan evaluasi kinerja)			V Perwali No 26 Tahun 2023 tentang MKI SPBE	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
13	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi pada seluruh OPD		V Belum			Kegiatan belum terlaksana
14	Pembentukan Tim Keamanan Informasi Pemkot Blitar				V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
15	Penyusunan Kebijakan Audit Teknologi Informasi	Audit TIK meliputi audit aplikasi, audit infrastruktur dan audit keamanan	V Belum			Kegiatan belum terlaksana
16	Pembaruan Proses Bisnis SPBE untuk semua OPD	Penyusunan Proses Bisnis SPBE Pemkot Blitar harus mengacu ke Permenpan		V		Kegiatan perlu diselesaikan

V	Kegiatan	Keterangan	Belum Direalisasi	Dalam Progres	Sudah direalisasi	Analisa Kesenjangan
		RB no 19 tahun 2019 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis				
17	Penyusunan Peraturan tentang Software/Free Open Source Software		V Belum			Kegiatan belum terlaksana
18	Penyusunan Peraturan tentang Standarisasi Infrastruktur Jaringan TIK					Analisa kesenjangan belum ada
19	Penyusunan Peraturan tentang Standarisasi Aplikasi/Sistem Informasi TIK				V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
20	Pemeliharaan dan Pengembangan Satu Data				V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
21	Sinkronisasi Arsitektur Data Pemkot Blitar - Satu Data Nasional		V Belum			Kegiatan perlu diselesaikan
22	Penyusunan kebijakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (Government Service Bus)				V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
23	Sertifikasi ISO 20000-1:2018 tentang Sistem		V			Kegiatan belum terlaksana

V	Kegiatan	Keterangan	Belum Direalisasi	Dalam Progres	Sudah direalisasi	Analisa Kesenjangan
	Manajemen Layanan					
24	Evaluasi SPBE secara periodik				V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
25	Evaluasi Rencana Induk SPBE secara periodik				V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
26	Evaluasi Kinerja Tim Koordinasi SPBE	Penyusunan program kerja tahunan, pelaksanaan program dan evaluasi capaian kinerja			V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
27	Forum Kolaborasi SPBE	Wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE. Anggota meliputi pelaku usaha, masyarakat, wakil perguruan tinggi, lembaga penelitian, dll. Forum kolaborasi dalam bentuk pertemuan informal/ FGD		V		Kegiatan perlu diselesaikan

V	Kegiatan	Keterangan	Belum Direalisasi	Dalam Progres	Sudah direalisasi	Analisa Kesenjangan
6-2	Peta Jalan Manajemen SPBE					
1	Pembuatan Pedoman dan Pembaharuan Pedoman Manajemen Risiko SPBE	Pedoman Manajemen Risiko SPBE Pemkot Blitar harus mengacu pada Permenpan RB no 5 tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE			V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
2	Pelaksanaan dan evaluasi penerapan Manajemen Risiko SPBE di seluruh OPD	Penerapan Manajemen Risiko SPBE harus direviu setiap tahun	V Belum, baru beberapa OPD			Kegiatan belum terlaksana
3	Penyusunan dan Pembaharuan Pedoman/Standar Keamanan Informasi	Pedoman/standar Keamanan Informasi harus mengacu ke Perban BSSN no 4 tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi	V Belum			Kegiatan belum terlaksana
4	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi beserta evaluasinya		V Belum			Kegiatan belum terlaksana
5	Penyusunan Pedoman dan Pembaharuan		V Belum			Kegiatan belum terlaksana

V	Kegiatan	Keterangan	Belum Direalisasi	Dalam Progres	Sudah direalisasi	Analisa Kesenjangan
	Pedoman Manajemen Data					
6	Penerapan Manajemen Data beserta evaluasinya	Penerapan Manajemen Data meliputi proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.	V Belum			Kegiatan belum terlaksana
7	Penyusunan Dokumen pedoman pelaksanaan Manajemen Aset TIK	Aset TIK mencakup perangkat lunak, perangkat keras, data dan informasi, infrastruktur, SDM, lisensi, data, SOP, outsource services, dan IT asset register.				Kegiatan belum terlaksana
8	Penerapan Manajemen Aset TIK beserta evaluasinya					Analisa kesenjangan belum ada
9	Penyusunan Dokumen pedoman pelaksanaan Manajemen SDM SPBE	Pedoman memuat serangkaian proses manajemen SDM SPBE mulai dari perencanaan	V Belum ada			Kegiatan belum terlaksana

V	Kegiatan	Keterangan	Belum Direalisasi	Dalam Progres	Sudah direalisasi	Analisa Kesenjangan
		n, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan SDM dalam SPBE				
10	Penerapan Manajemen SDM SPBE beserta evaluasinya		V Belum ada			Kegiatan belum terlaksana
11	Penyusunan Dokumen dan Pembaharuan Dokumen Panduan Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE,	Pedoman harus memuat serangkaian proses manajemen pengetahuan mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.	V Belum ada			Kegiatan belum terlaksana
12	Penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE di semua OPD beserta evaluasinya				V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
13	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Manajemen Perubahan	Pedoman Manajemen Perubahan SPBE harus meliputi	V			Kegiatan belum terlaksana

V	Kegiatan	Keterangan	Belum Direalisasi	Dalam Progres	Sudah direalisasi	Analisa Kesenjangan
		Perubahan Aplikasi, Perubahan Perangkat Keras, Perubahan Perangkat Lunak, Perubahan Infrastruktur, Perubahan Proses Bisnis, Perubahan Lingkungan Organisasi, Perubahan Layanan, Perubahan Data, Perubahan Keamanan dan Perubahan Arsitektur.				
14	Penyusunan Dokumen dan Pembaharuan Dokumen Pedoman Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE,		V			Kegiatan belum terlaksana
15	Penerapan Manajemen Perubahan SPBE di semua OPD beserta evaluasinya		V			Kegiatan belum terlaksana
6-3	Peta Jalan Layanan SPBE					
1	Pengembangan Sistem Informasi Eksekutif Terintegrasi				V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan

V	Kegiatan	Keterangan	Belum Direalisasi	Dalam Progres	Sudah direalisasi	Analisa Kesenjangan
2	Penyediaan software berlisensi				V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
3	Penerapan Sistem Penghubung Layanan untuk integrasi layanan SPBE				V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
4	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan				V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
5	Sinkronisasi layanan e-planning, e-budgeting dan manajemen keuangan dengan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)					Analisa kesenjangan belum ada
6	Integrasi Layanan Manajemen Kepegawaian dengan BKN dan Layanan Kinerja Pegawai			V		Kegiatan perlu diselesaikan
7	Integrasi Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Layanan Manajemen Keuangan					Analisa kesenjangan belum ada
8	Penerapan Layanan Kearsipan Dinamis di semua OPD					Analisa kesenjangan belum ada

V	Kegiatan	Keterangan	Belum Direalisasi	Dalam Progres	Sudah direalisasi	Analisa Kesenjangan
9	Integrasi Layanan Kearsipan Dinamis dengan Layanan Manajemen Kepegawaian, Manajemen Perencanaan dan Manajemen Keuangan				V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
10	Integrasi Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Layanan Pengadaan Barang/Jasa, Layanan Penganggaran dan Layanan Manajemen Keuangan					Analisa kesenjangan belum ada
11	Integrasi Layanan Pengawasan Internal dengan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik		V			Kegiatan belum terlaksana
12	Penambahan fitur analitik data pada Layanan					Analisa kesenjangan belum ada

V	Kegiatan	Keterangan	Belum Direalisasi	Dalam Progres	Sudah direalisasi	Analisa Kesenjangan
	Pengaduan Layanan Publik					
13	Pengembangan Layanan Data Terbuka Kota Blitar				V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
14	Integrasi Layanan Data Terbuka Kota Blitar dengan Layanan Data Terbuka Pemprov Jawa Timur dan Layanan Data Terbuka Nasional			V		Kegiatan sedang dalam pengajuan
15	Update Konten dan Penambahan Fitur Analitik Data Layanan Data Terbuka		V Belum			Kegiatan belum terlaksana
16	Penambahan fitur transaksi layanan JDIH dan integrasi dengan Layanan JDIH Nasional		V Belum			Kegiatan belum terlaksana
17	Pengembangan Portal Pusat Layanan SPBE		V Belum			Kegiatan belum terlaksana
18	Evaluasi Layanan secara periodik		V Perlu dilanjutkan			Kegiatan perlu dilanjutkan
19	Pengembangan Big Data Analytics pada layanan SPBE		V Perlu dilanjutkan			Kegiatan perlu dilanjutkan

V	Kegiatan	Keterangan	Belum Direalisasikan	Dalam Progres	Sudah direalisasikan	Analisa Kesenjangan
20	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan				V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
21	Pengembangan dan Update Portal Pusat Layanan SPBE		V Perlu dilanjutkan			Kegiatan perlu dilanjutkan
6-4	Peta Jalan Infrastruktur SPBE					
1	Pembangunan Jaringan Fiber Optic untuk Backbone untuk semua OPD				V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
2	Pemeliharaan, Pengamanan, Penambahan Jaringan Wired maupun Wireless				V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
3	Peningkatan dan Pengaturan Alokasi Bandwidth Internet				V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
4	Penyediaan Public Access Point (Free WiFi)				V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
5	Peningkatan Kinerja Data Center				V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
6	Pembangunan Hybrid Cloud Computing				V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
7	Pengembangan Disaster Recovery Center		V Belum			Kegiatan belum terlaksana
8	Pembangunan Emergency Call Center					Analisa kesenjangan belum ada

V	Kegiatan	Keterangan	Belum Direalisasikan	Dalam Progres	Sudah direalisasikan	Analisa Kesenjangan
9	Pengembangan Network Operation Center		V Belum			Kegiatan belum terlaksana
10	Penyediaan Helpdesk Service dan IT Support				V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
11	Pengembangan Security Operation Center		V Belum			Kegiatan belum terlaksana
12	Integrasi Data Center Pemkot Blitar ke Data Center Pemprov Jatim				V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
13	Integrasi Data Center Pemkot Blitar ke Pusat Data Nasional				V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
14	Penyediaan Network Monitoring Tools				V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
6-5	Peta Jalan Aplikasi SPBE					
1	Layanan dan Database Kesbangpol (E-LANDA)	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana			V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
2	CSR KOTA BLITAR	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
3	SMART SURVEY	Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan			V	Aplikasi perlu diupgrade

V	Kegiatan	Keterangan	Belum Direalisasi	Dalam Progres	Sudah direalisasi	Analisa Kesenjangan
4	Sistem Informasi Managemen Data Kesra (SIMDAKESRA)	Bagian Perekonomian dan Kesra			V	Aplikasi perlu diupgrade
5	Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (SIPAK)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
6	Sistem Informasi Kesehatan Hewan dan Peternakan (SIMASTAHANP ENAK)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	V			Aplikasi masih diperlukan untuk dibangun
7	Blitar Kota Serba Ada (BLIKOSDA)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	V			Aplikasi masih diperlukan untuk dibangun
8	Melaporkan Kelahiran dan Kematian (E-MELATI)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	V			Aplikasi masih diperlukan untuk dibangun
9	Sistem Informasi Fasilitas Kesehatan dan Peta Sebar Penyakit (INFOKES)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	V			Aplikasi masih diperlukan untuk dibangun
10	Sistem Verifikasi Data Kependudukan (SIDAKU)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	V			Aplikasi masih diperlukan untuk dibangun
11	Sistem Informasi Rawat Inap Elektronik (SIRINE)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	V			Aplikasi masih diperlukan untuk dibangun

V	Kegiatan	Keterangan	Belum Direalisasikan	Dalam Progres	Sudah direalisasikan	Analisa Kesenjangan
12	Sistem Informasi Dana Bergulir (SIDALIR)	Dinas Koperasi dan UKM	V			Aplikasi masih diperlukan untuk dibangun
13	Visit Blitar	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	V			Aplikasi masih diperlukan untuk dibangun
14	SLOGAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PB dan KB	V			Aplikasi masih diperlukan untuk dibangun
15	Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pendidikan Kota Blitar (PANSEL-DP)	Dinas Pendidikan	V			Aplikasi masih diperlukan untuk dibangun
16	Info PKL Kota Blitar (PEKA5)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian			V	Aplikasi perlu diupgrade
17	PINTAR ONLINE SHOP	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	V			Aplikasi masih perlu dibangun
18	Aplikasi Absensi Berbasis Lokasi (AKSI)	Badan Kepegawaian Daerah			V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
19	E-FORMASI	Badan Kepegawaian Daerah	V			Aplikasi masih perlu dibangun
20	SIAP	Badan Kepegawaian Daerah	V			Aplikasi masih perlu dibangun
21	Sistem Informasi Bea Perolehan Hak atas Tanah	Badan Pendapatan, Keuangan	V			Aplikasi masih perlu dibangun

V	Kegiatan	Keterangan	Belum Direalisasikan	Dalam Progres	Sudah direalisasikan	Analisa Kesenjangan
	dan Bangunan (SIBPHTB)	dan Aset Daerah				
22	Sistem Informasi Manajemen PBB (SIM PBB)	Badan Pendapatan , Keuangan dan Aset Daerah			V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
23	SISMIOP	Badan Pendapatan , Keuangan dan Aset Daerah	V			Aplikasi masih perlu dibangun
24	Sistem Terintegrasi Informasi Jabatan (SISTER MANJA)	Bagian Organisasi	V			Aplikasi masih perlu dibangun
25	Perijinan Nakes	Dinas Kesehatan	V			Aplikasi masih perlu dibangun
26	Aplikasi Pengelolaan Keuangan Sekolah Terpadu	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik	V			Aplikasi masih perlu dibangun
27	E-RUSUNAWA	Dinas Perumahan Rakyat	V			Aplikasi masih perlu dibangun
28	E-Klaim INA-CBG	RSUD Mardi Waluyo	V			Aplikasi masih perlu dibangun
6-6	Peta Jalan Keamanan SPBE					
1	Pembuatan Dokumen Tata Kelola Keamanan Informasi		V Belum			Kegiatan belum terlaksana
2	Penyusunan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE		V Belum			Kegiatan belum terlaksana

V	Kegiatan	Keterangan	Belum Direalisasikan	Dalam Progres	Sudah direalisasikan	Analisa Kesenjangan
3	Penyusunan standar teknis keamanan aplikasi berbasis web		V Belum			Kegiatan belum terlaksana
4	Penyusunan standar teknis keamanan aplikasi berbasis mobile		V Belum			Kegiatan belum terlaksana
5	Analisis Risiko Keamanan Informasi				V Sebagian	Kegiatan sudah selesai direalisasikan sebagian
6	Sosialisasi Edukasi Kesadaran Keamanan Informasi				V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
7	Analisis Kerentanan Keamanan SPBE				V Sebagian	Kegiatan sudah selesai direalisasikan sebagian
8	Penetration Testing untuk uji coba keamanan server dan infrastruktur jaringan				V Sebagian	Kegiatan sudah selesai direalisasikan sebagian
9	Pembentukan CSIRT Kota Blitar				V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
10	Penanganan Insiden Keamanan SPBE		V Belum			Kegiatan belum terlaksana
11	Penerapan sistem pencadangan berkala (backup & recovery)				V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan

V	Kegiatan	Keterangan	Belum Direalisasikan	Dalam Progres	Sudah direalisasikan	Analisa Kesenjangan
12	Penerapan Single Sign-on untuk autentikasi jaringan dan aplikasi				V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
13	Konfigurasi Firewall pada semua server	Terkonfigurasi pada semua server			V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
14	Konfigurasi Intrusion Detection pada Router	Terkonfigurasi pada semua router			V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
15	Penguatan keamanan pada semua server	Terkonfigurasi pada firewall			V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
16	Penerapan Digital Signature pada layanan – layanan penting				V	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
17	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Information System Security Professional (CISSP)		V Belum			Kegiatan belum terlaksana
18	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Information System Auditor (CISA)		V Belum			Kegiatan belum terlaksana
19	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Information Security Manager (CISM)		V Belum			Kegiatan belum terlaksana
20	Pelatihan dan Sertifikasi Certified		V Belum			Kegiatan belum terlaksana

V	Kegiatan	Keterangan	Belum Direalisasikan	Dalam Progres	Sudah direalisasikan	Analisa Kesenjangan
	Network Defender					
21	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Ethical Hacker		V Belum			Kegiatan belum terlaksana
22	Pelatihan dan Sertifikasi Systems Security Certified Practitioner (SSCP)		V Belum			Kegiatan belum terlaksana
23	Pelatihan dan Sertifikasi Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK)		V Belum			Kegiatan belum terlaksana
24	Pelatihan dan Sertifikasi Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security)		V Tidak perlu			Kegiatan tidak perlu untuk dilanjutkan
25	Sertifikasi ISO 27001:2013 Information Security Manajement System (ISMS)		V Belum			Kegiatan belum terlaksana
6-7	Peta Jalan Audit TIK					
1	Penyusunan Dokumen dan Pembaharuan Pedoman Audit Aplikasi	Audit Aplikasi SPBE terdiri atas Audit Aplikasi Umum dan Audit Aplikasi Khusus	V Belum			Kegiatan belum terlaksana

V	Kegiatan	Keterangan	Belum Direalisasikan	Dalam Progres	Sudah direalisasikan	Analisa Kesenjangan
2	Penyusunan Dokumen dan Pembaharuan Pedoman Audit Infrastruktur	Audit Infrastruktur meliputi penerapan tata kelola dan manajemen infrastruktur SPBE, infrastruktur SPBE, kinerja infrastruktur SPBE dan aspek infrastruktur SPBE lainnya.	V Belum			Kegiatan belum terlaksana
3	Penyusunan Dokumen dan Pembaharuan Dokumen Panduan Audit Keamanan	Audit Keamanan SPBE terdiri atas Audit Keamanan Aplikasi dan Audit Keamanan Infrastruktur.	V Belum			Kegiatan belum terlaksana
4	Audit Aplikasi secara mandiri	Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh auditor TIK internal			V Sudah terhadap SPSE 2021	Kegiatan sudah selesai direalisasikan
5	Audit Infrastruktur secara mandiri	Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh auditor TIK internal	V Belum			Kegiatan belum terlaksana
6	Audit Keamanan secara mandiri	Kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan oleh			V Menggunakan tools	Kegiatan sudah selesai direalisasikan

V	Kegiatan	Keterangan	Belum Direalisasikan	Dalam Progres	Sudah direalisasikan	Analisa Kesenjangan
		auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi internal			indeks KAMI	
7	Audit Aplikasi eksternal (auditor eksternal tersertifikasi)	Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh auditor TIK eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi	V Belum			Kegiatan belum terlaksana
8	Audit Infrastruktur eksternal (auditor eksternal tersertifikasi)	Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan oleh auditor TIK eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi	V Belum			Kegiatan belum terlaksana
9	Audit Keamanan eksternal (auditor eksternal tersertifikasi)	Kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor Sistem	V Belum			Kegiatan belum terlaksana

V	Kegiatan	Keterangan	Belum Direalisasikan	Dalam Progres	Sudah direalisasikan	Analisa Kesenjangan
		Keamanan Informasi.				
10	Tindak lanjut rekomendasi hasil audit aplikasi	Output: Laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	V Belum			Kegiatan belum terlaksana
11	Tindak lanjut rekomendasi hasil audit infrastruktur	Output: Laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	V Belum			Kegiatan belum terlaksana
12	Tindak lanjut rekomendasi hasil audit keamanan	Output: Laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	V Belum			Kegiatan belum terlaksana
13	Pelatihan dan Sertifikasi Audit Aplikasi	Pelatihan diadakan oleh Lembaga audit terakreditasi dan auditornya	V Belum			Kegiatan belum terlaksana

V	Kegiatan	Keterangan	Belum Direalisasikan	Dalam Progres	Sudah direalisasikan	Analisa Kesenjangan
		terdaftar di BPPT				
14	Pelatihan dan Sertifikasi Audit Infrastruktur	Pelatihan diadakan oleh Lembaga audit terakreditasi dan auditornya terdaftar di BPPT	V Belum			Kegiatan belum terlaksana
15	Pelatihan dan Sertifikasi Audit Keamanan	Pelatihan diadakan oleh Lembaga audit terakreditasi dan auditornya terdaftar di BPPT	V Belum			Kegiatan belum terlaksana
16	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Information Systems Auditor (CISA)	Sertifikasi internasional dari Information Systems Audit and Control Association (ISACA)	V Belum			Kegiatan belum terlaksana

5.3 Analisa Kesenjangan Dukungan Teknologi Informasi pada RPJMD Kota Blitar

Untuk mendukung tercapainya program pembangunan Pemerintah Kota Blitar, maka strategi pengembangan SPBE perlu diselaraskan dengan program pembangunan pemerintah Kota Blitar. Pada tabel berikut ini dapat dilihat analisa kesenjangan dukungan teknologi informasi yang diperlukan untuk tercapainya program pembangunan daerah yang direncanakan Pemerintah Kota Blitar untuk mendukung tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 5.95 Analisa kesenjangan dukungan teknologi informasi terhadap RPJMD Kota Blitar

Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan				
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Dukungan Teknologi Informasi	Analisa Kesenjangan
<i>Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis</i>	<i>Meningkatnya kerukunan antar umat beragama</i>	<i>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	<i>Perlu</i>	• Pengembangan aplikasi untuk memberikan materi terkait penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan seperti arti Pancasila, pentingnya Pancasila, pembuatan video animasi yang menggambarkan nilai-nilai Pancasila beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari, membuat tebak-tebakan untuk meningkatkan sisi interaktif aplikasi, pembuatan fitur Text-to-Speech, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan

Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan				
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Dukungan Teknologi Informasi	Analisa Kesenjangan
				• Bimbingan teknis penerapan aplikasi penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan kepada semua pengguna yang terkait • Pembuatan Peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan • Integrasi aplikasi penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Perlu	• Mengidentifikasi berbagai aplikasi program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat • Mengembangkan sebuah aplikasi umum yang memuat navigasi ke seluruh aplikasi program

Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan				
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Dukungan Teknologi Informasi	Analisa Kesenjangan
				pemerintahan dan kesejahteraan rakyat • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi umum • Bimbingan teknis penerapan aplikasi umum ke seluruh pengguna aplikasi • Buat peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi umum • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi umum • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi umum
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Perlu	• Menambahkan fitur pada aplikasi E-LANDA untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial seperti peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat, pengembangan mekanisme penyelesaian konflik, penguatan kapasitas aparat

Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan				
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Dukungan Teknologi Informasi	Analisa Kesenjangan
				penegak hukum, kolaborasi antar pihak terkait, monitoring dan early warning system, promosi dialog dan rekonsiliasi, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social • Bimbingan teknis penerapan aplikasi ke seluruh pengguna aplikasi • Pembuatan Peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial • Integrasikan aplikasi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial dengan aplikasi lain yang berkaitan • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas

Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan				
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Dukungan Teknologi Informasi	Analisa Kesenjangan
				dan fasilitasi penanganan konflik sosial • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perlu	• Menambahkan fitur pada aplikasi E-LANDA untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan seperti peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat, pengembangan mekanisme penyelesaian konflik, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, kolaborasi antar pihak terkait, monitoring dan early warning system, promosi dialog dan rekonsiliasi, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pemberdayaan dan

Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan				
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Dukungan Teknologi Informasi	Analisa Kesenjangan
				pengawasan organisasi kemasyarakatan • Bimbingan teknis penerapan aplikasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan ke seluruh pengguna aplikasi • Pembuatan Peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan • Integrasikan aplikasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dengan aplikasi lain yang berkaitan • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan				
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Dukungan Teknologi Informasi	Analisa Kesenjangan
		<i>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</i>	Tidak	-
	<i>Meningkatnya ketertiban umum</i>	<i>Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum</i>	Tidak	-
	<i>Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Kelestarian Cagar Budaya</i>	<i>Program Pengembangan Kebudayaan</i>	Perlu	• Menambahkan fitur pada website VISIT Blitar untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program pengembangan kebudayaan seperti data budaya yang ada di Blitar, memperbarui informasi terkait kebudayaan kota Blitar, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengembangan kebudayaan • Bimbingan teknis penerapan aplikasi aplikasi pengembangan kebudayaan ke seluruh pengguna aplikasi

Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan				
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Dukungan Teknologi Informasi	Analisa Kesenjangan
				• Pembuatan Peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi pengembangan kebudayaan • Integrasikan aplikasi pengembangan kebudayaan dengan aplikasi lain yang berkaitan • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengembangan kebudayaan • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pengembangan kebudayaan

Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan				
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Dukungan Teknologi Informasi	Analisa Kesenjangan
<i>Meningkatnya Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan, dan Anak</i>	<i>Menurunnya kesenjangan gender</i>	<i>Program pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</i>	<i>Perlu</i>	• Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan seperti kesadaran dan pendidikan, penguatan ekonomi perempuan, kepemimpinan dan partisipasi perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, akses kesehatan reproduksi dan layanan kesehatan, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan • Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan kepada semua pengguna yang terkait • Pembuatan Peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan

Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan				
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Dukungan Teknologi Informasi	Analisa Kesenjangan
				• Integrasi aplikasi pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan
		Program perlindungan Perempuan	Perlu	• Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak seperti pengaduan kekerasan terhadap
		Program Perlindungan Khusus Anak	Perlu	

Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan				
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Dukungan Teknologi Informasi	Analisa Kesenjangan
				perempuan dan anak, edukasi terhadap perlindungan perempuan dan anak, data kekerasan terhadap perempuan dan anak, pendaftaran relawan masyarakat, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi perlindungan perempuan dan anak • Bimbingan teknis penerapan aplikasi perlindungan perempuan dan anak kepada semua pengguna terkait • Pembuatan Peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi perlindungan perempuan dan anak. • Integrasi aplikasi perlindungan perempuan dan anak dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi perlindungan perempuan dan anak • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi perlindungan perempuan dan anak

Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter

Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Dukungan Teknologi Informasi	Analisa Kesenjangan
<i>Meningkatnya derajat kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia</i>	<i>Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan</i>	<i>Program pengelolaan pendidikan</i>	<i>Tidak</i>	-
	<i>Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat</i>	<i>Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat</i>	<i>Tidak</i>	-
		<i>Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat</i>	<i>Tidak</i>	-
		<i>Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman</i>	<i>Tidak</i>	-
		<i>Program pemberdayaan</i>	<i>Tidak</i>	-

Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter				
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Dukungan Teknologi Informasi	Analisa Kesenjangan
	<i>Meningkatnya prestasi olahraga dan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah</i>	<i>masyarakat bidang kesehatan</i>		
		<i>Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan</i>	<i>Perlu</i>	• Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan seperti data organisasi kepemudaan dan komunitas olahraga, aktivitas organisasi kepemudaan dan olahraga, data fasilitas kepemudaan dan olahraga, peminjaman fasilitas kepemudaan dan olahraga, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan olahraga • Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan olahraga • Pembuatan Peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan olahraga
		<i>Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan</i>	<i>Perlu</i>	

Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter				
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Dukungan Teknologi Informasi	Analisa Kesenjangan
				• Integrasi aplikasi pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan olahraga dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan olahraga • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan olahraga
	Meningkatnya pengendalian penduduk	Program pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Tidak	-
	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Program pembinaan perpustakaan	Perlu	• Memperbarui aplikasi pembinaan perpustakaan (INLISLITE dan E-PERPUSTAKAAN) agar menjadi mutakhir. Khususnya website INLISLITE yang tidak bisa diakses saat pengguna ingin mencari buku-buku yang tersedia. • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pembinaan perpustakaan

Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter

Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Dukungan Teknologi Informasi	Analisa Kesenjangan
				• Bimbingan teknis penerapan aplikasi pembinaan perpustakaan • Pembuatan Peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi pembinaan perpustakaan • Integrasi aplikasi pengembangan pembinaan perpustakaan dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pembinaan perpustakaan • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pembinaan perpustakaan

Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital

Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Dukungan Teknologi Informasi	Analisa Kesenjangan
Meningkatnya tingkat	Menurunnya ketimpangan antar penduduk miskin	Program perlindungan dan jaminan sosial	Tidak	-

Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital				
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Dukungan Teknologi Informasi	Analisa Kesenjangan
<i>kesejahteraan masyarakat</i>	<i>Meningkatnya ketahanan pangan daerah</i>	<i>Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat</i>	<i>Tidak</i>	-
		<i>Program Penanganan Kerawanan Pangan</i>	<i>Tidak</i>	-
	<i>Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat</i>	<i>Program Rehabilitasi sosial</i>	<i>Perlu</i>	
		<i>Program Pemberdayaan sosial</i>	<i>Perlu</i>	
	<i>Menurunnya tingkat pengangguran</i>	<i>Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja</i>	<i>Perlu</i>	• Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja seperti kebutuhan pasar kerja, pelatihan ketrampilan teknis, pelatihan ketrampilan non teknis, program magang dan penempatan kerja, pembinaan dan mentoring, sertifikasi dan pengakuan kompetensi, dll

Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital				
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Dukungan Teknologi Informasi	Analisa Kesenjangan
				• Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja • Bimbingan teknis penerapan aplikasi pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja ke seluruh pengguna aplikasi • Pembuatan Peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja • Integrasi aplikasi pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
		Program Penempatan tenaga kerja	Perlu	• Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja seperti pencocokan dan penilaian, informasi pekerjaan, bimbingan karir, pemantauan

Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital				
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Dukungan Teknologi Informasi	Analisa Kesenjangan
				dan evaluasi, kemitraan dengan pengusaha, dukungan pasca penempatan, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi penempatan tenaga kerja • Bimbingan teknis penerapan aplikasi penempatan tenaga kerja ke seluruh pengguna aplikasi • Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi penempatan tenaga kerja • Integrasi aplikasi penempatan tenaga kerja dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi penempatan tenaga kerja • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi penempatan tenaga kerja
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya nilai investasi daerah	Program Pengembangan iklim penanaman modal	Perlu	• Pembaharuan aplikasi Sistem Informasi Dana Bergulir (SIDALIR), SIMTAP, dan CSR Kota Blitar

Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital

Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Dukungan Teknologi Informasi	Analisa Kesenjangan
		Program Pelayanan penanaman modal	Perlu	• Pengembangan aplikasi layanan penanaman modal yang dapat dipergunakan untuk mengelola data seperti: profil Kota Blitar dalam bentuk angka, alur perizinan penanaman modal, pendaftaran calon investor, peluang menanamkan modal di lingkungan Kota Blitar, dll • Pembuatan pendoman penggunaan aplikasi layanan penanaman modal • Bimbingan teknis penerapan aplikasi layanan penanaman modal ke seluruh pengguna aplikasi • Pembuatan Peraturan Walikota tentang kebijakan layanan penanaman modal dan penerapan aplikasi layanan penanaman modal • Integrasikan aplikasi layanan penanaman modal dengan aplikasi lain yang berkaitan • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi layanan penanaman modal • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi layanan penanaman modal

Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital				
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Dukungan Teknologi Informasi	Analisa Kesenjangan
	<i>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian</i>	<i>Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan</i>	<i>Tidak</i>	-
		<i>Program Perencanaan dan pembangunan industri</i>	<i>Tidak</i>	-
	<i>Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan ekonomi kreatif</i>	<i>Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata</i>	<i>Perlu</i>	• Menambahkan fitur pada aplikasi VISIT dan BLIKOSDA sebagai aplikasi peningkatan daya tarik destinasi wisata seperti pembenahan infrastruktur, peningkatan kualitas produk dan layanan, pelestarian budaya dan alam, pengembangan produk wisata unggulan, pemasaran dan promosi, keterlibatan komunitas lokal • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi peningkatan daya tarik destinasi pariwisata • Bimbingan teknis penerapan aplikasi peningkatan daya tarik destinasi pariwisata ke seluruh pengguna aplikasi

Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital				
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Dukungan Teknologi Informasi	Analisa Kesenjangan
				• Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi peningkatan daya tarik destinasi pariwisata • Integrasikan aplikasi peningkatan daya tarik destinasi wisata dengan aplikasi lain yang berkaitan • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi peningkatan daya tarik destinasi pariwisata • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi peningkatan daya tarik destinasi wisata
		Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Perlu	• Mengembangkan aplikasi VISIT dan BLIKOSDA untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan pelaksanaan program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif seperti destinasi pariwisata, produk dan pengalaman wisata, pemberdayaan masyarakat lokal, pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam dan budaya, pengembangan keterampilan dan peningkatan kualitas layanan, dll

Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital				
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Dukungan Teknologi Informasi	Analisa Kesenjangan
				• Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif • Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif ke seluruh pengguna aplikasi • Pembuatan Peraturan walikota tentang aplikasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif • Integrasi aplikasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi peningkatan daya tarik destinasi pariwisata • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
	Meningkatnya nilai tambah bruto koperasi dan Usaha Mikro terhadap	Program Pengembangan UMKM	Perlu	• Pengembangan aplikasi untuk mengelola data UMKM seperti pelaku UMKM, produk/layanan UMKM, perizinan UMKM, kegiatan pengembangan UMKM, dll

Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital				
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Dukungan Teknologi Informasi	Analisa Kesenjangan
	<i>perekonomian daerah</i>			• Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi UMKM • Bimbingan teknis penerapan aplikasi UMKM ke seluruh pengguna aplikasi • Pembuatan peraturan walikota tentang aplikasi UMKM • Integrasi aplikasi UMKM dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi UMKM • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi UMKM
		<i>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</i>	<i>Perlu</i>	• Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM seperti akses pendanaan, pelatihan dan pengembangan ketrampilan, akses pasar dan promosi, akses teknologi dan inovasi, infrastruktur dan fasilitas pendukung, kemitraan dan jejaring usaha, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pemberdayaan UMKM

Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital				
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Dukungan Teknologi Informasi	Analisa Kesenjangan
				• Bimbingan teknis penerapan aplikasi pemberdayaan UMKM ke seluruh pengguna aplikasi • Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi pemberdayaan UMKM • Integrasi aplikasi pemberdayaan UMKM dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi peningkatan daya tarik destinasi pariwisata • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pemberdayaan UMKM
		Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Perlu	• Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan data koperasi, pengembangan dan pemberdayaan koperasi, pembinaan dan pengembangan pemasaran koperasi, izin koperasi, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi

Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital				
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Dukungan Teknologi Informasi	Analisa Kesenjangan
				• Bimbingan teknis penerapan aplikasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi ke seluruh pengguna aplikasi • Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi • Integrasi aplikasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi peningkatan daya tarik destinasi pariwisata • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi.
	Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan	Program Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Tidak	-
		Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan	Perlu	• Pengembangan aplikasi berbasis Internet of Things untuk mengelola data Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner. Setiap hewan yang dimonitor diberi identitas (RFID). Aplikasi dipergunakan untuk menyimpan data

Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital				
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Dukungan Teknologi Informasi	Analisa Kesenjangan
		masyarakat veteriner		riwayat kesehatan hewan, tindakan/penanganan yang pernah dilakukan terhadap hewan tersebut, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi untuk mengelola data kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner • Bimbingan teknis penerapan aplikasi untuk mengelola data kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ke seluruh pengguna aplikasi • Integrasi aplikasi untuk mengelola data kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dengan aplikasi lain • Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi untuk mengelola data kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi untuk mengelola data kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital

Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Dukungan Teknologi Informasi	Analisa Kesenjangan
				• Pembuatan SOP penggunaan aplikasi untuk mengelola data kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
		Program Perizinan usaha pertanian	Perlu	• Pengembangan aplikasi untuk mengelola perizinan usaha pertanian seperti perencanaan dan pengelolaan area pertanian; data-data pertanian seperti jenis tanah, jenis tanaman, benih, pupuk, pestisida; surat permohonan; surat izin pertanian, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi perizinan usaha pertanian • Bimbingan teknis penerapan aplikasi perizinan usaha pertanian • Pembuatan peraturan walikota tentang aplikasi perizinan usaha pertanian • Integrasi aplikasi perizinan usaha pertanian dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi perizinan usaha pertanian • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi perizinan usaha pertanian

Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital				
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Dukungan Teknologi Informasi	Analisa Kesenjangan
		<i>Program Pengelolaan perikanan budidaya</i>	<i>Perlu</i>	• Pengembangan aplikasi untuk mengelola data pengelolaan perikanan budidaya seperti perencanaan dan pengelolaan area budidaya, pemilihan spesies ikan yang tepat, manajemen pakan, pemantauan kesehatan ikan, penggunaan teknologi budidaya yang inovatif, pelatihan dan pendampingan, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengelolaan perikanan budidaya • Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengelolaan perikanan budidaya • Pembuatan peraturan walikota tentang aplikasi pengelolaan perikanan budidaya • Integrasi aplikasi pengelolaan perikanan budidaya dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi aplikasi pengelolaan perikanan budidaya • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pengelolaan perikanan budidaya

Misi 4: Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Dukungan Teknologi Informasi	Analisa Kesenjangan
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Program Penyelenggaraan Jalan	Perlu	• Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program penyelenggaraan jalan seperti pemeliharaan rutin jalan, perbaikan dan rehabilitasi jalan, pengembangan jalan, peningkatan keselamatan jalan, pengelolaan lalu lintas, pemberdayaan masyarakat, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi penyelenggaraan jalan • Bimbingan teknis penerapan aplikasi penyelenggaraan jalan • Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi penyelenggaraan jalan • Integrasi aplikasi penyelenggaraan jalan dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi penyelenggaraan jalan • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi penyelenggaraan jalan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Perlu	• Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) seperti pembangunan infrastruktur air minum, pengelolaan sumber daya air, pengolahan air minum, pengelolaan distribusi air,

				<i>pendidikan dan kesadaran masyarakat, kebijakan dan regulasi, dll</i> • <i>Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengelolaan sumber daya air</i> • <i>Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengelolaan sumber daya air</i> • <i>Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi pengelolaan sumber daya air</i> • <i>Integrasi aplikasi pengelolaan sumber daya air dengan aplikasi lain yang terkait</i> • <i>Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengelolaan sumber daya air</i> • <i>Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pengelolaan sumber daya air</i>
		<i>Program Penataan Bangunan Gedung</i>	<i>Perlu</i>	• <i>Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program penataan bangunan gedung seperti kebijakan tata bangunan, kawasan-kawasan potensial, rencana dan rancangan pembangunan umum, investasi, dll</i> • <i>Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi penataan bangunan gedung</i> • <i>Bimbingan teknis penerapan aplikasi penataan bangunan gedung</i> • <i>Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi penataan bangunan gedung</i> • <i>Integrasi aplikasi penataan bangunan gedung dengan aplikasi lain yang terkait</i>

				• <i>Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi penataan bangunan gedung</i> • <i>Pembuatan SOP penggunaan aplikasi penataan bangunan gedung</i>
	<i>Meningkatnya kualitas perhubungan</i>	<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>Perlu</i>	• <i>Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program penyelenggaraan dan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan seperti data lalu lintas, data angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan pengemudi, pengguna jalan, dsb</i> • <i>Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan</i> • <i>Bimbingan teknis penerapan aplikasi lalu lintas dan angkutan jalan</i> • <i>Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi lalu lintas dan angkutan jalan</i> • <i>Integrasi aplikasi lalu lintas dan angkutan jalan dengan aplikasi lain yang terkait</i> • <i>Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi lalu lintas dan angkutan jalan</i> • <i>Pembuatan SOP penggunaan aplikasi lalu lintas dan angkutan jalan</i>
<i>Meningkatnya kelayakhunian</i>	<i>Meningkatnya akses rumah layak huni</i>	<i>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</i>	<i>Perlu</i>	• <i>Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program perumahan dan kawasan permukiman kumuh seperti data kawasan perumahan dan permukiman kumuh, kondisi sosial</i>

				<i>ekonomi dan budaya masyarakat, tingkat kekumuhan kawasan, regulasi, perizinan, dll</i> • <i>Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi perumahan dan kawasan permukiman kumuh</i> • <i>Bimbingan teknis penerapan aplikasi perumahan dan kawasan permukiman kumuh</i> • <i>Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi perumahan dan kawasan permukiman kumuh</i> • <i>Integrasi aplikasi perumahan dan kawasan permukiman kumuh dengan aplikasi lain yang terkait</i> • <i>Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi perumahan dan kawasan permukiman kumuh</i> • <i>Pembuatan SOP penggunaan aplikasi lalu lintas dan angkutan jalan</i>
		<i>Program Pengembangan Perumahan</i>	<i>Perlu</i>	• <i>Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program pengembangan perumahan seperti data perumahan, kebijakan dan strategi perumahan, perizinan, regulasi, tata ruang perumahan/pemukiman, sarana dan prasarana perumahan/pemukiman</i>
	<i>Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman</i>	<i>Program Kawasan Permukiman</i>	<i>Perlu</i>	• <i>Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengembangan perumahan</i> • <i>Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengembangan perumahan</i> • <i>Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi pengembangan perumahan</i>

				• Integrasi aplikasi pengembangan perumahan dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengembangan perumahan • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pengembangan perumahan
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perlu	• Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum seperti pendataan, pengaduan, pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum • Bimbingan teknis penerapan aplikasi prasarana, sarana dan utilitas umum • Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi prasarana, sarana dan utilitas umum • Integrasi aplikasi prasarana, sarana dan utilitas umum dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi prasarana, sarana dan utilitas umum • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi prasarana, sarana dan utilitas umum
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Perlu	• Pengembangan aplikasi SIM Database Jalan dan Drainase untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase seperti jaringan drainase air berbentuk peta digital, pengaduan

				<i>drainase air, pendataan drainase, kawasan berpotensi kelebihan/kekurangan air dll</i> • <i>Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem drainase</i> • <i>Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem drainase</i> • <i>Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem drainase</i> • <i>Integrasi aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dengan aplikasi lain yang terkait</i> • <i>Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem drainase</i> • <i>Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem drainase</i>
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Perlu	• <i>Pengembangan aplikasi SIM Database Jalan dan Drainase serta Aplikasi Pelaporan Lingkungan Online (SILOLIK) untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah seperti jaringan pembuangan limbah, pengaduan pengelolaan limbah, pendataan limbah dan sumber-sumbernya, kawasan yang berpotensi memiliki/mengeluarkan limbah dll</i> • <i>Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah</i> • <i>Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah</i>

				• Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah • Integrasi aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Perlu	• Pengembangan aplikasi SIM Database Jalan dan Drainase untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum seperti data sumber penyedia air minum, jalur distribusi air minum, peta digital interaktif, inventaris sistem, pendataan kondisi air minum, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum • Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum • Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum • Integrasi aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum

				• Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Program penyelenggaraan penataan ruang	Perlu	• Pengembangan aplikasi SIM Tata Ruang (SIMTARU) untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program penyelenggaraan penataan ruang seperti manajemen data, peta tata ruang, izin dan sertifikasi pemanfaatan ruang, dokumen rencana kota, patrol, forum penataan ruang dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi penyelenggaraan penataan ruang • Bimbingan teknis penerapan aplikasi penyelenggaraan penataan ruang • Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi penyelenggaraan penataan ruang • Integrasi aplikasi penyelenggaraan penataan ruang dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi penyelenggaraan penataan ruang • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi penyelenggaraan penataan ruang
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Perlu	• Pengembangan aplikasi Pelaporan Lingkungan Online (SILOLIK) untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup seperti pengaduan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup, izin dan sertifikat pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, rancangan pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran, kebijakan terhadap
		Program Pembinaan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan	Perlu	

		<i>Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</i>		<i>pencemaran lingkungan, sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat dll</i>
	<i>Meningkatnya kualitas udara</i>	<i>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i>	<i>Perlu</i>	• <i>Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup</i> • <i>Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup</i> • <i>Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup</i> • <i>Integrasi aplikasi penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup dengan aplikasi lain yang terkait</i> • <i>Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup</i> • <i>Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup</i>
	<i>Meningkatnya kualitas lahan</i>	<i>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</i>	<i>Perlu</i>	• <i>Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program pengelolaan keanekaragaman hayati seperti perencanaan konservasi keanekaragaman hayati, kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati, forum pengelolaan keanekaragaman hayati, data keanekaragaman hayati, dll</i> • <i>Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengelolaan keanekaragaman hayati</i>

				• Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengelolaan keanekaragaman hayati Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi pengelolaan keanekaragaman hayati • Integrasi aplikasi pengelolaan keanekaragaman hayati dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengelolaan keanekaragaman hayati • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pengelolaan keanekaragaman hayati
	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	Program Pengelolaan Persampahan	Perlu	• Pengembangan aplikasi Pelaporan Lingkungan Online (SILOLIK) untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program pengelolaan sampah dan pengendalian bahan B3 dan limbah B3 seperti data informasi beserta peta digital tempat pembuangan sampah, data peta digital terkait perusahaan/kawasan yang berpotensi menghasilkan bahan B3 dan limbah B3, kebijakan pengelolaan sampah dan pengendalian bahan B3 dan limbah B3, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengelolaan sampah dan pengendalian bahan B3 dan limbah B3 • Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengelolaan sampah dan pengendalian bahan B3 dan limbah B3 • Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi pengelolaan sampah dan pengendalian bahan B3 dan limbah B3
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Perlu	

				• Integrasi aplikasi pengelolaan sampah dan pengendalian bahan B3 dan limbah B3 dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengelolaan sampah dan pengendalian bahan B3 dan limbah B3 • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pengelolaan sampah dan pengendalian bahan B3 dan limbah B3
	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Program Penanggulangan bencana	Perlu	• Mengidentifikasi potensi bencana alam yang mungkin terjadi di kota Blitar • Pengembangan aplikasi Layanan dan Database Kesbangpol (E-LANDA) untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program penanggulangan bencana seperti data-data bencana alam yang mungkin terjadi, cara pencegahan bencana alam, informasi mengenai cara menyelamatkan diri pada bencana alam tertentu, informasi bencana alam terkini, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi penanggulangan bencana • Bimbingan teknis penerapan aplikasi penanggulangan bencana • Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi penanggulangan bencana • Integrasi aplikasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi penanggulangan bencana

				• Pembuatan SOP penggunaan aplikasi penanggulangan bencana
--	--	--	--	--

Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Dukungan Teknologi Informasi	Analisa Kesenjangan
Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Perlu	• Mengembangkan sebuah aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah seperti perencanaan dan rancangan pembangunan daerah, kebijakan pembangunan daerah, pendataan mengenai pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dll • Pembuatan pedoman perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah • Bimbingan teknis penerapan aplikasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah ke seluruh pengguna aplikasi • Buat peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah • Integrasi aplikasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah

		<i>Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat</i>	<i>Perlu</i>	• Mengidentifikasi berbagai aplikasi program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat • Mengembangkan sebuah aplikasi umum yang memuat navigasi ke seluruh aplikasi program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi umum • Bimbingan teknis penerapan aplikasi umum ke seluruh pengguna aplikasi • Buat peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi umum • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi umum • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi umum
	<i>Meningkatnya kualitas Tata Kelola keuangan dan aset daerah</i>	<i>Program Pengelolaan keuangan daerah</i>	<i>Perlu</i>	• Mengembangkan sebuah aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program pengelolaan keuangan daerah seperti pengeluaran dan pemasukan daerah, pengajuan anggaran, penganggaran, laporan keuangan, regulasi pengelolaan keuangan daerah, grafik pengeluaran dan pemasukan daerah secara periodik (setiap bulan, triwulan, semester, atau tahun), dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah • Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengelolaan keuangan daerah ke seluruh pengguna aplikasi • Buat peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi pengelolaan keuangan daerah • Integrasi aplikasi pengelolaan keuangan daerah dengan aplikasi lain yang terkait
		<i>Program penyelenggaraan pengawasan</i>	<i>Perlu</i>	
		<i>Program pengelolaan pendapatan daerah</i>	<i>Perlu</i>	

				• <i>Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengelolaan keuangan daerah</i> • <i>Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah</i>
	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</i>	<i>Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</i>	<i>Perlu</i>	• <i>Memperbarui aplikasi Sistem Informasi Layanan Publik Terintegrasi Secara Elektronik (SILPUSITRON) dan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (SIPAK) agar menjadi mutakhir</i> • <i>Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</i> • <i>Bimbingan teknis penerapan aplikasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ke seluruh pengguna aplikasi</i> • <i>Buat peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</i> • <i>Integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan aplikasi lain yang terkait</i> • <i>Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</i> • <i>Pembuatan SOP penggunaan aplikasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</i>
		<i>Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</i>	<i>Perlu</i>	• <i>Mengembangkan sebuah aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan, bantuan biaya, dll</i> • <i>Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pemberdayaan masyarakat</i>

				• Bimbingan teknis penerapan aplikasi pemberdayaan masyarakat ke seluruh pengguna aplikasi • Buat peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi pemberdayaan masyarakat • Integrasi aplikasi pemberdayaan masyarakat dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pemberdayaan masyarakat • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pemberdayaan masyarakat
		Program pendaftaran penduduk	Perlu	• Mengembangkan sebuah aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program pendaftaran dan pencatatan sipil seperti data penduduk, data kelahiran, data kematian, data perkawinan dan perceraian, pengajuan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengangkatan anak, pengajuan perubahan berkas, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pendaftaran dan pencatatan sipil • Bimbingan teknis penerapan aplikasi pendaftaran dan pencatatan sipil ke seluruh pengguna aplikasi • Buat peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi pendaftaran dan pencatatan sipil • Integrasi aplikasi pendaftaran dan pencatatan sipil dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pendaftaran dan pencatatan sipil
		Program Pencatatan Sipil	Perlu	

				• Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pendaftaran dan pencatatan sipil
	Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Program aplikasi informatika	Perlu	• Mengembangkan sebuah aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program aplikasi informatika serta informasi dan komunikasi publik seperti berita mengenai kota Blitar terbaru, navigasi untuk menuju ke website Kota Blitar lainnya (beserta fungsi), pendataan aplikasi/website yang dimiliki kota Blitar, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi informatika serta informasi dan komunikasi publik • Bimbingan teknis penerapan aplikasi informatika serta informasi dan komunikasi publik • Buat peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi informatika serta informasi dan komunikasi publik • Integrasi aplikasi informatika serta informasi dan komunikasi publik dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi informatika serta informasi dan komunikasi publik • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi informatika serta informasi dan komunikasi publik
		Program informasi dan komunikasi publik	Perlu	
	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Program kepegawaian daerah	Perlu	• Memperbarui aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Online dan Terintegrasi (SISKOL) untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program kepegawaian daerah seperti manajemen absensi/presensi, pengajuan administrasi kepegawaian, helpdesk, manajemen tugas, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi kepegawaian daerah

				• <i>Bimbingan teknis penerapan aplikasi kepegawaian daerah ke seluruh pengguna aplikasi</i> • <i>Buat peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi kepegawaian daerah</i> • <i>Integrasi aplikasi kepegawaian daerah dengan aplikasi lain yang terkait</i> • <i>Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi kepegawaian daerah</i> • <i>Pembuatan SOP penggunaan aplikasi kepegawaian daerah</i>
	<i>Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah</i>	<i>Program Pengelolaan arsip</i>	<i>Perlu</i>	• <i>Memperbarui aplikasi pembinaan perpustakaan (INLISLITE dan E-PERPUSTAKAAN) agar menjadi mutakhir. Khususnya website INLISLITE yang tidak bisa diakses saat pengguna ingin mencari buku-buku yang tersedia.</i> • <i>Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pembinaan perpustakaan</i> • <i>Bimbingan teknis penerapan aplikasi pembinaan perpustakaan</i> • <i>Pembuatan Peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi pembinaan perpustakaan</i> • <i>Integrasi aplikasi pengembangan pembinaan perpustakaan dengan aplikasi lain yang terkait</i> • <i>Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pembinaan perpustakaan</i> • <i>Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pembinaan perpustakaan</i>

5.4 Analisa Kesenjangan Keberlangsungan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Pemkot Blitar

Untuk keberlangsungan kegiatan SPBE Pemerintah Kota Blitar, maka perlu pengidentifikasian kegiatan rencana strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Pemerintah Kota Blitar. Pengidentifikasian ini diperlukan untuk mengetahui kegiatan apa saja yang perlu dilanjutkan dan tidak perlu dilanjutkan. Pada tabel berikut ini dapat diketahui kegiatan-kegiatan yang perlu dilanjutkan pada rencana strategis Dinas Komunikasi informatika dan Persandian Pemerintah kota Blitar.

Tabel 5.96 Analisa kesenjangan keberlangsungan rencana strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Pemerintah Kota Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional/Formul asi Penghitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaa n (Tahun 2020)	Satuan	Keterangan (Perlu dilanjutkan/tida k)
1	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	(Bobot x Domain Kebijakan SPBE) + (Bobot x Domain Tata Kelola SPBE) + (Bobot x Layanan SPBE)	2,88	Indeks	Perlu dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya
		Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik		Nilai Hasil Monev PPID	Pemeringkatan monev Keterbukaan informasi publik (Berdasarkan Perki 5 Tahun 2016)	71	Angka	Perlu dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional/Formul asi Penghitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Satuan	Keterangan (Perlu dilanjutkan/tida k)
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik/ jumlah masyarakat x 100%		Persen	Perlu dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya
			Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan		dokumen	Perlu dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya
			Penyelenggaraa n Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasika n Informasi	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan		dokumen	Perlu dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional/Formul asi Penghitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Satuan	Keterangan (Perlu dilanjutkan/tida k)
				Program atau Kebijakan				
		Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK		Persentase layanan publik online dan terintegritasi	Jumlah Layanan publik on line dan terintegritasi	81	Angka	Perlu dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya
			Program Aplikasi Informatika	Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik	Rata rata persentase jaringan infrastruktur yang tersambung + persentase layanan spbe yang terintegrasi	45,69	Persen	Perlu dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya
			Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup	Presentase penerapan domain go.id / sub domain pada aplikasi administrasi pemerintahan dan layanan			Persen	Perlu dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional/Formul asi Penghitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Satuan	Keterangan (Perlu dilanjutkan/tida k)
			Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	public sesuai aturan				
			Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota		Domain	Perlu dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya
			Penatalaksana an dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		dokumen	Perlu dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional/Formul asi Penghitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Satuan	Keterangan (Perlu dilanjutkan/tida k)
			Penyelenggaraa n Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah		unit	Perlu dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya
			Pengelolaan E- Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layananan publik	Jumlah aplikasi pemerintahan dan layanan public yang tersedia/jumlah kebutuhan aplikasi pemerintahan dan layanan publik x 100%		Persen	Perlu dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya
			Penatalaksana an dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Dokume n	Perlu dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional/Formul asi Penghitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Satuan	Keterangan (Perlu dilanjutkan/tida k)
			Kabupaten/Kota					
			Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan		dokumen	Perlu dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya
				Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik			Perlu dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola		unit	Perlu dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya
			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan		dokumen	Perlu dilanjutkan pada

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional/Formul asi Penghitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Satuan	Keterangan (Perlu dilanjutkan/tida k)
			Intra Pemerintah Daerah	Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah			tahun-tahun berikutnya
			Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi		dokume n	Perlu dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya
			Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		perangk at daerah	Perlu dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan		unit	Perlu dilanjutkan pada

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional/Formul asi Penghitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Satuan	Keterangan (Perlu dilanjutkan/tida k)
			Pemerintahan Berbasis Elektronik	Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Berbasis Elektronik yang Dikembangkan			tahun-tahun berikutnya
			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		layanan	Perlu dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kot a Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasik an Sesuai dengan Masterplan Smart City	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City		Dokume n	Perlu dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber		dokume n	Perlu dilanjutkan pada

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional/Formul asi Penghitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Satuan	Keterangan (Perlu dilanjutkan/tida k)
			Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			tahun-tahun berikutnya
			Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		dokume n	Perlu dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya
		Meningkatny a Keamanan informasi		Indeks KAMI	Jumlah nilai per area keamanan informasi/Jumlah area penilaian x 100 %	20,31	Indeks	Perlu dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya
			Program penyelenggaraa n persandian untuk	Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan		20,31	persen	Perlu dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional/Formul asi Penghitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Satuan	Keterangan (Perlu dilanjutkan/tida k)
			pengamanan informasi	Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
			Penyelenggaraa n Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintsh daerah kab/kota	Jumlah OPD yang memanfaatkan sertifikat elektronik pada persuratan / sitem elektronik dibandingkan dengan jumlah seluruh OPD		Persen	Perlu dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya
			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		dokume n	Perlu dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional/Formul asi Penghitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Satuan	Keterangan (Perlu dilanjutkan/tida k)
			Kabupaten/Kota					
			Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		laporan	Perlu dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		laporan	Perlu dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional/Formul asi Penghitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Satuan	Keterangan (Perlu dilanjutkan/tida k)
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		perangk at daerah	Perlu dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya
			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi	Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi yang dilaksanakan pada tahun berjalan		Persen	Perlu dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya
			Operasionalisa si Jaring komunikasi sandi Pememerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi			Perlu dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Definisi Operasional/Formul asi Penghitungan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Satuan	Keterangan (Perlu dilanjutkan/tida k)
			Kabupaten/Kota					
2	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori SAKIP PD berdasarkan evaluasi/penilaian dari Inspektorat Daerah Kota Blitar	A	Nilai	Perlu dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya
		Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah dokumen IKM yang disusun / dokumen x 100%	Baik	Indeks	Perlu dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya

5.5 Analisa Kesenjangan Dukungan Pemkot Blitar terhadap Rencana Strategis SPBE Nasional

Untuk mendukung tercapainya program pembangunan Pemerintah Kota Blitar maka perlu diketahui capaian dan target yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Blitar. Pada tabel berikut ini dapat dilihat strategi yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Blitar untuk mendukung rencana strategis SPBE nasional beserta capaiannya.

Tabel 5.97 Analisa Kesenjangan Dukungan Pemkot Blitar terhadap Rencana Strategis SPBE Nasional

No.	Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu	Penanggung Jawab	Capaian dan Target
A. Tata Kelola SPBE					
1	Pembangunan Arsitektur SPBE	Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	2020-2021	Kepala Daerah	Target : 6 domain Capaian : 4 domain
2	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE	Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah	2018-2019	Kepala Daerah	Sudah terbentuk SK Tim (2020)
3	Penguatan Kebijakan SPBE	Kebijakan Mikro	2019-2025	Pimpinan K/L/D	Kewenangan atau kewajiban instansi pusat
4	Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE	Evaluasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	2018-2025	Pimpinan K/L/D	Target 2025 : 3,20 Capaian 2022 : 2,81 (Baik)
B. Layanan SPBE					
5	Survei Penggunaan SPBE	Survei Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna	2019-2025	Pimpinan K/L/D	Target 2025 : Sangat Baik Capaian 2022 : Baik
C. Teknologi Informasi dan Komunikasi					
6	Penyediaan jaringan Intra Pemerintah	Jaringan Intra Instansi Pusat	2018-2022	Pimpinan K/L/D	Kewenangan atau kewajiban instansi pusat

No.	Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu	Penanggung Jawab	Capaian dan Target
		Jaringan Intra Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	2018-2022	Bupati/ Walikota	Terkoneksinya jaringan intra penda diseluruh perangkat daerah, sekolah, instansi vertikal, fasilitas kesehatan, fasilitas publik
D. Sumber Daya Manusia SPBE					
7	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggaran SPBE	Pelatihan dan sertifikasi Kompetensi	2018-2025	Pimpinan K/L/D	Kewenangan atau kewajiban instansi pusat

5.6 Analisa Kesenjangan Penerapan Aplikasi

Pada tabel berikut ini akan dapat dilihat status aplikasi yang sudah dipergunakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Kota Blitar.

Tabel 5.98 Analisa Kesenjangan Penerapan Aplikasi

	NAMA APLIKASI	OPD	TAHUN	Masih Digunakan	Sudah Tidak Digunakan	Perlu Diupgrade
PELAYANAN						
1	Kependudukan					
	SIMPEDAK (Penyajian Data Kependudukan)	DISPENDUKCAPIL	2019	1		
	E-MELATI (Pelaporan Kelahiran dan Kematian)	DISKOMINFOTIK	2019			1

	NAMA APLIKASI	OPD	TAHUN	Masih Digunakan	Sudah Tidak Digunakan	Perlu Diupgrade
	SIDAKU (Verifikasi Data Kependudukan)	DISKOMINFOTIK	2020			1
	SIPAK (Pelayanan Administrasi Kependudukan)	DISPENDUKCAPIL	2022		1	
	SIMPONI CINTA (Sistem Informasi Pendaftaran Nikah Online Cepat, Inovatif, dan Tanggap)	KEC. SANANWETAN	2021	1		
2	Perpajakan dan Retribusi					
	SIM PBB (Manajemen PBB P2)	BPKAD	2021	1		
	PADAMOVEON (Pajak Daerah Memudahkan Orang Versi Online)	BPKAD	2017	1		
3	Pendaftaran dan Perijinan					
	PIRT Online (Produk Ijin Rumah Tangga)	DINKES	2018		1	
	PATRIA Dinkes (Pelayanan Rekomendasi dan Perijinan Kesehatan)	DINKES	2019	1		
	SIMTAP (SI Terpadu Satu Atap)	DPM NAKER DAN PTSP	2019		1	
	SILOLIK (Aplikasi Pelaporan Lingkungan Online)	DLH	2020	1		
	SIM IZIN	DPM-PTSP	2022	1		
4	Bisnis dan Inventasi					

	NAMA APLIKASI	OPD	TAHUN	Masih Digunakan	Sudah Tidak Digunakan	Perlu Diupgrade
	BLIKOSDA (Blitar Kota Serba Ada)	DISKOMINFOTIK	2018			1
5	Pengaduan Masyarakat					
	ULPIM (Layanan Pengaduan Masyarakat)	DISKOMINFOTIK	2013	1		
	Helpdesk LPSE	DISKOMINFOTIK	2019		1	
	WBS (Whistle Blowing System)	DISKOMINFOTIK	2020	1		
6	Publikasi Info Umum dan Pemerintahan					
	E-Litbang Daerah	BAPPEDA	2019	1		
ADMINISTRASI DAN MANAGEMEN						
7	Surat Elektronik					
	SIMAYA PERGI (Persuratan dan Kegiatan)	KEC. SUKOREJO	2019	1		
	SI SUKMA (Surat Masuk dan Keluar)	DIKDA	2019		1	
	SILPUSITRON (Pelayanan Publik Terintegrasi Secara Online)	DISKOMINFOTIK	2018	1		
	SIMASUR (Manajemen Arsip Surat)	BAG. UMUM	2008			1
	EMAIL RESMI PEMKOT	DISKOMINFOTIK	2019	1		
8	Sistem Dokumen Elektronik					

	NAMA APLIKASI	OPD	TAHUN	Masih Digunakan	Sudah Tidak Digunakan	Perlu Diupgrade
	SIKD (Kearsipan Dinamis)	DINPERPUSIP	2016		1	
	SIMASKEREN (Managemen Arsip dan Kearsipan)	DINPERPUSIP	2018			1
	SEKARTURI	DISKOMINFOTIK	2022	1		
9	Sistem Pendukung Keputusan					
	MEDSOS MAPPING (Mapping Media Sosial)	DISKOMINFOTIK	2019	1		
10	Kolaborasi dan Koordinasi					
	i-RAPAT (Manajemen Informasi dan Notulen Rapat)	DISKOMINFOTIK	2020	1		
11	Managemen Pelaporan Pemerintah					
	E-SPM (Standar Pelayanan Minimal)	DISKOMINFOTIK	2020			1
	ASAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Online)	DISKOMINFOTIK	2020	1		
	SI ANJAB ABK (Analisa Jabatan, Beban Kerja dan Evaluasi)	BAG. HUKUM DAN ORGANISASI	2012	1		
	KERETA (Klinik Reformasi Birokrasi Blitar Keren)	BAG. ORGANISASI	2022		1	

	NAMA APLIKASI	OPD	TAHUN	Masih Digunakan	Sudah Tidak Digunakan	Perlu Diupgrade
	SIVAKIP (Lembar Kerja Evaluasi - Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	INSPEKTORAT	2022	1		
LEGISLASI						
12	Sistem Administrasi DPRD					
13	Sistem Pemilu Daerah					
	Quick Count PILKADA	BAKESBANGPOL	2018		1	
14	Katalog Hukum Peraturan dan Perundangan					
	JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)	BAG. HUKUM DAN ORGANISASI	2019	1		
PEMBANGUNAN						
15	Sistem Informasi dan Managemen Data					
	DATAWAREHOUSE (Pusat Data Terpadu)	DISKOMINFOTIK	2020	1		
	ADATA Statistik	DISKOMINFOTIK	2020	1		
	MASTER DATA	DISKOMINFOTIK	2020	1		
	OPEN DATA	DISKOMINFOTIK	2022	1		
16	Perencanaan Pembangunan Daerah					
	SENOPPATI (Perencanaan Pembangunan Terintegrasi)	BAPPEDA	2017	1		

	NAMA APLIKASI	OPD	TAHUN	Masih Digunakan	Sudah Tidak Digunakan	Perlu Diupgrade
	E-Verifikasi PUPR (Verifikasi Dokumen Perencanaan)	DINAS PUPR	2019	1		
17	Sistem Perencanaan Proyek					
	SIRUP Lokal	DISKOMINFOTIK	2019		1	
	LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	DISKOMINFOTIK	2023	1		
18	Pengelolaan dan Monitoring Proyek					
	SILAPBAJA (Layanan Administrasi Pengadaan Barjas)	BAGIAN PEMBANGUNAN	2016	1		
	MONEV RKPD	BAPPEDA	2018	1		
	E-MONEV (Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa)	BAGIAN PEMBANGUNAN	2015	1		
	SIMONEV-KONSTRUKSI	DISPERKIM	2021	1		
19	Sistem Evaluasi dan Info Pembangunan					
	SIPEX (Pendukung Eksekutif)	BPKAD	2015	1		
	E-REVIEW Pembangunan	DISKOMINFOTIK	2020			1
	SIP TLHP (Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)	DISKOMINFOTIK	2017		1	
	RT KEREN	BAG ORGANISASI	2022	1		

	NAMA APLIKASI	OPD	TAHUN	Masih Digunakan	Sudah Tidak Digunakan	Perlu Diupgrade
	SI-PATRIAWAS (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan)	INSPEKTORAT	2021	1		
	KEUANGAN					
20	Sistem Anggaran					
	SIP APBD (Penyusunan APBD)	BPKAD	2010	1		
	SIP BLUD	RSD MARDI WALUYO	2015	1		
	SIP BOS (Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah)	DIKDA	2019		1	
	Aplikasi Pengelolaan Keuangan Sekolah Terpadu	DISKOMINFOTIK	2020			1
21	Sistem Kas dan Perbendaharaan					
	SIP KD (Keuangan Daerah)	BPKAD	2018	1		
22	Sistem Akuntansi Daerah					
	SIP KD (Keuangan Daerah)	BPKAD	2018	1		
	KEPEGAWAIAN					
23	Pengadaan PNS					
	e-FORMASI	BKD	2019	1		
24	Sistem Absensi dan Penggajian					
	AKSI (Absensi Berbasis Lokasi)	BKD	2021		1	
	SIM Gaji	BPKAD	2016	1		

	NAMA APLIKASI	OPD	TAHUN	Masih Digunakan	Sudah Tidak Digunakan	Perlu Diupgrade
25	Sistem Penilaian PNS					
	E-KINERJA	BKD	2018	1		
26	Arsip Dokumen Kepegawaian					
	E-MASTER	BKD	2018	1		
KEPEMERINTAHAN						
27	Pengelolaan Barang Daerah					
	SIKANDA (Informasi Kendaraan Daerah)	BPKAD	2017	1		
	SIMBADA (Aset Barang Daerah)	BPKAD	2019	1		
28	Katalog Barang Daerah					
	SIHANDAL (Data Pemetaan Aset Pemkot)	DINAS PUPR	2019	1		
29	Pengelolaan Pendapatan Daerah					
	SI BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)	BPKAD	2021	1		
30	Pengelolaan Perusahaan Daerah					
KEWILAYAHAN						
31	Tata Ruang dan Lingk Hidup					
	SIMOLIN (Monitoring Lingkungan)	DISKOMINFOTIK	2019	1		
	SIDOTI (Sistem Informasi Sedot Tinja)	DLH	2019	1		

	NAMA APLIKASI	OPD	TAHUN	Masih Digunakan	Sudah Tidak Digunakan	Perlu Diupgrade
	SIMTARU (Tata Ruang Kota)	DINAS PUPR	2018	1		
	SIMDARU (Database Rumah)	DISPERA	2021	1		
32	Potensi Daerah					
33	Kehutanan					
34	Pertanian, Peternakan dan Perkebunan					
	SIMASTAHANPENAK (Sistem Informasi Kesehatan Hewan dan Peternakan)	DINAS KETAHANAN PANGAN	2019			1
35	Perikanan dan Kelautan					
36	Pertambangan dan Energi					
37	Pariwisata					
38	IKM					
	SMART SURVEY	BAGIAN PEMBANGUNAN	2019			1
	SI KETAN (Kepuasan Masyarakat)	KEC. SANANWETAN	2021	1		
KEMASYARAKATAN						
39	Kesehatan					
	SIGON (Gudang Alat Konstrasepsi)	DP3A P2KB			1	
	SIRINE (Informasi Rawat Inap RS)	DISKOMINFOTIK	2019			1

	NAMA APLIKASI	OPD	TAHUN	Masih Digunakan	Sudah Tidak Digunakan	Perlu Diupgrade
	INFOKES (Informasi Peta Sebaran Penyakit)	DISKOMINFOTIK	2019			1
	BANK DATA KESEHATAN	DISKOMINFOTIK	2019	1		
	E-KESGA (KESEHATAN KELUARGA)	DINKES	2019	1		
	SIK SIMPUSTRONIK (Puskesmas Elektronik)	DINKES	2019	1		
40	Pendidikan					
	SIMGEPREK (Managemen Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan)	DIKDA	2018	1		
	PPDB ONLINE (Penerimaan Peserta Didik Baru Online)	DISKOMINFOTIK	2020	1		
	PETAGUSILAH (Pemetaan Data Guru dan Siswa)	DISKOMINFOTIK	2019	1		
	ASINARO (Aplikasi Media Pembelajaran dan Rapat Online)	DISKOMINFOTIK	2020	1		
	E-PERPUSTAKAAN	DINPERPUSIP	2018	1		
	INLISLITE (Buku Perpustakaan)	DINPERPUSIP	2017	1		
41	Ketenagakerjaan					
42	Industri dan Perdagangan					
	INFO PEKA5	DISPERINDAG	2021			1
	SIDALIR (Dana Begulir)	DINKOP UM	2018			1

	NAMA APLIKASI	OPD	TAHUN	Masih Digunakan	Sudah Tidak Digunakan	Perlu Diupgrade
	SICANTIK (Sistem Tata Cara Pelaporan Data & Informasi Koperasi)	DINKOP UM	2022	1		
43	Jaringan Pengaman Sosial					
	HIBAH BANSOS Online	DISKOMINFOTIK	2017		1	
	DAWAMI MANTAN (Data Warga Miskin dan Penerima Bantuan)	DISKOMINFOTIK	2020	1		
	SIMDAKESRA (Managemen Data Kesejahteraan Rakyat)	BAG KESRA	2018			1
	SARANA & PRASARANA					
44	Transportasi					
	SIM PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor)	DISHUB	2013	1		
	E-KIR	DISHUB	2018	1		
	SIPAKSABAR	DISHUB	2019	1		
	GPS KENDARAAN (Tracking GPS Kendaraan)	DISKOMINFOTIK	2019	1		
	E-PARKIR	DISHUB	2020	1		
45	Jalan dan Jembatan					
	SIM Database Jalan dan Drainase	DINAS PUPR	2019	1		
46	Terminal dan Pelabuhan					
47	Sarana Umum					

	NAMA APLIKASI	OPD	TAHUN	Masih Digunakan	Sudah Tidak Digunakan	Perlu Diupgrade
	PESAN KITA	DINAS PUPR	2020	1		
	SIAPIK (Administrasi Infrastruktur Konstruksi)	DINAS PUPR	2018	1		
	SISKOI (Sistem Informasi Fasilitas Keolahragaan)	DISPORA	2020	1		

BAB 6 – Rekomendasi Program Peningkatan SPBE

6.1. Strategi Pengembangan SPBE

6.1.1. Visi SPBE

Visi SPBE Pemerintah Kota Blitar adalah:

"Menjadi pemerintahan yang transparan, efisien, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang didukung oleh teknologi informasi yang canggih."

6.1.2. Misi SPBE

Misi SPBE Pemerintah Kota Blitar adalah:

"Melaksanakan transformasi digital dalam pemerintahan dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi administrasi, dan keterbukaan dengan berbagai inisiatif strategi yang akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Blitar"

6.1.3. Tujuan SPBE

Tujuan SPBE Pemerintah Kota Blitar adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan.
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

6.1.4. Sasaran SPBE

Sasaran SPBE Pemerintah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kematangan kebijakan internal SPBE
2. Meningkatnya kematangan penerapan tata Kelola SPBE
3. Meningkatnya kematangan penerapan manajemen SPBE
4. Meningkatnya kematangan penerapan audit SPBE
5. Meningkatnya kematangan penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
6. Meningkatnya kematangan penerapan layanan publik berbasis elektronik

6.1.5. Arah Kebijakan SPBE

1. Arah Penyusunan Kebijakan SPBE

Untuk memberikan pedoman pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Blitar maka perlu diatur kebijakan yang berkaitan dengan arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, pembangunan aplikasi, layanan pusat data, layanan jaringan intra, sistem penghubung layanan, manajemen keamanan informasi, audit TIK dan Tim Koordinasi SPBE. Semua kebijakan tersebut perlu mengacu pada pedoman evaluasi SPBE nasional. Kebijakan tersebut perlu direviu dan dievaluasi setiap periode tertentu. Kebijakan SPBE perlu diperbaiki berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

2. Arah kebijakan penerapan tata kelola SPBE

Untuk menerapkan tata Kelola SPBE yang efisien dan efektif di lingkungan Pemerintah Kota Blitar maka Pemerintah Kota Blitar perlu menerapkan beberapa aspek tata Kelola SPBE yaitu tata kelola arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, inovasi proses bisnis SPBE, Pembangunan aplikasi SPBE, layanan jaringan intra, system penghubung layanan, layanan pusat data, tim koordinasi SPBE, dan tim kolaborasi SPBE. Dalam penerapan tata Kelola SPBE maka perlu diperhatikan keterlibatan seluruh Perangkat Daerah dalam masing-masing aspek tata Kelola, integrasi dengan Pemerintah Daerah lain atau Instansi Pusat. Penerapan tata Kelola SPBE pada seluruh aspek perlu direviu dan dievaluasi secara periodik untuk memastikan bahwa tata Kelola SPBE yang dilaksanakan sesuai dengan perkembangan dan kebijakan terkini. Berdasarkan hasil evaluasi maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penerapan tata Kelola SPBE tersebut.

3. Arah kebijakan penerapan manajemen SPBE

Untuk menerapkan manajemen SPBE yang efisien dan efektif di lingkungan Pemerintah Kota Blitar maka Pemerintah Kota Blitar perlu menerapkan beberapa aspek manajemen SPBE yaitu: manajemen risiko, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, manajemen data, manajemen asset, manajemen sumber daya manusia, manajemen keamanan, manajemen layanan. Pada setiap aspek manajemen perlu dipersiapkan peta rencana penerapan manajemen, pedoman penerapan manajemen. Penerapan manajemen wajib diterapkan di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Penerapan manajemen perlu direviu dan dievaluasi secara periodik untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini. Pedoman dan peta rencana manajemen perlu direvisi sesuai dengan hasil reviu dan evaluasi.

4. Arah kebijakan penerapan audit SPBE

Pemerintah Kota Blitar perlu melaksanakan 3 jenis audit yaitu audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE dan audit keamanan SPBE. Untuk melaksanakan audit tersebut maka perlu disusun pedoman audit di masing-masing jenis audit. Selain itu juga diperlukan peta rencana pelaksanaan audit untuk masing-masing jenis audit tersebut. Untuk melaksanakan kegiatan audit tersebut maka Pemerintah Kota Blitar perlu menugaskan staf untuk mengikuti sertifikasi sebagai auditor TIK/ Sistem Informasi/ Keamanan Informasi. Untuk melaksanakan audit aplikasi dan audit infrastruktur maka calon auditor yang ditugaskan perlu mendapatkan sertifikasi sebagai auditor dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Sedangkan calon auditor yang akan melaksanakan audit keamanan informasi perlu mendapatkan sertifikasi sebagai auditor keamanan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Setelah kegiatan audit dilaksanakan oleh auditor internal maka kegiatan berikutnya adalah melaksanakan audit oleh auditor eksternal yaitu dari BRIN dan BSSN. Hasil dari audit perlu ditindaklanjuti. Kegiatan audit perlu dilaksanakan secara periodik.

5. Arah kebijakan penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang wajib diterapkan di Pemerintah Kota Blitar antara lain: layanan perencanaan,

layanan penganggaran, layanan Keuangan, layanan pengadaan barang dan jasa, layanan kepegawaian, layanan kearsipan dinamis, layanan pengelolaan barang milik negara/ daerah, layanan pengawasan internal, layanan akuntabilitas kinerja organisasi, layanan kinerja pegawai. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik ini wajib memprioritaskan penggunaan aplikasi umum dan aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan oleh Kementerian/ Lembaga. Jika tidak tersedia aplikasi umum dan aplikasi berbagi pakai maka Pemerintah Kota Blitar perlu mengembangkan aplikasi sendiri atau kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain yang telah memiliki aplikasi yang sejenis. Penggunaan aplikasi ini perlu direviu dan dievaluasi setiap periode tertentu. Dalam penerapan masing-masing layanan maka perlu dipersiapkan SOP pelaksanaan layanan. Layanan pengadaan barang dan jasa perlu memprioritaskan pengadaan produk lokal.

6. Arah kebijakan penerapan layanan public berbasis elektronik

Layanan publik berbasis elektronik yang wajib diterapkan di Pemerintah Kota Blitar antara lain: layanan pengaduan pelayanan public, layanan data terbuka, layanan jaringan dan dokumentasi hukum, layanan public sektor 1, layanan public sektor 2, layanan public sektor 3. Layanan public berbasis elektronik ini wajib memprioritaskan penggunaan aplikasi umum dan aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan oleh Kementerian/ Lembaga. Jika tidak tersedia aplikasi umum dan aplikasi berbagi pakai maka Pemerintah Kota Blitar perlu mengembangkan aplikasi sendiri atau kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain yang telah memiliki aplikasi yang sejenis. Penggunaan aplikasi ini perlu direviu dan dievaluasi setiap periode tertentu. Dalam penerapan masing-masing layanan maka perlu dipersiapkan SOP pelaksanaan layanan. Pengembangan layanan public sektor 1-3 perlu memprioritaskan pengembangan layanan untuk mendukung program prioritas Presiden seperti stunting, investasi, penanggulangan kemiskinan, dll.

6.1.6. Inisiatif dan Strategi Pengembangan SPBE

Inisiatif dan Strategi Pengembangan SPBE Pemerintah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

a. Inisiatif Pengembangan SPBE 1: Peningkatan kematangan kebijakan SPBE

Strategi pengembangan SPBE:

1. Peningkatan Kematangan Kebijakan Arsitektur SPBE
2. Peningkatan Kematangan Kebijakan Peta Rencana
3. Peningkatan Kematangan Kebijakan Manajemen Data
4. Peningkatan Kematangan Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE
5. Peningkatan Kematangan Kebijakan Layanan Pusat Data
6. Peningkatan Kematangan Kebijakan Layanan Jaringan Intra
7. Peningkatan Kematangan Kebijakan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan
8. Peningkatan Kematangan Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi

9. Peningkatan Kematangan Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
10. Peningkatan Kematangan Kebijakan Tim Koordinasi SPBE

b. Inisiatif Pengembangan SPBE 2: Peningkatan kematangan tata kelola SPBE

Strategi pengembangan SPBE:

1. Peningkatan kematangan Arsitektur SPBE
2. Peningkatan kematangan Peta Rencana SPBE
3. Peningkatan kematangan Rencana dan Anggaran Pengembangan SPBE
4. Peningkatan kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE
5. Peningkatan kematangan Pembangunan Aplikasi
6. Peningkatan kematangan Layanan Pusat Data
7. Peningkatan kematangan Layanan Jaringan Intra
8. Peningkatan kematangan Sistem Penghubung Layanan
9. Peningkatan kematangan Tim Koordinasi SPBE
10. Peningkatan kematangan Tim Kolaborasi Penerapan SPBE

c. Inisiatif Pengembangan SPBE 3: Peningkatan kematangan penerapan manajemen SPBE

Strategi pengembangan SPBE:

1. Peningkatan kematangan penerapan Manajemen Risiko SPBE
2. Peningkatan kematangan penerapan Manajemen Keamanan Informasi
3. Peningkatan kematangan penerapan Manajemen Data
4. Peningkatan kematangan penerapan Manajemen Aset TIK
5. Peningkatan kematangan penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia
6. Peningkatan kematangan penerapan Manajemen Pengetahuan
7. Peningkatan kematangan penerapan Manajemen Perubahan
8. Peningkatan kematangan penerapan Manajemen Layanan SPBE

d. Inisiatif Pengembangan SPBE 4: Peningkatan kematangan pelaksanaan audit SPBE

Strategi pengembangan SPBE:

1. Peningkatan kematangan pelaksanaan audit aplikasi SPBE
2. Peningkatan kematangan pelaksanaan audit infrastruktur SPBE
3. Peningkatan kematangan pelaksanaan audit keamanan SPBE

e. Inisiatif Pengembangan SPBE 5: Peningkatan kematangan layanan pemerintahan berbasis elektronik

Strategi pengembangan SPBE:

1. Peningkatan kematangan Layanan Perencanaan
2. Peningkatan kematangan Layanan Penganggaran
3. Peningkatan kematangan Layanan Keuangan
4. Peningkatan kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
5. Peningkatan kematangan Layanan Kepegawaian
6. Peningkatan kematangan Layanan Kearsipan Dinamis
7. Peningkatan kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
8. Peningkatan kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah
9. Peningkatan kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
10. Peningkatan kematangan Layanan Kinerja Pegawai

f. Inisiatif Pengembangan SPBE 6: Peningkatan kematangan layanan public berbasis elektronik

Strategi pengembangan SPBE:

1. Peningkatan kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
2. Peningkatan kematangan Layanan Data Terbuka
3. Peningkatan kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
4. Peningkatan kematangan Layanan Publik Sektor 1
5. Peningkatan kematangan Layanan Publik Sektor 2
6. Peningkatan kematangan Layanan Publik Sektor 3

• **6.2. Rencana Aksi Pengembangan SPBE**

Berdasarkan inisiatif strategi dan strategi pengembangan SPBE diatas maka perlu disusun rencana aksi yang diperlukan supaya inisiatif strategi dan strategi tersebut dapat dicapai. Pada bagian berikut ini akan dibahas mengenai rencana aksi yang diperlukan untuk mendukung tercapainya inisiatif strategi dan strategi pengembangan SPBE.

6.2.1. Rencana Aksi Untuk Mendukung Penerapan Inisiatif Strategi 1

Inisiatif Strategi 1 adalah "Peningkatan kematangan kebijakan SPBE". Untuk mendukung inisiatif strategi tersebut maka pada table 6.1. berikut ini akan dapat dilihat strategi dan rencana aksi yang diperlukan.

Tabel 6.99 Rencana Aksi Untuk Mendukung Inisiatif Strategi 1

No	Strategi	Rencana Aksi
1	Peningkatan kematangan Kebijakan Arsitektur SPBE	1. Melengkapi pasal kebijakan yang berkaitan dengan referensi dan domain arsitektur yang lengkap. Domain arsitektur terdiri dari: arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur infrastruktur,

No	Strategi	Rencana Aksi
		arsitektur aplikasi, arsitektur keamanan, dan arsitektur layanan 2. Kebijakan internal Arsitektur SPBE perlu mengatur integrasi SPBE antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/ atau antar IPPD. 3. Melakukan revidi dan evaluasi kebijakan secara periodik 4. Menindaklanjuti hasil revidi dan evaluasi kebijakan internal terkait arsitektur SPBE dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan arsitektur SPBE agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi
2	Peningkatan kematangan Kebijakan Peta Rencana	1. Melengkapi pasal kebijakan yang berkaitan dengan peta rencana SPBE. Peta rencana SPBE terdiri atas: tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan audit teknologi informasi dan komunikasi 2. Melakukan revidi dan evaluasi kebijakan secara periodik 3. Menindaklanjuti hasil revidi dan evaluasi kebijakan internal terkait peta rencana SPBE dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan peta rencana SPBE agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi
3	Peningkatan kematangan Kebijakan Manajemen Data	7. Melengkapi pasal kebijakan internal manajemen data yang mencakup pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data 8. Melakukan revidi dan evaluasi kebijakan secara periodik 9. Menindaklanjuti hasil revidi dan evaluasi kebijakan internal terkait manajemen data aplikasi dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan manajemen data agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi
4	Peningkatan kematangan Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE	1. Melengkapi pasal kebijakan internal Pembangunan aplikasi SPBE yang mengatur seluruh siklus pembangunan aplikasi. Siklus pembangunan aplikasi meliputi kajian kebutuhan, perencanaan, rancang bangun, implementasi, pengujian kelayakan, pemeliharaan, dan evaluasi 2. Kebijakan internal perlu mengatur proses konsultasi terkait seluruh siklus pembangunan

No	Strategi	Rencana Aksi
		aplikasi SPBE dengan perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK 3. Kebijakan internal mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan aplikasi oleh unit kerja/perangkat daerah. 4. Melakukan revidu dan evaluasi kebijakan secara periodic 5. Menindaklanjuti hasil revidu dan evaluasi kebijakan internal terkait pembangunan aplikasi dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan aplikasi agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi
5	Peningkatan kematangan Kebijakan Layanan Pusat Data	1. Melengkapi pasal kebijakan internal layanan pusat data untuk mengatur interkoneksi layanan pusat data antar instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar IPPD 2. Kebijakan direvidu dan dievaluasi secara periodic 3. Menindaklanjuti hasil revidu dan evaluasi kebijakan internal terkait Layanan Pusat Data dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Layanan Pusat Data agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi
6	Peningkatan kematangan Kebijakan Layanan Jaringan Intra	1. Melengkapi kebijakan internal terkait pengoperasian Jaringan Intra secara menyeluruh yang mengatur interkoneksi Layanan Pusat data antar Instansi Pusat, antar Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah daerah 2. Melakukan revidu dan evaluasi kebijakan secara periodic 3. Menindaklanjuti hasil revidu dan evaluasi kebijakan internal jaringan intra instansi dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Jaringan Intra agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.
7	Peningkatan kematangan Kebijakan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	1. Melengkapi kebijakan internal terkait Sistem Penghubung Layanan secara menyeluruh dan telah mengatur keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 2. Melakukan revidu dan evaluasi kebijakan secara periodic 3. Menindaklanjuti hasil revidu dan evaluasi kebijakan Internal sistem Penghubung Layanan dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Sistem

No	Strategi	Rencana Aksi
		Penghubung terkait agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi
8	Peningkatan kematangan Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi	1. Melengkapi kebijakan mengenai manajemen keamanan informasi secara menyeluruh. Manajemen keamanan informasi meliputi: penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan keberlanjutan terhadap Keamanan Informasi. 2. Kebijakan internal perlu dilengkapi dengan bahwa penerapan manajemen keamanan informasi wajib diberlakukan pada seluruh Perangkat Daerah 3. Kebijakan perlu direviu dan dievaluasi secara periodic 4. Menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan Internal manajemen keamanan informasi dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan manajemen keamanan informasi agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi
9	Peningkatan kematangan Kebijakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Memperbaiki kebijakan mengenai audit teknologi informasi dan komunikasi yang terdiri atas: audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE dan audit keamanan SPBE. 2. Kebijakan perlu mencantumkan bahwa audit teknologi informasi meliputi: penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi, fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi, kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan, dan aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya. 3. Kebijakan perlu direviu dan dievaluasi secara periodic 4. Menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan Internal audit SPBE dengan menetapkan suatu kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan audit SPBE agar sesuai dengan kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi
10	Peningkatan kematangan Kebijakan Tim Koordinasi SPBE	1. Memperbaiki kebijakan dengan mencantumkan perlunya memiliki arah koordinasi , kerja sama atau integrasi penerapan SPBE dengan instansi Pusat/ Pemerintah Daerah lain yang dituangkan pada tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE 2. Kebijakan perlu direviu dan dievaluasi secara periodic 3. Menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi kebijakan Tim Koordinasi SPBE dengan menetapkan suatu

No	Strategi	Rencana Aksi
		kebijakan sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan Tim Kooordinasi SPBE agar SPBE sesuai dengan kebutuhan

6.2.2. Rencana Aksi Untuk Mendukung Penerapan Inisiatif Strategi 2

Inisiatif Strategi 2 adalah "Menerapkan seluruh aspek tata kelola SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Blitar". Untuk mendukung inisiatif strategi tersebut maka pada table 6.2. berikut ini akan dapat dilihat strategi dan rencana aksi yang diperlukan.

Tabel 6.100 Rencana Aksi Untuk Mendukung Inisiatif Strategi 2

No	Strategi	Rencana Aksi
1	Peningkatan kematangan Arsitektur SPBE	1. Membuat dokumen arsitektur SPBE yang mencakup sebagian referensi arsitektur SPBE dan enam domain arsitektur SPBE, yaitu arsitektur proses bisnis SPBE, arsitektur data dan informasi SPBE, arsitektur layanan SPBE, arsitektur aplikasi SPBE, arsitektur infrastruktur SPBE, dan arsitektur keamanan SPBE. 2. Menyusun dokumen arsitektur SPBE sesuai standar arsitektur SPBE Nasional 3. Memproses legalitas dokumen arsitektur SPBE 4. Reviu dan evaluasi arsitektur SPBE secara periodik 5. Pemutakhiran dokumen arsitektur SPBE sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi
2	Peningkatan kematangan Peta Rencana SPBE	1. Membuat dokumen Peta Rencana SPBE yang mencakup peta rencana tata kelola SPBE, peta rencana manajemen SPBE, peta rencana audit SPBE, peta rencana aplikasi SPBE, peta rencana infrastruktur SPBE, peta rencana keamanan SPBE, peta rencana layanan SPBE. 2. Menyusun dokumen peta rencana SPBE sesuai standar arsitektur SPBE Nasional 3. Memproses legalitas dokumen peta rencana SPBE 4. Reviu dan evaluasi peta rencana SPBE secara periodik 5. Pemutakhiran dokumen arsitektur SPBE sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi
3	Peningkatan kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	1. Seluruh Perangkat Daerah Menyusun dokumen rencana dan anggaran SPBE 2. Dokumen Rencana dan Anggaran SPBE seluruh Perangkat Daerah dikonsultasikan kepada Dinas Kominfo

No	Strategi	Rencana Aksi
		3. Dokumen Rencana dan Anggaran SPBE seluruh Perangkat Daerah dikonsultasikan kepada Bappeda 4. Rencana dan anggaran SPBE direviu dan dievaluasi secara periodik 5. Revisi rencana dan anggaran SPBE sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi
4	Peningkatan kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1. Menyusun dokumen proses bisnis sesuai standar 2. Perbaiki proses bisnis sebagai bentuk penerapan inovasi proses bisnis 3. Menerapkan inovasi proses bisnis dengan dukungan sistem elektronik/ system aplikasi 4. Reviu dan evaluasi inovasi proses bisnis secara periodic 5. Perbaiki Inovasi Proses Bisnis yang diterapkan melalui sistem elektronik sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi
5	Peningkatan kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1. Menentukan siklus Pembangunan aplikasi 2. Seluruh proses pembangunan/pengembangan aplikasi wajib mengikuti siklus Pembangunan aplikasi 3. Setiap tahap Pembangunan aplikasi wajib memiliki dokumentasinya 4. Setiap proses Pembangunan aplikasi wajib dikonsultasikan kepada Dinas Kominfo. 5. Setiap pembangunan/pengembangan aplikasi wajib dilaksanakan secara terpadu dan dapat dikendalikan 6. Reviu dan evaluasi pembangunan aplikasi secara periodic 7. Peningkatan fungsi aplikasi SPBE sesuai kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi
6	Peningkatan kematangan Layanan Pusat Data	1. Memiliki layanan pusat data 2. Menyusun prosedur pengoperasian baku pusat data yang dimanfaatkan oleh seluruh perangkat daerah 3. Interkoneksi/ integrasi layanan pusat data dengan pusat data yang diselenggarakan oleh IPPD lain atau Pusat Data nasional 4. Melakukan reviu dan evaluasi layanan pusat data secara berkala 5. Perbaiki Layanan Pusat data IPPD sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi

No	Strategi	Rencana Aksi
7	Peningkatan kematangan Layanan Jaringan Intra	1. Seluruh Perangkat Daerah terhubung dalam layanan jaringan intra 2. Layanan jaringan intra terhubung dengan jaringan intra IPPD lainnya, atau dengan Jaringan intra Pemerintah 3. Melakukan reviu dan evaluasi terhadap pengoperasian layanan jaringan intra 4. Melakukan peningkatan/perbaikan terhadap pengoperasian jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi
8	Peningkatan kematangan Sistem Penghubung Layanan	1. Seluruh Perangkat Daerah diwajibkan mempergunakan sistem penghubung layanan 2. Sistem penghubung layanan terintegrasi dengan sistem penghubung layanan IPPD lainnya dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (Nasional) 3. Melakukan reviu dan evaluasi penerapan sistem penghubung layanan secara berkala 4. Perbaikan sistem penghubung layanan sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi
9	Peningkatan kematangan Tim Koordinasi SPBE	1. Tim Koordinasi SPBE menyusun program kerja 2. Tim Koordinasi SPBE mensosialisasikan program kerja ke seluruh Perangkat Daerah. 3. Tim Koordinasi SPBE melaksanakan program kerja 4. Melakukan reviu dan evaluasi terhadap tugas/program kerja 5. Melakukan peningkatan/perbaikan program kerja sebagai hasil tindak lanjut reviu dan evaluasi
10	Peningkatan kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1. Membentuk Tim Kolaborasi SPBE secara terpadu dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah. 2. Melegalkan Tim Kolaborasi SPBE dalam bentuk SK Walikota 3. Menyusun program kerja Tim Kolaborasi SPBE 4. Tim Kolaborasi SPBE melaksanakan seluruh program kerja 5. Melakukan pertemuan secara rutin yang dikoordinasikan oleh Walikota atau Sekretaris Daerah. 6. Melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terkait efektivitas Kolaborasi Penerapan SPBE

No	Strategi	Rencana Aksi
		7. Perbaiki pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi secara berkesinambungan

6.2.3.Rencana Aksi Untuk Mendukung Penerapan Inisiatif Strategi 3

Inisiatif Strategi 3 adalah "Peningkatan kematangan penerapan manajemen SPBE". Untuk mendukung inisiatif strategi tersebut maka pada table 6.3. berikut ini akan dapat dilihat strategi dan rencana aksi yang diperlukan.

Tabel 6.101 Rencana Aksi Untuk Mendukung Inisiatif Strategi 3

No	Strategi	Rencana Aksi
1	Peningkatan kematangan penerapan Manajemen Risiko SPBE	1. Menyusun peta rencana manajemen risiko 2. Menyusun pedoman penerapan manajemen risiko 3. Melaksanakan program yang tercantum dalam peta rencana manajemen risiko sesuai dengan pedoman manajemen risiko 4. Menyusun kebijakan strategis Manajemen Risiko SPBE yang ditetapkan oleh Komite Manajemen Risiko SPBE/Tim Koordinasi SPBE 5. Sosialisasi dan penerapan kebijakan dan pedoman manajemen risiko kepada seluruh Perangkat Daerah 6. Melakukan reviu dan evaluasi penerapan manajemen risiko secara berkala 7. Tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi penerapan manajemen risiko.
2	Peningkatan kematangan penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1. Menyusun peta rencana manajemen keamanan informasi 2. Menyusun pedoman penerapan manajemen keamanan informasi 3. Sosialisasi pedoman penerapan manajemen keamanan informasi ke seluruh Perangkat Daerah 4. Penerapan manajemen keamanan informasi pada seluruh Perangkat Daerah 5. Menyusun strategi keamanan informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE berdasarkan risiko SPBE 6. Melakukan reviu dan evaluasi penerapan manajemen keamanan informasi secara berkala 7. Tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi penerapan manajemen keamanan informasi

No	Strategi	Rencana Aksi
3	Peningkatan kematangan penerapan Manajemen Data	1. Menyusun peta rencana penerapan manajemen data 2. Menyusun pedoman penerapan manajemen data yang memuat seluruh rangkaian proses pengelolaan manajemen data SPBE yang meliputi: arsitektur data, data induk dan data referensi, basis data, dan kualitas data 3. Menerapkan Manajemen Data sesuai dengan pedoman 4. Menyusun strategi pengelolaan data yang ditetapkan oleh Forum Satu Data atau Tim Koordinasi SPBE IPPD dan strategi tersebut diterapkan kepada seluruh Perangkat Daerah 5. Melakukan reviu dan evaluasi secara berkala 6. Perbaikan penerapan manajemen data sebagai hasil tindak lanjut reviu dan evaluasi manajemen data
4	Peningkatan kematangan penerapan Manajemen Aset TIK	1. Menyusun peta rencana manajemen aset TIK 2. Menyusun pedoman penerapan manajemen aset TIK yang memuat seluruh rangkaian proses pedoman Manajemen Aset TIK (Proses Manajemen Aset TIK: perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak) 3. Menerapkan Manajemen Aset TIK sesuai dengan pedoman yang berlaku 4. Menyusun strategi pengelolaan Aset TIK yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE yang diterapkan kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah 5. Melakukan reviu dan evaluasi secara berkala 6. Melakukan perbaikan penerapan Manajemen Aset TIK sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi
5	Peningkatan kematangan penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1. Menyusun peta rencana penerapan kompetensi SDM SPBE 2. Menyusun pedoman penerapan kompetensi SDM SPBE yang memuat serangkaian proses Penerapan Kompetensi SDM SPBE mulai dari perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan SDM dalam SPBE 3. Memenuhi seluruh kompetensi SDM SPBE yang terdiri dari kompetensi dalam bidang proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE sesuai pedoman yang berlaku

No	Strategi	Rencana Aksi
		4. Reviu dan evaluasi pemenuhan kompetensi SDM SPBE secara periodik 5. Perbaikan perencanaan dan pemenuhan kompetensi SDM sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi
6	Peningkatan kematangan penerapan Manajemen Pengetahuan	1. Menyusun peta rencana penerapan manajemen pengetahuan SPBE 2. Menyusun pedoman penerapan manajemen pengetahuan SPBE 3. Menerapkan kegiatan Manajemen Pengetahuan SPBE sesuai dan selaras dengan program kegiatan yang tercantum dalam Peta Rencana SPBE 4. Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE mengacu pada pedoman yang berlaku 5. Penerapan manajemen pengetahuan SPBE dengan menggunakan aplikasi manajemen pengetahuan yang terintegrasi 6. Reviu dan evaluasi terhadap penerapan manajemen pengetahuan secara periodik 7. Perbaikan manajemen pengetahuan sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi penerapan manajemen pengetahuan.
7	Peningkatan kematangan penerapan Manajemen Perubahan	1. Menyusun peta rencana manajemen perubahan SPBE 2. Menyusun pedoman penerapan manajemen Perubahan SPBE. Muatan manajemen perubahan meliputi perubahan aplikasi SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, layanan SPBE, keamanan SPBE. Proses manajemen perubahan terdiri dari: perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE 3. Menyusun strategi pelaksanaan Manajemen Perubahan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE 4. Melaksanakan kegiatan manajemen Perubahan yang diterapkan kepada seluruh Perangkat Daerah 5. Melakukan reviu dan evaluasi penerapan manajemen perubahan secara berkala 6. Melakukan perbaikan Manajemen Perubahan sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi secara berkesinambungan

No	Strategi	Rencana Aksi
8	Peningkatan kematangan penerapan Manajemen Layanan SPBE	1. Menyusun peta rencana penerapan manajemen layanan SPBE 2. Menyusun pedoman penerapan manajemen layanan SPBE yang memuat pedoman pelayanan pengguna SPBE dan pengoperasian layanan SPBE 3. Mengembangkan dan menerapkan system aplikasi manajemen layanan pada seluruh Perangkat Daerah 4. Melakukan reviu dan evaluasi penerapan manajemen layanan secara berkala 5. Melakukan perbaikan penerapan Manajemen Layanan SPBE sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi

6.2.4.Rencana Aksi Untuk Mendukung Penerapan Inisiatif Strategi 4

Inisiatif Strategi 4 adalah "Peningkatan kematangan pelaksanaan audit TIK". Untuk mendukung inisiatif strategi tersebut maka pada table 6.4. berikut ini akan dapat dilihat strategi dan rencana aksi yang diperlukan.

Tabel 6.102 Rencana Aksi Untuk Mendukung Inisiatif Strategi 4

No	Strategi	Rencana Aksi
1	Peningkatan Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1. Menyusun Peta Rencana Audit Infrastruktur SPBE. 2. Menyusun pedoman pelaksanaan audit infrastruktur SPBE 3. Melaksanakan audit infrastruktur SPBE sesuai dengan pedoman oleh auditor TIK/ Sistem Informasi Pemkot Blitar 4. Melaksanakan audit infrastruktur SPBE sesuai dengan pedoman oleh auditor TIK/ Sistem Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/ Sistem Informasi 5. Perbaikan penerapan infrastruktur SPBE sebagai tindak lanjut hasil audit.
2	Peningkatan kematangan pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1. Menyusun Peta Rencana Audit aplikasi SPBE. 2. Menyusun pedoman pelaksanaan audit aplikasi SPBE 3. Melaksanakan audit aplikasi SPBE sesuai dengan pedoman oleh auditor TIK/ Sistem Informasi Pemkot Blitar 4. Melaksanakan audit aplikasi SPBE sesuai dengan pedoman oleh auditor TIK/ Sistem

No	Strategi	Rencana Aksi
		Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/ Sistem Informasi 5. Perbaikan penerapan aplikasi SPBE sebagai tindak lanjut hasil audit.
3	Peningkatan kematangan pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1. Menyusun Peta Rencana Audit keamanan SPBE. 2. Menyusun pedoman pelaksanaan audit keamanan SPBE 3. Melaksanakan audit keamanan SPBE sesuai dengan pedoman oleh auditor TIK/ Sistem Keamanan Informasi Pemkot Blitar 4. Melaksanakan audit keamanan SPBE sesuai dengan pedoman oleh auditor TIK/ Sistem Keamanan Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/ Sistem Keamanan Informasi 5. Perbaikan penerapan keamanan SPBE sebagai tindak lanjut hasil audit.

6.2.5.Rencana Aksi Untuk Mendukung Penerapan Inisiatif Strategi 5

Inisiatif Strategi 5 adalah "Peningkatan kematangan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik". Untuk mendukung inisiatif strategi tersebut maka pada table 6.5. berikut ini akan dapat dilihat strategi dan rencana aksi yang diperlukan.

Tabel 6.103 Rencana Aksi Untuk Mendukung Inisiatif Strategi 5

No	Strategi	Rencana Aksi
32	Peningkatan kematangan Layanan Perencanaan	1. Peningkatan penerapan Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik disesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi 2. Melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)
33	Peningkatan kematangan Layanan Penganggaran	1. Peningkatan penerapan Layanan penganggaran berbasis Elektronik disesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi 2. Melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)

No	Strategi	Rencana Aksi
34	Peningkatan kematangan Layanan Keuangan	1. Peningkatan penerapan Layanan Keuangan berbasis Elektronik disesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi 2. Melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk))
35	Peningkatan kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	1. Peningkatan penerapan Layanan pengadaan barang dan jasa berbasis Elektronik disesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi 2. Melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk))
36	Peningkatan kematangan Layanan Kepegawaian	1. Peningkatan penerapan Layanan kepegawaian berbasis Elektronik disesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi 2. Melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk))
37	Peningkatan kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	1. Peningkatan penerapan Layanan kearsipan dinamis berbasis Elektronik disesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi 2. Melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk))
38	Peningkatan kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	1. Mempertgunakan Layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya 2. Mempertgunakan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi 3. Melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)
39	Peningkatan kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	1. Mempertgunakan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya 2. Memiliki Layanan Pengawasan Internal Pemerintah yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan

No	Strategi	Rencana Aksi
		terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi 3. Melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)
40	Peningkatan kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1. Mempergunakan Layanan Pengelolaan BMN/BMD Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya 2. Memiliki Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berbasis Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi 3. Melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)
41	Peningkatan kematangan Layanan Kinerja Pegawai	1. Mempergunakan Layanan kinerja pegawai Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya 2. Memiliki Layanan kinerja pegawai yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi 3. Melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)

6.2.6.Rencana Aksi Untuk Mendukung Penerapan Inisiatif Strategi 6

Inisiatif Strategi 6 adalah "Peningkatan kematangan layanan public berbasis elektronik". Untuk mendukung inisiatif strategi tersebut maka pada table 6.6. berikut ini akan dapat dilihat strategi dan rencana aksi yang diperlukan.

Tabel 6.104 Rencana Aksi Untuk Mendukung Inisiatif Strategi 6

No	Strategi	Rencana Aksi
42	Peningkatan kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	1. Peningkatan penerapan Layanan pengaduan pelayanan public berbasis Elektronik disesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi 2. Melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)
43	Peningkatan kematangan Layanan Data Terbuka	1. Mempergunakan Layanan data terbuka Berbasis Elektronik yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya 2. Memiliki Layanan kinerja pegawai yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan

No	Strategi	Rencana Aksi
		terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi 3. Melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)
44	Peningkatan kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	1. Peningkatan penerapan Layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum berbasis Elektronik disesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi 2. Melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk))
45	Peningkatan kematangan Layanan Publik Sektor 1	1. Memiliki Layanan Publik Sektor 1 Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi 2. Melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)
46	Peningkatan kematangan Layanan Publik Sektor 2	1. Memiliki Layanan Publik Sektor 2 Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi 2. Melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)
47	Peningkatan kematangan Layanan Publik Sektor 3	1. Memiliki Layanan Publik Sektor 3 Elektronik yang dapat ditingkatkan/dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan instansi 2. Melakukan optimalisasi melalui penguatan kebijakan layanan, perbaikan tata kelola layanan, dan penerapan manajemen dari layanan (help desk)

6.3. Rekomendasi Peta Rencana SPBE PEMKOT BLITAR 2021 – 2025

Untuk mendukung tercapainya peta rencana SPBE Pemerintah Kota Blitar, maka perlu diketahui kegiatan apa saja yang belum direalisasikan atau yang sudah direalisasikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran kegiatan-kegiatan yang selaras dengan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kota Blitar 2021 - 2025. Pada tabel berikut ini dapat dilihat rekomendasi kegiatan yang belum/sedang terealisasikan berdasarkan peta rencana SPBE Pemerintah Kota Blitar pada tahun 2021 – 2025.

Tabel 6.105 Rekomendasi Kegiatan Peta Rencana SPBE Pemkot Blitar 2021 - 2025

V	Kegiatan	Keterangan
6-1	Peta Jalan Tata Kelola SPBE	
1	Penerapan Manajemen Data	Manajemen Data meliputi seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data
2	Pembuatan prosedur (SOP) terkait pengoperasian Layanan Pusat Data	
3	Sertifikasi nasional/internasional pusat data	
4	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi pada seluruh OPD	
5	Penyusunan Kebijakan Audit Teknologi Informasi	Audit TIK meliputi audit aplikasi, audit infrastruktur dan audit keamanan
6	Pembaruan Proses Bisnis SPBE untuk semua OPD	Penyusunan Proses Bisnis SPBE Pemkot Blitar harus mengacu ke Permenpan RB no 19 tahun 2019 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis
7	Penyusunan Peraturan tentang Software/Free Open Source Software	
8	Penyusunan Peraturan tentang Standarisasi Infrastruktur Jaringan TIK	
9	Sinkronisasi Arsitektur Data Pemkot Blitar - Satu Data Nasional	
10	Sertifikasi ISO 20000-1:2018 tentang Sistem Manajemen Layanan	
11	Forum Kolaborasi SPBE	Wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE. Anggota meliputi pelaku usaha, masyarakat, wakil perguruan tinggi, lembaga penelitian, dll. Forum kolaborasi dalam bentuk pertemuan informal/ FGD
6-2	Peta Jalan Manajemen SPBE	
1	Pelaksanaan dan evaluasi penerapan Manajemen Risiko SPBE di seluruh OPD	Penerapan Manajemen Risiko SPBE harus direviu setiap tahun
2	Penyusunan dan Pembaharuan Pedoman/Standar Keamanan Informasi	Pedoman/standar Keamanan Informasi harus mengacu ke Perban BSSN no 4 tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi

V	Kegiatan	Keterangan
3	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi beserta evaluasinya	
4	Penyusunan Pedoman dan Pembaharuan Pedoman Manajemen Data	
5	Penerapan Manajemen Data beserta evaluasinya	Penerapan Manajemen Data meliputi proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
6	Penyusunan Dokumen pedoman pelaksanaan Manajemen Aset TIK	Aset TIK mencakup perangkat lunak, perangkat keras, data dan informasi, infrastruktur, SDM, lisensi, data, SOP, outsource services, dan IT asset register.
7	Penerapan Manajemen Aset TIK beserta evaluasinya	
8	Penyusunan Dokumen pedoman pelaksanaan Manajemen SDM SPBE	Pedoman memuat serangkaian proses manajemen SDM SPBE mulai dari perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan SDM dalam SPBE
9	Penerapan Manajemen SDM SPBE beserta evaluasinya	
10	Penyusunan Dokumen dan Pembaharuan Dokumen Panduan Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan SPBE,	Pedoman harus memuat serangkaian proses manajemen pengetahuan mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
11	Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Manajemen Perubahan	Pedoman Manajemen Perubahan SPBE harus meliputi Perubahan Aplikasi, Perubahan Perangkat Keras, Perubahan Perangkat Lunak, Perubahan Infrastruktur, Perubahan Proses Bisnis, Perubahan Lingkungan Organisasi, Perubahan Layanan, Perubahan Data, Perubahan Keamanan dan Perubahan Arsitektur.
12	Penyusunan Dokumen dan Pembaharuan Dokumen Pedoman Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE,	
13	Penerapan Manajemen Perubahan SPBE di semua OPD beserta evaluasinya	

V	Kegiatan	Keterangan
6-3	Peta Jalan Layanan SPBE	
1	Sinkronisasi layanan e-planning, e-budgeting dan manajemen keuangan dengan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)	
2	Integrasi Layanan Manajemen Kepegawaian dengan BKN dan Layanan Kinerja Pegawai	
3	Integrasi Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Layanan Manajemen Keuangan	
4	Penerapan Layanan Kearsipan Dinamis di semua OPD	
5	Integrasi Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Layanan Pengadaan Barang/Jasa, Layanan Penganggaran dan Layanan Manajemen Keuangan	
6	Integrasi Layanan Pengawasan Internal dengan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Berbasis Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik	
7	Penambahan fitur analitik data pada Layanan Pengaduan Layanan Publik	
8	Integrasi Layanan Data Terbuka Kota Blitar dengan Layanan Data Terbuka Pemprov Jawa Timur dan Layanan Data Terbuka Nasional	
9	Update Konten dan Penambahan Fitur Analitik Data Layanan Data Terbuka	
10	Penambahan fitur transaksi layanan JDIH dan integrasi dengan Layanan JDIH Nasional	
11	Pengembangan Portal Pusat Layanan SPBE	
12	Evaluasi Layanan secara periodik	
13	Pengembangan Big Data Analytics pada layanan SPBE	
14	Pengembangan dan Update Portal Pusat Layanan SPBE	
6-4	Peta Jalan Infrastruktur SPBE	

V	Kegiatan	Keterangan
1	Pengembangan Disaster Recovery Center	
2	Pembangunan Emergency Call Center	
3	Pengembangan Network Operation Center	
4	Pengembangan Security Operation Center	
6-4	Peta Jalan Aplikasi	
A	Kebijakan Pembangunan Aplikasi	
1	Dinas Kominfo membuat kebijakan internal SPBE yang mengatur tentang pembangunan aplikasi SPBE.	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik
2	Sosialisasi kebijakan pembangunan aplikasi SPBE ke seluruh Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik
3	Proses penetapan kebijakan pembangunan aplikasi SPBE oleh Bupati	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik
4	Review dan evaluasi kebijakan pembangunan aplikasi SPBE	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik
5	Revisi kebijakan internal tentang pembangunan aplikasi SPBE	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik
6	Upgrade dan Pembangunan aplikasi	Perangkat Daerah yang terkait
B	Upgrade dan Pembangunan Aplikasi	
1	Layanan dan Database Kesbangpol (E-LANDA)	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana
2	CSR KOTA BLITAR	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3	SMART SURVEY (Upgrade)	Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan
4	Sistem Informasi Manajemen Data Kesra (SIMDAKESRA) (Upgrade)	Bagian Perekonomian dan Kesra
6	Sistem Informasi Kesehatan Hewan dan Peternakan (SIMASTAHANPENAK) (Upgrade)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Blitar Kota Serba Ada (BLIKOSDA) (Upgrade)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
8	Melaporkan Kelahiran dan Kematian (EMELATI) (Upgrade)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

V	Kegiatan	Keterangan
9	Sistem Informasi Fasilitas Kesehatan dan Peta Sebar Penyakit (INFOKES) (Upgrade)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
10	Sistem Verifikasi Data Kependudukan (SIDAKU)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
11	Sistem Informasi Rawat Inap Elektronik (SIRINE)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
12	Sistem Informasi Dana Bergulir (SIDALIR) (Upgrade)	Dinas Koperasi dan UKM
13	Visit Blitar	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
14	SLOGAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PB dan KB
15	Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pendidikan Kota Blitar (PANSEL-DP)	Dinas Pendidikan
17	PINTAR ONLINE SHOP	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
19	E-FORMASI	Badan Kepegawaian Daerah
20	SIAP	Badan Kepegawaian Daerah
21	Sistem Informasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SIBPHTB)	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
23	SISMIOP	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
24	Sistem Terintegrasi Informasi Jabatan (SISTER MANJA)	Bagian Hukum dan Organisasi
25	Perijinan Nakes	Dinas Kesehatan
26	Aplikasi Pengelolaan Keuangan Sekolah Terpadu (upgrade)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
27	E-RUSUNAWA	Dinas Perumahan Rakyat
28	E-Klaim INA-CBG	RSUD Mardi Waluyo
6-6	Peta Jalan Keamanan SPBE	
1	Pembuatan Dokumen Tata Kelola Keamanan Informasi	
2	Penyusunan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE	
3	Penyusunan standar teknis keamanan aplikasi berbasis web	

V	Kegiatan	Keterangan
4	Penyusunan standar teknis keamanan aplikasi berbasis mobile	
5	Analisis Risiko Keamanan Informasi	
7	Analisis Kerentanan Keamanan SPBE	
8	Penetration Testing untuk uji coba keamanan server dan infrastruktur jaringan	
10	Penanganan Insiden Keamanan SPBE	
17	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Information System Security Professional (CISSP)	
18	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Information System Auditor (CISA)	
19	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Information Security Manager (CISM)	
20	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Network Defender	
21	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Ethical Hacker	
22	Pelatihan dan Sertifikasi Systems Security Certified Practitioner (SSCP)	
23	Pelatihan dan Sertifikasi Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK)	
25	Sertifikasi ISO 27001:2013 Information Security Manajement System (ISMS)	
6-7	Peta Jalan Audit TIK	
1	Penyusunan Dokumen dan Pembaharuan Pedoman Audit Aplikasi	Audit Aplikasi SPBE terdiri atas Audit Aplikasi Umum dan Audit Aplikasi Khusus
2	Penyusunan Dokumen dan Pembaharuan Pedoman Audit Infrastruktur	Audit Infrastruktur meliputi penerapan tata kelola dan manajemen infrastruktur SPBE, infrastruktur SPBE, kinerja infrastruktur SPBE dan aspek infrastruktur SPBE lainnya.
3	Penyusunan Dokumen dan Pembaharuan Dokumen Panduan Audit Keamanan	Audit Keamanan SPBE terdiri atas Audit Keamanan Aplikasi dan Audit Keamanan Infrastruktur.
5	Audit Infrastruktur secara mandiri	Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh auditor TIK internal

V	Kegiatan	Keterangan
7	Audit Aplikasi eksternal (auditor eksternal tersertifikasi)	Kegiatan Audit Aplikasi dilaksanakan oleh auditor TIK eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi
8	Audit Infrastruktur eksternal (auditor eksternal tersertifikasi)	Kegiatan Audit Infrastruktur dilaksanakan oleh auditor TIK eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi
9	Audit Keamanan eksternal (auditor eksternal tersertifikasi)	Kegiatan Audit Keamanan dilaksanakan oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi eksternal yang memiliki sertifikasi auditor Sistem Keamanan Informasi.
10	Tindak lanjut rekomendasi hasil audit aplikasi	Output: Laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE
11	Tindak lanjut rekomendasi hasil audit infrastuktur	Output: Laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE
12	Tindak lanjut rekomendasi hasil audit keamanan	Output: Laporan hasil revidu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut hasil pelaksanaan Audit Keamanan SPBE
13	Pelatihan dan Sertifikasi Audit Aplikasi	Pelatihan diadakan oleh Lembaga audit terakreditasi dan auditornya terdaftar di BPPT
14	Pelatihan dan Sertifikasi Audit Infrastruktur	Pelatihan diadakan oleh Lembaga audit terakreditasi dan auditornya terdaftar di BPPT
15	Pelatihan dan Sertifikasi Audit Keamanan	Pelatihan diadakan oleh Lembaga audit terakreditasi dan auditornya terdaftar di BPPT
16	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Information Systems Auditor (CISA)	Sertifikasi internasional dari Information Systems Audit and Control Association (ISACA)

6.4. Rekomendasi Dukungan Teknologi Informasi pada RPJMD Kota Blitar

Untuk mendukung tercapainya program pembangunan Pemerintah Kota Blitar, maka strategi pengembangan SPBE perlu diselaraskan dengan program pembangunan pemerintah Kota Blitar. Pada tabel berikut ini dapat dilihat rekomendasi dukungan teknologi informasi yang diperlukan untuk tercapainya program pembangunan daerah yang direncanakan Pemerintah Kota Blitar untuk mendukung tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 6.106 Rekomendasi Dukungan Teknologi Informasi terhadap Program Pembangunan Daerah pada RPJMD Kota Blitar

Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan			
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Rekomendasi
Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	• Pengembangan aplikasi untuk memberikan materi terkait penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan seperti arti Pancasila, pentingnya Pancasila, pembuatan video animasi yang menggambarkan nilai-nilai Pancasila beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari, membuat tebak-tebakan untuk meningkatkan sisi interaktif aplikasi, pembuatan fitur Text-to-Speech, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan • Bimbingan teknis penerapan aplikasi penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan kepada semua pengguna yang terkait • Pembuatan Peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan • Integrasi aplikasi penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dengan aplikasi lain yang terkait

Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan			
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Rekomendasi
			• <i>Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan</i> • <i>Pembuatan SOP penggunaan aplikasi penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan</i>
		<i>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</i>	• <i>Mengidentifikasi berbagai aplikasi program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat</i> • <i>Mengembangkan sebuah aplikasi umum yang memuat navigasi ke seluruh aplikasi program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat</i> • <i>Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi umum</i> • <i>Bimbingan teknis penerapan aplikasi umum ke seluruh pengguna aplikasi</i> • <i>Buat peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi umum</i> • <i>Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi umum</i> • <i>Pembuatan SOP penggunaan aplikasi umum</i>
		<i>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan</i>	• <i>Menambahkan fitur pada aplikasi E-LANDA untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial seperti peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat, pengembangan mekanisme penyelesaian konflik, penguatan kapasitas</i>

Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan			
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Rekomendasi
		<i>Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>aparatus penegak hukum, kolaborasi antar pihak terkait, monitoring dan early warning system, promosi dialog dan rekonsiliasi, dll</i> <i>• Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial</i> <i>• Bimbingan teknis penerapan aplikasi ke seluruh pengguna aplikasi</i> <i>• Pembuatan Peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial</i> <i>• Integrasikan aplikasi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial dengan aplikasi lain yang berkaitan</i> <i>• Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial</i> <i>• Pembuatan SOP penggunaan aplikasi peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial</i>
		<i>Program Pemberdayaan dan Pengawasan</i>	<i>• Menambahkan fitur pada aplikasi E-LANDA untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan seperti peningkatan kesadaran dan</i>

Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan			
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Rekomendasi
		<i>Organisasi Kemasyarakatan</i>	<i>pendidikan masyarakat, pengembangan mekanisme penyelesaian konflik, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, kolaborasi antar pihak terkait, monitoring dan early warning system, promosi dialog dan rekonsiliasi, dll</i> <i>• Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</i> <i>• Bimbingan teknis penerapan aplikasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan ke seluruh pengguna aplikasi</i> <i>• Pembuatan Peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</i> <i>• Integrasikan aplikasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dengan aplikasi lain yang berkaitan</i> <i>• Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</i> <i>• Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</i>
	<i>Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan dan Kelestarian</i>	<i>Program Pengembangan Kebudayaan</i>	<i>• Menambahkan fitur pada website VISIT Blitar untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program pengembangan kebudayaan seperti data budaya yang ada di Blitar, memperbarui informasi terkait kebudayaan kota Blitar, dll</i> <i>• Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengembangan kebudayaan</i>

Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan			
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Rekomendasi
	<i>Cagar Budaya</i>		• <i>Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengembangan kebudayaan ke seluruh pengguna aplikasi</i> • <i>Pembuatan Peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi pengembangan kebudayaan</i> • <i>Integrasikan aplikasi pengembangan kebudayaan dengan aplikasi lain yang berkaitan</i> • <i>Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengembangan kebudayaan</i> • <i>Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pengembangan kebudayaan</i>

Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan			
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Rekomendasi
Meningkatnya Kesenjangan Gender, Perlindungan Perempuan, dan Anak	Menurunnya kesenjangan gender	Program pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	• Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan seperti kesadaran dan pendidikan, penguatan ekonomi perempuan, kepemimpinan dan partisipasi perempuan, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, akses kesehatan reproduksi dan layanan kesehatan, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan • Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan kepada semua pengguna yang terkait • Pembuatan Peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan • Integrasi aplikasi pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pengarus utamaan gender dan pemberdayaan perempuan
		Program perlindungan Perempuan	• Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak seperti pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak, edukasi terhadap

Misi 1: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan			
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Rekomendasi
		Program Perlindungan Khusus Anak	perlindungan perempuan dan anak, data kekerasan terhadap perempuan dan anak, pendaftaran relawan masyarakat, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi perlindungan perempuan dan anak • Bimbingan teknis penerapan aplikasi perlindungan perempuan dan anak kepada semua pengguna terkait • Pembuatan Peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi perlindungan perempuan dan anak. • Integrasi aplikasi perlindungan perempuan dan anak dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi perlindungan perempuan dan anak • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi perlindungan perempuan dan anak

Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter

Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Analisa Kesenjangan
Meningkatnya derajat kesehatan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya prestasi olahraga dan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	• Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan seperti data organisasi kepemudaan dan komunitas olahraga, aktivitas organisasi kepemudaan dan olahraga, data fasilitas kepemudaan dan olahraga, peminjaman fasilitas kepemudaan dan olahraga, dll
		Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	• Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan olahraga • Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan olahraga • Pembuatan Peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan olahraga • Integrasi aplikasi pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan olahraga dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan olahraga • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan olahraga
	Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat	Program pembinaan perpustakaan	• Memperbarui aplikasi pembinaan perpustakaan (INLISLITE dan E-PERPUSTAKAAN) agar menjadi mutakhir. Khususnya website INLISLITE yang tidak bisa diakses saat pengguna ingin mencari buku-buku yang tersedia.

Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter

Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Analisa Kesenjangan
			• Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pembinaan perpustakaan • Bimbingan teknis penerapan aplikasi pembinaan perpustakaan • Pembuatan Peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi pembinaan perpustakaan • Integrasi aplikasi pengembangan pembinaan perpustakaan dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pembinaan perpustakaan • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pembinaan perpustakaan

Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital

Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Analisa Kesenjangan
Meningkatnya tingkat	Meningkatnya kesejahteraan	Program Rehabilitasi sosial	

Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital

Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Analisa Kesenjangan
kesejahteraan masyarakat	sosial masyarakat	Program Pemberdayaan sosial	
	Menurunnya tingkat pengangguran	Program Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	• Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja seperti kebutuhan pasar kerja, pelatihan ketrampilan teknis, pelatihan ketrampilan non teknis, program magang dan penempatan kerja, pembinaan dan mentoring, sertifikasi dan pengakuan kompetensi, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja • Bimbingan teknis penerapan aplikasi pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja ke seluruh pengguna aplikasi • Pembuatan Peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja • Integrasi aplikasi pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja

Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital

Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Analisa Kesenjangan
		Program Penempatan tenaga kerja	• Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja seperti pencocokan dan penilaian, informasi pekerjaan, bimbingan karir, pemantauan dan evaluasi, kemitraan dengan pengusaha, dukungan pasca penempatan, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi penempatan tenaga kerja • Bimbingan teknis penerapan aplikasi penempatan tenaga kerja ke seluruh pengguna aplikasi • Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi penempatan tenaga kerja • Integrasi aplikasi penempatan tenaga kerja dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi penempatan tenaga kerja • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi penempatan tenaga kerja
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya nilai investasi daerah	Program Pengembangan iklim penanaman modal	• Pembaharuan aplikasi Sistem Informasi Dana Bergulir (SIDALIR), SIMTAP, dan CSR Kota Blitar • Pengembangan aplikasi layanan penanaman modal yang dapat dipergunakan untuk mengelola data seperti: profil Kota Blitar dalam bentuk angka, alur perizinan penanaman modal, pendaftaran calon investor, peluang menanamkan modal di lingkungan Kota Blitar, dll
		Program Pelayanan	• Pembuatan pendoman penggunaan aplikasi layanan penanaman modal

Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital

Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Analisa Kesenjangan
		penanaman modal	• Bimbingan teknis penerapan aplikasi layanan penanaman modal ke seluruh pengguna aplikasi • Pembuatan Peraturan Walikota tentang kebijakan layanan penanaman modal dan penerapan aplikasi layanan penanaman modal • Integrasikan aplikasi layanan penanaman modal dengan aplikasi lain yang berkaitan • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi layanan penanaman modal • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi layanan penanaman modal
	Menguatnya predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata dan ekonomi kreatif	Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	• Menambahkan fitur pada aplikasi VISIT dan BLIKOSDA sebagai aplikasi peningkatan daya tarik destinasi wisata seperti pembenahan infrastruktur, peningkatan kualitas produk dan layanan, pelestarian budaya dan alam, pengembangan produk wisata unggulan, pemasaran dan promosi, keterlibatan komunitas lokal • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi peningkatan daya tarik destinasi pariwisata • Bimbingan teknis penerapan aplikasi peningkatan daya tarik destinasi pariwisata ke seluruh pengguna aplikasi • Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi peningkatan daya tarik destinasi pariwisata

Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital

Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Analisa Kesenjangan
			• <i>Integrasikan aplikasi peningkatan daya tarik destinasi wisata dengan aplikasi lain yang berkaitan</i> • <i>Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi peningkatan daya tarik destinasi pariwisata</i> • <i>Pembuatan SOP penggunaan aplikasi peningkatan daya tarik destinasi wisata</i>
		<i>Program Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif</i>	• <i>Mengembangkan aplikasi VISIT dan BLIKOSDA untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan pelaksanaan program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif seperti destinasi pariwisata, produk dan pengalaman wisata, pemberdayaan masyarakat lokal, pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam dan budaya, pengembangan keterampilan dan peningkatan kualitas layanan, dll</i> • <i>Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif</i> • <i>Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif ke seluruh pengguna aplikasi</i> • <i>Pembuatan Peraturan walikota tentang aplikasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif</i> • <i>Integrasi aplikasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dengan aplikasi lain yang terkait</i>

Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital

Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Analisa Kesenjangan
	Meningkatnya nilai tambah bruto koperasi dan Usaha Mikro terhadap perekonomian daerah		• Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi peningkatan daya tarik destinasi pariwisata • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
		Program Pengembangan UMKM	• Pengembangan aplikasi untuk mengelola data UMKM seperti pelaku UMKM, produk/ layanan UMKM, perizinan UMKM, kegiatan pengembangan UMKM, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi UMKM • Bimbingan teknis penerapan aplikasi UMKM ke seluruh pengguna aplikasi • Pembuatan peraturan walikota tentang aplikasi UMKM • Integrasi aplikasi UMKM dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi UMKM • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi UMKM
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	• Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM seperti akses pendanaan, pelatihan dan pengembangan ketrampilan, akses pasar dan promosi, akses teknologi dan inovasi, infrastruktur dan fasilitas pendukung, kemitraan dan jejaring usaha, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pemberdayaan UMKM

Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital			
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Analisa Kesenjangan
			• Bimbingan teknis penerapan aplikasi pemberdayaan UMKM ke seluruh pengguna aplikasi • Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi pemberdayaan UMKM • Integrasi aplikasi pemberdayaan UMKM dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi peningkatan daya tarik destinasi pariwisata • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pemberdayaan UMKM
		Program Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	• Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan data koperasi, pengembangan dan pemberdayaan koperasi, pembinaan dan pengembangan pemasaran koperasi, izin koperasi, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi • Bimbingan teknis penerapan aplikasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi ke seluruh pengguna aplikasi • Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi • Integrasi aplikasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi dengan aplikasi lain yang terkait

Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital

Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Analisa Kesenjangan
			• <i>Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi peningkatan daya tarik destinasi pariwisata</i> • <i>Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi.</i>
	<i>Terjaganya produktivitas pertanian dan perikanan</i>	<i>Program Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner</i>	• <i>Pengembangan aplikasi berbasis Internet of Things untuk mengelola data Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner. Setiap hewan yang dimonitor diberi identitas (RFID). Aplikasi dipergunakan untuk menyimpan data riwayat kesehatan hewan, tindakan/ penanganan yang pernah dilakukan terhadap hewan tersebut, dll</i> • <i>Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi untuk mengelola data kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner</i> • <i>Bimbingan teknis penerapan aplikasi untuk mengelola data kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner ke seluruh pengguna aplikasi</i> • <i>Integrasi aplikasi untuk mengelola data kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dengan aplikasi lain</i> • <i>Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi untuk mengelola data kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner</i> • <i>Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi untuk mengelola data kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner</i> • <i>Pembuatan SOP penggunaan aplikasi untuk mengelola data kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner</i>

Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital

Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Analisa Kesenjangan
		Program Perizinan usaha pertanian	• Pengembangan aplikasi untuk mengelola perizinan usaha pertanian seperti perencanaan dan pengelolaan area pertanian; data-data pertanian seperti jenis tanah, jenis tanaman, benih, pupuk, pestisida; surat permohonan; surat izin pertanian, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi perizinan usaha pertanian • Bimbingan teknis penerapan aplikasi perizinan usaha pertanian • Pembuatan peraturan walikota tentang aplikasi perizinan usaha pertanian • Integrasi aplikasi aplikasi perizinan usaha pertanian dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi perizinan usaha pertanian • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi perizinan usaha pertanian
		Program Pengelolaan perikanan budidaya	• Pengembangan aplikasi untuk mengelola data pengelolaan perikanan budidaya seperti perencanaan dan pengelolaan area budidaya, pemilihan spesies ikan yang tepat, manajemen pakan, pemantauan kesehatan ikan, penggunaan teknologi budidaya yang inovatif, pelatihan dan pendampingan, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengelolaan perikanan budidaya • Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengelolaan perikanan budidaya

Misi 3: Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital

Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Analisa Kesenjangan
			• Pembuatan peraturan walikota tentang aplikasi pengelolaan perikanan budidaya • Integrasi aplikasi pengelolaan perikanan budidaya dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengelolaan perikanan budidaya • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pengelolaan perikanan budidaya

Misi 4: Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Analisa Kesenjangan
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Meningkatnya kualitas infrastruktur pekerjaan umum	Program Penyelenggaraan Jalan	• Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program penyelenggaraan jalan seperti pemeliharaan rutin jalan, perbaikan dan rehabilitasi jalan, pengembangan jalan, peningkatan keselamatan jalan, pengelolaan lalu lintas, pemberdayaan masyarakat, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi penyelenggaraan jalan • Bimbingan teknis penerapan aplikasi penyelenggaraan jalan

Misi 4: Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Analisa Kesenjangan
			• Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi penyelenggaraan jalan • Integrasi aplikasi penyelenggaraan jalan dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi penyelenggaraan jalan • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi penyelenggaraan jalan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	• Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) seperti pembangunan infrastruktur air minum, pengelolaan sumber daya air, pengolahan air minum, pengelolaan distribusi air, pendidikan dan kesadaran masyarakat, kebijakan dan regulasi, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengelolaan sumber daya air • Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengelolaan sumber daya air • Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi pengelolaan sumber daya air • Integrasi aplikasi pengelolaan sumber daya air dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengelolaan sumber daya air • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pengelolaan sumber daya air

Misi 4: Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Analisa Kesenjangan
		<i>Program Penataan Bangunan Gedung</i>	• Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program penataan bangunan gedung seperti kebijakan tata bangunan, kawasan-kawasan potensial, rencana dan rancangan pembangunan umum, investasi, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi penataan bangunan gedung • Bimbingan teknis penerapan aplikasi penataan bangunan gedung • Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi penataan bangunan gedung • Integrasi aplikasi penataan bangunan gedung dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi penataan bangunan gedung • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi penataan bangunan gedung
	<i>Meningkatnya kualitas perhubungan</i>	<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	• Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program penyelenggaraan dan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan seperti data lalu lintas, data angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan pengemudi, pengguna jalan, dsb • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan • Bimbingan teknis penerapan aplikasi lalu lintas dan angkutan jalan

Misi 4: Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Analisa Kesenjangan
			• Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi lalu lintas dan angkutan jalan • Integrasi aplikasi lalu lintas dan angkutan jalan dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi lalu lintas dan angkutan jalan • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi lalu lintas dan angkutan jalan
Meningkatnya kelayakhunian	Meningkatnya akses rumah layak huni	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	• Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program perumahan dan kawasan permukiman kumuh seperti data kawasan perumahan dan permukiman kumuh, kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat, tingkat kekumuhan kawasan, regulasi, perizinan, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi perumahan dan kawasan permukiman kumuh • Bimbingan teknis penerapan aplikasi perumahan dan kawasan permukiman kumuh • Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi perumahan dan kawasan permukiman kumuh • Integrasi aplikasi perumahan dan kawasan permukiman kumuh dengan aplikasi lain yang terkait

Misi 4: Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Analisa Kesenjangan
			• Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi perumahan dan kawasan permukiman kumuh • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi lalu lintas dan angkutan jalan
		Program Pengembangan Perumahan	• Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program pengembangan perumahan seperti data perumahan, kebijakan dan strategi perumahan, perizinan, regulasi, tata ruang perumahan/pemukiman, sarana dan prasarana perumahan/pemukiman
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	• Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengembangan perumahan • Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengembangan perumahan • Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi pengembangan perumahan • Integrasi aplikasi pengembangan perumahan dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengembangan perumahan • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pengembangan perumahan
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan	• Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum seperti pendataan, pengaduan, pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, dll

Misi 4: Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Analisa Kesenjangan
		Utilitas Umum (PSU)	• Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum • Bimbingan teknis penerapan aplikasi prasarana, sarana dan utilitas umum • Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi prasarana, sarana dan utilitas umum • Integrasi aplikasi prasarana, sarana dan utilitas umum dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi prasarana, sarana dan utilitas umum • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi prasarana, sarana dan utilitas umum
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	• Pengembangan aplikasi SIM Database Jalan dan Drainase untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase seperti jaringan drainase air berbentuk peta digital, pengaduan drainase air, pendataan drainase, kawasan berpotensi kelebihan/kekurangan air dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem drainase • Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem drainase

Misi 4: Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Analisa Kesenjangan
			• Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem drainase • Integrasi aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem drainase • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	• Pengembangan aplikasi SIM Database Jalan dan Drainase serta Aplikasi Pelaporan Lingkungan Online (SILOLIK) untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah seperti jaringan pembuangan limbah, pengaduan pengelolaan limbah, pendataan limbah dan sumber-sumbernya, kawasan yang berpotensi memiliki/mengeluarkan limbah dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah • Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah • Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah

Misi 4: Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Analisa Kesenjangan
			• Integrasi aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	• Pengembangan aplikasi SIM Database Jalan dan Drainase untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum seperti data sumber penyedia air minum, jalur distribusi air minum, peta digital interaktif, inventaris sistem, pendataan kondisi air minum, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum • Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum • Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum • Integrasi aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum

Misi 4: Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Analisa Kesenjangan
			• Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Program penyelenggaraan penataan ruang	• Pengembangan aplikasi SIM Tata Ruang (SIMTARU) untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program penyelenggaraan penataan ruang seperti manajemen data, peta tata ruang, izin dan sertifikasi pemanfaatan ruang, dokumen rencana kota, patrol, forum penataan ruang dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi penyelenggaraan penataan ruang • Bimbingan teknis penerapan aplikasi penyelenggaraan penataan ruang • Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi penyelenggaraan penataan ruang • Integrasi aplikasi penyelenggaraan penataan ruang dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi penyelenggaraan penataan ruang • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi penyelenggaraan penataan ruang
Meningkatnya kualitas	Meningkatnya kualitas air	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau	• Pengembangan aplikasi Pelaporan Lingkungan Online (SILOLIK) untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup seperti pengaduan pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup, izin dan sertifikat

Misi 4: Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Analisa Kesenjangan
<i>lingkungan hidup</i>		<i>Kerusakan Lingkungan Hidup</i>	pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, rancangan pengelolaan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran, kebijakan terhadap pencemaran lingkungan, sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup • Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup • Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup • Integrasi aplikasi penyelenggaraan pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pengendalian pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup
		<i>Program Pembinaan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</i>	
	<i>Meningkatnya kualitas udara</i>	<i>Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup</i>	
	<i>Meningkatnya kualitas lahan</i>	<i>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</i>	• Pengembangan aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program pengelolaan keanekaragaman hayati seperti perencanaan konservasi keanekaragaman hayati, kebijakan

Misi 4: Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Analisa Kesenjangan
			pengelolaan keanekaragaman hayati, forum pengelolaan keanekaragaman hayati, data keanekaragaman hayati, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengelolaan keanekaragaman hayati • Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengelolaan keanekaragaman hayati • Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi pengelolaan keanekaragaman hayati • Integrasi aplikasi pengelolaan keanekaragaman hayati dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengelolaan keanekaragaman hayati • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pengelolaan keanekaragaman hayati
	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	Program Pengelolaan Persampahan	• Pengembangan aplikasi Pelaporan Lingkungan Online (SILOLIK) untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program pengelolaan sampah dan pengendalian bahan B3 dan limbah B3 seperti data informasi beserta peta digital tempat pembuangan sampah, data peta digital terkait perusahaan/ kawasan yang berpotensi menghasilkan bahan B3 dan limbah B3, kebijakan pengelolaan sampah dan pengendalian bahan B3 dan limbah B3, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengelolaan sampah dan pengendalian bahan B3 dan limbah B3
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan	

Misi 4: Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Analisa Kesenjangan
		Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	• Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengelolaan sampah dan pengendalian bahan B3 dan limbah B3 • Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi pengelolaan sampah dan pengendalian bahan B3 dan limbah B3 • Integrasi aplikasi pengelolaan sampah dan pengendalian bahan B3 dan limbah B3 dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengelolaan sampah dan pengendalian bahan B3 dan limbah B3 • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pengelolaan sampah dan pengendalian bahan B3 dan limbah B3
	Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Program Penanggulangan bencana	• Mengidentifikasi potensi bencana alam yang mungkin terjadi di kota Blitar • Pengembangan aplikasi Layanan dan Database Kesbangpol (E-LANDA) untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program penanggulangan bencana seperti data-data bencana alam yang mungkin terjadi, cara pencegahan bencana alam, informasi mengenai cara menyelamatkan diri pada bencana alam tertentu, informasi bencana alam terkini, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi penanggulangan bencana • Bimbingan teknis penerapan aplikasi penanggulangan bencana

Misi 4: Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Analisa Kesenjangan
			• Pembuatan peraturan walikota tentang penerapan aplikasi penanggulangan bencana • Integrasi aplikasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi penanggulangan bencana • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi penanggulangan bencana

Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Analisa Kesenjangan
Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah	Program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	• Mengembangkan sebuah aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah seperti perencanaan dan rancangan pembangunan daerah, kebijakan pembangunan daerah, pendataan mengenai pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dll • Pembuatan pedoman perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah • Bimbingan teknis penerapan aplikasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah ke seluruh pengguna aplikasi

Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi			
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Analisa Kesenjangan
			• Buat peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah • Integrasi aplikasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah
		Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	• Mengidentifikasi berbagai aplikasi program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat • Mengembangkan sebuah aplikasi umum yang memuat navigasi ke seluruh aplikasi program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi umum • Bimbingan teknis penerapan aplikasi umum ke seluruh pengguna aplikasi • Buat peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi umum • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi umum • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi umum

Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi			
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Analisa Kesenjangan
	<i>Meningkatnya kualitas Tata Kelola keuangan dan aset daerah</i>	<i>Program Pengelolaan keuangan daerah</i>	• Mengembangkan sebuah aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program pengelolaan keuangan daerah seperti pengeluaran dan pemasukan daerah, pengajuan anggaran, penganggaran, laporan keuangan, regulasi pengelolaan keuangan daerah, grafik pengeluaran dan pemasukan daerah secara periodik (setiap bulan, triwulan, semester, atau tahun), dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah • Bimbingan teknis penerapan aplikasi pengelolaan keuangan daerah ke seluruh pengguna aplikasi • Buat peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi pengelolaan keuangan daerah • Integrasi aplikasi pengelolaan keuangan daerah dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pengelolaan keuangan daerah • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah
		<i>Program penyelenggaraan pengawasan</i>	
		<i>Program pengelolaan pendapatan daerah</i>	
	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</i>	<i>Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</i>	• Memperbarui aplikasi Sistem Informasi Layanan Publik Terintegrasi Secara Elektronik (SILPUSITRON) dan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (SIPAK) agar menjadi mutakhir

Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi			
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Analisa Kesenjangan
			• Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik • Bimbingan teknis penerapan aplikasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ke seluruh pengguna aplikasi • Buat peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik • Integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	• Mengembangkan sebuah aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan, bantuan biaya, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pemberdayaan masyarakat • Bimbingan teknis penerapan aplikasi pemberdayaan masyarakat ke seluruh pengguna aplikasi • Buat peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi pemberdayaan masyarakat

Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi			
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Analisa Kesenjangan
			• Integrasi aplikasi pemberdayaan masyarakat dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pemberdayaan masyarakat • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pemberdayaan masyarakat
		Program pendaftaran penduduk	• Mengembangkan sebuah aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program pendaftaran dan pencatatan sipil seperti data penduduk, data kelahiran, data kematian, data perkawinan dan perceraian, pengajuan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengangkatan anak, pengajuan perubahan berkas, dll
		Program Pencatatan Sipil	• Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pendaftaran dan pencatatan sipil • Bimbingan teknis penerapan aplikasi pendaftaran dan pencatatan sipil ke seluruh pengguna aplikasi • Buat peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi pendaftaran dan pencatatan sipil • Integrasi aplikasi pendaftaran dan pencatatan sipil dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pendaftaran dan pencatatan sipil • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pendaftaran dan pencatatan sipil

Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi			
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Analisa Kesenjangan
	Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Program aplikasi informatika	• Mengembangkan sebuah aplikasi untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program aplikasi informatika serta informasi dan komunikasi publik seperti berita mengenai kota Blitar terbaru, navigasi untuk menuju ke website Kota Blitar lainnya (beserta fungsi), pendataan aplikasi/ website yang dimiliki kota Blitar, dll • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi informatika serta informasi dan komunikasi publik • Bimbingan teknis penerapan aplikasi informatika serta informasi dan komunikasi publik • Buat peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi informatika serta informasi dan komunikasi publik • Integrasi aplikasi informatika serta informasi dan komunikasi publik dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi informatika serta informasi dan komunikasi publik • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi informatika serta informasi dan komunikasi publik
	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Program kepegawaian daerah	
			• Memperbarui aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Online dan Terintegrasi (SISKOI) untuk mengelola berbagai data yang berkaitan dengan program kepegawaian daerah seperti manajemen absensi/presensi, pengajuan administrasi kepegawaian, helpdesk, manajemen tugas, dll

Misi 5: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi			
Tujuan	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Analisa Kesenjangan
			• Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi kepegawaian daerah • Bimbingan teknis penerapan aplikasi kepegawaian daerah ke seluruh pengguna aplikasi • Buat peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi kepegawaian daerah • Integrasi aplikasi kepegawaian daerah dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi kepegawaian daerah • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi kepegawaian daerah
	Meningkatnya tata kearsipan pemerintahan daerah	Program Pengelolaan arsip	• Memperbarui aplikasi pembinaan perpustakaan (INLISLITE dan E-PERPUSTAKAAN) agar menjadi mutakhir. Khususnya website INLISLITE yang tidak bisa diakses saat pengguna ingin mencari buku-buku yang tersedia. • Pembuatan pedoman penggunaan aplikasi pembinaan perpustakaan • Bimbingan teknis penerapan aplikasi pembinaan perpustakaan • Pembuatan Peraturan Walikota tentang penerapan aplikasi pembinaan perpustakaan • Integrasi aplikasi pengembangan pembinaan perpustakaan dengan aplikasi lain yang terkait • Monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi pembinaan perpustakaan • Pembuatan SOP penggunaan aplikasi pembinaan perpustakaan

6.5. Rekomendasi Keberlangsungan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Pemkot Blitar

Untuk keberlangsungan kegiatan SPBE Pemerintah Kota Blitar, maka perlu pengidentifikasian kegiatan rencana strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Pemerintah Kota Blitar. Pengidentifikasian ini diperlukan untuk mengetahui kegiatan apa saja yang perlu dilanjutkan dan tidak perlu dilanjutkan. Pada tabel berikut ini dapat diketahui kegiatan-kegiatan yang perlu dilanjutkan pada rencana strategis Dinas Komunikasi informatika dan Persandian Pemerintah kota Blitar.

Tabel 6.107 Rekomendasi Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Pemerintah Kota Blitar

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah
1	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
		Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK	Program Aplikasi Informatika
			Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota
			Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
			Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah
			Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
			Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
			Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
			Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
			Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
		Meningkatnya Keamanan informasi	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
			Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
			Operasionalisasi Jaring komunikasi sandi Pememerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

• **6.5 Rekomendasi Dukungan Pemkot Blitar terhadap Rencana Strategis SPBE Nasional**

Untuk mendukung tercapainya program pembangunan Pemerintah Kota Blitar maka perlu diketahui capaian dan target yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Blitar. Pada tabel berikut ini dapat dilihat strategi yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Blitar untuk mendukung rencana strategis SPBE nasional beserta capaiannya.

Tabel 6.108 Rekomendasi Strategi Pemerintah Kota Blitar untuk Mendukung Rencana Strategis SPBE Nasional

No.	Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu	Capaian dan Target
A. Tata Kelola SPBE				
1	Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE	Evaluasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	2018-2025	Target 2025 : 3,20 Capaian 2022 : 2,81 (Baik)

No.	Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu	Capaian dan Target
B. Layanan SPBE				
2	Survei Penggunaan SPBE	Survei Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna	2019-2025	Target 2025 : Sangat Baik Capaian 2022 : Baik

BAB 7 – Peta Rencana SPBE

7.1 Peta Rencana Tata Kelola SPBE

Pada table berikut ini dapat dilihat Peta Rencana Tata Kelola SPBE.

Tabel 7.109 Peta Rencana Tata Kelola SPBE

No	Rencana Aksi	PIC	2023	2024	2025
A	Kebijakan				
1	Membuat dan legalisasi peraturan percepatan penerapan SPBE	PIC: Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
2	Sosialisasi kebijakan percepatan SPBE ke seluruh Perangkat Daerah	PIC: Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
3	Reviu dan evaluasi kebijakan percepatan SPBE	PIC: Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
4	Peningkatan kematangan kebijakan SPBE	PIC: Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
B	Arsitektur SPBE				
1	Sinkronisasi Arsitektur Data Pemkot Blitar - Satu Data Nasional	PIC : Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
2	Peningkatan kematangan penerapan arsitektur SPBE	PIC : Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
C	Peta Rencana SPBE				
1	Peningkatan kematangan penerapan peta rencana SPBE	PIC : Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
D	Manajemen Data				
1	Pemeliharaan dan Pengembangan Satu Data	PIC : Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
2	Peningkatan kematangan penerapan manajemen data	PIC : Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
E	Pembangunan Aplikasi SPBE				
1	Revisi Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE	PIC : Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			

No	Rencana Aksi	PIC	2023	2024	2025
2	Penyusunan Peraturan tentang Software/Free Open Source Software	PIC : Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
3	Penyusunan Peraturan tentang Standarisasi Aplikasi/Sistem Informasi TIK	PIC : Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
4	Peningkatan kematangan penerapan pembangunan aplikasi	PIC : Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
F	Layanan Pusat Data				
1	Pembuatan prosedur (SOP) terkait pengoperasian Layanan Pusat Data	PIC : Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
2	Integrasi Pusat Data Kota Blitar dengan Pusat Data Pemprov Jawa Timur	PIC : Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
3	Integrasi Pusat Data Kota Blitar dengan Pusat Data Nasional	PIC : Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
4	Penambahan kapasitas storage untuk Backup & Recovery pada Pusat Data	PIC : Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
5	Sertifikasi nasional/ internasional pusat data	PIC : Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
6	Peningkatan kematangan penerapan layanan pusat data	PIC : Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
G	Jaringan Intra				
1	Penyusunan Kebijakan Jaringan Intra Pemkot Blitar	PIC : Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
2	Pengukuran Quality of Service Jaringan Intra Pemkot Blitar	PIC : Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
3	Penyusunan Peraturan tentang Standarisasi Infrastruktur Jaringan TIK	PIC : Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			

No	Rencana Aksi	PIC	2023	2024	2025
4	Peningkatan kematangan penerapan layanan jaringan intra	PIC : Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
H	Keamanan Informasi				
1	Penyusunan Kebijakan Manajemen Keamanan Informs	PIC : Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
2	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi pada seluruh OPD	PIC : Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
3	Pembentukan Tim Keamanan Informasi Pemkot Blitar	PIC : Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
4	Peningkatan kematangan penerapan manajemen keamanan informasi	PIC : Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
I	Audit TIK				
1	Penyusunan Kebijakan Audit Teknologi Informasi	PIC : Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
2	Peningkatan kematangan audit infrastruktur	PIC : Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
3	Peningkatan kematangan audit aplikasi	PIC : Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
4	Peningkatan kematangan pelaksanaan audit keamanan	PIC : Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
J	Proses Bisnis				
1	Pembaruan Proses Bisnis SPBE untuk semua OPD. Penyusunan Proses Bisnis SPBE Pemkot Blitar harus mengacu ke Permenpan RB no 19 tahun 2019 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis	PIC: Seluruh Perangkat Daerah			
2	Peningkatan kematangan inovasi proses bisnis	PIC: Seluruh Perangkat Daerah			

No	Rencana Aksi	PIC	2023	2024	2025
K	Sistem Penghubung Layanan				
1	Penyusunan kebijakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (Government Service Bus)	PIC : Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
2	Peningkatan kematangan penerapan system penghubung layanan	PIC : Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
L	Evaluasi SPBE				
1	Evaluasi SPBE secara periodik	PIC : Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
M	Tim Koordinasi SPBE				
1	Evaluasi Kinerja Tim Koordinasi SPBE Penyusunan program kerja tahunan, pelaksanaan program dan evaluasi capaian kinerja	PIC : Tim Koordinasi SPBE			
2	Peningkatan kematangan penerapan Tim Koordinasi SPBE	PIC : Tim Koordinasi SPBE			
N	Tim Kolaborasi SPBE				
1	Forum Kolaborasi SPBE	PIC: Tim Kolaborasi SPBE			
2	Peningkatan kematangan penerapan Tim Kolaborasi SPBE	PIC: Tim Kolaborasi SPBE			

7.2 Peta Rencana Manajemen SPBE

• 7.2.1. Peta Rencana Manajemen Risiko

Pelaksanaan Manajemen Risiko meliputi penyusunan pedoman, pelaksanaan dan evaluasi manajemen risiko SPBE diseluruh OPD, hingga pembaharuan pedoman manajemen risiko SPBE. Pada table berikut dapat dilihat Peta Rencana Manajemen Risiko SPBE.

Tabel 7.110 Peta Rencana Manajemen Risiko

No	Rencana Aksi	PIC	2023	2024	2025
1	Pembentukan Komite Manajemen Risiko, Unit Pengelola Risiko (UPR) dan Unit	Dinas Komunikasi , Informatika			

No	Rencana Aksi	PIC	2023	2024	2025
	<i>Kepatuhan Resiko (UKR)</i>	<i>dan Statistik</i>			
2	<i>Proses legalitas Komite Manajemen Resiko, Unit Pengelola Resiko (UPR) dan Unit Kepatuhan Resiko (UKR)</i>	<i>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</i>			
3	<i>Penyusunan dokumen pedoman manajemen resiko SPBE yang berisi kerangka manajemen resiko SPBE, proses manajemen resiko SPBE, struktur manajemen resiko SPBE, budaya resiko SPBE</i>	<i>Komite Manajemen Resiko</i>			
4	<i>Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pelaksanaan manajemen resiko yang termuat dalam Renstra/ RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika</i>	<i>Komite Manajemen Resiko</i>			
5	<i>Penerapan manajemen resiko melalui komunikasi dan konsultasi melalui rapat berkala, rapat insidentil, FGD</i>	<i>Unit Pengelola Resiko</i>			
6	<i>Penetapan konteks resiko SPBE</i>	<i>Komite Manajemen Resiko</i>			
7	<i>Penyusunan identifikasi resiko SPBE dengan menguraikan jenis resiko, penyebab, kategori, dampak dan area dampak</i>	<i>Komite Manajemen Resiko</i>			
8	<i>Penyusunan analisis resiko SPBE dengan menguraikan kemungkinan dan</i>	<i>Unit Pengelola Resiko</i>			

No	Rencana Aksi	PIC	2023	2024	2025
	dampak yang ditimbulkan serta level resiko SPBE				
9	Penyusunan evaluasi resiko SPBE	Unit Kepatuhan Resiko			
10	Penyusunan rencana penanganan resiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan resiko, output, jadwal implementasi dan penanggung jawab	Unit Pengelola Resiko			
11	Penyusunan laporan manajemen resiko SPBE secara periodic dan insidentil	Unit Kepatuhan Resiko			
12	Penyusunan dan penetapan kebijakan manajemen resiko SPBE	Komite Manajemen Resiko			
13	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan dan supervise penerapan manajemen resiko	Unit Pengelola Resiko			
14	Monitoring pelaksanaan manajemen resiko	Unit Kepatuhan Resiko			
15	Review dan evaluasi pelaksanaan manajemen resiko	Unit Pengelola Resiko			
16	Perbaikan pedoman dan rencana kerja penerapan manajemen resiko	Komite Manajemen Resiko			

Ruang lingkup manajemen resiko:

- Perencanaan Manajemen Risiko dituangkan pada Peta Rencana SPBE
- Pemerintah Daerah menerapkan Manajemen Risiko SPBE berdasarkan pedoman Manajemen Risiko SPBE

- Proses manajemen risiko/muatan : identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE (Perpres 95/2018).
- Cakupan implementasi/penerapan : sebagian atau keseluruhan unit
- Pemerintah Daerah membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR), Unit Pengelola Risiko (UPR), serta Unit Kepatuhan Risiko (UKR)
- Pemerintah Daerah menerapkan Manajemen Risiko SPBE dengan memanfaatkan tool identifikasi risiko yang dapat ditemukan pada lampiran Pedoman Manajemen Risiko/PermenPANRB 5/2020
- Risiko SPBE yang telah diidentifikasi oleh Pemerintah Daerah menjadi dasar pengendalian keamanan informasi SPBE.
- Penerapan Manajemen Risiko SPBE harus direviu setiap tahun

• 7.2.2. Peta Rencana Manajemen Keamanan Informasi

Secara umum, Peta Rencanan Manajemen Keamanan Informasi memuat pelaksanaan penyusunan, penerapan, evaluasi, hingga pembaharuan pedoman Kemanan Informasi. Pada table berikut dapat dilihat peta rencana manajemen keamanan informasi SPBE.

Tabel 7.111 Peta Rencana Manajemen Keamanan Informasi

No	Rencana Aksi	PIC	2023	2024	2025
1	Penyusunan dokumen pedoman Keamanan Informasi	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
2	Penyusunan dokumen perencanaan keamanan informasi SPBE yang memuat program kerja berdasarkan kategori resiko SPBE dan target realisasinya	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
3	Pelaksanaan program kerja keamanan SPBE: - Menginventarisasi seluruh asset SPBE (data, informasi, aplikasi dan infrastruktur) - Pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap asset SPBE Mengukur tingkat keamanan resiko	Seluruh Perangkat Daerah			

No	Rencana Aksi	PIC	2023	2024	2025
	SPBE oleh unit kerja dengan berpedoman pada dokumen perencanaan keamanan SPBE yang disusun Dinas Komunikasi dan Informatika				
4	Penyusunan standar teknis dan SOP keamanan SPBE	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
5	Pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan dan supervisi keamanan	Seluruh Perangkat Daerah			
	Penerapan manajemen keamanan informasi	Seluruh Perangkat Daerah			
6	Review dan evaluasi pelaksanaan manajemen keamanan informasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
7	Perbaikan pedoman keamanan informasi, perencanaan keamanan informasi, standar teknis dan SOP	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			

Ruang lingkup manajemen keamanan informasi:

- Pedoman/standar Keamanan Informasi harus mengacu ke Perban BSSN no 4 tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi
- Perencanaan Manajemen Keamanan Informasi dituangkan pada Peta Rencana SPBE
- Seluruh muatan Manajemen Keamanan Informasi SPBE diterapkan sesuai pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE
- Risiko SPBE yang telah diidentifikasi dalam penerapan manajemen risiko SPBE, menjadi dasar pengendalian keamanan informasi (16 kategori, 7 dampak area)
- Proses Manajemen Keamanan Informasi : Penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi SPBE

- Prinsip prinsip : penjaminan kerahasiaan confidentiality), keutuhan integrity), ketersediaan availability), keaslian, dan kenirsangkalan (non repudiation) sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi SPBE.
 - Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
 - Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
 - Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
 - Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
 - Penjaminan kenirsangkalan non repudiation) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- Skala penerapan : penerapan melihat pada unit kerja/perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap data atau informasi vital
- Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE dengan konsultasi/koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- **7.2.3. Peta Rencana Manajemen Data**

Penyusunan kebijakan internal manajemen data, meliputi kegiatan penyusunan pedoman, penerapan, evaluasi, hingga pembaharuan. Pada table berikut dapat dilihat peta rencana manajemen data.

Tabel 7.112 Peta Rencana Manajemen Data

No	Rencana Aksi	PIC	2023	2024	2025
1	Menyusun strategi keamanan data	Tim Koordinasi SPBE			
2	Penyusunan dokumen pedoman manajemen data	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
3	Penyusunan arsitektur data	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
4	Perencanaan data induk dan data referensi	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
5	Pengumpulan data induk	wali data			

No	Rencana Aksi	PIC	2023	2024	2025
6	Pemeriksaan data induk dan data referensi	wali data			
7	Penyebarluasan data induk dan data referensi	wali data			
8	Review dan evaluasi arsitektur data, data induk dan data referensi	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
9	Pembaruan arsitektur data, data induk dan data referensi	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			

Ruang lingkup manajemen data:

- Perencanaan Manajemen Data dituangkan pada Peta Rencana SPBE IPPD
- Pelaksanaan seluruh proses Manajemen Data sudah mengikuti pedoman manajemen data SPBE (Permen PPN No.16 Tahun 2020)
- Muatan : arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data
- Proses : masing masing muatan memiliki proses manajemen mengikuti Permen PPN No.16/2020
- Kebijakan manajemen data harus meliputi manajemen arsitektur data, manajemen data induk, manajemen data referensi, manajemen basis data dan manajemen kualitas
- Skala Penerapan : sebagian (level 1 3) atau seluruh unit kerja (level 4 5).
- Manajemen arsitektur data : rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarluaskan komponen Arsitektur Data.
- Manajemen data induk dan manajemen data referensi : rangkaian proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan Data Referensi.
- Manajemen basis data : proses pengelolaan kumpulan data yang disimpan di Pusat Data
- Manajemen kualitas data : proses untuk memastikan data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.

• 7.2.4. Peta Rencana Manajemen Aset Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Pada table berikut dapat dilihat peta rencana manajemen aset.

Tabel 7.113 Peta Rencana Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

No	Rencana Aksi	PIC	2023	2024	2025
1	Pembuatan strategi pengelolaan aset TIK	Tim Koordinasi SPBE, serta Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah			
2	Menyusun pedoman manajemen aset yang memuat proses manajemen aset TIK yaitu: perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak	Tim Koordinasi SPBE, serta Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah			
3	Sosialisasi strategi pengelolaan aset TIK dan pedoman manajemen aset TIK ke seluruh Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik, serta Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah			
4	Penerapan manajemen aset TIK ke seluruh Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik, serta Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah			
5	Review dan evaluasi penerapan manajemen aset	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik, serta Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah			
6	Perbaikan strategi dan pedoman penerapan manajemen aset TIK	Tim Koordinasi SPBE, serta Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah			

Ruang lingkup penerapan manajemen asset:

- Perencanaan Manajemen Aset TIK dituangkan pada Peta Rencana SPBE
- Pelaksanaan Manajemen Aset TIK berdasarkan pedoman manajemen aset TIK SPBE
- Proses Manajemen Aset TIK : perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak
- Aset TIK mencakup perangkat lunak, perangkat keras, data dan informasi, infrastruktur, SDM, lisensi, data, SOP, outsource services, dan IT asset register.

• **7.2.5. Peta Rencana Manajemen Sumber Daya Manusia**

Pada table berikut dapat dilihat peta rencana manajemen SDM.

Tabel 7.114 Peta Rencana Manajemen Sumber Daya Manusia

No	Rencana Aksi	PIC	2023	2024	2025
1	Pembuatan strategi pengembangan SDM SPBE	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
2	Pembuatan pedoman manajemen SDM SPBE	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
3	Analisis jabatan dan Analisa beban kerja terhadap jabatan TIK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
4	Pembuatan peta jabatan TIK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan			

No	Rencana Aksi	PIC	2023	2024	2025
		Sumber Daya Manusia, serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
5	Rencana, penerapan, dan laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi jabatan TIK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
6	Analisis kebutuhan pelatihan bagi pejabat TIK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
7	Review dan evaluasi penerapan manajemen SDM TIK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
8	Perbaikan strategi dan pedoman manajemen SDM TIK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			

Ruang lingkup penerapan manajemen SDM:

- Perencanaan Manajemen SDM tertuang di dalam peta rencana SPBE
 - Manajemen SDM dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE
 - Proses Manajemen SDM : perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan SDM dalam SPBE
 - Muatan Kompetensi SDM : Proses Bisnis Pemerintahan, Arsitektur SPBE, Data dan Informasi, Keamanan SPBE, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE
 - Skala Penerapan : seluruh unit kerja/perangkat daerah
- **7.2.6. Peta Rencana Manajemen Pengetahuan**

Pada table berikut dapat dilihat peta rencana manajemen pengetahuan.

Tabel 7.115 Peta Rencana Manajemen Pengetahuan

No	Rencana Aksi	PIC	2023	2024	2025
1	Pembuatan rencana kerja penerapan manajemen pengetahuan	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
2	Pembuatan pedoman penerapan manajemen pengetahuan	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
3	Pembuatan aplikasi system manajemen pengetahuan	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
4	Pelatihan penggunaan aplikasi ke seluruh Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
5	Penerapan aplikasi system manajemen pengetahuan	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
6	Integrasi aplikasi system manajemen pengetahuan dengan aplikasi lain	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
7	Review dan evaluasi penerapan manajemen pengetahuan	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
8	Perbaikan rencana kerja dan pedoman manajemen pengetahuan	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			

Ruang lingkup manajemen pengetahuan:

- Perencanaan Manajemen Pengetahuan tertuang di dalam Peta Rencana SPBE
- Manajemen Pengetahuan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE
- Proses Manajemen Pengetahuan : pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE
- Muatan Manajemen Pengetahuan : Pengalaman dan pengetahuan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi SPBE
- Skala Penerapan : seluruh unit kerja; telah atau belum digunakannya sistem aplikasi manajemen pengetahuan.

• **7.2.7. Peta Rencana Manajemen Perubahan**

Pada table berikut dapat dilihat peta rencana manajemen perubahan.

Tabel 7.116 Peta Rencana Manajemen Pengetahuan

No	Rencana Aksi	PIC	2023	2024	2025
1	Pembuatan rencana kerja penerapan manajemen perubahan	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
2	Pembuatan pedoman penerapan manajemen perubahan	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
3	Sosialisasi rencana kerja dan pedoman penerapan manajemen perubahan ke semua Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
4	Penerapan manajemen perubahan seluruh Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
5	Review dan evaluasi penerapan manajemen perubahan	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
6	Perubahan rencana kerja dan pedoman penerapan manajemen perubahan	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			

Ruang lingkup manajemen perubahan:

- Perencanaan Manajemen Perubahan tertuang di dalam Peta Rencana Manajemen Perubahan SPBE.

- Manajemen Perubahan dilaksanakan berdasarkan Pedoman Manajemen Perubahan (KemenPANRB)
 - Proses Manajemen Perubahan: perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE
 - Skala Penerapan : seluruh unit kerja
 - IPPD membentuk struktur (ex officio) manajemen perubahan SPBE yang terdiri atas: Pimpinan Manajemen Perubahan (PMP), Komite Manajemen Perubahan (KMP), Unit Pelaksana Manajemen Perubahan (UPMP), serta Agen Perubahan SPBE (Agent of Change)
 - Pedoman Manajemen Perubahan SPBE harus meliputi Perubahan Aplikasi, Perubahan Perangkat Keras, Perubahan Perangkat Lunak, Perubahan Infrastruktur, Perubahan Proses Bisnis, Perubahan Lingkungan Organisasi, Perubahan Layanan, Perubahan Data, Perubahan Keamanan dan Perubahan Arsitektur.
- **7.2.8. Peta Rencana Manajemen Layanan SPBE**

Pada table berikut dapat dilihat Peta Rencana Manajemen Layanan.

Tabel 7.117 Peta Rencana Manajemen Layanan SPBE

No	Rencana Aksi	PIC	2023	2024	2025
1	Penyusunan SOP Pelaksanaan Manajemen Layanan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
2	Sosialisasi SOP dan Panduan Pelaksanaan Manajemen Layanan ke semua OPD	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
3	Penerapan Manajemen Layanan SPBE sesuai pedoman di semua OPD	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
4	Reviu dan evaluasi pelaksanaan manajemen layanan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
5	Perbaikan dokumen panduan pelaksanaan manajemen layanan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
6	Sertifikasi ISO 20000-1:2018 tentang Sistem Manajemen Layanan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			

Ruang lingkup penerapan manajemen layanan:

- Muatan Manajemen Layanan :
 - Aktivitas : Pelayanan pengguna (pengaduan, permintaan), pengoperasian layanan yang dapat melingkupi pengelolaan Aplikasi SPBE
 - Jenis : Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik
- Penyelenggaraan Manajemen Layanan dapat diwujudkan dengan membangun layanan berbasis elektronik (opsional) untuk menjalankan proses:
 - Pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna
 - Pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE
- Manajemen Layanan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE

7.3 Peta Rencana Layanan SPBE

Pada table berikut dapat dilihat Peta Rencana Layanan SPBE

Tabel 7.118 Peta Rencana Layanan SPBE

N o	Rencana Aksi	PIC	20 23	20 24	20 25
1	Pengembangan Sistem Informasi Eksekutif Terintegrasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
2	Penyediaan software berlisensi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
3	PenerapanSistem Penghubung Layanan untuk integrasi layanan SPBE	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
4	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
5	Sinkronisasi layanan e-planning, ebudgeting dan manajemen	Dinas Komunikasi,			

N o	Rencana Aksi	PIC	20 23	20 24	20 25
	<i>keuangan dengan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)</i>	<i>Informatika dan Statistik</i>			
6	<i>Integrasi Layanan Manajemen Kepegawaian dengan BKN dan Layanan Kinerja Pegawai</i>	<i>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</i>			
7	<i>Integrasi Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Layanan Manajemen Keuangan</i>	<i>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</i>			
8	<i>Penerapan Layanan Kearsipan Dinamis di semua OPD</i>	<i>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</i>			
9	<i>Integrasi Layanan Kearsipan Dinamis dengan Layanan Manajemen Kepegawaian, Manajemen</i>	<i>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</i>			
10	<i>Perencanaan dan Manajemen Keuangan</i>	<i>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, serta Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah</i>			
11	<i>Integrasi Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Layanan Pengadaan Barang/Jasa, Layanan Penganggaran dan Layanan Manajemen Keuangan</i>	<i>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</i>			
12	<i>Integrasi Layanan Pengawasan Internal dengan Layanan Penganggaran Berbasis Elektronik, Layanan Pengadaan Berbasis</i>	<i>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</i>			

No	Rencana Aksi	PIC	20 23	20 24	20 25
	<i>Elektronik, Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik, Layanan Keuangan Berbasis Elektronik</i>	<i>ka dan Statistik</i>			
1 3	<i>Penambahan fitur analitik data pada Layanan Pengaduan Layanan Publik</i>	<i>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</i>			
1 4	<i>Pengembangan Layanan Data Terbuka Kota Blitar</i>	<i>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</i>			
1 5	<i>Integrasi Layanan Data Terbuka Kota Blitar dengan Layanan Data Terbuka Pemprov Jawa Timur dan Layanan Data Terbuka Nasional</i>	<i>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</i>			
1 6	<i>Update Konten dan Penambahan Fitur Analitik Data Layanan Data Terbuka</i>	<i>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</i>			
1 7	<i>Penambahan fitur transaksi layanan JDIH dan integrasi dengan Layanan JDIH Nasional</i>	<i>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</i>			
1 8	<i>Pengembangan Portal Pusat Layanan SPBE</i>	<i>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, serta Perangkat Daerah</i>			
1 9	<i>Evaluasi Layanan secara periodik</i>	<i>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</i>			

<i>N o</i>	<i>Rencana Aksi</i>	<i>PIC</i>	<i>20 23</i>	<i>20 24</i>	<i>20 25</i>
20	<i>Pengembangan Big Data Analytics pada layanan SPBE</i>	<i>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</i>			
21	<i>Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan</i>	<i>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</i>			
22	<i>Pengembangan dan Update Portal Pusat Layanan SPBE</i>	<i>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</i>			
23	<i>Pembuatan pedoman proses dan dokumentasi pengembangan / penerapan aplikasi.</i>	<i>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</i>			
24	<i>Sosialisasi pedoman proses dan dokumentasi pengembangan/ penerapan aplikasi ke seluruh Perangkat Daerah</i>	<i>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, serta Perangkat Daerah</i>			
25	<i>Desain Integrasi antar layanan</i>	<i>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</i>			
26	<i>Pengembangan layanan yang terintegrasi</i>	<i>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</i>			
27	<i>Evaluasi layanan layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik yang dipergunakan</i>	<i>Perangkat Daerah</i>			

N o	Rencana Aksi	PIC	20 23	20 24	20 25
28	Evaluasi layanan public berbasis elektronik yang dipergunakan	Perangkat Daerah			
29	Perbaiki layanan pemerintah berbasis elektronik yang dikembangkan Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
30	Mengirimkan masukan ke Instansi Pusat yang mengembangkan aplikasi umum berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan	Perangkat daerah			
31	Menambahkan fitur layanan yang terintegrasi dengan aplikasi umum	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
32	Perbaiki layanan public berbasis elektronik yang dikembangkan Pemerintah Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			

7.4 Peta Rencana Aplikasi SPBE

Pada bagian ini akan dibahas mengenai peta rencana pengembangan Aplikasi Pemerintah Kota Blitar 2023-2025

Tabel 7.119 Peta Rencana Aplikasi SPBE

N o	Rencana Aksi	PIC	20 23	202 4	20 25
1	Dinas Kominfo membuat kebijakan internal SPBE yang mengatur tentang pembangunan aplikasi SPBE.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
2	Sosialisasi kebijakan pembangunan aplikasi SPBE ke seluruh Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
3	Proses penetapan kebijakan pembangunan aplikasi SPBE oleh Bupati	Dinas Komunikasi, Informatika			

No	Rencana Aksi	PIC	2023	2024	2025
		dan Statistik			
4	Review dan evaluasi kebijakan pembangunan aplikasi SPBE	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
5	Revisi kebijakan internal tentang pembangunan aplikasi SPBE	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
6	Upgrade dan Pembangunan aplikasi	Perangkat Daerah yang terkait			

Detil masing-masing aplikasi yang akan dikembangkan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.120 Daftar Aplikasi

Peta Jalan Aplikasi SPBE					
No	Nama Aplikasi	SKPD Pengguna	2023	2024	2025
1	Layanan dan Database Kesbangpol (E-LANDA)	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana			
2	CSR KOTA BLITAR	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
3	SMART SURVEY (Upgrade)	Bagian Pembangunan dan Layanan Pengadaan			
4	Sistem Informasi Manajemen Data Kesra (SIMDAKESRA) (Upgrade)	Bagian Perekonomian dan Kesra			
6	Sistem Informasi Kesehatan Hewan dan Peternakan (SIMASTAHANPENAK) (Upgrade)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
7	Blitar Kota Serba Ada (BLIKOSDA) (Upgrade)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			

Peta Jalan Aplikasi SPBE					
No	Nama Aplikasi	SKPD Pengguna	2023	2024	2025
8	Melaporkan Kelahiran dan Kematian (EMELATI) (Upgrade)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
9	Sistem Informasi Fasilitas Kesehatan dan Peta Sebar Penyakit (INFOKES) (Upgrade)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
10	Sistem Verifikasi Data Kependudukan (SIDAKU)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
11	Sistem Informasi Rawat Inap Elektronik (SIRINE)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
12	Sistem Informasi Dana Bergulir (SIDALIR) (Upgrade)	Dinas Koperasi dan UKM			
13	Visit Blitar	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
14	SLOGAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PB dan KB			
15	Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pendidikan Kota Blitar (PANSEL-DP)	Dinas Pendidikan			
17	PINTAR ONLINE SHOP	Dinas Perdagangan dan Perindustrian			
19	E-FORMASI	Badan Kepegawaian Daerah			
20	SIAP	Badan Kepegawaian Daerah			
21	Sistem Informasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SIBPHTB)	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah			
23	SISMIOP	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah			
24	Sistem Terintegrasi Informasi Jabatan (SISTER	Bagian Hukum dan Organisasi			

Peta Jalan Aplikasi SPBE					
No	Nama Aplikasi	SKPD Pengguna	2023	2024	2025
	MANJA)				
25	Perijinan Nakes	Dinas Kesehatan			
26	Aplikasi Pengelolaan Keuangan Sekolah Terpadu (upgrade)	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
27	E-RUSUNAWA	Dinas Perumahan Rakyat			
28	E-Klaim INA-CBG	RSUD Mardi Waluyo			

7.5 Peta Rencana Infrastruktur SPBE

Pada table berikut ini terlihat Peta Rencana Infrastruktur SPBE Pemerintah Kota Blitar 2023-2025.

Tabel 7.121 Peta Rencana Infrastruktur SPBE

No	Rencana Aksi	PIC	2023	2024	2025
1	Pembangunan Jaringan Fiber Optic untuk Backbone untuk semua OPD	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
2	Pemeliharaan, Pengamanan, Penambahan Jaringan Wired maupun Wireless	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
3	Peningkatan dan Pengaturan Alokasi Bandwidth Internet	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
4	Penyediaan Public Access Point (Free WiFi)	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
5	Peningkatan Kinerja Data Center	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
6	Pembangunan Hybrid Cloud Computing	Dinas Komunikasi ,			

No	Rencana Aksi	PIC	2023	2024	2025
		Informatika dan Statistik			
7	Pengembangan Disaster Recovery Center	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
8	Pembangunan Emergency Call Center	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
9	Pengembangan Network Operation Center	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
10	Penyediaan Helpdesk Service dan IT Support	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
11	Pengembangan Security Operation Center	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
12	Integrasi Data Center Pemkot Blitar ke Data Center Pemprov Jatim	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
13	Integrasi Data Center Pemkot Blitar ke Pusat Data Nasional	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
14	Penyediaan Network Monitoring Tools	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
15	Peningkatan kapasitas data center	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			
16	Peningkatan fasilitas komputasi perangkat daerah	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik			

<i>N o</i>	<i>Rencana Aksi</i>	<i>PIC</i>	<i>2 0 2 3</i>	<i>20 24</i>	<i>2 0 2 5</i>
17	<i>Pengadaan infrastruktur untuk mendukung RPJMD</i>	<i>Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik</i>			

7.6 Peta Rencana Keamanan SPBE

Pada table berikut ini terlihat rencana keamanan SPBE Pemerintah Kota Blitar 2023-2025.

Tabel 7.122 Peta Rencana Keamanan SPBE

<i>N o</i>	<i>Rencana Aksi</i>	<i>PIC</i>	<i>2 0 2 3</i>	<i>20 24</i>	<i>2 0 2 5</i>
1	<i>Pembuatan Dokumen Tata Kelola Keamanan Informasi</i>	<i>Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik</i>			
2	<i>Penyusunan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE</i>	<i>Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik</i>			
3	<i>Penyusunan standar teknis keamanan aplikasi berbasis web</i>	<i>Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik</i>			
4	<i>Penyusunan standar teknis keamanan aplikasi berbasis mobile</i>	<i>Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik</i>			
5	<i>Analisis Risiko Keamanan Informasi</i>	<i>Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik</i>			
6	<i>Sosialisasi Edukasi Kesadaran Keamanan Informasi</i>	<i>Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik</i>			
7	<i>Analisis Kerentanan Keamanan SPBE</i>	<i>Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik</i>			

No	Rencana Aksi	PIC	2023	2024	2025
8	Penetration Testing untuk uji coba keamanan server dan infrastruktur jaringan	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
9	Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
10	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Information System Security Professional (CISSP)	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
11	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Information System Auditor (CISA)	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
12	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Information Security Manager (CISM)	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
13	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Network Defender	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
14	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Ethical Hacker	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
15	Pelatihan dan Sertifikasi Systems Security Certified Practitioner (SSCP)	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
16	Pelatihan dan Sertifikasi Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK)	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
17	Sertifikasi ISO 27001:2013 Information Security Manajement System (ISMS)	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			

No	Rencana Aksi	PIC	2023	2024	2025
18	Keamanan Infrastruktur	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
19	Mitigasi DDoS	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
20	Enkripsi data	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
21	Inventarisasi dan konfigurasi	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
22	Pemantauan dan Pembuatan Log	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
23	Identity dan Pengendalian akses	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
24	Pengujian Penetrasi	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
25	Pengembangan kebijakan, prosedur keamanan dan pedoman keamanan sesuai standar BSSN	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
26	Pengamanan perangkat infrastruktur	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
27	Routing protocol security	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			

No	Rencana Aksi	PIC	2023	2024	2025
28	Routing filter	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
29	Encryption	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
30	Pemasangan Firewall Next Generation dengan teknologi UTM (Unified Treat Management) pada Back Bone Jaringan	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
31	Pengembangan keamanan aplikasi	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
32	Membangun pusat data secara terpusat	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
33	Manajemen keamanan data secara fisik pada data center	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
34	Evaluasi desain jaringan	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
35	Security audit dan maintenance	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
36	Pembangunan Disaster Recovery Center	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
37	Desain dan implementasi audit trail	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			

No	Rencana Aksi	PIC	2023	2024	2025
38	Monitoring bandwidth	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
39	Security audit dan maintenance	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
40	Review penerapan keamanan SPBE	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			

7.7 Peta Rencana Audit TIK

• 7.7.1. Peta Rencana Audit Infrastruktur SPBE;

Pada table berikut dapat dilihat peta rencana audit infrastruktur SPBE

Tabel 7.123 Peta Rencana Audit Infrastruktur SPBE

No	Rencana Aksi	PIC	2023	2024	2025
1	Pembentukan Tim Auditor TIK	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
2	Pelatihan dan Sertifikasi Audit Infrastruktur	Tim Auditor TIK Eksternal Tersertifikasi			
3	Pembuatan rencana kerja pelaksanaan audit infrastruktur SPBE	Tim Auditor TIK			
4	Pembuatan pedoman audit infrastruktur SPBE mengacu pada standar BRIN	Tim Auditor TIK			
5	Pelaksanaan audit ke seluruh aspek teknis yang dipersyaratkan dalam pedoman (Audit Infrastruktur secara mandiri)	Tim Auditor TIK			

No	Rencana Aksi	PIC	2023	2024	2025
6	Pelaksanaan audit ke seluruh aspek teknis yang dipersyaratkan dalam pedoman (Audit Infrastruktur eksternal (auditor eksternal tersertifikasi))	Tim Auditor TIK Eksternal Tersertifikasi			
7	Evaluasi hasil audit infrastruktur SPBE	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
8	Tindak lanjut hasil evaluasi	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			

Ruang lingkup audit infrastruktur SPBE:

- Perencanaan Audit TIK tertuang pada Peta Rencana SPBE
- Audit infrastruktur SPBE dilakukan sesuai dengan standar dan tata cara pelaksanaan audit infrastruktur SPBE (OR PPT BRIN)
- Muatan pemeriksaan Audit Infrastruktur TIK :
 - Penerapan tata kelola dan manajemen infrastruktur SPBE
 - Infrastruktur SPBE
 - Kinerja infrastruktur SPBE yang dihasilkan
 - Aspek infrastruktur SPBE lainnya
- Audit infrastruktur SPBE dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah , berkoordinasi dengan Kemenkominfo.

• 7.7.2. Peta Rencana Audit Aplikasi SPBE

Pada table berikut dapat dilihat peta rencana audit aplikasi SPBE

Tabel 7.124 Peta Rencana Audit Aplikasi SPBE

No	Rencana Aksi	PIC	2023	2024	2025
1	Pembentukan Tim Auditor TIK	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
2	Pelatihan dan Sertifikasi Audit Aplikasi	Tim Auditor TIK			

No	Rencana Aksi	PIC	2023	2024	2025
3	Pelatihan dan Sertifikasi Certified Information Systems Auditor (CISA)	Tim Auditor TIK Eksternal Tersertifikasi			
4	Pembuatan rencana kerja pelaksanaan audit aplikasi SPBE	Tim Auditor TIK			
5	Pembuatan pedoman audit aplikasi SPBE mengacu pada standar BRIN	Tim Auditor TIK			
6	Pelaksanaan audit ke seluruh aspek teknis yang dipersyaratkan dalam pedoman	Tim Auditor TIK			
7	Pelaksanaan audit Audit Aplikasi eksternal (auditor eksternal tersertifikasi)	Tim Auditor TIK Eksternal Tersertifikasi			
8	Evaluasi hasil audit aplikasi SPBE	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
9	Tindak lanjut hasil evaluasi	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			

Ruang lingkup audit aplikasi SPBE:

- Perencanaan Audit Aplikasi tertuang di dalam Peta Rencana SPBE
- Audit Aplikasi SPBE dilakukan sesuai dengan standar dan tata cara pelaksanaan audit aplikasi SPBE (OR PPT BRIN).
- Audit Aplikasi SPBE terdiri atas
 - Audit Aplikasi Umum
 - Audit Aplikasi Khusus
- Audit aplikasi umum: sebaiknya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun oleh OR PPT BRIN
- Audit aplikasi khusus: sebaiknya dilakukan 1 kali dalam 2 tahun oleh Pemerintah Daerah, dengan melakukan koordinasi dengan Kemenkominfo.

• **7.7.3. Peta Rencana Audit Keamanan SPBE.**

Pada table berikut dapat dilihat peta rencana audit keamanan SPBE

Tabel 7.125 Peta Rencana Audit Keamanan SPBE

No	Rencana Aksi	PIC	2023	2024	2025
1	Pembentukan Tim Auditor TIK	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
2	Pelatihan dan Sertifikasi Audit Keamanan	Tim Auditor TIK			
3	Pembuatan rencana kerja pelaksanaan audit keamanan SPBE	Tim Auditor TIK			
4	Pembuatan pedoman audit keamanan SPBE mengacu pada standar BSSN	Tim Auditor TIK			
5	Pelaksanaan audit ke seluruh aspek teknis yang dipersyaratkan dalam pedoman	Tim Auditor TIK			
6	Pelaksanaan Audit Keamanan eksternal (auditor eksternal tersertifikasi)	Tim Auditor TIK Eksternal Tersertifikasi			
7	Evaluasi hasil audit aplikasi SPBE	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			
8	Tindak lanjut hasil evaluasi	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik			

Ruang lingkup audit keamanan SPBE:

- Perencanaan Audit Keamanan SPBE tertuang di dalam Peta Rencana SPBE
- Audit Keamanan SPBE dilakukan sesuai dengan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE (BSSN).
- Audit Keamanan SPBE terdiri atas:

- Audit Keamanan Infrastruktur SPBE IPPD (dilaksanakan 1 kali dalam 2 tahun oleh Pemerintah Daerah, berkoordinasi dengan Kemenkominfo)
- Audit Keamanan Aplikasi umum (dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun oleh BSSN)
- Audit Keamanan Aplikasi khusus (dilaksanakan 1 kali dalam 2 tahun oleh Pemerintah Daerah, berkoordinasi dengan Kemenkominfo)

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008